



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 78 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2023 - 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan dengan baik, profesional, terarah dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk melaksanakan tujuan pembangunan berkelanjutan perlu dilakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dan penyelarasan dengan sasaran pembangunan daerah;
- c. bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam penyusunan kebijakan pembangunan diperlukan pengaturan mengenai tujuan pembangunan berkelanjutan di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 - 2027.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023 - 2027.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut RAD TPB adalah Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 – 2027.
2. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya RAD TPB sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk mendukung pencapaian RAD TPB sesuai dengan sasaran pembangunan daerah.
- (2) Tujuan disusunnya RAD TPB sebagai berikut:
 - a. meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan;
 - b. menjaga keberlanjutan kehidupan sosial;
 - c. menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif; dan
 - d. terlaksananya tata kelola yang mampu meningkatkan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Pasal 3

- (1) RAD TPB menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi rencana strategis dan rencana kerja Pemerintah Daerah dengan memprioritaskan kerjasama lintas sektor dalam upaya percepatan pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan di Daerah.
- (2) RAD TPB menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah untuk menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi tujuan pembangunan berkelanjutan dengan memprioritaskan kerjasama lintas sektor dalam upaya percepatan pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan di Daerah.

- (3) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. organisasi kemasyarakatan;
 - b. filantropi;
 - c. pelaku usaha;
 - d. akademisi; dan
 - e. pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 4

- (1) RAD TPB berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2023-2027.
- (2) RAD TPB memuat:
- a. tujuan;
 - b. indikator target dan strategi pencapaian; dan
 - c. dukungan program dan kegiatan Perangkat Daerah dan non Pemerintah Daerah.
- (3) RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pengkajian ulang dengan ketentuan:
- a. paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun; atau
 - b. jika diperlukan.

Pasal 5

- (1) RAD TPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Sistematika RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN
PELAKSANAAN TPB/SDGs
- BAB III : TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN
TPB/SDGs
- BAB IV : PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
- BAB V : PENUTUP
- LAMPIRAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan asistensi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB di Daerah.

- (2) Asistensi, pemantauan, dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengembangan infrastruktur wilayah dan pembiayaan pembangunan.

Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan RAD TPB bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 34); dan
- b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 86),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 November 2023

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 78

**RENCANA AKSI DAERAH
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2023 - 2027**



**PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

KATA PENGANTAR

Laporan Rencana Aksi Daerah (RAD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goal's* Tahun 2023 - 2027 diselesaikan dengan secara baik. Laporan RAD TPB/SDG's DIY Tahun 2023 - 2027 telah disesuaikan dengan amanat Perpres 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan.

Dalam proses penyusunan RAD TPB DIY 2023 -2027 telah berkolaborasi dengan berbagi lintas sektor baik Pemerintah Daerah, Pemerintah Vertical, Kabupaten/Kota dan Lembaga Non Pemerintah (Lembaga Masyarakat, Akademisi, Filantropi dan Dunia usaha). Kolaborasi lintas sector ini mendukung tujuan/Goal's 17 TPB/SDG's.

RAD TPB DIY tahun 2023 - 2027 telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) Daerah Istimewa Yogyakarta. Isu-isu pembangunan yang diangkat, juga merupakan tantangan nyata yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. RAD TPB DIY tahun 2023 -2027 merupakan RAD TPB DIY periode ke dua melanjutkan RAD TPB DIY tahun 2018 -2022 yang Pergub 86 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur DIY No 34 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018 - 2022.

Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goal's* Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 – 2027 merupakan wujud komitmen Pemerintah Daerah DIY mendukung TPB/SDG's. Semoga dapat memberi dampak kepada masyarakat baik untuk Pemerintah DIY dan Indonesia.

Yogyakarta, Januari 2023
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Hamengku Buwono X

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Keselarasan Sustainable Development Goals (SDGs) Terhadap Nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Rancangan Akhir Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 DIY serta rancangan awal RPJMD DIY Tahun 2022 – 2027	1
1.2. Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs.....	7
1.3. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs	9
1.4. Pembiayaan TPB/SDGs	11
1.5. Metodologi Penyusunan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs	12
1.6. Sistematisasi Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs.....	12
BAB II KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB/SDGs	14
2.1. Mengakhiri Bentuk Kemiskinan.....	14
A. Pengantar	14
B. Capaian	14
C. Tantangan.....	22
D. Best Practice.....	24
2.2. Menghilangkan Kelaparan	24
A. Pengantar	24
B. Capaian	25
C. Tantangan.....	32
D. Best Practice.....	33
2.3. Kehidupan yang Sehat.....	34
A. Pengantar	34
B. Capaian	35

C. Tantangan.....	35
D. Best Practice.....	43
2.4. Pendidikan Bermutu.....	44
A. Pengantar	44
B. Capaian	44
C. Tantangan.....	50
D. Best Practice.....	53
2.5. Mencapai Kesetaraan Gender.....	54
A. Pengantar	54
B. Capaian dan Tantangan	54
C. Best Practice.....	68
2.6. Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak	69
A. Pengantar	69
B. Capaian	69
C. Tantangan.....	74
D. Best Practice.....	75
2.7. Energi Bersih dan Terjangkau.....	76
A. Pengantar	76
B. Capaian	76
C. Best Practice.....	79
2.8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.....	80
A. Pengantar	80
B. Capaian	81
C. Best Practice.....	88
2.9. Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi.....	89
A. Pengantar	89
B. Capaian	90
2.10. Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah.....	92
A. Pengantar	92

B. Capaian	93
C. Best Practice.....	94
2.11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan	97
A. Pengantar	97
B. Capaian	98
C. Best Practice.....	102
2.12. Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan.....	103
A. Pengantar	103
B. Capaian	104
C. Tantangan.....	113
2.13. Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan.....	113
A. Pengantar	113
B. Capaian	114
C. Tantangan.....	119
D. Best Practice.....	121
2.14. Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan	121
A. Pengantar	121
B. Capaian	122
C. Best Practice.....	127
2.15. Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan.....	128
A. Pengantar	128
B. Capaian	129
C. Best Practice.....	131
2.16. Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	132
A. Pengantar	132
B. Capaian	133
C. Tantangan.....	143
D. Best Practice.....	145

2.17. Kemitraan untuk Pembangunan Berkelanjutan.....	148
A. Pengantar	148
B. Capaian	148
C. Tantangan.....	151
D. Best Practice.....	153
BAB III TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs.....	154
3.1. Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan	154
A. Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2023 – 2027	162
B. Kontribusi Aktor Nonpemerintah pada TPB/SDGs Tujuan 1	165
3.2. Tujuan 2 Tanpa Kelaparan.....	166
A. Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2023 – 2027	170
B. Kontribusi Aktor Nonpemerintah pada RAN TPB/SDGs Tujuan 2.....	171
3.3. Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera.....	171
A. Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2023 – 2027	177
B. Kontribusi Aktor Nonpemerintah pada RAD TPB/SDGs Tujuan 3.....	178
3.4. Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas	178
A. Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2023 – 2027	184
B. Kontribusi Aktor Nonpemerintah pada RAD TPB/SDGs Tujuan 4.....	185
3.5. Tujuan 5: Kesenjangan Gender	185
A. Arah kebijakan dan Strategi Tahun 2023 - 2027.....	190
B. Kontribusi Aktor Nonpemerintah pada RAD TPB/SDGs Tujuan 5.....	191
3.6. Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak.....	191
A. Arah Strategi Kebijakan Tahun 2023 - 2027	195
B. Kontribusi Aktor Nonpemerintah pada TPB/SDGs Tujuan 6.....	195
3.7. Tujuan 7: Energi Bersih dan Terjangkau	195
A. Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2023 – 2027	198
B. Kontribusi Aktor Nonpemerintah pada RAD TPB/SDGs Tujuan 7.....	198
3.8. Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	198
A. Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2023 - 2027	204
B. Kontribusi Aktor Nonpemerintah pada RAD TPB/SDGs Tujuan 8.....	206

3.9.	Tujuan 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur.....	206
	A. Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2023 – 2027	208
	B. Kontribusi Aktor Nonpemerintah pada RAD TPB/SDGs Tujuan 9.....	208
3.10.	Tujuan 10: Berkurangnya Kesenjangan	209
	A. Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2023 – 2027	212
	B. Kontribusi Aktor Nonpemerintah pada RAD TPB/SDGs Tujuan 10.....	212
3.11.	Tujuan 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan.....	213
	A. Arah Kebijakan dan Strategi 2023 - 2027	218
	B. Kontribusi Aktor Nonpemerintah pada RAD TPB/SDGs Tujuan 11	218
3.12.	Tujuan 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab.....	218
	A. Arah Kebijakan dan Strategi 2023 – 2027	222
	B. Kontribusi Aktor Nonpemerintah pada RAD TPB/SDGs Tujuan 12.....	222
3.13.	Tujuan 13: Penanganan Perubahan Iklim	222
	A. Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2023 -2027	227
	B. Kontribusi Aktor Nonpemerintah pada RAD TPB/SDGs Tujuan 13.....	229
3.14.	Tujuan 14: Ekosistem Laut.....	229
	A. Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2023 -2027	233
	B. Kontribusi Aktor Nonpemerintah pada RAD TPB/SDGs Tujuan 14.....	233
3.15.	Tujuan 15: Ekosistem Daratan.....	233
	A. Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2023 -2027	237
	B. Kontribusi Aktor Nonpemerintah pada RAD TPB/SDGs Tujuan 15.....	237
3.16.	Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh.....	237
	A. Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2023 - 2027	242
	B. Kontribusi Aktor Nonpemerintah pada RAD TPB/SDGs Tujuan 16.....	243
3.17.	Tujuan 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	244
	A. Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2023 - 2027	247
	B. Kontribusi Aktor Nonpemerintah pada RAD TPB/SDGs Tujuan 17	247
BAB IV PEMANTAUAN EVALUASI DAN PELAPORAN		248
4.1.	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	248
4.2.	Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD)	249

A.	Alur Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi RAD	250
B.	Alur Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Renaksi Pihak NonPemerintah 251	
4.3.	Jadwal Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian TPB/SDGS 2023-2027	253
4.4.	Publikasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi.....	253
A.	Bahan Pemantauan dan Evaluasi.....	253
B.	Alat Pemantauan dan Evaluasi.....	253
BAB V PENUTUP		261

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	bangunan jumlah target yang diarusutamakan dalam RPJMN 2020-2024 berdasarkan pilar TPB/SDGs	3
Tabel 1.2	Isu Pembangunan Berkelanjutan DIY dan Tujuan TPB	6
Tabel 2.1	Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2019 – 2021	15
Tabel 2.2	Perkembangan Tingkat Kemiskinan Nasional dan DIY Tahun 2018 – 2022	16
Tabel 2.3	Imunisasi Dasar Lengkap di DIY Tahun 2018 -2022	17
Tabel 2.4	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan di DIY Tahun 2017-2021	17
Tabel 2.5	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/ Kota di D.I. Yogyakarta, 2017 – 2021	18
Tabel 2.6	Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota	19
Tabel 2.7	Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota Jenis BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Dan Non PBI Tahun 2020 dan 2021	20
Tabel 2.8	Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/ Kota dan Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal di D.I. Yogyakarta, 2021	21
Tabel 2.9	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Menurut Kabupaten/Kota 2018-2020	25
Tabel 2.10	Prevalensi Stunting Pada Anak Balita Menurut Kabupaten/Kota 2018-2021	27
Tabel 2.11	Skor Pola Pangan Harapan Menurut Kabupaten/Kota 2018-2022	28
Tabel 2.12	Anemia Pada Ibu Hamil Menurut Kabupaten/Kota 2018-2022	29
Tabel 2.13	Penetapan Kawasan Pertanian Berkelanjutan Menurut Kabupaten/Kota 2018-2022	30
Tabel 2.14	Angka Kematian Ibu (AKI) Menurut Kabupaten/Kota 2018-2020	35
Tabel 2.15	Data Age Specific Fertility Rate (ASFR) Menurut Kabupaten/Kota 2018-2021	40
Tabel 2.16	Data Total Fertility Rate (TFR) Menurut Kabupaten/Kota 2018-2022	40

Tabel 2.17	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Kabupaten/Kota 2019-2020	45
Tabel 2.18	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Kabupaten/Kota 2020-2021	45
Tabel 2.19	Indikator mutu guru, 2016-2018	47
Tabel 2.20	Angka Partisipasi Kasar PAUD Menurut Kabupaten/Kota 2018-2022	50
Tabel 2.21	Ketersediaan Kerangka Hukum yang Mendorong, Menetapkan dan Memantau kesetaraan Gender dan Penghapusan Diskriminasi	55
Tabel 2.22	Ketercapaian Target 5.2 TPB DIY Tahun 2018-2022	56
Tabel 2.23	Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan Menurut Kabupaten/Kota 2018-2020	57
Tabel 2.24	Proporsi Kursi Legislatif Tingkat Pusat dan Daerah yang Diduduki Perempuan	60
Tabel 2.25	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota 2018-2022	71
Tabel 2.26	Penambahan Kapasitas Air Baku Menurut Kabupaten/Kota 2018-2022	71
Tabel 2.27	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota 2018-2022	72
Tabel 2.28	Kesesuaian Izin Pengusahaan Air Tanah dan Pertambangan Terhadap Rencana Tata Ruang Menurut Kabupaten/Kota 2018-2022	73
Tabel 2.29	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal 2018-2022	73
Tabel 2.30	Jumlah Kelompok Masyarakat Sekitar Sungai yang Berpartisipasi dalam Pengelolaan Sungai 2018-2022	74
Tabel 2.31	Persentase Rumah Tangga Berakses Listrik Menurut Kabupaten/Kota 2018-2022	76
Tabel 2.32	Penambahan Jumlah Rumah Tangga yang Menikmati Listrik Menurut Kabupaten/Kota 2018-2022	77
Tabel 2.33	Bangunan/gedung Pemerintah, Komersial, dan Industri yang Telah Diaudit Energi Menurut Kabupaten/Kota 2018-2022	77
Tabel 2.34	Penambahan Izin Ketenagalistrik Sesuai Ketentuan Menurut Kabupaten/Kota 2018-2022	78
Tabel 2.35	Penambahan Izin Ketenagalistrikan Menurut Kabupaten/Kota 2018-2022	79

Tabel 2.36	PDRB Perkapita DIY 2018-2021	82
Tabel 2.37	Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota 2018-2022	82
Tabel 2.38	Proporsi Tenaga Kerja Informal Sektor Non Pertanian DIY 2018-2021	83
Tabel 2.39	Proporsi Tenaga Kerja Formal Menurut Kabupaten/Kota 2018-2021	83
Tabel 2.40	Proporsi Tenaga Kerja Informal Sektor Pertanian Menurut Kabupaten/Kota 2018-2021	83
Tabel 2.41	Upah Rata-rata Per Bulan Menurut Kabupaten/Kota 2018-2021	84
Tabel 2.42	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota 2018-2022	84
Tabel 2.43	Persentase Setengah Menganggur DIY 2018-2022	85
Tabel 2.44	Persentase Usia Muda (15-24) yang Sedang Tidak Bersekolah. Bekerja atau Mengikuti Pelatihan DIY 2018-2021	85
Tabel 2.45	Nilai Sektor Akomodasi Makan dan Minum dalam PDRB Menurut Kabupaten/Kota 2018-2022	86
Tabel 2.46	Jumlah Wisatawan Mancanegara Menurut Kabupaten/Kota 2018-2021	86
Tabel 2.47	Jumlah Wisatawan Nusantara Menurut Kabupaten/Kota 2018-2021	87
Tabel 2.48	Rangkuman Indikator 10.1.	93
Tabel 2.49	Rangkuman Indikator 10.3.	93
Tabel 2.50	Indikator 10.4.	94
Tabel 2.51	Indikator 10.7.	95
Tabel 2.52	Indikator Target 11.4	101
Tabel 2.53	Indikator Target 11.5	101
Tabel 2.54	Indikator Target 11.b	102
Tabel 2.55	Indikator Target 13.2. TPB DIY 2018-2022	116
Tabel 2.56	Indikator Target 14.4. TPB DIY 2018 – 2021	118
Tabel 2.57	Indikator Target 14.5. TPB DIY 2018 – 2021	118
Tabel 2.58	Indikator Target 14.6. TPB DIY 2018 – 2021	118
Tabel 2.59	Indikator Target 14.b. TPB DIY 2018 – 2021	119
Tabel 2.60	Indikator Target 15.1. TPB DIY 2018-2022	130
Tabel 2.61	Indikator Target 15.2. TPB DIY 2018-2022	131
Tabel 2.62	Indikator Target 16.1. TPB DIY 2018 – 2021	133

Tabel 2.63	Ketercapaian Target 16.1. TPB DIY 2018-2022	139
Tabel 2.64	Ketercapaian Target 16.7. TPB DIY 2018-2022	142
Tabel 2.65	Ketercapaian Target 16.10. TPB DIY 2018-2022	142
Tabel 2.66	Nilai Ekspor DIY 2018-2022	149
Tabel 3.1	Target dan Indikator Sasaran Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan	156
Tabel 3.2	Indikator Lokal Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan	159
Tabel 3.3	Target dan Indikator Sasaran Tujuan 2 Tanpa Kelaparan	165
Tabel 3.4	Target dan Indikator Lokal Tujuan 2 Tanpa Kelaparan	166
Tabel 3.5	Target dan Indikator Sasaran Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera	170
Tabel 3.6	Target dan Indikator Lokal Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera	173
Tabel 3.7	Target dan Indikator Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas	177
Tabel 3.8	Target dan Indikator Lokal Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas	179
Tabel 3.9	Target dan Indikator Tujuan 5 Kesetaraan Gender	183
Tabel 3.10	Target dan Indikator Lokal Tujuan 5 Kesetaraan Gender	185
Tabel 3.11	Target dan Indikator Sasaran Tujuan 6 Akses Air Bersih dan Sanitasi	188
Tabel 3.12	Tabel 3.12 Target dan Indikator Lokal Tujuan 6 Akses Air Bersih dan Sanitasi	189
Tabel 3.13	Target dan Indikator Sasaran Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau	192
Tabel 3.14	Target dan Indikator Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	195
Tabel 3.15	Target dan Indikator Lokal Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	197
Tabel 3.16	Target dan Indikator Tujuan 9 Infrastruktur, Industri dan Inovasi	201
Tabel 3.17	Target dan Indikator Tujuan 10 Mengurangi Ketimpangan	204
Tabel 3.18	Target dan Indikator Lokal Tujuan 10 Mengurangi Ketimpangan	205
Tabel 3.19	Target dan Indikator Tujuan 11 Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan	208
Tabel 3.20	Target dan Indikator Lokal Tujuan 11 Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan	210
Tabel 3.21	Target dan Indikator Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan	213
Tabel 3.22	Target dan Indikator Lokal Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan	214

Tabel 3.23	Target dan Indikator Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim	218
Tabel 3.24	Target dan Indikator Tujuan 14 Menjaga Ekosistem Laut	223
Tabel 3.25	Target dan Indikator Lokal Tujuan 14 Menjaga Ekosistem Laut	224
Tabel 3.26	Target dan Indikator Tujuan 15 Menjaga Ekosistem Darat	227
Tabel 3.27	Target dan Indikator Lokal Tujuan 15 Menjaga Ekosistem Darat	228
Tabel 3.28	Target dan Indikator Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kuat	230
Tabel 3.29	Target dan Indikator Lokal Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kuat	233
Tabel 3.30	Target dan Indikator Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan	237
Tabel 4.1	Contoh isian Form 1 capaian kinerja pencapaian sasaran TPB/SDGs	246
Tabel 4.2	Simbol status pencapaian TPB/SDGs tahun berjalan	247
Tabel 4.3	Contoh isian Form 2b realisasi program, kegiatan dan anggaran program pemerintah daerah	247
Tabel 4.4	Contoh isian Form 3 realisasi program, kegiatan dan anggaran program nonpemerintah	249
Tabel 4.5	Contoh isian Form 4 realisasi Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan Pelaku Usaha	250
Tabel 4.6	Form 4 realisasi proyek/kegiatan/produk/jasa berkelanjutan pelaku usaha	251

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Visi Indonesia 2045 Menuju Indonesia Maju dan TPB/SDGs	1
Gambar 1.2	Sinergi Nawa Cita, RPJMN 2020-2024, dan TPB/SDGs	2
Gambar 1.3	TPB/SDGs sebagai xivnstrument utama transformasi ekonomi Indonesia	4
Gambar 1.4	Metodologi Penyusunan RAD TPB/SDGs DIY 2023 – 2027	12
Gambar 2.1	Perkembangan Kemiskinan DIY Maret 2013 – Maret 2022	14
Gambar 2.2	Indikator deprivasi tunggal kemiskinan multidimensi	16
Gambar 2.3	Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB per Kapita D.I. Yogyakarta, 2016 - 2021	81
Gambar 2.4	Tren Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK), 2015-2020	138
Gambar 3.1	Kerangka Kerja Logis Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	180
Gambar 4.1	Indikator TPB/SDGs berdasarkan pilar pembangunan	241
Gambar 4.2	Alur Pemantauan RAD	242
Gambar 4.3	Alur Pelaporan	243
Gambar 4.4	Jadwal Pemantauan dan Evaluasi	244

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Keselarasan Sustainable Development Goals (SDGs) Terhadap Nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Rancangan Akhir Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 DIY serta rancangan awal RPJMD DIY Tahun 2022 – 2027.

Agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan penjabaran operasional dari Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang disusun berdasarkan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. RPJMN 2020-2024 juga merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) memberikan landasan kokoh dan merupakan instrumen utama untuk mewujudkan transformasi ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.



Gambar 1.1

Visi Indonesia 2045 Menuju Indonesia Maju dan TPB/SDGs

RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 telah mengarusutamakan SDGs. Target-target dari 17 goals beserta indikatornya terefleksikan dalam agenda pembangunan nasional. Sinergi Nawacita, 7 (tujuh) agenda pembangunan RPJMN, dan TPB/SDGs dapat dilihat pada Gambar 1.2.



Gambar 1.2

Sinergi Nawa Cita, RPJMN 2020-2024, dan TPB/SDGs

Pengarusutamaan target-target TPB/SDGs dalam RPJMN berperan dalam upaya melokalkan pelaksanaan TPB/SDGs sampai dengan tingkat daerah. Dalam RPJMN 2020-2024, sebanyak 124 dari total 169 target TPB/SDGs telah diarusutamakan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional. Jumlah ini meningkat dibandingkan target yang diarusutamakan dalam RPJMN 2015-2019 sebanyak 94 target. Dengan diarusutamakan target TPB/SDGs ke dalam RPJMN maka program dan kegiatan yang terkait pencapaian SDGs beserta alokasi anggarannya dielaborasi dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) setiap tahunnya. Selanjutnya, target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMN dan selaras dengan TPB/SDGs menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan nonpemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan, serta

monitoring dan evaluasi seluruh program dan kegiatan yang mendukung pencapaian TPB/SDGs. Dengan demikian, target- target SDGs secara bertahap dapat dicapai hingga tahun 2030.

Tabel 1.1
Perkembangan jumlah target yang diarusutamakan dalam RPJMN 2020-2024
berdasarkan pilar TPB/SDGs

Pilar/Tujuan	Jumlah Target Global	Jumlah Target TPB/SDGs Yang Telah Diarusutamakan	
		RPJMN 2015-2019	RPJMN 2020-2024
Pilar Pembangunan Sosial (Tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5)	47	25	38
Pilar Pembangunan Ekonomi (Tujuan 7, 8, 9, 10, dan 17)	54	30	37
Pilar Pembangunan Lingkungan (Tujuan 6, 11, 12, 13, 14, dan 15)	56	31	38
Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola (Tujuan 16)	12	8	11
Total	169	94	124

Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak triwulan pertama tahun 2020 menyebabkan tekanan besar terhadap sistem kesehatan, perekonomian, dan kondisi sosial masyarakat. Pandemi juga berdampak pada berbagai kemajuan pencapaian sasaran dan target TPB/SDGs. Kondisi ini mendorong Pemerintah melakukan orientasi baru untuk dapat mempercepat pemulihan ekonomi dan mengejar gap sasaran RPJMN termasuk di dalamnya target-target TPB/SDGs, serta agar visi Indonesia Maju dapat dicapai tepat waktu.

Untuk memastikan pemulihan yang berkelanjutan dan berketahanan, Pemerintah menyiapkan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dengan mengusung prinsip keselarasan green recovery dan green economy yang inklusif dan berkelanjutan. Berdasarkan TPB/SDGs, pemerintah menyusun enam strategi besar redesain transformasi ekonomi Indonesia pasca COVID-19 sebagai "game changer" menuju Indonesia Maju di tahun 2045 (Gambar 1.3).

TRANSFORMASI EKONOMI INDONESIA YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN DENGAN TPB/SDGs SEBAGAI “INSTRUMEN UTAMA”

6 Strategi Besar Transformasi Ekonomi Indonesia - “Build Forward Better”: Dengan SDGs sebagai Instrumen Utama



Disertai perbaikan *enabling environment*: Reformasi Birokrasi, Reformasi Fiskal, dan Reformasi Sektor Keuangan

Gambar 1.3

TPB/SDGs sebagai instrumen utama transformasi ekonomi Indonesia

RPJMD DIY 2022 - 2027 pada tahun 2022 telah mencapai tahap rancangan awal dan di tahun 2023 ditetapkan. Visi dan misi Gubernur DIY untuk masa jabatan 2022 – 2027 diantaranya sebagai berikut:

Visi Gubernur DIY 2022 – 2027 adalah: Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Dengan rumusan Visi sebagaimana diutarakan di atas, maka dapat dirumuskan empat (4) misi yang pada prinsipnya merupakan pernyataan usaha atau apa-apa yang harus dikerjakan agar Visi yang diharapkan dapat terwujud. Dari visi Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi, terdapat empat Misi yang dapat dirumuskan yakni:

1. Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan;
2. Memberdayakan Kawasan Selatan dengan mengoptimalkan dukungan

- infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan /pengelolaan sumber daya setempat;
3. Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemanfaatan kemajuan teknologi informasi;
 4. Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik.

Penyusunan RPJMD DIY 2022 – 2027 telah diselaraskan dengan RAD SDG's DIY melalui Telaah SDG's dan Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). RAD SDG's DIY 2023 -2027 mendasarkan pada RAN 2021 – 2024 dan kajian Naskah Akademik SDG's DIY yang disusun oleh Sekretariat Daerah DIY melalui Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan yang diantaranya mengkaji mengenai capaian SDG's DIY 2018 -2022, analisa kebijakan Pemda DIY di periode RPJMD 2017 -2022, analisa sektoral terhadap seluruh tujuan SDG's DIY dan rekomendasi tujuan dan indikator SDG's yang digunakan pada periode 2023 - 2027.

Pemda DIY selama ini telah mendukung pelaksanaan MDGs yang selanjutnya berevolusi menjadi SDGs. Regulasi telah disusun untuk mengatur Rencana Aksi Daerah SDGs dengan Peraturan Gubernur Nomor 34 tahun 2018 (Pergub DIY No. 34 Tahun 2018) tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2022 yang kemudian diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 86 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2022 yang disetiap tahunnya disertai dengan Keputusan Gubernur DIY tentang Tim Pemantauan dan Evaluasi SDG's dengan hasil kerja laporan monev SDG's DIY setiap tahun dari periode tahun 2018 sampai tahun 2022. Selanjutnya disusun pula Keputusan Gubernur DIY Nomor 331/TIM/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2023-2027.

Rencana Aksi Daerah ini disusun dengan partisipasi dari segenap OPD Pemerintah Daerah DIY, Instansi Vertikal dan perwakilan dari beberapa lembaga non pemerintah, akademisi dan filantropi yang kemudian juga terlibat aktif dalam Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah SDGs sampai hari ini. Ciri dari

Rencana Aksi Daerah SDGs DIY adalah Partisipatif, Koordinatif, Kolaboratif, dan Selaras dengan Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan oleh segenap Organisasi Pemerintah Daerah dan lembaga, sehingga untuk unsur pemerintah akuntabilitasnya menjadi jelas dan terukur, sedangkan di unsur nonpemerintah memiliki penyelarasan yang efektif dengan visi misi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan cara ini, pelaksanaan SDGs di DIY menjadi selaras dan kolaboratif antar semua unsur, dan selanjutnya dengan akuntabilitas yang baik akan memacu kualitas pelaksanaan yang efektif dan efisien.

Pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan dilakukan selaras dengan rencana pembangunan daerah di DIY. Dengan keselarasan tersebut maka terjadi hubungan yang saling mendukung dan melengkapi satu dengan lainnya. Keselarasan juga mengarahkan agar fokus pada berbagai isu prioritas yang akan diselesaikan. Isu strategis pembangunan berkelanjutan DIY sejalan dengan muatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), hal ini dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 1.2.

Isu Pembangunan Berkelanjutan DIY dan Tujuan TPB

No	Isu Pembangunan Berkelanjutan DIY	Tujuan TPB
1	Pencemaran, kerusakan lingkungan hidup dan risiko bencana	Air bersih dan sanitasi layak (tujuan 6) Kota dan permukiman berkelanjutan (tujuan 11) Penanganan perubahan iklim (tujuan 13) Ekosistem Lautan (tujuan 14) Ekosistem Daratan (tujuan 15)
2	Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang dan tingginya alih fungsi lahan pertanian	Tanpa Kelaparan (tujuan 2) Kota dan Permukiman berkelanjutan (tujuan 11)
3	Masih tingginya ketimpangan wilayah	Pekerjaan Layak dan pertumbuhan ekonomi (tujuan 8) Berkurangnya Kesenjangan (tujuan 10)
4	Penyediaan infrastruktur di kawasan pesisir selatan belum optimal	Industri, Inovasi dan Infrastruktur (tujuan 9)
5	Angka kemiskinan masih tinggi	Tanpa Kemiskinan (tujuan 1) Berkurangnya Kesenjangan (tujuan 10)

No	Isu Pembangunan Berkelanjutan DIY	Tujuan TPB
6	Belum optimalnya implementasi Pendidikan Karakter dan Pendidikan Vokasi dalam rangka meningkatkan pemerataan akses pendidikan dan kualitas sumber daya manusia	Pendidikan Berkualitas (Tujuan 4)
7	Belum optimalnya pelestarian Budaya Baik Benda Maupun Tak Benda dalam mengantisipasi dinamika perubahan.	Kota dan Permukiman Berkelanjutan (Tujuan 11)
8	Belum optimalnya implementasi Tata Kelola pemerintahan (Good Governance) pada semua lini pemerintahan	Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang Tangguh (Tujuan 16)
9	Pertumbuhan Ekonomi yang Belum Inklusif	Energi bersih dan terjangkau (Tujuan 7) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan ekonomi (Tujuan 8) Industri, Inovasi dan Infrastruktur (Tujuan 9) Berkurangnya Kesenjangan (Tujuan 10)
10	Belum optimalnya ratifikasi Kebijakan Internasional Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja PBB	Kemitraan untuk mencapai tujuan (Tujuan 17)

1.2. Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs

Memasuki Decade of Action pencapaian Agenda 2030, komitmen pencapaian TPB/SDGs semakin kuat melibatkan para pihak, tidak hanya pemerintah tetapi juga nonpemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah hingga desa. Kepemilikan bersama yang tumbuh semakin kuat ini merupakan hasil dari penerapan prinsip inklusif, partisipatif, dan transparan dalam pelaksanaan TPB/SDGs selama ini. Berbagai pendekatan dan instrumen kebijakan yang dikembangkan selama lima tahun terakhir menjadi acuan pengarusutamaan

TPB/SDGs dalam dokumen perencanaan pembangunan dan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan baik pemerintah maupun nonpemerintah. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, telah disusun Peta Jalan TPB/SDGs 2030, Metadata Indikator TPB/SDGs yang telah diterbitkan dalam dua edisi, Rencana Aksi Nasional (RAN), laporan tahunan, dan laporan kepada PBB yang disampaikan melalui Voluntary National Review (VNR).

Keterlibatan pemangku kepentingan nonpemerintah diwujudkan melalui pembentukan SDGs Center/Network/Hub yang saat ini terdapat di 25 Perguruan Tinggi di tingkat berbagai daerah. Di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah terdapat 4 Perguruan Tinggi yang memiliki SDG's Center yaitu UGM, Adma Jaya, UNY dan UMY. Peran filantropi dan pelaku usaha juga meningkat ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah asosiasi serta dalam program dan kegiatan yang berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, semakin banyak perusahaan yang menyampaikan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) untuk menunjukkan kontribusinya dalam pelaksanaan TPB/SDGs Indonesia. Upaya ini juga diikuti juga oleh filantropi. Selanjutnya, melalui Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, program-program TJSL BUMN dilaksanakan berdasarkan empat pilar utama TPB/SDGs yaitu sosial, lingkungan, ekonomi, serta hukum dan tata kelola. Pemda DIY sudah mempunyai Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP) dan dilibatkan dalam tematik pembangunan DIY dan merupakan bagian integral dalam pencapaian SDG's DIY.

Keterlibatan dan kontribusi organisasi kemasyarakatan juga berperan signifikan, melalui pelaksanaan berbagai program yang mampu menjangkau hingga ke masyarakat dan seluruh pelosok Indonesia. Keterlibatan dan tingginya komitmen pemangku kepentingan nonpemerintah dapat dilihat dari jumlah institusi yang telah menyampaikan rencana program dan kegiatannya pada RAD TPB/SDGs.

1.3. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs

Melaksanakan TPB/SDGs ibarat *buy one get two* yaitu melaksanakan agenda pembangunan nasional dan sekaligus memenuhi komitmen pembangunan dunia. Dalam penyusunan Rencana Aksi, prinsip-prinsip TPB/SDGs juga diterapkan. Prinsip pertama adalah *universality*, yaitu mendorong penerapan TPB/SDGs di seluruh wilayah Indonesia. Prinsip kedua adalah *integration*, yang mengandung makna terintegrasinya dan saling keterkaitan antara dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola. Prinsip ketiga adalah “*No One Left Behind*” atau “Tidak ada seorangpun yang Tertinggal”, di DIY disebut “Sedaya Dipun Gatosaken” yang berarti semua diperhatikan, prinsip ini menjamin bahwa pelaksanaan TPB/SDGs harus melibatkan semua pemangku kepentingan dan memberi manfaat bagi semua. Prinsip ini juga telah diterapkan dalam setiap tahapan/proses pelaksanaan TPB/SDGs di Indonesia.

Penerapan prinsip-prinsip di atas memastikan TPB/SDGs dilaksanakan secara inklusif melalui orkestrasi gerakan bersama pemerintah dan pemangku kepentingan non pemerintah. Sebagai salah satu perwujudan dari prinsip tersebut adalah penetapan Tim Koordinasi Nasional TPB/SDGs yang beranggotakan keempat platform partisipasi, yaitu: (1) Pemerintah dan Parlemen (baik nasional dan daerah), (2) Organisasi Kemasyarakatan, (3) Filantropi dan Pelaku Usaha, dan (4) Akademisi. Setiap pihak dan unsur dapat berpartisipasi dan berkontribusi baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Hal ini untuk memastikan prinsip-prinsip inklusif, partisipasi, dan transparansi dilaksanakan sehingga kepercayaan antarpihak tumbuh dan terjaga.

Dengan memperhatikan seluruh prinsip-prinsip pelaksanaan TPB/SDGs di atas, Indonesia berketetapan untuk menjadikan TPB/SDGs sebagai suatu “gerakan bersama” dalam mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Penyusunan RAD TPB/SDGs melibatkan sejauh mungkin seluruh platform yang tercermin pada Matriks Rencana Aksi.

TPB merupakan kesatuan antara dimensi pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan yang komprehensif serta saling terkait. Kemajuan pada satu dimensi pembangunan memerlukan keterlibatan aktif dari dimensi pembangunan lainnya. TPB juga merupakan aksi dan katalis global untuk kemitraan internasional dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. TPB menekankan pentingnya

pemenuhan hak asasi manusia dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaannya harus mampu memberi manfaat kepada semua orang, khususnya kelompok rentan dan disabilitas. Prinsip ini dikenal dengan istilah "No one left behind" atau "Tidak ada seorangpun yang Tertinggal". Untuk melaksanakan TPB, Indonesia menjalankan prinsip inklusif dengan melibatkan 4 platform partisipasi yang terdiri atas Pemerintah dan Parlemen, Akademisi dan Pakar, Filantropi dan Pelaku Usaha, Organisasi Masyarakat Sipil dan Media dengan fokus pada kelompok rentan dan kaum disabilitas, termasuk kelompok anak, perempuan dan pemuda. Setiap platform ini memiliki peran masing-masing, namun saling terkait.

Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki peran untuk menetapkan kebijakan dan peraturan, memformulasikan perencanaan dan alokasi anggaran, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi dan melaporkan hasil pencapaian. Sementara, fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah untuk mengawasi anggaran, pelaksanaan dan pemantauan TPB. Organisasi masyarakat sipil dan media berperan untuk mendiseminasikan dan melakukan advokasi tentang TPB, membangun kesadaran masyarakat, memfasilitasi program dan pelaksanaannya serta turut serta dalam pemantauan dan evaluasi. Filantropi dan pelaku usaha, berperan untuk melakukan advokasi di antara para pelaku usaha dan sektor bisnis, memfasilitasi dan melaksanakan program, meningkatkan kapasitas masyarakat, serta memberikan dukungan pendanaan. Peran serta para pakar dan akademisi berpijak pada fungsi utama pendidikan dan berdasar pada Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu mendidik, melakukan riset, dan melaksanakan pengabdian masyarakat.

TPB tidak hanya mencakup tujuan dan target, namun juga cara pelaksanaan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan meliputi kebijakan, pendanaan, teknologi dan peningkatan kapasitas, serta ketersediaan data untuk memastikan tercapainya semua tujuan. Disamping itu, sumber pembiayaan TPB tidak hanya bertumpu pada anggaran pemerintah, namun diperluas dengan sumber-sumber dari pihak swasta dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat dan sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan memperhatikan seluruh prinsip-prinsip pelaksanaan TPB di atas, DIY berketetapan untuk menjadikan TPB sebagai suatu "gerakan bersama" dalam mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Penyusunan RAD TPB ini juga telah melibatkan sejauh mungkin seluruh platform

yang tercermin pada Matriks RAD, baik yang akan dilaksanakan oleh Pemda maupun nonpemerintah.

1.4. Pembiayaan TPB/SDGs

TPB/SDGs tidak hanya mencakup cara pelaksanaan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, namun juga memerlukan pembiayaan dan investasi yang memadai. Kebutuhan pendanaan SDGs diperkirakan mengalami peningkatan yang signifikan dengan adanya pandemi COVID-19. Terdisrupsi target-target SDGs akibat pandemi menyebabkan celah pembiayaan untuk pelaksanaan TPB/SDGs semakin lebar. Sementara itu, penerimaan pajak dan sumber penerimaan lainnya mengalami penurunan. Namun demikian, Presiden RI menekankan meskipun ditempa dengan pandemi COVID-19, target TPB/SDGs Indonesia pada tahun 2030 tidak boleh diturunkan. Sehingga inovasi pembiayaan TPB/SDGs merupakan sebuah kebutuhan.

Strategi pendanaan TPB/SDGs tidak bisa hanya bertumpu pada anggaran pemerintah, namun diperluas pada sumber-sumber lain yang inovatif. Potensi pendanaan inovatif berkembang dari pelaku usaha, filantropi, potensi keuangan global (global finance), serta impact investment, dengan spektrum pendanaan beragam baik finansial maupun nonfinansial. Diperlukan sinergi dan integrasi yang dapat menghubungkan seluruh potensi pendanaan inovatif untuk pencapaian TPB/SDGs.

Sebagai wujud komitmen kuat dalam menjalankan TPB Pemda DIY mengupayakan semaksimal mungkin berbagai sumber pembiayaan untuk pendanaan pelaksanaan TPB, baik yang bersifat konvensional maupun berbagai skema yang bersifat inovatif (*innovative financing*). Sehubungan dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemda, dalam aspek pendanaan perlu dilakukan pengembangan mekanisme pembiayaan alternatif untuk pelaksanaan TPB di daerah. Sehingga pembiayaan tidak hanya mengandalkan dari dana pemerintah (APBN dan APBD), namun juga pembiayaan alternatif dapat berupa kerja sama dengan pihak swasta, filantropi, dan mitra pembangunan. Selanjutnya, kerjasama antara pemerintah dan swasta diwujudkan dalam skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Skema ini dikembangkan untuk mengatasi

keterbatasan anggaran pemerintah sebagai salah satu alternatif pembiayaan dalam upaya pencapaian pelaksanaan TPB.

1.5. Metodologi Penyusunan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs

Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs 2023-2027 disusun mengikuti periode RPD 2023-2026 dan juga sebagai tahap selanjutnya dari Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs periode 2018-2022. Sebagai koordinator pelaksana TPB/SDGs. Kementerian PPN/Bappenas melibatkan keempat platform partisipasi dalam penyusunan RAN SDGs yang dilakukan melalui proses sebagaimana dijelaskan pada Gambar 1.4 berikut.



Gambar 1.4

Metodologi Penyusunan RAD TPB/SDGs DIY 2023 – 2027

1.6. Sistematika Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs

Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs DIY terdiri atas lima bagian dan lampiran, sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan menjelaskan keselarasan TPB/SDGs dengan Nawacita dan RPJMN, serta komitmen DIY dalam melaksanakan TPB/SDGs. Bab

ini menjabarkan pula platform partisipasi dalam pelaksanaan TPB/SDGs di DIY sesuai dengan perannya masing-masing, pembiayaan TPB/SDGs, dan proses penyusunan RAD.

Bab kedua menjabarkan kondisi pencapaian, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi DIY untuk beberapa indikator utama dari setiap Tujuan. Bab ini menyajikan gambaran data dasar (baseline) tahun 2022 dan capaian yang menjadi tolok ukur penentuan target, program dan kegiatan untuk pencapaian TPB/SDGs hingga tahun 2027.

Bab ketiga menyajikan target dan arah kebijakan pada RPD 2022-2026 yang selaras dengan setiap Tujuan TPB/SDGs, yang diselaraskan dengan RPJMD DIY 2022 – 2027. Berdasarkan arah kebijakan ini, pemerintah menetapkan program-program pembangunan untuk setiap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang tertuang dalam dokumen perencanaan baik Rencana Strategis (Renstra) maupun Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RPD) setiap tahunnya. Bab ini juga menjelaskan garis besar dari program-program nonpemerintah yang secara lebih rinci terdapat dalam lampiran RAD ini.

Bab keempat menerangkan mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan, tanggung jawab masing-masing platform partisipasi, dan waktu pelaksanaan RAD TPB/SDGs 2023-2027. Bab ini berisi mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan bagi pemerintah dan nonpemerintah.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kaidah pelaksanaan TPB/SDGs, serta upaya dan proses yang dilakukan dalam penyusunan RAD. Bab ini juga menerangkan tentang kesempatan kaji ulang dari dokumen RAD TPB/SDGs khususnya untuk keterlibatan nonpemerintah yang tertuang pada program dan kegiatannya.

Dokumen RAD juga dilengkapi lampiran berupa matriks. Matriks 2b berisi program dan kegiatan Pemerintah Daerah, Matriks 3 berisi program/kegiatan nonpemerintah untuk Organisasi Masyarakat/CSO, Filantropi, dan Akademia; dan Matriks 4 berisi program/kegiatan nonpemerintah untuk Pelaku Usaha/Bisnis.

BAB II

KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB/SDGs

2.1. Mengakhiri Bentuk Kemiskinan

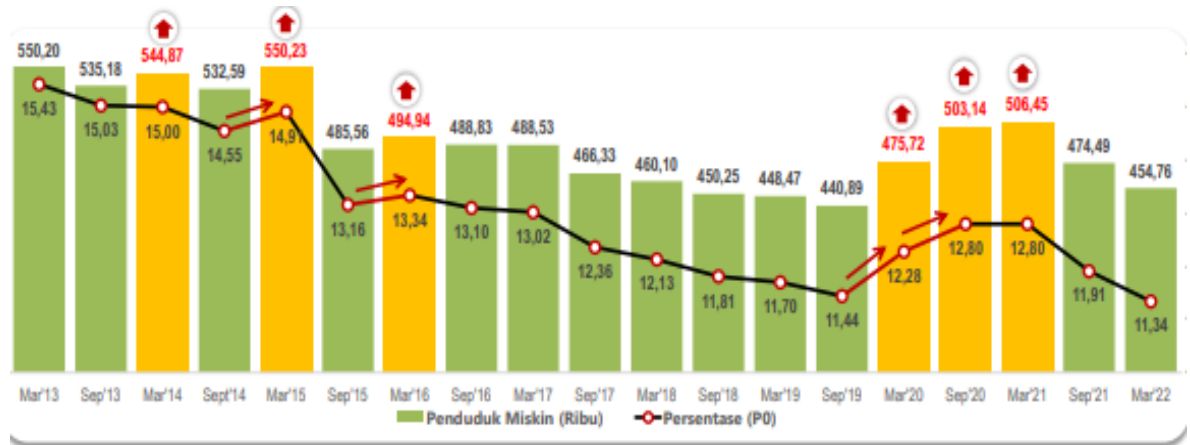
A. Pengantar

Kemiskinan masih menjadi tantangan terbesar di DIY. Pandemi COVID-19 telah meningkatkan angka kemiskinan sebesar 1,36% atau 26,25 ribu orang miskin baru (September 2019-September 2020). Presiden juga mengarahkan perhatian lebih besar untuk pengurangan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024.

B. Capaian

1. Tingkat Kemiskinan

Proporsi penduduk yang hidup di bawah Garis Kemiskinan di DIY mengalami penurunan setiap tahun. Penduduk miskin pada September 2019 tercatat sebesar 448,47 ribu orang atau 11,44% dari total penduduk, yang meningkat pada tahun 2020 menjadi 475,72 ribu orang atau 12,8% peningkatan diakibatkan oleh terjadinya pandemi COVID-19.



Gambar 2.1.

Perkembangan Kemiskinan DIY Maret 2013 – Maret 2022

Gambar 2.1 memperlihatkan penurunan jumlah penduduk miskin per semester selama periode 2013-2022. Pada Maret 2013 jumlah penduduk miskin di

DIY sebesar 550,20 orang (15,43%) dan terus menurun menjadi 440,89 ribu orang (11,44%) pada September 2019. Pandemi covid-19 mengakibatkan peningkatan tingkat kemiskinan menjadi 506,45 ribu orang (12,8%) pada September 2021 dan berangsur-angsur menurun menjadi 11,34% pada Maret 2022. Jumlah Penduduk Miskin pada Maret 2022 sebesar 454,76 ribu orang, turun 19,7 ribu orang terhadap September 2021 dan turun 51,7 ribu orang terhadap Maret 2021. Persentase Penduduk Miskin pada Maret 2022 sebesar 11,34 persen, turun 0,57 persen poin terhadap September 2021 dan turun 1,46 persen poin terhadap Maret 2021. Tingkat kemiskinan menurut Kabupaten/Kota selama periode tahun 2019-2021 menunjukkan ranking yang tetap, Tingkat kemiskinan tertinggi Kulonprogo, Gunungkidul, Bantul, Sleman dan Kota Yogyakarta. Pada tahun 2021 misalnya tingkat kemiskinan di Kabupaten Kulonprogo 18,38%, Gunungkidul 17,69%, Bantu 14,04%, Sleman 8,64% dan Kota Yogyakarta 7,64%.

Tabel 2.1.

Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2019 - 2021

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021
D.I. Yogyakarta	11.70	12.28	12.80
Kulonprogo	17.39	18.01	18.38
Bantul	12.92	13.50	14.04
Gunungkidul	16.61	17.07	17.69
Sleman	7.41	8.12	8.64
Yogyakarta	6.84	7.27	7.64

Sumber: *bps.go.id, **Yogyakarta.bps.go.id diakses 29 Agustus 2022

Tingkat kemiskinan di DIY lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional, Tabel 2.2. menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu tingkat kemiskinan di DIY selalu lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional.

Tabel 2.2.

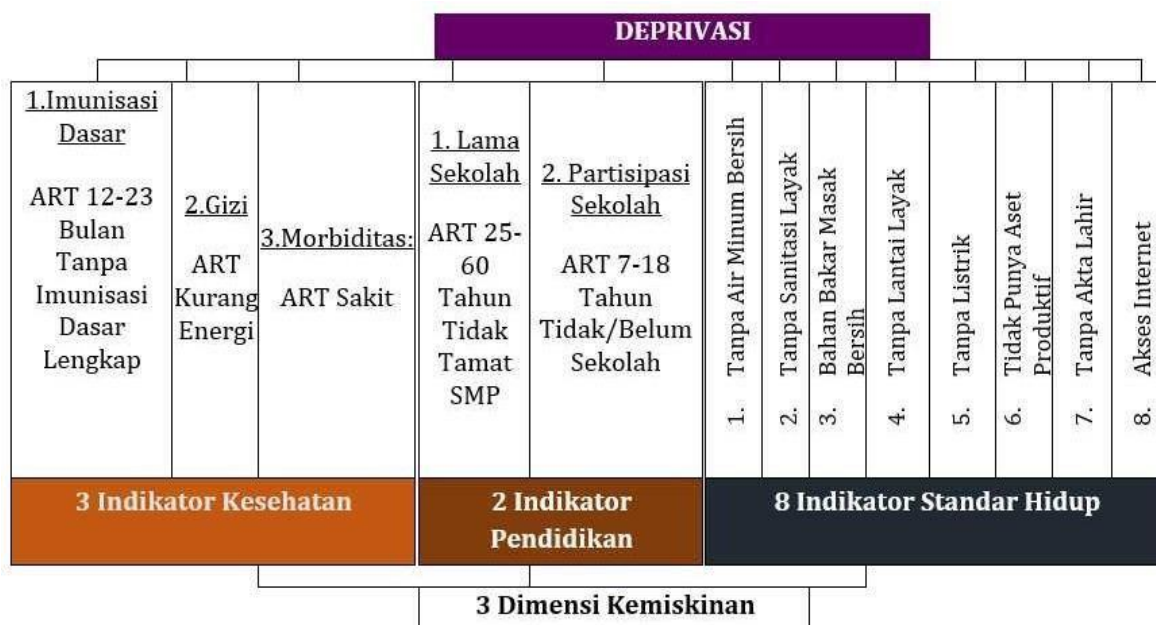
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Nasional dan DIY Tahun 2018 - 2022

	Maret 2018	Maret 2019	Maret 2020	Maret 2021	Maret 2022
Nasional*	9,66	9,41	9,78	10,14	9,54
DIY**	12,13	11,70	12,28	12,80	11,36

Sumber: *bps.go.id , **Yogyakarta.bps.go.id diakses 29 Agustus 2022

2. Pengurangan Deprivasi

Analisis kemiskinan multidimensi memperlihatkan aspek kemiskinan yang lebih luas dari kemiskinan yang diukur berdasarkan pendapatan. Tiga dimensi yang digunakan meliputi: Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, dan Standar Hidup yang diukur menggunakan 12 indikator. Setiap indikator akan ditampilkan untuk kelompok miskin dan rentan.



Gambar 2.2

Indikator deprivasi tunggal kemiskinan multidimensi

2.a. Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) anak usia 12-23 bulan

IDL dimaksudkan untuk menurunkan tingkat kematian anak dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Tabel 2.3. menunjukkan balita yang

mendapat IDL yang pada tahun 2018 mencapai 97,5% pada tahun 2019 balita yang memperoleh IDL telah mencapai 97,90%, pada tahun 2020 sebesar 96,71 dan pada tahun 2021 sebesar 97,25. Target RAN 2017-2019 untuk IDL adalah 80% sebagaimana UCI (Universal Coverage of Immunization). WHO (World Health Organization) tahun 2012 merekomendasikan rencana aksi global tahun 2011-2020 menetapkan cakupan imunisasi nasional minimal 90%, cakupan imunisasi di kabupaten 80%, eradikasi polio tahun 2020, eliminasi Campak dan Rubella serta introduksi vaksin baru.

Tabel 2.3

Imunisasi Dasar Lengkap di DIY Tahun 2018 -2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
IDL Balita (%)	97,50	97,90	96,71	97,25	97,25**

Sumber: LKPJ AMJ Gubernur DIY 2017-2021

2.b. Ketidakcukupan Energi (kalori), PoU: *Prevalence of Undernourishment*

Penduduk yang tidak memperoleh pangan/energi harian yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan normal dan tumbuh sehat disebut sebagai penduduk kurang energi. Prevalensi ketidakcukupan pangan penduduk DIY pada periode 2017-2021 menunjukkan angka yang meningkat dari 8,84% pada tahun 2017 menjadi 10,18% pada tahun 2021.

Tabel 2.4.

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di DIY Tahun 2017-2021

Nama Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	8.84	8.7	7.35	9.9	10.18

Sumber: LKPJ AMJ Gubernur DIY 2017-2021

Status kesehatan masyarakat dapat mencerminkan seberapa banyak penduduk dalam sebulan terakhir yang sakit yaitu mereka mempunyai keluhan kesehatan dan mengganggu kegiatan sehari-hari. Sakit yang dimaksud dalam definisi ini adalah sakit yang bersifat akut (mendadak) maupun sakit yang bersifat

kronis yang tidak selalu dapat mengancam jiwa.

Tabel 2.5.

Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/ Kota di D.I. Yogyakarta, 2017 – 2021

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Kulon Progo	39,85	37,85	39,14	36,35	21,64
Bantul	33,22	31,85	36,94	38,69	27,84
Gunung kidul	31,28	34,16	35,76	37,04	20,63
Sleman	31,45	38,82	31,95	39,17	44,33
Kota Yogyakarta	32,12	33,07	39,59	36,94	20,63
DIY	32,90	35,32	35,67	38,07	30,20

Sumber, BPS DIY, 2022

Hasil Susenas pada 2019 pada tabel berikut menunjukkan sekitar 32,90% masyarakat DIY yang menderita sakit selama sebulan yang lalu pada saat survei dilakukan. Sedangkan pada Tahun 2021 sebesar 30,20%

2.c. Persentase penduduk usia 25-60 tahun yang belum menamatkan SMP

Indikator ini mencerminkan penduduk usia sekolah SMP (13-15 tahun) yang tidak mendapatkan akses pada pendidikan SMP pada saat program wajib belajar 9 tahun diberlakukan pada tahun 1994. Mereka yang tidak mempunyai ijazah SMP adalah mereka yang dirugikan karena tidak memperoleh atau memanfaatkan kesempatan bersekolah di tingkat SMP sehingga kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri dengan melanjutkan pada pendidikan yang lebih tinggi menjadi hilang.

2.d. Partisipasi sekolah penduduk umur 7-18 tahun

Penduduk umur 7-24 tahun yang tidak berada dalam sistem pendidikan jumlahnya sangat rendah yang pada tahun 2020 mencapai 0,05%. Pada tahun 2021 angka tersebut meningkat menjadi 0,11% atau meningkat 0,06% poin dibandingkan tahun 2020. Menggunakan estimasi dengan cara proportionally adjusted terhadap penduduk 7-24 tahun, penduduk 7-18 tahun yang belum sekolah pada tahun 2020 diperkirakan mencapai 0,28% yang kemudian pada tahun 2021 meningkat menjadi

0,41% atau peningkatan sebesar 0,13% poin, peningkatan yang cukup berarti sehingga target zero percentage belum bisa dicapai (Susenas BPS).

Partisipasi sekolah penduduk umur 7-18 tahun dan 7-24 tahun di DIY, persentase penduduk belum sekolah pada usia 7-24 tahun pada tahun 2020 adalah 0,05% dan meningkat menjadi 0,41% pada tahun 2021, sedangkan persentase penduduk umur 7-18 tahun yang belum sekolah adalah 0,28% pada tahun 2020 dan menurun pada tahun 2021.

3. Cakupan Program Jaminan Sosial

Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di DIY pada tahun 2018 telah mencapai 91,57% dari seluruh penduduk, namun pada tahun 2021 persentasenya menurun menjadi 90,19%, pada September 2022 ada peningkatan yang signifikan sehingga kepesertaan jaminan sosial nasional menjadi 96,49%. Pada tahun 2018 persentase penduduk yang memiliki jaminan Kesehatan tertinggi di Kota Yogyakarta 95,43 sedangkan terendah adalah Kabupaten Bantul 87,33%, pada September 2022 tertinggi Kabupaten Kulon Progo 98,39% dan terendah Kabupaten Bantul 95,05%. Perkembangan cakupan peserta JKN pada periode 2018- 2022 adalah pada tabel berikut.

Tabel 2.6

Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota

Parameter	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kulon Progo	87,33	94,52	96,13	94,31	98,39
Bantul	94,40	88,08	88,05	85,64	95,05
Gunungkidul	88,39	91,47	89,93	92,67	95,42
Sleman	91,64	91,03	88,88	91,08	96,21
Kota Yogyakarta	95,43	100,56	96,38	87,96	98,11
DIY	91,57	92,13	91,17	90,19	96,49

Sumber: DIY Dalam Angka, 2022

Tabel 2.7
 Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan
 Menurut Kabupaten/Kota Jenis BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI)
 Dan Non PBI Tahun 2020 dan 2021

Kabupaten	Penerima Bantuan Iuran (PBI)		Non Penerima Bantuan Iuran (Non PBI)	
	2020	2021	2020	2021
Kulon Progo	58,73	63,68	22,32	17,37
Bantul	46,64	51,3	28,87	22,26
Gunungkidul	70,78	74,88	12,55	8,91
Sleman	28,69	31,65	47,76	42,82
Kota Yogyakarta	49,45	56,25	42,07	29,94
DIY	47,27	51,53	32,47	26,54

Sumber: DIY Dalam Angka

Berdasarkan jenis BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) persentase tertinggi adalah Kabupaten Gunungkidul dan terendah adalah Kabupaten Sleman, Kabupaten Sleman persentasenya di bawah persentase DIY pada tahun 2021 DIY 51,53% sedangkan Kabupaten Sleman 31,65%. Berdasarkan jenis BPJS Kesehatan Non Penerima Bantuan Iuran (Non PBI) persentase tertinggi adalah Kabupaten Sleman dan terendah adalah Kabupaten Gunungkidul, pada tahun 2020 Kabupaten/Kota dengan persentase kepemilikan BPJS Kesehatan Non PBI lebih tinggi dibanding DIY adalah Kabupaten Sleman 47,76% dan Kota Yogyakarta 42,07%.

4. Hak Terhadap Sumber Daya Ekonomi

Akses pada lahan dan perumahan yang terjamin (secure tenure) merupakan prasyarat pengurangan kemiskinan, karena penduduk dalam status miskin atau rawan miskin akan terbantu dengan akses tersebut. Pada tahun 2021 persentase dari rumahtangga yang tinggal di rumah milik sendiri 76,53%. Tinggal di rumah sewa/kontrak 13,98%, sedangkan lainnya 9,49%. Jika dilihat perbandingan antar kabupaten dan kota, persentase tertinggi adalah kabupaten Gunungkidul 95,58%

dan tertendah adalah Kota Yogyakarta 42,79%. Jadi di perkotaan rumahtangga yang tinggal di rumah sendiri relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan kabupaten lain.

Tabel 2.8.

Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/ Kota dan Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal di D.I. Yogyakarta, 2021

Kabupaten/Kota	Milik Sendiri	Kontrak/Sewa	Lainnya	Jumlah
Kulon Progo	94,06	0,63	5,30	100,00
Bantul	80,68	8,18	11,14	100,00
Gunung kidul	95,58	0,32	4,10	100,00
Sleman	70,09	23,41	6,49	100,00
Kota Yogyakarta	42,79	31,59	25,62	100,00
DIY	76,53	13,98	9,49	100,00

Sumber : BPS DIY, 2022

Membangun Ketahanan Masyarakat Miskin dan Rentan Untuk Mengurangi Kerentanan Terhadap Kejadian Ekstrem Terkait Iklim dan Guncangan Ekonomi, Sosial, Lingkungan, dan Bencana.

Banyaknya korban bencana tergantung dari jumlah bencana dan kekuatan dari bencana yang menimbulkan korban sebagai dampak dari bencana. Sebagai wilayah yang secara geografis berada dalam wilayah cincin api Pacific (Pacific ring of fire) risiko terhadap terjadinya bencana di Indonesia tidak dapat dihindari. Kerentanan (vulnerability) yang tinggi dari masyarakat, infrastruktur serta elemen-elemen di dalam kawasan yang berisiko bencana serta kapasitas yang rendah dari berbagai komponen di dalam masyarakat dalam mengantisipasi terjadinya bencana juga menyumbang pada besaran korban yang terdampak bencana.

Jumlah kerugian ekonomi sebagai dampak bencana juga perlu diketahui baik dalam nominal rupiah maupun persentasenya terhadap PDB. Kerugian terhadap infrastruktur produksi khususnya akan menghambat pemulihan pertumbuhan ekonomi di wilayah terdampak.

5. Pengeluaran Untuk Pemberantasan Kemiskinan

Pemberantasan kemiskinan telah menjadi komitmen global khususnya sejak

dicanangkan MDGs pada awal tahun 2000. Seberapa besar pemerintah mengalokasikan pembiayaan untuk program pemberantasan kemiskinan menjadi perhatian global karena tanggung jawab utama pengurangan kemiskinan berada pada tangan pemerintah

Pengeluaran Untuk Layanan Pokok (Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial) Pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial merupakan komponen penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pengeluaran pemerintah untuk perlindungan sosial meliputi jumlah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk perlindungan kesehatan melalui jaminan sosial (PBI) yang berasal dari APBN dan jumlah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk bantuan sosial (KIP, KPS, PKH, Rastra/Raskin) yang berasal dari APBN

C. Tantangan

Beberapa kendala yang perlu diatasi dalam penyelenggaraan program dan kegiatan terkait dengan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan adalah:

- Pengukuran kemiskinan di DIY pada bulan Maret 2022 menunjukkan bahwa penduduk miskin berjumlah 454,76 ribu jiwa atau 11,34% dari populasi. Pada Maret 2022 persentase penduduk miskin di perdesaan lebih banyak dibandingkan di perkotaan. Disparitas kemiskinan perkotaan dan perdesaan sebesar 3,10 persen poin. Persentase penduduk miskin periode Maret 2022 - September 2021 di perkotaan turun sebanyak 0,64 persen poin dan di perdesaan turun sebanyak 0,34 persen poin.
- Di antara lima kabupaten/kota di DIY, Kabupaten Kulonprogo adalah kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Sementara itu, Kota Yogyakarta memiliki tingkat kemiskinan terendah. Bila dilihat berdasarkan tipe daerah, kemiskinan di DIY didominasi oleh kemiskinan di perdesaan dimana pada bulan Maret 2022 persentase kemiskinan perdesaan (13,56 persen) lebih tinggi dibandingkan dengan kemiskinan perkotaan (10,56 persen). Dengan cukup dominannya sektor pertanian di sebagian wilayah DIY maka diperkirakan penurunan kinerja sektor pertanian menjadi salah satu penyebab kemiskinan di pedesaan. Terbatasnya kepemilikan lahan pertanian yang dimiliki petani menyebabkan ongkos produksi pertanian menjadi relatif besar sehingga tidak jarang petani mengalami kerugian, ditambah dengan perubahan iklim yang tidak menentu.

Selain itu, ketiadaan pengetahuan dan keterampilan diluar sektor pertanian menjadi penghambat untuk mencari sumber pendapatan lain diluar sektor pertanian. Sebagai tambahan adalah masih adanya keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar, yaitu infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan. Sementara itu, kemiskinan perkotaan juga perlu diperhatikan karena angkanya juga relatif tinggi, yakni mencapai sekitar 315 ribu jiwa. Kemiskinan di perkotaan erat kaitannya dengan kesempatan kerja atau ketersediaan lapangan kerja, kemampuan dan keterampilan tenaga kerja, serta kemampuan pengembangan usaha (kewirusahaan).

- Salah satu hambatan dalam pengentasan kemiskinan adalah keterpaduan data. Data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) merupakan sumber data utama dalam penanggulangan kemiskinan. Proses verifikasi dan validasi dalam DTKS sering mengalami kendala karena dinamika sosial ekonomi masyarakat yang berubah cepat. Selain itu, berdasarkan keterangan BPS, Dinsos, dan Bappeda DIY pada sesi FGD, data DTKS beberapa kali mengalami perubahan format. Kekurangakuratan data dapat menyebabkan pemberian bantuan dan perlindungan sosial kurang tepat sasaran. Selain itu juga, belum sinerginya kegiatan penanggulangan kemiskinan serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor antar Perangkat Daerah di DIY, antara provinsi dengan kabupaten/ kota, maupun dengan pihak non pemerintah. Perbaikan ke depan perlu dilakukan untuk memastikan keberhasilan, kebermanfaatan, dan keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan.
- Banyaknya penduduk yang hidup hampir miskin (near poor) atau sedikit di atas garis kemiskinan, sehingga jika terjadi gejolak yang menyebabkan kenaikan garis kemiskinan maka akan banyak penduduk yang jatuh miskin. Seringkali menimbulkan dilema mengenai kebijakan apa yang paling tepat untuk menangani kelompok penduduk ini, apakah pengentasan kemiskinan atau perlindungan sosial.
- Strategi meningkatkan pendapatan dibuat untuk penciptaan kesempatan kerja dan berusaha bagi kelompok penduduk miskin dan hampir miskin. Di sisi lain, pendekatan mengurangi beban pengeluaran penduduk kelompok yang sama telah dilakukan berupa subsidi atas pengeluaran kebutuhan pokok serta program

perlindungan sosial.

D. Best Practice

Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan kegiatan yang bersifat multi sektor, hasilnya langsung menyentuh salah satu kebutuhan dasar masyarakat, juga pendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi yang jika dilakukan secara benar akan memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Hal tersebut disebabkan karena pembangunan perumahan dapat mendorong pertumbuhan wilayah dan ekonomi daerah, mendukung pembangunan sosial budaya dan memberikan efek multiplier terhadap sektor lain seperti penciptaan lapangan kerja baik yang langsung maupun yang tidak langsung.

Pemerintah Daerah DIY memandang program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman diperlukan dalam bentuk fasilitasi dan bantuan stimulan perumahan swadaya agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan papan secara swadaya. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta memandang bahwa melalui kegiatan ini akan dapat membantu untuk pelaksanaan kegiatan program khususnya untuk peningkatan kualitas (PK) Rumah Tidak Layak Huni dan pembangunan baru (PB) Rumah Layak Huni di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2.2. Menghilangkan Kelaparan

A. Pengantar

Tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs) Tujuan 2 adalah menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Tujuan ini dicapai apabila setiap orang, khususnya warga miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan termasuk ibu hamil, bayi dan disabilitas memiliki akses atas pangan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun, untuk dapat hidup sehat, cerdas, aktif, dan produktif. Target menghilangkan kelaparan dan menjamin akses pangan bagi semua orang (2.1) dan target menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi (2.2) merupakan hasil dari pembangunan sistem pangan, perbaikan gizi masyarakat, dan pelayanan kesehatan

serta kesejahteraan masyarakat.

Dalam periode lima tahun terakhir (2018-2022) telah dilaporkan kemajuan dalam pencapaian sasaran dari beberapa indikator TPB/SDGs tujuan 2, namun ada juga beberapa indikator lainnya yang pencapaian sarannya memerlukan upaya lebih besar lagi. Tren capaian positif selama periode lima tahun tersebut terdisrupsi, karena terjadinya pandemi COVID-19 pada awal tahun 2020 yang melanda semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Pandemi berdampak pada pelambatan pertumbuhan bahkan resesi ekonomi yang menyebabkan penurunan daya beli masyarakat, serta pada akhirnya menurunkan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat. Selain itu, diberlakukannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak munculnya pandemi ini mengakibatkan terganggunya aktivitas ekonomi dan kinerja sistem pangan, dan terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, termasuk layanan pemantauan tumbuh kembang anak. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah mengupayakan perluasan jaring pengaman sosial (social safety net) berupa bantuan sosial, salah satunya untuk melindungi daya beli dan menjaga pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan masyarakat.

B. Capaian

1. Menghilangkan Kelaparan dan Menjamin Akses Pangan

1.a. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi pangan (PoU)

Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi (diukur dalam kalori) untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif. Data untuk menganalisis perkembangan PoU diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS berbagai tahun) yang diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

Tabel 2.9

Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Menurut Kabupaten/Kota
2018-2020

Parameter	Tahun		
	2018	2019	2020
Kulon Progo	12,83	10,40	13,29

Parameter	Tahun		
	2018	2019	2020
Bantul	10,08	7,14	9,38
Gunungkidul	12,02	11,73	14,52
Sleman	4,98	4,69	6,68
Kota Yogyakarta	5,88	4,30	8,30
DIY	8,70	7,35	9,90

Sumber: Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, BKP 2021

1.b. Prevalensi kerawanan pangan (FIES)

Prevalensi Food Insecurity Experience Scale (FIES) atau Skala Pengalaman Kerawanan Pangan menggambarkan ketidakmampuan rumah tangga atau individu dalam mengakses makanan yang dibutuhkan secara reguler. Angka ini juga menggambarkan besarnya kerawanan pangan sedang dan berat.

Tren positif ini salah satunya merupakan hasil dari respons cepat pemerintah memberikan bantuan sosial berupa transfer uang dan/atau pangan yang cukup masif kepada penduduk berpendapatan rendah dan yang kehilangan pekerjaan sementara sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Apabila bantuan pemerintah ini tidak ada atau terlambat, dampak sosial pandemi ini akan lebih buruk lagi (UNICEF, UNDP, Prospera, dan SMERU, 2021).

1.c. Dinamika Pencapaian Ketahanan Pangan

Membaiknya ketahanan pangan nasional di DIY periode 2018-2022, yang tercermin dari penurunan angka PoU dan prevalensi FIES sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan per kapita masyarakat, terjaganya kestabilan pasokan dan harga pangan. Hal terakhir ini didukung oleh upaya khusus pemerintah dalam peningkatan produksi pangan pokok dan penting, pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah serta masyarakat. Kemajuan tersebut terganggu atau terdisrupsi

pada tahun 2020 karena terjadinya pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia sejak awal tahun. Secara umum pandemi COVID-19 berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat utamanya kelompok penduduk yang bekerja sebagai buruh di sektor industri dan di sektor informal (Suryana et al 2020, Robins et al 2020).

Dengan situasi pandemi COVID-19 masih mempengaruhi dinamika kehidupan yang mempersulit pertumbuhan ekonomi, penciptaan kesempatan kerja, dan penerimaan pendapatan bagi kelompok berpendapatan rendah, berbagai bentuk bantuan atau perlindungan sosial masih tetap diperlukan. Pelaksanaan distribusi paket bantuan sosial perlu dipertajam dalam hal kelancaran dan kecepatan distribusi, ketepatan penerima sasaran, dan keutuhan paket bantuan.

Sektor pertanian yang mendominasi perekonomian perdesaan memiliki resiliensi atau ketangguhan yang cukup tinggi dalam menghadapi guncangan atau krisis yang diakibatkan oleh guncangan dari luar (external shock) seperti krisis ekonomi dan politik tahun 1997/1998, krisis moneter internasional tahun 2008 dan pandemi COVID-19 tahun 2020 (Suryana et al. 2020, Yusuf et al 2020). Pada awal masa pandemi, sektor pertanian dan sektor informal di perdesaan mampu menjadi katup pengaman menampung penduduk kota yang kehilangan pekerjaan kembali ke desa dan proses produksi pertanian tidak terpengaruh secara signifikan.

2. Memenuhi Kebutuhan Gizi

2.a. Prevalensi stunting pada anak balita

Data stunting pada anak di bawah usia lima tahun (balita) diperoleh dari

Tabel 2.10.

Prevalensi Stunting Pada Anak Balita Menurut Kabupaten/Kota 2018-2021

Parameter	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
DIY	21,41	21,04	19,88	17,30

Sumber: SSGI, 2022

2.b. Prevalensi wasting pada anak balita

Wasting adalah kondisi kurang gizi akut yang diukur berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) yang lebih rendah dibandingkan dengan standar World Health Organization (WHO). Sumber data untuk prevalensi wasting sama dengan untuk prevalensi stunting.

2.c. Kualitas Konsumsi Pangan

Kualitas konsumsi pangan diukur dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang dihitung oleh Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian dengan memanfaatkan data Susenas dari BPS. Skor ideal PPH adalah 100, yang menggambarkan komposisi kelompok pangan utama yang dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya untuk dapat hidup sehat, cerdas, aktif, dan produktif. Skor PPH ini dihitung berdasarkan angka kecukupan energi 2.000 kilo kalori/kapita/hari (BKP 2020).

Tabel 2.11.

Skor Pola Pangan Harapan Menurut Kabupaten/Kota 2018-2022

Parameter	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kulon Progo	77,3	92,2	94,7	92,2	90,9
Bantul	91,7	93,3	93,5	91,2	95,7
Gunungkidul	84,6	89,9	86,9	90,2	91,3
Sleman	95,1	94,0	93,8	94,5	96,6
Kota Yogyakarta	78,3	92,1	94,3	92,1	95,1
DIY	89,92	91,70	94,70	95,70	96,80

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2022

Peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih terbuka dan akses terhadap pasar pangan yang lebih baik di perkotaan menyebabkan kualitas pangan rumah tangga di perkotaan lebih baik dibandingkan di perdesaan.

2.d. Prevalensi Anemia pada Ibu Hamil

Anemia pada ibu hamil terjadi jika kadar hemoglobin darah di bawah standar normal sesuai umur kehamilan. Menurut WHO (2001) anemia berdampak negatif pada perkembangan kognitif dan motorik dan kapasitas kerja, dan di antara perempuan hamil, anemia defisiensi besi dikaitkan dengan hasil reproduksi yang merugikan, termasuk meningkatnya risiko kematian ibu, persalinan prematur, bayi dengan berat badan lahir rendah, dan penurunan simpanan zat besi untuk bayi, yang dapat menyebabkan gangguan perkembangan.

Anemia pada ibu hamil merupakan masalah gizi yang belum dapat dipecahkan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari besarnya prevalensi anemia dari waktu ke waktu.

Tabel 2.12.

Anemia Pada Ibu Hamil Menurut Kabupaten/Kota 2018-2022

Parameter	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
DIY	15,21	19,00	16,60	16,50	11,44

Sumber: Bappeda DIY, 2022

3. Produktivitas Tenaga Kerja Pertanian, Pendapatan Petani Skala Kecil, dan Sistem Produksi Pangan Berkelanjutan

3.a. Produktivitas tenaga kerja pertanian dan pendapatan petani skala kecil

Data dua indikator pada target 2.3 TPB/SDGs Tujuan 2 masih terbatas, hanya untuk tahun 2020, belum didisagregasi berdasarkan subsektor lingkup pertanian,

3.b. Nilai tambah pertanian per tenaga kerja

Data indikator nilai tambah pertanian per tenaga kerja (NTP/TKP) menurut subsektor belum tersedia (indikator 2.3.1.(a)). Data dari BPS yang tersedia baru untuk sektor pertanian secara keseluruhan.

3.c. Proporsi areal pertanian produktif dan berkelanjutan

Proporsi areal pertanian produktif dan berkelanjutan (sustainable) merupakan salah satu indikator TPB/SDGs tujuan 2 target 2.4. Pengukuran indikator 2.4.1 ini

mencakup tiga dimensi, terdiri dari 11 tema dan untuk setiap tema ditetapkan satu subindikator. Tiga dimensi berkelanjutan tersebut meliputi (i) dimensi ekonomi dengan tema produktivitas lahan, profitabilitas, dan ketahanan; (ii) dimensi lingkungan dengan tema kesuburan tanah, penggunaan air, risiko penggunaan pupuk, risiko penggunaan pestisida, dan keanekaragaman hayati; dan (iii) dimensi sosial meliputi pekerjaan yang layak, keamanan pangan, dan kepemilikan lahan.

3.d. Proporsi lahan pertanian pangan berkelanjutan

Indikator 2.4.1 (a) adalah proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Indikator ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Penetapannya dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan peraturan daerah (Perda). Mengingat sawah merupakan lahan produksi pangan pokok masyarakat Indonesia (utamanya padi) yang memiliki nilai sosial, ekonomi dan lingkungan, pada saat ini lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang dicatat Kementerian Pertanian adalah lahan baku sawah.

Tabel 2.13.

Penetapan Kawasan Pertanian Berkelanjutan Menurut Kabupaten/Kota 2018-2022

Parameter	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kulon Progo	5.029,00	5.002,83	5.002,83	5.002,83	5.002,83
Bantul	13.000,00	19.075,01	19.075,01	19.075,01	19.075,01
Gunungkidul	5.505,00	51.312,00	51.312,00	51.312,00	51.312,00
Sleman	12.377,59	18.482,03	18.482,03	18.482,03	18.482,03
Kota Yogyakarta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIY	35.911,59	104.905,76	104.905,76	104.905,76	104.905,76

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2022

4. Faktor Pendukung Pengembangan Sistem Pertanian Berkelanjutan

4.a. Pengelolaan Sumber Daya Genetik Tanaman Dan Hewan Untuk Pangan dan Pertanian

Indikator 2.5.1 adalah jumlah aksesori sumber daya genetik (SDG) tanaman

dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik untuk jangka menengah ataupun jangka panjang (SDG dikonservasi). Data yang tersedia hanya untuk SDG tanaman. Sejak lebih dari 15 tahun lalu Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan), Kementerian Pertanian sudah mengelola SDG tanaman untuk pangan dan pertanian baik di fasilitas konservasi ataupun di lapangan, termasuk membangun Bank Genetik Pertanian (Bank Gen) yang pengelolaannya dilakukan oleh Balai Besar Litbang Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian (BB Biogen), Balitbangtan.

Informasi dari BB Biogen (2021) menunjukkan hingga tahun 2015 data jumlah dan daftar koleksi SDG tanaman belum tersedia. Pada tahun 2019 dilaporkan jumlah koleksi SDG tanaman yang tersimpan dalam jangka menengah dan/atau jangka panjang sebanyak 10.900 aksesori yang terdiri dari 32 komoditas; sebanyak 8.400 aksesori dalam bentuk benih dan 2.500 tersimpan sebagai tanaman di lapangan. Dari sejumlah aksesori tersebut, yang telah terdaftar dalam penyimpanan jangka menengah dan jangka panjang adalah 4.594 aksesori. Sementara itu, pada tahun 2020 tersimpan SDG tanaman sebanyak 5.246 aksesori, atau bertambah 652 aksesori. Sementara itu, pengelolaan sumber daya genetik ternak untuk pangan dan pertanian belum tersedia.

4.b. Proporsi Hewan Ternak Berisiko Punah

Indikator lainnya adalah proporsi hewan ternak yang diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan, yaitu (i) berisiko, (ii) tidak berisiko, dan (iii) risiko yang tidak diketahui. Definisi berisiko punah jika suatu rumpun ternak dengan jumlah betina produktif ≤ 100 ekor dan jantan produktif ≤ 5 ekor. Hewan ternak yang dinilai berisiko punah di Indonesia diidentifikasi hanya satu rumpun ternak yaitu kambing Gembrong dari Bali. Dengan mengacu pada total hewan ternak lokal Indonesia yang dilaporkan kepada Domestic Animal Diversity- Information System (DAD-IS) FAO sebanyak 216 rumpun, maka persentase ternak domestik yang berisiko punah sebesar 0,46%, selebihnya tidak berisiko.

4.c. Anomali Harga Pangan

Target 2.c dalam TPB/SDGs Tujuan 2 yaitu mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas, termasuk membatasi volatilitas

harga pangan yang ekstrim. Capaian indikator (2.c.1*) diukur dengan indikator anomali harga pangan (IAHP), yaitu the normalized difference of the compound growth rate of prices dari nilai tengah historisnya untuk jangka waktu tertentu yang ditentukan sebelumnya. Pergerakan harga-harga pangan diklasifikasikan berdasarkan nilai IAHP sebagai berikut: Normal: $-0,5 \leq \text{IAHP} < 0,5$; moderat tinggi: $0,5 \leq \text{IAHP} < 1$; dan abnormal tinggi: $\text{IAHP} \geq 1$.

C. Tantangan

Permasalahan dan tantangan untuk mencapai target TPB/SDGs tujuan 2 terkait erat dengan pembangunan sistem pangan, pelayanan kesehatan dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam memproduksi pangan tersebut antara lain:

- Konversi lahan pertanian pangan ke penggunaan lain berlangsung terus-menerus yang menurunkan kapasitas memproduksi pangan; sementara perluasan/pembukaan lahan pertanian sebagai penggantinya terbatas pada lahan sub-optimal yang harus dikelola sesuai prinsip perdesaan;
- Degradasi kualitas sumber daya air dan perairan serta persaingan dalam pemanfaatan air dengan sektor industri semakin meningkat;
- Usaha pertanian pangan didominasi oleh usaha tani skala kecil (rata-rata luas lahan pertanian 0,5 ha luas lahan sawah 0,2 ha) dengan rata-rata usia petani yang menua (aging farmer) yang mengakibatkan akses pada sumber teknologi, informasi, pasar, dan pembiayaan usaha terbatas;
- Frekuensi dan intensitas kejadian perubahan iklim ekstrim semakin tinggi yang berdampak pada penurunan produktivitas tanaman pangan dan peningkatan risiko gagal panen.

Permasalahan dan tantangan aspek permintaan dan pola konsumsi pangan yang dihadapi adalah: (a) Permintaan pangan meningkat secara berkelanjutan dalam jumlah, keragaman, kualitas, serta keamanan pangan; sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk, pendapatan rumah tangga, dan pengetahuan gizi masyarakat; (b) permintaan makanan jadi dan kebiasaan makan di luar rumah meningkat sejalan dengan urbanisasi yang terus berlangsung dan proporsi wanita bekerja yang terus meningkat; (c) karakteristik sosial ekonomi rumah tangga dalam

pemenuhan konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang, yaitu (i) kemampuan atau daya beli rumah tangga berpendapatan rendah, (ii) pola konsumsi pangan rumah tangga belum memenuhi kaidah gizi, (iii) tingkat pengetahuan pangan dan gizi ibu rumah tangga masih rendah, dan (iv) kurang optimalnya pemanfaatan pangan lokal. Permasalahan gizi juga dipengaruhi oleh buruknya kondisi lingkungan seperti akses sanitasi dan air bersih, dan rendahnya akses pada fasilitas kesehatan. Tantangan yang dihadapi dalam upaya mempercepat penanganan permasalahan gizi pada anak balita lebih rumit lagi. Selain permasalahan di atas, penurunan kekurangan gizi pada balita juga berkaitan dengan: (a) rendahnya pelayanan kesehatan ibu dan anak, (b) rendahnya cakupan imunisasi, (c) belum optimalnya praktik pemberian makanan dan anak balita, (d) kurang baiknya pola asuh keluarga, dan (e) terbatasnya cakupan perlindungan sosial pada keluarga kurang gizi.

Keseluruhan tantangan seperti diuraikan di atas intensitasnya menjadi lebih besar lagi dengan adanya pandemi COVID-19. Sampai pertengahan 2021 pandemi ini masih belum memperlihatkan tanda-tanda berakhir, baik secara global maupun di Indonesia. Pandemi ini mempengaruhi kemampuan dalam penyediaan pangan baik dari produksi dalam negeri atau melalui perdagangan internasional, menghambat kelancaran kinerja rantai pasok pangan, dan menurunkan kemampuan masyarakat, terutama golongan 40% pendapatan terendah, dalam memenuhi konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman. Kelompok yang paling terkena dampak pandemi ini adalah penduduk dengan pendapatan 40% terbawah (2 kuintil terbawah), termasuk kelompok rentan seperti ibu hamil dan menyusui, balita, dan disabilitas. Pandemi ini juga menyebabkan disparitas perawatan kesehatan yang lebar dan menghadapi tantangan dalam penyediaan tenaga kesehatan yang cukup, sarana alat kesehatan dan obat-obatan serta pembiayaan yang sangat mahal.

D. Best Practice

Generasi berkualitas lahir dari seorang ibu yang berkualitas baik kesehatan fisik, mental dan spiritualnya. Usia perkawinan anak menjadi salah satu penyebab lahirnya bayi dengan kondisi BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah). Dan bayi BBLR menjadi salah satu penyebab terjadinya bayi lahir stunting (bayi pendek). Saat ini stunting menjadi prioritas kebijakan kesehatan nasional selain TBC (Tuberculosis)

dan PTM (Penyakit Tidak Menular).

Tujuan dari inovasi ini adalah sebagai upaya mengatasi permasalahan yang ada, yaitu sejak tahun 2013 kondisi angka pernikahan usia anak di Kecamatan Gedangsari cukup tinggi sehingga Dinas Kesehatan Gunung Kidul beserta lintas sektor berkomitmen membuat inovasi Ayunda Si Menik (Ayo Tunda Usia Menikah), dan tahun 2021 diketahui angka stunting pada Balita sangat tinggi sehingga perlu upaya untuk mendorong kegiatan yang lebih intensif dilakukan, sehingga melahirkan inovasi lanjutan yaitu Sego Ceting (Semangat Gotong Royong Cegah Stunting).

2.3. Kehidupan yang Sehat

A. Pengantar

Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia merupakan isu yang kompleks dan dalam pencapaiannya perlu mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain kesenjangan pelayanan kesehatan, kesenjangan ekonomi, kesetaraan gender, perubahan iklim dan lingkungan, serta transisi epidemiologi penyakit menular dan tidak menular.

Penguatan sistem kesehatan merupakan hal utama dalam mencapai sasaran pembangunan kesehatan berkelanjutan. Sistem kesehatan mencakup pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata, pemenuhan tenaga kesehatan serta farmasi dan alat kesehatan, penguatan tata kelola, pemberdayaan, pembiayaan dan sistem informasi kesehatan. Pencapaian sasaran pembangunan kesehatan berkelanjutan sangat bergantung pada peran aktif seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat maupun daerah, parlemen, dunia usaha, media massa, lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi profesi dan akademisi, serta mitra pembangunan.

Pandemi COVID-19 menyebabkan disrupsi sistem kesehatan. Pandemi COVID-19 selama lebih dari setahun juga mempengaruhi kehidupan seluruh penduduk semua usia terutama kelompok rentan, yaitu perempuan (di bidang kesehatan, pada aspek tertentu, mungkin laki-laki lebih rentan), usia dewasa dan lanjut usia dengan komorbid penyakit tidak menular, serta penyandang disabilitas. Pembatasan aktivitas berdampak pada seluruh penduduk pergi ke tempat pelayanan kesehatan, pelayanan obat, serta penyuluhan dan konsultasi kesehatan.

Selain itu, pandemi COVID-19 membatasi tenaga kesehatan dalam pemberian layanan kesehatan serta menghambat rantai pasok ketersediaan farmasi dan alat kesehatan. Pandemi COVID-19 memberikan momen penting untuk kesiapsiagaan darurat kesehatan dan untuk investasi dalam layanan publik abad ke 21 yang kritis.

B. Capaian

1. Mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI)

Tabel 2.14

Angka Kematian Ibu (AKI) Menurut Kabupaten/Kota 2018-2020

Parameter	Tahun		
	2018	2019	2020
Kulon Progo	3	5	11
Bantul	14	13	11
Gunungkidul	8	6	4
Sleman	7	8	3
Kota Yogyakarta	4	4	0
DIY	36	36	29

Sumber: Dalduk DIY, 2022

Terobosan atau inovasi program diperlukan untuk memenuhi target tersebut. Untuk merumuskan perubahan kebijakan yang signifikan agar target tercapai, perlu diketahui penyebab kematian ibu sehingga bisa dirumuskan alternatif intervensinya. Pola penyebab kematian ibu berdasarkan Sample Registration System (SRS) 2018 menunjukkan penyebab kematian ibu terbanyak adalah hipertensi dalam kehamilan (31,9%), perdarahan (26,9%), dan komplikasi non-obstetri (18,5%). Hipertensi dalam kehamilan bila telah terdeteksi dari awal kehamilan bisa terkontrol dan kematian ibu bisa dicegah.

Salah satu kunci keberhasilan penurunan AKI adalah memastikan setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih dan proses melahirkan di fasilitas kesehatan.

C. Tantangan

Tantangan ke depan adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, serta kegawat daruratan maternal termasuk kompetensi SDM, fasilitas, puskesmas mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dan rumah sakit mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) termasuk menjamin ketersediaan obat kesehatan ibu dan anak di fasilitas pelayanan kesehatan;
2. Perbaiki kesehatan ibu hamil, dan jika memungkinkan sebelum kehamilan terjadi, dengan mengurangi prevalensi anemia, dan perbaikan gizinya. Perlu dipastikan bahwa seluruh Ibu hamil dapat mengonsumsi tablet besi sekurang-kurangnya 120 tablet selama kehamilan, dan juga perbaikan konsumsi gizi selama kehamilan;
3. Peningkatan layanan kesehatan reproduksi bagi ibu dan remaja, serta pentingnya pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan bagi ibu hamil;
4. Penurunan unmet need KB untuk mencegah meningkatnya kehamilan yang tidak diinginkan (KTD), dan juga peningkatan akses dan layanan KB pasca persalinan;
5. Peningkatan akses informasi yang komprehensif untuk kesehatan reproduksi dan seksualitas, khususnya pada remaja;
6. Peningkatan status gizi wanita pra-hamil dan persiapan calon ibu yang berkualitas;
7. Memprioritaskan wilayah sasaran mempunyai AKI tinggi dan cakupan rendah persalinan yang aman oleh tenaga kesehatan; dan
8. Aksesibilitas layanan dan fasilitas kesehatan yang ramah bagi penyandang disabilitas perlu menjadi pertimbangan, diikuti dengan peningkatan kapasitas petugas tenaga kesehatan untuk menyampaikan informasi tentang kesehatan reproduksi.

2. Mengakhiri Kematian Bayi Baru Lahir dan Balita yang Dapat Dicegah

Angka kematian neonatal (AKN) dan balita (AKBa) menunjukkan

Tantangan ke depan adalah:

1. Peningkatan status kesehatan ibu hamil dan remaja perempuan untuk mencegah kematian neonatal yang disebabkan oleh komplikasi intrapartum,

- gangguan pernafasan, dan berat lahir rendah serta prematuritas;
2. Penguatan pelayanan kegawatdaruratan neonatal, bayi dan balita di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
 3. Peningkatan pengetahuan ibu tentang pola asuh bayi dan anak;
 4. Penguatan UKBM (desa siaga, kelas ibu hamil dan posyandu); dan
 5. Peningkatan upaya promosi dan edukasi kesehatan terutama imunisasi dan manfaatnya kepada masyarakat umum.

3. Mengakhiri Epidemii Penyakit Menular

Penyakit menular yang menjadi fokus perhatian dalam pembangunan kesehatan berkelanjutan adalah malaria, HIV, TB-Paru, hepatitis B, serta penyakit tropis yang terabaikan, yaitu filaria dan kusta.

Global AIDS Strategy 2021-2026 untuk memastikan pencapaian '3 Zero' HIV/AIDS dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, yaitu tidak ada lagi infeksi baru HIV; tidak ada lagi kematian akibat AIDS; dan tidak ada lagi stigma dan diskriminasi pada ODHA. Global TB report 2020 menunjukkan prevalensi TB di Indonesia menurun dari sebesar 312 per 100.000 penduduk pada tahun 2019 menjadi 301 per100.000 penduduk pada tahun 2020.

Tetapi perlu pertimbangan antisipasi pada penderita kusta yang sudah sembuh, walaupun tidak akan menjadi penular, mereka akan menjadi penyandang disabilitas. Selain itu mereka juga tetap akan menghadapi stigma (efek dari kusta) yang berdampak panjang pada ekonomi. Pendidikan dan kebutuhan alat bantu jika memerlukan mobilitas kegiatan produktif.

Tantangan untuk mengakhiri epidemi penyakit menular adalah:

1. Perluasan screening wajib pada ibu hamil (triple eliminasi) dalam mencegah dan mengendalikan HIV/AIDS, Sifilis dan Hepatitis B yang harus dilakukan saat pemeriksaan kehamilan, sehingga penularan kepada bayi dapat dicegah;
2. Perluasan penggunaan metode Tes Cepat Molekuler (TCM) TB keseluruhan RS untuk meningkatkan temuan kasus baru TB;
3. Peningkatan upaya mencegah Multi Drug Resistance (MDR);
4. Peningkatan kebutuhan logistik, SDM dan pembiayaan untuk HIV/AIDS (obat ARV, reagen dan kit diagnostic), untuk TB (obat anti TB dan kit diagnostic), dan untuk malaria (obat anti malaria);

5. Peningkatan cakupan HIV testing, terutama pada daerah yang jumlah kasus terbanyak, selain meningkatkan 'treatment retention rates' Mempercepat peningkatan kapasitas tenaga Kesehatan yang dapat melakukan HIV treatment di Rumah Sakit dan juga di Puskesmas; dan
6. Peningkatan upaya pencegahan COVID-19 yang terus menerus dengan melaksanakan protokol Kesehatan: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas.

4. Mengakhiri Kematian Akibat Penyakit Tidak Menular/PTM

Penurunan risiko penyakit tidak menular di DIY, evaluasi capaian kinerja target 3.4 terkendala ketersediaan data dimana riset kesehatan dasar (Riskesdas) dilakukan empat tahun sekali, terakhir dilakukan pada tahun 2018. Dengan data yang tersedia, risiko PTM di DIY masih cukup tinggi dan perlu kerja keras serta inovasi untuk menekan angka PTM dan faktor risiko PTM. Kendatipun begitu, DIY berhasil menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa di seluruh puskesmas.

Salah satu upaya pencegahan PTM, yaitu pencantuman informasi kandungan gula garam lemak serta pesan kesehatan untuk pangan olahan dari pangan siap saji yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013. Namun, sampai saat ini peraturan tersebut masih belum diberlakukan, karena informasi yang diberikan kurang mencukupi bagi para industri pangan dalam menerapkannya. Faktor yang memperberat kejadian PTM adalah perilaku merokok, pola makan dengan gizi tidak seimbang dan kurangnya aktivitas fisik. Faktor-faktor tersebut menjadi penyumbang meningkatnya prevalensi PTM di DIY.

Peran aktif dari berbagai pihak termasuk tokoh masyarakat dan tokoh agama dibutuhkan dalam mendukung upaya berhenti merokok dengan membantu menciptakan lingkungan yang sehat dan kondusif. Pada tahun 2021 tercatat 397 kabupaten/kota (77,2%) sudah memiliki Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok/KTR. Namun, pelaksanaannya masih menjadi tantangan.

Tantangan untuk menurunkan kematian akibat penyakit tidak menular antara lain:

1. Penjangkauan 2/3 penderita PTM yang belum mengetahui bahwa telah mengidap PTM dengan menyediakan tempat-tempat umum yang memberikan fasilitas pemeriksaan gula darah, fasilitas pemeriksaan tekanan darah gratis disertai dengan konseling jika terdeteksi pre-diabetes, atau pre-hipertensi;

2. Upaya promotif dan preventif untuk pengendalian faktor risiko PTM seperti promosi terus menerus untuk tidak merokok, konsumsi sayur dan buah, serta aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Selain itu, diperlukan berbagai upaya untuk perubahan perilaku untuk mencegah obesitas dan penyediaan fasilitas umum yang aman untuk melakukan aktivitas fisik;
3. Diberlakukannya Permenkes Nomor 30/2013 untuk pengaturan GGL pada pangan siap saji atau minuman berpemanis yang diproduksi oleh industri pangan;
4. Diberlakukannya sanksi untuk implementasi Perda tentang KTR untuk mengurangi perokok;
5. Upaya pencegahan PTM yang dimulai pada usia sebelum 50 tahun;
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, serta fasilitas layanan kesehatan seiring dengan meningkatnya jumlah penderita PTM; dan
7. Deteksi dini dan screening faktor risiko PTM: rokok, obesitas, hipertensi, dan diabetes melitus, termasuk pada anak di sekolah.

5. Memperkuat Pencegahan dan Pengobatan untuk Penyalahgunaan Napza dan Alkohol

Ada dua hal yang perlu dilakukan pada target 3.5 ini yaitu penyalahgunaan narkotika/zat adiktif (napza) dan alkohol. Upaya pencegahan napza sepenuhnya merupakan tanggung jawab/tugas BNN untuk mengupayakan agar penyalahgunaan napza bisa melakukan fungsi sosialnya. Kerjasama pencegahan dilakukan Kemenkes bersama BNN. Sedangkan adiksi alkohol bukan menjadi tanggung jawab BNN. Dua indikator yang menjadi target TPB, yaitu 3.5.1a. penyalahgunaan napza dan alkohol ditangani oleh BNN dan Kementerian Kesehatan, sedangkan 3.5.1b layanan pascarehabilitasi dijalankan oleh BNN.

Tantangan dalam pencegahan peningkatan prevalensi penyalahgunaan napza dan alkohol adalah:

1. Implementasi Inpres No. 2 tahun 2020 untuk mendorong Pemerintah Daerah mengeluarkan regulasi pengendalian Napza;
2. Meningkatkan kerjasama yang sinergis antara BNN, Kemenkes, dan institusi yang terlibat dalam pencegahan dan pengendalian masalah napza dan alkohol;

3. Integrasi data untuk optimalisasi peningkatan layanan pascarehabilitasi; dan
4. Melakukan advokasi dan sosialisasi yang intensif pada pemegang kebijakan untuk menyediakan anggaran dan komitmen dalam upaya pencegahan dan penanggulangan masalah penyalahgunaan Napza dan alkohol.
5. Menjamin Akses Universal Terhadap Layanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi
6. Berdasarkan SDKI, angka kelahiran perempuan usia 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR).

Tabel 2.15.

Data Age Specific Fertility Rate (ASFR) Menurut Kabupaten/Kota 2018-2021

Parameter	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Kulon Progo	5,0	8,82		10,2
Bantul	15,5	2,38		8,2
Gunungkidul	47,4	28,54		2,4
Sleman	15,3	8,35		25,6
Kota Yogyakarta	9,1	10,02		8,4
DIY	19,8	12,75		

Sumber: Susenas 2022

Selain itu, ASFR pada usia 10-14 tahun termasuk indikator yang juga dipantau. Hal ini dikaitkan dengan terjadinya kelahiran di usia anak, yang melanggar UU No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan. UU tersebut mengatur tentang usia perkawinan, termasuk pencegahan kekerasan seksual, yang dapat meningkatkan kelahiran tidak diinginkan (KTD).

Tabel 2.16.

Data Total Fertility Rate (TFR) Menurut Kabupaten/Kota 2018-2022

Parameter	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Kulon Progo	2,349	2,28		1,53
Bantul	1,903	1,93		1,80
Gunungkidul	2,305	2,30		1,93
Sleman	1,848	1,82		2,06
Kota Yogyakarta	1,584	1,50		2,17

DIY	1,903	1,88		
-----	-------	------	--	--

Sumber: Susenas, 2022

Tantangan ke depan adalah:

1. Peningkatan partisipasi pendidikan atau pengetahuan perempuan untuk mencegah pernikahan anak;
2. Peningkatan pemahaman kehidupan berkeluarga, dan peningkatan kualitas pendidikan kesehatan reproduksi terutama bagi anak usia sekolah/remaja;
3. Peningkatan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP); dan
4. peningkatan inovasi layanan dan pemenuhan alat dan obat kontrasepsi selama masa pandemi COVID-19.

6. Mencapai Cakupan Kesehatan Universal

Pemerintah DIY berupaya mencapai cakupan kesehatan universal, untuk menjamin seluruh masyarakat mempunyai akses pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang berkualitas dan efektif. Target untuk mencapai kesehatan universal adalah i) penyempurnaan akses terhadap pelayanan kesehatan esensial yang berkualitas, ii) pengurangan jumlah orang yang kesulitan keuangan untuk kesehatan, dan iii) penyempurnaan akses terhadap obat-obatan, vaksin, diagnostik, dan alat kesehatan esensial pada pelayanan kesehatan primer. Dalam rangka mewujudkan cakupan kesehatan universal, Pemerintah Indonesia menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sejak 1 Januari 2014. Program ini diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Pandemi COVID-19 berdampak pada meningkatnya unmet need pelayanan kesehatan. Survei yang dilakukan oleh Balitbangkes, Kemenkes pada tahun 2020 menunjukkan meskipun 72,5 persen Puskesmas memiliki jam kerja seperti pada masa sebelum pandemi, 83,6 persen Puskesmas mengalami penurunan kunjungan pasien. Selain itu, 43% dari Puskesmas yang disurvei tidak memberikan layanan Posyandu dan 56,9% melaporkan penurunan cakupan imunisasi.

Pelaksanaan cakupan kesehatan universal perlu diarahkan pada upaya pemerataan pelayanan kesehatan antarwilayah. Upaya ke depan diantaranya:

1. Menjangkau kepesertaan JKN dari pekerja informal dan pekerja penerima upah;

2. Memperluas kerja sama BPJS Kesehatan dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) swasta/mandiri;
3. Meningkatkan akses pada fasilitas dan tenaga kesehatan yang berkualitas di seluruh wilayah, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap obat dan vaksin yang aman, efektif, dan bermutu;
4. Meningkatkan koordinasi dan pola komunikasi yang efektif antar Dinas Kesehatan dan BPJS agar informasi terdistribusi secara lebih berdaya guna dan mengantisipasi terjadinya salah komunikasi;
5. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai peraturan BPJS pada semua pihak (rumah sakit, PUSKESMAS, dan warga masyarakat), terutama tentang komponen-komponen pelayanan yang ditanggung dan yang tidak ditanggung oleh skema JKN/ BPJS;
6. Meningkatkan perhatian, kepedulian terhadap keluhan dan/atau pengaduan warga masyarakat tentang berbagai hal yang terkait dengan pelayanan kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi, yang dicakup oleh skema JKN/BPJS; dan
7. Meningkatkan sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan, ketersediaan obat dan alat kesehatan, pemerataan distribusi SDM kesehatan, pemanfaatan data dan sistem informasi, kecukupan anggaran, kenaikan iuran serta regulasi yang mendorong perbaikan penyelenggaraan Program JKN.

7. Perangkat Implementasi

Indikator 3.a.1* Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.

Di setiap negara, diharapkan segala bentuk program yang mengarah pada promosi 'stop smoking' diberlakukan untuk lokasi-lokasi publik, disertai dengan tanda 'daerah bebas asap rokok', khususnya di institusi pendidikan, tempat layanan kesehatan, restoran, dan lainnya.

Target 3.b Mendukung pemerataan distribusi obat esensial dan vaksin.

Dalam rangka memastikan penyediaan akses terhadap obat dan vaksin, indikator yang dipantau adalah:

Persen anak 12-23 bulan yang sudah mendapat Imunisasi dasar lengkap (3.b.1*);

Total Official Development Assistant (ODA) untuk penelitian medis dan sektor

kesehatan dasar (3.b.2*); dan

Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan (3.b.3*).

Indikator 3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga Kesehatan

Dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan, maka ketersediaan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan menjadi sangat penting. Tenaga kesehatan yang didayagunakan di fasilitas pelayanan kesehatan semakin meningkat.

Kementerian Kesehatan berupaya meningkatkan distribusi tenaga kesehatan di setiap provinsi, melalui Program Nusantara Sehat yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rumah sakit milik pemerintah di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Program lainnya adalah Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) yang bertujuan untuk memberikan pemerataan tenaga spesialis di setiap wilayah di Indonesia.

Tantangan ke depan adalah:

1. Peningkatan kualitas dan profesionalisme tenaga kesehatan;
2. Pengembangan skema penempatan tenaga kesehatan terutama untuk daerah tertinggal.
3. Redistribusi tenaga kesehatan ke wilayah dengan kekosongan tenaga kesehatan;
4. Meningkatkan kemandirian obat dan bahan baku obat;
5. Meningkatkan penggunaan obat rasional; dan
6. Memperkuat sistem pengawasan obat dan vaksin, serta pembinaan pelaku usaha agar secara mandiri dapat menjamin mutu produk yang diproduksi dan didistribusikan.

D. Best Practice

Sonjo adalah gerakan kemanusiaan fokus pada upaya membantu masyarakat rentan dan berisiko terkena dampak penyebaran Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kata sonjo (Bahasa Jawa) berarti silaturahmi dan khusus untuk gerakan kemanusiaan ini SONJO adalah singkatan dari Sambatan Jogja. Sambatan adalah bentuk gotong-royong yang banyak dilakukan di daerah-daerah pedesaan di Jawa untuk membangun rumah warga/fasilitas publik. SONJO

menggunakan Whatsapp Group (WAG) sebagai media utama dalam berkoordinasi melakukan berbagai program.

2.4. Pendidikan Bermutu

A. Pengantar

Tujuan 4 berkaitan dengan penjaminan kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta peningkatan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Pembahasan Tujuan 4 mencakup empat isu utama, yaitu: (1) pemenuhan akses pendidikan; (2) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran; (3) pendidikan untuk peningkatan keberkerjaan termasuk pendidikan vokasi dan pelatihan; serta (4) penguatan pendidikan satu tahun pra-sekolah. Tujuan 4 ini terdiri dari 10 target, 7 diantaranya adalah target yang indikatornya secara langsung berkaitan dengan penerima manfaat dari sistem pendidikan, sementara tiga yang lain merupakan faktor pendorong kualitas pengajaran dan pembelajaran. Empat isu utama tersebut saling berkaitan, dan membutuhkan solusi yang sistematis.

B. Capaian

Dalam kurun waktu 5 tahun (2018-2022), tercatat progres yang baik pada pencapaian beberapa indikator Tujuan 4. Pada bagian ini status capaian akan dikelompokkan berdasarkan empat isu utama, yaitu: (1) pemenuhan akses pendidikan; (2) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran; (3) pendidikan untuk peningkatan keberkerjaan termasuk pendidikan vokasi dan pelatihan; serta (4) penguatan pendidikan satu tahun pra-sekolah.

1. Pemenuhan Akses Pendidikan

Target yang digunakan dalam RAD TPB DIY 2018-2022 untuk mengukur tujuan keempat adalah “Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki- laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif”.

Pemerintah DIY terus menunjukkan komitmen untuk meningkatkan akses

pendidikan. Hal ini ditunjukkan dalam capaian untuk indikator-indikator yang berkaitan dengan angka partisipasi, sebagaimana indikator 4.5.1: rasio angka partisipasi murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat, dan perguruan tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas. Indikator ini ditujukan untuk melihat tingkat disparitas akses pendidikan antar kelompok demografi.

Tabel 2.17.

Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Kabupaten/Kota 2019-2020

Kab/Kota	APM SD/MI (%)		APM SMP/MTs (%)		APM SMA/MA (%)	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Kulon Progo	98.26	97.66	87.34	77.78	85.57	61.99
Bantul	99.28	97.63	84.75	77.10	72.32	61.18
Gunung Kidul	99.08	97.31	91.89	77.83	62.64	61.72
Sleman	98.62	97.52	79.61	77.89	69.01	62.58
Kota Yogyakarta	99.38	96.39	78.67	79.19	72.73	67.84
DIY	98.93	98.85	84.21	83.99	70.97	70.96

Sumber: BPS DIY, 2022

Tabel 2.18.

Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Kabupaten/Kota 2020-2021

Kab/Kota	APK SD/MI (%)		APK SMP/MTs (%)		APK SMA/MA (%)	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Kulon Progo	101.30	107.70	96.20	90.32	94.85	85.45
Bantul	103.60	108.16	98.31	88.50	91.96	84.99
Gunung Kidul	103.67	107.87	108.11	91.56	72.53	84.89
Sleman	106.42	108.03	93.20	90.44	80.28	83.62
Kota Yogyakarta	104.32	103.88	81.33	92.30	102.27	95.14
DIY	104.30	104.71	96.59	94.80	85.94	89.29

Sumber: BPS DIY, 2022

Akses perguruan tinggi juga masih sangat terbatas, belum mampu mencapai target RPJMN pada tahun 2019, di mana targetnya adalah 36,73%. Data BPS menunjukkan bahwa capaian angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi (PT) hanya mencapai 30,85% pada tahun 2020. Walaupun ada kecenderungan kenaikan APK PT dari tahun ke tahun, angka tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar

lulusan jenjang SMA/ sederajat (hampir 70%) tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Hal ini menguatkan alasan pentingnya kebermanjaraan lulusan sekolah menengah serta kesempatan untuk mengakses pendidikan dan pelatihan yang dapat meningkatkan kebermanjaraan lulusan SMA/ sederajat. Pendidikan dan pelatihan untuk kebermanjaraan ini akan disampaikan pada bagian lain.

2. Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran

Kualitas pengajaran dan pembelajaran pada umumnya ditunjukkan melalui kualitas hasil belajar peserta didik termasuk kemampuan literasi dan numerasi. Namun demikian, untuk mengetahui kualitas proses pembelajaran yang dialami peserta didik, indikator kualitas pendidik dan sarana prasarana sekolah perlu diperhatikan. Indikator yang erat kaitannya dengan kualitas pembelajaran tersebut adalah Indikator 4.1.1, 4.a.1, dan 4.c.1.

Angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah terus meningkat, sebagai pemenuhan komitmen Wajib Belajar. Namun demikian, rendahnya proporsi siswa usia 15 tahun yang mencapai kompetensi minimum literasi membaca, matematika, dan sains dalam PISA 2018 menjadi penunjuk penting bahwa kualitas pendidikan yang baik baru dapat diakses oleh sedikit anak-anak dan remaja Indonesia.

Laporan Tujuan 4 tahun 2019 (Bappenas, 2020) menunjukkan bahwa terjadi penurunan proporsi anak-anak dan remaja yang mencapai standar kemampuan minimum dalam membaca dan matematika (indikator 4.1.1). Turunnya capaian ini terjadi terutamadalam tes PISA yang merupakan survei literasi dan numerasi internasional yang diikuti oleh siswa berusia 15 tahun (pada umumnya siswa kelas 9 SMP dan 10 SMA). Pada tahun 2015, 45% siswa mencapai standar kemampuan minimum dalam membaca dan 31% untuk kemampuan minimum dalam matematika. Pada tahun 2018, Indonesia kembali mengikuti tes PISA dan proporsi siswa yang mencapai standar kemampuan minimum dalam membaca dan matematika menurun menjadi masing-masing 30% dan 28

Rendahnya proporsi siswa Indonesia yang mencapai kemampuan minimum dalam literasi membaca dan matematika menjadi indikasi rendahnya kualitas pembelajaran yang diakses oleh sebagian besar anak-anak dan remaja di Indonesia. Indikator 4.a.1 tentang sarana dan prasarana satuan pendidikan dan indikator 4.c.1 tentang kualifikasi guru dapat menjelaskan kualitas proses belajar yang siswa alami.

Laporan Tujuan 4 tahun 2019 (Bappenas, 2020) menunjukkan bahwa Indonesia perlu terus membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif, dan efektif bagi semua.

Kualitas hasil belajar siswa juga berkaitan dengan fenomena perundungan yang terjadi di sekolah. Siswa usia 15 tahun yang merupakan korban perundungan setidaknya beberapa kali per bulan memiliki skor membaca di PISA lebih rendah daripada mereka yang tidak mengalami perundungan. Dalam survei PISA 2018 tersebut, didapati bahwa sebanyak 41% siswa Indonesia menjadi korban perundungan setidaknya beberapa kali dalam sebulan. Angka ini jauh lebih tinggi dari rata-rata negara OECD, yaitu 22.7%. Secara khusus di Indonesia, terdapat kecenderungan yang lebih tinggi untuk menjadi korban perundungan bagi siswa laki-laki dan/atau siswa yang memiliki kelebihan secara finansial. Hasil survei ini menunjukkan bahwa upaya untuk menciptakan sekolah yang ramah anak harus terus dikuatkan.

Kualitas hasil belajar sangat dipengaruhi oleh kualitas guru. Berdasarkan data Dapodik Kementerian Pendidikan, kurang dari separuh guru-guru di Indonesia yang telah memiliki sertifikasi. Selain itu, masih ada guru-guru dengan kualifikasi di bawah sarjana 1 atau diploma 4 (S1/D4). Tabel 2.13 menunjukkan proporsi kualifikasi guru tersebut.

Tabel 2.19.
Indikator mutu guru, 2016-2018

Katagori	2016	2017	2018
Proporsi guru dengan Sertifikat Guru			
PAUD	68,95	66,67	
SD	45,03	47,8	42,81
SMP	50,07	49,43	45,75
SMA	50,95	49,17	46,49
SMK	37,34	35,72	35,3
Proporsi guru dengan kualifikasi minimum S1 atau D3			
PAUD	52,3	52	
SD	84,2	86	88,4
SMP	92,1	93,2	94,5

Katagori	2016	2017	2018
SMA	96,9	97,4	98
SMK	94	94,6	95,4

Sumber : BPS, 2022

Selain guru, faktor yang berkontribusi pada kualitas pembelajaran adalah sarana prasarana. Indikator 4.a.1 meliputi fasilitas pendidikan yang mendasar untuk kebutuhan belajar anak. Menurut Statistik Pendidikan (BPS, 2020), Indonesia mengalami darurat gedung sekolah. Berdasarkan data Kemdikbud, pada tahun ajaran 2019/2020 terdapat lebih dari 70 persen ruang kelas pada setiap jenjang pendidikan yang kondisinya rusak, baik rusak ringan/sedang maupun rusak berat. Bahkan pada jenjang pendidikan SD dan SMP, ruang kelas dalam kondisi rusak mencapai persentasenya di atas 80 persen. Hal yang cukup memprihatikan adalah ruang kelas dengan kondisi yang baik malah mengalami penurunan dibandingkan tahun ajaran sebelumnya dan ini terjadi pada setiap jenjang pendidikan.

Kebutuhan fasilitas belajar tidak terbatas pada sarana dan prasarana yang langsung berkaitan dengan kegiatan belajar, tetapi juga kebutuhan terkait kesehatan, mengingat anak dan remaja menghabiskan banyak waktu di sekolah. Nampak bahwa belum 100% satuan pendidikan mengakses listrik, dan dapat diduga bahwa di sekolah-sekolah ini kegiatan belajar mudah terganggu oleh cuaca. Di Abad 21, komputer dan internet merupakan kebutuhan dasar untuk melangsungkan proses belajar yang efektif dan efisien. Namun demikian, hingga tahun 2018, proporsi satuan pendidikan yang menggunakan internet dan juga komputer untuk tujuan pembelajaran masih rendah, khususnya di jenjang pendidikan SD dan SMP. Rendahnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pembelajaran dapat menjadi salah satu faktor yang menjelaskan capaian literasi anak dan remaja di Indonesia.

Laporan 2019 juga mencatat bahwa fasilitas cuci tangan (WASH: water, sanitation, and hygiene) yang tersedia di sekolah perlu ditingkatkan. Di semua jenjang, proporsi satuan pendidikan yang memiliki fasilitas ini hanya sekitar 50%. Data ini menunjukkan bahwa perhatian satuan pendidikan terhadap fasilitas kesehatan perlu ditingkatkan.

3. Pendidikan Untuk Peningkatan Kebekerjaan

Laporan pencapaian Tujuan 4 tahun 2019 mencatat bahwa peran pendidikan untuk meningkatkan kebermanfaatan lulusan masih perlu terus ditingkatkan. Angka partisipasi pendidikan tinggi masih relatif rendah, yaitu hanya sekitar 30%. Namun demikian angka ini meningkat sekitar 5% dibandingkan tahun 2015. Dengan rendahnya angka partisipasi perguruan tinggi ini, maka pendidikan non-formal dan pelatihan (training) untuk angkatan kerja (remaja dan dewasa) menjadi sangat penting peranannya untuk meningkatkan kebermanfaatan lulusan SMA/ sederajat atau yang lebih rendah. Industri dan dunia usaha kerja melaporkan secara konsisten bahwa kompetensi lulusan tidak cocok dengan kebutuhan dunia industri. Hal ini disebabkan karena kurangnya partisipasi kuat oleh sektor industri dalam sistem pengembangan kompetensi lulusan (World Bank, 2020). Kerangka Kompetensi Nasional Indonesia (KKNi) telah mengatur kompetensi yang dibutuhkan, namun pengembangan standar ini masih dinilai kurang fokus pada kebutuhan industri dan mengikuti perkembangan industri yang pesat. Oleh karena itu, perlu ada penyesuaian kurikulum pendidikan vokasi dengan rancangan yang lebih dinamis dan responsif terhadap kebutuhan sektor industri.

4. Pendidikan Satu Tahun Pra-Sekolah

Pendidikan satu tahun pra-sekolah atau pendidikan anak usia dini untuk anak lima dan enam tahun (PAUD 5-6) merupakan pendidikan yang penting untuk transisi dari belajar di rumah yang pada umumnya tidak terorganisir, menuju pendidikan yang lebih terorganisir dan terstruktur di sekolah. Pada usia emas ini anak-anak membutuhkan berbagai stimulasi untuk perkembangan mereka.

Untuk anak-anak yang masih terdaftar di PAUD 5-6 sekalipun, kualitas pembelajaran di masa pandemi COVID-19 juga mengalami hambatan. Kegiatan belajar dari rumah (BDR) juga dikhawatirkan menurunkan kualitas pembelajaran yang berdampak pada kesiapan bersekolah. Asesmen kebutuhan cepat (rapid needs assessment) yang dilakukan Save The Children Indonesia pada bulan April 2020 menunjukkan bahwa 25 persen orang tua tidak memiliki alat dan bahan yang memadai untuk mendukung pembelajaran anak di rumah, serta sekitar 40 persen orang tua menilai adanya penurunan motivasi belajar anak-anak mereka yang

berusia dini.

Pendidikan satu tahun pra-sekolah atau pendidikan anak usia dini untuk anak lima dan enam tahun (PAUD 5-6) merupakan pendidikan yang penting untuk transisi dari belajar di rumah yang pada umumnya tidak terorganisir, menuju pendidikan yang lebih terorganisir dan terstruktur di sekolah. Pada usia emas ini anak-anak membutuhkan berbagai stimulasi untuk perkembangan mereka.

Tabel 2.20.
Angka Partisipasi Kasar PAUD Menurut Kabupaten/Kota 2018-2022

Parameter	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Kulon Progo	59,33	60,22	86,10	66,18
Bantul	66,37	68,00	98,44	85,13
Gunungkidul	66,64	66,69	80,17	80,63
Sleman	56,33	57,13	88,56	79,93
Kota Yogyakarta	72,69	74,42	115,63	71,94
DIY	64,66	65,56	92,44	78,89

Sumber: Penjaringan Data (Dikpora)

C. Tantangan

Permasalahan dan tantangan terkait akses dan kualitas pendidikan dibagi menjadi empat tema, yaitu akses pendidikan yang berkualitas sekaligus terjangkau khususnya untuk pendidikan dasar dan menengah yang merupakan bagian dari komitmen Wajib Belajar.

1. Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang Bermutu dan Terjangkau

Pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah, yaitu sekolah negeri, merupakan satuan pendidikan yang relatif terjangkau dari segi biaya dan juga lebih terkendali mutunya. Namun demikian, di banyak daerah, akses ke sekolah negeri masih kurang, terutama untuk jenjang sekolah menengah. Di konteks pendidikan vokasi dan juga pendidikan tinggi, tantangan kualitas pendidikan yang paling nyata adalah mengatasi ketidaksesuaian atau mismatch antara kompetensi lulusan atau supply tenaga kerja lulusan pendidikan vokasi dengan ekspektasi (demand) industri dapat menyebabkan rendahnya keberjeaan lulusan.

Berdasarkan komponen IPM pendidikan, pendidikan di DIY merupakan yang terbaik di Indonesia, khususnya pendidikan di Kabupaten Sleman dan Kota

Yogyakarta. Di sisi lain, capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) di DIY untuk semua jenjang pendidikan selama pelaksanaan RAD TPB DIY 2018-2022 belum berhasil mencapai target walaupun sudah mendekati angka 100%. Masalah utama terkait APK adalah rendahnya APK tingkat SMA dibandingkan dengan APK tingkat SMP. Diduga, banyak anak tamatan SMP yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA untuk menuntaskan wajib belajar dua belas tahun. Selain itu, ada pula beberapa permasalahan pendidikan yang diulas dalam RPD DIY, diantaranya adalah:

1. Layanan pendidikan yang berkualitas belum merata,
2. Mutu pendidikan belum optimal,
3. Disparitas tingkat pendidikan penduduk antar Kabupaten/Kota,
4. Tingkat pendidikan tenaga kerja masih tergolong rendah, dan
5. Angka partisipasi sekolah belum optimal.
6. Tak hanya itu, dalam LKPJ AMJ Gubernur DIY 2017-2022, ada pula beberapa permasalahan pendidikan yang diulas, diantaranya adalah:
7. Adanya penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah
8. Perbedaan kualitas pendidikan antar satuan pendidikan
9. Penyerapan tenaga kerja lulusan SMK cenderung rendah

Baik RPD maupun LKPJ AMJ, keduanya menggarisbawahi kualitas pendidikan DIY yang masih timpang baik secara kewilayahan maupun antar satuan. Ditambah lagi, kedua dokumen juga mencatat partisipasi sekolah yang belum optimal terbukti dari adanya penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah. Oleh karena itu, di D.I. Yogyakarta pembangunan bidang pendidikan kini difokuskan pada pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas mutu guru dan tenaga kependidikan, serta peningkatan mutu pendidikan.

Satu hal yang seringkali luput dari perhatian dalam urusan pendidikan adalah pendidikan untuk anak luar biasa. Dalam RAN TPB dimuat satu indikator baru yaitu APK SLB untuk memberikan potret pendidikan yang lebih inklusif. Di D.I. Yogyakarta sekolah luar biasa (SLB) berjumlah 79 sekolah, sudah termasuk sekolah berstatus negeri dan swasta. Berdasarkan pernyataan dari Dinas Pendidikan dan Olahraga DIY, program pendidikan perlu lebih inklusif lagi terlebih kepada anak-anak berkebutuhan khusus.

2. Tantangan Pendidikan di Masa COVID

Sejak sekitar Maret 2020 pembelajaran tatap muka di sekolah diberhentikan karena pandemi COVID-19, dan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau pembelajaran dari rumah (BDR) dimulai. Hingga laporan ini ditulis, di beberapa daerah di Indonesia, PJJ masih terus dijalankan. Disrupsi proses belajar ini dapat menjadi hambatan terhadap pencapaian Tujuan 4, terutama dalam pencapaian target-target yang berkaitan dengan kualitas hasil belajar (misalnya Target

Turunnya kualitas belajar di masa pandemi COVID-19 berkaitan dengan dua hal, yaitu kompetensi pedagogi guru untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan fasilitas belajar yang tersedia baik untuk pendidik maupun peserta didik. Salah satu yang memberatkan proses belajar PJJ adalah kurang terampilnya guru dalam mengelola pembelajaran, sehingga kegiatan belajar menuntut anak dan remaja untuk duduk berjam-jam di depan laptop ataupun telepon selular mereka untuk mendengarkan guru berceramah. Hal ini berdampak negatif pada motivasi anak untuk belajar. Proses belajar tanpa kehadiran guru dan murid di kelas berpotensi mengurangi kualitas pendidikan.

Pandemi COVID-19 menuntut peran orang tua yang lebih besar dalam proses pembelajaran anak dan remaja. Penilaian Kebutuhan Cepat (Rapid Need Assessment) yang dilakukan Save the Children Indonesia pada April 2020 menunjukkan bahwa 25 persen orang tua tidak memiliki alat dan bahan ajar yang memadai, 40 persen orang tua melihat motivasi anak menurun, dan hampir 30 persen guru membutuhkan materi pembelajaran jarak jauh. Dukungan orang tua sangat penting bagi pembelajaran anak, namun tidak semuanya memiliki kemampuan yang sama dalam mendukung, terutama karena perbedaan sosio-ekonomi.

Selain anak dan remaja dari keluarga dengan sumberdaya yang terbatas dan mereka yang tinggal di wilayah perdesaan, yang juga kehilangan kesempatan belajar secara efektif adalah anak dan remaja dengan kebutuhan khusus. Berdasarkan hasil survei terhadap guru untuk siswa berkebutuhan khusus di Jawa Timur (Afrianty, et al., 2020), ditemui beberapa kendala yang dialami guru dan peserta didik dengan ketunaan selama pembelajaran dengan sistem daring. Sebagian guru kesulitan berkomunikasi karena akses dan

keterampilan TIK yang terbatas.

Kajian yang dilakukan RISE Programme in Indonesia mendapati bahwa akibat dari terbatasnya akses internet di sebagian wilayah Indonesia menyebabkan sekitar 30% guru di pulau Jawa tidak dapat beraktivitas setiap hari sebagaimana biasanya, dan proporsi ini lebih besar lagi di luar Jawa, mencapai sekitar 50% guru. Di sisi peserta didik pun ditemui banyak kasus anak-anak yang tidak memiliki akses baik ke jaringan internet ataupun gawai yang dapat mereka gunakan untuk belajar (Alifia, 2020). Disparitas akses ini menjadi tantangan yang lebih besar untuk pencapaian Tujuan 4, khususnya terkait dengan pemerataan kesempatan pendidikan yang berkualitas.

D. Best Practice

Salah satu contoh praktik baik di bidang pendidikan adalah upaya pemerintah DIY menyediakan Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library for All (Sepatu Jolifa) yang merupakan solusi cerdas. Sepatu Jolifa hadir di masyarakat untuk memenuhi kebutuhan informasi dan pengetahuan melalui jaringan kerja sama antar perpustakaan berbasis teknologi informasi. Sistem perpustakaan terpadu ini dibangun atas dasar kesadaran untuk berkolaborasi dalam rangka memenuhi keterbatasan sumber daya layanan informasi. Kolaborasi dilakukan untuk saling memenuhi kebutuhan informasi masyarakat melalui berbagi koleksi berupa buku cetak maupun elektronik, fasilitas dan ruang perpustakaan, dan sarana TIK di perpustakaan.

Sepatu Jolifa menawarkan layanan secara online maupun offline. Secara online Sepatu Jolifa dapat diakses melalui alamat situs www.jogjalib.com. Jenis layanannya yaitu integrasi informasi 39 perpustakaan yang meliputi data katalog buku, e-resources, informasi fasilitas perpustakaan, dan informasi buku unggulan. "Secara offline, Sepatu Jolifa memberikan kemudahan akses masuk perpustakaan melalui layanan silang kunjung, dan pinjam buku antar perpustakaan melalui layanan silang pinjam. Layanan silang pinjam ini, menjadi satu-satunya di Indonesia yang menerapkan konsep Inter Library Loan (ILL) di tingkat provinsi,"

2.5. Mencapai Kesetaraan Gender

A. Pengantar

Tujuan 5 SDGs adalah mewujudkan kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan. Mendorong terwujudnya Tujuan 5 TPB/SDGs ini tidak hanya upaya untuk memenuhi hak asasi manusia dan mewujudkan keadilan, tapi juga merupakan landasan untuk menciptakan bangsa yang lebih sejahtera. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan penting untuk memastikan terlibatnya perempuan secara bermakna dalam proses pembangunan.

Pembangunan inklusif gender mewarnai seluruh tujuan dari TPB/SDGs untuk memastikan bahwa jalan menuju kesetaraan gender hanya dapat terwujud jika pembangunan dilakukan secara setara diantara laki-laki dan perempuan di seluruh aspek kehidupan. Tujuan 5 memiliki 9 target yang diukur melalui 14 indikator. Pada laporan ini, analisis situasi dan tantangan pembangunan gender akan dilakukan terhadap 8 target TPB/SDGs dengan menganalisis capaian 12 indikator TPB/SDGs.

B. Capaian dan Tantangan

1. Kerangka Hukum yang Mendorong dan Memantau Kesetaraan Gender

Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan, dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin merupakan upaya yang dilakukan untuk mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Hal ini berada dalam kerangka upaya untuk menjamin pemenuhan hak asasi manusia dari seorang perempuan.

Untuk mengukur ketersediaan kerangka hukum yang responsif gender, dilakukan penilaian terhadap kebijakan yang mendorong/memajukan kesetaraan gender yang disertai dengan penegakan hukum dan pemantauan pelaksanaannya. Penilaian menggunakan kuesioner yang terdiri dari 45 pertanyaan terkait capaian di 4 bidang, yaitu dasar hukum umum (12 pertanyaan), kekerasan terhadap perempuan (12 pertanyaan), lapangan kerja dan ekonomi (10 pertanyaan), serta perkawinan dan keluarga (11 pertanyaan) di tingkat nasional. Hasil penilaian perangkat peraturan perundang-undangan Indonesia yang responsif gender di Indonesia pada 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.21.

Ketersediaan Kerangka Hukum yang Mendorong, Menetapkan dan Memantau kesetaraan Gender dan Penghapusan Diskriminasi

Bidang	Hasil penilaian	Jumlah pertanyaan survei dengan jawaban Ya
Dasar Hukum Umum	100%	12 dari 12 pertanyaan
Kekerasan terhadap Perempuan	91,67%	11 dari 12 pertanyaan
Lapangan Kerja dan Ekonomi	90%	9 dari 10 pertanyaan
Perkawinan dan Keluarga	81,82%	9 dari 11 pertanyaan

2. Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Sebagai separuh dari populasi nasional, kapasitas perempuan utamanya yang berkaitan dengan pelaksanaan program pembangunan merupakan aspek penting yang perlu dioptimalkan pemanfaatannya. Namun kekerasan berbasis gender yang umumnya dialami oleh perempuan dapat menghambat partisipasi mereka dalam pembangunan bahkan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara (Heise et al., 1994; Watts & Zimmerman, 2002). Dalam jangka panjang, kekerasan ini dapat berdampak pada rendahnya kemampuan bekerja dan kualitas pengasuhan anak yang dilakukan oleh perempuan korban kekerasan. Jika korban masih berada dalam usia anak, kekerasan berpotensi memunculkan perilaku berisiko baik saat mereka masih berada di usia anak maupun saat telah dewasa seperti terlibat aktivitas seksual berisiko dan tindak kejahatan (Pinheiro, 2006).

Kondisi Pencapaian

Kasus kekerasan terhadap perempuan masih menjadi fenomena gunung es di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh jumlah kasus terlapor yang dianggap belum dapat merepresentasikan jumlah kasus sesungguhnya. Penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan juga banyak dilakukan melalui jalur non hukum (seperti mediasi keluarga, tokoh masyarakat, dan penyelesaian adat).

Tabel 2.22.

Ketercapaian Target 5.2 TPB DIY Tahun 2018-2022

No	Target/Indikator	Indikator RAD TPB 2018-2022	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
5.2		Menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.						
1	5.2.1	Prevalensi Kekerasan terhadap anak perempuan dan laki-laki 0-17 th	%	NA	5,2	4,4	4,5	
		Target		4,9	4,8	4,7	4,6	4,5
2	5.2.2	Proporsi perempuan dan anak perempuan mengalami kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	%	2	3,7	3,1	0,7	
		Target		1,8	1,7	1,6	1,5	1,4
3	5.2.3	Proporsi perempuan dan anak perempuan mengalami kekerasan non-KDRT	%	4,8	2,7	2,4	0,3	
		Target		4,5	4,4	4,3	4,2	4,1
4	5.2.4	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	%	100	100	100	100	
		Target		70	73	76	80	85

Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2022

Ketersediaan data dan informasi yang komprehensif diperlukan untuk mengungkap kasus kekerasan serta membantu membangun pemahaman yang menyeluruh terkait akar persoalan dari yang terjadi. Pada tingkat makro, terdapat data SPHPN yang dihimpun oleh BPS, meskipun data tersebut dikumpulkan satu kali dalam 5 tahun. Sementara dari sisi catatan administrasi, telah terdapat pendataan kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh beberapa

lembaga layanan seperti pengadilan negeri, kepolisian, Women's Crisis Centre dan Lembaga Swadaya Masyarakat, dinas terkait pada tingkat kabupaten, P2TP2A, dan Komnas Perempuan. Namun pendataan kasus dari seluruh jenis layanan terkait kekerasan terhadap perempuan (layanan pendampingan dan pengaduan, layanan penegakan dan bantuan hukum, layanan kesehatan, dan layanan rehabilitasi) belum terintegrasi dengan optimal sehingga data yang tersedia belum mencerminkan jumlah kasus riil.

Upaya KIE yang selama ini dilakukan juga dianggap kurang efektif sehingga masih banyak perempuan dewasa dan anak perempuan yang belum sepenuhnya memiliki kesadaran atas berbagai bentuk kekerasan sehingga tidak menganggap dirinya memiliki hak atas perlindungan. Di sisi lain, terdapat keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya berupa SDM, anggaran, dan fasilitas untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan, ketersediaan layanan dan cara menjangkaunya.

Bentuk tantangan lain yang masih dihadapi dalam upaya pengentasan kekerasan terhadap perempuan adalah kerentanan perempuan pekerja migran terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Selama ini, perempuan juga lebih rentan menjadi korban TPPO karena beberapa hal seperti kesulitan mencari pekerjaan, kemiskinan, dan posisinya yang bukan merupakan kepala keluarga sehingga tidak dianggap sebagai pengambil keputusan utama dalam rumah tangga (Daniah & Apriani, 2017).

3. Perkawinan Anak

Perkawinan anak memiliki konsekuensi negatif tidak hanya pada anak, tapi juga bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Ancaman yang muncul dari perkawinan pada usia anak adalah: putus sekolah, ancaman kesehatan fisik ibu dan anak yang dilahirkan¹⁹, berpotensi mengganggu kesehatan mental, risiko kekerasan dalam rumah tangga serta peluang penerapan pola asuh yang keliru. Perkawinan anak juga memiliki konsekuensi pada terjadinya kasus stunting pada anak bawah lima tahun (Bappenas et al., 2020). Secara makro, persoalan perkawinan anak ini meningkatkan angka fertilitas di Indonesia, mengancam capaian IPM, dan berpotensi mengganggu capaian berbagai indikator SDG—tidak hanya di tujuan 5, tapi juga di Tujuan 1, 2, 3, 4, 8, 10, dan 16.

Kondisi Pencapaian

Tabel 2.23..

Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan Menurut Kabupaten/Kota 2018-2020

Kab/Kota	Tahun			
	2018		2019	2020
	Perkotaan	Pedesaan		
Kulon Progo	22	21	22	23
Bantul	23	23	23	22
Gunungkidul	22	20	20	20
Sleman	23	22	23	23
Kota Yogyakarta	24	-	23	23
DIY	23	20	22	22

Sumber: Susenas, 2022

Perkawinan anak lebih banyak terjadi pada perempuan yang tinggal di pedesaan, yang berasal dari rumah tangga (kepala rumah tangga) berpendidikan rendah dan tingkat kesejahteraan menengah kebawah. Anak-anak yang mengalami perkawinan anak cenderung memiliki tingkat pendidikan yang rendah, dengan kasus perkawinan anak lebih tinggi terjadi diantara perempuan non

Tantangan

Terdapat kompleksitas faktor penyebab praktik perkawinan anak di DIY mulai dari tingkat individu anak, keluarga, norma sosial yang berkembang di daerah, serta kebijakan. Tantangan di masing-masing tingkatan kehidupan ini saling berinteraksi satu sama lain menghasilkan intensitas tantangan yang berbeda bagi setiap individu anak di wilayah berbeda.

Pada tingkat individu, anak dan remaja kurang memiliki keberdayaan dan pemahaman terkait kesehatan reproduksi dan dampak negatif perkawinan anak.

Dalam konteks kehamilan di luar pernikahan, relasi pertemanan dan kemudahan akses informasi/komunikasi yang tidak diiringi keberdayaan dan kapasitas individu mengenai kesehatan reproduksi menjadi salah satu penyebab kehamilan remaja di luar pernikahan. Norma sosial yang menabukan pendidikan kesehatan reproduksi remaja menjadi penghalang peningkatan kapasitas anak dan remaja terhadap kesehatan reproduksi. Ditambah dengan norma sosial di beberapa daerah yang memberikan stigma negatif pada perempuan yang belum menikah di usia muda—stigma ini akhirnya membuat anak penerima perkawinan di usia dini (Bappenas & PPPA, 2020; BPS & Bappenas, 2020).

Di dalam keluarga, faktor ekonomi/kemiskinan dengan banyaknya jumlah anak, pendidikan orang tua yang rendah, serta lemahnya pemahaman mereka terhadap kesehatan reproduksi dan dampak perkawinan anak menjadi faktor pendorong orang tua menikahkan anaknya pada usia anak. Faktor sulitnya akses pendidikan (jumlah sekolah yang terbatas, yang berimplikasi pada besarnya biaya pendidikan yang harus dikeluarkan) juga turut menjadi faktor yang berperan terhadap perkawinan anak.

Pemerintah juga mendorong penurunan angka perkawinan anak melalui penetapan kabupaten/kota layak anak—salah satu indikator yang digunakan dalam penentuan kabupaten/kota layak anak ini adalah tingkat perkawinan anak. Dukungan peraturan di berbagai tingkat pemerintahan diperlukan untuk mendorong pencegahan perkawinan anak di tingkat daerah. Namun yang menjadi tantangan saat ini adalah belum seluruh daerah memiliki peraturan terkait. Sementara itu, peraturan di tingkat desa seringkali ditemukan kontradiktif dengan upaya perlindungan hak anak. Di satu sisi, peraturan memberikan batasan dalam berpacaran. Namun ketika terjadi pelanggaran, terdapat sanksi denda atau sanksi sosial yang melukai martabat anak (Bappenas & PPPA, 2020).

4. Partisipasi Perempuan

Tujuan 5 TPB/SDGs menilai keterlibatan perempuan sebagai pengambil keputusan dalam bidang politik, ekonomi dan kemasyarakatan melalui proporsi perempuan yang menduduki kursi di parlemen dan jabatan pemerintahan baik di tingkat pusat dan daerah, serta perempuan yang menduduki jabatan manajerial/kepemimpinan di pemerintahan dan perusahaan publik/swasta.

Kondisi Pencapaian

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengakui hak dan akses yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk menduduki jabatan publik baik di lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Upaya untuk mendorong representasi perempuan di legislatif merupakan proses panjang yang telah dimulai sejak masa awal reformasi. Upaya untuk mendorong representasi perempuan di legislatif ini telah dilakukan dari hulu hingga hilir proses legislasi, mulai dari proses seleksi di internal partai, penempatan perempuan di daftar calon legislatif, dan mekanisme penentuan calon terpilih (Margret et al., 2018).

Partisipasi politik perempuan sebagai pengambil keputusan politik telah didorong di dalam serangkaian peraturan perundang-undangan, dengan target keterwakilan perempuan di parlemen minimal 30%. Kebijakan berawal dari adanya himbauan di dalam UU No. 12/2003 untuk memperhatikan keterwakilan perempuan 30% di legislatif pada kegiatan pemilu 2004. Penetapan kuota ini merupakan tindak lanjut dari konvensi perempuan se dunia Tahun 1995 di Beijing dan hasil sidang umum Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman (CEDAW) pada tahun 2000. Kebijakan kuota ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen tidak hanya merupakan tugas perempuan, tapi juga tanggung jawab negara—diperlukan kebijakan/dukungan dari negara agar keterwakilan perempuan di parlemen ini dapat terealisasi.

Sejauh ini, angka perempuan yang menduduki kursi legislatif terus mengalami peningkatan. Namun hingga pemilu 2019, target 30% perempuan di legislatif baru terpenuhi pada anggota DPD. Sementara proporsi perempuan yang menjadi anggota DPR dan DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota masih jauh dari angka target 30%.

Tabel 2.24.

Proporsi Kursi Legislatif Tingkat Pusat dan Daerah yang Diduduki Perempuan

	2009	2014	2019
DPR	18,04	17,32	20,52
DPD	26,52	25,76	30,88
DPRD Provinsi	15,50	15,92	17,53
DPRD Kabupaten/Kota		14,24	15,30

Sumber: KPU

Tantangan

Dengan beragam kerangka hukum yang telah tersedia, masih terdapat tantangan yang menyebabkan rendahnya keterlibatan perempuan di kursi legislatif dan sebagai pengambil keputusan berbagai instansi pemerintah dan non pemerintah. Hal ini mengakar pada budaya patriarki yang berlaku di masyarakat menciptakan hambatan dari sisi individu perempuan, dan hambatan dari sisi lingkungan yang tidak mendukung partisipasi perempuan sebagai pengambil keputusan.

Di dunia politik, (Gelgel dan Apriani, 2019) mengidentifikasi adanya perlakuan yang berbeda yang diberikan partai politik dalam menyeleksi calon perempuan dan laki-laki. Di internal partai, perempuan cenderung ditempatkan sebagai anggota partai. Dengan kata lain, hanya sedikit perempuan yang menduduki jabatan sebagai pimpinan partai politik.

Tantangan lain yang menjadi penyebab rendahnya keterlibatan perempuan di kursi legislatif dan sebagai pengambil keputusan berbagai instansi pemerintah dan non pemerintah adalah faktor internal perempuan. Untuk terjun ke dunia politik, tantangan perempuan adalah adanya keterbatasan sumber daya (finansial, jejaring sosial), pengalaman politik, serta rendahnya motivasi/ambisi/minat perempuan untuk berkarir di dunia politik (Gelgel & Apriani, 2019; Margret et al., 2018). Ambisi perempuan untuk merencanakan karir dan menduduki posisi manajerial juga ditemukan lebih rendah dibandingkan laki-laki (Lidyah, 2017).

5. Otonomi Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Terkait Kesehatan Seksual dan Reproduksi

Ratifikasi Beijing Declaration and Platform for Action pada tahun 1995 beserta hasil penelaahan dari konferensi terkait memunculkan tindak lanjut berupa kesepakatan dari negara yang tergabung dalam PBB untuk menyediakan akses universal terhadap fasilitas penyedia layanan kesehatan seksual dan reproduksi.

Kondisi Pencapaian

Diantara WUS dan PUS, wanita berstatus kawin memiliki otonomi pengambilan keputusan yang lebih baik dibandingkan wanita yang tidak berstatus

kawin. Hal ini ditandai dengan lebih tingginya angka otonomi pengambilan keputusan pada PUS dibandingkan WUS. Namun secara umum, lebih dari separuh perempuan belum memiliki otonomi dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan seksualitas dan reproduksi, baik diantara WUS maupun PUS. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh pelaksanaan kebijakan terkait kesehatan reproduksi yang masih berfokus pada family planning.

Terdapat variasi kemampuan mengambil keputusan sendiri antar kelompok usia dengan bentuk hubungan seperti parabola terbalik. Kemampuan pengambilan keputusan wanita masih rendah kelompok usia 15-19 tahun. Kemampuan ini semakin membaik pada kelompok usia yang semakin tinggi, namun menurun kembali pada kelompok usia 45-49 tahun. Diantara kelompok usia muda, adanya anggapan seksualitas sebagai hal yang tabu untuk dibicarakan kepada remaja merupakan faktor penyebab rendahnya otonomi mereka dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan seksual dan reproduksi. Anggapan bahwa seksualitas remaja yang dikonstruksikan secara negatif melalui wacana moral justru dapat berakhir kontraproduktif sebab informasi terkait kesehatan seksual dan reproduksi justru tidak tersampaikan secara utuh sehingga para remaja tersebut tidak memiliki cukup data untuk mengambil keputusan sendiri.

Tantangan

Adanya agensi individu perempuan, pengetahuan dan akses informasi mereka terkait hak kesehatan seksual dan reproduksi, dan tingkat pendidikan merupakan aspek penting dalam membentuk kemampuan perempuan dalam mengambil keputusan terkait hak kesehatan seksualitas dan reproduksi. Pengetahuan yang komprehensif mengenai kesehatan seksual dan reproduksi dibutuhkan untuk membentuk kapasitas (pengetahuan, sikap dan keterampilan) perempuan dalam pengambilan keputusan. Namun hal ini tidak berdiri sendiri. Dukungan pasangan dan keluarga dalam pengambilan keputusan, norma sosial/pemahaman nilai agama terkait peran laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan turut membentuk terwujudnya kemandirian perempuan dalam pengambilan keputusan.

Anggapan bahwa informasi terkait kesehatan seksual dan reproduksi sebagai isu yang tabu juga berimplikasi pada keterbatasan pemahaman remaja

mengenai realitas perilaku seks dan risiko seksual yang mereka hadapi (Pakasi & Kartikawati, 2013). Hal ini utamanya disebabkan oleh minimnya konstruksi seksualitas remaja yang lebih positif, misalnya dengan menganggap bahwa remaja merupakan makhluk seksual yang perlu mempertanggungjawabkan kesehatan seksual dan reproduksinya.

6. Akses Terhadap Sumber Daya Ekonomi

Kepemilikan dan penguasaan lahan/tanah pertanian oleh perempuan merupakan salah satu kunci dalam peningkatan pemberdayaan perempuan. Hal ini disebabkan oleh eksistensi lahan sebagai faktor produksi utama dalam kehidupan perekonomian penduduk agraris (Setiawan, 2006). Kepemilikan dan penguasaan perempuan atas lahan dapat meningkatkan ketahanan pangan dan pendapatan keluarga, daya tawar mereka di rumah tangga, meningkatkan akses mereka terhadap kredit, bahkan berpotensi membuat pendapat perempuan diperhitungkan dalam pengambilan keputusan baik pada tingkat rumah tangga maupun desa.

Oleh karena itu, terjaminnya hak yang sah bagi perempuan dalam menguasai, menggunakan, dan memindahkan hak atas lahan dalam bentuk sertifikat maupun penguasaan lahan secara defakto menjadi indikator penting untuk mendorong kesetaraan gender.

Tantangan

Ketimpangan dalam akses dan kontrol formal atas lahan pertanian oleh perempuan tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain pewarisan sumber daya ekonomi yang lebih banyak dialokasikan pada anak/ahli waris laki-laki, akses garapan dan informasi terkait garapan yang lebih banyak diberikan pada kepala keluarga, anggapan bahwa tanggungjawab utama perempuan merupakan ranah domestik, serta belum terakomodasinya kebutuhan perempuan petani dan/atau perempuan adat.

Praktik pewarisan lahan pertanian sebagai sumber daya ekonomi yang condong pada laki-laki utamanya didorong oleh aspek sosial budaya pada masyarakat yang umumnya menganut sistem patrilineal. Sistem tersebut mensyaratkan masyarakat yang menganutnya untuk menarik garis kekerabatan dari

pihak ayah. Oleh karena itu, kedudukan anak laki-laki diletakkan lebih utama daripada anak perempuan termasuk dalam pengaturan harta warisan. Tantangan lain yang muncul dari praktik ini ialah adanya fenomena pengambilan keputusan terkait penggunaan lahan yang tidak melibatkan perempuan meski mereka merupakan pemilik lahan tersebut. Fenomena tersebut erat kaitannya dengan anggapan bahwa perempuan cukup berperan “di atas kertas” sedangkan pemanfaatan lahan, termasuk penjualan, merupakan peran dari anggota keluarga laki-laki.

Hal ini ditambah dengan keberadaan UU No. 16/2019 tentang Perkawinan. Pada regulasi tersebut ditegaskan bahwa suami merupakan kepala keluarga sedangkan isteri merupakan ibu rumah tangga. Posisi tersebut seolah mendorong laki-laki untuk lebih banyak berperan dalam keputusan strategis termasuk pengaturan kepemilikan sumber daya ekonomi keluarga. Selain itu, pemberian akses garapan dan sumber informasi terkait pendidikan, penyuluhan, serta pelatihan biasanya juga lebih mudah diberikan pada kepala keluarga (Luthfi, 2010).

Secara umum, kerangka hukum formal yang menjamin bahwa perempuan memiliki hak kepemilikan dan/atau kontrol atas lahan pertanian telah tersedia melalui UU No 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (atau biasa disebut sebagai UU Pokok Agraria) serta Perpres No. 86/2018 tentang Reforma Agraria. Bahkan UU No. 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pun menjamin keterlibatan petani perempuan dalam pembentukan kelompok tani. Kerangka regulasi yang memberikan pengakuan terhadap hak universal atas kepemilikan lahan/tanah diharapkan dapat mendorong adanya peningkatan pemberdayaan perempuan melalui penguasaan sumber daya ekonomi. Akan tetapi, pengimplementasian dari kebijakan tersebut masih menemui tantangan yang ditunjukkan oleh masih rendahnya penguasaan lahan oleh perempuan.

7. Akses Teknologi

Pemerataan kepemilikan telepon genggam berpeluang mendorong pengembangan ekonomi, sosial, partisipasi politik, pengetahuan dan kapasitas dan produktivitas baik pada laki-laki maupun perempuan. Hal ini terutama terjadi karena perkembangan teknologi telepon genggam yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi jarak jauh (mereduksi jarak) dan untuk mengakses internet melalui

telepon genggam. Dengan manfaat ini, ketimpangan kepemilikan telepon genggam antara laki-laki dan perempuan memperbesar peluang ketimpangan gender di banyak bidang kehidupan.

Kondisi Pencapaian

Dalam kurun waktu pelaksanaan kerangka pembangunan berkelanjutan sejak 2015, tren akses telepon genggam penduduk (baik perempuan maupun laki-laki) masih menunjukkan perkembangan yang positif. Namun pada 2020, terjadi perlambatan perkembangan akses telepon genggam penduduk. Di tingkat nasional, tingkat akses telepon genggam penduduk turun dari angka 63,53% pada 2019 menjadi 57,48% pada 2020. Penurunan pada tahun 2020 ini mengembalikan capaian akses telepon genggam Indonesia ke kondisi tahun 2015-2016.

Tingkat akses telepon genggam di perkotaan lebih baik dibandingkan perdesaan. Pada 2020, sekitar 7 dari 10 penduduk perkotaan telah memiliki/menguasai telepon genggam. Sementara di perdesaan, akses telepon genggam hanya dinikmati oleh 5 dari 10 penduduk. Namun peningkatan kepemilikan telepon genggam di perdesaan sebenarnya kuat karena sejak 2015-2019, rata-rata pertumbuhan tahunan kepemilikan telepon genggam di pedesaan mencapai 3,66%, sementara di perkotaan hanya 1,57%.

Jika dibandingkan antar jenis kelamin, akses telepon genggam penduduk perempuan lebih tertinggal dibandingkan laki-laki. Hal ini secara konsisten terjadi antara tahun 2015-2020. Namun ketimpangan akses ini semakin mengecil dari tahun ke tahun.

Tantangan

Perkembangan akses terhadap telepon genggam paling tidak dipengaruhi oleh adanya peningkatan cakupan (coverage) sinyal dan jaringan telepon seluler dan sinyal internet, dan kapasitas masyarakat dan keterjangkauan harga (faktor ekonomi masyarakat).

8. Alokasi Anggaran Responsif Gender

Dukungan anggaran memiliki peranan penting untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan responsif gender. Sejauh ini, pemerintah telah memiliki

langkah afirmatif untuk memastikan, memantau dan melacak anggaran responsif gender (ARG) melalui kerangka hukum nasional berupa Instruksi Presiden No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah No. 8/2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Disamping itu, untuk melacak dan memantau pencapaian kesetaraan gender melalui kebijakan dan ARG dengan sistematis, pemerintah menggunakan strategi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Berdasarkan Peraturan Menteri PPPA No. 2/2013 tentang Panduan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Daerah, PPRG merupakan instrumen yang digunakan untuk mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses perencanaan dan penganggaran. Penyusunan PPRG sendiri mempertimbangkan aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat untuk pembangunan yang lebih berkeadilan.

Indikator 5.c.1* menilai sejauh mana sistem untuk melacak dan membuat alokasi ARG telah terpenuhi di Indonesia. Keberadaan dukungan anggaran yang dapat dipantau dan dilacak memiliki peranan penting untuk mewujudkan kesetaraan gender.

Kondisi Pencapaian

Penilaian terhadap sistem untuk melacak dan membuat alokasi ARG dilakukan dengan mengukur 3 kriteria, yaitu 1) program dan alokasi anggaran untuk mengurangi kesenjangan gender, 2) sistem anggaran untuk mendorong pencapaian kesetaraan gender, serta 3) akses masyarakat terhadap data/informasi alokasi anggaran untuk mencapai kesetaraan gender.

Berdasarkan penilaian menggunakan tiga kriteria di atas, kinerja anggaran responsif gender Indonesia dianggap telah mendekati pemenuhan persyaratan yang ada. Hal ini dikarenakan terpenuhinya dua aspek utama dari total tiga aspek kriteria tersebut yakni pada aspek program dan alokasi anggaran untuk mengurangi kesenjangan gender (kriteria 1), dan sistem anggaran untuk mendorong pencapaian kesetaraan gender (kriteria 2).

Situasi ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi anggaran

responsif gender Indonesia sejauh ini adalah sebagai berikut. Indonesia telah memiliki kebijakan PUG yang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan gender termasuk pada sektor yang tidak khusus menangani kesetaraan gender. Kebijakan ini merupakan strategi yang harus dilaksanakan oleh seluruh KL dan Pemda. Indonesia juga telah mengembangkan berbagai alat dalam kerangka sistem PPRG yang digunakan untuk memastikan keterpaduan aspek gender pada proses anggaran. Kerangka sistem tersebut dibagi menjadi tiga yakni edaran dan dokumentasi ARG, Pernyataan Anggaran Gender (Gender Budget Statement) yang digunakan untuk menginformasikan kegiatan dan alokasi kegiatan untuk menangani permasalahan gender, serta pelacakan belanja anggaran untuk kesetaraan gender. Dalam proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran, alat analisis berupa Gender Analysis Pathway digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan gender berdasarkan APKM beserta faktor penyebabnya.

Dalam menjalankan kebijakan PUG, tidak dialokasikan anggaran tambahan untuk gender. Sumber daya yang tersedia perlu dialokasikan untuk menjamin kesetaraan akses antara perempuan dan laki-laki. Sejalan ini, Kementerian Keuangan sudah menerbitkan edaran atau arahan lain tentang petunjuk penyusunan Anggaran yang Responsif Gender melalui Perdirjen Anggaran No. PER-5/AG/2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran K/L dan Pengesahan DIPA. Untuk mendukung hal ini, Bappenas menyusun pedoman penandaan ARG bagi KL. Data dan statistik gender juga telah digunakan dalam pembuatan kebijakan alokasi anggaran yang responsif gender—disyaratkan untuk menyediakan data terpilah gender. ARG menjadi salah satu anggaran tematik APBN yang ditagging dalam sistem Krisna Renja KL.

Tantangan

Sebagai instrumen yang akan digunakan untuk mengintegrasikan aspek gender dalam pembangunan, PPRG diujicobakan pada tujuh kementerian/lembaga dan empat pemerintah provinsi sepanjang periode 2009–2010. Ketujuh kementerian/lembaga tersebut merupakan Kementerian PU, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian PPPA, Kementerian Pertanian, dan Bappenas. Sedangkan empat provinsi yang menjadi wilayah ujicoba merupakan Banten, Yogyakarta, Jawa

Tengah, dan Jawa Timur. Ujicoba PPRG tersebut dilakukan dengan memasukkan aspek analisis gender dan Gender Budget Statement (GBS) dalam perencanaan dan penganggaran.

Tantangan serupa masih dapat ditemukan dalam upaya pengimplementasian ARG pada tingkat daerah (Khaerah & Mutiarin, 2017). Beberapa tantangan yang muncul berkaitan dengan kapasitas birokrasi dalam memahami perspektif gender dalam penganggaran. Hal ini disebabkan oleh pemahaman pengambil kebijakan mengenai situasi keadilan dan kesetaraan gender serta minimnya derajat partisipasi perempuan dalam urusan publik. Persepsi pemerintah daerah mengenai gender juga mengakibatkan identifikasi ARG sebagai alokasi anggaran yang ditujukan khusus untuk perempuan (Susiana, 2015). Padahal anggaran khusus target gender hanya salah satu dari tiga kategori yang termasuk dalam ARG. Hal tersebut memicu pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan program yang hanya bersifat insidental, seperti lokakarya, alih-alih program yang memiliki keberlanjutan. Selain itu, terdapat tantangan lain berupa kurangnya fasilitasi untuk melibatkan masyarakat dalam proses penganggaran yang secara tidak langsung menciptakan dominasi struktur.

Pelaksanaan PPRG masih menemui pelbagai kendala. Salah satu kendala utama yang ditemui merupakan perlunya penguatan dasar hukum berupa kebijakan daerah yang menjadi turunan dari Instruksi Presiden No. 9/2000 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15/2008 (Khaerah & Mutiarin, 2017; Nurhaeni & Habsari, 2013). Dengan adanya peraturan turunan pada tingkat daerah, maka struktur birokrasi akan mendorong disposisi pemangku kebijakan di masing-masing SKPD untuk melaksanakan perencanaan dan penganggaran responsif gender. Selain itu, koordinasi antar institusi juga diharapkan dapat berjalan lebih baik sehingga struktur birokrasi yang ada akan menguatkan penyusunan ARG.

C. Best Practice

Pemerintah Daerah DIY berupaya untuk mensinergikan pengembangan desa yang selama ini telah berjalan sesuai dengan tugas fungsi masing masing OPD yang terlibat. Dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan dana keistimewaan untuk kesejahteraan rakyat maka pengembangan desa budaya disinergikan dengan desa wisata, desa preneur dan desa prima. Sehingga pengembangan desa dapat

berjalan seiring dari faktor budaya, pariwisata, pemberdayaan ekonomi kewirausahaan dan pemberdayaan perempuan. Hal ini didukung melalui regulasi dan koordinasi pelaksanaan antara OPD yang terlibat.

2.6. Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak

A. Pengantar

Target pada Tujuan 6 terdiri dari : (6.1) pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua; (6.2) pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan; (6.3) pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global; (6.4) pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air; (6.5) Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas sesuai kepantasan; dan (6.6) Pada tahun 2030, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.

B. Capaian

1. Akses Air Minum dan Sanitasi Aman

Akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman merupakan salah satu infrastruktur dasar untuk memastikan kesehatan masyarakat serta meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM). Penyediaan akses air minum dan sanitasi perlu didukung oleh ketersediaan sumber daya air yang mencukupi baik dari sisi

kualitas dan kuantitas, pencegahan pencemaran terhadap sumber-sumber air baku dari pencemaran, dan tutupan vegetasi untuk menjaga, memelihara dan menjamin ketersediaan air baku.

Rumah tangga memiliki akses air minum aman apabila rumah tangga menggunakan sumber air layak, lokasi sumber berada di dalam atau di halaman rumah, tersedia setiap dibutuhkan, dan kualitas sumber air memenuhi syarat kualitas air minum. Akses layak dasar adalah apabila rumah tangga menggunakan sumber air minum layak dengan waktu pengambilan 30 menit atau kurang. Akses air minum layak terbatas adalah apabila rumah tangga menggunakan sumber air minum layak dengan waktu pengambilan air lebih dari 30 menit. Sumber air minum layak adalah jika rumah tangga menggunakan sumber air minum utama berupa ledeng, perpipaan, perpipaan eceran, kran halaman, hidran umum, air terlindungi, dan penampungan air hujan. Sumber air minum terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindungi, dan mata air terlindung. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak sumber air untuk mandi/cuci berasal dari ledeng, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan.

Rumah tangga memiliki akses sanitasi aman apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T). Akses Layak Sendiri adalah: (i) apabila rumah tangga (di perkotaan atau di perdesaan) menggunakan fasilitas sendiri, dimana bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik; (ii) untuk di perdesaan, apabila rumah tangga menggunakan fasilitas sendiri, dimana bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa dan bangunan bawahnya lubang tanah. Akses Layak Bersama adalah: (i) apabila rumah tangga (di perkotaan atau di perdesaan) menggunakan fasilitas bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dimana bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik atau IPALD; (ii) khusus di perdesaan, apabila rumah tangga menggunakan fasilitas bersama rumah tangga lain tertentu, dimana bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa dan bangunan bawahnya

lubang tanah.

Capaian Air Minum dan Sanitasi

Target 6.1. Mengusahakan akses air bersih semesta untuk semua masyarakat di mana pun. Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua Target ini diukur dengan dua indikator yaitu persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan penambahan kapasitas air baku:

Tabel 2.25.

Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota 2018-2022

Kab/Kota	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kulon Progo	119.765	143.705	142.599	141.113	138.453
Bantul	288.430	310.654	321.826	336.263	249.884
Gunungkidul	132.832	158.194	177.346	188.074	286.126
Sleman	344.026	348.880	399.801	383.672	427.596
Kota Yogyakarta	122.864	136.153	143.348	143.348	149.793
DIY	1.001.149	1.097.586	1.184.919	1.186.273	1.251.851

Sumber : DPUP ESDM DIY, 2022

Tabel 2.26.

Penambahan Kapasitas Air Baku Menurut Kabupaten/Kota 2018-2022

Kab/Kota	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
DIY	16,09	403,86	20	56,56	0

Sumber : DPUP ESDM DIY, 2022

Target 6.2 mengusahakan sanitasi yang baik terutama bagi masyarakat rentan dan perempuan. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan Target 6.2 diukur dengan tiga indikator.

Tabel 2.27.

Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota 2018-2022

Kab/Kota	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kulon Progo	128.820	143.593	139.663	139.957	129.441
Bantul	285.150	283.984	306.459	302.073	283.850
Gunungkidul	229.104	249.212	241.838	241.269	237.951
Sleman	373.003	349.926	401.130	400.988	369.275
Kota Yogyakarta	131.684	134.916	142.279	141.845	122.445
DIY	1.146.736	1.161.632	1.231.368	1.227.799	1.142.962

Sumber : DPUP ESDM DIY, 2022

Indikator target 6.3. pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global Peningkatan kualitas air. Target ini diukur dengan satu indikator, yakni kualitas air sungai. Tren dari indeks kualitas air sungai cenderung mengarah ke pemburukan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menambahkan, bahwa kualitas sungai di DIY terus menurun kualitasnya sejak tahun 2017 dengan kontributor terbesar yaitu buangan limbah rumah tangga.

Indikator 6.4. pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi

penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air. Target ini diukur dengan Kesesuaian izin perusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang.

Tabel 2.28.

Kesesuaian Izin Perusahaan Air Tanah dan Pertambangan Terhadap Rencana Tata Ruang Menurut Kabupaten/Kota 2018-2022

Kab/Kota	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kulon Progo	7	11	15	15	23
Bantul	3	13	19	29	30
Gunungkidul	4	10	3	7	8
Sleman	9	11	31	31	45
Kota Yogyakarta	4	4	3	11	9
DIY	27	49	71	93	115

Sumber : DPUP-ESDM

Tabel 2.29..

Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal 2018-2022

	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
DIY	1	1	1	3

Sumber : DPUP-ESDM

Target 6.5 bertujuan untuk menerapkan pengelolaan sumber daya air secara kolaboratif dengan indikator jumlah kelompok masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam mengelola sungai. Pada tahun 2018-2020, jumlah kelompok masyarakat yang ikut berpartisipasi mengelola sungai tetap konsisten berada di atas target.

Tabel 2.30.

Jumlah Kelompok Masyarakat Sekitar Sungai yang Berpartisipasi dalam

Pengelolaan Sungai 2018-2022

	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
DIY	14	14	104	104	104

Sumber : DPUP-ESDM

C. Tantangan

Tantangan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Tantangan dalam penyediaan air minum. Tantangan penyediaan air minum antara lain masih lemahnya tata kelola dan kelembagaan penyelenggaraan air minum serta rendahnya komitmen dan kapasitas pemerintah daerah sebagai penyelenggara utama dari Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Diperlukan upaya percepatan penyediaan akses air minum untuk dalam rangka mencapai Target Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) serta untuk memenuhi kebutuhan air minum aman yang semakin meningkat. Sementara itu, kuantitas dan kualitas sumber air baku mengalami penurunan akibat pengelolaan daerah tangkapan air yang belum optimal. Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab utama dalam penyediaan akses air minum aman untuk masyarakat perlu meningkatkan komitmen dan kapasitasnya melalui pengintegrasian target dan sasaran penyediaan air minum nasional dalam dokumen perencanaan daerah, memberikan prioritas melalui alokasi APBD, serta memberikan dukungan kepada penyelenggara.

Tantangan lainnya adalah kapasitas penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang belum optimal. Pada tahun 2020, BUMD Air Minum yang berkinerja sehat baru 61,76%. Diperlukan peningkatan kinerja BUMD Air Minum dan penyelenggara SPAM lainnya (UPTD, Bumdes, Kelompok Masyarakat, dan lain lain) baik dalam hal teknis pengembangan dan pengelolaan SPAM, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan sumber daya manusia. Pada saat ini, sebagian besar BUMD Air Minum belum didukung dengan tarif air minum yang dapat memenuhi kebutuhan untuk operasional dan pemeliharaan. Dalam rangka mencapai target TPB/SDGs, penyelenggara SPAM diharapkan mampu untuk menyediakan akses air minum aman, dengan menyusun Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) dan melakukan Pengawasan Kualitas Air Minum (PKAM).

Belum optimalnya laju peningkatan sambungan rumah melalui sistem perpipaan berdampak pada meningkatnya penggunaan air kemasan dan air isi ulang untuk air minum, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Data BPS untuk akses air minum perpipaan di perkotaan dan di perdesaan menunjukkan besarnya ketergantungan masyarakat pada air kemasan (termasuk air isi ulang). Dalam rangka meningkatkan demand masyarakat untuk mengurangi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), diperlukan upaya edukasi kepada masyarakat untuk dapat mengakses air minum aman melalui sistem air minum jaringan perpipaan atau sistem air minum bukan jaringan perpipaan terlindungi.

Tantangan dalam penyediaan sanitasi

Tantangan penyediaan akses sanitasi layak dan aman secara umum adalah belum optimalnya peningkatan akses layanan sanitasi dilihat dari berbagai aspek, mulai dari teknis, perilaku masyarakat, pendanaan, kelembagaan dan regulasinya. Berdasarkan data Susenas BPS 2020 yang diolah Bappenas, persentase rumah tangga yang praktik BABS di tempat terbuka adalah sebesar 6,19%. RPJMN 2020-2024 menetapkan target 0% rumah tangga harus sudah menghentikan praktik BABS di tempat terbuka.

D. Best Practice

Program Jambanisasi di DIY diselenggarakan di semua kabupaten dan kota, sebagai contoh yang dilakukan di Kabupaten Sleman. Pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022, Pemerintah Kalurahan Sidoluhur dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman serta Bank BPD DIY sebagai pihak penyalur menyelenggarakan Sosialisasi Bantuan Jambanisasi yang bertempat di Pendopo Kalurahan Sidoluhur. Bantuan Jambanisasi ini bersumber dari Bantuan Keuangan Daerah bersifat Khusus untuk Jambanisasi yang dimaksudkan untuk mendukung program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Adapun sasarannya adalah yaitu masyarakat penerima bantuan sosial berbasis pada data DTKS. Adapun alokasi bantuan untuk Kalurahan Sidoluhur sebanyak 39 Penerima dengan nominal bantuan sebesar Rp 4.000.000,- per penerima. Pada kegiatan ini ,penerima bantuan jambanisasi dibuatkan nomor rekening BPD DIY yang nantinya akan digunakan untuk pencairan yang akan dilaksanakan pada bulan Juni. Sedangkan pelaksanaan pembangunan jambanisasi

akan dilaksanakan pada Juli hingga September dengan dimonitoring dan evaluasi dari Dinas Kesehatan. Penggunaan dana bantuan tersebut hanya untuk pembangunan jamban sesuai dengan ketentuan teknis yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.

2.7. Energi Bersih dan Terjangkau

A. Pengantar

Sektor energi dan sumber daya mineral merupakan sektor strategis dan menjadi andalan dalam mendukung pembangunan dan perekonomian nasional. Seluruh kegiatan perekonomian maupun kegiatan-kegiatan yang lain memerlukan energi untuk dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, menjamin akses energi yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan untuk semua sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional, baik pada pilar pembangunan ekonomi maupun pilar pembangunan lainnya.

B. Capaian

Rasio Elektrifikasi (RE) adalah salah satu indikator utama pembangunan ketenaga listrikan yang menunjukkan perbandingan jumlah rumah tangga yang sudah berlistrik baik dari listrik PLN maupun non-PLN dengan jumlah rumah tangga total. Target 7.1. Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal, dan modern diukur dengan dua indikator:

Tabel 2.31.

Persentase Rumah Tangga Berakses Listrik Menurut Kabupaten/Kota 2018-2022

Kab/Kota	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Kulon Progo	99,99	99,99	99,99	99,99
Bantul	99,99	99,99	99,99	99,99
Gunungkidul	99,99	99,99	99,99	99,99
Sleman	99,99	99,99	99,99	99,99
Kota Yogyakarta	99,99	99,99	99,99	99,99

Kab/Kota	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
DIY	99,99	99,99	99,99	99,99

Sumber: PLN, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Dinas PUPESDM DIY

Tabel 2.32.

Penambahan Jumlah Rumah Tangga yang Menikmati Listrik Menurut Kabupaten/Kota 2018-2022

Kab/Kota	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kulon Progo	407	327	190	97	158
Bantul	85	242	277	264	511
Gunungkidul	1830	777	1246	1434	452
Sleman	390	245	130	127	123
Kota Yogyakarta	17	0	0	0	0
DIY	2729	1591	1843	1944	1244

*)data s.d November 2022

Sumber: Dinas PUPESDM DIY

Target 7.1 dalam RAD TPB DIY diukur dengan dua indikator turunan yaitu:

Tabel 2.33.

Bangunan/gedung Pemerintah, Komersial, dan Industri yang Telah Diaudit Energi Menurut Kabupaten/Kota 2018-2022

Kab/Kota	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kulon Progo	0	0	0	0	0
Bantul	2	4	0	0	0
Gunungkidul	0	0	0	0	0
Sleman	5	3	0	0	0

Kab/Kota	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Yogyakarta	3	3	0	0	0
DIY	10	10	0	0	0

*) s.d tahun 2017 terdapat 42 Gedung pemerintah yang telah di audit energi

Sumber: Dinas PUPESDM DIY

Tabel 2.34.
Penambahan Izin Ketenagalistrik Sesuai Ketentuan
Menurut Kabupaten/Kota 2018-2022

Kab/Kota	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kulon Progo	2	4	3	4	8
Bantul	2	9	16	17	19
Gunungkidul	1	-	1	1	2
Sleman	6	14	17	22	32
Kota Yogyakarta	4	3	8	16	14
DIY	15	30	45	60	75

Sumber: Dinas PUPESDM DIY

Rasio penggunaan gas rumah tangga merupakan indikator untuk menggambarkan proporsi rumah tangga yang telah menggunakan gas sebagai bahan bakar untuk memasak terhadap total rumah tangga secara keseluruhan. Hasil Susenas 2021 menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga di D.I. Yogyakarta telah menggunakan energi yang ramah lingkungan. Sebanyak 76,65 persen rumah tangga di wilayah ini telah menggunakan bahan bakar elpiji untuk memasak. Disamping itu, terdapat 0,97 persen rumah tangga yang menggunakan listrik untuk keperluan memasak. Namun demikian, masih terdapat 16,16 persen rumah tangga yang menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar untuk memasak. Selain itu juga terdapat 0,11 persen rumah tangga yang menggunakan

bahan bakar fosil berupa minyak tanah untuk keperluan memasak (BPS DIY 2022).

Salah satu tolok ukur penyediaan energi bersih dan berkelanjutan dapat dilihat dari bauran energi terbarukan. Dalam hal ini dapat diukur dari pangsa Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam pasokan energi primer atau Total Primary Energy Supply (TPES).

Tabel 2.35.

Penambahan Izin Ketenagalistrikan Menurut Kabupaten/Kota 2018-2022

Kab/Kota	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kulon Progo	2	0	5	2	5
Bantul	5	16	10	8	11
Gunungkidul	2	0	9	5	5
Sleman	13	41	22	44	51
Kota Yogyakarta	21	26	9	24	54
DIY	43	85	55	83	126

Sumber: Dinas PUP ESDM DIY

C. Best Practice

Beberapa potensi energi alternatif yang dapat dikembangkan di wilayah pesisir DIY antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), serta Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB). Potensi tenaga air di DIY yang dapat dimanfaatkan untuk PLTMH mencapai 763,6 KW. Potensi intensitas radiasi matahari mencapai 4,5KWH/m² dengan potensi radiasi maksimum terjadi pada jam 10.00-14.30 hampir diseluruh wilayah untuk pengembangan PLTS. Kapasitas potensi PLTB di sepanjang pantai Yogyakarta mencapai 10 MW dengan kecepatan angin sebesar 2,5 – 4m/s, sedangkan di Sundak, Srandakan, Baron dan Pantai Samas kapasitas potensi PLTB mencapai 10 hingga 100 MW dengan kecepatan angin sebesar 45 m/s. Selain itu, energi

gelombang laut juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber energi alternatif, terutama di kecamatan Saptosari.

Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya terdiri atas kawasan strategis kasultanan dan kawasan strategis kadipaten. Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan ekonomi terdiri atas Kawasan Perkotaan Yogyakarta, Kawasan Temon-Prambanan, Kawasan Tempel- Parangtritis, dan Kawasan Pantai Selatan DIY. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri atas Kawasan Bentang Alam Karst dan Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi yaitu Kawasan Pantai Selatan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Bayu dan Gelombang Laut di Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul.

2.8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

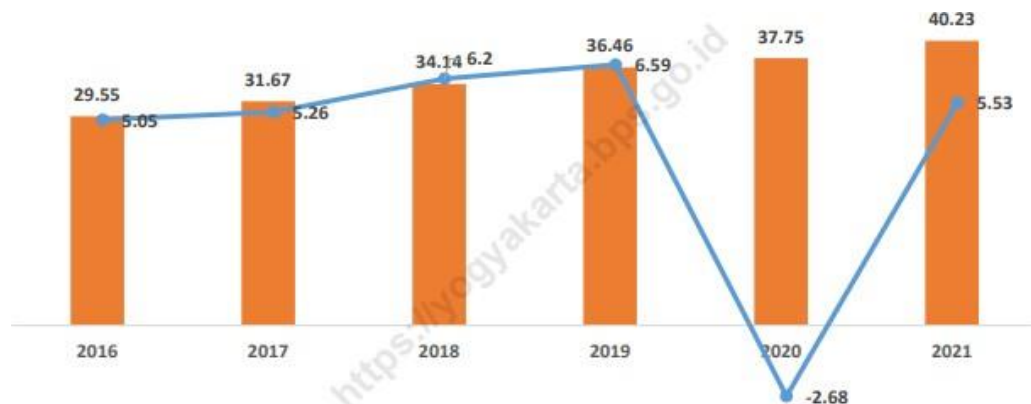
A. Pengantar

Pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif menjadi salah satu target dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Tujuan 8 meliputi target-target seperti mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita, menciptakan tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, meningkatkan kebijakan pembangunan dan mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja yang semakin layak, mendorong formalisasi dan pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan (NEET), mengurangi pekerja anak, mempromosikan pariwisata berkelanjutan, dan memperkuat lembaga keuangan. Bagian ini tidak membahas isu pola konsumsi berkelanjutan yang akan dibahas pada Tujuan 12.

Adanya pandemi COVID-19 berimplikasi kepada menurunnya pencapaian pada sebagian besar indikator yang termasuk ke dalam tujuan ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga kebijakan yang mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional yang bersifat inklusif, merata dan berkelanjutan pada masa pemulihan pasca pandemi COVID-19 menjadi sangat krusial.

B. Capaian

1. Perkembangan ekonomi makro DIY



Sumber: BPS 2022

Gambar 2.3.

Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB per Kapita D.I. Yogyakarta, 2016 - 2021

Gambar 2.3 menunjukkan perkembangan pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita DIY Seiring dengan pelonggaran aktivitas masyarakat, kegiatan perekonomian D.I. Yogyakarta juga mengalami pemulihan. Setelah sempat mengalami kontraksi pada tahun 2020 pada awal merebaknya Covid19, perekonomian wilayah ini kembali mencatatkan pertumbuhan positif. Pada tahun 2021, kinerja ekonomi D.I. Yogyakarta tumbuh sebesar 5,53 persen (yoy). Pertumbuhan tersebut tercatat lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi nasional

yang sebesar 3,69 persen (BPS DIY, 2022). Pada tahun yang sama, PDRB perkapita juga meningkat menjadi 40,23 juta rupiah. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, PDRB per kapita D.I. Yogyakarta mengalami peningkatan sebesar 6,57 persen.

PDRB per kapita masing-masing Kabupaten dan Kota ditunjukkan pada Tabel 2.51

Tabel 2.36.

PDRB Perkapita DIY 2018-2021

Kab/Kota	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
DIY	25,776	27,010	27,750	28,902

Sumber: BPS DIY, 2022

Target 8.1 berusaha untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang. Dalam RAD TPB DIY, target ini diukur dengan tiga indikator: pertama, Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam PDRB (ADHK), kedua Nilai subsektor kehutanan dalam PDRB DIY (ADHK) dan ketiga Nilai subsektor perikanan dalam PDRB DIY (ADHK).

2. Penciptaan Lapangan Kerja Yang Layak dan Produktif

Target 8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya Target 8.2. bertujuan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi. Target ini diukur hanya menggunakan satu indikator, yaitu laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja. Indikator laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja menunjukkan tingkat produktivitas tenaga kerja dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi. Sejauh ini, masih diperlukan inovasi untuk meningkatkan laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja karena capaian indikator masih jauh dari target

indikator yang telah ditetapkan RAD TPB DIY

Tabel 2.37.

Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota 2018-2022

Kab/Kota	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
DIY	1,36	5,44	-0,47	0,69

Sumber: BPS DIY, 2022

Target 8.3. Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan. Target 8.3. diukur dengan beberapa indikator:

Tabel 2.38.

Proporsi Tenaga Kerja Informal Sektor Non Pertanian DIY 2018-2021

Kab/Kota	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
DIY	43,98	41,26	48,21	46,61

Sumber : Sakernas Agustus 2018-2021 BPS

Tabel 2.39.

Proporsi Tenaga Kerja Formal Menurut Kabupaten/Kota 2018-2021

Kab/Kota	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Kulon Progo	33.40	40.31	35.72	37.15
Bantul	48.87	50.78	47.96	50.72
Gunungkidul	30.12	30.86	23.64	26.68
Sleman	52.58	57.04	49.19	51.78
Kota Yogyakarta	60.69	60.17	49.82	51.81
DIY	45.55	48.36	42.59	44.64

Sumber: Sakernas Agustus 2018-2021 BPS,

Tabel 2.40.

Proporsi Tenaga Kerja Informal Sektor Pertanian Menurut Kabupaten/Kota 2018-2021

Kab/Kota	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
DIY	95,20	95,73	93,80	94,61

Sumber: :Sakernas Agustus 2018-2021 BPS

Target 8.5. Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. Indikator yang digunakan adalah: upah rata-rata per bulan, tingkat pengangguran terbuka, dan persentase setengah pengangguran.

Tabel 2.41.

Upah Rata-rata Per Bulan Menurut Kabupaten/Kota 2018-2021

Kab/Kota	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Kulon Progo	2.085.957	2.251.571	2.169.284	2.191.503
Bantul	2.179.986	2.142.792	2.196.731	2.308.531
Gunungkidul	1.836.480	1.816.012	1.814.919	1.980.857
Sleman	2.128.70	2.632.130	2.595.048	2.370.116
Kota Yogyakarta	2.210.543	2.317.449	2.267.519	2.252.574
DIY	2.112.551	2.307.500	2.308.710	2.272.425

Sumber:Sakernas Agustus 2018-2021, BPS

Tabel 2.42.

Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota 2018-2022

Kab/Kota	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kulon Progo	1.51	1.80	3.71	3.69	2.80
Bantul	2.76	3.07	4.06	4.04	3.97

Gunungkidul	2.11	1.96	2.16	2.20	2.08
Sleman	4.41	3.98	5.09	5.17	4.78
Kota Yogyakarta	6.24	4.95	9.16	9.13	7.18
DIY	3.37	3.18	4.57	4.56	4.06

Sumber: Sakernas Agustus 2018-2021. BPS

Tabel 2.43.

Persentase Setengah Menganggur DIY 2018-2022

Kab/Kota	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
DIY	4,11	3,81	7,67	6,08	4,57

Sumber: Sakernas Agustus 2018-2021, Data tersedia tingkat provinsi

3. Persentase Usia Muda (15-24 Tahun) Yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja, atau Mengikuti Pelatihan (NEET)

Target 8.6. Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan diukur dengan satu indikator, yaitu Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)

Tabel 2.44.

Persentase Usia Muda (15-24) yang Sedang Tidak Bersekolah. Bekerja atau Mengikuti Pelatihan DIY 2018-2021

Kab/Kota	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
DIY	12.52	9.78	12.71	9.89

Sumber: :Sakernas Agustus 2018-2021, BPS

4. Pekerja anak

Target 8.8. Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja

migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya. Persentase pekerja anak menjadi salah satu indikator penting dalam indikator TPB. Hal ini dikarenakan banyak pekerja anak bekerja karena dipaksa dan bekerja di pekerjaan yang tidak layak. Sejatinya juga anak seharusnya mengenyam pendidikan ketimbang bekerja.

5. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu kontributor perekonomian Indonesia. Berdasarkan data BPS, jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2018 didominasi oleh usaha mikro dengan jumlah sebesar 63,5 juta usaha atau sekitar 98,68% dari total usaha yang ada. Secara output, UMKM di Indonesia pada tahun 2019 berkontribusi sebesar 60% terhadap pendapatan nasional. Dari sisi tenaga kerja, UMKM mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja. Besarnya kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional tentunya harus diikuti dengan dukungan dari segala pihak. Salah satunya adalah memastikan UMKM bisa tumbuh dan terus berkembang.

6. Peningkatan Peran Sektor Pariwisata

Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang berkontribusi cukup besar terhadap perekonomian DIY baik dalam berkontribusi terhadap PDRB maupun menyerap tenaga kerja yang cukup besar. Target ini diukur dengan empat indikator yaitu: Meningkatnya nilai sektor akomodasi makan minum dalam PDRB, jumlah wisatawan mancanegara, jumlah wisatawan nusantara dan jumlah belanja (money spending) wisatawan

Tabel 2.45.

Nilai Sektor Akomodasi Makan dan Minum dalam PDRB
Menurut Kabupaten/Kota 2018-2022

Kab/Kota	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022

DIY	9.383.603	9.383.603	8.489.706	9.131.091	3.043.667
-----	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Sumber: Dataku BAPPEDA DIY, 2022

Tabel 2.46.

Jumlah Wisatawan Mancanegara Menurut Kabupaten/Kota 2018-2021

Kab/Kota	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Kulon Progo	44,947	41,753	0	9
Bantul	21,288	4,871	252	57
Gunungkidul	22,759	19,191	3,453	8
Sleman	291,776	233,050	24,044	5,162
Kota Yogyakarta	219,332	252,682	37,008	827
DIY	600,102	551,547	64,757	6,063

Sumber: Dinas Pariwisata, 2022

Tabel 2.47.

Jumlah Wisatawan Nusantara Menurut Kabupaten/Kota 2018-2021

Kab/Kota	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Kulon Progo	1,924,676	1,994,417	56,643	909,098
Bantul	8,819,154	8,007,795	2,265,171	2,819,691
Gunungkidul	3,032,525	3,661,612	1,978,146	1,937,627
Sleman	7,606,312	10,145,104	4,226,075	1,723,256
Kota Yogyakarta	4,533,019	3,963,919	1,329,562	458,435
DIY	25,915,686	27,772,847	9,855,597	7,848,107

Sumber: Dinas Pariwisata, 2022

7. Kapasitas Lembaga Keuangan Domestik

Menurut studi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2020), masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan akses terhadap layanan keuangan karena tidak tahu cara, fungsi dan manfaatnya. Selain masalah akses, tingkat pemahaman atau literasi keuangan penduduk Indonesia juga masih sangat rendah meskipun telah mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini sesuai dengan hasil survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (2020) menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia pada tahun 2019 tergolong masih rendah, dengan indeks literasi

keuangan penduduk Indonesia sebesar 38,03% walaupun memiliki peningkatan dari tiga tahun sebelumnya yang mencapai 29,7%.

Rendahnya tingkat literasi keuangan yang dimiliki oleh masyarakat di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Studi yang dilakukan oleh BKF dan LPEM UI (2020) menunjukkan bahwa rendahnya literasi keuangan di Indonesia dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat akan produk keuangan yang sangat rendah, berkorelasi positif dengan tingkat pendidikan, serta sangat dipengaruhi oleh pengalaman masyarakat pernah membeli atau memanfaatkan produk keuangan yang ada. Sehingga hubungan antara akses dan juga literasi menjadi sangat erat kaitannya.

C. Best Practice

Mesin penggerak ekonomi daerah DIY adalah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan proporsi jenis usaha hingga sebesar 92% dari total jenis usaha yang ada di DIY. UMKM memegang kunci dinamisasi laju perekonomian daerah yang pergerakannya sudah terbukti stabil dan tahan banting. DISKOP UKM DIY bagi pelaku Koperasi dan UMKM di DIY memiliki inovasi platform untuk medigitalisasi pelaku koperasi UMKM di DIY melalui SiBakul yang dirintis pada tahun 2019. Pemerintah DIY juga menggandeng Bank BPD DIY untuk mendorong koperasi dan usaha kecil menengah (KUKM) naik kelas dengan meluncurkan Kartu Mitra Si Bakul Jogja. Dinas Koperasi dan UMKM membentuk Platform Pembinaan KUKM dan peluncuran Kartu Mitra Si Bakul Jogja, menjadi simbolisasi masa transisi dari bisnis konvensional ke bisnis digital. Sejatinya, dengan diluncurkan kartu tersebut, menunjukkan komitmen Bank BPD DIY untuk mendekatkan KUKM dalam memperoleh layanan pembiayaan. Yakni dengan preferensi keringanan bunga dan cicilan, serta kemudahan proses. Tujuan dari pengembangan SiBakul diantaranya :

1. Mendorong agar kegiatan ekonomi DIY dapat terkait dari hulu ke hilir sehingga seluruh sektor bisa menerima manfaat ekonomi.
2. Penguatan KUKM di era digital.
3. Pembinaan KUKM yang efektif
4. Dorong UMKM naik kelas

Sibakul Jogja kini telah bertransformasi menjadi Markethub seiring adanya pandemi Covid-19. Kehadiran SiBakul Jogja Markethub ini merupakan bagian dari

stimulus dari Dinas Koperasi dan UKM (Dinkop UKM) DIY kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar terus memasarkan produknya dengan difasilitasi pemasaran melalui daring. UMKM yang produknya terbeli dibantu dengan keringanan bebas ongkos kirim (ongkir) yang biaya ditanggung Pemda DIY Intinya SiBakul Jogja didesain sebagai media UMKM membantu pemasaran produk-produk yang layak. Sehingga skema free ongkir adalah bentuk investasi Pemda DIY guna lebih memberdayakan UMKM, dalam rangka pemulihan ekonomi dan mendorong tingkat konsumsi masyarakat DIY.

SiBakul Jogja pun menghadirkan tata kelola UMKM modern berbasis data yang valid dalam memenuhi kebutuhan penyusunan kebijakan, integrasi aplikasi dan kolaborasi optimasi potensi Koperasi dan UMKM DIY. SiBakul Jogja sebenarnya sudah ada sejak 2019 lalu, namun pada saat diluncurkan masih dalam skema pendataan UMKM yaitu proses mendata dan membina klaster UMKM. Sebab awalnya ratusan ribu UMKM belum berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dengan adanya SiBakul Jogja maka UMKM sudah berbasis NIK sehingga tiap NIK dapat diketahui jenis usahanya, punya sertifikasi atau tidak dan punya daya saing atau tidak.

Layanan bebas ongkir SiBakul Jogja Markethub sudah menjajaki pasar ekspor luar negeri. Artinya komitmen SiBakul Jogja terhadap pemberdayaan UMKM yang tangguh, sudah sangat serius. Kami sangat berharap SiBakul Jogja menjadi rumah bagi UMKM, tempat berkonsultasi terkait dengan tata kelola bisnis kedepannya sebagai wujud komitmen dan kesungguhan Pemda DIY

2.9. Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi

A. Pengantar

Tujuan 9 dalam kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) difokuskan pada aspek-aspek industri, inovasi, dan infrastruktur dimana ketiga aspek tersebut saling terkait dalam mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan. Pada aspek industri, sasaran-sasaran dipusatkan pada industri manufaktur dan industri berskala kecil sebagai sektor penyerap sebagian besar

tenaga kerja. Aspek infrastruktur menekankan pada ketersediaan infrastruktur dalam mendukung konektivitas transportasi darat, laut, dan udara, serta infrastruktur digital. Sementara aspek inovasi dalam Tujuan 9 menekankan pada tingkat dukungan terhadap riset dan pengembangan sains.

Tujuan 9 TPB/SDGs memiliki peran penting mengingat industrialisasi merupakan mesin utama pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terbangunnya sektor industri mendorong peningkatan produktivitas, menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar, dan menaikkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mempercepat pemberantasan kemiskinan dan pencapaian tujuan pembangunan lain. Infrastruktur merupakan salah satu prasyarat industrialisasi. Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan, dan tangguh mendorong pembangunan sektor industri yang kuat. Keberadaan sektor industri yang tangguh pada akhirnya akan memicu proses peningkatan nilai tambah melalui adopsi dan inovasi sains dan teknologi.

B. Capaian

1. Pembangunan Infrastruktur untuk Konektivitas

Tujuan nomor sembilan diwujudkan RAD TPB DIY ke dalam dua target, yakni target 9.2 mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang, serta target 9.3 meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.

Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang. Target tersebut diukur dengan indikator yaitu: Proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDRB, Laju pertumbuhan PDRB industri pengolahan, dan Proporsi tenaga kerja pada sektor industri pengolahan.

2. Pertumbuhan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan

Target 9.2 yaitu meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar. Indikator yang digunakan adalah Proporsi nilai tambah industri kecil dan menengah terhadap total nilai tambah industri.

Sektor industri sebagai motor pembangunan juga memiliki peran krusial dalam mendukung pencapaian TPB/SDGs lain. Selain kontribusinya terhadap perekonomian secara makro, peran sektor industri juga perlu diarahkan pada upaya mitigasi dampak perubahan iklim. Selain dalam rangka memenuhi komitmen pemerintah terkait pengendalian perubahan iklim dalam kerangka United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), pengembangan sektor industri yang berkelanjutan juga membantu pemerintah dalam pencapaian TPB/SDGs Tujuan 13 mengenai lingkungan. Sinergi antara pencapaian Tujuan 9 tentang industri dan Tujuan 13 tentang lingkungan sangat penting mengingat dampak perubahan iklim dapat mengancam tidak saja lingkungan hidup manusia tetapi juga kinerja sektor industri dalam menopang perekonomian secara luas. Sebaliknya, sektor industri selama ini juga merupakan salah satu kontributor terbesar emisi gas rumah kaca yang mengakselerasi perubahan iklim. Kedepan, pengembangan sektor industri wajib mempertimbangkan faktor lingkungan sehingga tercapai pembangunan industri yang berkelanjutan.

3. Inovasi untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Peran ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) tidak dapat dilepaskan dalam mendorong inovasi untuk mendukung pengembangan industri dan pembangunan infrastruktur. Per tahun 2019 kapasitas adopsi iptek dan penciptaan inovasi Indonesia hanya mampu menduduki peringkat 85 dari 129 negara dengan skor Global Innovation Index (GII) 29.72 dari skala 0-100. Padahal, Indonesia sebagai negara berkembang membutuhkan banyak inovasi yang berdaya guna. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat riset ilmiah.

Riset sendiri terbagi menjadi dua kegiatan, yaitu penelitian dan pengembangan. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan yang berkaitan dengan pemahaman tentang

fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis dan penarikan kesimpulan ilmiah. Sedangkan pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan yang telah terbukti kebenarannya dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam konteks ini, penting untuk diperhatikan bahwa dalam TPB/SDGs Tujuan 9 inovasi diarahkan untuk mampu mendorong tumbuhnya inovasi yang berkontribusi terhadap penurunan emisi, mendorong munculnya teknologi ramah lingkungan, dan memicu adanya program-program berbasis lingkungan. Dalam beberapa tahun terakhir, misalnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menginisiasi sistem pendukung untuk menghadirkan inovasi di bidang lingkungan seperti Sistem Inventori Gas Rumah Kaca (GRK) dan Program Kampung Iklim (Proklim).

2.10. Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah

A. Pengantar

1. Pengurangan Kesenjangan Pendapatan dan Kewilayahan

Tujuan nomor sepuluh dalam tujuan pembangunan berkelanjutan adalah mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara. Indikator ini merupakan indikator yang penting untuk dicermati menimbang ketimpangan di DIY tergolong tinggi. Tujuan 10 dijabarkan ke dalam empat target turunan, yakni:

Target 10.1 : Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional,

Target 10.3 : Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan, dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan, dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut,

Target 10.4 : Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah, dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar, dan

Target 10.7 : Memfasilitasi migrasi dan mobilisasi manusia yang teratur, aman,

berkala, dan bertanggungjawab, termasuk melalui penerapan kebijakan imigrasi yang terencana dan terkelola dengan baik.

Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional., dijabarkan pada beberapa target diantaranya:

B. Capaian

Tabel 2.48.

Rangkuman Indikator 10.1.

Target Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Koefisien Gini	0,441	0,423	0,434	0,441	
Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	12,13	11,7	12,8	12,8	
Desa Mandiri Budaya	56	56	56	76	76

Sumber: *Kajian PIW&PP 2022*

Target 10.3. Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan, dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan, dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut. Target 10.3. dijabarkan dalam beberapa indikator.

Tabel 2.49.

Rangkuman Indikator 10.3.

Target Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran HAM					
Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran HAM perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	0,61	0,62	0,52	0,52	

Sumber: *Kajian PIW&PP 2022*

1. Kebijakan Fiskal dan Sosial Untuk Kesetaraan

Kesenjangan dan kemiskinan masih merupakan agenda pembangunan yang penting, kendati Indonesia kini telah berada dalam kategori negara dengan pendapatan menengah. Beragam kebijakan dan tindakan telah diupayakan dalam pengurangan kesenjangan dan kemiskinan, khususnya dalam satu dekade terakhir. Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah, dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar

Tabel 2.50.
Indikator 10.4.

Target Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	62,18	62,18	62,18	62,18	

Sumber: *Kajian PIW&PP 2022*

2. Kesempatan Yang Sama Dalam Hukum Tanpa Diskriminasi

Target 10.7 diukur hanya menggunakan satu indikator, yakni jumlah fasilitas pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi

Tabel 2.51.
Indikator 10.7.

Target Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah fasilitas pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi	1.543	1.033	173	107	

Sumber: *Kajian PIW&PP 2022*

C. Best Practice

Difagana, akronim dari Difabel Siaga Bencana, adalah organisasi sukarelawan penanggulangan bencana yang berisi penyandang disabilitas. Difagana diinisiasi Dinas Sosial DIY berkolaborasi dengan Handicap Internasional

(Humanity and Inclusion). Dengan pendekatan *peer to peer*, yakni memberdayakan difabel untuk sesama penyandang disabilitas, Difagana menjadi pelopor manajemen penanggulangan bencana inklusif dan aksesibel, yang memiliki sensitivitas terhadap kebutuhan sesama penyandang disabilitas.

Lahirnya Difagana di DIY tidak terlepas dari bencana erupsi Merapi Tahun 2010 yang berdampak pada penyandang disabilitas di lokasi bencana. Pascabencana tersebut, Dinas Sosial DIY menyelenggarakan program pendampingan sosial korban bencana. Akan tetapi, berdasarkan hasil evaluasi, ditemukan ketidakpuasan para penyandang disabilitas korban bencana terhadap kinerja sukarelawan dan pendamping sosial yang notabene bukan penyandang disabilitas. Mereka dianggap kurang mampu memahami, mengomunikasikan, dan memetakan dengan baik kebutuhan kaum disabilitas korban bencana. Program penanggulangan bencana pun akhirnya kurang sensitif dan aksesibel. Di sisi lain, penyandang disabilitas masih menjadi objek pemberian layanan atau bantuan karena dipandang tidak berdaya ketika terjadi bencana. Akibatnya, partisipasi penyandang disabilitas dalam upaya penanggulangan bencana masih rendah. Masalah serupa rentan dialami oleh 18.136 atau 67,5% (Pemutakhiran Data PPKS dan PSKS Tahun 2021, Dinas Sosial DIY) penyandang disabilitas lain di DIY, yang tinggal di lokasi rawan bencana, padahal sebagian dari mereka memiliki potensi dan minat untuk mengambil peran dalam penanggulangan bencana. Berangkat dari hal tersebut, Dinas Sosial DIY menginisiasi pembentukan Difabel Siaga Bencana (Difagana) bekerja sama dengan Handicap Internasional yang saat ini berubah nama menjadi Humanity and Inclusion pada Tahun 2017.

Pendekatan *peer to peer* dengan memberdayakan difabel untuk sesama penyandang disabilitas merupakan hal baru dalam konteks disabilitas dan penanggulangan bencana. Konsep tersebut membuat Difagana unggul sebagai:

- Pelopor manajemen bencana berbasis inklusi
- Pelopor partisipasi aktif difabel dalam penanggulangan bencana, di DIY dan berbagai wilayah di Indonesia.
- Difagana mampu mengomunikasikan dan menjadi penghubung layanan penanggulangan bencana bagi penyandang disabilitas.
- Difagana mampu berempati, memahami, dan memetakan kebutuhan

penyanggah disabilitas korban bencana untuk menyediakan layanan yang tepat, berkualitas, aksesibel dan setara.

- Kepiawaian anggota difagana yang identik dengan 'keterbatasan' karena mereka disabilitas memberikan motivasi tersendiri bagi para korban bencana untuk bangkit dari keterpurukan.
- Pemahaman terhadap kebutuhan sesama penyanggah disabilitas mendorong Difagana menghadirkan Difagana *Disaster Emergency Support* (Difgandes), aplikasi ramah difabel berbasis android sebagai bentuk adaptasi layanan terhadap perkembangan teknologi informasi yang aksesibel untuk membantu penyanggah disabilitas dan kelompok rentan lainnya dalam situasi bencana.

Pada Hari Disabilitas Internasional Tahun 2017, Difagana memperoleh apresiasi dari Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa yang menyebut Difagana sebagai gagasan '*out of the box*' dari Dinas Sosial DIY, dan pertama serta satu-satunya di Indonesia. Tahun 2018, pada acara peringatan HUT Tagana ke-14, Menteri Sosial RI Idrus Marham memuji penampilan Difagana dalam melakukan simulasi penanggulangan bencana yang menyuarakan aksesibilitas. Difagana memperoleh potongan tumpeng pertama dari Idrus Marham sebagai bentuk apresiasi.

Tahun 2021 menciptakan aplikasi Difgandes yg bisa dijangkau se-Indonesia. Di aplikasi tersebut. Aplikasi ini bisa diakses di seluruh wilayah Indonesia tentang berita kebencanaan se-Indonesia, notifikasi kebencanaan se-Indonesia. Difgandes tidak terbatas wilayah layanan tertentu, misal ada bencana dimanapun, kalau ada aduan dan membutuhkan layanan Difagana, siap untuk membantu. Pada Tahun 2017 Difagana dibentuk, 2018 ditugaskan membantu di Lombok NTB, 2019 ditugaskan membantu di Sulawesi Selatan. Dalam aplikasi tersedia fitur titik kumpul. Meng guide difabel untuk menuju titik kumpul evakuasi terdekat. Saat ini baru di wilayah DIY yg didaftarkan. Tetapi jika ada wilayah lain di luar DIY didaftarkan maka bisa diakses.

2.11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan

A. Pengantar

Kota dan permukiman memiliki peran penting dalam menjamin kualitas kehidupan manusia. Terlebih saat ini sudah lebih dari separuh penduduk dunia tinggal di kota dan kawasan perkotaan. Kota tidak hanya menjadi habitat bagi manusia dan beragam keanekaragaman hayati lainnya, tetapi juga sebagai sarana bertransaksi ekonomi, interaksi sosial, serta penjagaan ekosistem alam secara berkelanjutan. Di samping itu, dengan konsentrasi penduduk yang begitu besar dan dengan berbagai latar belakang, kota menawarkan beragam peluang bagi penduduknya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan serta mendorong terciptanya kreativitas dan inovasi baru.

Urbanisasi adalah salah satu tren paling transformatif yang terjadi di seluruh dunia, khususnya di negara-negara yang secara ekonomi sedang berkembang seperti Indonesia. Saat ini, sudah lebih dari setengah dari total penduduk Indonesia tinggal di kawasan perkotaan. Angka tersebut akan terus meningkat dan pada tahun 2030, saat periode Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan – TPB) berakhir, persentase penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan di Indonesia akan mencapai sekitar 63,4% (Bappenas, BPS, dan UNFPA, 2013). Dominasi penduduk perkotaan tersebut menunjukkan urgensi untuk membuat lingkungan perkotaan menjadi inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan sebagaimana yang ingin diwujudkan melalui Tujuan 11 SDGs.

TPB/SDG 11 (yang selanjutnya disebut Tujuan 11) meliputi target yang ingin dicapai untuk mewujudkan kota dan permukiman yang berkelanjutan pada tahun 2030 dan mencakup perbaikan dari sisi kelayakhunian dan keberlanjutan kota yaitu dari sisi perumahan dan permukiman, transportasi publik, efisiensi penggunaan lahan, ketangguhan terhadap bencana, kualitas lingkungan, ketersediaan RTH, penguatan perencanaan dan juga kebijakan terkait bangunan dan gedung. Pelaksanaan Tujuan 11 berkaitan erat dengan berbagai kegiatan dari institusi lintas sektor yang terlibat dalam pembangunan perkotaan seperti Kementerian/Lembaga diantaranya Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BNPB, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Perhubungan, pelaku usaha dan filantropi, serta lembaga nonpemerintah.

B. Capaian

1. Akses Terhadap Rumah Layak Huni dan Terjangkau

Target 11.1 mengukur tentang akses masyarakat terhadap rumah yang layak untuk dihuni dan terjangkau. Adapun definisi rumah layak huni, sesuai dengan Metadata II, diukur melalui beberapa kriteria kelayakan, antara lain:

1. Ketahanan bangunan (durable housing).
2. Kecukupan luas tempat tinggal (sufficient living space) yaitu luas lantai perkapita $\geq 7,2$ m².
3. Memiliki akses air minum layak.
4. Memiliki akses sanitasi layak.

Di samping itu, terdapat 2 (dua) kriteria hunian terjangkau yang akan terus dikawal, yaitu keamanan bermukim berupa bukti kepemilikan rumah serta pengeluaran hunian yang tidak melebihi dari 30% total pengeluaran rumah tangga.

2. Akses Terhadap Transportasi Publik

Target 11.2 diterjemahkan ke dalam dua indikator, yaitu proporsi populasi yang mendapat akses yang nyaman pada transportasi publik serta persentase penduduk terlayani transportasi umum. Akses transportasi yang nyaman didekati dengan jarak terhadap fasilitas transportasi publik seperti halte atau stasiun dalam radius 500 meter. Kedua indikator ini dapat mencerminkan kemudahan masyarakat dalam mengakses transportasi publik dan apakah kemudahan akses tersebut dapat mendorong lebih banyak penduduk untuk menggunakan transportasi publik dan meninggalkan kendaraannya.

3. Urbanisasi Inklusif

Target ketiga terkait urbanisasi yang inklusif yang diukur melalui rasio perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk juga belum dapat diukur dan dievaluasi pencapaiannya. Lahan terbangun yang dimaksud adalah lahan yang tidak bervegetasi, memiliki tutupan permanen atau semi permanen yang kedap air. Hal ini karena data yang diperlukan, terutama dalam bentuk peta, yang tidak bisa dikumpulkan setiap tahun. Peta yang dibutuhkan yang tersedia adalah pada tahun 2016 dan baru akan diperbarui pada tahun 2024. Kondisi tersebut menyulitkan analisis untuk pencapaian indikator tersebut.

4. Konservasi Warisan Budaya dan Alam

Target keempat terkait warisan budaya diukur melalui pengeluaran per kapita untuk alokasi anggaran pemerintah untuk preservasi, perlindungan, dan konservasi warisan budaya. Sejumlah K/L yang memiliki kegiatan yang berkaitan dengan target ini, antara lain Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ANRI, dan sebagainya. Mempertimbangkan hal tersebut, maka data yang diperlukan perlu diidentifikasi secara lengkap dari berbagai instansi yang memiliki kewenangan terkait upaya preservasi dan konservasi warisan budaya dan alam.

5. Kebencanaan

Target 11.5 diukur dengan dua indikator yaitu jumlah korban (meninggal, hilang, terluka/cedera dan mengungsi akibat bencana alam serta proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB. Kedua indikator ini dinilai telah sesuai dengan target yang ada. Namun demikian, karena bencana sifatnya tidak bisa diprediksi, kedua indikator dalam target ini hanya bisa dihitung ketika bencana terjadi.

6. Dampak Lingkungan Perkotaan

Target 11.6 mengenai dampak lingkungan perkotaan ini diterjemahkan ke dalam empat indikator, utamanya terkait pengelolaan sampah dan kualitas udara. Indikator mengenai pengelolaan sampah mencakup persentase rumah tangga perkotaan yang terlayani pengelolaan sampah dan persentase sampah nasional yang terkelola. Adapun indikator terkait kualitas udara meliputi rata-rata tahunan PM10 dan Indeks Kualitas Udara. Keempat indikator tersebut sangat relevan bagi kehidupan perkotaan, sehingga arah pembangunan kota tidak lagi mendegradasi kualitas lingkungan hidup, baik itu dari segi persampahan maupun kualitas udara.

7. Ruang Terbuka Publik dan Ruang Terbuka Hijau

Target ketujuh dalam Tujuan 11 ini terkait pentingnya ruang terbuka publik dan Ruang Terbuka Hijau di perkotaan. Target ini diterjemahkan ke dalam dua indikator: proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua dan proporsi penduduk

yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir. Yang dimaksud dengan ruang terbuka di perkotaan meliputi ruang terbuka hijau, ruang terbuka non hijau dan ruang untuk jalan. Secara lebih khusus, amanat UU no. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa setiap kota wajib untuk menyediakan 30% lahannya untuk RTH, yang mana 20% disediakan oleh publik dan 10% dari privat.

8. Perencanaan Pembangunan dan Lingkungan

Target 11.a diterjemahkan menjadi indikator proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah dilengkapi KLHS. Sejak 2017, setiap rancangan RTRW yang masuk ke Kementerian ATR/BPN untuk mendapatkan persetujuan perlu dilengkapi dengan dokumen KLHS sebagai salah satu syarat perlindungan lingkungan skala kawasan.

9. Pengurangan Risiko Bencana sesuai Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR)

Target 11.b diterjemahkan menjadi jumlah rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana di Indonesia yang selaras dengan SFDRR. Indikator ini dinilai telah cukup berhasil dijalankan. Pemerintah pusat melalui BNPB telah memiliki Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2044 serta Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) 2015-2019 yang kemudian diteruskan menjadi RENAS PB 2020-2024. Di samping itu, menurut pemantauan UNDRR, skor Indonesia dalam upaya adopsi dan implementasi rencana penanggulangan bencana yang sesuai dengan SFDRR adalah sebesar 0,83 (United Nations for Disaster Risk Reduction, 2021). Artinya, dokumen rencana terkait kebencanaan sudah cukup sejalan dengan komitmen internasional. Selain itu, berdasarkan data hasil perhitungan, pada tahun 2020 telah terdapat 190 kab/kota yang telah menyusun Rencana Penanggulangan Bencana dan pada tahun 2024, ditargetkan akan terdapat 210 kab/kota yang telah menyusun Rencana Penanggulangan Bencana dari total 514 Kab/Kota di Indonesia.

10. Bangunan dan Material Berkelanjutan

Target 11.c mengenai pengaturan terkait penggunaan bangunan dan

material berkelanjutan diterjemahkan ke dalam indikator persentase daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang berkelanjutan, berketahanan, dan menggunakan material lokal. Indikator ini dinilai belum dapat diukur pencapaiannya karena merupakan indikator yang baru diusulkan.

Tujuan nomor sebelas diturunkan ke dalam tiga target dalam RAD TPB DIY, yakni:

- Target 11.4 : Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia,
- Target 11.5 : Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan, dan
- Target 11.b : Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi, dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.

Tabel 2.52.

Indikator Target 11.4

Target Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah kawasan cagar budaya dan warisan budaya dunia	20	17	17	17	17

Sumber: *Kajian PIW&PP 2022*

Tabel 2.53.

Indikator Target 11.5

	Tahun

Target Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase korban meninggal dan hilang terhadap jumlah kejadian bencana	12	0	0	1,2	0
Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY	142.24	140.92	140.92	126.34	
Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY	68,5	72,5	75,26	79	
Jumlah desa/kelurahan tangguh bencana yang terbentuk	228	233	258	283	
Jumlah sistem peringatan dini yang sudah terintegrasi.	0	0	5	5	5
Capaian indeks pemulihan pasca bencana di DIY	66,1	99,41	119,18	123,66	

Sumber: Kajian PIW&PP 2022

Target 11.b diukur dengan dua indikator, yakni jumlah dokumen rencana kontijensi dan peningkatan pengelolaan sampah regional.

Tabel 2.54.
Indikator Target 11.b

Target Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase jumlah dokumen Rencana terhadap 5 (lima) jenis ancaman bencana di DIY.	0	0	40	40	40
Peningkatan Pengelolaan Persampahan Regional (Ton)	NA	600	573,97	660	

Sumber: Kajian PIW&PP 2022

C. Best Practice

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menginginkan menjadi Jogja Smart Province. Dimana konsep Jogja Smart Province menitik beratkan pada Smart Government, Smart Culture, Smart Environment, Smart Economy, smart Living. Prioritas Pengembangan menjadi Jogja Smart Province diantaranya :

1. Peningkatan kualifikasi dan jumlah SDM dengan kualifikasi TI secara terencana dan berkesinambungan;

2. Pengembangan platform integrasi aplikasi-aplikasi yang telah berjalan dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi serta keterpaduan data primer (data utama milik unit kerja);
3. Melakukan perbaikan koneksi internet dan konektivitas intranet antar unit kerja ke kantor Gubernur/Kominfo;
4. Menyediakan kebijakan implementasi TIK yang menyeluruh dan menjangkau seluruh OPD;
5. Pengadaan dan pengembangan sistem untuk mendukung performa pelayanan publik yang maksimal (good and clean government) yang dilakukan oleh Perangkat Daerah;
6. Pengembangan Command Center di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (IDMC);
7. Pengembangan Data Center yang handal;
8. Meningkatkan level pengamanan jaringan lokal dan internet di untuk masing-masing unit kerja;
9. Penambahan dan peremajaan perangkat komputer dan perangkat pendukung.

2.12. Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

A. Pengantar

Sustainable Consumption and Production (SCP) atau konsumsi dan produksi yang berkelanjutan merupakan salah satu subtema aksi menuju perwujudan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) yang telah dicanangkan sejak Deklarasi Rio tahun 1992, yakni adanya komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya yang berkesinambungan. Dalam principle ke-8 Deklarasi Rio untuk Lingkungan Hidup dan Pembangunan pada tahun 1992, disebutkan bahwa "... untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan kualitas hidup lebih baik bagi semua orang, negara- negara harus mengurangi dan menghapus pola konsumsi dan produksi yang tidak berkelanjutan dan mempromosikan kebijakan demografi yang sesuai."

Penerapan SCP di Indonesia dilaksanakan melalui beberapa tahapan intervensi, dimulai dari tahap inisiasi (2013-2014), tahap sistemik (2015-2019), tahap

akselerasi (2020- 2024), hingga tahap pengarusutamaan/mainstreaming (2025-2030). Indonesia telah aktif di berbagai forum Internasional dalam bidang SCP sejak tahun 2001 dan menjadi tuan rumah Asia Pacific Roundtable on SCP (APRSCP) ke-10 pada November 2011 di Yogyakarta. Pada tahun 2013, Indonesia meluncurkan Dokumen Kerangka Kerja 10 Tahun Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan (10YF SCP) di Indonesia 2013-2023 yang memuat peta jalan Indonesia dalam menerapkan konsumsi dan produksi berkelanjutan. Pada tahun yang sama, hasil pertemuan United Nations High Level Panel of Eminent Persons (UN HLPEP) “Post-2015 Development Agenda” di Bali pada Maret 2013, yang dipimpin oleh Presiden RI, menetapkan SCP sebagai salah satu tema dalam “Post-2015 Development Agenda”.

Sejak tahun 2015, intervensi pelaksanaan konsumsi dan produksi berkelanjutan ditandai dengan masuknya SCP dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Selain itu, penerapan SCP juga telah menjadi bagian dari pelaksanaan Rencana Aksi Nasional SDGs 2017-2019 dan berbagai Rencana Aksi SDGs di berbagai daerah. Saat ini, penerapan SCP juga menjadi salah satu bagian dalam Prioritas Nasional (PN) 1, yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan dan Prioritas Nasional (PN) 6, yaitu Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim pada RPJMN 2020-2024 sebagai bagian dari upaya efisiensi penggunaan sumber daya dan pengurangan beban pencemaran terhadap lingkungan hidup serta peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Hal ini ditandai dengan diterapkannya pembangunan rendah karbon (low carbon development, LCD) dalam rencana pembangunan di Indonesia.

B. Capaian

1. Pelaksanaan the 10-Year Framework of Programmes on SCP Patterns

Pelaksanaan 10 YFP SCP dicerminkan dengan peningkatan jumlah kolaborasi tematik quick wins program di Indonesia. Indonesia telah menyusun dokumen 10 YFP SCP sebagai bagian dari komitmen dalam melaksanakan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan. Dokumen 10 YFP SCP Indonesia memuat peta jalan Indonesia dalam mengarusutamakan penerapan SCP dalam agenda pembangunan nasional dan pelaksanaan kebijakan/program nasional prioritas

dengan program tematik “Quick Wins” secara bertahap pada periode waktu 2013–2023.

Sampai tahun 2020, telah terdapat 11 sektor kolaborasi tematik quick wins program SCP di Indonesia yang terdiri dari:

- Sektor Industri, mencakup: Standar Industri Hijau dan dan Low Cost Green Car (LCGC).
- Sektor Kehutanan, mencakup: Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK); Teknik Silvikultur Intensif (SILIN); Hutan Tanaman Energi; serta Jasa Lingkungan Kehutanan.
- Sektor Energi, mencakup: Energi Baru dan Terbarukan.
- Sektor Pariwisata, mencakup: Indonesia Sustainable Tourism (ISTA);
- Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, mencakup: Sustainable Construction and Building.
- Sektor Transportasi, mencakup: Sustainable transport; dan skema International Civil Aviation Organization (ICAO) Carbon Offsetting and Reduction Scheme For International Aviation (CORSIA) atau (ICAO Corsia).
- Sektor Komunikasi dan Informasi, mencakup: teknologi komunikasi informasi yang ramah lingkungan (Green ICT).
- Sektor Inovasi dan Teknologi, mencakup: Teknologi hijau.
- Sektor Keuangan, mencakup: Sustainability Finance.
- Sektor Pertanian, mencakup: Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO);
- Sektor Kelautan dan Perikanan, mencakup: Sustainable Fisheries.

Penerapan industri hijau yang dilakukan melalui konsep produksi bersih (cleaner production) mencakup aplikasi 4R, yaitu Reduce (pengurangan limbah pada sumbernya), Reuse (penggunaan kembali limbah), Recycle (daur ulang limbah), dan Recovery (pemisahan suatu bahan atau energi dari suatu limbah). Upaya pemerintah terkait penerapan industri hijau dilakukan melalui penyusunan Standar Industri Hijau dan adanya Sertifikasi Industri Hijau (SIH) yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian. SIH merupakan salah bentuk insentif non fiskal dari Pemerintah kepada industri yang telah melakukan efisiensi penggunaan sumber daya material (bahan baku dan bahan penolong), energi, air,

proses produksi, manajemen perusahaan, pengelolaan limbah, dan aspek lainnya sehingga tercapai industri yang berkelanjutan.

2. Pengurangan Limbah Pangan dan Kehilangan Makanan

Saat ini, kebijakan ketahanan pangan di Indonesia umumnya fokus pada peningkatan produksi pangan dan belum sepenuhnya meningkatkan pengelolaan kehilangan makanan dan sampah makanan (food loss and waste, FLW). Menurut FAO (2019), kehilangan makanan atau food loss adalah penurunan kuantitas makanan yang dihasilkan makanan yang dihasilkan dari keputusan dan tindakan pemasok makanan dalam rantai makanan, tidak termasuk retail, penyedia layanan makanan dan konsumen. Sampah makanan atau food waste adalah penurunan kuantitas makanan yang dihasilkan dari keputusan dan tindakan pengecer, layanan makanan dan konsumen. Food loss berlangsung dari tahap produksi, tahap pascapanen dan penyimpanan, hingga tahap pemrosesan dan pengemasan. Sementara itu, food waste terjadi saat distribusi dan pemasaran makanan hingga saat dikonsumsi oleh konsumen.

Menurut kajian food loss and waste di Indonesia (Bappenas, 2021), diperkirakan timbulan food loss and waste di Indonesia pada tahun 2000-2019 mencapai 23-48 juta ton/tahun atau 115-184 kg/kapita/tahun. Timbulan terbesar terjadi pada rantai pasok konsumsi (5-19 juta ton/tahun). Persentase food loss selama 20 tahun cenderung menurun, dari 61% pada tahun 2000 menjadi 45% pada tahun 2019 dengan rata-rata sebesar 56%. Sebaliknya, timbulan food waste selama 20 tahun cenderung naik, dari 39% pada tahun 2000 menjadi 55% pada tahun 2019 dengan rata-rata sebesar 44%. Jika ditinjau dari sisi jenis pangan, timbulan FLW terbesar dikontribusikan oleh sektor tanaman pangan, tepatnya dari padi-padian, yaitu sebesar 12-21 juta ton/tahun. Sementara itu, jenis pangan yang paling tidak efisien ialah sektor hortikultura terutama sayur-sayuran – di mana kehilangannya mencapai 62,8% dari seluruh suplai domestik sayur-sayuran yang ada di Indonesia.

3. Pengelolaan Bahan Kimia dan Semua Jenis Limbah yang Ramah Lingkungan

3.a. Peran Aktif Mengikuti Kesepakatan Multilateral Internasional tentang Bahan Kimia dan Limbah Berbahaya

Indonesia mempunyai kepentingan besar dalam berperan aktif mendukung

kesepakatan terkait pengelolaan bahan kimia dan limbah berbahaya. Hal ini disebabkan Indonesia merupakan negara dengan banyak pulau dan secara geografis rentan terhadap datangnya sumber pencemar, termasuk limbah B3, sehingga membutuhkan kerja sama dengan negara lain.

3.b. Persentase Pengurangan dan Penghapusan Merkuri dari Baseline 50 ton Penggunaan Merkuri

Sebagai implementasi peran aktif dalam pengelolaan limbah B3 yang sesuai kesepakatan global, terutama terkait ratifikasi Konvensi Rotterdam dan Konvensi Minamata, Indonesia menjadikan upaya pengurangan dan penghapusan merkuri sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional. Pengurangan merkuri adalah upaya pembatasan merkuri secara bertahap pada kegiatan peredaran merkuri, penggunaan merkuri, dan pengendalian emisi dan lepasan merkuri, sedangkan penghapusan merkuri adalah upaya pelarangan produksi merkuri, penggunaan merkuri, dan/atau penggantian merkuri dengan bahan alternatif yang ramah terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

3.c. Persentase Penurunan Tingkat Konsumsi Perusak Ozon dari Baseline

Bahan kimia yang dikategorikan bahan perusak ozon (BPO) antara lain Chlorofluorocarbons (CFCs), Halon, Carbon tetrachloride (CTC), Methyl chloroform (1,1,1-trichloroethane / TCA), Hydrochlorofluorocarbons (HCFCs), Hydrobromofluorocarbons (HBFCs), Bromochloromethane, dan Methyl bromide. BPO antara lain digunakan sebagai bahan pendingin refrigerasi dan AC, zat pendorong untuk bahan semprotan, pengembang pembuatan busa, bahan pemadam api, fumigant sebagai pembasmi hama, serta sebagai cairan pembersih. Selain kegunaan tersebut, BPO berkontribusi dalam merusak lingkungan. BPO yang lepas ke alam dapat mencapai lapisan stratosfer dan bereaksi dengan ozon (O₃). Hal ini bisa menyebabkan penguraian sehingga jumlah ozon mengalami penurunan. Penurunan ozon ini akan mengurangi peranan pentingnya dalam menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet-B (UV-B) dari matahari, sehingga meningkatkan UV-B yang lolos dan sampai ke permukaan Bumi. Menurut para ahli, setiap 10% penipisan lapisan ozon dapat meningkatkan 20% radiasi UV-B. Bila radiasi UV-B terlalu banyak sampai ke Bumi maka kasus-kasus yang terjadi, antara lain memicu

terjadinya penyakit kanker kulit, katarak mata dan menurunkan tingkat kekebalan tubuh terhadap penyakit infeksi. Selain itu, radiasi UV-B juga dapat menghambat pertumbuhan tanaman sehingga menjadi kerdil, menyebabkan kepunahan plankton yang merupakan sumber makanan utama bagi ikan dan organisme air lainnya, dan mengurangi kemampuan sejumlah organisme dalam penyerapan gas karbondioksida (CO₂) yang merupakan salah satu GRK sehingga berpengaruh pada perubahan iklim.

4. Pengelolaan Limbah B3

Salah satu upaya pengurangan limbah industri di Indonesia dilakukan melalui pengelolaan limbah B3 serta penyusunan kajian upaya pengelolaan limbah B3 di sektor industri. Pada tahun 2020, 95,48% (193,77 juta ton) limbah B3 telah dikelola dari total timbulan sebesar 203,05 juta ton. Capaian pengelolaan limbah B3 yang terkelola ini dipengaruhi oleh perusahaan yang telah menerapkan teknologi bersih sehingga mengurangi penggunaan B3 yang dapat berdampak pada pengurangan timbulan limbah B3. Selain itu, selama 5 tahun terakhir hingga tahun 2020 telah dilakukan pemulihan lahan terkontaminasi seluas ±1,9 juta m² atau setara dengan ±2,9 juta ton limbah B3.

5. Pengurangan Produksi Sampah

Pada tahun 2015, masyarakat Indonesia mulai melakukan pengelolaan sampah terpadu Reduce, Reuse and Recycle (3R) melalui beroperasinya Pusat Daur Ulang (PDU) skala kota dan Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R dengan kapasitas 5 – 20 ton/hari. Pada tahun 2019, KLHK telah mendorong kebijakan perpanjangan tanggung jawab produsen/extended producer responsibility (EPR) di Indonesia yang ditandai dengan adanya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mencapai target pengurangan sampah oleh produsen sebesar 30% dibandingkan timbulan sampah pada tahun 2029. Pengurangan sampah yang dimaksud dilakukan melalui pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali.

6. Praktek Berkelanjutan dalam Siklus Pelaporan Perusahaan

6.a. Laporan Berkelanjutan Perusahaan

Publikasi penerapan praktik-praktik berkelanjutan dilakukan melalui Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report atau SR). Laporan Keberlanjutan adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan. Laporan ini merupakan alat bagi industri keuangan untuk menetapkan tujuan, memonitor kinerja, melakukan evaluasi, dan mengelola perubahan untuk menciptakan kegiatan operasional yang berkelanjutan dan efisien. Laporan Keberlanjutan menjadi sarana bagi industri untuk mengungkapkan informasi kinerja keberlanjutannya secara transparan sehingga dapat mendorong perubahan perilaku dalam mengelola risiko, baik keuangan, sosial maupun lingkungan. Dengan demikian, Laporan Keberlanjutan menjadi salah satu alat ukur bagi pemangku kepentingan (eksternal) dalam melakukan penilaian atas kinerja suatu industri, termasuk industri keuangan. Penyampaian Laporan Keberlanjutan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan konsumen sehingga dapat meningkatkan daya tarik dan daya saing industri keuangan. Laporan Keberlanjutan juga memuat dukungan kegiatan atau program industri keuangan yang sejalan dengan SDGs dan komitmen pemerintah lainnya.

6.b. Perusahaan yang Menerapkan Sertifikasi SNI ISO 14001

Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) ini ditandai dengan banyaknya perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001. Penerapan SNI ISO 14001 berawal dari SNI 19-14001:1996 mengenai Sistem Manajemen Lingkungan (SML) yang memuat persyaratan dan panduan penggunaannya. SNI ISO 14001 mengalami beberapa revisi diantaranya SNI 19-14001:2005 dan terakhir adalah SNI ISO 14001: 2015. ISO 14001 merupakan standar yang disepakati secara internasional dalam menerapkan persyaratan untuk sistem manajemen lingkungan. Berdasarkan Laporan Capaian SDGs 2020 (Bappenas 2020) dilengkapi update capaian SDGs KLHK (2021), jumlah perusahaan yang menerapkan SNI ISO 14001 di Indonesia memperlihatkan kecenderungan yang positif. Selama kurun waktu tahun 2009-2019 jumlah perusahaan di Indonesia yang telah menerapkan SNI ISO 14001 cenderung meningkat dari 1.028 perusahaan (2010) menjadi 2.125 perusahaan (2019).

7. Praktek Pengadaan Publik yang Berkelanjutan

7.a. Produk Ramah Lingkungan Teregister dan Masuk dalam Pengadaan Barang - Jasa Pemerintah

Mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, salah satu tujuan dari Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) adalah meningkatkan pengadaan berkelanjutan. Selanjutnya, pada Pasal 68, dijelaskan bahwa PBJP dilaksanakan dengan memperhatikan aspek berkelanjutan yang terdiri atas: (1) Aspek Ekonomi; (2) Aspek Sosial; dan (3) Aspek Lingkungan. Pengembangan aspek lingkungan dalam pengadaan berkelanjutan salah satunya dicerminkan melalui pengembangan pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan.

Penerapan pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan dimaksudkan untuk mendorong perubahan perilaku dan pola pikir dari sisi konsumsi di jajaran instansi Pemerintah agar lebih efisien dan ramah lingkungan. Penerapan pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan juga bermakna keteladanan perubahan perilaku dari jajaran pemerintah serta pada komunitas – komunitas yang telah terbentuk di masyarakat. Skema yang digunakan sebagai kriteria dalam pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan merupakan kesepakatan bersama antara Kementerian/Lembaga pemilik skema untuk maju bersama mengawal aspek lingkungan dan keberlanjutan secara lintas sektor.

7.b. Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa

Pertumbuhan permintaan barang dan jasa yang ramah lingkungan mendukung pelaksanaan kebijakan/program Green Public Procurement, Green Building, Green Tourism, Green Hotel dan lain-lain. Untuk menunjukkan suatu produk ramah lingkungan, Indonesia telah mengeluarkan logo ekolabel untuk produk ramah lingkungan yang teregister yaitu: (1) Ekolabel Tipe I, Label ini diberikan kepada produk yang telah memenuhi SNI kriteria ekolabel. Sampai bulan April tahun 2021 terdapat 31 produk telah teregistrasi memenuhi Ekolabel Tipe I; (2) Ekolabel Tipe II. Label ini diberikan kepada produk yang memiliki swadeklarasi lingkungan

yang terverifikasi.

8. Informasi dan Kesadaran Terhadap Pembangunan Berkelanjutan

8.a. Satuan Pendidikan Formal dan Lembaga/Komunitas Masyarakat Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup

Kesadaran terhadap pentingnya pola hidup ramah lingkungan dapat dilakukan melalui peningkatan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta pengembangan kapasitas manusia dan kelembagaan. Indikator yang digunakan adalah jumlah satuan pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup. Pendidikan lingkungan hidup merupakan upaya mengubah perilaku dan sikap yang dilakukan oleh berbagai pihak atau elemen masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai lingkungan dan isu permasalahan lingkungan. Harapannya, pendidikan ini pada akhirnya dapat menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelestarian dan keselamatan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Program Adiwiyata merupakan salah satu dari Program KLHK dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan bagi kepentingan generasi sekarang maupun yang akan datang.

8.b. Fasilitas Publik yang Menerapkan Pelayanan Masyarakat (SPM) dan Teregister

Kesadaran akan pola hidup ramah lingkungan juga dapat diintervensi melalui keberadaan fasilitas publik ramah lingkungan yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat. Fasilitas publik merupakan lokus yang ideal dalam melakukan intervensi menuju pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Fasilitas publik merupakan tempat terjadinya interaksi antara perilaku masyarakat selaku pengguna fasilitas publik dengan perilaku pemerintah dan swasta selaku pengelola fasilitas publik. Dengan demikian, fasilitas publik dapat menjadi laboratorium sosial bersama dalam mendorong perilaku produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab.

9. Dampak Pembangunan Berkelanjutan terhadap Pariwisata Berkelanjutan

9.a. Lokasi Penerapan Sustainable Tourism Development

Penerapan sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan telah menjadi mainstreaming untuk pengembangan pariwisata yang berkualitas sesuai arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Sampai dengan tahun 2020, sustainable tourism telah dilaksanakan oleh Kementerian/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam bentuk dukungan pada pembangunan Sustainable Tourism Destinations dan Sustainable Tourism Observatory. Pelaksanaannya difokuskan di beberapa lokasi dalam 10 (sepuluh) Destinasi Pariwisata Prioritas, 8 (delapan) Destinasi Pariwisata Pengembangan, dan Destinasi Revitalisasi Bali. Pelaksanaan, penerapan, dan pendanaan sustainable tourism dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan mitra pembangunan. Untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan serta branding dari konsep sustainable tourism, juga diadakan Indonesia Sustainable Tourism Awards (ISTA) sebagai wadah apresiasi dari pembangunan sustainable tourism, yang mencakup tata kelola destinasi wisata berkelanjutan, pemanfaatan ekonomi untuk masyarakat lokal, pelestarian budaya, pelestarian lingkungan, akomodasi hijau dan kelompok masyarakat sadar wisata. Penerapan pariwisata berkelanjutan juga perlu disertai dengan kesadaran akan pariwisata yang bertanggung jawab (responsible tourism), yang berfokus pada perwujudan destinasi wisata sebagai tempat untuk tinggal dan berwisata. Pembangunan pariwisata bertanggung jawab tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kepuasan wisatawan (tourist satisfaction) namun juga masyarakat di destinasi (community satisfaction), industri, dan lingkungan. Wisata bertanggung jawab melibatkan banyak pihak, seperti operator dan pelaku industri pariwisata, pemerintah, masyarakat sekitar destinasi wisata dan wisatawan yang bertanggung jawab yang dapat membantu perwujudan pariwisata berkelanjutan.

9.b. Rasionalisasi Subsidi Bahan Bakar Fosil

Pemerintah telah berkomitmen terhadap upaya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan sesuai amanat tujuan SDG 12. Upaya tersebut secara selaras diwujudkan dengan menurunkan subsidi bahan bakar fosil secara bertahap dan terus-menerus. Berdasarkan realisasinya, terlihat tren penurunan realisasi jumlah subsidi bahan bakar fosil sebagai persentase PDB di Indonesia. Persentase subsidi bahan bakar fosil terhadap PDB selama tiga tahun terakhir menurun dari 0,65%

(2018) menjadi 0,31% (2020).

C. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan SCP di Indonesia, antara lain: (1) Meningkatkan pemahaman terhadap SCP dan komitmen para pemangku kepentingan; (2) Meningkatkan ketersediaan data dan informasi mengenai pelaksanaan SCP di Indonesia yang belum tersedia secara lengkap; (3) Meningkatkan green infrastruktur termasuk teknologi melalui skema pembiayaan inovatif dan berkelanjutan; (4) Melengkapi NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria) dan panduan operasional mengenai penerapan prinsip-prinsip SCP dalam “business cycle” dan “business process” di pihak pemerintah, masyarakat, dan swasta termasuk UMKM; dan (5) Mengembangkan skema insentif dan disinsentif yang dapat mendorong implementasi SCP.

2.13. Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan

A. Pengantar

Perubahan iklim telah, sedang dan akan dapat menimbulkan dampak yang nyata terhadap masyarakat di semua negara dan wilayah. Dampak perubahan iklim beresiko mengganggu perekonomian nasional dan mempengaruhi kehidupan masyarakat saat sekarang dan akan lebih besar lagi dampaknya di masa mendatang tanpa ada penanganan yang kontinyu dan menyeluruh. Dampak perubahan iklim ini dapat dirasakan mulai dari perubahan pola cuaca, meningkatnya permukaan air laut, kejadian cuaca ekstrim yang semakin sering terjadi, hingga bencana terkait iklim atau hidrometeorologi akibat pemanasan global atau perubahan iklim, seperti banjir, longsor, kekeringan dan kebakaran hutan.

Emisi gas rumah kaca yang menjadi penyebab pemanasan global menurut IPCC (2018) sebagian besar dipicu oleh aktivitas manusia untuk mencapai kesejahteraan global. Aktivitas manusia diperkirakan telah menyebabkan sekitar 1,0°C pemanasan global diatas tingkat pra- industri, dengan kisarannya antara 0.8°C hingga 1.2°C. Namun, pemanasan global kemungkinan besar akan mencapai 1,5°C C antara tahun 2030 dan 2052 jika suhu terus meningkat dengan laju seperti saat

ini. Suhu rata-rata akan terus meningkat sebesar 3-5°C pada akhir abad ini dibandingkan dengan pada era pra-industri. Untuk mempertahankan kenaikan suhu di bawah batas 2°C diperlukan koordinasi semua pihak untuk berkontribusi sesuai dengan bidang dan kemampuan masing-masing. Upaya bersama tersebut juga memerlukan berbagai perubahan, termasuk teknologi, kelembagaan dan perilaku.

B. Capaian

1. Pencapaian penguatan kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam.

Pencapaian target memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam sampai dengan tahun 2019 diindikasikan dengan kinerja:

- Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana hidrometeorologi,
- Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim,
- Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030,
- Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional.
- Potensi pengurangan kehilangan PDB akibat dampak perubahan iklim melalui implementasi kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim

Kerugian akibat bencana tidak saja mengakibatkan korban jiwa dan korban terdampak bencana, namun juga kerugian ekonomi. Dari sisi ketahanan ekonomi, selama rentang waktu 2018-2022, nilai kerugian ekonomi akibat bencana cenderung mengalami penurunan meskipun fluktuatif dimana rata-rata kerugian ekonomi akibat bencana adalah

Pengaruh dari perubahan iklim berupa peningkatan cuaca ekstrem, berdampak pada peningkatan kejadian bencana seperti kekeringan, banjir dan tanah longsor, naiknya tinggi muka air laut dan abrasi, serta kejadian gelombang ekstrim di laut. Secara umum, dampak perubahan iklim dibagi dalam dua kategori, yaitu dampak perubahan iklim yang berlangsung cepat (rapid onset) dan dampak

perubahan iklim yang berlangsung dalam kurun waktu yang relatif panjang (slow onset). Kedua hal tersebut dapat memicu kejadian bahaya yang mengakibatkan kerugian ekonomi di empat sektor prioritas. Dampak perubahan iklim slow onset, tidak dirasakan secara signifikan saat ini, tetapi terakumulasi dan berpotensi menjadi lebih besar di masa yang akan datang.

2. Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan bencana.

Indonesia telah menyusun Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2015-2019 maupun Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2044. Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2044 juga telah mengacu pada Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction) 2015-2030 (BNPB, 2020a).

Pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan pengurangan risiko bencana daerah.

Sampai dengan tahun 2019, dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) telah dimiliki oleh seluruh provinsi di Indonesia, kecuali Provinsi Kalimantan Utara atau 97.1%. Dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) juga telah dimiliki oleh 181 kabupaten/kota dari 514 kabupaten/kota di Indonesia atau 35.6% (BPS, 2020; BNPB, 2020c). Dengan telah tersusunnya dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota diharapkan daerah akan siap dan mampu untuk pencegahan dini atau mengurangi dampak bencana yang akan terjadi. Upaya pengurangan risiko bencana pada suatu daerah dapat dilakukan melalui upaya pengurangan bahaya dan keterpaparan terhadap bencana dan peningkatan kapasitas pemerintah serta komunitas dalam menghadapi bencana.

3. Integrasi antisipasi perubahan iklim dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.

Perubahan iklim menjadi bagian dalam agenda pembangunan Indonesia sejak RPJMN 2009-2014 dan 2015-2019, bahkan semakin diperkuat menjadi prioritas pembangunan nasional yang tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan ekonomi dan sosial lainnya pada saat sekarang. Pencapaian target

mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional sampai dengan tahun 2019 diindikasikan dengan kinerja: Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi GRK, serta pemantauan, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR) dan National Communications,

- a. Jumlah emisi GRK per tahun,
- b. Potensi penurunan emisi GRK,
- c. Potensi penurunan intensitas emisi GRK.
- d. Penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta pemantauan, pelaporan dan verifikasi emisi GRK

Indonesia memiliki kewajiban untuk melaporkan secara berkala melalui komunikasi nasional, dan untuk menyerahkan laporan pembaruan dua tahunan (BUR) yang berisi pemutakhiran inventarisasi gas rumah kaca nasional, termasuk laporan inventarisasi nasional dan informasi tentang aksi mitigasi, kebutuhan dan dukungan yang diterima, sebagaimana diamanatkan oleh Konferensi Para Pihak pada Sesi Keenambelas (COP 16).

Tujuan tiga belas bertujuan untuk mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Serupa dengan tujuan dua belas, tujuan tiga belas juga diturunkan menjadi satu target dan diukur hanya menggunakan satu indikator. Satu-satunya target turunan dari tujuan tiga belas adalah target 13.2, yakni mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan strategi dan perencanaan nasional. Indikator yang digunakan adalah jumlah dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).

Tabel 2.55.

Indikator Target 13.2. TPB DIY 2018-2022

Target Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	1	1	1	1	1

Sumber: *Kajian PIW&PP 2022*

Berdasarkan hasil pemantauan aksi Pembangunan Rendah Karbon (PRK), capaian penurunan emisi GRK pada tahun 2020 adalah sebesar 25,93% dari baseline kumulatif. Capaian tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan aksi PRK yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemda di 34 provinsi. Upaya penurunan emisi di bidang kehutanan dan lahan gambut dihitung berdasarkan asumsi pencapaian target tahun 2020. Potensi penurunan intensitas emisi GRK.

Peningkatan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim.

Penanganan perubahan iklim juga telah dilakukan melalui peningkatan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim. Indikator yang digunakan adalah jumlah satuan pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup.

4. Melaksanakan komitmen negara maju pada the UNFCCC untuk tujuan mobilisasi dana bersama sebesar 100 miliar dolar Amerika per tahun pada tahun 2020.

4.a. Jumlah dana publik (budget tagging) untuk pendanaan perubahan iklim

Dalam penanganan perubahan iklim, Indonesia juga memiliki komitmen dalam pendanaannya. Komitmen ini diwujudkan dalam bentuk jumlah dana publik untuk pendanaan perubahan iklim yang dapat diketahui atau dimonitor melalui penandaan anggaran (budget tagging). Penandaan anggaran perubahan iklim merupakan salah satu perwujudan dari komitmen pemerintah dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta pembangunan rendah karbon dengan mengedepankan prinsip pembiayaan berkelanjutan. Sistem penandaan anggaran perubahan iklim telah dibangun sejak 2016. Sistem penandaan anggaran perubahan iklim merupakan suatu upaya untuk mendukung pengelolaan anggaran perubahan iklim agar lebih terukur dan terstruktur mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pemantauan pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Tujuan empat belas TPB bertujuan untuk mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra dan maritim untuk

pembangunan yang berkelanjutan. Dalam RAD TPB DIY 2018-2022, tujuan empat belas diturunkan menjadi empat target, yakni:

Target 14.4 : Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya,

Target 14.5 : Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia,

Target 14.6 : Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization, dan

Target 14.b : Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.

Tabel 2.56.

Indikator Target 14.4. TPB DIY 2018 - 2021

Target Indikator	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	6.494,87	6.370,29	6.591,6	7.122

Sumber: *Kajian PIW&PP 2022*

Tabel 2.57.

Indikator Target 14.5. TPB DIY 2018 - 2021

Target Indikator	Tahun			
	2018	2019	2020	2021

Peningkatan status kawasan konservasi perairan	20	30	30	10
--	----	----	----	----

Sumber: Kajian PIW&PP 2022

Tabel 2.58.

Indikator Target 14.6. TPB DIY 2018 - 2021

Target Indikator	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Persentase kawasan rehabilitasi dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan	15,71	30	10	30
Persentase penurunan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan	38,9	10	10	10

Sumber: Kajian PIW&PP 2022

Tabel 2.59.

Indikator Target 14.b. TPB DIY 2018 - 2021

Target Indikator	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Nilai produksi ikan yang masuk melalui pelabuhan/tempat pelelangan ikan. (Milyar Rp)	33,67	121,625	183,723	138,814

Sumber: Kajian PIW&PP 2022

C. Tantangan

Penanganan perubahan iklim telah dilakukan secara bersungguh-sungguh dan telah memberikan hasil yang baik, namun masih diperlukan upaya untuk menanggulangi tantangan dinamika pembangunan masa depan. Tantangan strategis yang masih dihadapi dalam penanganan perubahan iklim, khususnya pembangunan rendah karbon diantaranya (KemenPPN/Bappenas, 2020) adalah:

Penurunan emisi dan intensitas emisi GRK memerlukan upaya yang holistik dan terintegrasi dalam program pembangunan:

- Untuk mencapai target penurunan emisi GRK sebesar 29 persen dengan usaha sendiri dan sebesar 41 persen dengan dukungan internasional di bawah baseline emisi GRK pada tahun 2030 memerlukan penerapan pembangunan rendah karbon yang bersifat holistik dalam penanganan perubahan iklim dan mengintegrasikan kebijakan penanggulangan perubahan iklim ke dalam program pembangunan nasional,
- Pertumbuhan ekonomi dan sosial perlu dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan yang rendah emisi dan mengurangi eksploitasi sumberdaya alam yang berlebihan melalui pembangunan rendah karbon,
- Penurunan emisi GRK dan intensitas emisi sangat tergantung dari efektifitas implementasi kebijakan di sektor energi, lahan dan gambut, industri, limbah, pertanian serta pesisir dan kelautan.

Pembangunan rendah karbon memerlukan dukungan lintas sektor dan multipihak:

- Komitmen penerapan pembangunan rendah karbon perlu diperkuat di tingkat sub- nasional, nasional, dan internasional, baik dari unsur pemerintah maupun non- pemerintah,
- Keterlibatan dan dukungan pemerintah daerah dalam pembangunan rendah karbon perlu ditingkatkan, khususnya terkait penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah dan pelaksanaan berbagai aksi pembangunan rendah karbon secara terintegrasi,
- Keterlibatan dan dukungan aktor non-pemerintah, seperti peneliti, sektor swasta dan organisasi kemasyarakatan terhadap pembangunan rendah karbon masih perlu ditingkatkan,
- Komunikasi dan penjangkauan terhadap berbagai pihak, khususnya aktor non-pemerintah untuk peningkatan kesadaran terhadap pembangunan rendah karbon masih perlu ditingkatkan.
- Upaya peningkatan teknologi rendah emisi perlu terus didorong:
- Transisi pembangunan rendah karbon perlu diselaraskan dengan dukungan pengembangan teknologi dan inovasi,
- Ketersediaan teknologi rendah karbon perlu diupayakan agar dapat terjangkau

dan memiliki nilai ekonomi yang lebih menguntungkan,

- Kemajuan teknologi perlu dimanfaatkan untuk perencanaan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan beserta dampaknya terhadap lingkungan secara lebih efisien,
- Inovasi usaha ramah lingkungan masih perlu dikembangkan untuk menurunkan dampak negatif pencemaran dan sekaligus meningkatkan daya saing usaha yang ramah lingkungan,
- Potensi dukungan dunia usaha melalui program CSR pada bidang-bidang pembangunan rendah karbon perlu dioptimalkan.

Sedangkan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan penanggulangan bencana adalah:

- meningkatnya kejadian bencana geologi dan hidrometeorologi akibat perubahan iklim yang menimbulkan kerugian fisik, sosial, dan ekonomi;
- kapasitas dan kesadaran para pihak terhadap bencana yang masih rendah; dan tata kelola kelembagaan termasuk rotasi personel dan konvergensi pembangunan berketahanan bencana dan iklim masih perlu ditingkatkan.

D. Best Practice

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui:

- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- b. Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim; serta
- c. Pembangunan rendah karbon.

2.14. Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan

A. Pengantar

Penurunan sampah yang terbuang ke laut

B. Capaian

Pemerintah Indonesia sangat memberikan perhatian terhadap sampah laut yang merupakan masalah global dalam beberapa tahun terakhir. Sampah yang terbuang hingga ke laut akan memberikan tekanan ekologi yang memberikan dampak terhadap semakin menurunnya kualitas lingkungan serta kualitas dan kuantitas sumber daya pesisir dan laut.

Berdasarkan perkiraan awal yang telah dilakukan oleh LIPI pada tahun 2018, jumlah sampah laut Nasional mencapai 0,27 – 0,59 juta ton per tahun. Data tersebut merupakan hasil pengamatan lapangan pada 18 lokasi stasiun pengamatan di seluruh Indonesia. Hasil perhitungan sementara dari Tim Koordinasi Sekretariat Nasional Penanganan Sampah Laut, total sampah yang masuk ke laut pada tahun 2020 diperkirakan mencapai 521.275 ton, di mana sekitar 12.519 ton berasal dari aktivitas di laut.

Tantangan dalam upaya penurunan sampah yang terbuang ke laut antara lain adalah pola pikir, perilaku, dan pengetahuan masyarakat terkait lingkungan, khususnya pengelolaan sampah plastik yang masih terbatas; sumber daya manusia yang masih terbatas dalam penanganan sampah plastik; jumlah sampah plastik yang terlalu banyak; dan komitmen pemerintah daerah yang masih belum maksimal dalam penanganan sampah plastik. Tantangan lainnya adalah terkait pemutakhiran data sampah laut Nasional, terutama sampah plastik yang terapung. Saat ini, pengembangan pemanfaatan teknologi penginderaan jauh melalui teknologi penerbangan dan antariksa (earth observation) diharapkan dapat menambah dan meningkatkan akurasi data sebaran sampah laut dan pencemaran laut yang disebabkan oleh tumpahan minyak, serta meningkatkan efektifitas pendataannya.

Upaya yang terus dilakukan dalam rangka penurunan sampah terbuang ke laut selain melalui pengelolaan/pengendalian sampah plastik dari berbagai aktivitas masyarakat dan kegiatan industri hulu/hilir, adalah melalui peningkatan kesadaran masyarakat dengan kampanye 6R, yaitu: re-design (design ulang), reduce (mereduksi plastik sebagai bahan baku), remove (menghilangkan plastik sekali pakai), reuse (menggunakan kembali plastik yang masih bisa digunakan), recycle (daur ulang untuk menghindari sampah plastik), recover (pembakaran plastik secara ketat untuk produksi energi), dan pendekatan circular economy.

1. Pengelolaan dan Perlindungan Ekosistem Laut dan Pesisir

1.a. Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan area lautan

Pengelolaan dan perlindungan ekosistem pesisir dan laut secara berkelanjutan merupakan upaya untuk mengurangi dampak lingkungan terhadap ekosistem dengan memperkuat ketahanannya (resiliensi) dan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif. Landasan pengelolaan sumber daya kelautan adalah UU No. 27/2007 jo. UU No. 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang mengamankan penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Lebih lanjut, UU No. 32/2014 tentang Kelautan mengamankan penyusunan dan penetapan rencana tata ruang laut/rencana zonasi meliputi: (1) Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN); (2) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K); dan (3) Rencana Zonasi Kawasan Laut, yang terdiri dari: Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT), serta Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW).

Dalam rangka mendukung pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan perikanan yang berbasis WPPNRI perlu disinergikan dengan perencanaan ruang yang sifatnya spasial dan implementasi rencana tata ruang laut/rencana zonasi tersebut. Hal ini dilakukan diantaranya melalui penetapan pusat-pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan, sistem jaringan sarana-prasarana kelautan, alokasi ruang laut untuk zona perikanan tangkap, alur migrasi biota, dan kawasan konservasi yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi keberlanjutan produksi perikanan.

1.b. Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutan

Pemerintah Indonesia terus mendorong pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan berkelanjutan. Pemerintah telah membagi manajemen manajemen perikanan ke dalam 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Pengelolaan WPPNRI dilakukan melalui Lembaga Pengelolaan Perikanan WPPNRI sesuai dengan Permen KP No. 33/PERMEN-KP/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelolaan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang diperbaharui melalui Permen KP No.22/PERMEN-

KP/2021 tentang Penyusunan RPP dan LPP di WPPNRI. LPP WPPNRI bertugas melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan RPP, memberikan masukan penyusunan dan pelaksanaan RPP, dan memberikan rekomendasi penyusunan kebijakan pengelolaan perikanan berkelanjutan di WPPNRI. RPP merupakan dokumen resmi yang memuat status perikanan dan rencana strategis pengelolaan perikanan di bidang penangkapan ikan yang disusun berdasarkan potensi, distribusi, komposisi jenis, tingkat pemanfaatan sumber daya ikan, lingkungan, sosial ekonomi, isu pengelolaan, tujuan pengelolaan perikanan, dan rencana langkah-langkah pengelolaan, yang merupakan kesepakatan antara Pemerintah dan para pemangku kepentingan sebagai arah dan pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di bidang penangkapan ikan.

Tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman Indonesia secara konsisten melakukan pemutakhiran angka pendugaan kelimpahan ikan (stock assessment) di laut, untuk menduga nilai Potensi Maksimum Lestari (Maximum Sustainable Yield/MSY) dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (Total Allowable Catch/TAC). Jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) adalah sebesar 80% dari potensi maksimum lestarinya. Pada tahun 2013, MSY ditetapkan sebesar 7,30 juta ton (Renstra KKP 2015-2019, Permen KP No.25/2015); selanjutnya pada tahun 2016, ditetapkan nilai MSY sebesar 9,93 juta ton (Kepmen KP No.47/2016); dan terakhir pada tahun 2017, nilai MSY ditetapkan sebesar 12,54 juta ton (Kepmen KP No.50/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia).

2. Kepatuhan pelaku usaha

Indikator persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan merupakan indikator proxy dari indikator global: tingkat pelaksanaan dari instrumen internasional yang bertujuan untuk memerangi penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU fishing). Indikator tersebut pada hakikatnya mengukur kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan oleh para pelaku usaha dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan. Rumusan indikator ini merupakan representasi kinerja nasional dalam upaya pemberantasan praktik-

praktik Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) Fishing karena dengan meningkatnya kepatuhan para pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan maka secara tidak langsung praktik-praktik para pelaku usaha kelautan dan perikanan bergeser menjadi Legal, Regulated, and Reported Fishing serta memperhatikan keseimbangan ekologi untuk keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan yang selaras dengan konsep ekonomi biru. Berdasarkan RPJMN 2020-2024, Indonesia telah menetapkan target capaian kepatuhan para pelaku usaha kelautan dan perikanan hingga 98% pada tahun 2024.

3. Penyediaan akses untuk nelayan

3.a. Tingkat penerapan kerangka hukum/regulasi/kebijakan/kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil

Pengakuan dan perlindungan hak akses perikanan skala kecil telah diatur dalam UU No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam bertujuan untuk: (1) Menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha; (2) Memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan; (3) Meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam; menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya Ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan; dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan; (4) Menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha; (5) Melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan (6) Memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.

3.b. Provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan

Kondisi usaha penangkapan ikan saat ini rata-rata masih belum bankable sehingga menjadi hambatan dalam mengakses sumber permodalan. Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan

Nasional RI telah melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil untuk Peningkatan Akses Permodalan dalam rangka peningkatan pengembangan diversifikasi usaha melalui Fasilitas Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan (SeHAT). Kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi nelayan dalam memperoleh kepastian hukum atas aset yang dimiliki (berupa bidang tanah) agar dapat dijadikan sebagai jaminan (agunan) dalam memperoleh kredit dari lembaga keuangan atau perbankan sehingga nelayan dapat mengembangkan usahanya ataupun dapat mengembangkan usaha ekonomi produktif sebagai mata pencaharian alternatif (diversifikasi usaha).

Peningkatan kepastian hukum hak atas tanah melalui proses sertifikasi memberikan beberapa manfaat bagi nelayan: (1) mengurangi potensi hilangnya aset tanah nelayan akibat tidak adanya kepastian hukum atas kepemilikan, (2) dengan tanah yang dimiliki maka nelayan dapat membangun tempat tinggal menetap permanen, layak dan sehat, (3) tanah juga merupakan aset yang dapat dijadikan agunan untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan/bank, sebagai salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan pengembangan usaha nelayan yaitu permodalan.

Alternatif lainnya yang dapat dikembangkan dalam rangka peningkatan akses pendanaan usaha perikanan skala kecil adalah melalui penguatan kelembagaan ekonomi mikro di pedesaan yang dikelola oleh masyarakat desa, yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa dan meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa. Selanjutnya diharapkan melalui BUMDes dapat mengembangkan rencana kerja sama usaha antardesa dan/atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa (Permendesa PDT dan Transmigrasi No.4/2015 tentang tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa).

3.c. Nelayan yang terlindungi

Perlindungan terhadap nelayan kecil sebagaimana tertuang dalam UU No.

7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam yang mengatur beberapa dukungan untuk nelayan kecil. Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) merupakan salah satu bentuk perlindungan kepada nelayan demi keberlangsungan kegiatan usaha penangkapan ikan.

Kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS

Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan beberapa kebijakan dan instrumen terkait dengan pelaksanaan UNCLOS (the United Nations Convention on the Law of the Sea) didalam pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan sumberdaya lautan, yaitu antara lain:

UU No. 17/1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi PPB tentang Hukum Laut), dimana Indonesia mengakui konvensi hukum laut Internasional, sehingga segala kebijakan di bidang kelautan harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam konvensi. UU ini mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai sediaan ikan yang beruaya terbatas dan sediaan ikan yang beruaya jauh;

UU No. 6/1996 tentang Perairan Indonesia yang memuat ketentuan-ketentuan dasar tentang hak dan kewajiban negara di laut yang disesuaikan dengan status hukum dari berbagai zona maritim sebagaimana diatur dalam UNCLOS. UU ini mengatur tentang wilayah perairan Indonesia, hak lintas bagi kapal-kapal asing, pemanfaatan, pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan perairan Indonesia, serta penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia;

UU No. 1/2014 tentang Perubahan Atas UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi koordinasi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

C. Best Practice

Daerah Istimewa Yogyakarta berbatasan administrasi dengan lautan, sehingga perlindungan laut juga menjadi salah satu program DiY, diantaranya :

- Kawasan pesisir selatan juga memiliki ekosistem lingkungan khas dan potensi energi yang ramah lingkungan, yang terdiri dari :
 - a. Ekosistem terumbu karang Terdapat 7 lokasi yang memiliki ekosistem terumbu karang di DIY yang semuanya terdapat di perairan Kabupaten Gunungkidul. Ekosistem terumbu karang tersebut terdapat di Pantai Ngrenehan, Pantai Gesing, Pantai Ngandong, Pantai Baron, Pantai Drini, Pantai Nglambor, dan Pantai Wediombo. Tutupan karang keras hidup di semua lokasi, namun hanya di Pantai Wediombo yang kondisinya tutupannya relatif lebih baik.
 - b. Ekosistem Mangrove Luas hutan mangrove di DIY pada tahun 2018 adalah 40,10 hektar. Keberadaan hutan mangrove ini sangat penting bagi wilayah pesisir DIY. Hal ini mengingat terdapat 33 desa yang berbatasan dengan pantai. Hutan mangrove tidak saja bermanfaat dalam memberi perlindungan terhadap intrusi, erosi, dan abrasi pantai, namun juga terbukti mampu meredam dampak tsunami. Mangrove di DIY tersebar di beberapa lokasi yang dapat dijumpai dengan membentuk suatu ekosistem maupun dalam kelompok-kelompok (spot) yang kecil. Vegetasi mangrove di DIY terdapat di Dusun Pasir Mendit Kalurahan Jangkaron Kapanewon Temon dan Dusun Baros Kalurahan Tirtoharjo Kapanewon Kretek. Data Statistik Lingkungan Hidup DIY 2021 (BPS, 2022) menyatakan bahwa dari luas hutan mangrove seluas 40,10 Ha, 42,64% dalam kondisi Baik. Sementara itu, 18,45% dalam kondisi Sedang dan 38,91% dalam kondisi Buruk.

2.15. Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan

A. Pengantar

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDG) Tujuan 15 Ekosistem Daratan, mempunyai tujuan melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Pencapaian Tujuan 15 ini akan dicapai melalui 12 target dengan 14 indikator yang terdiri dari 7 (tujuh) indikator nasional yang sesuai dengan indikator global dan 7 (tujuh) indikator

nasional sebagai proksi indikator global.

Isu utama dalam Tujuan 15, meliputi: tata kelola kehutanan, konservasi dan keanekaragaman hayati, kawasan bernilai konservasi tinggi (high conservation value/HCV), melestarikan dan memanfaatkan nilai ekonomi hayati, serta penegakan hukum. Masing- masing isu dijelaskan pada sub bab di bawah ini.

B. Capaian

1. Tata Kelola Kehutanan

Permasalahan dan tantangan yang ada terkait dengan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan adalah keterbatasan anggaran yang tersedia, dan keberlangsungan keberhasilan kegiatan RHL setelah program penanaman selesai. Upaya lain perlu dilakukan pemerintah, seperti juga mendorong masyarakat dan pihak swasta untuk mendukung kegiatan RHL tersebut.

2. Konservasi Keanekaragaman Hayati

Pengelolaan kawasan konservasi dilakukan berdasarkan fungsinya antara lain perlindungan ekosistem sebagai sistem penopang kehidupan (life support system), pengawetan sumber daya alam dan genetiknya, serta pemanfaatan secara lestari.

3. Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV)

Kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV) adalah kawasan mengandung nilai-nilai penting untuk lingkungan hidup, kehidupan sosial dan ekonomi. Nilai penting itu, di antaranya kawasan bernilai konservasi tinggi yang mempunyai habitat satwa liar endemik (spesies kunci/mega fauna), daerah perlindungan resapan air dan merupakan situs arkeologi (kebudayaan). Nilai-nilai tersebut diperhitungkan sebagai nilai yang sangat signifikan atau sangat penting secara lokal, regional maupun global (Konsorsium revisi HCV Toolkit Indonesia 2008). Dengan kata lain bahwa kawasan bernilai konservasi tinggi merupakan kawasan hutan yang memiliki keanekaragaman hayati yang penting, baik pada level ekosistem, populasi hingga ke tingkat spesies, tidak terkecuali daerah-daerah yang merupakan kantong-kantong satwa prioritas yang wilayah jelajahnya menjangkau dan masuk ke dalam kawasan ekosistem esensial (KEE).

4. Melestarikan dan Memanfaatkan Nilai Ekonomi Keanekaragaman Hayati

Dalam dokumen Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) tahun 2015- 2020, keanekaragaman hayati dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: 1) keanekaragaman ekosistem adalah keanekaragaman bentuk dan susunan bentang alam, daratan, maupun perairan di mana makhluk atau organisme hidup berinteraksi dan membentuk keterkaitan dengan lingkungan fisiknya; 2) keanekaragaman jenis adalah keanekaragaman jenis organisme yang menempati suatu ekosistem di darat maupun di perairan; dan 3) keanekaragaman genetika adalah keanekaragaman individu di dalam suatu jenis. Ketiga tingkat Kehati tersebut saling terkait satu dengan lainnya.

5. Penegakan Hukum

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan penyelesaian sengketa lingkungan dapat dilakukan melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Penegakan hukum pidana merupakan salah satu pilar penting dalam kegiatan penegakan hukum setelah sanksi administrasi, dan penegakan hukum perdata. Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, terbagi dalam 6 (enam) tipologi, yakni: 1) pembalakan liar, 2) perambahan hutan, 3) peredaran tumbuhan dan satwa liar (TSL) ilegal, 4) pencemaran lingkungan, 5) kebakaran hutan dan lahan, dan 6) kerusakan lingkungan. Kasus terbanyak adalah kasus dengan tipologi pembalakan liar dan peredaran TSL ilegal.

Tujuan nomor lima belas bertujuan untuk melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi (penggurunan), dan menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati. Tujuan ini diturunkan menjadi dua target, yakni:

Target 15.1 : Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian

Target 15.2 : Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang

terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.

Tabel 2.60.

Indikator Target 15.1. TPB DIY 2018-2022

Target Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Penambahan luas tutupan vegetasi dan lahan terkonservasi	108	166	75	76	30
Persentase Penurunan kerusakan hutan	1,29	0,3	0,8	2,15	0,9
Produksi bibit tanaman bersertifikat yang ditanam (batang)	325.000	600.000	442.600	340.000	

Sumber: Kajian PIW&PP 2022

Tabel 2.61.

Indikator Target 15.2. TPB DIY 2018-2022

Target Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase hutan tertata	NA	88,03	88,03	91,04	91,04
Persentase peningkatan jumlah usaha kehutanan yang memiliki sertifikat	NA	9,76	0	4	4
Rasio pemanfaatan sumber daya hutan	86,6	86,7	85,66	86,68	86,68
Persentase hutan konservasi terkelola	75,21	80,13	81,18	76,97	

Sumber: Kajian PIW&PP 2022

C. Best Practice

Wilayah dengan fungsi hutan di DIY pada tahun 2022 tercatat seluas 84.909,45 Ha yang didominasi hutan rakyat dengan luasan 68.874,36 Ha dan sisanya 19.035 Ha merupakan hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Luas hutan rakyat pada tahun 2022 tercatat menurun dibandingkan tahun 2021 sebesar 79.262,58 Ha, hal ini karena adanya perbaruan data hasil dari perbaruan

kriteria tutup hutan. Wilayah hutan pada wilayah DIY sebagian besar berada di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Adapun persentase hutan konservasi yang terkelola pada tahun 2022 tercatat sebanyak 68,81%, menurun jauh dibanding tahun 2020 yang mencatatkan pengelolaan sebesar 81,18%. Berikut adalah data luas lahan kehutanan di DIY tahun 2018-2022.

Pengelolaan hutan produksi di DIY dikelola oleh Balai KPH Yogyakarta (UPTD DLHK DIY). Selain tanaman jati, tanaman kayu putih menjadi salah satu hasil kehutanan yang potensial di DIY. Hasil tanaman kayu putih yang diolah menjadi minyak kayu putih memberikan kontribusi pendapatan yang cukup besar bagi Pemda DIY. Pengembangan tanaman kayu putih di DIY mengalami kendala produktivitas yang rendah karena jumlah populasi tegakan yang kurang memadai. Upaya pemenuhan populasi tegakan tanaman kayu putih senantiasa dilakukan secara bertahap dan diimplementasikan sinergis melalui skema kemitraan bersama masyarakat sekitar hutan dalam desain terpadu untuk pengentasan kemiskinan.

Penurunan kerusakan hutan diwujudkan melalui peningkatan upaya perlindungan dan pengamanan hutan. Selain itu, didukung dengan upaya pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan dalam rangka peningkatan pendapatannya melalui skema tumpangsari maupun pola kerjasama lain.

2.16. Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan

A. Pengantar

Tujuan 16 merupakan indikator yang menjadi landasan atau pondasi dan menentukan keberhasilan pencapaian Tujuan lainnya dalam TPB/SDGs atau disebut sebagai enabler goal. Dalam kerangka pembangunan nasional, Tujuan 16 memfokuskan pada upaya untuk memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai, usaha untuk menciptakan akses yang sama terhadap keadilan bagi seluruh masyarakat, serta membangun suatu kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif, dalam upaya pencapaian TPB/SDGs di Indonesia. Tujuan 16 terdiri dari 12 target dan 36 indikator berdasarkan pada Metadata Edisi II.

B. Capaian

Pada periode antara tahun 2015 hingga 2019, terdapat beberapa pencapaian positif dari beberapa target yang terdapat dalam indikator Tujuan 16, namun beberapa indikator lainnya masih memerlukan perhatian khusus yang juga tidak terlepas dari kondisi pandemi COVID-19 yang melanda seluruh negara di dunia. Pada bagian ini, status capaian untuk Tujuan 16 akan dikelompokkan menjadi tiga isu utama, yaitu: (1) memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai; (2) akses yang sama terhadap keadilan; dan (3) membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif.

1. Memperkuat Masyarakat Yang Inklusif Dan Damai

1.a. Mengurangi Segala Bentuk Kekerasan dan Terkait Angka Kematian Dimanapun

Selama periode tahun 2015 hingga 2019, terlihat adanya upaya mengurangi segala bentuk kekerasan dan angka kematian yang ditunjukkan oleh beberapa indikator. Indikator 16.1.1 (a) Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir, merupakan indikator proksi yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk memperoleh gambaran secara makro mengenai situasi dan kondisi keamanan masyarakat serta perkembangannya selama beberapa tahun terakhir. Indikator utama lainnya yaitu Indikator 16.1.2 (a) kematian yang disebabkan konflik per 100.000 penduduk yang juga mengalami penurunan. Sementara indikator 16.1.3 (a) proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir Indikator 16.3.1 (a) merupakan indikator yang menunjukkan proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.

Target indikator yang digunakan dalam TPB DIY adalah Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.

Tabel 2.62.

Indikator Target 16.1. TPB DIY 2018 - 2021

Target Indikator	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Prevalensi Kekerasan terhadap anak perempuan dan laki-laki 0-17 th	NA	0,052	0,044	0,045

Sumber: Kajian PIW&PP 2022

Pihak nonpemerintah juga berupaya dalam pengurangan tingkat kekerasan terhadap anak dan perempuan. Berbagai bentuk pendekatan yang dilakukan oleh pihak nonpemerintah antara lain dalam bentuk:

Program untuk membangun kesadaran dan komitmen untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan melalui media elektronik dan cetak berbasis organisasi kemasyarakatan (ormas) dan lembaga keagamaan serta penguatan dukungan masyarakat sipil.

1.b. Keterlibatan lembaga lokal dalam memberi perlindungan dari kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Beberapa inisiatif lembaga pengadaan pelayanan perlindungan serta penguatan jejaring relawan yang fokus pada upaya perlindungan dari kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik sebelum maupun di masa pandemi COVID-19. Pengadaan layanan yang dimaksud termasuk lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat sipil dan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Layanan yang disediakan oleh masyarakat sipil terdiri dari layanan konsultasi dan informasi hukum, konseling psikologis, pendampingan litigasi dan nonlitigasi, membentuk kelompok dukungan serta penguatan komunitas perempuan dan anak. Layanan tersebut biasanya masih disertai dengan kunjungan lapangan, menjangkau korban bila sulit menjangkau lembaga layanan dan kegiatan lain yang mendekatkan akses layanan kepada korban. Pemerintah juga menyediakan layanan melalui P2TP2A/UPT-PPA, selain penyediaan informasi dan layanan konseling, juga melakukan pendampingan litigasi dan nonlitigasi. Baik lembaga layanan masyarakat sipil maupun UPTD-P2TP2A melakukan koordinasi dan membangun sistem rujukan yang melibatkan lembaga penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan; dan lembaga pelayanan kesehatan seperti Puskesmas, Rumah Sakit, serta Dinas Sosial untuk korban yang membutuhkan.

1.c. Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif

Indikator 16.b.1 (a) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur

terkait kebijakan yang masih diskriminatif, dengan menghitung jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan terakhir, berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM internasional. Strategi kebijakan yang terus diupayakan pemerintah terkait pencegahan diskriminasi yaitu meningkatkan upaya perlindungan hak asasi manusia dan pencegahan diskriminasi, diantaranya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pencegahan Kekerasan Seksual masih terus didorong agar disahkan. Program pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak korban juga ditetapkan dengan terwujudnya sejumlah rekomendasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Selain pemerintah, juga terdapat program yang dijalankan nonpemerintah yaitu dukungan sumber daya untuk mendorong kebijakan bagi pemenuhan hak korban pelanggaran HAM di masa lalu khususnya di tingkat lokal.

2. Akses Yang Sama Terhadap Keadilan

2.a. Menggalakkan Negara Berdasarkan Hukum dan Menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.

Sebagai negara berbasis hukum, pemerintah dengan dukungan dan kerjasama dari berbagai lembaga nonpemerintah terus berusaha melindungi masyarakat dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi seluruh warga negara. Upaya menggalakkan negara berdasarkan hukum dan jaminan akses yang sama terhadap keadilan tercermin pada berbagai indikator utama yang trennya membaik.

Terkait akses pada keadilan, indikator 16.3.1 (b) mengenai masyarakat miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi menunjukkan tren meningkat sepanjang periode 2016-2020.

Selanjutnya, indikator 16.3.1 (c) mengenai masyarakat tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara. Semenjak tahun 2015 hingga 2020, persentase orang tidak mampu yang terlayani hampir mencapai 100%, meskipun pada tahun 2019 dan 2020, pelayanan pembebasan biaya perkara mengalami penurunan menjadi 71 persen dan 73 persen. Capaian ini menunjukkan upaya yang nyata dari pemerintah untuk meningkatkan penjaminan akses terhadap keadilan

khususnya bagi masyarakat tidak mampu yang selama ini ditengarai mendapati berbagai hambatan untuk memperoleh layanan peradilan. Berikut ini merupakan tabel yang menunjukkan persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa sidang di luar gedung pengadilan, pembebasan biaya perkara dan pos bantuan hukum.

Pemerintah telah menjalankan upaya penjaminan akses keadilan yang dilakukan melalui pendekatan yang salah satunya adalah akses yang terbuka pada putusan pengadilan dari Mahkamah Agung. Dengan terbukanya putusan-putusan pengadilan tersebut, maka analisis dan pemahaman yang lebih baik dapat dilakukan untuk mendalami berbagai perkara hukum yang terjadi, serta memberikan informasi guna menyiapkan berbagai aspek yang diperlukan agar lebih terstandardisasi terkait ketersediaan pendampingan dan bantuan hukum, serta terkait sidang di luar gedung pengadilan, pembebasan biaya perkara, dan pos bantuan hukum. Hal ini juga akan sangat mendukung upaya meningkatkan layanan bantuan hukum, khususnya yang terkait dengan perkara-perkara yang melibatkan anak-anak dan kelompok rentan. Berbagai program pemerintah lainnya turut dilakukan dalam rangka penjaminan akses terhadap keadilan yaitu melalui penyelenggaraan pembinaan hukum di wilayah dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dan pelaksanaan bantuan hukum di seluruh kantor wilayah, serta monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan hukum di wilayah.

Strategi program pembangunan yang relevan terkait indikator akses keadilan paling menonjol adalah kebijakan-kebijakan yang merupakan respon di masa pandemi COVID-19. Pemerintah menetapkan kebijakan pelaksanaan persidangan melalui teleconference dengan maksud agar tercapai optimalisasi, efektivitas, efisiensi, dan keamanan dalam pelaksanaannya. Pertimbangan yang mendasari kebijakan ini adalah pertimbangan risiko kesehatan yang dapat muncul selama pandemi COVID-19 sambil tetap memperhatikan hak tersangka, terdakwa, korban, saksi, serta masyarakat luas dalam kegiatan persidangan.

Selain itu, pemerintah juga menetapkan kebijakan pembebasan narapidana dan anak melalui program asimilasi dan integrasi (UNICEF, 2020) dengan pertimbangan bahwa fasilitas pemasyarakatan merupakan salah satu tempat penyebaran COVID-19 yang tinggi akibat kondisi sulitnya menjaga jarak dan praktik hidup bersih dan sehat. Upaya pemerintah dalam melakukan pembebasan dini

sebagai mitigasi persebaran COVID-19 di dalam lembaga penahanan dan penjara, menurut UNICEF (2020), Indonesia telah membebaskan 992 anak yang merupakan sekitar setengah dari jumlah anak yang menjalani penahanan dan berada di penjara.

Pemerintah juga mencanangkan kebijakan yang mengamanatkan para aparat penegak hukum agar menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan yang memenuhi kriteria yaitu perlakuan non-diskriminatif, pemenuhan rasa aman dan nyaman, komunikasi yang efektif, tersedianya informasi terkait hak penyandang disabilitas, tersedianya fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh, dan penyediaan pendamping disabilitas dan atau penterjemah.

2.b. Memberikan Identitas yang Sah Bagi Semua.

Memberikan identitas yang sah bagi semua orang merupakan suatu bentuk penjaminan pengakuan di hadapan hukum, perlindungan hak-hak, dan memastikan kelalaian dalam hal tersebut tidak akan terjadi. Anak tanpa dokumen identifikasi resmi akan ditolak mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan. Lebih jauh, anak dapat memasuki pernikahan atau dunia kerja, dipaksa masuk dalam militer sebelum usia legal yang ditentukan ketika tidak memiliki akta kelahiran. Ketika sudah dewasa, akta kelahiran diperlukan untuk mendapat jaminan sosial atau pekerjaan di sektor formal, pembelian properti atau lahan, hak memilih dan mendapatkan paspor. Terdapat tiga indikator capaian yang menunjukkan upaya pemerintah dalam memberikan identitas yang sah tersebut:

Pertama, indikator 16.9.1* mengenai capaian proporsi anak berumur kurang dari 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur. Tren capaian memperlihatkan adanya peningkatan proporsi dari 72,65 persen pada tahun 2015 menjadi 74,36 persen pada tahun 2019. Capaian indikator kedua yaitu indikator 16.9.1 (a) mengenai persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada kelompok 40 persen berpendapatan bawah. Tren capaian menunjukkan kemajuan dimana pada tahun 2015 terdapat 71,59 persen kepemilikan akta lahir yang mengalami kenaikan menjadi 80,44 persen pada tahun 2019. Ketiga adalah capaian indikator 16.9.1 (b) mengenai persentase anak yang memiliki akta kelahiran. Tren capaian di indikator ini menunjukkan kenaikan hingga 88,11 persen di tahun 2020 dibandingkan 79,92 persen pada tahun 2015.

Dalam upaya memberikan identitas yang syah bagi semua, beberapa strategi pemerintah yang sudah dilaksanakan antara lain yaitu komitmen pemerintah untuk terus memperkuat sistem pencatatan sipil (civil registration) dan manajemen data kependudukan nasional. Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati telah memberikan landasan hukum yang nyata bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memperluas cakupan pelayanan pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa vital warga negara Indonesia lainnya.

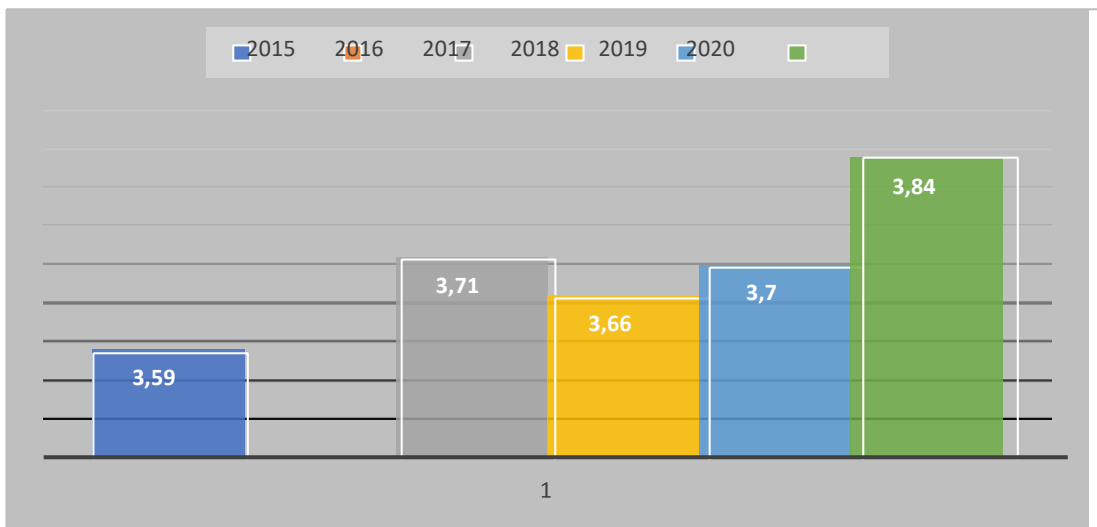
Strategi program pembangunan pemerintah yang relevan terkait capaian ini khususnya selama pandemi, yaitu menjalankan pengalihan proses pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk ke sistem daring (online) sejak Maret 2020 melalui surat edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Nomor 443.1/2978/Dukcapil.

3. Membangun Kelembagaan Yang Efektif, Akuntabel Dan Inklusif

Dalam semangat yang intensif untuk membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif, pemerintah dengan didukung dan kerjasama dari berbagai lembaga nonpemerintah mengedepankan berbagai upaya dan pendekatan yang digambarkan oleh berbagai indikator utama.

3.a. Mengurangi Korupsi dan Penyuapan dalam Segala Bentuknya

Indikator pengurangan korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya diukur dengan indikator 16.5.1 (a) tentang Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK), yang menunjukkan pola meningkat. Indikator ini menunjukkan tren kenaikan tingkat permisivitas masyarakat terhadap perilaku anti korupsi yang berarti semangat zero tolerance terhadap praktek korupsi semakin menguat di masyarakat.



Sumber: BPS, 2022

Gambar 2.4

Tren Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK), 2015-2020

Pemerintah memahami bahwa diperlukan perbaikan yang menyeluruh dalam upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi. Oleh karena itu, pendekatan anti korupsi seperti pemilihan tender, pelacakan arus keuangan, dan penerapan mekanisme pengaduan dan pelaporan terus diterapkan. Peningkatan mekanisme pengawasan internal dengan cara meningkatkan peran inspektorat pada setiap bidang pemerintahan sebagai bentuk pengendalian internal dan memastikan tata kelola yang baik sehingga akan memastikan kegiatan dan program yang berkaitan dengan keuangan negara dilaksanakan sesuai regulasi yang berlaku, juga terus dilakukan.

3.b. Membangun Kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan transparan

Beberapa indikator utama dalam target ini menunjukkan dinamika yang mengarah pada pembangunan yang signifikan. Indikator 16.6.1* tentang proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun di mana sejumlah 91,05 persen proporsi tersebut dicapai pada tahun 2015 yang kemudian meningkat hingga 99,7 persen pada tahun 2018 meskipun sempat mengalami penurunan menjadi 93,83 persen di tahun 2019 namun kembali mengalami peningkatan menjadi 94,55 persen pada tahun 2020. Hal

ini menunjukkan peningkatan efektivitas kinerja pemerintah dalam menjalankan program yang telah direncanakan dan penyerapan anggaran.

Indikator 16.6.1 (a) merupakan indikator yang mewakili akuntabilitas lembaga pemerintahan yaitu persentase instansi pemerintah yang mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai bentuk opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan.

Tabel 2.63.
Ketercapaian Target 16.1. TPB DIY 2018-2022

Target Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Nilai akuntabilitas pemerintah (AKIP)	AA	AA	AA	AA	AA

Sumber: *Kajian PIW&PP 2022*

Selain ukuran akuntabilitas dari BPK tersebut, indikator lain yang juga mengukur akuntabilitas kelembagaan adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Pada tahun 2019, indikator 16.6.1 (b) mengenai persentase instansi pemerintah yang memiliki skor SAKIP B mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga 2019.

Secara spesifik perubahan skor SAKIP dipengaruhi antara lain: (1) keterlibatan langsung pimpinan K/L dan daerah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja, melalui kegiatan telaah realisasi anggaran dan kinerja secara triwulanan yang semakin meningkat; (2) turunan (cascading) sasaran nasional ke dalam visi-misi organisasi sampai pada tingkatan terendah (indikator kinerja

individu) telah diperbaiki; (3) penggunaan teknologi informasi dalam peningkatan kinerja dan pelayanan yang mulai optimal.

Pemerintah secara konsisten terus berusaha menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Lebih lanjut, untuk mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap instansi pemerintah maka indikator utama yang digunakan adalah persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi.

Indikator indeks Reformasi Birokrasi ini mencakup berbagai aspek kualitas layanan meliputi: (a) prosedur layanan, (b) persyaratan layanan, (c) biaya layanan, (d) waktu layanan, (e) jangka waktu layanan, (f) responsifitas layanan, (g) kecakapan SDM, (h) sarana/prasarana layanan, dan (i) fasilitas pengaduan.

3.c. Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif.

Capaian target terkait penjaminan pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif tercermin pada beberapa indikator utama berikut ini. Perkembangan partisipasi politik perempuan dalam menetapkan kebijakan publik terlihat pada perkembangan indikator 16.7.1 (a) mengenai persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Indikator berikutnya terkait dengan perkembangan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di lembaga eksekutif yang tercermin pada indikator 16.7.1 (b) mengenai proporsi perempuan di posisi kepemimpinan di lembaga pemerintahan pada tingkat eksekutif (eselon I dan II) terhadap keseluruhan pengambil keputusan di Lembaga eksekutif setara eselon I dan II.

Capaian kinerja lembaga demokrasi, kebebasan sipil dan kesetaraan warga dalam menggunakan hak pilihnya dapat dicermati lewat indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Untuk melihat capaian kinerja lembaga demokrasi khususnya penyelenggara pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, birokrasi pemerintah daerah, peradilan yang independen diukur dengan indikator 16.7.2 (a) mengenai Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi. Indeks ini mengukur

kapabilitas negara dan lembaga demokrasi untuk menjamin agar prinsip kebebasan dan kesetaraan berjalan dalam ranah politik, ekonomi, dan sosial. Kapabilitas lembaga demokrasi yang termasuk di dalamnya yakni penyelenggara pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, birokrasi pemerintah daerah, peradilan yang independen.

Capaian kebebasan sipil dilihat hanya pada kebebasan individu dan kelompok yang berkaitan erat dengan kekuasaan negara dan atau kelompok masyarakat tertentu yang diukur dengan Indikator 16.7.2 (b) tentang Indeks Kebebasan yang merupakan salah satu prinsip atau variabel dalam pengukuran IDI. Indeks ini mengukur kebebasan setiap individu sebagai warga negara yang dijamin oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Warga terjamin kebebasannya untuk dapat beraktivitas dan mengekspresikan sikap serta berdaulat untuk terbebas dari ancaman kekerasan, diskriminasi, eksploitasi dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial.

Capaian keadilan dan kesetaraan akses warga negara dalam hal memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pembangunan diukur dengan indikator 16.7.2 (c) mengenai Indeks Kesetaraan yang fokus pada warga terjamin keadilan dan kesetaraan aksesnya terhadap sumber daya politik, ekonomi, dan sosial melalui keterlibatan warga secara langsung dalam bentuk partisipasi atau melalui perwakilan untuk mewakili kepentingannya.

Tabel 2.64.

Ketercapaian Target 16.7. TPB DIY 2018-2022

Target Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon II dan III)	NA	NA	NA	NA	
Indeks Hak-hak Politik	80,82	80,67	81,59	NA	

Sumber: *Kajian PIW&PP 2022*

3.d. Menjamin Akses Publik Terhadap Informasi dan Perlindungan Kebebasan

Mendasar

Pemerintah terus mengupayakan penjaminan akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar yang sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional. Dalam upaya tersebut, pemerintah dengan didukung dan kerjasama dari berbagai lembaga nonpemerintah berkomitmen mewujudkan pencapaian berbagai indikator terkait target tersebut agar publik mendapatkan jaminan atas hak-hak untuk bebas dari penyiksaan, penangkapan secara semena-mena dan proses hukum yang berkeadilan memberi jaminan tiadanya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh siapa pun. Salah satu indikator utama di aspek ini adalah indikator 16.10.1 (a) tentang Indeks Kemerdekaan Pers.

Tabel 2.65.

Ketercapaian Target 16.10. TPB DIY 2018-2022

Target Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah OPD Pemda DIY yang telah menyusun Draft Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	27	32	38	37	
Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi	100	100	70	100	

Sumber: Kajian PIW&PP 2022

C. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam upaya penghentian berbagai bentuk kekerasan dan penyiksaan anak antara lain:

- masih sulitnya mendapatkan informasi dan ilustrasi yang menyeluruh tentang

insiden kekerasan terhadap anak dan perempuan di Indonesia karena terbatasnya ketersediaan data. Meskipun berbagai layanan yang terkait isu kekerasan perempuan dan anak telah tersedia namun ditengarai masih belum semua bentuk layanan tersebut beroperasi secara baik akibat belum tersedianya standar operasional prosedur (SOP) layanan dan rujukan secara merata, terbatasnya ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan layanan yang belum mampu menjangkau penanganan kasus hingga ke tingkat komunitas.

- upaya pencegahan dan penanganan kekerasan yang dicanangkan belum secara intensif menjangkau kelompok rentan dan terpinggirkan seperti anak dan perempuan yang hidup dalam lingkungan rumah tangga tradisional (Bappenas, 2020).
- tantangan yang dihadapi di tengah masa pandemi khususnya bagi anak dan perempuan yang merupakan kelompok yang paling rentan dalam upaya menanggulangi penyebaran COVID-19 akibat adanya kebijakan pembatasan mobilitas dan kegiatan.
- Tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum dan akses keadilan selama ini masih bertumpu pada isu pemantauan dan perbaikan kualitas pendampingan hukum, baik litigasi maupun nonlitigasi. Salah satu aspek penting dari isu tersebut adalah ketersediaan data berdasarkan persebaran wilayah, jenis kasus, usia tersangka, dan hasil pendampingan yang lebih lengkap dan detail. Perlunya memahami konteks berbagai kasus dari data pendampingan dan kebutuhan hukum di tingkat masyarakat yang tersedia secara berkala, dapat meningkatkan kemampuan analisis yang lebih baik tentang kesesuaian dan efektivitas bantuan hukum yang disediakan pemerintah Indonesia. Selain itu, tantangan dalam upaya peningkatan akses keadilan untuk semua masyarakat yaitu persebaran organisasi bantuan hukum (OBH) yang masih belum merata, sehingga penyediaan layanan bantuan hukum belum dapat menjangkau secara optimal seluruh pelosok wilayah di Indonesia.
- Tantangan yang dihadapi dalam upaya memberikan identitas yang sah bagi semua terutama pada aspek hambatan pencatatan kelahiran yang masih dialami anak-anak di rumah tangga termiskin.

- Tantangan yang dihadapi terkait penjaminan pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif yaitu terkait pemanfaatan data dan informasi dalam kegiatan perencanaan pembangunan yang belum optimal. Sebagai contoh, indikator yang mengukur kinerja lembaga demokrasi yaitu Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) idealnya digunakan untuk dapat menggambarkan kondisi demokrasi di setiap provinsi di Indonesia berdasarkan realitas berbasis bukti. Namun, pemanfaatan indikator ini belum secara penuh terjadi di daerah khususnya saat pemerintah daerah melakukan pertimbangan perencanaan pembangunan politik di daerahnya masing-masing. Selain itu, IDI juga dapat digunakan sebagai bentuk evaluasi bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan. Oleh karena itu, strategi pemerintah terkait indikator ini adalah memperkuat kelompok kerja IDI di daerah.
- Tantangan yang dihadapi dalam upaya menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar yaitu memastikan semua aturan dan kebijakan yang implementasinya bersifat nondiskriminatif serta memberikan akses yang sama pada keadilan dan layanan dasar bagi perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya. Dengan kata lain, pemerintah masih perlu memperhatikan pelaksanaan peraturan yang ada apabila masih mengandung unsur-unsur yang mengecualikan kelompok masyarakat tertentu. Menurut Komnas Perempuan, masih ditemukan adanya 438 peraturan baik di tingkat nasional maupun di daerah yang terindikasi memuat aturan diskriminatif terhadap perempuan, anak dan kelompok marjinal di tahun 2019. Menurut Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI), telah terlihat adanya upaya perbaikan dalam penanganan kasus penodaan agama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, di mana mereka melakukan klarifikasi, memfasilitasi mediasi, dan memberhentikan laporan dalam beberapa kasus (YLBHI, 2020). Namun, secara umum masih terdapat beberapa tantangan bagi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah untuk menyediakan solusi dan perlindungan yang adil.

D. Best Practice

Pemda DIY melaksanakan prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) dalam rangka memenuhi mandatori masyarakat untuk mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang baik. Ukuran keberhasilan dari tujuan reformasi tata kelola pemerintahan yang tertuang pada target Skor Reformasi Birokrasi dari 73,07 (BB) tahun 2016 menjadi 76 (A) pada tahun 2022, sebagai akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 2017-2022.

Tujuan RPJMD DIY 2017-2022 tersebut ditunjang dengan tiga sasaran strategis. Salah satunya meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan yang diukur dengan opini BPK atas Laporan Keuangan, dan nilai akuntabilitas pemerintah (AKIP). Untuk mewujudkan laporan keuangan dan nilai akuntabilitas pemerintah yang lebih baik, Pemda DIY menginisiasi sistem monitoring dan evaluasi (monev) berbasis informasi teknologi (IT) bernama Sistem Monev APBD/APBN (2008), yang berkembang menjadi Sistem Jogja Kendali (pada 2017).

Namun demikian, posisi kinerja pembangunan daerah masih belum semua bisa tervisualisasi. Selain itu, pengembangan skema pengendalian masih berkuat pada aspek kepatuhan serapan, dan masih dijumpai adanya gap pencapaian sasaran pembangunan daerah, yang cenderung stagnan setiap tahun.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY kemudian membuat inovasi monev berbasis sistem informasi dalam aplikasi Jogja Kendali . Pada perjalanannya Jogja Kendali belum mampu mengakomodasi manajemen evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan daerah yang mudah dipahami, tepat, cepat, dan komprehensif.

Berkaca dari sejumlah kendala tersebut, maka Bappeda DIY menata kembali sistem yang sudah dikembangkan, kemudian lahirlah Sistem Pertanggungjawaban Pembangunan Daerah (Sengguh). Sengguh dibangun secara terintegrasi dengan sistem yang sudah ada untuk menunjukkan skema evaluasi pembangunan daerah, secara runtut dan mampu menunjukkan posisi kinerja pembangunan daerah.

Sengguh merupakan rintisan inovasi Pemda DIY untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sengguh memenuhi kebutuhan tata kelola perencanaan pembangunan yang sigap dan tanggap (agile governance) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Pemerintahan Pemda DIY. Sengguh mewujudkan kesinergisan pengelolaan manajemen pembangunan daerah baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian hingga evaluasi. Sistem ini dapat

mensinkronkan hasil evaluasi pembangunan lintas kewenangan sehingga perencanaan dapat dilakukan lebih menyeluruh. Selain itu Sengguh juga menunjukkan progres program strategis secara lebih efektif. Sengguh menunjukkan gap pembangunan daerah melalui analisa terhadap hasil kinerja pembangunan daerah.

Sengguh bertujuan menjadi alat bantu bagi pengambil kebijakan untuk melakukan manajemen perencanaan pembangunan daerah secara lebih kualitatif. Sengguh bukan hanya menjadi sistem informasi, tetapi juga menjadi sarana pelebagaan Balance Score Card dalam rangka mempertahankan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, sarana untuk mewujudkan Pemerintahan yang Bersih serta Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme.

Selain itu Sengguh juga bertujuan menjadi sarana pengukuran Efektivitas Institusi Publik untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sesuai indikator kinerja utama (IKU) Gubernur DIY; sarana melembagakan keterlibatan lintas sektor untuk mencapai target strategis daerah; sarana untuk memperkuat pelebagaan Rapat Koordinasi Pengendalian per Triwulan (Rakordal) sebagai forum transformatif untuk memperkuat reformasi birokrasi dan AKIP; sarana yang melembagakan inovasi perangkat daerah dalam mengoptimalkan layanan publik; dan sebagai sarana untuk membuka diri dan beradaptasi terhadap peluang integrasi data dengan sistem informasi lain untuk meningkatkan pengalaman pengguna/user.

Ide utama Sengguh membantu memonitor dan mengevaluasi kinerja (sasaran hingga sub kegiatan) di lingkungan Pemda DIY, sehingga efektivitas institusi publik untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) dapat tercapai.

Sengguh menjadi sistem berwujud aplikasi yang tak hanya memperbarui Jogja Kendali tetapi juga memperbaiki sistem pembaruan kebutuhan terkait dengan monev. Salah satunya menyajikan menu log frame, yaitu untuk mengetahui keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam mendukung program, asumsi eksternal dalam pencapaian kinerja pada setiap jenjang. Di dalam Sengguh juga ada menu Kerangka Acuan Kerja (KAK), yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan sub kegiatan.

Pada Sengguh, terdapat menu Lintas Sektor yang menyajikan informasi dukungan lintas sektor untuk mencapai IKU yang merupakan indikator sasaran

Pemda DIY. Menu E-LKPJ merupakan sarana untuk menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur secara online (paperless)

2.17. Kemitraan untuk Pembangunan Berkelanjutan

A. Pengantar

Pandemi COVID- 19, yang merupakan unprecedented shock, dan berdampak pada berbagai bidang dan turut mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan masyarakat. Kondisi ini jelas mempengaruhi pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) termasuk diantaranya Tujuan 17 sebagai Tujuan Means of Implementation atau Tujuan yang menjadi Sarana Pelaksanaan guna mendukung pelaksanaan ke-16 Tujuan lainnya.

Capaian dan tantangan sejumlah indikator pada Tujuan 17 sepanjang periode aksi TPB/SDGs antara tahun 2018- 2022, termasuk dampak yang disebabkan pandemi COVID-19 yang mempengaruhi capaian Tujuan 17, akan dijabarkan ke dalam lima (5) isu utama diantaranya (1) penerimaan daerah; (2) perdagangan internasional; (3) teknologi informasi dan komunikasi; (4) kerjasama multipihak termasuk kemitraan global dan kerjasama antara pemerintah dengan swasta; dan (5) ketersediaan data.

B. Capaian

1. Penerimaan Pemerintah Daerah

Program PEN merupakan upaya pemerintah untuk memulihkan perekonomian nasional dan daerah yang terdampak oleh pandemi COVID-19 melalui strategi kebijakan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional. Program ini mencakup enam klaster yaitu kesehatan, perlindungan sosial, insentif usaha, dukungan untuk UMKM, pembiayaan korporasi, serta dukungan ekonomi melalui program sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Langkah kebijakan penanganan dan pemulihan ekonomi ini diarahkan untuk menjaga konsumsi, mendorong investasi, mendukung ekspor impor, serta menjaga dunia usaha tetap beroperasi. Di antaranya adalah alokasi untuk jaring pengaman sosial (social safety net) agar daya beli masyarakat miskin dan rentan miskin dapat terjaga untuk menjaga kestabilan perekonomian domestik, serta insentif pajak bagi dunia

usaha agar tetap produktif.

2. Remintansi Pekerja Migran Indonesia

Di masa kini, posisi pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri semakin penting. Remitansi yang mereka hasilkan menjadi salah satu sumber penyumbang devisa negara, yang tercatat dalam neraca pendapatan sekunder. Pandemi COVID-19 membuat pekerja migran Indonesia rentan kehilangan pekerjaan. Kebijakan pembatasan kegiatan dan perjalanan yang diambil negara-negara tujuan kerja menyebabkan pekerja migran tidak lagi bekerja, baik untuk sementara ataupun secara permanen. Ditambah lagi dengan risiko kesehatan akibat COVID-19 yang tingkatannya bergantung pada tingkat keparahan kesehatan masing-masing negara tempat kerja mereka. Faktor-faktor tersebut turut mempengaruhi kontribusi remitansi pekerja migran bagi devisa negara.

Namun demikian, potensi peningkatan devisa negara yang dihasilkan oleh pekerja migran di masa mendatang masih terbuka lebar. Terutama dengan terjadinya aging population atau penuaan penduduk di sejumlah negara Asia yang berpotensi membuat mereka kekurangan tenaga kerja produktif.

3. Ekspor Nonmigas

Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020. Target indikator yang digunakan adalah nilai ekspor

Tabel 2.66. Nilai Ekspor DIY 2018-2022

Target Indikator	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Nilai Ekspor	338,02	370,22	134,37	539,96

Sumber: *Kajian PIW&PP 2022*

4. Perdagangan Internasional

Kerjasama perdagangan internasional secara khusus juga dilakukan melalui indikator 17.10.1.(a) dalam skema Preferential Trade Agreement (PTA) dan Free Trade

Agreement (FTA), serta kemitraan ekonomi melalui Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). PTA, FTA, dan CEPA merepresentasikan komitmen Indonesia untuk membangun kerjasama internasional dalam hal perdagangan barang dan jasa, maupun bidang-bidang lain seperti investasi, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan lain-lain.

5. Eknologi, Informasi, dan Komunikasi

Dalam TPB/SDG Indonesia, terdapat dua indikator penyediaan infrastruktur TIK yang digunakan, yaitu i) persentase rumah tangga terlayani jaringan internet akses fixed broadband terhadap total rumah tangga, serta ii) persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik broadband. Selain itu, terdapat satu indikator dalam TPB/SDG Indonesia yang merepresentasikan sisi permintaan, yaitu persentase pengguna internet.

Pandemi COVID-19 menjadi momentum untuk membuat lompatan besar dalam transformasi digital. Pembatasan mobilitas manusia yang berdampak pada berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, telah menstimulasi perubahan perilaku dan mendorong peningkatan kebutuhan pada layanan dan sistem yang berbasis digital. Bersama dengan penguatan ekosistem digital dan sumber daya manusia talenta digital, akselerasi transformasi digital menjadi kunci dari pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional. Akselerasi transformasi digital perlu ditopang penyediaan infrastruktur TIK yang memadai guna meningkatkan cakupan jaringan broadband yang cepat dan terjangkau.

6. Kerjasama Pemerintah dan Swasta

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) merupakan salah satu bentuk kerjasama pembangunan yang melibatkan swasta atau public private partnership (PPP) di Indonesia. KPBU merupakan kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha dalam menyediakan sarana dan prasarana layanan umum berdasarkan pembagian risiko antara pemerintah dan swasta. KPBU dilakukan untuk: (i) menjembatani kesenjangan pembiayaan melalui investasi swasta, termasuk prakarsa badan usaha (unsolicited), pada penyediaan sarana dan prasarana layanan umum; dan (ii) mendapatkan efisiensi sektor swasta dalam penyediaan sarana dan prasarana layanan umum.

7. Ketersediaan Data dan Informasi Yang Berkualitas

Data dan informasi yang berkualitas merupakan prasyarat penting dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan pembangunan nasional untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Upaya peningkatan kualitas data dan informasi telah memiliki payung hukum yang kuat melalui capaian indikator 17.18.2.(a) terkait dengan tersedianya Undang Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, di mana Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam penyelenggaraan statistik di Indonesia. Undang Undang tersebut ditujukan untuk mengatur penyelenggaraan statistik nasional yang terpadu dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang handal, efektif, dan efisien.

C. Tantangan

Tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan aksi TPB/SDGs untuk Tujuan 17 adalah sebagai berikut:

Tantangan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan kerjasama internasional adalah:

- Keterlibatan aktor nonpemerintah, baik dari pelaku usaha, organisasi sosial kemasyarakatan, ataupun institusi nonpemerintah lainnya. Hal ini untuk memastikan inklusivitas atau partisipasi aktor nonpemerintah serta meningkatkan kegiatan KSST dari sisi jumlah maupun kualitas. Terkait hal ini, diperlukan sinergi antara pemerintah dan aktor nonpemerintah sebagai bagian dari pemangku kepentingan dalam kerangka kerjasama pembangunan internasional.
- Menggali potensi pengembangan inovasi dan kemitraan dalam pembangunan di daerah dengan koordinasi yang lebih efektif antara pusat dan daerah.

Tantangan yang terkait dengan perdagangan internasional dan PTA/FTA/CEPA bagi Indonesia adalah:

- Masih dominannya ekspor bahan mentah berbasis sumber daya alam dan bahan olahan dengan nilai tambah rendah.
- Keterlibatan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) juga tergolong rendah,

akibatnya, potensi manfaat yang dapat diperoleh Indonesia tidak optimal.

- Tantangan yang dihadapi terkait infrastruktur TIK.
- Peningkatan keandalan dan kecepatan pelayanan informasi memerlukan perluasan jaringan fixed broadband dan jaringan mobile broadband.
- Penyediaan infrastruktur TIK masih menghadapi sejumlah tantangan dan permasalahan. Selain perbedaan perijinan antar daerah yang menyebabkan right of way dan open acces belum terjadi, tantangan utama yang dihadapi adalah pembangunan di wilayah-wilayah yang tidak komersial, termasuk di lokasi layanan publik. Dalam hal ini, investasi atau biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh.
- Khusus fixed broadband, terdapat sejumlah permasalahan yang menyebabkan rendahnya penetrasi jaringan tersebut, seperti:
 - Kebutuhan investasi yang tinggi terutama pada komponen pekerjaan umum, di antaranya penggalian dan pemasangan tiang (proporsi antara 70-80%)
 - Biaya overhead yang tinggi
 - Utilisasi jaringan tergolong rendah (26,02%) terutama di wilayah-wilayah yang tidak layak secara ekonomi (perhitungan keuangan)
 - Harga layanan yang dirasakan mahal oleh masyarakat (dalam studi yang dilakukan Puslitbang SDPPI pada 2018, 56,4% responden menyatakan harga langganan internet fixed broadband tergolong mahal70).
- Pemanfaatan infrastruktur TIK yang telah diselenggarakan perlu dioptimalkan pada layanan sektor publik, industri, pariwisata, dan jasa untuk memulihkan produktivitas ekonomi.
- Pemanfaatan layanan infrastruktur TIK terhambat keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang menguasai keahlian di bidang digital. Oleh karenanya perlu dilakukan pengembangan SDM termasuk melalui pendidikan vokasi bidang TIK, pendidikan tinggi yang berasal dari bidang khususnya science, technology, engineering, and mathematics (STEM).

Tantangan dalam implementasi KPBU adalah:

- Risiko politik dan regulasi terkait dengan pelaksanaan KPBU . Dari sisi swasta, skema KPBU dianggap rumit karena memerlukan proses yang relatif panjang, serta melibatkan pemerintah daerah dan DPRD.
- Relatif tingginya risiko investasi serta ketidaklayakan proyek secara finansial.

Dalam menyikapi tantangan tersebut, khususnya yang terkait dengan risiko investasi dan ketidaklayakan proyek secara finansial, pemerintah memberikan sejumlah fasilitas guna mendukung proyek KPBU, khususnya bagi proyek yang memiliki manfaat dan dampak ekonomi yang besar, di antaranya adalah dukungan pemerintah, jaminan pemerintah, pembayaran atas layanan, dan insentif perpajakan. Salah satu instrumennya adalah VGF atau dukungan pemerintah melalui penyediaan sebagian aset, sebagai kontribusi pemerintah pada proyek KPBU guna meningkatkan kelayakan finansial sebuah proyek pembangunan. Dengan adanya dukungan ini, biaya konstruksi sebuah proyek infrastruktur dapat diturunkan sehingga tingkat pengembalian investasi dapat ditingkatkan.

D. Best Practice

DIY mempunyai potensi unggulan daerah di bidang Ekonomi kreatif yang berbasis teknologi informasi dan pariwisata berbasis budaya. Dalam rangka upaya menjembatani potensi ekonomi daerah dengan peluang pasar dan investasi di luar negeri utamanya di bidang perdagangan, pariwisata, investasi serta budaya secara lebih efektif dan efisien diperlukan kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait melalui kegiatan promosi terpadu dengan konsep TTIC (Trade, Tourism, Investment, Culture).

Budaya menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kegiatan promosi terpadu ini mengingat DIY menyandang predikat tidak hanya sebagai kota pendidikan dan kota pariwisata namun juga sebagai kota budaya. Dengan predikat ini Pemda DIY senantiasa berupaya untuk melestarikan dan menumbuhkembangkan nilai budaya Yogyakarta yang mendasari kegiatan pembangunan di bidang-bidang yang lain

BAB III

TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs

3.1. Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, tujuan 1 TPB tanpa kemiskinan terkait dengan sasaran makro pembangunan dan 5 (lima) Prioritas Nasional. Selain pemberantasan kemiskinan, tujuan 1 juga mencakup penerapan perlindungan kemiskinan, pemenuhan layanan dasar, mengurangi kerentanan masyarakat terhadap bencana, serta penguatan kebijakan dan mobilisasi sumber daya. Untuk mencapai tujuan tanpa kemiskinan, arahan RPJMN 2020-2024 adalah pada tiga kebijakan utama, yaitu 1) penyelenggaraan perlindungan sosial, 2) perluasan dan peningkatan pelayanan dasar, serta 3) pengembangan kehidupan berkelanjutan dengan perluasan akses usaha mikro, kecil, dan koperasi.

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta juga memberikan perhatian khusus terhadap kemiskinan ini. DIY sudah memiliki peraturan khusus mengenai pengentasan kemiskinan melalui Peraturan Daerah DIY Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan dengan strategi penanggulangan kemiskinan DIY meliputi:

- Perlindungan dan jaminan sosial: bantuan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan,
- Rehabilitasi sosial: bimbingan mental, bimbingan sosial, bimbingan psikologi dan bimbingan keterampilan,
- Pemberdayaan masyarakat: pembinaan usaha mikro dan kecil, pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan, bimbingan manajemen usaha, fasilitasi pengelolaan usaha kelompok, fasilitasi pemberdayaan perempuan, penyediaan kesempatan dan peluang kerja bagi penduduk miskin, serta pemanfaatan dan pengembangan pemasaran hasil produksi penduduk miskin, dan Pemenuhan akses terhadap sumber daya: fasilitasi akses air bersih, sanitasi, listrik, jalan, sarana prasarana pemasaran dan komunikasi, pengembangan wilayah atau kawasan khusus dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, program kepada pelaku usaha untuk

menampung, menggunakan, dan memasarkan produk yang dihasilkan oleh penduduk miskin dari berbagai wilayah penghasil, pengembangan infrastruktur penunjang, kemitraan antara pengusaha besar, kecil dan menengah, pinjaman modal murah dari lembaga keuangan/perbankan untuk penduduk miskin, peningkatan kemampuan pengelolaan tempat wisata dan bantuan sarana prasarana pariwisata.

Kemiskinan menjadi isu prioritas di Daerah Istimewa Yogyakarta, karena kemiskinan DIY masih di atas rata – rata nasional. Dalam RPD DIY tahun 2023 - 2026 juga dimuat urgensi kebijakan percepatan pembangunan perdesaan untuk mengentaskan kemiskinan di perdesaan dan perlunya peningkatan cakupan jaminan kesehatan semesta. Selain itu, ada pula arah kebijakan pariwisata yang bertujuan untuk mewujudkan Yogyakarta sebagai destinasi wisata utama dunia berbasiskan nilai nilai keistimewaan dengan pendekatan komprehensif dan terintegrasi sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Penyediaan data mengenai penduduk miskin yang lengkap, baik secara individu maupun rumah tangga, dan diperbarui secara kontinu juga merupakan hal penting untuk dilaksanakan agar program kemiskinan diharapkan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin.

Tabel 3.1 Target dan Indikator Sasaran Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target Tahunan				
					2023	2024	2025	2026	2027
1.1	Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari								
1.1.1	Tingkat kemiskinan ekstrim	BPS, TNP2K	%	2,41 (2022)		0	0	0	0
1.2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional								
1.2.1	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	BPS, RPJMD	%	11,34	10,66	10,16	9,66	9,16	8,66
	1. Imunisasi Dasar: Persentase anak berusia 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Dinkes	%	97.25	97.26	97.55	97.95	98.36	98.76
	2. Gizi: <i>Prevalence of Undernourishment</i> (tingkat kekurangan gizi)	Dinkes	%	-0.07	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
	3. Indikator Morbiditas: persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan	Indikator Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS, Dinkes, Kajian RAD TPB DIY	%	12,70%	PM*	PM*	PM*	PM*	PM*
	4. Lama sekolah: Persentase ART usia 25 – 60 tahun yang tidak tamat SMP	BPS, Disdikpora, Kajian RAD TPB DIY			PM*	PM*	PM*	PM*	PM*
	5. Partisipasi sekolah: Persentase anak usia sekolah 7-18 tahun yang tidak/belum bersekolah	BPS, Disdikpora			Didukung oleh indikator alternatif				
	6. Listrik: Persentase rumah tangga yang sumber penerangan utamanya bukan listrik	Indikator inverse dari indikator Persentase RT berakses listrik	%		0	0	0	0	0

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target Tahunan				
					2023	2024	2025	2026	2027
		RPD DIY 2023-2026							
	7. Air minum: Persentase rumah tangga tanpa akses pada air minum bersih	BPS, DPUP-ESDM	%	25,6 (air kemasan) 21, semur terlindungi 11,41 sumur bor	Didukung oleh indikator alternatif				
	8. Sanitasi: Persentase rumahtangga tidak mempunyai WC layak	BPS	%	99,15	Didukung oleh indikator alternatif				
	9. Lantai: Persentase rumah tangga dengan jenis lantai terluas adalah tanah atau luas lantai per kapita kurang dari 8 m ²	BPS, Kajian RAD TPB DIY		<7,2 3,99 (2021)	PM*	PM*	PM*	PM*	PM*
	10. Bahan bakar memasak: Persentase rumah tangga dengan Bahan bakar memasak menggunakan elpiji 3kg	BPS. Statistik Strategis, DPUP-ESDM Kajian RAD TPB DIY	%		95,79 sd 96,13	95,8 sd 96,13	95,8 sd 96,14	95,81 sd 96,14	95,81 sd 96,15
	11. Aset: Persentase rumah tangga yang tidak punya aset produktif	BPS			PM*	PM*	PM*	PM*	PM*
	12. Akta kelahiran: Persentase penduduk yang berusia 0-17 tahun yang tidak memiliki akta kelahiran	Biro Tapem	%		Didukung oleh indikator alternatif				
	13. Akses internet: Persentase rumah tangga yang tidak punya akses internet	BPS, Diskominfo	%		Didukung oleh indikator alternatif				
	14. Pekerjaan: Persentase rumah tangga dengan anggota rumah tangga bekerja	Disnakertras	%		PM*	PM*	PM*	PM*	PM*

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target Tahunan				
					2023	2024	2025	2026	2027
1.3.1	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok anak berkebutuhan khusus, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan	Renstra Dinsos	%		12.49	12.52	12.56	12.61	12.61
1.3.1.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Dinkes	%	97.2	97.6	98	98.2	98.4	98.6
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Disnakertrans			Didukung oleh indikator alternatif				
1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro								
1.4.1	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar								
	1. Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman	RPD DIY 2023-2026, DPUP-ESDM	%		95,28	95,80	96,48	97,15	
	2. Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak dan aman	RPD DIY 2023-2026, DPUP-ESDM	%		94,90	96,07	96,54	97,23	
	3. Persentase penduduk dengan akses pada layanan mobilitas Dasar di Pedesaan	BPS	%		PM*	PM*	PM*	PM*	PM*
	4. Persentase penduduk dengan akses pada layanan fasilitas Penyehatan Dasar	BPS	%		Didukung oleh indikator alternatif				
1.4.2	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan								
	1. Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Milik Sendiri / Proporsi rumah tangga dengan status kepemilikan rumah milik dan sewa/kontrak menurut provinsi	BPS, DPUP-ESDM Kajian RAD TPB DIY	%		76,07 sd 83,18	77,88 sd 84,98	79,69 sd 86,79	81,49 sd 88,6	83,3 sd 90,4

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target Tahunan				
					2023	2024	2025	2026	2027
	2. Proporsi rumah tangga dengan status kepemilikan rumah milik dan sewa/kontrak menurut provinsi	BPS, DPUP-ESDM, Kajian RAD TPB DIY	%		14,27 sd 17,23	14,52 sd 17,49	14,77 sd 17,74	15,02 sd 17,99	15,27 sd 18,24
1.5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana								
1.5.1	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	BPBD DIBI	per 100.000 jiwa	0.173 (2021)	PM*	PM*	PM*	PM*	PM*
1.5.2	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDRB	BPD DIBI	%	0.01246 (2021)	PM*	PM*	PM*	PM*	PM*
1.5.3	Rencana Penanggulangan Bencana DIY dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana DIY	BPBD			1	1	1	1	1
1.5.4	Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencana	BPBD	%		100	100	100	100	100

Keterangan PM* Tidak dilakukan perhitungan indikator oleh Perangkat Daerah Provinsi tetapi mendukung target Nasional

Tabel 3.2. Indikator Lokal Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target Tahunan				
					2023	2024	2025	2026	2027
1.2.1	1. Imunisasi Dasar: Persentase anak berusia 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Dinkes	%	97.25	97.26	97.55	97.95	98.36	98.76
	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi**	Dinkes	%		100	100	100	100	100

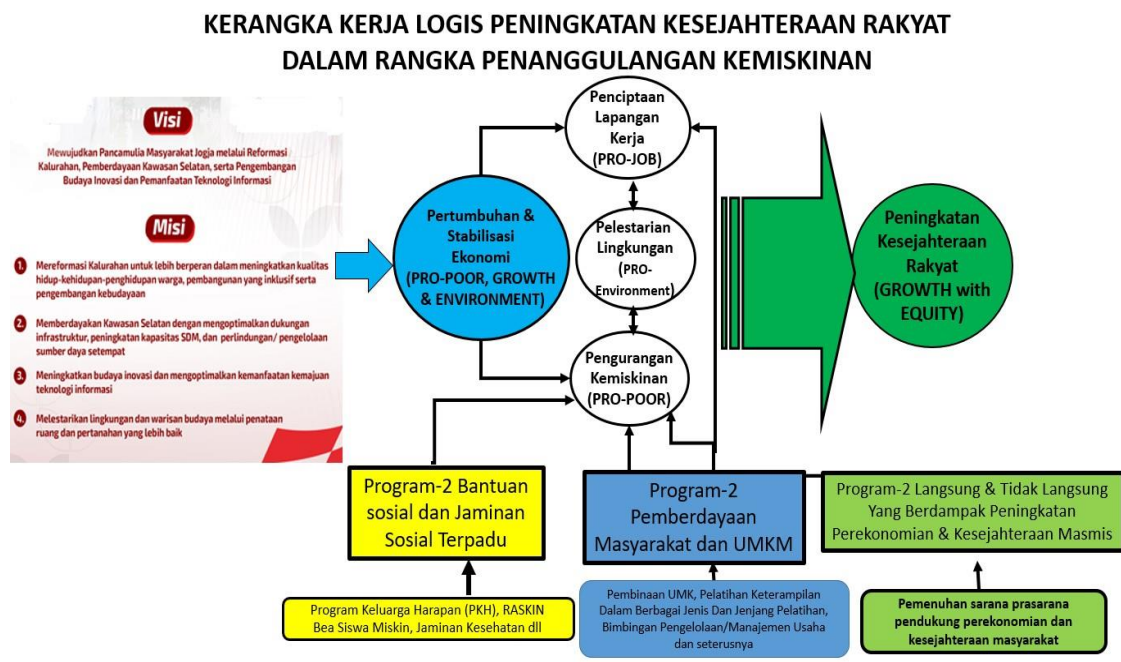
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target Tahunan				
					2023	2024	2025	2026	2027
1.2.1	2. Gizi: <i>Prevalence of Undernourishment</i> (tingkat kekurangan gizi)	Dinkes	%	-0.07	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
	Gizi: <i>Prevalence of Undernourishment</i> (tingkat kekurangan gizi) untuk balita gizi buruk	Dinkes	%	0,20	0,19	0,18	0,17	0,16	0,15
1.2.1	5. Partisipasi sekolah: Persentase anak usia sekolah 7-18 tahun yang tidak/belum bersekolah								
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 16-18 tahun**	Profil pendidikan	%	80.47	81.22	81.97	82.72	83.47	84.22
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Tahun**	Profil pendidikan	%	93.15	93.9	94.65	95.4	96.15	96.9
1.2.1	7. Air minum: Persentase rumah tangga tanpa akses pada air minum bersih								
	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman**	RPD DIY 2023-2026, DPUP-ESDM	%	92,92 (2021)	95,28	95,80	96,48	97,15	PM
1.2.1	8. Sanitasi: Persentase rumahtangga tidak mempunyai WC layak								
	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak dan aman**	RPD DIY 2023-2026, DPUP-ESDM	%	N/A	94,90	96,07	96,54	97,23	
1.2.1	12. Akta kelahiran: Persentase penduduk yang berusia 0-17 tahun yang tidak memiliki akta kelahiran								
	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak	Dataku	%	N/A	94,34 sd 94,7	94,42 sd 94,78	94,5 sd 94,86	94,58 sd 94,94	94,66 sd 95,02
1.2.1	13. Akses internet: Persentase rumah tangga yang tidak punya akses internet								
	Persentase Rumah Tangga yang Pernah Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir**	Diskominfo	%,	N/A	100	100	100	100	100

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target Tahunan				
					2023	2024	2025	2026	2027
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan								
	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan**	Renstra Disnaker	Jiwa	411701 (2021)	449.588	469.819	490.961	513.054	536.142
1.4.1	4. Persentase penduduk dengan akses pada layanan fasilitas Penyehatan Dasar								
	Proporsi rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar menurut provinsi (Persen): Indeks pada Fasilitas Kesehatan Dasar**	BPS Pusat. SDGs	%						

A. Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2023 – 2027

Visi Gubernur DI. Yogyakarta Tahun 2022 – 2027 adalah mewujudkan pancamulia masyarakat Jogja melalui reformasi Kalurahan, pemberdayaan kawasan selatan serta pengembangan budaya inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi. Sedangkan Misinya adalah:

- Mereformasi Kalurahan untuk lebih berperan dalam meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan yang inklusif serta pengembangan kebudayaan.
- Memberdayakan kawasan selatan dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan/pengelolaan sumberdaya setempat.
- Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemanfaatan kemajuan teknologi informasi.
- Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik.



Sumber : Pedoman Program Penanggulangan Kemiskinan DIY

Gambar. 3.1.

Kerangka Kerja Logis Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Atas penjabaran visi dan misi Gubernur DI. Yogyakarta tersebut, masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dan Kabupaten Kota menyusun program program kegiatan yang berpihak kepada masyarakat miskin (pro poor), yang mampu mengatasi pengangguran dengan membuka lapangan kerja (pro job), dan mampu memelihara dan melestarikan lingkungan (pro environment), serta mampu mengarahkan pertumbuhan ekonomi secara merata dan berkeadilan diseluruh lapisan masyarakat (pro growth). Untuk mewujudkan keberpihakan atas 4 (empat) aspek tersebut, maka program kegiatan terbagi menjadi 3 (tiga) kluster agar tepat sasaran, jumlah, waktu dan tujuan, yaitu :

- Kluster Bantuan Sosial dan jaminan sosial terpadu, yang meliputi Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Rehabilitasi Sosial;
- Kluster Pemberdayaan Masyarakat dan UMKM, yang meliputi Pemberdayaan Masyarakat seperti pembinaan Usaha Mikro dan Kecil (UMKM), pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan, bimbingan pengelolaan/manajemen usaha dan seterusnya;
- Kluster Program-program langsung dan tidak langsung yang berdampak pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat miskin, utamanya untuk pemenuhan akses terhadap sumberdaya antara lain berupa fasilitasi akses air bersih, bantuan akses sanitasi, bantuan akses listrik, peningkatan akses jalan lingkungan, dan lain sebagainya.

Kerangka kerja logis ini disusun dalam rangka memberikan gambaran / sistematis perencanaan dalam rangka penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan. dengan adanya kerangka kerja ini dijadikan guidance perencanaan dalam mencapai target / goals. Melalui percepatan pembangunan infrastruktur, perbaikan iklim investasi, paket kebijakan UMK dan perdagangan serta stabilitas harga bahan pokok akan meningkatkan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Pro poor growth akan menciptakan lapangan pekerjaan (PRO-JOB) dan pengurangan kemiskinan (PRO-POOR). Program pengurangan kemiskinan dapat dilakukan melalui program : (1). Program Bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu yang berbasis rumah tangga dan individu, (2). Program pemberdayaan masyarakat dan UMKM baik yang berbasis individu, kelembagaan atau kelompok, dan (3). Program langsung maupun

tidak langsung yang berdampak terhadap peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin.

Penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan mempertimbangkan empat prinsip utama penanggulangan kemiskinan yang komprehensif, yaitu (i) perbaikan dan pengembangan sistem perlindungan sosial; (ii) peningkatan akses pelayanan dasar; (iii) pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; dan (iv) pembangunan yang inklusif.

Mengacu kepada prinsip utama tersebut, penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan strategi (i) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; (ii) meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; (iii) mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro serta kecil; dan (iv) membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Strategi tersebut dijalankan dengan berbagai program penanggulangan kemiskinan. Yaitu, kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Secara nasional, program penanggulangan kemiskinan dapat dikelompokkan menurut basis sasaran (penerima program) dan tujuannya, menjadi:

- Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga. Tujuannya adalah memenuhi hak dasar, mengurangi beban hidup, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin.
- Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Tujuannya adalah memenuhi hak dasar, mengurangi beban hidup, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin.
- Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Tujuannya adalah mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan berdasarkan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.
- Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil. Tujuannya adalah memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.

Program - program lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat

meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Strategi penanggulangan kemiskinan DIY dilakukan dengan :

- Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin;
- Peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- Pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
- Sinergi kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan.

Sedangkan program penanggulangan kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan adalah :

Program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;

Program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan

Program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan.

B. Kontribusi Aktor Nonpemerintah pada TPB/SDGs Tujuan 1

Sesuai dengan prinsip inklusi, untuk optimalisasi pencapaian SDGs/TPB, peran aktor nonpemerintah menjadi bagian dalam mengisi Rencana Aksi Daerah DIY. Secara garis besar, dukungan program nonpemerintah untuk Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan diantaranya adalah: Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia (KPSI) Simpul Yogyakarta, Yayasan SATUNAMA Yogyakarta, UCP Roda Untuk Kemanusiaan Indonesia, Pimpinan wilayah ikatan tunanetra muslim Indonesia daerah istimewa Yogyakarta PW ITMI DIY, PPDI DIY, BAZNAS DIY, Universitas Widya Mataram, LAZISMU, Aisiyah DIY.

Kegiatan yang dikontribusikan pada umumnya bersifat: pelatihan kewirausahaan, pelatihan dan bantuan disabilitas, perluasan lapangan kerja

informal, bantuan sanitasi, ketahanan pangan, pemberdayaan UMKM, perduli lansia, siaga bencana. Program dan kegiatan aktor nonpemerintah lainnya secara lebih rinci dapat dilihat pada Matriks 3 dan Matriks 4 pada Lampiran RAD SDG's DIY 2023 - 2027.

3.2. Tujuan 2 Tanpa Kelaparan

Upaya percepatan penurunan stunting menjadi salah satu prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 dan oleh karenanya juga menjadi perhatian khusus Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk menekan angka stunting, Pemda DIY telah memiliki rencana aksi daerah yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Stunting Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 – 2024. Regulasi tersebut mengatur rencana aksi dan peran masing-masing sektor dalam menurunkan prevalensi stunting. Sementara itu, terkait pangan, Pemda DIY melaksanakan berbagai upaya mengatasi kerawanan pangan melalui usaha ekonomi produktif, antara lain menerapkan program Desa Mandiri Pangan. Program Desa Mandiri Pangan tersebut juga perlu bersinergi dengan program-program terkait peningkatan produktivitas pertanian. Kebijakan yang relevan diantaranya adalah peningkatan kualitas lahan, intensifikasi lahan, penyaluran sarana produksi pertanian, dan penerapan insentif-disinsentif untuk petani pada KP2B. Dalam upayanya untuk memperkuat produksi pangan, DIY juga memiliki Peraturan Daerah DIY Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dalam Perda tersebut memuat Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diarahkan pada lahan pertanian beririgasi dan tidak beririgasi dengan luas 104.905,76 hektar yang terdiri atas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Tabel 3.3 Target dan Indikator Sasaran Tujuan 2 Tanpa Kelaparan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target Tahunan				
					2023	2024	2025	2026	2027
2.1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun								
2.1.1	Prevalensi ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	BPS Pusat Kajian RAD TPB DIY	%		8,49 sd 10,73	7,92 sd 10,16	7,35 sd 9,59	6,78 sd 9,02	6,21 sd 8,45
2.1.2	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan Skala Pengalaman Kerawanan Pangan (FIES)	Renstra DPKP	%		Didukung oleh indikator alternatif				
2.2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah lima tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula								
2.2.1	Prevalensi Stunting	SSGI Dinkes	%	17 (2021)	15	14	13.7	13.4	13.2
2.2.2	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) pada balita	SSGI Dinkes	%	5,8 (2021)	5.4	5.2	5	4.9	4.8
2.2.2.(a)	Skor Pola Pangan Harapan (PPH), berdasarkan standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.100 kkal/kapita/hari (skor)	RPD DIY 2023-2026, DPKP	Skor		94,4	94,5	94,6	94,7	94,8
2.2.3	Prevalensi anemia pada ibu hamil	Dinkes	%	16.5 (2021)	16.4	16.3	16.2	16.1	16
2.3	Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non pertanian								
2.3.1	Volume produksi/tenaga kerja pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan)	DPKP			Didukung oleh indikator alternatif				
2.3.1.(a)	Nilai tambah pertanian/tenaga kerja pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan)	DPKP			Didukung oleh indikator alternatif				
2.3.2	Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan)	DPKP			PM*	PM*	PM*	PM*	PM*

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target Tahunan				
					2023	2024	2025	2026	2027
2.4	Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktik pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan								
2.4.1	Proporsi areal pertanian produktif dan berkelanjutan	BPS, DPKP	%		PM*	PM*	PM*	PM*	PM*
2.4.1.(a)	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan, (untuk lahan baku sawah)	BPS, DPKP	%		PM*	PM*	PM*	PM*	PM*
2.5	Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianeka-ragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan.								
2.5.1	Jumlah sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, jangka menengah atau jangka panjang	BPS, DPKP			PM*	PM*	PM*	PM*	PM*
2.a	Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerja sama internasional yang kuat, dalam infrastruktur perdesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang								
2.a.1	Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah	BPS, DPKP			PM*	PM*	PM*	PM*	PM*
2.a.2	Total bantuan Pembangunan (ODA) dan bantuan lain untuk sektor Pertanian	BPS, DPKP			PM*	PM*	PM*	PM*	PM*

Keterangan PM* Tidak dilakukan perhitungan indikator oleh Perangkat Daerah Provinsi tetapi mendukung target Nasional

Tabel 3.4 Target dan Indikator Lokal Tujuan 2 Tanpa Kelaparan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target Tahunan				
					2023	2024	2025	2026	2027
2.1.2	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan Skala Pengalaman Kerawanan Pangan (FIES)								
	persentase Desa Mandiri Pangan dalam tahap kemandirian	Rentra		0	93,18	94,32	95,45	96,59	97,72
2.2.2	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) pada balita								
	Prevalensi ketidakcukupan gizi (underweight) pada anak**	SSGI Dinkes	%	12,30	11,9	11,7	11,5	11,3	11,2
2.3.1	Volume produksi/tenaga kerja pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan)								
	Rata-rata persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan**	Renstra DPKP	%		0,45	0,47	0,47	0,47	0,47
2.3.1.(a)	Nilai tambah pertanian/tenaga kerja pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan)								
	Peningkatan nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam PDRB (ADHK)**	Renstra DPKP	Juta rupiah		7575752	7621206	7670744	7724439	7782372

A. Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2023 – 2027

Ada dua cara dalam menangani stunting. Pertama, dimulai dari keluarga yakni fokus pada pengasuhan anak melalui pemantauan 1000 hari pertama kehidupan (HPK). Pada penanganan ini orangtua balita berperan penting dalam pemantauan balita dari lingkup keluarga. Pada fase emas, para orangtua dibantu oleh tenaga kesehatan yang disebut dengan intervensi spesifik dan intervensi sensitif dalam pola asuhnya. Meskipun demikian pengetahuan terhadap pola asuh dan gizi balita sangat penting dimiliki orangtua dalam mengentaskan stunting di DIY. Sehingga dari sisi pengetahuan mengenai pola asuh dan asupan gizi anak sangat ditekankan untuk menghindarkan stunting pada balita.

Selain itu ada juga pelaksanaan pencegahan stunting melalui peran serta kelurahan dan kalurahan secara konvergen yaitu memastikan kelompok sasaran mendapatkan pelayanan yang baik. Hal ini dapat diwujudkan dengan tersedianya layanan kesehatan Ibu dan anak, konseling gizi terpadu yang dapat diwujudkan dengan kegiatan posyandu, tersedianya sarana air bersih dan sanitasi, perlindungan dan jaminan sosial serta kesehatan, pemberian pendidikan anak usia dini (PAUD) dan kelas pengasuhan, pemeriksaan kesehatan pasangan usia subur serta pemberian tablet tambahan darah pada remaja puteri. Sarana dan prasarana yang memadai akan sangat membantu pada keluarga yang memiliki balita. Akses dan keterjangkauan orangtua balita terhadap fasilitas kesehatan sangat dibutuhkan untuk menekan angka stunting di DIY.

Kebijakan dan strategi yang dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan 2, antara lain 1) penguatan desa mandiri pangan; 2) penerapan sistem pertanian berkelanjutan; 3) peningkatan keanekaragaman pangan; 4) memperpendek rantai pasok pangan, misalnya melalui pasar mitra tani; 5) intensifikasi pertanian melalui peningkatan kualitas lahan dan distribusi sarana produksi; 6) upaya peningkatan gizi masyarakat melalui penguatan komitmen, kampanye, dan evaluasi; 7) penguatan sistem surveilans gizi; dan 8) peningkatan efektivitas intervensi spesifik melalui perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi.

Strategi meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan :

1. Meningkatkan produksi tanaman dan populasi ternak yang berdampak bagi peningkatan pendapatan petani;

2. Meningkatkan daya saing produk pertanian melalui standardisasi produk dan proses, peningkatan rantai pasok, mutu dan keamanan pangan;
3. Mengembangkan infrastruktur (lahan, air, sarana dan prasarana);
4. Mengembangkan kawasan yang berdampak terhadap pendapatan petani;
5. Mengembangkan sentrasentra pembibitan ternak lokal;
6. Melakukan pendampingan dan pengawalan kelompok;
7. Meningkatkan kapasitas tenaga penyuluh, memantapkan kelembagaan penyuluhan, dan meningkatkan koordinasi penyelenggaraan penyuluhan;
8. Menumbuhkan dan memberdayakan petani milenial;
9. Mengendalikan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan penyakit hewan menular strategis (PHMS) serta menangani dampak bencana alam dan perubahan iklim untuk mengamankan produksi pertanian.

Strategi Meningkatnya kualitas ketahanan pangan masyarakat dengan cara Meningkatkan ketersediaan, akses, konsumsi, dan keamanan pangan dan disinergikan dalam penanggulangan stunting DIY.

B. Kontribusi Aktor Nonpemerintah pada RAN TPB/SDGs Tujuan 2

Sesuai dengan prinsip inklusif, untuk optimalisasi pencapaian SDGs, Non pemerintah menjadi bagian dalam mengisi Rencana Aksi Daerah DIY. Secara garis besar, program yang masuk dalam lingkup DIY dari Aktor Nonpemerintah untuk TPB/SDGs Tujuan 2 diantaranya adalah: UNIVERSITAS WIDYA MATARAM, Yayasan Hijau GPL, Lazismu, Pimpinan wilayah ikatan tunanetra muslim Indonesia daerah istimewa Yogyakarta PW ITMI DIY, PPD DIY.

Dengan beberapa program kegiatan diantaranya: penanganan stunting, pendampingan desa rawan pangan, pembinaan gizi, bansos.

3.3. Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera terkait dengan dua Prioritas Nasional, yaitu Prioritas 3 dan Prioritas 7. Tujuan 3 TPB mencakup kematian ibu dan bayi, penyakit menular dan tidak menular, kesehatan reproduksi dan KB, cakupan kesehatan universal, serta penyalahgunaan NAPZA. Melalui Tujuan 3 TPB,

diharapkan pelayanan kesehatan dapat diakses oleh semua orang, tanpa kecuali. Kejadian kesehatan untuk semua tingkatan umur perlu segera diatasi karena dalam jangka panjang, kesehatan individu akan dipengaruhi oleh kesehatannya di masa lampau.

Arah kebijakan sesuai RPJMN 2020-2024 adalah meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi.

Tabel 3.5 Target dan Indikator Sasaran Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target Tahunan				
					2023	2024	2025	2026	2027
3.1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup								
3.1.1	Angka Kematian Ibu (AKI)	Dinkes	kasus	131 (2021)	44	42	39	35	30
3.1.2	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Dinkes	%	99.87 (2021)	99.81	99.82	99.83	99.84	99.85
3.2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000								
3.2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Dinkes	Kasus per setiap 1000 kelahiran hidup	6.99 (2021)	6.76	6.68	6.63	6.6	6.58
3.2.2	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Dinkes	Jiwa	210 (2021)	208	207	206	205	204
3.3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya								
3.3.3	Kejadian Malaria per 1.000 orang (ada di metadata tapi tidak di RAN)	Dinkes	Per 1000 orang	0.036 (2022)	0.021	0.021	0.021	0.021	0.021
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Dinkes	Kab/Kota	5	5	5	5	5	5
3.3.4	Insiden Hepatitis B	Dinkes	%	115	113	112	111	110	109
3.3.5	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta								
	a. Filariasis	Dinkes	orang	3 (2022)	5	4	4	3	3
	b. Kusta	Dinkes	%	75 (2022)	75.5	76	76.5	77	77.5
3.3.5.(a)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi Kusta	Dinkes	Kab/Kota	5 (2022)	5	5	5	5	5
3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan filariasis yang mencapai eliminasi	Dinkes	Kab/Kota	5 (2022)	5	5	5	5	5

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target Tahunan				
					2023	2024	2025	2026	2027
3.4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan								
3.4.1.(a)	Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas selama sebulan terakhir merokok tembakau	BPS, Statistik strategis	%		PM*	PM*	PM*	PM*	PM*
3.4.1.(b)	Jumlah Penderita Hipertensi	Dinkes	%	51,5(2021)	52	53	54	55	56
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Dinkes	%	21,3 (2022)	21.2	21.2	21.1	21	20.9
3.5	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan								
3.5.1.(a)	Jumlah penyalahgunaan napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis	Dinkes	orang		210	215	219	223	226
3.5.1.(a)	Jumlah penyalahgunaan napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis	BNNP DIY, BNNK Sleman, BNNK Yogyakarta, BNNK Bantul	Orang	146	153	161	169	177	186
3.5.1.(b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi	BNNP DIY, BNNK Sleman, BNNK Yogyakarta, BNNK Bantul	Orang	146	153	161	169	177	186
3.7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional								
3.7.1	Persentase pemakaian kontrasepsi (modern contraceptive prevalence rate/ CPR)	DP3AP2	%		76,22 sd 78,67	76,87 sd 79,32	77,52 sd 79,97	78,17 sd 80,62	78,82 sd 81,26
	Persentase pemakaian kontrasepsi (modern contraceptive prevalence rate/ CPR)	BKKBN	%	55,60 (2021)	57,17	57,17	57,18	PM	PM

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target Tahunan				
					2023	2024	2025	2026	2027
	Unmet Need kebutuhan ber-KB	BKKBN	%	19,80 (2021)	14,5	14,5	14,5	PM	PM
3.7.2	Angka kelahiran menurut umur (ASFR) 15-19 tahun	BKKBN	Kelahiran per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun	9,10 (2021)	13	12	PM	PM	PM
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR)	BKKBN	Jumlah anak per WUS 15-49 tahun	1,91 (2021)	1,82	1,82	1,82	PM	PM
3.8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang								
3.8.1	Cakupan pelayanan kesehatan esensial	BPS,Dinkes			PM*	PM*	PM*	PM*	PM*
3.8.1.(a)	Unmet Need Pelayanan Kesehatan Menurut Provinsi	BPS,Dinkes	%		PM*	PM*	PM*	PM*	PM*
3.8.2	Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan	BPS,Susenas	%		PM*	PM*	PM*	PM*	PM*
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Dinkes	%	97.2	97.6	97.8	97.9	98	98
3.a	Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat								
3.a.1	Persentase Merokok Pada Penduduk Umur ≥ 15 Tahun Menurut Provinsi	BPS	%		PM*	PM*	PM*	PM*	PM*
3.b	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek- Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua								
3.b.1	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional								
	a. DPT3	Dinkes	%	97,8(2021)	97,9	98	98	98,1	98,2

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target Tahunan				
					2023	2024	2025	2026	2027
	b. Campak2	Dinkes	%	88,5 (2021)	88,6	88,7	88,8	88,9	89
	c. PCV2	Dinkes	%		90	90,5	91	91,5	92
3.b.3	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan.	Dinkes	%	100	100	100	100	100	100
3.c	Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil								
3.c.1	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	Dinkes	%	5.18 (2021)	6,94	7,02	7,10	7,18	7,26
	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Dinkes	%	92.3	93.31	95.87	97.52	99.17	100
	Persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya	Dinkes	%	80	80	90	90	90	100

Keterangan PM* Tidak dilakukan perhitungan indikator oleh Perangkat Daerah Provinsi tetapi mendukung target Nasional

Tabel 3.5 Target dan Indikator Lokal Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target Tahunan				
					2023	2024	2025	2026	2027
	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional	Dinkes	%						
3.b.1	a. DPT3	Dinkes	%	97,8(2021)	97,9	98	98	98,1	98,2
	b. Campak2	Dinkes	%	88,5 (2021)	88,6	88,7	88,8	88,9	89
	c. PCV2	Dinkes	%		90	90,5	91	91,5	92
	Imunisasi Dasar Lengkap anak usia 12-23 bulan	Dinkes	%	97.25	97.26	97.55	97.95	98.36	98.76
	Persentase Anak kurang dari 1 tahun mendapat imunisasi lengkap**	Dinkes	%		96	97	98	99	100

A. Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2023 – 2027

Arah kebijakan untuk mencapai target Tujuan 3 TPB, antara lain melalui:

1. peningkatan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi;
2. percepatan perbaikan gizi masyarakat;
3. peningkatan pengendalian penyakit;
4. pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; dan
5. penguatan sistem kesehatan

Untuk DIY, kebijakan kesehatan perlu difokuskan dalam beberapa hal, yaitu gizi, kesehatan ibu dan anak, penyakit menular dan penyakit tidak menular terutama penyakit degeneratif, pelayanan kesehatan, serta pembiayaan kesehatan. Oleh karena itu, beberapa strategi yang dapat dilaksanakan, antara lain:

1. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan antenatal, neonatal, persalinan, dan pasca persalinan
2. Pengembangan sistem jaminan gizi dan tumbuh kembang anak dengan pemberian asupan gizi sejak dalam kandungan, perbaikan pola asuh, dan perbaikan sanitasi lingkungan, serta penyediaan air bersih
3. Pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit termasuk perluasan cakupan deteksi dini dan penguatan surveilans real-time
4. Pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian penyakit
5. Penyebaran masyarakat dan *health literacy* terutama dalam menangani faktor resiko penyakit
6. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang difokuskan pada penguatan fungsi Puskesmas dan jaringannya dalam upaya kesehatan masyarakat yang berkualitas dan didukung dengan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan terutama difokuskan pada wilayah selatan DIY.
7. Penguatan health security.

Selain itu, strategi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dilakukan Dinas Kesehatan DIY antara lain:

1. Fokus pada pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bencana dan KLB dengan penekanan pre-hospital emergency
2. Fokus pada penguatan layanan kesehatan Primary Health Care, RS, dan pengembangan RS Respira menjadi RS Unggulan Paru di wilayah selatan DIY
3. Fokus pada intervensi penurunan stunting
4. Fokus pada bridging system/integrasi sistem informasi dan pemanfaatan teknologi informasi kesehatan
5. Mendukung budaya menjadi mainstream pembangunan dengan upaya pengembangan kesehatan tradisional
6. Fokus pada pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan pembangunan Kesehatan masyarakat.

B. Kontribusi Aktor Nonpemerintah pada RAD TPB/SDGs Tujuan 3

Sesuai dengan prinsip inklusif, untuk optimalisasi pencapaian SDGs, aktor nonpemerintah menjadi bagian dalam Rencana Aksi Daerah. Secara garis besar, program yang masuk dalam lingkup nasional dari aktor nonpemerintah untuk Tujuan 3 kehidupan sehat dan sejahtera diantaranya adalah: PKBI, Lazismu, Nu Care, Univ. Respati Yogyakarta, Univ Aisyiah Yogyakarta, Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia (KPSI) Simpul Yogyakarta, Yayasan SATUNAMA Yogyakarta, ORGANISASI HARAPAN NUSANTARA INDONESIA, PPDI DIY, Wahana Keluarga Cerebral Palsy (WKCP), Genta Lansia dan Dukungan Kecil, Pusat Rehabilitasi YAKKUM

Program Kesehatan Seksual dan Reproduksi, Pembinaan Gizi, akses Kesehatan, Gerakan hidup sehat (GERMAS), peningkatan layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, posbindu, pengendalian AIDS, kesehatan lansia, kesehatan jiwa

3.4. Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas

Tujuan 4 TPB berkaitan dengan penyediaan pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata serta peningkatan kesempatan belajar untuk semua. Dalam RPJMN 2020-2024, tujuan 4 terutama terkait dengan dua Prioritas Nasional,

yaitu Prioritas 3 Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, serta Prioritas 4 Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Target-target tujuan 4 mencakup beberapa isu pokok, antara lain pemenuhan akses pendidikan, peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, pendidikan yang mengarah pada kesiapan kerja, serta pendidikan pra sekolah. Strategi yang diupayakan untuk mencapai tujuan 4 adalah sebagai berikut 1) Optimalisasi angka partisipasi pendidikan; 2) Peningkatan dan pemertaan mutu layanan pendidikan; 3) Peningkatan relevansi pendidikan; 4) Penguatan budaya, bahasa, dan pendidikan karakter, dan 5) Penguatan tata kelola pendidikan.

Penjabaran visi jangka panjang DIY tahun 2005-2025 adalah mewujudkan DIY sebagai pusat pendidikan dan budaya yang terkemuka sehingga bidang pendidikan menjadi perhatian khusus bagi DIY. Selaras dengan Perda DIY no 5 tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya maka pendidikan di DIY perlu dikaitkan dengan kebudayaan dan karakter khas Kejojjaan. Hal ini mendukung siswa untuk tidak hanya pintar secara akademik namun juga memiliki martabat dan mampu menjunjung tinggi budaya. Berdasarkan anggaran, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta harus konsisten dan berkelanjutan dalam menyalurkan setidaknya 20% dari anggaran untuk fungsi pendidikan sesuai dengan amanat undang-undang. Dalam RTRW telah tercantum rencana untuk pengembangan kawasan pendidikan, pusat penelitian dan teknologi tinggi. Juga, di dalam RPD terdapat program peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dengan harapan peningkatan akses dan kualitas akan diikuti dengan peningkatan partisipasi sekolah. Sementara itu, angka target pencapaian indikator Tujuan 4 untuk tahun 2023-2027 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.7 Target dan Indikator Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target Tahunan				
					2023	2024	2025	2026	2027
4.1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif								
4.1.1.(a)	Proporsi anak-anak dan remaja yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam (i) membaca dan (ii) matematika								
	Nilai rata-rata hasil PISA: Membaca	Renstra Disdikpora	Skor	411	420	PM	PM	PM	425
	Nilai rata-rata hasil PISA: Matematika	Renstra Disdikpora	Skor	422	425	PM	PM	PM	430
4.1.2	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat								
	a. Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan dan Provinsi (SD)	BPS, Kajian RAD TPB DIY	%		96,06 sd 98,47	96,24 sd 98,65	96,42 sd 98,82	96,6 sd 99	96,78 sd 99,18
	b. Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan dan Provinsi (SMP)	BPS, Kajian RAD TPB DIY	%		94,79 sd 97,2	95,56 sd 97,97	96,34 sd 98,75	97,12 sd 99,53	97,9 sd 100,31
	c. Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan dan Provinsi (SMA)	BPS, Kajian RAD TPB DIY	%		90,91 sd 93,32	92,45 sd 94,86	93,99 sd 96,4	95,53 sd 97,94	97,07 sd 99,48
4.1.2.(a)	Angka anak tidak sekolah jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat								
	Angka Putus Sekolah SD/MI SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat**	Disdikpora, Kajian RAD TPB DIY			0,04 sd 0,11	0,02 sd 0,09	0,01 sd 0,08	0 sd 0,06	0 sd 0,05
	Angka Putus Sekolah SMP/MTs**	Disdikpora, Kajian RAD TPB DIY			0,03 sd 0,14	0,01 sd 0,12	0 sd 0,11	0 sd 0,09	0 sd 0,08
	Angka Putus Sekolah SMA/MA**	Disdikpora, Kajian RAD TPB DIY			0,13 sd 0,29	0,12 sd 0,28	0,1 sd 0,26	0,09 sd 0,25	0,07 sd 0,23
4.2	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar								

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target Tahunan				
					2023	2024	2025	2026	2027
4.2.1	Proporsi anak usia 24-59 bulan yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin	BPS, Kajian RAD TPB DIY	%		PM*	PM*	PM*	PM*	PM*
4.2.2	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar) menurut provinsi	BPS, Kajian RAD TPB DIY	%		99,53 sd 100	99,74 sd 100	99,94 sd 100	100	100
4.3	Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas								
4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin								
	(1) usia 15 – 24 tahun	BPS, Kajian RAD TPB DIY	%		PM*	PM*	PM*	PM*	PM*
	(2) usia 15 – 59 tahun	BPS, Kajian RAD TPB DIY	%		PM*	PM*	PM*	PM*	PM*
4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	BPS, Kajian RAD TPB DIY	%		75,65 sd 83,86	77,49 sd 85,7	79,34 sd 87,55	81,18 sd 89,39	83,02 sd 91,23
4.4	Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan								
4.4.1.(a)	Proporsi Remaja Dan Dewasa Usia 15-24 Tahun Dengan Keterampilan Teknologi Informasi Dan Komputer (TIK) Menurut Provinsi	BPS, Kajian RAD TPB DIY	%		99,27 sd 100	99,67 sd 100	100	100	100
	Proporsi Remaja Dan Dewasa Usia 15-59 Tahun Dengan Keterampilan Teknologi Informasi Dan Komputer (TIK) Menurut Provinsi	BPS, Kajian RAD TPB DIY	%		86,48 sd 100	93,86 sd 100	100	100	100
4.5	Menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan								
4.5.1	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki- laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas								

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target Tahunan				
					2023	2024	2025	2026	2027
4.5.1 (i)	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) SD Perempuan/Laki-Laki Menurut Provinsi	BPS, Disdikpora, Kajian RAD TPB DIY	%	87.9	99,74 sd 100,25	99,79 sd 100,29	99,83 sd 100,34	99,88 sd 100,39	99,93 sd 100,44
4.5.1 (ii)	Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat	Disdikpora	%	108.22	99	99,5	100	100	100
	Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB	Renstra Disdikpora	%		84,08	84,78	85,18	85,88	
4.6	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numeras								
4.6.1.(a)	Angka Melek Huruf Penduduk 15 Tahun Ke atas	BPS, statistik strategis, Kajian RAD TPB DIY	%		95,18 sd 95,72	95,31 sd 95,85	95,43 sd 95,97	95,56 sd 96,1	95,68 sd 96,22
4.a	Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua								
4.a.1	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	BPS, Disdikpora		Semua sekolah sudah	PM*	PM*	PM*	PM*	PM*
				SMA 168	PM*	PM*	PM*	PM*	PM*
				SMK 216	PM*	PM*	PM*	PM*	PM*
				SLB 79	PM*	PM*	PM*	PM*	PM*
4.a.1.(a)	Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir	BPS, Disdikpora	%	Dalam rapat pendidikan dalam lingkungan pembelajaran	PM*	PM*	PM*	PM*	PM*
4.c	Pada tahun 2030, secara substansial meningkatkan penyediaan guru-guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional untuk pelatihan guru di negara-negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil								
4.c.1	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan	Disdikpora			Didukung oleh Indikator Alternatif				

Keterangan PM* Tidak dilakukan perhitungan indikator oleh Perangkat Daerah Provinsi tetapi mendukung target Nasional

Tabel 3.8 Target dan Indikator Lokal Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (<i>baseline</i>)	Target Tahunan				
					2023	2024	2025	2026	2027
4.c.1	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan								
	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang kompeten**	Renstra Disdikpora	%	94.37	95.88	96.25	96.65	97	PM

A. Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2023 – 2027

Beberapa kebijakan yang dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan 4, antara lain :

- 1) pengembangan kawasan pendidikan, pusat penelitian, dan teknologi tinggi;
- 2) peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan terutama untuk wilayah selatan DIY;
- 3) pemerataan kapasitas tenaga pendidik dan kualitas sarana prasarana pendidikan;
- 4) optimalisasi pengelolaan dana BOS;
- 5) mempertemukan kebutuhan dunia usaha dengan pendidikan vokasi;
- 6) peningkatan mutu dan sertifikasi tenaga pendidik; serta
- 7) sistem pencatatan dan agregasi data pendidikan yang terpadu dari tingkat kabupaten/ kota sampai provinsi.

Pelaksanaan pembangunan membutuhkan strategi yang tepat dan memadai sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Perumusan strategi dilakukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan strategis baik di dalam (internal) maupun di luar (eksternal) seperti :

1. Meningkatkan layanan prima dengan pemanfaatan sarana prasarana secara efektif dan efisien
2. Pengelolaan pendidikan menengah dengan fokus pada pencapaian SPM, mempermudah akses pendidikan, Penguatan karakter kemandirian siswa, peningkatan kompetensi guru, dan penguatan jejaring dengan dunia usaha dunia industry
3. Pengelolaan pendidikan khusus dengan fokus pada pencapaian SPM, advokasi kepada keluarga untuk anak disabilitas tentang layanan pendidikan, afirmatif policy melalui beasiswa, Penguatan karakter kemandirian siswa, peningkatan jumlah dan kompetensi guru
4. Peningkatan kualitas, kuantitas Guru dan Tenaga Kependidikan
5. Mengembangkan kurikulum sesuai perkembangan, dengan tetap memasukkan nilai budaya dan meningkatkan kemampuan guru dalam penerapan kurikulum
6. pengendalian perizinan pendidikan
7. Mengembangkan kapasitas daya saing kepemudaan serta mengembangkan wirausaha bagi pemuda
8. Meningkatkan daya saing keolahragaan melalui penyelenggaraan dan

partisipasi event olahraga

9. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana olahraga sesuai standar
10. Peningkatan pendidikan berbasis budaya berbasis keistimewaan DIY
11. Meningkatkan jejaring pendidikan dibarengi dengan memperkuat identitas budaya DIY

B. Kontribusi Aktor Nonpemerintah pada RAD TPB/SDGs Tujuan 4

Sesuai dengan prinsip inklusif, untuk optimalisasi pencapaian SDGs, Aktor Nonpemerintah menjadi bagian dalam mengisi Rencana Aksi Daerah DIY. Secara garis besar, program yang masuk dalam lingkup nasional dari Aktor Nonpemerintah untuk TPB/SDGs Tujuan 4 diantaranya adalah: AIESEC, PKBI, Lazismu, Nu Care, Perguruan Tinggi (Poltekkes Kemenkes Yogyakarta), FPMI DIY (Forum Pendidik Madrasah Inklusi) DIY

Program kegiatan yang mendukung tujuan 4 diantaranya :pelatihan pendidikan non formal, konseling untuk remaja, beasiswa, peningkatan kualitas pendidikan, renovasi bangunan sekolah, penelitian, pelatihan guru inklusif, pelatihan membaca dan menulis.

3.5. Tujuan 5: Kesetaraan Gender

Tujuan 5 TPB yang berfokus pada kesetaraan gender terkait dengan empat prioritas nasional, yaitu prioritas 3 Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, prioritas 4 Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, prioritas 5 Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar, dan prioritas 7 Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Pemerintah Indonesia, melalui Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 mengamanatkan strategi pengarusutamaan gender (PUG) secara nasional yang dimandatkan kepada semua Kementerian/Lembaga dan Pimpinan Daerah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan. Program dan kebijakan yang menuju tujuan ini kebanyakan berada di bawah tugas dan fungsi Dinas P3AP2 dan BKKBN. Untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan, DP3AP2 telah mengusahakan beberapa program. Program unggulan dari DP3AP2 adalah P2TPA Korban Kekerasan RDU. Program tersebut adalah program pelayanan terpadu perempuan dan anak korban kekerasan melalui pemanfaatan teknologi digital

seperti kontak whatsapp dan surat elektronik. Keterpaduan program terletak pada layanan yang komprehensif bagi korban melalui satu pintu. Terdapat lima layanan konsultasi yang disediakan, yakni konsultasi psikologis, konsultasi medis, konsultasi perkawinan, konsultasi sosial, dan konsultasi hukum. P2TPAKK RDU sejak tahun 2018 sudah berstandar ISO 9001:2015 di bawah payung hukum Pergub DIY nomor 14 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur No. 67 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami”.

Selain itu, ada pula program TeSAGA DIY. TeSAGA adalah layanan telekonseling psikologi terkait pengasuhan, tumbuh kembang anak, remaja, serta permasalahan perempuan dan keluarga. Layanan TeSAGA merupakan layanan gratis yang disediakan DP3AP2. Layanan yang diberikan juga mencakup konsultasi pranikah, parenting, dan kesehatan reproduksi. Layanan diberikan secara daring melalui media sosial guna memudahkan komunikasi dan membuka akses yang lebih luas. Selain itu, ada pula kegiatan-kegiatan pendukung lain dari DP3AP2. Kegiatan seperti kampanye pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, fasilitasi pusat lembaga layanan, peningkatan kapasitas bagi petugas layanan, dan Fasilitasi Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) merupakan beberapa kegiatan yang ikut mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan terutama untuk perempuan dan anak.

Tak hanya DP3AP2, Dinas Sosial DIY juga ikut andil dalam menyukseskan tujuan kesetaraan gender. Dinas sosial memiliki Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW). Pada tahun 2017, terdapat penelitian yang meneliti BPRSW DIY. Dalam penelitian tersebut dinyatakan bahwa hambatan dalam operasional BPRSW adalah perbedaan latar belakang masalah klien dan masih rendahnya partisipasi masyarakat sehingga kuota target yang telah ditentukan oleh BPRSW tidak terpenuhi.

Sementara itu, target dan indikator untuk mencapai Tujuan 5 TPB disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.9 Target dan Indikator Tujuan 5 Kesetaraan Gender

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target Tahunan				
					2023	2024	2025	2026	2027
5.2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya								
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	DP3AP2, Polda DIY	%		Didukung oleh Indikator Alternatif				
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	DP3AP2 dan Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK)			PM*	PM*	PM*	PM*	PM*
5.3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan								
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun	BPS, DP3AP2, Kajian RAD TPB DIY	%		PM*	PM*	PM*	PM*	PM*
	Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi	BPS, DP3AP2, Kajian RAD TPB DIY	%		0.61 sd 3.89	0.31 sd 3.59	0.01 sd 3.29	0.01 sd 2.99	0.01 sd 2.69
5.5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat								
5.5.1*	(a) Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat (DPR dan DPD RI)	BPS, Statistik Strategis, DP3AP2	%	18,8 (2021)	18	18.5	19	19	19
	(b) Proporsi kursi legislatif dan jabatan pemerintah yang diduduki perempuan di pemerintah daerah yang dipilih melalui pemilu (DPRD provinsi dan kabupaten/kota, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota)	RPD DIY 2023-2026, DP3AP2	%	lihat di rentra DP3AP2	18	18.5	19	19	19

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target Tahunan				
					2023	2024	2025	2026	2027
5.5.2*	(a) Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial di pemerintahan	BPS, DP3AP2, Kajian RAD TPB DIY	%	lihat di reentra DP3AP2	32.09 sd 47.47	33.84 sd 49.22	35.59 sd 50.97	37.34 sd 52.72	39.09 sd 54.47
5.6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reuiu dari konferensi-konferensi tersebut								
5.6.1*	(1) Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan (seluruh wanita usia subur/WUS)	BPS , DP3AP2, Kajian RAD TPB DIY	Persen		PM*	PM*	PM*	PM*	PM*
	(2) Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun berstatus kawin yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan (hanya Pasangan Usia Subur/PUS)	BPS , DP3AP2, Kajian RAD TPB DIY	Persen		PM*	PM*	PM*	PM*	PM*
5.6.2*	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.	BPS , DP3AP2, Kajian RAD TPB DIY	Dokumen	Perda perlindungan anaka dan kekerasan	PM*	PM*	PM*	PM*	PM*
5.a	Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional								
5.a.1*	(1) Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian;	BPS, Sutas, Kajian RAD TPB DIY	%	43.76	PM*	PM*	PM*	PM*	PM*
	(2) Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan.	BPS, Sutas, Kajian RAD TPB DIY	%	43.87	PM*	PM*	PM*	PM*	PM*
5.b	Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan								
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Diskominfo, Provider			Digunakan Indikator Alternatif				

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target Tahunan				
					2023	2024	2025	2026	2027
	Persentase Penduduk 5 Tahun Ke atas menurut Apakah Menggunakan Telepon Selular dan Memiliki/menguasai Telepon Selular dalam 3 Bulan Terakhir**	BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat, Diskominfo, Kajian RAD TPB DIY	%		69,5 sd 72,83	70,42 sd 73,76	71,34 sd 74,68	72,27 sd 75,6	73,19 sd 76,52
	Persentase Penduduk Perempuan Berumur 5 Tahun ke Atas yang Memiliki/ Menguasai Telepon Seluler (HP) dalam 3 Bulan Terakhir**	BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat, Diskominfo, Kajian RAD TPB DIY	%	baseline 2021: 66.6,	67,1 sd 70,43	68,4 sd 71,74	69,71 sd 73,05	71,02 sd 74,35	72,33 sd 75,66
	Persentase Penduduk Laki-laki Berumur 5 Tahun ke Atas yang Memiliki/ Menguasai Telepon Seluler (HP) dalam 3 Bulan Terakhir**	BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat, Diskominfo, Kajian RAD TPB DIY	%	73,08 (2021)	71,95 sd 75,29	72,48 sd 75,82	73,01 sd 76,35	73,54 sd 76,88	74,07 sd 77,41

Keterangan PM* Tidak dilakukan perhitungan indikator oleh Perangkat Daerah Provinsi tetapi mendukung target Nasional

Tabel 3.10 Target dan Indikator Lokal Tujuan 5 Kesetaraan Gender

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target Tahunan				
					2023	2024	2025	2026	2027
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.								
	Jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) **	Polda DIY,	Kasus	67 (2022)*	10	7	5	2	1
	Jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) **	DP3AP2 dan Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK)	Kasus	616 (2022)	menurun	menurun	menurun	menurun	menurun

A. Arah kebijakan dan Strategi Tahun 2023 - 2027

Untuk mencapai Tujuan 5, kebijakan yang dapat dilaksanakan, antara lain sebagai berikut:

1. peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, terutama dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, tenaga kerja, serta politik, jabatan publik, dan pengambilan keputusan
2. Penguatan sistem perlindungan anak
3. Pelibatan lembaga non pemerintah maupun komunitas untuk pemberdayaan perempuan
4. Pelibatan lembaga non pemerintah maupun komunitas dalam upaya pencegahan KDT maupun dalam perlindungan dan advokasi korban
5. Optimalisasi pelayanan lembaga perlindungan perempuan dan anak.

Beberapa strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Menurunkan prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui optimalisasi jejaring pencegahan, penanganan dan pemberdayaan.
2. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui Sosialisasi, peningkatan kapasitas, penyediaan informasi dan layanan konseling Tenaga.
3. Meningkatkan level capaian KLA di DIY melalui peningkatan kapasitas gugus tugas KLA di provinsi dan kabupaten/kota.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan dan penanganan korban melalui koordinasi jejaring lembaga layanan.
5. Memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender dan peningkatan kapasitas SDM tentang perspektif gender di seluruh aspek pembangunan.
6. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pembentukan dan pendampingan Kelompok Ekonomi Produktif Desa Prima.
7. Meningkatkan partisipasi perempuan di ranah publik melalui advokasi, penguatan kapasitas perempuan dan peningkatan kesadaran masyarakat.
8. Penguatan dan pemanfaatan Sistem Data Gender dan Anak.
9. Mempertahankan rata-rata usia kawin pertama perempuan.
10. Mengoptimalkan sistem konseling ketahanan keluarga.
11. Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

B. Kontribusi Aktor Nonpemerintah pada RAD TPB/SDGs Tujuan 5

Sesuai dengan prinsip inklusif, untuk optimalisasi pencapaian SDGs, Aktor Nonpemerintah menjadi bagian dalam mengisi Rencana Aksi Daerah DIY. Secara garis besar, program yang masuk dalam lingkup nasional dari Aktor Nonpemerintah untuk TPB/SDGs Tujuan 5 diantaranya ada Aisyiyah. Program kegiatan pada tujuan 5diantaranya: Pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana dan Pembinaan Keluarga.

3.6. Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak

Tujuan 6 TPB air minum dan sanitasi layak terkait dengan dua prioritas nasional, yaitu prioritas 5 Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, erta prioritas 6 Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Tujuan 6 TPB ini berfokus pada air minum aman, sanitasi layak, kualitas air, dan pengelolaan sumber daya.

Dalam RAD, Pemda DIY telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan cakupan penduduk berakses air minum dan meningkatkan persentase penggunaan air minum perpipaan. Melalui SPAM Regional, SPAM IKK, dan SPAM Perdesaan dengan penekanan pada keberfungsian, dalam hal ini terkait dengan peningkatan kapasitas produksi, peningkatan sambungan rumah, peningkatan jumlah jiwa terlayani, serta peningkatan distribusi air mengalir. Selain itu, dalam upaya untuk meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan, maka diperlukan peningkatan layanan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpadu. DIY sudah memiliki SPALD terpadu di Bantul yang melayani sebagian Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, dan sebagian Kabupaten Sleman. Namun, SPALD terpadu belum bisa melayani seluruh rumah tangga di DIY khususnya Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo karena kendala geografis. Sebagai alternatif, Pemda DIY membuat IPAL komunal, atau yang kini disebut SPALD Terpusat Skala Permukiman, di berbagai tempat di DIY. Selama ini, tak hanya pemerintah yang berusaha untuk menjaga kualitas air sungai, tetapi ada juga kelompok masyarakat yang ikut serta menjaga sungai. Pada tahun 2020, tercatat terdapat dua puluh kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan sungai.

Target pencapaian indikator TPB Tujuan 6 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11 Target dan Indikator Sasaran Tujuan 6 Akses Air Bersih dan Sanitasi

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target Tahunan				
					2023	2024	2025	2026	2027
6.1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua								
6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	RPD DIY 2023-2026, DPUP-ESDM	%		95,28	95,80	96,48	97,15	PM
6.2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan								
6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.	BPS, DPUP-ESDM, Dinkes, Kajian RAD TPB DIY			PM*	PM*	PM*	PM*	PM*
	a. Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Fasilitas Cuci Tangan Dengan Sabun Dan Air Menurut Provinsi	BPS, DPUP-ESDM, Kajian RAD TPB DIY	%		83,13 sd 91,95	85,95 sd 94,76	87,49 sd 96,3	89,04 sd 97,85	90,58 sd 99,4
	b. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak	RPD DIY 2023-2026, DPUP-ESDM	%	96.18	94,9	96,07	96,54	97,23	PM
	c. Persentase rumah tangga yang masih melakukan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka	DPUP-ESDM	%		Digunakan Indikator Alternatif				
	d. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T	RPD DIY 2023-2026, DPUP-ESDM	%	34.72	35,39	36,05	36,72	37,39	PM
	e. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sistem pengelolaan lumpur tinja	Perhitungan data sekunder, DPUP-ESDM	m3		28800	28800	28800	28800	PM
6.3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global								
6.3.1 (a)	Persentase limbah cair industri yang dikelola secara aman	DLHK, Kajian RAD TPB DIY			PM*	PM*	PM*	PM*	PM*

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target Tahunan				
					2023	2024	2025	2026	2027
6.3.2 (a)	Kualitas air permukaan sebagai air baku	DLHK, Kajian RAD TPB DIY			Didukung oleh Indikator Alternatif				
6.3.2 (b)	Kualitas air tanah sebagai air baku	DLHK, Kajian RAD TPB DIY			PM*	PM*	PM*	PM*	PM*
6.4	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air								
6.4.2.(a)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaanya	DLHK, Kajian RAD TPB DIY	%		PM*	PM*	PM*	PM*	PM*
6.4.2.(b)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaanya	DLHK, Kajian RAD TPB DIY	%		PM*	PM*	PM*	PM*	PM*
6.5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas sesuai kepantasan								
6.5.1*	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100)	DLHK, Kajian RAD TPB DIY			Didukung oleh Indikator Alternatif				
6.6	Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau								
6.6.1 *	Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu (Indek kualitas tutupan lahan dan gambut)								
	Genangan air	Renstra DPUPESDM 2023-2026	Ha	3.07	3,83	4,59	5,35	6,11	PM
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	DLHK	Indeks		51,06	51,22	PM	PM	PM
	Indeks Kualitas Air Sungai	DLHK	Indeks		40,2	41,4	PM	PM	PM
	Kualitas badan air (permukaan dan tanah)	DLHK, Kajian RAD TPB DIY	Indeks		PM*	PM*	PM*	PM*	PM*

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (<i>baseline</i>)	Target Tahunan				
					2023	2024	2025	2026	2027
	Kuantitas akuifer air tanah	DPUP-ESDM, Kajian RAD TPB DIY	Indeks		PM*	PM*	PM*	PM*	PM*

Keterangan PM* Tidak dilakukan perhitungan indikator oleh Perangkat Daerah Provinsi tetapi mendukung target Nasional

Tabel 3.12 Target dan Indikator Lokal Tujuan 6 Akses Air Bersih dan Sanitasi

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (<i>baseline</i>)	Target Tahunan				
					2023	2024	2025	2026	2027
6.2.1*	c. Persentase rumah tangga yang masih melakukan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka								
	Persentase KK dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat)**	DPUP-ESDM	%		100	100	100	100	100
6.3.2 (a)	Kualitas air permukaan sebagai air baku								
	Indeks Kualitas Air Sungai	DLHK	%		40,2	41,4			
6.5.1*	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100)								
	Persentase penyediaan infrastruktur sumber daya air**	Renstra DPUPESDM 2023-2026	%		70,53	80,19	89,86	100,00	100,00

A. Arah Strategi Kebijakan Tahun 2023 - 2027

Arah kebijakan penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman sesuai dengan amanat RPJMN dilaksanakan melalui beberapa strategi, antara lain

1. peningkatan layanan penyediaan air minum layak dan aman
2. peningkatan layanan sanitasi yang berkelanjutan
3. pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi permukiman sesuai dengan karakteristik daerah
4. peningkatan kesadaran dan perilaku masyarakat terkait dengan pemanfaatan air dan sanitasi
5. pengembangan kerja sama dan pola pendanaan yang inovatif dalam penyediaan infrastruktur pelayanan dasar.

B. Kontribusi Aktor Nonpemerintah pada TPB/SDGs Tujuan 6

Sesuai dengan prinsip inklusif, untuk optimalisasi pencapaian SDGs, Aktor Nonpemerintah menjadi bagian dalam mengisi Rencana Aksi Daerah DIY. Secara garis besar, program yang masuk dalam lingkup nasional dari Aktor Nonpemerintah untuk TPB/SDGs Tujuan 6 dilakukan oleh Yayasan Hijau dengan program kegiatan Pendampingan perlindungan kawasan ekosistem air berbasis masyarakat dan pengetahuan budaya lokal.

3.7. Tujuan 7: Energi Bersih dan Terjangkau

Tujuan 7 TPB Energi bersih dan terjangkau terkait dengan dua prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024, yaitu prioritas 1 Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, serta prioritas 5 Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Tujuan 7 TPB ini berfokus pada memperluas akses energi yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan; perbaikan efisiensi energi; serta memperluas infrastruktur dan meningkatnya teknologi modern dan berkelanjutan. Arah kebijakan terkait energi yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024, antara lain 1) melakukan diversifikasi energi dan ketenagalistrikan untuk pemenuhan kebutuhan, 2) meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi dan tenaga listrik, dan 3) melakukan penguatan dan perluasan pelayanan pasokan energi dan tenaga listrik.

Ketersediaan energi listrik adalah salah satu parameter penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Pengelolaan energi listrik yang benar dan terarah merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan makin meningkatnya peran pemerintah daerah dalam hal pengelolaan sumber daya energi, termasuk di dalamnya sektor ketenagalistrikan. Hal ini terlihat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, yaitu pemerintah daerah berkewajiban menyediakan dana pembangunan sarana dan prasarana penyediaan tenaga listrik untuk membantu kelompok tidak mampu. Pemerintah terus fokus dalam pemerataan akses listrik yang ramah lingkungan ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Hal ini ditunjukkan melalui pencapaian rasio elektrifikasi sebesar 99,40% di triwulan III tahun 2021 dibarengi dengan pertumbuhan kapasitas pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan (EBT) yang cukup menjanjikan. Pada triwulan ketiga tahun 2021, rasio elektrifikasi naik 0,3% menjadi 99,40%. Pemerintah menargetkan seluruh wilayah dan rumah tangga di Indonesia akan mendapatkan aliran listrik 100% pada tahun 2022.

DIY bukanlah produsen energi. Energi yang digunakan di DIY masih bergantung pada energi fosil. Ke depan, dalam RPD disebutkan bahwa strategi dalam pembangunan ekonomi jangka panjang harus mengutamakan energi bersih dan terbarukan sebagai alternatif energi. Terlebih lagi, menimbang kondisi geografis DIY yang tidak memungkinkan untuk pembangunan pembangkit listrik konvensional dengan bahan bakar batu bara, penting bagi DIY untuk menggunakan energi alternatif demi mewujudkan kemandirian energi. Strategi yang cocok terkait urusan energi adalah pengembangan sumber energi bersih dan terbarukan bertenaga angin, matahari, bioenergi, dan air. Dalam RPD sudah tercatat rencana untuk pembangunan prasarana energi alternatif dan prasarana energi listrik tenaga hibrid di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul. DPUP-ESDM DIY juga melaksanakan program Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi. Hal penting lainnya bagi DIY adalah untuk menciptakan tata ruang yang hemat energi dengan densifikasi dan permukiman vertikal.

Target dan indikator untuk mencapai Tujuan 7 TPB disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.13 Target dan Indikator Sasaran Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (<i>baseline</i>)	Target Tahunan				
					2023	2024	2025	2026	2027
7.1	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua								
7.1.1*	Rasio elektrifikasi	RPD DIY 2023-2026, DPUP-ESDM	%	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	PM
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita	PBS, DPUP-ESDM, Kajian RAD TPB DIY	kWh/kapita	1.336 (Nasional)	PM*	PM*	PM*	PM*	PM*
7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga	BPS, DPUP-ESDM, Kajian RAD TPB DIY	%	76,65 (2021)	PM*	PM*	PM*	PM*	PM*

Keterangan PM* Tidak dilakukan perhitungan indikator oleh Perangkat Daerah Provinsi tetapi mendukung target Nasional

A. Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2023 – 2027

Dalam RPD DIY Tahun 2023 - 2026 Strategi untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi dengan mengedepankan penggunaan sumber energi baru terbarukan dan teknologi ramah lingkungan terdiri atas: a. memantapkan infrastruktur pertanian untuk perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan; b. mengembangkan pelabuhan; c. mengembangkan sumber energi baru terbarukan dari angin, matahari, bioenergi, dan air; d. mengembangkan dan mengelola sumber daya air secara terpadu berbasis wilayah sungai dan cekungan air tanah; e. mengembangkan infrastruktur kawasan industri yang ramah lingkungan dan mendorong relokasi kegiatan industri menuju kawasan industri; dan f. mengembangkan permukiman vertikal, hemat energi dan sumber daya di kawasan perkotaan.

Perwujudan Sistem Jaringan Energi Perwujudan Sistem Jaringan Energi pada tahun 2023-2026 dilaksanakan melalui: Pengembangan jaringan gas perkotaan di KPY; Pembangunan instalasi baru, pengoperasian instalasi penyaluran dan peningkatan jaringan distribusi di seluruh DIY; Peningkatan kapasitas terpasang listrik pada kawasan industri dan kawasan peruntukan industri Kawasan Sentolo, Sedayu, Pajangan, dan Piyungan; pengembangan energi listrik tenaga air di Waduk Sermo dan saluran irigasi Kalibawang; Pembangunan prasarana energi listrik tenaga hibrid di Bantul dan Gunungkidul, Pembangunan pembangkit energi listrik untuk menunjang kegiatan di Kawasan Pantai Selatan DIY; Pembangunan Gardu Induk SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi), SUTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi), SUTM (Saluran Udara Tegangan Menengah), dan SUTR (Saluran Udara Tegangan Rendah); serta Pembangunan prasarana energi alternatif.

B. Kontribusi Aktor Nonpemerintah pada RAD TPB/SDGs Tujuan 7

Sesuai dengan prinsip inklusif, untuk optimalisasi pencapaian SDGs, Aktor Nonpemerintah menjadi bagian dalam mengisi Rencana Aksi Daerah DIY. Masih perlu dukungan Aktor Nonperintah dalam tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau.

3.8. Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Tujuan nomor 8 dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menjamin atas

pertumbuhan dan produktivitas ekonomi, penciptaan lapangan kerja, formalisasi UMKM, upah pekerjaan yang adil, hingga akses terhadap jasa keuangan bagi semua. Tujuan ini terkait dengan 2 prioritas nasional, yaitu Prioritas 1 Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, serta Prioritas 6 Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim. Dalam upaya mencapai tujuan 8, arah kebijakan dan strategi dalam RPJMN 2020-2024 mengarah pada

- penguatan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi;
- peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil;
- peningkatan produktivitas dan daya saing;
- penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi terutama sektor keuangan; dan
- pengembangan sektor pariwisata.

Rincian target pada Tujuan 8 untuk periode tahun 2023-2027 adalah sebagai berikut

Tabel 3.14 Target dan Indikator Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target Tahunan				
					2023	2024	2025	2026	2027
8.1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang								
8.1.1	Laju pertumbuhan PDRB per kapita	BPS, RPJMD DIY	%	5,53 (2021)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
8.1.1.(a)	PDRB per kapita	BPS, Kajian RAD TPB DIY	juta rupiah	38,808 (2021)	PM*	PM*	PM*	PM*	PM*
8.2	Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya								
8.2.1	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja	BPS, Kajian RAD TPB DIY	%		PM*	PM*	PM*	PM*	PM*
8.3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan								
8.3.1*	Proporsi Lapangan Kerja Informal berdasarkan sektor dan jenis kelamin	BPS	%		Didukung oleh Indikator Alternatif				
	Laki - laki								
	Perempuan								
	Pertanian								
	Manufaktur								
8.3.1.(a)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	Diskop UKM			Didukung oleh Indikator Alternatif				
8.5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya								
8.5.1*	Upah Rata - Rata per jam pekerja				Didukung oleh Indikator Alternatif				
8.5.2*	Tingkat Pengangguran Terbuka	Disnaker	%	4,06	3,8	3,63	3,45	3,26	3,12
8.5.2.(a)*	Tingkat Setengah Pengangguran Menurut Provinsi	Disnaker	%	4,57 (2022)	5,32	5,15	4,97	4,78	4,64

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target Tahunan				
					2023	2024	2025	2026	2027
8.6	Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan								
8.6.1*	Penduduk Usia Kerja Umur 15 - 24 Tahun yang Tidak Sedang Bekerja, Tidak Sedang Bersekolah, dan Tidak Sedang Mengikuti Pelatihan	BPS, Disnakertrans, Kajian RAD TPB DIY	Jiwa	tahun 2021	48.503 sd 67.204	45.859 sd 64.559	43.214 sd 61.915	40.570 sd 59.270	37.925 sd 56.626
8.7	Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya								
8.7.1.(a)	Persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja menurut provinsi	BPS, Disnakertrans, Kajian RAD TPB DIY	%	Tahun 2021	1,79 sd 2,11	1,73 sd 2,06	1,68 sd 2	1,62 sd 1,95	1,57 sd 1,89
8.8	Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya								
8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kerja dan norma K3	RPD DIY 2023-2026, Disnakertrans	Perusahaan		262	274	286	298	310
8.9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal								
8.9.1*	Laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDRB	BPS, Dispar, Kajian RAD TPB DIY	%		PM*	PM*	PM*	PM*	PM*
	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB	BPS, Dispar, Kajian RAD TPB DIY	%		PM*	PM*	PM*	PM*	PM*
8.9.1.(a)	Wisatawan Mancanegara (Wisman)	Renstra Dispar	Jiwa	29774 (2022)*	45000	60000	95000	150000	300000
8.9.1.(b)	Wisatawan Nusantara (Wisnus)	Renstra Dispar	Jiwa	4503080 (2022)*	6500000	7000000	7700000	8750000	1000000
8.1	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua								
8.10.1*	Mesin ATM Regional	BI, OJK, Kajian NA RAD TPB DIY	Unit		2.007 sd 2.080	2.014 sd 2.087	2.020 sd 2.094	2.027 sd 2.101	2.034 sd 2.108

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target Tahunan				
					2023	2024	2025	2026	2027
8.10.2*	Jumlah kantor bank	OJK, Statistik Perbankan Indonesia, Kajian RAD TPB DIY	Unit		61 sd 63	61 sd 63	61 sd 63	62 sd 63	62 sd 63
8.10.1.(a)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	BI, Statistik Ekonomi, Diskop UMK	%		35,54	36,12	36,7	37,28	37,86

Keterangan PM* Tidak dilakukan perhitungan indikator oleh Perangkat Daerah Provinsi tetapi mendukung target Nasional

Tabel 3.15 Target dan Indikator Lokal Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target Tahunan				
					2023	2024	2025	2026	2027
8.3.1*	Proporsi Lapangan Kerja Informal berdasarkan sektor dan jenis kelamin								
	Laki - laki								
	Perempuan								
	Pertanian								
	Manufaktur								
8.3.1*	Jasa - jasa								
8.3.1*	Proporsi Lapangan Kerja Informal Menurut Provinsi	BPS Pusat, SDGs	%		52,49	51,99	51,49	50,99	50,49
8.3.1.(a)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan								
	Pembiayaan yang dihasilkan dari kemitraan UKM dan lembaga pembiayaan (Bank dan Lembaga non Bank)**	Diskop UKM	Jumlah Kontrak		100	110	120	130	140

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (<i>baseline</i>)	Target Tahunan				
					2023	2024	2025	2026	2027
8.5.1*	Upah Rata - Rata per jam pekerja								
8.5.1*	Upah Rata - Rata Pekerja Menurut Provinsi	Disnaker	Rp	rilis 7 Nov BPS	2.189.029	2.210.919	2.233.028	2.255.359	2.277.912

A. Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2023 - 2027

Beberapa aspek pokok dalam pengembangan pariwisata adalah terkait destinasi, pemasaran, industri, dan kelembagaan pariwisata, serta ekonomi kreatif. Oleh karena itu, kebijakan dan strategi yang dapat dilaksanakan, antara lain 1) pengembangan daya saing destinasi wisata; 2) pengembangan kepariwisataan berkelanjutan; 3) pengembangan SDM kepariwisataan, termasuk berbasis masyarakat; 4) pengembangan atraksi wisata, terutama yang berbasis budaya; 5) pengembangan daya saing industri pariwisata dan ekonomi kreatif.

Kebijakan yang terkait dengan kewirausahaan, koperasi dan UMKM, antara lain pendampingan UMKM, meningkatkan akses pembiayaan, meningkatkan kemitraan, serta meningkatkan penciptaan peluang usaha dan *start-up*. Sementara itu, dalam upaya untuk meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi sektor riil, dapat dilaksanakan upaya, antara lain meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian, meningkatkan kemampuan tenaga kerja (pembinaan ketenagakerjaan), serta meningkatkan iklim usaha dan meningkatkan investasi. Kini, pendampingan terhadap KUKM sudah dilakukan oleh Diskop UKM. Terlebih lagi, data terkait KUKM juga sudah dapat diakses pada aplikasi Sibakul DIY. Namun, formalisasi lapangan kerja juga penting untuk meningkatkan kualitas pekerjaan dan menjamin kesejahteraan pekerja.

Strategi merupakan serangkaian upaya yang didasarkan pada potensi sumber daya yang dimiliki untuk mengatasi permasalahan pembangunan guna mewujudkan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Secara konseptual, satu strategi dapat dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis. Sementara itu, arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan strategi agar lebih sistematis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang berkelanjutan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode pembangunan. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Agar pelaksanaan program/kegiatan fokus dan tepat sasaran seperti yang diinginkan, maka dibutuhkan strategi yang tepat sehingga kemungkinan penyimpangan dalam pelaksanaannya serta kegagalan pencapaian tujuan yang ditetapkan dapat diminimalisir, strategi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut oleh Dinas Koperasi dan UMKM diantaranya :

- Mengoptimalkan komitmen pimpinan untuk meningkatkan dukungan terhadap pembinaan Koperasi

- Membangun sistem pembinaan Koperasi dan UKM terpadu baik secara offline maupun online (SIBAKULJOGJA)
- Menerapkan kurikulum untuk pembinaan UMKM dengan optimal
- Mengembangkan inovasi pada pembinaan Koperasi dan UKM melalui offline maupun online yang mengarah pada digitalisasi bisnis dengan basis data dari aplikasi SIBAKULJOGJA
- Menciptakan kemitraan dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan baku dan pemasaran.
- Pemberdayaan Koperasi dan UKM dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan wilayah.
- Mengoptimalkan regulasi terhadap pemanfaatan produk lokal
- Meningkatkan kualitas dan inovasi produk UKM agar dapat bersaing dengan produk asing.
- Melakukan promosi dan evaluasi pemanfaatan produk Koperasi dan UKM melalui berbagai media
- Pemberdayaan Wirausaha Baru dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan wilayah.
- Menciptakan kemitraan dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan baku dan pemasaran
- Menghubungkan kemitraan pelaku Wirausaha Baru dengan penyedia modal.
- Meningkatkan kualitas dan inovasi produk Wirausaha Baru agar dapat diterima pasar.
- Menyiapkan antisipasi dampak pada KUMKM yang termasuk kelompok rentan

Selain itu ada beberapa strategi meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja diantaranya :

- Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pemagangan, standarisasi kompetensi dan pengembangan produktivitas
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas penempatan serta pemberdayaan tenaga kerja
- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan transmigrasi
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas perangkat hubungan industrial dan perbaikan iklim ketenagakerjaan

- Meningkatkan kualitas pengawasan dan perlindungan tenaga

Kepariwisata juga memiliki beberapa strategi dalam meningkatkan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi di DIY :

- Penguatan Kelembagaan kepariwisataan dan Daya Saing SDM Pariwisata
- Pengembangan dan peningkatan daya saing Daya Tarik Wisata
- Pelaksanaan atraksi wisata budaya sebagai ragam daya tarik pariwisata dan meningkatkan kapasitas lembaga wisata budaya dalam mendukung kegiatan kepariwisataan
- Peningkatan Daya Saing Industri dan Produk Ekonomi Kreatif
- Pengembangan Pasar dan Citra Pariwisata (brand development tourism)

B. Kontribusi Aktor Nonpemerintah pada RAD TPB/SDGs Tujuan 8

Sesuai dengan prinsip inklusif, untuk optimalisasi pencapaian SDGs, Aktor Nonpemerintah menjadi bagian dalam mengisi Rencana Aksi Daerah DIY. Masih perlu dukungan Aktor Nonperintah dalam tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.

3.9. Tujuan 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur

Tujuan 9 TPB terkait dengan empat Prioritas dalam RPJMN 2020-2024. Tujuan ini berfokus untuk membangun sektor industri yang inklusif dan berkelanjutan yang ditopang dengan inovasi dan infrastruktur yang tangguh.

Target dan indikator untuk mencapai Tujuan 9 TPB disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.16. Target dan Indikator Tujuan 9 Infrastruktur, Industri dan Inovasi

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target Tahunan				
					2023	2024	2025	2026	2027
9.1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua								
9.1.1*	Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak.	DPUP-ESDM, Kajian RAD TPB DIY			PM*	PM*	PM*	PM*	PM*
9.1.1.(a)	Persentase kemantapan jalan	RPD DIY 2023-2026, DPUP-ESDM	%		68,61	69,21	69,81	70,41	71,01
9.1.2*	Jumlah Penumpang Domestik berdasarkan Moda Transportasi Pesawat Terbang menurut provinsi, Jumlah Penumpang Internasional berdasarkan Moda Transportasi Pesawat Terbang menurut provinsi	BPS, Perhubungan dalam Angka, Kajian RAD TPB DIY			PM*	PM*	PM*	PM*	PM*
9.1.2.(a)	Jumlah bandara	BPS, Perhubungan dalam Angka	Unit		2	2	2	2	2
9.2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang								
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB	BPS, Disperindag	%		13	13	13	13	13
	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur per kapita	BPS, Disperindag	%		PM*	PM*	PM*	PM*	PM*
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur	BPS, Ekstrapolasi Target 2018-2022, Disperindag	%		4	4	4	4	4
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	BPS, Disperindag	%		15	15	15	15	15

Keterangan PM* Tidak dilakukan perhitungan indikator oleh Perangkat Daerah Provinsi tetapi mendukung target Nasional

A. Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2023 – 2027

Kebijakan yang cocok untuk mendukung sektor industri di DIY adalah kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas kelembagaan, pelatihan, pendampingan, dan dukungan teknologi tepat guna untuk IKM. Pada gilirannya, semua upaya yang diusahakan diharapkan akan bermuara pada peningkatan nilai tambah sektor industri terhadap PDRB dan kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja. Terkait akses pasar, Pemda DIY perlu memfasilitasi dan mendorong IKM untuk melakukan standardisasi dan sertifikasi produknya.

Strategi dalam perkembangan industri dan inovasi yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY adalah sebagai berikut:

- Mengembangkan entrepreneurship yang berorientasi pada pengurangan angka kemiskinan.
- Penguatan Perdagangan Dalam Negeri melalui peningkatan penggunaan produk lokal, kelancaran distribusi, stabilisasi harga, pengelolaan persaingan usaha serta pengembangan pemasaran baik secara konvensional maupun online.
- Penguatan perdagangan dalam negeri melalui perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.
- Memperkuat dan memperluas perdagangan internasional dalam upaya meningkatkan nilai ekspor DIY.
- Penguatan dan penumbuhan IKM melalui pengembangan aspek produksi, desain, pemasaran produk baik secara konvensional maupun online, dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
- Penguatan dan penumbuhan IKM Industri Kreatif melalui pengembangan aspek produksi, desain, pemasaran perlindungan, dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual produk industri kreatif.
- Pengembangan teknologi industri yang mendukung proses produksi secara kualitas maupun kuantitas.
- Kordinasi dan fasilitasi penyediaan kawasan industri untuk IKM.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas produk kreatif khas DIY

B. Kontribusi Aktor Nonpemerintah pada RAD TPB/SDGs Tujuan 9

Sesuai dengan prinsip inklusif, untuk optimalisasi pencapaian SDGs, Aktor Nonpemerintah menjadi bagian dalam mengisi Rencana Aksi Daerah DIY.

Secara garis besar, program yang masuk dalam lingkup nasional dari Aktor Nonpemerintah untuk TPB/SDGs Tujuan 9 dilakukan oleh Yayasan Hijau dengan program kegiatan Program kegiatan Meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelajaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.

3.10. Tujuan 10: Berkurangnya Kesenjangan

Tujuan 10 TPB Berkurangnya kesenjangan terkait dengan tiga prioritas nasional, yaitu prioritas 2 Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, prioritas 3 Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, serta prioritas 7 memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Tujuan ini berfokus pada kesenjangan pendapatan dan kesenjangan kewilayahan. Arah kebijakan yang terkait dengan kesenjangan pendapatan dan kesenjangan kewilayahan, antara lain penguatan perlindungan sosial, percepatan pembangunan desa, serta penguatan keterkaitan desa-kota untuk mendukung pertumbuhan.

Target dan indikator untuk mencapai Tujuan 10 TPB disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.17. Target dan Indikator Tujuan 10 Mengurangi Ketimpangan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target Tahunan				
					2023	2024	2025	2026	2027
10.1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional								
10.1.1*	Indeks Gini	BPS,RPJMD	Rasio		0,423	0,419	0,415	0,411	0,407
10.1.1.(a)	Tingkat Kemiskinan	BPS, RPJMD	%		10,74	10,35	9,93	9,51	PM
10.1.1.(b)	Jumlah desa tertinggal.	IDM, Kemen. PDDT, Biro Bermas		0 (2022)	0	0	0	0	0
10.1.1.(c)	Jumlah desa Mandiri	RPD DIY 2023-2026, Biro Bermas	Desa		119	124	129	134	139
10.1.1.(d)	Jumlah daerah tertinggal								
10.2	Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya								
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.				Didukung oleh Indikator Alternatif				
10.3	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut								
10.3.1(a)	IDI Aspek Kebebasan	BPS	Indeks	74,31	meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	Polda DIY	kasus		0	0	0	0	0
10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	Kanwil Kemenkumham	kasus		10	12	14	10	11
10.3.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Kanwil Kemenkumham			2	2	2	2	2

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target Tahunan				
					2023	2024	2025	2026	2027
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Kanwil Kemenkumham			Tidak dilakukan perhitungan indikator oleh Perangkat Daerah tingkat Provinsi secara tahunan				
10.4	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar								
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.				Didukung oleh Indikator Alternatif				

Keterangan PM* Tidak dilakukan perhitungan indikator oleh Perangkat Daerah Provinsi tetapi mendukung target Nasional

Tabel 3.18. Target dan Indikator Lokal Tujuan 10 Mengurangi Ketimpangan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target Tahunan				
					2023	2024	2025	2026	2027
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.								
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut provinsi	BPS Pusat, SDGs	%		12,09 sd 12,8	11,93 sd 12,65	11,78 sd 12,49	11,62 sd 12,34	11,47 sd 12,18
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.								
10.4.1.(b)	Jumlah tenaga kerja yang terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Disnakertrans			449.588	469.819	490.961	513.054	536.142

A. Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2023 – 2027

Dalam rangka mencapai tujuan 10, Pemerintah Daerah DIY memberikan perhatian khusus melalui berbagai kebijakan yang mendukung berkurangnya kesenjangan pendapatan dan kesenjangan kewilayahan. Secara kewilayahan, fokus pembangunan DIY sudah mengarah ke wilayah selatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kebijakan dan strategi yang dapat ditempuh, antara lain :

- 1) penguatan kegiatan ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal;
- 2) peningkatan akses layanan dasar;
- 3) peningkatan kesempatan kerja yang didukung dengan peningkatan kualitas tenaga kerja;
- 4) penguatan perlindungan dan jaminan sosial terutama bagi kelompok rentan; dan
- 5) percepatan pembangunan desa secara terpadu.

Strategi dalam RPD DIY 2023 – 2026 mengurangi ketimpangan diantara:

- Menumbuhkan dan mengembangkan wirausaha baru termasuk start-up business berbasis teknologi
- Mengembangkan pusatpusat kegiatan ekonomi baru terutama di kawasan pedesaan dengan menawarkan investment project ready to offer dan pemerataan investasi
- Meningkatkan daya saing produk unggulan DIY
- Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang
- Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
- Meningkatkan ketangguhan (resiliency) dalam menghadapi bencana
- Mengembangkan sumber-sumber PAD dan pembiayaan pembangunan

B. Kontribusi Aktor Nonpemerintah pada RAD TPB/SDGs Tujuan 10

Sesuai dengan prinsip inklusif, untuk optimalisasi pencapaian SDGs, Aktor Nonpemerintah menjadi bagian dalam mengisi Rencana Aksi Daerah DIY. Masih perlu dukungan Aktor Nonperintah dalam tujuan 10 Mengurangi Ketimpangan.

3.11. Tujuan 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan

Tujuan nomor 11 bertujuan untuk menjamin kemudahan akses terhadap hunian dan ruang terbuka yang aman dan inklusif, terutama untuk perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Beberapa urusan yang termuat dalam tujuan ini antara lain hunian layak, pengelolaan sampah perkotaan, dan ketangguhan bencana. Terkait hunian yang layak, telah diselenggarakan Program Penyelenggaraan Perumahan yang ditujukan untuk menangani rumah tidak layak huni (RTLH), dengan sumber pendanaan anggaran DAK, BSPS, APBD Kab/Kota dan APBD Provinsi. Selain itu, pengelolaan sampah di DIY juga masih perlu banyak peningkatan. Persampahan menjadi masalah tanpa solusi jangka panjang, terutama terkait TPA Regional Piyungan yang sudah mencapai kapasitas maksimal. Hal ini menjadi catatan penting bagi DIY untuk segera mengambil langkah konkrit, tidak hanya dalam pengelolaan dan pengangkutan sampah namun juga dalam upaya pengurangannya. Terkait masalah persampahan, Pemerintah Daerah DIY melalui Dinas PUP-ESDM sudah merencanakan Pembangunan/Rehabilitasi TPA/TPST. Selain itu, diperlukan juga upaya pengurangan timbulan sampah dimulai dari lingkup terkecil, yakni rumah tangga. Kini, kesadaran masyarakat semakin tinggi untuk mengurangi timbulan sampah dan mulai melakukan pengelolaan sampah secara sederhana seperti penggunaan kemasan berulang dan komposting. Rumah tangga juga kini terbantu dengan jasa pengangkutan dan pengelolaan sampah swasta yang kini mudah diakses melalui aplikasi. Penting bagi pemerintah untuk terus melakukan engagement dengan pihak swasta sebagai bentuk kolaborasi. Kebencanaan juga termasuk sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keberlanjutan kota dan permukiman. Selain bencana alam, terdapat juga risiko bencana ulah manusia atau man-made disaster yaitu kebakaran, terutama pada perkotaan dengan permukiman padat. Untuk meningkatkan ketangguhan bencana daerah, diperlukan penguatan kolaborasi berbagai pemangku kebijakan di DIY. Dalam RPD, ditekankan bahwa selama ini kolaborasi pemangku kebijakan terkait kebencanaan masih kurang optimal. Alangkah lebih baik bila kolaborasi melibatkan seluruh elemen, yakni pemerintah, akademisi, LSM/NGO, swasta, dan organisasi masyarakat (Ormas).

Sementara itu, angka target pencapaian indikator Tujuan 11 untuk tahun 2023-2027 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.19. Target dan Indikator Tujuan 11 Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target Tahunan				
					2023	2024	2025	2026	2027
11.1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh								
11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	RPD DIY 2023-2026, DPUP-ESDM	%	95.65	96,12	96,59	97,05	97,53	PM
11.2	Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua								
11.2.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses nyaman (jarak 0.5 km) ke transportasi umum menurut provinsi	BPS, Perhubungan dalam Angka, Kajian RAD TPB DIY	%		PM*	PM*	PM*	PM*	PM*
11.2.1.(b)	Jumlah Penumpang Angkutan Umum	Dishub, Kajian RAD TPB DIY	Orang	2223441**	meningkat	meningkat	meningkat	meningkat	meningkat
11.3	Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara								
11.3.1.(a)	Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk.	BPS, DPTR, DPUP-ESDM, Kajian RAD TPB DIY			PM*	PM*	PM*	PM*	PM*
11.4	Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia								
11.4.1.(a)	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP)	BPKA, Kajian RAD TPB DIY			PM*	PM*	PM*	PM*	PM*
11.5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDRB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan								
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	BPBD							
	a. Meninggal		Orang		Tergantung Kejadian				

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target Tahunan				
					2023	2024	2025	2026	2027
	b. Luka/Cedera		Orang		Tergantung Kejadian				
	c. Mengungsi		Orang		Tergantung Kejadian				
11.5.2.(a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDRB.	BPBD	%		Didukung oleh Indikator Alternatif				
11.6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota								
11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampah	DLHK, Kajian RAD TPB DIY	Persen		PM*	PM*	PM*	PM*	PM*
11.6.1.(b)	Persentase sampah yang terkelola dan ketersediaan alat berat pengelola sampah yang beroperasi **	RPD DIY 2023-2026, DLHK	%		92,86	92,86	92,86	92,86	92,86
11.6.2.(a)	Rata-rata tahunan materi partikulat halus PM 10	DLHK, Kajian RAD TPB DIY	µgram/m3		PM*	PM*	PM*	PM*	PM*
11.6.2.(b)	Indeks Kualitas Udara	DLHK, Kajian RAD TPB DIY	Indeks		85,28 sd 90,12	84,41 sd 89,25	83,54 sd 88,38	82,67 sd 87,51	81,8 sd 86,64
11.7	Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas								
11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua	DLHK, Kajian RAD TPB DIY	%		PM*	PM*	PM*	PM*	PM*
11.7.2 (a)	Proporsi Penduduk Yang Menjadi Korban Kejahatan Kekerasan Dalam 12 Bulan Terakhir Menurut Provinsi	BPS, Polda	%		Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun
11.a	Mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah								
11.a.1.(a)	Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah dilengkapi KLHS	Bappeda			Didukung oleh Indikator Alternatif				
11.b	Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030								

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target Tahunan				
					2023	2024	2025	2026	2027
11.b.2*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana	BPBD			Didukung oleh Indikator Alternatif				
11.c	Memberikan dukungan kepada negara-negara kurang berkembang, melalui bantuan keuangan dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tangguh, dengan memanfaatkan bahan lokal								
11.c.1.(a)	Persentase Daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan menggunakan Material Lokal	BPS, DPUP-ESDM, Kajian RAD TPB DIY	%		PM*	PM*	PM*	PM*	PM*

Keterangan PM* Tidak dilakukan perhitungan indikator oleh Perangkat Daerah Provinsi tetapi mendukung target Nasional

Tabel 3.20. Target dan Indikator Lokal Tujuan 11 Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target Tahunan				
					2023	2024	2025	2026	2027
11.5.2.(a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDRB.								
	Indeks Risiko Bencana (IRB)**	BPBD	Skor		104,78	102,78	100,78	98,78	96,78
11.6.1.(b)	Persentase sampah yang terkelola dan ketersediaan alat berat pengelola sampah yang beroperasi **	RPD DIY 2023-2026, DLHK	%		92,86	92,86	92,86	92,86	92,86
	Terlaksananya penanganan sampah di TPA Regional**	Renstra DLHK 2023-2026	%		100	100	100	100	100
11.a.1.(a)	Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah dilengkapi KLHS	Bappeda			Digunakan Indikator Alternatif				

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target Tahunan				
					2023	2024	2025	2026	2027
	Kabupaten/ kota yang memiliki RTRW dan sudah dilengkapi KLHS**	Bappeda	Kabupaten/Kota		5	5	5	5	5
11.b.2*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana	BPBD							
11.b.2*	Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki RPB	BPBD DIY	Kabupaten/Kota	5	5	5	5	5	5

A. Arah Kebijakan dan Strategi 2023 - 2027

Beberapa kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan 11 yang dapat dilaksanakan, antara lain :

- 1) penguatan dan koordinasi untuk penanganan RTLH;
- 2) pengurangan sampah dari sumbernya;
- 3) peningkatan cakupan layanan pengangkutan sampah;
- 4) penerapan sistem daur ulang dalam pengelolaan sampah;
- 5) pengurangan risiko bencana dan penguatan ketangguhan daerah;
- 6) peremajaan dan optimalisasi Early Warning System; serta
- 7) peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.

B. Kontribusi Aktor Nonpemerintah pada RAD TPB/SDGs Tujuan 11

Sesuai dengan prinsip inklusif, untuk optimalisasi pencapaian SDGs, Aktor Nonpemerintah menjadi bagian dalam mengisi Rencana Aksi Daerah DIY. Secara garis besar, program yang masuk dalam lingkup nasional dari Aktor Nonpemerintah untuk TPB/SDGs Tujuan 11 dilakukan oleh Yayasan Hijau dengan program kegiatan program kegiatan Pendampingan pengembangan preservasi warisan budaya dan alam, sebagai basis inspirasi dalam pengembangan produk kreatif oleh generasi milenial yang berada dalam kawasan warisan budaya dan alam.

3.12. Tujuan 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

Tujuan 12 TPB Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab terkait dengan dua prioritas nasional, yaitu prioritas nasional 1 Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, serta prioritas nasional 6 Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Tujuan 12 menargetkan sampah untuk dikelola dengan metode daur ulang, bukan hanya ditimbun. DIY saat ini sudah memiliki beberapa bank sampah. Namun, daur ulang sampah belum sepenuhnya optimal. Masih diperlukan keseriusan seluruh pemangku kebijakan. Daur ulang sampah tidak bisa dibebankan kepada masyarakat semata. Kota Jogja sudah memulai upaya untuk memasifkan daur ulang sampah dengan beberapa kegiatan, diantaranya adalah pemutakhiran data bank sampah, pendampingan bank sampah, bekerja

sama dengan lembaga keuangan terkait pembiayaan pengelolaan sampah. Langkah ini diharapkan dapat terus berlanjut dan dapat diadopsi oleh daerah lain.

Selain itu, salah satu poin penting terkait produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab adalah terkait dengan pengelolaan limbah, khususnya limbah B3. Di DIY, limbah B3 belum sepenuhnya tertangani dengan baik. Terlebih lagi, kesadaran rumah tangga terkait bahaya limbah B3 belum merata. Oleh karenanya, limbah B3 dari rumah tangga masih banyak yang bercampur dengan sampah yang dikelola secara konvensional. Pada tahun 2022, DLH Kota Yogyakarta merencanakan pembuatan TPS khusus limbah B3 di Kampung Karangmiri, Girimulyo. Penting bagi Pemda DIY untuk turut serta bekerja sama dan mendorong pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan pemerintah terkait Tujuan 12. Sebagian kebijakan yang diterapkan Pemerintah Pusat dapat diadopsi di DIY, seperti kebijakan terkait pengelolaan limbah B3 yang terintegrasi dan berkelanjutan, terlebih lagi DIY memiliki Perda nomor 2 tahun 2021 tentang Pengelolaan Limbah B3.

Target dan indikator untuk mencapai Tujuan 12 TPB disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.21 Target dan Indikator Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target Tahunan				
					2023	2024	2025	2026	2027
12.3	Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan								
12.3.1.(a)	Persentase Sisa makanan	BPS, DLHK, SIPSN KLHK	%	51,3 (2021)	PM*	PM*	PM*	PM*	PM*
12.4	Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan								
12.4.1.(a)	Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri	BPS, DLHK, Kajian RAD TPB DIY	%		PM*	PM*	PM*	PM*	PM*
12.4.1.(b)	Persentase penurunan tingkat konsumsi perusak ozon dari baseline	BPS, DLHK, Kajian RAD TPB DIY			PM*	PM*	PM*	PM*	PM*
12.4.2*	(a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita	BPS, DLHK, Kajian RAD TPB DIY	ton per kapita		PM*	PM*	PM*	PM*	PM*
	(b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya/ pengolahannya.	BPS, DLHK, Kajian RAD TPB DIY	%		PM*	PM*	PM*	PM*	PM*
12.5	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali								
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	BPS, DLHK, Kajian RAD TPB DIY			PM*	PM*	PM*	PM*	PM*
12.6	Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktik-praktik berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka								
12.6.1*	Jumlah perusahaan yang wajib memiliki dokumen lingkungan dan telah diverifikasi BLH DIY	DLHK, Kajian RAD TPB DIY	Perusahaan		12 sd 28	18 sd 34	24 sd 40	30 sd 46	34 sd 50
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	DLHK, Kajian RAD TPB DIY	Perusahaan		PM*	PM*	PM*	PM*	PM*
12.8	Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam								
12.8.1.(a)	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	DLHK			Didukung oleh Indikator Alternatif				
12.8.1.(b)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Biro Tapem			PM*	PM*	PM*	PM*	PM*

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (<i>baseline</i>)	Target Tahunan				
					2023	2024	2025	2026	2027
12.b	Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal								
12.b.1.(a)	Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development	Dispar			1	1	1	1	1

Keterangan PM* Tidak dilakukan perhitungan indikator oleh Perangkat Daerah Provinsi tetapi mendukung target Nasional

Tabel 3.22 Target dan Indikator Lokal Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (<i>baseline</i>)	Target Tahunan				
					2023	2024	2025	2026	2027
12.8.1.(a)	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	DLHK			Digunakan Indikator Alternatif				
	Terlaksananya pembinaan kelompok masyarakat (Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup)**	Renstra DLHK 2023-2026			40	85	135	190	

A. Arah Kebijakan dan Strategi 2023 – 2027

Kebijakan untuk tujuan 12 ini diarahkan untuk:

- 1) peningkatan kesadaran dan kapasitas dalam penerapan produksi dan konsumsi berkelanjutan
- 2) pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3), limbah B3 dan limbah non B3 yang terintegrasi dan berkelanjutan
- 3) peningkatan kinerja pengelolaan sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik
- 4) pengelolaan pangan berkelanjutan serta penanganan food loss dan food waste.

B. Kontribusi Aktor Nonpemerintah pada RAD TPB/SDGs Tujuan 12

Sesuai dengan prinsip inklusif, untuk optimalisasi pencapaian SDGs, Aktor Nonpemerintah menjadi bagian dalam mengisi Rencana Aksi Daerah DIY. Secara garis besar, program yang masuk dalam lingkup nasional dari Aktor Nonpemerintah untuk TPB/SDGs Tujuan 12 dilakukan oleh Yayasan Hijau dengan program kegiatan program kegiatan Pengembangan kampanye dan pendidikan lingkungan tentang pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam, Riset inovasi dalam pengembangan pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan, Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan infrastruktur industri pariwisata berkelanjutan.

3.13. Tujuan 13: Penanganan Perubahan Iklim

Tujuan 13 TPB penanganan perubahan iklim terkait dengan prioritas nasional yang keenam, yaitu Membangun Lingkungan Hidup, Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. Tujuan 13 memiliki tiga target, yaitu 1) memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam; 2) mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi, dan perencanaan; dan 3) meningkatkan pendidikan, kesadaran, dan kapasitas masyarakat dan lembaga terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak, dan peringatan dini perubahan iklim.

Komitmen Pemerintah Daerah DIY dalam upaya berkontribusi menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai target pembangunan nasional

tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dengan target capaian penurunan emisi GRK sampai dengan tahun 2020 sebesar 80,75 Gg CO₂ eq atau 80.752,88 ton CO₂ eq dari BAU Baseline emisi GRK yang diperkirakan senilai 2.228,132 Gg CO₂ eq atau 2.228.132 ton CO₂ eq. Hingga tahun 2020 potensi penurunan emisi GRK yang telah dilakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan melalui aplikasi AKSARA senilai 2.603.336,10 ton CO₂ eq yang artinya realisasi tersebut telah melebihi target yang telah ditetapkan pada Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2012. Kontribusi penurunan emisi GRK hingga tahun 2020 yaitu (1) berbasis lahan meliputi sektor kehutanan dan pertanian; (2) berbasis energi meliputi sektor transportasi dan energi serta (3) berbasis bidang pengelolaan limbah meliputi air limbah dan persampahan; (4) berbasis kawasan pesisir dan kelautan yaitu blue carbon. Berdasarkan hal tersebut di atas, pada tahun 2019 telah dilakukan Kaji Ulang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahun 2018-2030 untuk melakukan peninjauan kembali terhadap target Business as Usual (BAU) penurunan emisi GRK menggunakan historical linier selama 11 tahun (tahun 2000-2010), penyesuaian perubahan nomenklatur program/kegiatan, penyesuaian rencana aksi mitigasi yang mendukung penurunan emisi GRK baik nasional maupun daerah terhadap RPJMN Tahun 2020-2024 peningkatan sinergitas dalam pembagian peran dan tanggung jawab dalam pencapaian target penurunan emisi GRK baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan Masyarakat, dan RAD-GRK yang terintegrasi ke dalam RPJMN, RPJMD, RKP dan RKPD serta tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, dengan estimasi penurunan emisi GRK pada tahun 2030 sebesar 2.412.746 ton CO₂ eq atau 30,13% dari BAU baseline senilai 8.007.557 ton CO₂ eq, untuk bidang mitigasi pertanian, kehutanan, energi dan transportasi, limbah. Hingga saat ini, Kaji Ulang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahun 2018-2030 belum dilakukan penetapan. Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta diharapkan untuk mentransformasikan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) menjadi Rencana Aksi Daerah Pembangunan Rendah Karbon (RAD PRK), yang mendasar pada Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan

Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional. Namun, hingga saat ini peraturan turunan untuk pelaksanaan teknis yang mendukung Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tersebut, masih dalam proses penyusunan. Pada saat Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 ini mulai berlaku, maka Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca; dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Setelah nantinya aturan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 terbit, maka Bappeda DIY akan menyusun Pergub RAD PRK serta mengawal integrasi dan implementasinya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan OPD serta melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan (PEP) atas pelaksanaan RAD PRK. Sektor yang termasuk dalam PRK serta identifikasi program/kegiatan/subkegiatan yang dapat masuk ke dalam PRK berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-8889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah tersaji pada tabel berikut.

Sementara itu, angka target pencapaian indikator Tujuan 13 untuk tahun 2023-2027 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.23 Target dan Indikator Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target Tahunan				
					2023	2024	2025	2026	2027
13.1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara								
13.1.1. (a)	Jumlah korban meninggal dan hilang akibat terkena dampak bencana hidrometeorologi per 100.000 orang	BPBD	Jiwa per 100.000 orang		PM*	PM*	PM*	PM*	PM*
13.1.1. (b)	Persentase penurunan potensi kehilangan PDRB sektor terdampak bahaya iklim	BPBD			PM*	PM*	PM*	PM*	PM*
13.1.2 *	RPB DIY & RAD PRB DIY	BPBD DIY	Dokumen		2	2	2	2	2
13.1.3*	Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki RPB	BPBD DIY	Kabupaten/Kota		5	5	5	5	5
13.2	Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional								
13.2.2*	Emisi bersih GRK (tCO ₂ -eq) di Daerah Istimewa Yogyakarta	INCAS KLHK, DLHK	tCO ₂ -eq		26,28 sd 64,66	23,91 sd 62,29	21,55 sd 59,92	19,18 sd 57,55	16,81 sd 55,18
13.2.2.(a)	Penurunan emisi GRK	RPD DIY 2023-2026, DLHK	CO ₂ -eq		2.607	2.609	2.611	2.613	2.615
13.2.2.(b)	Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)	BPS, DLHK, Kajian RAD TPB DIY			PM*	PM*	PM*	PM*	PM*
13.3	Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim								
13.3.1.(a)	Terlaksananya pembinaan kelompok masyarakat (Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup)	Renstra DLHK 2023-2026			40	85	135	190	PM
	Jumlah peserta Sekolah Adiwiyata	DLHK	Sekolah		35	40	45	50	55
	Jumlah kampung iklim	DLHK, Kajian RAD TPB DIY	Desa		PM*	PM*	PM*	PM*	PM*
	Jumlah peserta Sekolah Lapang Iklim dan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan	BMKG, Kajian RAD TPB DIY			PM*	PM*	PM*	PM*	PM*

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (<i>baseline</i>)	Target Tahunan				
					2023	2024	2025	2026	2027
	Jumlah desa tangguh bencana	BPBD, Kajian RAD TPB DIY	Desa	276 (2022)	PM*	PM*	PM*	PM*	PM*

Keterangan PM* Tidak dilakukan perhitungan indikator oleh Perangkat Daerah Provinsi tetapi mendukung target Nasional

A. Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2023 -2027

Penanganan perubahan iklim merupakan tujuan penting yang memerlukan kolaborasi besar antara pemerintah dan nonpemerintah. Kerja sama multisektor penting untuk dijaga mengingat bahwa pemicu atas perubahan iklim datang dari berbagai sektor. Terkait upaya adaptasi, Pemerintah daerah diharapkan untuk mentransformasikan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) yang sudah dimiliki DIY dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca menjadi Rencana Aksi Daerah Pembangunan Rendah Karbon (RAD PRK). Namun demikian, saat ini Pemerintah Daerah DIY masih menunggu arahan dan terbitnya regulasi RAN PRK dari Pemerintah Pusat. Hal tersebut penting untuk mengarahkan upaya mitigasi terkait dengan penurunan emisi gas rumah kaca.

Adaptasi dan mitigasi dapat meningkatkan ketangguhan Provinsi DIY dalam menghadapi ancaman perubahan iklim. Upaya adaptasi perubahan iklim diwujudkan oleh pemerintah DIY melalui beberapa program, seperti program kampung iklim, kampung tangguh bencana, dan desa tangguh bencana. Di D.I. Yogyakarta, program kampung iklim dimodifikasi menjadi program kampung hijau dengan perbedaan yang tidak mencolok. Melalui program ini, pemerintah berupaya mendorong kepedulian kolektif dan kesadaran masyarakat terhadap perubahan iklim berikut dampaknya.

Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta diharapkan untuk mentransformasikan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) menjadi Rencana Aksi Daerah Pembangunan Rendah Karbon (RAD PRK), yang mendasar pada Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional. Namun, hingga saat ini peraturan turunan untuk pelaksanaan teknis yang mendukung Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tersebut, masih dalam proses penyusunan. Pada saat Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 ini mulai berlaku, maka Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca; dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Setelah nantinya aturan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 terbit,

maka Bappeda DIY akan menyusun Pergub RAD PRK serta mengawal integrasi dan implementasinya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan OPD serta melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan (PEP) atas pelaksanaan RAD PRK. Sektor yang termasuk dalam PRK serta identifikasi program/kegiatan/subkegiatan yang dapat masuk ke dalam PRK berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-8889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah tersaji pada tabel berikut.

Identifikasi Bidang dan Program/Kegiatan dalam Pembangunan Rendah Karbon

Bidang	Program	Kegiatan	OPD
Kehutanan	Pengelolaan Hutan	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	DLHK
		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	
	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	
		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	
Pertanian	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	DPKP
		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	
	Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	
		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		
Pesisir dan Laut	Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	DKP
	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	
	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	
	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		

Energi	Pengelolaan Energi Terbarukan	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	DPUESDM
Transportasi	Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	DISHUB
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
Pengelolaan limbah	Pengelolaan Persampahan		DLHK
	Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Regional	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	DPUESDM
	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan & Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	

B. Kontribusi Aktor Nonpemerintah pada RAD TPB/SDGs Tujuan 13

Sesuai dengan prinsip inklusif, untuk optimalisasi pencapaian SDGs, Aktor Nonpemerintah menjadi bagian dalam mengisi Rencana Aksi Daerah DIY. Secara garis besar, program yang masuk dalam lingkup nasional dari Aktor Nonpemerintah untuk TPB/SDGs Tujuan 13 dilakukan oleh Yayasan Hijau dengan program kegiatan program kegiatan Pengembangan kampanye dan pendidikan lingkungan tentang mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim, berbasis sekolah dasar.

3.14. Tujuan 14: Ekosistem Laut

Tujuan nomor 14 dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah menjamin pelestarian dan pemanfaatan sumber daya kelautan yang berkelanjutan, konservasi perairan, serta dukungan dan perlindungan untuk nelayan kecil. Arah kebijakan tujuan 14 difokuskan pada dua hal, yaitu 1) Peningkatan tata kelola laut dan pengelolaan pesisir serta pengembangan ekonomi kelautan berkelanjutan, dan 2) Peningkatan produksi dan nilai tambah perikanan serta kesejahteraan pelaku kegiatan ekonomi kelautan.

Dengan panjang pantai 135,24 km dan luas perairan 251.130 Ha, maka Pemerintah Daerah DIY juga perlu berfokus pada pengelolaan laut dan pesisir. Pesisir selatan DIY dihadapkan dengan dua ancaman. Ancaman yang pertama adalah terkait kebencanaan, khususnya bencana tsunami. Untuk memitigasi

ancaman tsunami, sudah dipasang EWS tsunami. Namun, diperlukan peremajaan dan penambahan unit EWS karena sebagian unit EWS di pesisir selatan Kabupaten Bantul sudah mengalami kerusakan. Ancaman yang kedua adalah abrasi pantai. Abrasi di pantai selatan cenderung tinggi karena berhadapan langsung dengan samudera. Abrasi cenderung mengancam bangunan yang berada di sekitar pantai, utamanya yang berada di bibir pantai. Perlu dilakukan penertiban tata ruang untuk menindak bangunan yang tidak sesuai ketentuan di sekitar pantai karena abrasi dapat membahayakan struktur bangunan. Selain itu, DLHK DIY sudah melakukan beberapa upaya, antara lain penanaman mangrove dan cemara udang, serta pemasangan pemecah ombak.

Sementara itu, terkait dengan pemanfaatan sumber daya kelautan, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY melakukan restocking di titik-titik yang sudah ditentukan. Hal ini merupakan upaya mengatasi masalah yang muncul akibat penangkapan sumber daya perikanan di laut yang berlebih. Selain itu, untuk upaya konservasi dan perlindungan terhadap sumber daya, pemerintah daerah melakukan konservasi kawasan laut dan pengelolaan setiap tahunnya. Pengawasan terhadap penangkapan ikan juga dilakukan, dengan target penurunan pelanggaran pemanfaatan sumber daya laut tiap tahunnya sebesar 10%.

Sementara itu, target dan indikator untuk mencapai Tujuan 14 TPB disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.24 Target dan Indikator Tujuan 14 Menjaga Ekosistem Laut

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target Tahunan				
					2023	2024	2025	2026	2027
14.1	Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi								
14.1.1.(a)	Persentase penurunan sampah yang terbuang ke laut	BPS, DLHK, Kajian RAD TPB DIY			PM*	PM*	PM*	PM*	PM*
14.2	Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif								
14.2.1.(b)	Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil diluar minyak dan gas bumi	Renstra DisLautKan 2023-2026	Lokasi		2	2	3	3	3
14.5	Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia								
14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut				Didukung oleh Indikator Alternatif				
14.6	Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization								
14.6.1.(a)	Persentase penurunan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan	RPD DIY 2023-2026, Dislautkan	%		10	10	10	10	10
14.b	Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar								
14.b.1*	Ketersediaan kerangka hukum/regulasi/kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil	Dislautkan			ada	ada	ada	ada	ada
14.b.1.(a)	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan	Dislautkan	kab/kota	3	3	3	3	3	3
14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi	Dislautkan			480	480	480	480	480

Keterangan PM* Tidak dilakukan perhitungan indikator oleh Perangkat Daerah Provinsi tetapi mendukung target Nasional

Tabel 3.25 Target dan Indikator Lokal Tujuan 14 Menjaga Ekosistem Laut

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target Tahunan				
					2023	2024	2025	2026	2027
14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut								
14.5.1*	Persentase target kawasan konservasi yang ditetapkan	Renstra DisLautKan 2023-2026	%		33	66	66	100	100
	Persentase status pengelolaan kawasan konservasi yang telah ditetapkan	RPD DIY 2023-2026, Dislautkan	%		25	50	75	100	100

A. Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2023 -2027

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan 14, antara lain sebagai berikut:

- Pengawasan penangkapan ikan;
- Penetapan konservasi kawasan;
- Perlindungan terhadap nelayan, terutama nelayan kecil;
- Mitigasi abrasi dengan rekayasa pesisir;
- Penguatan kapasitas kelembagaan untuk penegakan pemanfaatan sumber daya laut; dan
- Penguatan pengelolaan sumber daya pesisir dan ruang laut sejauh 12 mil laut diluar migas.

B. Kontribusi Aktor Nonpemerintah pada RAD TPB/SDGs Tujuan 14

Sesuai dengan prinsip inklusif, untuk optimalisasi pencapaian SDGs, Aktor Nonpemerintah menjadi bagian dalam mengisi Rencana Aksi Daerah DIY. Masih perlu dukungan Aktor Nonperintah dalam tujuan 14 Menjaga Ekosistem Laut.

3.15. Tujuan 15: Ekosistem Daratan

Tujuan 15 dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mewujudkan restorasi dan pemanfaatan hutan dan lahan produktif secara berkelanjutan, serta perlindungan terhadap keanekaragaman hayati. Tujuan 15 ini terkait dengan dua prioritas nasional, yaitu prioritas nasional 1 dan prioritas nasional 6. Kebijakan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, antara lain terdiri dari kebijakan tata kelola kehutanan, konservasi dan keanekaragaman hayati, melestarikan dan memanfaatkan nilai ekonomi hayati, serta penegakan hukum.

Lahan DIY yang terbatas luasnya dan daya tampung yang terus berkurang menjadi kendala dalam peningkatan konservasi daratan terutama penambahan luas hutan. Kini, hutan rakyat merupakan tutupan vegetasi hutan terluas. Hutan rakyat harus menjadi perhatian khusus dalam pengambilan kebijakan konservasi ekosistem daratan. Kesadaran masyarakat terhadap kelestarian hutan juga masih perlu dibina oleh berbagai pihak. Strategi lainnya adalah dengan meningkatkan kualitas tutupan lahan, tidak lagi berfokus pada kuantitas tutupan lahan. DLHK setiap tahun mengusahakan pengayaan

keanekaragaman hayati tutupan vegetasi dan hutan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, DLHK DIY juga melaksanakan program Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi serta program Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA.

Angka target pencapaian indikator Tujuan 15 untuk tahun 2023-2027 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.26 Target dan Indikator Tujuan 15 Menjaga Ekosistem Darat

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target Tahunan				
					2023	2024	2025	2026	2027
15.1	Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional								
15.1.1*	Proporsi tutupan lahan berhutan terhadap total luas daratan (% tutupan lahan berhutan)				Didukung oleh Indikator Alternatif				
15.1.2.(a)	Luas kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV)	DLHK	Ha (juta)		PM*	PM*	PM*	PM*	PM*
15.2	Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global								
15.2.1.(a)	Jumlah KPH yang masuk Kategori Maju				Didukung oleh Indikator Alternatif				
15.3	Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi								
15.3.1*	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan				Didukung oleh Indikator Alternatif				
15.4	Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan termasuk keanekaragaman hayatinya untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan								
15.4.1*	Situs keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan konservasi	DLHK			PM*	PM*	PM*	PM*	PM*
15.4.2*	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	DLHK, Dataku			51,06	51,22	58,59 sd 61,04	59,09 sd 61,53	59,58 sd 62,02

Keterangan PM* Tidak dilakukan perhitungan indikator oleh Perangkat Daerah Provinsi tetapi mendukung target Nasional

Tabel 3.27 Target dan Indikator Lokal Tujuan 15 Menjaga Ekosistem Darat

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (<i>baseline</i>)	Target Tahunan				
					2023	2024	2025	2026	2027
15.1.1*	Proporsi tutupan lahan berhutan terhadap total luas daratan (% tutupan lahan berhutan)								
15.1.1*	Kawasan Hutan (luasan)	DLHK	Ha		19.036,42	19.036,42	19.036,42	19.036,42	19.036,42
15.2.1.(a)	Jumlah KPH yang masuk Kategori Maju								
15.2.1.(a)	Persentase keterwujudan pengelolaan hutan lestari	RPD DIY 2023-2026, DLHK	%		68,6	77,98	88,13	100	100
	Persentase kesesuaian pengelolaan hutan	Renstra DLHK 2023-2026	%		69,33	78,85	89,41	100	100
15.3.1*	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan								
15.3.1*	Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	DLHK, Dataku, BPDAS SOP	Ha		235	235	285	285	285

A. Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2023 -2027

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan 14, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengawasan penangkapan ikan;
- 2) Penetapan konservasi kawasan;
- 3) Perlindungan terhadap nelayan, terutama nelayan kecil;
- 4) Mitigasi abrasi dengan rekayasa pesisir;
- 5) Penguatan kapasitas kelembagaan untuk penegakan pemanfaatan sumber daya laut; dan
- 6) Penguatan pengelolaan sumber daya pesisir dan ruang laut sejauh 12 mil laut diluar migas.

B. Kontribusi Aktor Nonpemerintah pada RAD TPB/SDGs Tujuan 15

Sesuai dengan prinsip inklusif, untuk optimalisasi pencapaian SDGs, Aktor Nonpemerintah menjadi bagian dalam mengisi Rencana Aksi Daerah DIY. Secara garis besar, program yang masuk dalam lingkup nasional dari Aktor Nonpemerintah untuk TPB/SDGs Tujuan 15 adalah Universitas Widya Mataram. Program dan Kegiatan yaitu Perlindungan satwa liar berbasis masyarakat.

3.16. Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh

Tujuan 16 merupakan tujuan yang menjadi prasyarat utama dalam pencapaian seluruh tujuan dalam Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan 16 berupaya menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai (Peace), terwujudnya penegakan keadilan (Justice) dengan menyediakan akses keadilan untuk semua, serta membangun institusi yang tangguh (Strong institutions).

Tujuan 16 TPB terkait dengan dua prioritas nasional, yaitu prioritas 3 peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing, serta prioritas 7 memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik,

Target dan indikator untuk mencapai Tujuan 16 TPB disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.28. Target dan Indikator Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kuat

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (<i>baseline</i>)	Target Tahunan				
					2023	2024	2025	2026	2027
16.1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun								
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	Polda DIY	kasus	11	turun	turun	turun	turun	turun
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	Polda DIY	orang	0	0	0	0	0	0
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Polda DIY, Kajian RAD TPB DIY	%		PM*	PM*	PM*	PM*	PM*
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggalnya	Kementerian P3A, Kajian TPB DIY			PM*	PM*	PM*	PM*	PM*
16.2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan peniksaan terhadap anak								
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Polda,DP3AP2	%		PM*	PM*	PM*	PM*	PM*
16.2.1 (a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	DP3AP2	kasus		0	0	0	0	0
16.2.1.(b)	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya	Polda DIY	kasus		0	0	0	0	0
16.2.2*	Angka korban perdagangan manusia per 100,000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi	Polda DIY	kasus	0	0	0	0	0	0
16.3	Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua								
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Polda DIY	kasus		15	10	6	6	6
16.3.1.(b)	jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum	Kanwil Kemenkumham	Orang	210 (terdapat penurunan)	273	273	273	273	273

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (<i>baseline</i>)	Target Tahunan				
					2023	2024	2025	2026	2027
				anggaran bantuan hukum yang dilakukan oleh BPHN)					
16.3.1.(c)	Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara	Kanwil Kemenkumham	orang		100	100	100	100	100
16.3.2. (a)	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.	Kanwil Kemenkumham	%		0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
16.5	Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya								
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	BPS, Kajian RAD TPB DIY			PM*	PM*	PM*	PM*	PM*
16.6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat								
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui	BPKA	%		100	100	100	100	100
16.6.1.(a)	Persentase instansi pemerintah yang mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)				Didukung oleh Indikator Alternatif				
16.6.1.(b)	Nilai akuntabilitas pemerintah (AKIP)	RPD DIY 2023-2026, BAPPEDA			AA	AA	AA	AA	AA
16.6.1.(c)	Indeks Reformasi Birokrasi	RPD DIY 2023-2026, Biro Organisasi			82,58	83,18	83,78	84,38 (A)	84,68
16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.	Biro Organisasi, Kajian RAD TPB DIY			PM*	PM*	PM*	PM*	PM*
16.7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan								

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target Tahunan				
					2023	2024	2025	2026	2027
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	DP3AP2	Persen		PM*	PM*	PM*	PM*	PM*
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	DP3AP2	Persen		Didukung oleh Indikator Alternatif				
16.7.2.(a)	Indeks Demokrasi Aspek Lembaga Demokrasi	BPS	Indeks	20,74 (2021)	meningkat	meningkat	meningkat	meningkat	meningkat
16.7.2.(b)	Indeks Demokrasi Aspek Kebebasan Sipil	BPS	Indeks	74,31 (2021)	meningkat	meningkat	meningkat	meningkat	meningkat
16.7.2.(c)	Indeks Kesetaraan	BPS	Indeks	87,21 (2021)	meningkat	meningkat	meningkat	meningkat	meningkat
16.9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran								
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil Menurut Provinsi	BPS Pusat, Biro Tapem, Kajian RAD TPB DIY	%		94,96 sd 96,9	95,29 sd 97,23	95,62 sd 97,56	95,95 sd 97,89	96,28 sd 98,23
16.9.1.(a)	Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Dengan Kepemilikan Akta Lahir (40% Terbawah), Menurut Provinsi (Persen)	BPS Pusat, Biro Tapem, Kajian RAD TPB DIY	%		97,72 sd 99,3	98 sd 99,58	98,28 sd 99,86	98,56 sd 100	98,84 sd 100
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran Menurut Provinsi (Persen)	BPS Pusat, Biro Tapem, Kajian RAD TPB DIY	%		98,35 sd 99,93	98,68 sd 100	99,01 sd 100	99,34 sd 100	99,67 sd 100
16.1	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional								
16.10.1 (a)	Indikator Kebebasan dari kekerasan bagi jurnalis dan awak media	BPS, Kajian RAD TPB DIY			0	0	0	0	0
16.10.1.(b)	Jumlah pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	Komnas HAM	Kasus		2	2	2	2	2
16.10.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	DP3AP2	%		3	3	3	3	3

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (<i>baseline</i>)	Target Tahunan				
					2023	2024	2025	2026	2027
16.10.2.(a)	Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi informatif	Komisi Informasi Daerah, Kajian RAD TPB DIY			PM*	PM*	PM*	PM*	PM*
16.10.2.(b)	Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.	Komisi Informasi Daerah, Kajian RAD TPB DIY			PM*	PM*	PM*	PM*	PM*
16.b	Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidakdiskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan								
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Kanwil Kemenkumham			PM*	PM*	PM*	PM*	PM*

Keterangan PM* Tidak dilakukan perhitungan indikator oleh Perangkat Daerah Provinsi tetapi mendukung target Nasional

Tabel 3.29. Target dan Indikator Lokal Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kuat

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (<i>baseline</i>)	Target Tahunan				
					2023	2024	2025	2026	2027
16.6.1.(a)	Persentase instansi pemerintah yang mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)								
16.6.1.(a)	Opini BPK	RPD DIY 2023-2026, BPKA			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).								
	Indeks Demokrasi Indonesia	BPS, RPD DIY 2023-2026, DP3AP2			76,72	77,02	77,32	77,62	77,92

A. Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2023 - 2027

Kebijakan untuk pencapaian Tujuan 16 antara lain difokuskan pada

- 1) Penguatan layanan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat dan pemberdayaan hukum bagi masyarakat
- 2) Memperkuat tata kelola kependudukan dengan percepatan cakupan administrasi kependudukan
- 3) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda
- 4) Penguatan kapasitas lembaga demokrasi
- 5) Penguatan sistem anti korupsi dan penguatan upaya pencegahan korupsi
- 6) Penguatan implementasi manajemen ASN, reformasi terkait akuntabilitas kinerja, dan transformasi pelayanan publik
- 7) Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat
- 8) Peningkatan kapasitas kelembagaan kalurahan.

Beberapa strategi Meningkatkan Ketahanan Nasional di DIY yang dilakukan Kesatuan Bangsa DIY antara lain :

1. Melaksanakan program kegiatan Sinau Pancasila dengan materi 4 (empat) pilar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika
2. Melaksanakan Pendidikan politik bagi masyarakat dan pengurus Partai Politik
3. Melakukan sosialisasi tentang hak dan kewajiban bagi organisasi kemasyarakatan
4. Melaksanakan deteksi dini dan cegah dini pada lapisan masyarakat
5. Menguatkan dan mengoptimalkan kinerja Forum-forum yang telah dibentuk (FKDM, FKUB, FPK)
6. Melaksanakan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya

Selain itu ada juga strategi Satpol PP DIY untuk mendukung tujuan 16 antara lain :

1. Strategi pertama : Meningkatkan penyelesaian pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Arah kebijakan yang ditetapkan adalah : a) Penguatan link antar sistem informasi yang ada di internal Satuan Polisi Pamong Praja DIY dan dengan sistem informasi di luar Satuan Polisi Pamong Praja DIY yang terkait.. b) Penguatan pembinaan dan peningkatan

kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja DIY serta sarana prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan. c) Penguatan fasilitasi terhadap aktivitas penyelesaian pelanggaran tibumtranmas serta membangun budaya peka dan responsif.

2. Strategi kedua : Meningkatkan kualitas dan kuantitas penegakan Perda / Perkada. Arah kebijakan yang ditetapkan adalah : a) Peningkatan kegiatan sosialisasi tentang Perda / Perkada, baik melalui metode konvensional, pemanfaatan media sosial, atraksi seni budaya, maupun teknologi informasi digital lainnya. b) Optimalisasi kegiatan diklat dan pembinaan bagi anggota Satpol PP agar mahir dan terampil dalam penegakan Perda / Perkada serta kelengkapan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam penegakan Perda / Perkada. c) Peningkatan kualitas dan kuantitas penegakan Perda / Perkada dan penegakan protokol kesehatan, serta sanksi yang diberikan guna memberikan efek jera dan efek malu. d) Peningkatan kualitas dan efektivitas proses penegakan Perda / Perkada serta koordinasi dengan jejaring kerja maupun lintas OPD.
3. Strategi ketiga : Meningkatkan cakupan petugas Pelindungan Masyarakat (Linmas). Arah kebijakan yang ditetapkan adalah : a) Penguatan pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM Satlinmas, Satlinmas Rescue Istimewa dan Jaga Warga. b) Penguatan fasilitasi terhadap aktivitas Satlinmas, Satlinmas Rescue Istimewa dan Jaga Warga. c) Pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Satlinmas, Satlinmas Rescue Istimewa dan Jaga Warga.

B. Kontribusi Aktor Nonpemerintah pada RAD TPB/SDGs Tujuan 16

Sesuai dengan prinsip inklusif, untuk optimalisasi pencapaian SDGs, Aktor Nonpemerintah menjadi bagian dalam mengisi Rencana Aksi Daerah DIY. Secara garis besar, program yang masuk dalam lingkup nasional dari Aktor Nonpemerintah untuk TPB/SDGs Tujuan 16 diantaranya : PKBI, Universitas Widya Mataram. Program dan Kegiatan yaitu Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh, Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

3.17. Tujuan 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Tujuan 17 TPB menitikberatkan pada kerjasama dan kemitraan multidimensi dan multisektoral untuk mencapai tujuan. Terdapat empat prioritas nasional yang terkait dengan tujuan 17, yaitu prioritas 1, prioritas 3, prioritas 5, dan prioritas 7. Target dan indikator untuk mencapai Tujuan 17 TPB disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.17 Target dan Indikator Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target Tahunan				
					2023	2024	2025	2026	2027
17.1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya								
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya	BPKA	%		1,3	1,31	1,32	1,33	1.335
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB	BPKA	%		1,16	1.165	1,17	1.175	1.179
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh PAD	BPKA	%		40,12	40,35	40,85	41,1	41,3
17.6	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global								
17.6.1.(a)	Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (fixed broadband) terhadap total rumah tangga, menurut provinsi	Diskominfo, Kajian RAD TPB DIY	%		PM*	PM*	PM*	PM*	PM*
17.6.1.(b)	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif).	Diskominfo, Kajian RAD TPB DIY	%		PM*	PM*	PM*	PM*	PM*
17.8	Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi								
17.8.1*	Presentase Penduduk 5 Tahun Keatas yang Menggunakan Internet	Diskominfo, Kajian RAD TPB DIY	%		PM*	PM*	PM*	PM*	PM*
17.11	Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020								
17.11.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk nonmigas	Disperindag, Kajian RAD TPB DIY	Juta USD		539,96 sd 741,72	539,96 sd 769,72	539,96 sd 797,72	539,96 sd 825,72	562,2 sd 853,72

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target Tahunan				
					2023	2024	2025	2026	2027
17,17	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama								
17.17.1.(a)	Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun.	Biro PIWP2, Kajian RAD TPB DIY			PM*	PM*	PM*	PM*	PM*
17.17.1.(b)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Biro PIWP2, Kajian RAD TPB DIY	Proyek		PM*	PM*	PM*	PM*	PM*
17.17.1.(c)	Jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi.	Biro PIWP2, Kajian RAD TPB DIY	Nilai investasi (Rp Milyar)		PM*	PM*	PM*	PM*	PM*
17.19	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang								
17.19.2 (b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	BPS, Biro Tapem, Kajian RAD TPB DIY	Data Registrasi		PM*	PM*	PM*	PM*	PM*

Keterangan PM* Tidak dilakukan perhitungan indikator oleh Perangkat Daerah Provinsi tetapi mendukung target Nasional

A. Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2023 - 2027

Beberapa tujuan strategi dalam mencapai tujuan 17 diantaranya sebagai berikut :

- Strategi Meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan publik dengan tujuan Meningkatkan kemitraan multisektor dan multi stakeholder dalam penyediaan layanan publik dan perlindungan sosial terutama bagi kelompok renta
- Meningkatkan kemitraan multisektor dan multi stakeholder dalam rangka pengembangan pengetahuan, perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan pelayanan publik (infrastruktur, kesehatan, pendidikan) yang mendukung pembangunan wilayah selatan

Kebijakan untuk pencapaian 17 diarahkan pada:

- Dukungan terhadap peningkatan peran lembaga non pemerintah dalam kerjasama pembangunan serta sebagai alternatif pembiayaan pembangunan
- Meningkatkan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk terutama untuk produk ekspor
- Penguatan infrastruktur TIK untuk memperluas akses
- Pencatatan kontribusi pihak non pemerintah terhadap pencapaian TPB.

B. Kontribusi Aktor Nonpemerintah pada RAD TPB/SDGs Tujuan 17

Sesuai dengan prinsip inklusif, untuk optimalisasi pencapaian SDGs, Aktor Nonpemerintah menjadi bagian dalam mengisi Rencana Aksi Daerah DIY. Masih perlu dukungan Aktor Nonperintah dalam tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

BAB IV

PEMANTAUAN EVALUASI DAN PELAPORAN

Tahapan penting dalam upaya pencapaian target-target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah pemantauan dan evaluasi. Hal tersebut menjadi bagian tak terpisahkan dari siklus pelaksanaan pencapaian di tingkat pusat maupun daerah. Pemantauan dan evaluasi program/kegiatan dilakukan oleh setiap pemangku kepentingan. Dan dimulai sejak tahap penyusunan rencana aksi, baik di level nasional maupun daerah.

Pemantauan dan evaluasi merupakan tahapan yang sangat penting untuk memastikan pencapaian TPB/SDGs dari waktu ke waktu. Sebagai bagian integral dari siklus pelaksanaan pencapaian yang dimulai dari penyusunan Rencana Aksi pada tingkat nasional maupun daerah, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan dilaksanakan untuk setiap pemangku kepentingan yang melaksanakan TPB/SDGs.

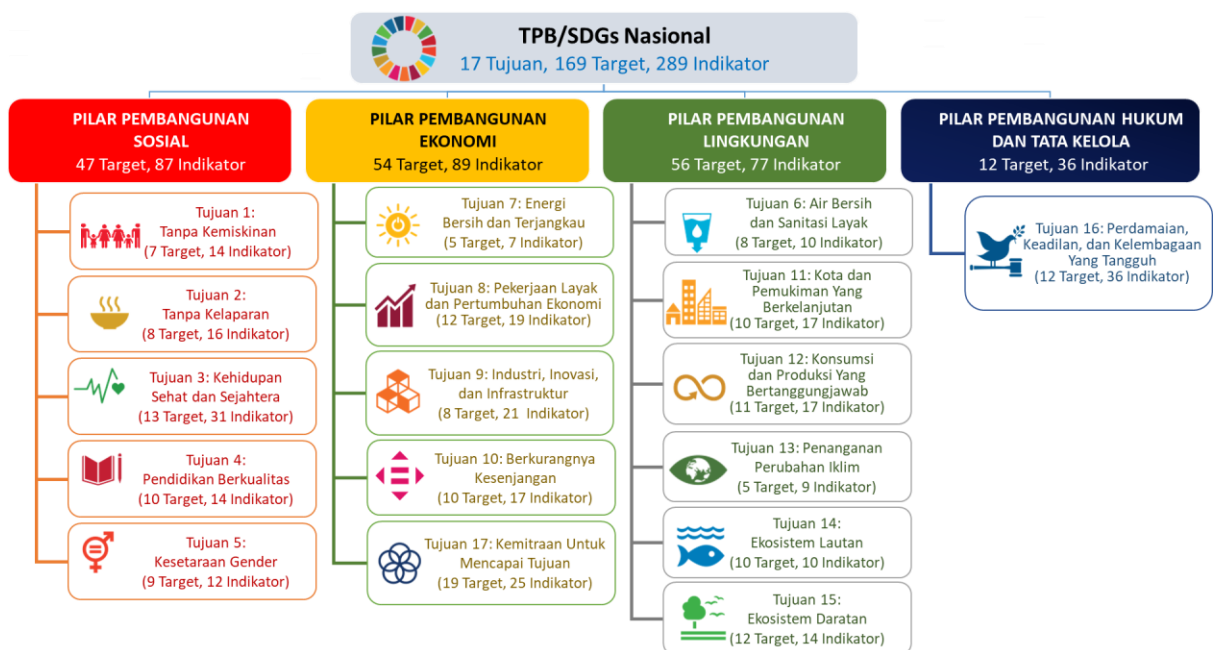
Landasan Peraturan. Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan berdasarkan Pasal 7 butir b Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sedangkan pelaporan pencapaian pelaksanaan TPB/SDGs diamanatkan pada Pasal 17, yang mengugaskan setiap Menteri/Kepala Lembaga dan Gubernur wajib menyampaikan laporan kepada Menteri PPN/Kepala BAPPENAS sebagai Koordinator Pelaksana TPB/SDGs Nasional. Khusus untuk pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan merupakan landasan hukum yang diacu untuk pelaksanaan kegiatan pelaporan, pemantauan, dan evaluasi. Untuk organisasi nonpemerintah yaitu organisasi kemasyarakatan serta media, pelaku usaha dan filantropi, serta akademisi, pelaporan, pemantauan dan evaluasi program maupun kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme tersendiri.

Tujuan pemantauan adalah mengamati perkembangan pencapaian TPB/SDGs dari waktu ke waktu untuk mengukur kemajuan pencapaian target dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan; mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul, agar dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Tujuan evaluasi adalah memberikan gambaran atas capaian TPB/SDGs dan menganalisis permasalahan dan faktor penyebabnya, sehingga hasil evaluasi menjadi umpan balik bagi perbaikan perencanaan kebijakan, program dan kegiatan khususnya yang terkait dengan TPB/SDGs.

4.1. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi TPB/SDGs DIY mencakup 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang dijabarkan dalam target dan indikator yang selaras dengan RPD 2023 - 2027 dan RPJMD 2022-2027. Rincian target dan indikator yang dipantau dan dievaluasi adalah yang tercantum dalam RAD TPB/SDGs DIY 2023-2027. Pemantauan dan evaluasi TPB/SDGs dilakukan pada program, kegiatan, dan keluaran (output) yang tercantum dalam RAD TPB/SDGs DIY 2023-2027 yang dibiayai yang bersumber dari APBN dan nonpemerintah.



Gambar 4.1

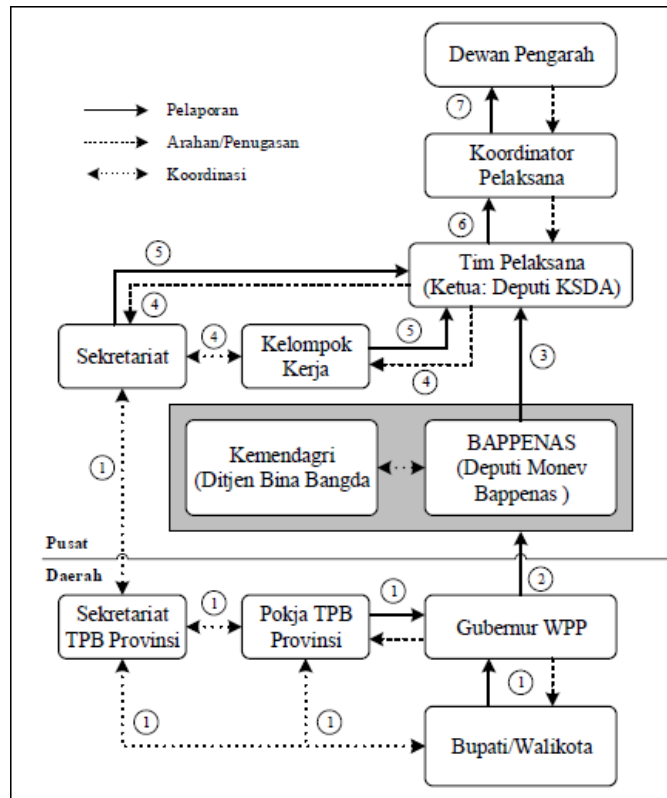
Indikator TPB/SDGs berdasarkan pilar pembangunan

4.2. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD)

Berdasarkan Perpres 59/2017 pada pasal 15 ayat 1, daerah diamanatkan menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam rangka pencapaian TPB/SDGs. Saat penyusunan, gubernur bekerja bersama dengan bupati/walikota di wilayahnya dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pihak-pihak lainnya. Pada pasal 17 ayat 2 Perpres 59/2017, mengamanatkan gubernur untuk menyampaikan Laporan tahunan pencapaian pelaksanaan Target TPB/SDGs di tingkat daerah kepada Menteri PPN/BAPPENAS selaku Koordinator Pelaksana TPB/SDGs dan juga kepada Menteri Dalam Negeri.

A. Alur Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi RAD

Alur pemantauan RAD TPB/SDGs mengikuti mekanisme (Gambar 4.2) sebagai berikut:



Gambar 4.2.

Alur Pemantauan RAD

Kelompok Kerja yang dibantu Sekretariat TPB/SDGs Provinsi melakukan koordinasi pembahasan pencapaian RAD TPB/SDGs tingkat provinsi (termasuk tingkat kabupaten, dan kota bila ada) setiap enam bulan sekali. Koordinasi dilakukan terkait program dan kegiatan untuk mencapai setiap target dan indikator serta alokasi anggaran untuk menjalankan program/kegiatan. Kelompok Kerja dibantu oleh Sekretariat TPB/SDGs Provinsi kemudian melaporkan capaian RAD kepada gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (WPP) dan ditembuskan kepada Sekretariat TPB/SDGs pusat (Langkah 1).

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (WPP) menyampaikan laporan progress pencapaian TPB/SDGs sesuai format yang berlaku kepada Menteri PPN/BAPPENAS melalui Deputi bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/BAPPENAS. Laporan juga disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah

(Langkah 2).

Deputi bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/BAPPENAS kemudian menyampaikan laporan yang telah dikonsolidasikan kepada Tim Pelaksana melalui ketua tim pelaksana yang dalam hal ini Deputi bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/BAPPENAS (Langkah 3).

Ketua Tim Pelaksana mengarahkan empat Kelompok Kerja untuk melakukan kajian atas laporan kemajuan yang disampaikan oleh Gubernur sebagai WPP dibantu oleh sekretariat SDGs (Langkah 4).

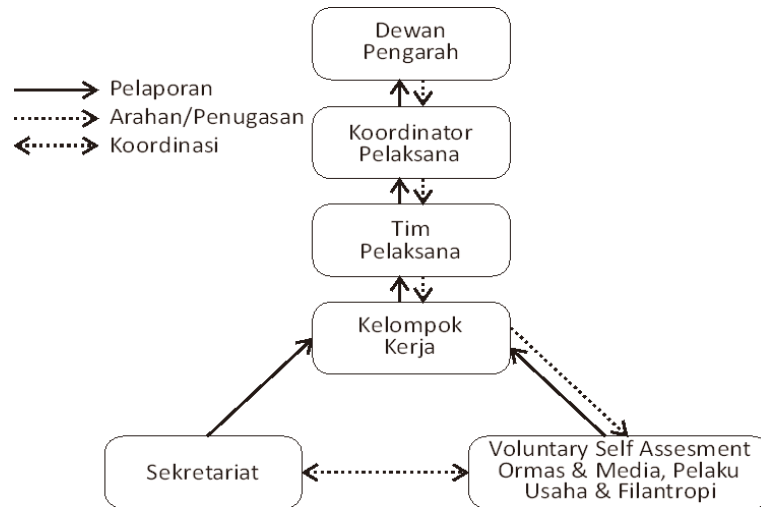
Masing-masing Kelompok Kerja yang dibantu Sekretariat menyerahkan keseluruhan laporan dan hasil kajian kepada Ketua Tim Pelaksana (Langkah 5).

Ketua Tim Pelaksana melaporkan hasil konsolidasi laporan dan kajian dari Pokja kepada Koordinator Pelaksana TPB/SDGS Nasional (Langkah 6).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS selaku Koordinator Pelaksana melaporkan pencapaian atas pelaksanaan Target TPB/SDGs tingkat daerah kepada Presiden selaku Ketua Dewan Pengarah sekali dalam (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, sesuai pasal 17 ayat 3 Perpres 59/2017 (Langkah 7).

B. Alur Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Renaksi Pihak NonPemerintah

Berbeda dengan mekanisme pemantauan dan evaluasi rencana aksi program/kegiatan pemerintah, mekanisme pemantauan dan evaluasi pihak nonpemerintah dilakukan menggunakan mekanisme “penilaian diri sukarela” (voluntary self assesment). Pihak nonpemerintah meliputi organisasi kemasyarakatan, media, pelaku usaha, filantropi, serta akademisi. Perbedaan ini disebabkan karena program dan kegiatan dari pihak nonpemerintah untuk pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs bersifat sukarela (voluntary), sehingga mekanisme pelaporannya pun bersifat sukarela. Sebagai catatan, meskipun bersifat sukarela, pelaporan program dan kegiatan tetap harus dapat dipertanggungjawabkan. Pelaporan dilakukan dengan menggunakan format laporan melalui self assesment tool (SAT) yang disepakati.



Gambar 4.3

Alur Pelaporan

Alur pelaporan dalam pemantauan pihak nonpemerintah mengikuti langkah-langkah berikut:

Organisasi nonpemerintah melakukan *voluntary self assessment* terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai format self assessment tool. Laporan ini kemudian disampaikan kepada Kelompok Kerja masing-masing pilar yang terkait dan ditembuskan kepada Sekretariat SDGs. Sekretariat TPB/SDGs kemudian bertugas mengkompilasi laporan dari organisasi nonpemerintah dengan format yang ditetapkan. (Langkah 1).

Kelompok Kerja dibantu oleh Sekretariat SDGs selanjutnya menyusun laporan kompilasi untuk ditelaah dan disampaikan kepada Ketua Tim Pelaksana (Langkah 2).

Ketua Tim Pelaksana kemudian menyampaikannya kepada Menteri PPN/Kepala BAPPENAS selaku Koordinator Pelaksana (Langkah 3).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS selaku Koordinator Pelaksana melaporkan pencapaian atas pelaksanaan Target TPB/SDGs tingkat Nasional kepada Presiden/Dewan Pengarah 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan (Langkah 4).

Mekanisme evaluasi bagi organisasi nonpemerintah dilakukan melalui sebuah forum, tim atau kelembagaan khusus yang dibentuk secara ad hoc. Forum ini merupakan panel independen dan nirkepentingan. Kelembagaan forum terdiri dari anggota yang diakui kompetensi, pengalaman, dan integritasnya dari pemangku kepentingan.

4.3. Jadwal Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian TPB/SDGs 2023-2027

Jadwal Pemantauan dan evaluasi pencapaian TPB/SDGs 2013-2027 dilaksanakan berdasarkan Perpres 59/2017 Pasal 20. Pasal ini mengatur tentang periode penyampaian pelaporan, pemantauan dan evaluasi.

Sesuai dengan periode pelaporan dan pemantauan enam bulanan, pemantauan RAN dilakukan pada bulan Juli dan pemantauan RAD akan dilakukan pada Januari (atau bersamaan dengan pemantauan/evaluasi tahunan RAN). Laporan pemantauan dari Kementerian dan Lembaga serta dari Gubernur disampaikan kepada Menteri PPN/Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri 15 hari setelah akhir bulan berkenaan.



Gambar 4.4.

Jadwal Pemantauan dan Evaluasi

4.4. Publikasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi

Diseminasi informasi terkait dengan peraturan, kebijakan, kegiatan seputar TPB/SDGs, dokumen dan informasi publik dilakukan melalui laman sdgs.BAPPENAS.go.id yang dipersiapkan oleh Tim Koordinasi Nasional TPB/SDGs dan dibantu oleh Sekretariat TPB/SDGs. Laman ini akan terus dikembangkan untuk dapat mengakomodir muatan yang dihasilkan dari pelaksanaan TPB/SDGs Indonesia. Publikasi hasil pemantauan dan evaluasi TPB/SDGs di DIY dilakukan melalui media massa. Data SDGs juga dapat diakses melalui sistem informasi terkait data pembangunan DIY.

A. Bahan Pemantauan dan Evaluasi

Bahan yang digunakan untuk pemantauan dan evaluasi di tingkat pusat adalah:

Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs 2021-2023;

Data pencapaian sasaran indikator TPB/SDGs termutakhir;

Data program, kegiatan, dan rincian output yang terkait dengan TPB/SDGs

termasuk capaian target dan realisasi anggarannya; dan

Dokumen pencapaian kinerja nonpemerintah.

B. Alat Pemantauan dan Evaluasi

Alat pemantauan dan evaluasi menggunakan formulir pemantauan dan evaluasi pelaksanaan TPB/SDGs. Substansi laporan pemantauan dan evaluasi diuraikan sebagai berikut:

Form 1 (Formulir Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran TPB/SDGs)

Form 1 digunakan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pencapaian sasaran seluruh indikator-indikator TPB/SDGs ditingkat nasional (RAN) dan daerah (RAD) sesuai dengan Metadata Edisi II. Di tingkat pusat (RAN), angka dasar dan capaian tahun berjalan menggunakan capaian nasional dengan target tahun berjalan diambil dari dokumen RPJMN/D. RKPD atau Renja OLD.

Berikut ini adalah contoh isian Form 1 yang memiliki informasi sebagai berikut: (1) nama tujuan TPB/SDGs; (2) nama target TPB/SDGs; (3) kode indikator TPB/SDGs; (4) nama indikator TPB/SDGs; (5) sumber data; (6) satuan; (7) angka dasar (baseline); (8) target tahun berjalan; (9) capaian tahun berjalan; dan (10) status pencapaian.

Tabel 4.1

Contoh isian Form 1 capaian kinerja pencapaian sasaran TPB/SDGs

TUJUAN 2 TANPA KELAPARAN (1)							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator TPB/SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Angka Dasar (Baseline) 2020 (7)	Target 2021 (8)	Capaian 2021 (9)	Status (10)
Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun. (2)							
2.1.1*	Prevalensi ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernutrition)	BPS	%	8,34	5,8		

h Tujuan 2

TUJUAN 2 TANPA KELAPARAN (1)							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator TPB/SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Angka Dasar (Baseline) 2020 (7)	Target 2021 (8)	Capaian 2021 (9)	Status (10)
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan Skala Pengalaman Kerawanan Pangan (FIES)	BPS	%	5,12	4,8		
Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah lima tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. (2)							



2.3.1.(a)	Nilai tambah pertanian/tenaga kerja pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan)	Biro Perencanaan, Kementerian Pertanian	Rp. Juta/tenaga kerja	55,33	57,20		
-----------	--	---	-----------------------	-------	-------	--	--

Catatan:

Nomor (9): diisi dengan capaian/realisasi tahun berjalan (tahun 2021) pada setiap indikator TPB/SDGs yang diambil dari sumber data termutakhir yaitu hasil survei atau laporan program yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai sumber data yang tertulis pada tabel di atas (kolom nomor 5).

Nomor (10) diisi dengan simbol yang menunjukkan status pencapaian indikator SDGs yang diukur dari perbandingan capaian indikator TPB/SDGs tahun berjalan dengan target indikator TPB/SDGs tahun berjalan. Simbol status pencapaian sebagai berikut:

Tabel 4.2
Simbol status pencapaian TPB/SDGs tahun berjalan

Simbol	Keterangan
: Tercapai (achieved)	Target tahun berjalan dapat tercapai.
: Akan tercapai/membaik (positive change) 	Tren capaian naik dari tahun sebelumnya walaupun belum mencapai target tahun berjalan.
: Perlu perhatian khusus (negative change) 	Tren capaian turun dari tahun sebelumnya dan target tahun berjalan tidak tercapai.

Form 2 (Formulir Realisasi Program, Kegiatan dan Anggaran Program Pemerintah)

Form 2 digunakan untuk memantau dan mengevaluasi realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran pemerintah yang mendukung pencapaian target setiap indikator TPB/SDGs baik di tingkat pusat dan daerah. Di tingkat pusat (Form 2a), pemantauan dan evaluasi dilakukan pada tataran rincian output (RO) K/L yang tercantum dalam RAN TPB/SDGs dan dilakukan penandaan (tagging) TPB/SDGs pada aplikasi KRISNA-Renja K/L. Sementara di tingkat daerah (Form 2b), pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap subkegiatan dari Renja OPD sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang tercantum dalam RAD TPB/SDGs setiap provinsi.

Berikut ini adalah contoh isian Form 2a untuk memantau perkembangan realisasi capaian RO K/L tahun anggaran 2021 termasuk realisasi anggarannya setiap semester. Informasi yang diperlukan untuk dapat mengisi Form 2a antara

lain: (1) nama program, kegiatan, dan RO K/L; (2) satuan dari RO K/L; (3) target tahun 2021 sesuai Renja dan RKA K/L tahun 2021; (4) realisasi target RO K/L pada semester I dan II tahun 2021; (5) alokasi anggaran RO K/L tahun 2021; (6) realisasi anggaran pada semester I dan II tahun 2021; (7) lokasi aktual di mana kegiatan RO dilaksanakan atau barang/layanan diberikan kepada penerima manfaat; dan (8) instansi pelaksana.

Tabel 4.3

Contoh isian Form 2b realisasi program, kegiatan dan anggaran program pemerintah daerah

TUJUAN 2 TANPA KELAPARAN										
Program/Kegiatan/ Rincian Output (1)	Satuan (2)	Target Tahun 2021 (3)	Realisasi Target Tahun 2021 (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2021 (Rp Juta) (5)	Realisasi Anggaran Tahun 2021 (Rp Juta) (6)		Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (7)	Instansi Pelaksana (8)	
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
PROGRAM PEMERINTAH PUSAT										
Indikator TPB/SDGs:										
* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita										
* Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe										
024.DD Program Kesehatan Masyarakat										
2080	Pembinaan Gizi Masyarakat	2080. QEA. 001	Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) yang mendapat makanan tambahan	Ibu Hamil KEK	238.000			63.265,09		Kemenkes
		2080. QEA. 003	Anak balita yang mendapat Suplement asi Gizi Mikro	Balita	140.000			5.265,99		Kemenkes
059.GH Program Komunikasi Publik										
4494	Pengelolaan Konten dan Diseminasi Informasi Publik	4494. QMB. 003	Diseminasi Informasi mengenai Stunting	Layanan	234			13.972,67		Kemen-kominfo

Form 3 (Formulir Self Assessments Rekapitulasi Realisasi Program, Kegiatan, dan Anggaran Program Nonpemerintah Untuk Organisasi Kemasyarakatan/CSO, Filantropi, dan Akademia)

Form 3 digunakan untuk memantau dan mengevaluasi realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran nonpemerintah untuk organisasi

kemasyarakatan/CSO, filantropi, dan academia. Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap output kegiatan dari setiap program yang menjadi target dari Lembaga Non Pemerintah yang ditunjukkan untuk mendukung pencapaian target setiap indikator TPB/SDGs. Data yang digunakan mengacu pada dokumen resmi seperti rencana kerja lembaga non pemerintah.

Berikut ini adalah contoh isian Form 3 untuk memantau perkembangan realisasi capaian tahun anggaran 2021 termasuk realisasi anggarannya setiap semester. Informasi yang diperlukan untuk dapat mengisi Form 3 antara lain: (1) nama program, kegiatan, dan output kegiatan; (2) satuan dari output kegiatan; (3) target output kegiatan tahun 2021; (4) realisasi target semester I dan II tahun 2021; (5) alokasi anggaran untuk setiap atau seluruh output kegiatan tahun 2021; (6) realisasi anggaran pada semester I dan II tahun 2021 untuk setiap output kegiatan; (7) sumber pendanaan pelaksanaan setiap/ seluruh output kegiatan; (8) lokasi aktual di mana output kegiatan dilaksanakan; dan (9) nama organisasi/lembaga non pemerintah yang melaksanakan program.

Tabel 4.4

Contoh isian Form 3 realisasi program, kegiatan dan anggaran program nonpemerintah

TUJUAN 12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB										
Program/Kegiatan/ Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target Tahun 2021 (3)	Realisasi Target Tahun 2021 (4)		Alokasi Anggaran Tahun 2021 (Rp Juta) (5)	Realisasi Anggaran Tahun 2021 (Rp Juta) (6)		Sumber Pendanaan (7)	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan (8)	Lembaga Pelaksana (9)
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
PROGRAM PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA										
Indikator TPB/SDGs:										
12.3.1.(a) Persentase Sisa makanan										
Nama Program: Dapur Pangan										
Kegiatan Program Dapur Pangan	1:1.1 Jumlah Mitra Dapur Pangan		115							Institusi Dapur Pangan Nasional

adalah program mendekati akses pangan berbasis masyarakat.	1.2 Jumlah penerima manfaat program Dapur Pangan	Orang	5.750							Galang dana, mitra dunia usaha		Institusi Dapur Pangan Nasional
Kegiatan Edukasi tentang pencegahan dan penanganan makanan berlebih melalui Dapur Pangan	2.1 Jumlah kegiatan edukasi yang terlaksana	Kegiatan	3									Institusi Dapur Pangan Nasional
	2.2 Jumlah mitra program yang mendapatkan edukasi	Edukasi	25									Institusi Dapur Pangan Nasional

Form 4 (Formulir Rekapitulasi Realisasi Program, Kegiatan Pelaku Usaha Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017) Form 4 digunakan untuk memantau dan mengevaluasi realisasi pelaksanaan program/kegiatan pelaku usaha. Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap kegiatan dari setiap program/kegiatan yang menjadi target dari pelaku usaha yang ditunjukkan untuk mendukung pencapaian target setiap indikator TPB/SDGs. Data yang digunakan mengacu pada dokumen resmi seperti rencana kerja pelaku usaha.

Berikut ini adalah contoh isian Form 4 untuk memantau perkembangan realisasi capaian pelaku usaha sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017. Informasi yang diperlukan untuk dapat mengisi Form 4 antara lain: (1) kode yang disesuaikan dengan Lampiran POJK 51/2017; (2) kegiatan usaha berkelanjutan yang mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-lte-TJSL; (3) kode indikator TPB/SDGs; (4) nama indikator TPB/SDGs; (5) nomor urut kegiatan/proyek/program; (6) nama proyek/kegiatan/produk/jasa berkelanjutan; (7) nama indikator capaian yang menjadi ukuran keberhasilan proyek/kegiatan/produk/jasa berkelanjutan; (8) satuan untuk mengukur indikator capaian; (9) waktu (durasi) pelaksanaan usaha sampai mencapai target; (10) angka target yang akan dicapai; dan (11) angka capaian target.

Tabel 4.5

Contoh isian Form 4 realisasi Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan Pelaku Usaha

Nama Perusahaan: Perusahaan A

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan		Indikator SDGs		Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan					Evaluasi Target	
Kode Sesuai Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor Urut	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian	Satuan	Waktu (Tahun)	Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A.6.c.2.b.	Kesetaraan dalam Kesempatan Bekerja	8.5.1*	Upah rata-rata per jam kerja	1	Penerapan upah minimum sesuai peraturan pada pekerja	Upah minimum sesuai dengan regulasi	%	1	100	
A.3.g.1.	Komunikasi dan Pelatihan anti korupsi	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	2	Training tentang BCoC/Kode Etik Bisnis kepada karyawan	Persentase kelulusan peserta training dengan nilai minimal 70%	%	1	100	

Form 5 (Formulir Identifikasi Masalah dan Rencana Tindak Lanjut)

Form ini ditujukan untuk mengidentifikasi masalah dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian target-target TPB/SDGs antara lain sesuai kategori berikut ini: (a) sumber daya manusia; (b) kelembagaan; (c) keuangan; (d) regulasi; (e) operasional; (f) politik; dan (g) lainnya, serta rencana tindak lanjut yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut dan institusi pelaksananya baik pemerintah maupun nonpemerintah.

Tabel 4.6

Form 4 realisasi proyek/kegiatan/produk/jasa berkelanjutan pelaku usaha

Tujuan SDGs	Identifikasi Masalah		Rencana Tindak Lanjut	Institusi Pelaksana Pemerintah/ Non Pemerintah
	Kategori	Deskripsi Masalah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nomor dan Nama Tujuan	Sumber Daya Manusia			

Target	Kelembagaan			
	Keuangan			
	Regulasi			
	Operasional			
	Politik			
	Lainnya			

Form 6 (Format pelaporan pembelajaran TPB/SDGs)

Form 6 ditujukan untuk merekam informasi dan pengalaman baik yang dilaksanakan baik institusi pemerintah dan nonpemerintah, sehingga dapat direplikasi di daerah lain. Skala pengalaman bisa bersifat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Pembelajaran harus memiliki tujuan yang jelas, program dan kegiatan yang jelas, data yang akurat, dan dapat direplikasi di tempat lain. Pembelajaran dituliskan dalam box dan mencakup informasi berikut.

BAB 5 PENUTUP

Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs periode 2023-2027 merupakan kelanjutan RAD periode pertama sebelumnya yang disusun sebagai dokumen rencana kerja lima tahunan untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pemerintah dan nonpemerintah yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian target TPB/SDGs. Saat ini, target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia dalam lima tahun ke depan.

Setelah pelaksanaan RAD periode pertama, komitmen pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs semakin kuat tidak hanya dari sisi pemerintah tetapi juga nonpemerintah, baik di tingkat nasional maupun di daerah, bahkan hingga tingkat desa. Kepemilikan bersama yang tumbuh semakin kuat diantara para pihak merupakan hasil dari penerapan prinsip inklusif, partisipatif, dan transparan dalam pelaksanaan TPB/SDGs sehingga dapat meningkatkan kepercayaan antarpihak. Oleh karena itu, setiap tahapan penyusunan RAN TPB/SDGs selalu didasarkan pada prinsip dan semangat inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik pihak pemerintah maupun nonpemerintah. Hal ini diharapkan juga menjadi landasan untuk memastikan pelaksanaan RAN TPB/SDGs dilakukan bersama dan memberikan manfaat untuk seluruh pemangku kepentingan.

Keterlibatan pemangku kepentingan nonpemerintah juga terus meningkat, antara lain melalui pembentukan SDGs *Center/Network/Hub* di berbagai Perguruan Tinggi. Peran filantropi dan pelaku usaha juga terus meningkat ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah asosiasi yang terlibat dan berkomitmen nyata dalam pelaksanaan TPB/SDGs melalui proses bisnisnya. Hal ini sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang memberikan mandat bagi perusahaan untuk menyampaikan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) guna menunjukkan kontribusinya dalam pelaksanaan TPB/SDGs yang juga mulai diikuti oleh filantropi. Selaras dengan hal tersebut, Pemerintah melalui Kementerian BUMN mendorong pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di seluruh BUMN yang dilaksanakan berdasarkan empat pilar utama TPB/SDGs yaitu pilar sosial, lingkungan, ekonomi, serta hukum dan tata kelola. Keterlibatan dan kontribusi organisasi kemasyarakatan juga berperan signifikan dalam pencapaian TPB/SDGs melalui pelaksanaan berbagai program yang mampu menjangkau hingga ke masyarakat dan seluruh pelosok Indonesia DIY dan Indonesia.

Inovasi dalam pembiayaan TPB/SDGs merupakan sebuah kebutuhan dalam rangka mempercepat pencapaian TPB/SDGs dan melengkapi upaya pembiayaan pembangunan. Strategi pendanaan TPB/SDGs tidak hanya bertumpu pada anggaran pemerintah, namun perlu diperluas sumber-sumber lain yang tidak mengikat dan sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan dari berbagai potensi yang lebih inovatif. Dalam menggali potensi pendanaan inovatif tersebut, spektrum pendanaan itu sendiri beragam dengan berbagai tujuan, baik finansial maupun nonfinansial. Oleh sebab itu, diperlukan sinergi dan integrasi yang dapat menghubungkan seluruh potensi pendanaan inovatif untuk pencapaian TPB/SDGs. Adapun sumber-sumber pembiayaan tersebut berasal dari: (1) optimalisasi penerimaan negara; (2) sumber pembiayaan nonpemerintah dari masyarakat; (3) sumber lain yang sah dan tidak mengikat; serta (4) sumber-sumber lainnya yang dibutuhkan dalam mendukung investasi jangka panjang.

Pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan membutuhkan dukungan berbagai pihak. Perpres Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menjelaskan prinsip inklusivitas (pelibatan aktor pemerintah & nonpemerintah, K/L, Filantropi & Pelaku Usaha, Akademisi & Ormas). Pemangku kepentingan tersebut bekerja sama dalam pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan termasuk dalam pendanaan untuk pembangunan, APBD, sumber lain yang sah dan tidak mengikat dapat berupa Pendanaan Inovasi. Pendanaan Inovatif adalah sumber-sumber dan skema pendanaan yang berasal dari para pemangku kepentingan nonpemerintah, baik lingkup global, nasional, maupun daerah, untuk mengakselerasi pencapaian TPB.

Keterkaitan Isu Strategis Pembangunan DIY dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) terlihat bahwa Pemerintah Daerah DIY selama ini telah mendukung pelaksanaan MDGs yang selanjutnya berevolusi menjadi SDGs. Rencana Aksi Daerah SDGs telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 34 tahun 2018 yang kemudian diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 86 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan DIY/SDGs DIY. Rencana Aksi Daerah ini disusun dengan partisipasi dari segenap OPD Pemerintah Daerah DIY, instansi vertikal dan perwakilan dari beberapa lembaga non pemerintah serta akademisi, yang kemudian juga terlibat aktif dalam Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah SDGs sampai hari ini. Dilanjutkan dengan Kajian terhadap RAD SDGs pada 2022 yang menjadi landasan RAD SDGs DIY 2023-2027.

Pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan dilakukan selaras dengan rencana pembangunan daerah di DIY. Dengan keselarasan tersebut maka terjadi hubungan yang saling mendukung dan melengkapi satu dengan lainnya. Keselarasan juga mengarahkan agar fokus pada berbagai isu prioritas yang akan diselesaikan. Isu strategis pembangunan DIY sejalan dengan muatan TPB.

Dokumen RAD TPB/SDGs ini merupakan dokumen yang secara terus menerus dapat dikaji ulang secara bersama antara pihak pemerintah dan nonpemerintah. Metode yang diterapkan adalah dengan konsultasi dan partisipasi publik, baik secara daring (*online*) dan luring (*offline*). Pemutakhiran dokumen setiap enam bulan sejalan dengan jadwal pelaksanaan pemantauan.

Matriks 2b: Rencana Program/Kegiatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Program/Kegiatan/Rincian Output (1)		Satuan	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana				
			2023	2024	2025	2026	2027								
TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN															
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 1.2.1 (1). Imunisasi Dasar: Persentase imunisasi dasar pada penduduk usia 12 - 23 bulan, terjadi deprivasi jika ada penduduk usia 12- 23 tahun yang tidak mendapatkan imunisasi dasar															
Kode dan Nama Program: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															
Kode Kegiatan: 1.02.02.1.02	Nama Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kode Sub Kegiatan: 1.02.02.1.02.17	Nama Sub Kegiatan: Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Rupiah	252,575,400	277,832,940	305,616,234	305,616,234	0	1,065,638,574	APBD		Dinas Kesehatan DIY		
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 1.2.1 (2) Gizi : Prevalence of Undernourishment (tingkat kekurangan gizi), terjadi deprivasi jika ada anggota rumah tangga yang kekurangan gizi															
Kode dan Nama Program: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															
Kode Kegiatan: 1.02.02.1.02	Nama Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kode Sub Kegiatan : 1.02.02.1.02.06	Nama Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rupiah	3,625,060,000	3,650,000,000	3,700,000,000	3,725,000,000		14,700,060,000	APBD		Dinas Kesehatan DIY		
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 1.2.1 (3). Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.															
Kode dan Nama Program: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															
Kode Kegiatan: 1.02.02.1.02.16	Nama Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kode Sub Kegiatan : 1.02.02.1.02.06	Nama Sub Kegiatan: Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rupiah	59,882,655,000	57,609,976,500	56,745,582,200	56,046,675,000		230,284,888,700	APBD		Dinas Kesehatan DIY		
Kode dan nama Indikator 2.1.1.(a) : Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.															
Kode dan Nama Program: Program Kawasan Permukiman															
1.04.03.1.02.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.04.03.1.02.03	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	%	58,27	62,75	67,24	71,73		285,400	APBD	DIY	Dinas PUP ESDM DIY		
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional															
Kode dan Nama Program: PENDIDIKAN: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
1.01.02.1	KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS	1.01.02.1.01.45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah												
			BOSDA Dikmen Swasta	siswa	64,794	65,500	66,000	66,500	67,000		APBD	DIY	Disdikpora		
			Beasiswa Jaminan Kelangsungan Pendidikan	siswa	200	200	200	200	200	#REF!	APBD	DIY	Disdikpora		
		1.01.02.1.01.47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	1.01.02.1.01.47	Beasiswa Retrieval	siswa	100	100	100	100	100		APBD	DIY	Disdikpora
					Biaya Operasional SMA Negeri	Sekolah	11	11	11	11	11	-	APBD	DIY	Disdikpora
					Biaya Operasional SMA Negeri	Sekolah	19	19	19	19	19	#REF!	APBD	DIY	Disdikpora
					Biaya Operasional SMA Negeri	Sekolah	11	11	11	11	11	-	APBD	DIY	Disdikpora
					Biaya Operasional SMA Negeri	Sekolah	11	11	11	11	11	-	APBD	DIY	Disdikpora
					Biaya Operasional SMA Negeri	Sekolah	17	17	17	17	17	-	APBD	DIY	Disdikpora
		1.01.02.1.01.53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.53	BOSNAS SMA	Sekolah	168	168	168	168	168		APBD	DIY	Disdikpora
	Sekolah				168	168	168	168	168	-	APBD	DIY	Disdikpora		
1.01.02.1	KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	1.01.02.1.02.37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah												
			Beasiswa Jaminan Kelangsungan Pendidikan SMK	siswa	400	400	400	400	400		APBD	DIY	Disdikpora		
			Beasiswa retrivel	siswa	100	100	100	100	100		APBD	DIY	Disdikpora		
		1.01.02.1.02.39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	1.01.02.1.02.39											
					Biaya Operasional SMK Negeri	sekolah	6	6	6	6	6	-	APBD	DIY	Disdikpora
					Biaya Operasional SMK Negeri	sekolah	13	13	13	13	13	-	APBD	DIY	Disdikpora
					Biaya Operasional SMK Negeri	sekolah	8	8	8	8	8	-	APBD	DIY	Disdikpora
					Biaya Operasional SMK Negeri	sekolah	12	12	12	12	12	-	APBD	DIY	Disdikpora
					Biaya Operasional SMK Negeri	sekolah						#REF!	APBD	DIY	Disdikpora
		1.01.02.1.02.40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan									APBD	DIY	Disdikpora	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Program/Kegiatan/Rincian Output (1)				Satuan	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2023	2024	2025	2026	2027				
			Pemetaan tamatan siswa SMK tingkat DIY	kegiatan	1	1	1	1	1	-	APBD	DIY	Disdikpora
		1.01.02.1.02.46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan										
			BOSNAS SMK	sekolah	210	210	210	210	210	-	APBD	DIY	Disdikpora
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 1.3.1 Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok anak berkebutuhan khusus, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan													
Kode dan Nama Program: 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL													
Kode Kegiatan: 1.06.04.1.01	Nama Kegiatan: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Kode Sub Kegiatan: 1.06.04.1.01.01	Nama Sub Kegiatan: Penyediaan Permakanan	orang	580	580	580	580	580	31,486,235,167	APBD	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		Kode Sub Kegiatan: 1.06.04.1.01.02	Nama Sub Kegiatan: Penyediaan Sandang	orang	580	580	580	580	580	8,160,958,236	APBD	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		Kode Sub Kegiatan: 1.06.04.1.01.03	Nama Sub Kegiatan: Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	orang	192	192	192	192	192	2,833,721,350	APBD	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		Kode Sub Kegiatan: 1.06.04.1.01.04	Nama Sub Kegiatan: Penyediaan Alat Bantu	orang	6	6	6	6	6	86,725,380	APBD	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		Kode Sub Kegiatan: 1.06.04.1.01.05	Nama Sub Kegiatan: Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	orang	258	258	258	258	258	5,039,731,355	APBD	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		Kode Sub Kegiatan: 1.06.04.1.01.06	Nama Sub Kegiatan: Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	orang	1030	1030	1030	1030	1030	14,261,480,023	APBD	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		Kode Sub Kegiatan: 1.06.04.1.01.07	Nama Sub Kegiatan: Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	orang	460	460	460	460	460	3,735,279,890	APBD	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		Kode Sub Kegiatan: 1.06.04.1.01.08	Nama Sub Kegiatan: Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	orang	27	27	27	27	27	19,780,524	APBD	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		Kode Sub Kegiatan: 1.06.04.1.01.09	Nama Sub Kegiatan: Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	orang	580	580	580	580	580	802,937,250	APBD	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		Kode Sub Kegiatan: 1.06.04.1.01.10	Nama Sub Kegiatan: Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang	279	279	279	279	279	107,916,189	APBD	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		Kode Sub Kegiatan: 1.06.04.1.01.11	Nama Sub Kegiatan: Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang	211	211	211	211	211	27,839,256	APBD	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
Kode Kegiatan: 1.06.04.1.02	Nama Kegiatan: Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Kode Sub Kegiatan: 1.06.04.1.02.01	Nama Sub Kegiatan: Pengasuhan	orang	125	125	125	125	125	614,124,219	APBD	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		Kode Sub Kegiatan: 1.06.04.1.02.02	Nama Sub Kegiatan: Penyediaan Makanan	orang	538	538	538	538	538	10,767,082,567	APBD	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		Kode Sub Kegiatan: 1.06.04.1.02.03	Nama Sub Kegiatan: Penyediaan Sandang	orang	538	538	538	538	538	3,491,900,470	APBD	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		Kode Sub Kegiatan: 1.06.04.1.02.04	Nama Sub Kegiatan: Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	orang	125	125	125	125	125	1,128,524,295	APBD	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		Kode Sub Kegiatan: 1.06.04.1.02.05	Nama Sub Kegiatan: Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	orang	538	538	538	538	538	1,574,084,038	APBD	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		Kode Sub Kegiatan: 1.06.04.1.02.06	Nama Sub Kegiatan: Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	orang	933	933	933	933	933	7,128,144,050	APBD	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		Kode Sub Kegiatan: 1.06.04.1.02.07	Nama Sub Kegiatan: Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	orang	120	120	120	120	120	509,385,124	APBD	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		Kode Sub Kegiatan: 1.06.04.1.02.08	Nama Sub Kegiatan: Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	orang	5	5	5	5	5	18,315,300	APBD	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Program/Kegiatan/Rincian Output (1)				Satuan	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2023	2024	2025	2026	2027				
		Kode Sub Kegiatan : 1.06.04.1.02.09	Nama Sub Kegiatan: Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	orang	538	538	538	538	538	4,913,756,891	APBD	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		Kode Sub Kegiatan : 1.06.04.1.02.10	Nama Sub Kegiatan: Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang	105	105	105	105	105	322,898,739	APBD	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		Kode Sub Kegiatan : 1.06.04.1.02.11	Nama Sub Kegiatan: Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang	30	30	30	30	30	782,570,033	APBD	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		Kode Sub Kegiatan : 1.06.04.1.02.12	Nama Sub Kegiatan: Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	orang	2	2	2	2	2	20,757,340	APBD	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		Kode Sub Kegiatan : 1.06.04.1.02.13	Nama Sub Kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Anak Dalam Panti	dokumen	1	1	1	1	1	675,193,535	APBD	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
Kode Kegiatan: 1.06.04.1.03	Nama Kegiatan: Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Kode Sub Kegiatan : 1.06.04.1.03.01	Nama Sub Kegiatan: Penyediaan Permakanan	orang	2555	2555	2555	2555	2555	28,816,645,879	APBD	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		Kode Sub Kegiatan : 1.06.04.1.03.02	Nama Sub Kegiatan: Penyediaan Sandang	orang	330	330	330	330	330	3,615,318,118	APBD	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		Kode Sub Kegiatan : 1.06.04.1.03.03	Nama Sub Kegiatan: Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	orang	230	230	230	230	230	854,268,328	APBD	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		Kode Sub Kegiatan : 1.06.04.1.03.05	Nama Sub Kegiatan: Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	orang	305	305	305	305	305	2,864,366,398	APBD	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		Kode Sub Kegiatan : 1.06.04.1.03.06	Nama Sub Kegiatan: Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	orang	1780	1780	1780	1780	1780	9,828,783,643	APBD	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		Kode Sub Kegiatan : 1.06.04.1.03.07	Nama Sub Kegiatan: Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	orang	280	280	280	280	280	3,510,066,194	APBD	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		Kode Sub Kegiatan : 1.06.04.1.03.10	Nama Sub Kegiatan: Pemberian Layanan Penelusuran Keluarga	orang	216	216	216	216	216	131,870,160	APBD	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		Kode Sub Kegiatan : 1.06.04.1.03.11	Nama Sub Kegiatan: Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga	orang	224	224	224	224	224	37,729,518	APBD	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		Kode Sub Kegiatan : 1.06.04.1.03.12	Nama Sub Kegiatan: Pemulasaraan	orang	50	50	50	50	50	886,216,316	APBD	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
Kode Kegiatan: 1.06.04.1.04	Nama Kegiatan: Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam PantiRehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Kode Sub Kegiatan : 1.06.04.1.04.01	Nama Sub Kegiatan: Penyediaan Permakanan	orang	50	50	50	50	50	3,052,122,643	APBD	BRSBKL Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		Kode Sub Kegiatan : 1.06.04.1.04.02	Nama Sub Kegiatan: Penyediaan Sandang	orang	50	50	50	50	50	844,762,687	APBD	BRSBKL Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		Kode Sub Kegiatan : 1.06.04.1.04.03	Nama Sub Kegiatan: Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses	orang	8	8	8	8	8	242,735,725	APBD	BRSBKL Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		Kode Sub Kegiatan : 1.06.04.1.04.04	Nama Sub Kegiatan: Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	orang	24	24	24	24	24	73,261,200	APBD	BRSBKL Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		Kode Sub Kegiatan : 1.06.04.1.04.05	Nama Sub Kegiatan: Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	orang	50	50	50	50	50	1,038,489,720	APBD	BRSBKL Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		Kode Sub Kegiatan : 1.06.04.1.04.06	Nama Sub Kegiatan: Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	orang	50	50	50	50	50	183,153,000	APBD	BRSBKL Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		Kode Sub Kegiatan : 1.06.04.1.04.07	Nama Sub Kegiatan: Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	orang	50	50	50	50	50	1,791,736,958	APBD	BRSBKL Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Program/Kegiatan/Rincian Output (1)				Satuan	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2023	2024	2025	2026	2027				
		Kode Sub Kegiatan : 1.06.04.1.04.08	Nama Sub Kegiatan: Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	orang	10	10	10	10	10	12,210,200	APBD	BRSBKL Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		Kode Sub Kegiatan : 1.06.04.1.04.09	Nama Sub Kegiatan: Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	orang	50	50	50	50	50	59,829,980	APBD	BRSBKL Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		Kode Sub Kegiatan : 1.06.04.1.04.10	Nama Sub Kegiatan: Pemulangan ke Daerah Asal	orang	8	8	8	8	8	113,554,860	APBD	BRSBKL Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
Kode Kegiatan: 1.06.04.1.05	Nama Kegiatan: Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Kode Sub Kegiatan : 1.06.04.1.05.01	Nama Sub Kegiatan: Penyediaan Permakanan	orang	327	327	327	327	327	21,132,174,825	APBD	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		Kode Sub Kegiatan : 1.06.04.1.05.02	Nama Sub Kegiatan: Penyediaan Sandang	orang	327	327	327	327	327	4,733,984,896	APBD	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		Kode Sub Kegiatan : 1.06.04.1.05.03	Nama Sub Kegiatan: Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses	orang	247	247	247	247	247	1,174,836,850	APBD	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		Kode Sub Kegiatan : 1.06.04.1.05.04	Nama Sub Kegiatan: Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	orang	327	327	327	327	327	4,881,222,813	APBD	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		Kode Sub Kegiatan : 1.06.04.1.05.05	Nama Sub Kegiatan: Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	orang	327	327	327	327	327	13,367,708,645	APBD	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		Kode Sub Kegiatan : 1.06.04.1.05.06	Nama Sub Kegiatan: Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	orang	327	327	327	327	327	5,431,045,678	APBD	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		Kode Sub Kegiatan : 1.06.04.1.05.07	Nama Sub Kegiatan: Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	orang	150	150	150	150	150	8,810,523,783	APBD	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		Kode Sub Kegiatan : 1.06.04.1.05.08	Nama Sub Kegiatan: Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	orang	70	70	70	70	70	14,652,240	APBD	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		Kode Sub Kegiatan : 1.06.04.1.05.09	Nama Sub Kegiatan: Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	orang	150	150	150	150	150	160,253,602	APBD	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		Kode Sub Kegiatan : 1.06.04.1.05.10	Nama Sub Kegiatan: Pemulangan ke Daerah Asal	orang	247	247	247	247	247	2,211,969,307	APBD	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		Kode Sub Kegiatan : 1.06.04.1.05.11	Nama Sub Kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	dokumen	76	76	76	76	76	454,219,440	APBD	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 1.3.1 Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok anak berkebutuhan khusus, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan													
Kode dan Nama Program: 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL													
Kode Kegiatan: 1.06.05.1.01	Nama Kegiatan: Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Kode Sub Kegiatan: 1.06.05.1.01.01	Nama Sub Kegiatan: Pengangkatan Anak antar WNI	orang	30	30	30	30	30	4,329,138,500	APBD	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
		Kode Sub Kegiatan: 1.06.05.1.01.02	Nama Sub Kegiatan: Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	orang	1	1	1	1	1	155,214,900	APBD	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
Kode Kegiatan: 1.06.05.1.02	Nama Kegiatan: Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Kode Sub Kegiatan : 1.06.05.1.02.02	Nama Sub Kegiatan: Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	orang	1900	1900	1900	1900	1900	90,731,273,325	APBD	Dinas Sosial DIY	Dinas Sosial DIY
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 1.3.1.(b). Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan**													
Kode dan Nama Program: 2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN													

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Program/Kegiatan/Rincian Output (1)				Satuan	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2023	2024	2025	2026	2027				
Kode Kegiatan: 2.07.06.1.01	Nama Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Kode Sub Kegiatan : 2.07.06.1.01.01	Nama Sub Kegiatan: Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Rupiah	210,000,000	231,000,000	254,100,000	279,510,000	307,461,000	1,282,071,000	APBD	DIY	Disnakertrans DIY
AN 2 TANPA KELAPARAN													
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 2.1.2. Persentase Desa Mandiri Pangan dalam tahap Kemandirian													
Kode dan Nama Program: 2.09.04. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN													
2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	2.09.04.1.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Dokumen	5	5	5	5	5	380,670,000	APBD	DIY	DPKP DIY
2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	2.09.04.1.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Dokumen	1	1	1	1		2,668,900,000	APBD	DIY	DPKP DIY
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 2.2.2.(a). Skor Pola Pangan Harapan (PPH), berdasarkan standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.100 kkal/kapita/hari (skor)													
Kode dan Nama Program: 2.09.03. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat													
2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.1.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan	6	6	6	6	6	1,312,591,500	APBD	DIY	DPKP DIY
		2.09.03.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Laporan	4	4	4	4	4	5,214,724,000	APBD	DIY	DPKP DIY
2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	2.09.03.1.04.01	Promosi Pengenekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dokumen	1	1	1	1	1	2,441,200,000	APBD	DIY	DPKP DIY
		2.09.03.1.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Laporan	1	1	1	1	1	2,441,200,000	APBD	DIY	DPKP DIY
		2.09.03.1.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Laporan	1	1	1	1	1	402,600,000	APBD	DIY	DPKP DIY
Kode dan Nama Program: 2.09.05. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN													
2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.09.05.1.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	1	353,600,000	APBD	DIY	DPKP DIY
		2.09.05.1.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Sertifikat	5	5	5	5	5	502,100,000	APBD	DIY	DPKP DIY
		2.09.05.1.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	1	353,600,000	APBD	DIY	DPKP DIY
Kode dan Nama Program: 2.22.08. PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN													
2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	2.22.08.5.08.01	Pengembangan Lumbung Mataraman	Laporan	7	8	8	8	8	35,268,139,000	DAIS	DIY	DPKP DIY
		2.22.08.5.08.07	Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional	Dokumen	3	3	3	3	3	3,750,000,000	DAIS	DIY	DPKP DIY
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:													
Kode dan Nama Program: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													
Kode Kegiatan: 1.02.02.1.02	Nama Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kode Sub Kegiatan : 1.02.02.1.02.06	Nama Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rupiah	3,625,060,000	3,650,000,000	3,700,000,000	3,725,000,000		14,700,060,000	APBD		Dinas Kesehatan DIY
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 2.3.1. Rata-rata persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan													
Kode dan Nama Program: 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG													
1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	1.03.13.5.02.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1,140,280,000	DAIS	ab. Gunungkid	DPKP DIY

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Program/Kegiatan/Rincian Output (1)			Satuan	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
				2023	2024	2025	2026	2027					
		1.03.13.5.02.03	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Dokumen	1	1	1	1	1	1,472,000,000	DAIS	ab. Gunungkid	DPKP DIY
		1.03.13.5.02.04	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Dokumen	1	1	1	1	1	1,296,052,000	DAIS	Kab. Kulonprogo	DPKP DIY
		1.03.13.5.02.10	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Dokumen	1	1	1	1	1	1,259,575,000	DAIS	Kab. Bantul	DPKP DIY
		1.03.13.5.02.11	Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-Sermo- Wates	Dokumen	1	1	1	1	1	1,446,625,000	DAIS	Kab. Kulonprogo	DPKP DIY
Kode dan Nama Program: 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN													
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3.27.02.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Dokumen	7	7	7	7	7	48,851,404,600	APBD	DIY	DPKP DIY
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.27.02.1.02.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Lembar sertifikat	250	250	250	250	250	726,000,000	APBD	DIY	DPKP DIY
		3.27.02.1.02.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Laporan	2	2	2	2	2	2,529,681,000	APBD	DIY	DPKP DIY
		3.27.02.1.02.03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Dokumen	2	2	2	2	2	5,393,379,500	APBD	DIY	DPKP DIY
		3.27.02.1.02.04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Laporan	2	2	2	2	2	170,972,000	APBD	DIY	DPKP DIY
3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	3.27.02.1.04.01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	1	62,327,747,240	APBD	DIY	DPKP DIY
		3.27.02.1.04.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Laporan	1	1	1	1	1	20,211,450,072	APBD	DIY	DPKP DIY
Kode dan Nama Program: 3.27.03. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN													
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	1	1	1	1	1	1,320,000,000	APBD	DIY	DPKP DIY
		3.27.03.1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Dokumen	3	3	3	3	3	10,503,000,000	APBD	DIY	DPKP DIY
Kode dan Nama Program: 3.27.04. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER													
3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3.27.04.1.01.01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	laporan	1	1	1	1	1	1,941,600,000	APBD	DIY	DPKP DIY
3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	3.27.04.1.02.01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	laporan	1	1	1	1	1	280,540,000	APBD	DIY	DPKP DIY
		3.27.04.1.02.03	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	laporan	1	1	1	1	1	3,298,500,000	APBD	DIY	DPKP DIY
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	3.27.04.1.03.03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen	1	1	1	1	1	6,750,980,000	APBD	DIY	DPKP DIY

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Program/Kegiatan/Rincian Output (1)				Satuan	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2023	2024	2025	2026	2027				
3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan	3.27.04.1.05.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Sertifikat	2	2	2	2	2	304,175,000	APBD	DIY	DPKP DIY
Kode dan Nama Program: 3.27.05. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN													
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	3.27.05.1.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Hektar	940	990	1090	1140	1240	6,982,800,000	APBD	DIY	DPKP DIY
Kode dan Nama Program: 3.27.07. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN													
3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.1.01.01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Orang	300	300	300	300	300	3,754,636,500	APBD	DIY	DPKP DIY
		3.27.07.1.01.02	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Orang	90	90	90	90	90	1,098,918,000	APBD	DIY	DPKP DIY
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.1.02.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	1	1	1	1	1	35,770,821,230	APBD	DIY	DPKP DIY
		3.27.07.1.02.02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Kelompok	58	58	58	58	58	1,165,772,000	APBD	DIY	DPKP DIY
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	3.27.07.1.03.02	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Laporan	1	1	1	1	1	364,292,000	APBD	DIY	DPKP DIY
		3.27.07.1.03.04	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Unit	10	10	10	10	10	915,765,000	APBD	DIY	DPKP DIY
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 2.3.1.(a). Peningkatan nilai subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam PDRB (ADHK)													
Kode dan Nama Program: 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG													
1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	1.03.13.5.02.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1,140,280,000	DAIS	ab. Gunungkid	DPKP DIY
		1.03.13.5.02.03	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Dokumen	1	1	1	1	1	1,472,000,000	DAIS	ab. Gunungkid	DPKP DIY
		1.03.13.5.02.04	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Dokumen	1	1	1	1	1	1,296,052,000	DAIS	Kab. Kulonprogo	DPKP DIY
		1.03.13.5.02.10	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Dokumen	1	1	1	1	1	1,259,575,000	DAIS	Kab. Bantul	DPKP DIY
		1.03.13.5.02.11	Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-Sermo- Wates	Dokumen	1	1	1	1	1	1,446,625,000	DAIS	Kab. Kulonprogo	DPKP DIY
Kode dan Nama Program: 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN													
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3.27.02.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Dokumen	7	7	7	7	7	48,851,404,600	APBD	DIY	DPKP DIY
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.27.02.1.02.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Lembar sertifikat	250	250	250	250	250	726,000,000	APBD	DIY	DPKP DIY
		3.27.02.1.02.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Laporan	2	2	2	2	2	2,529,681,000	APBD	DIY	DPKP DIY
		3.27.02.1.02.03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Dokumen	2	2	2	2	2	5,393,379,500	APBD	DIY	DPKP DIY
		3.27.02.1.02.04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Laporan	2	2	2	2	2	170,972,000	APBD	DIY	DPKP DIY
3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	3.27.02.1.04.01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	1	62,327,747,240	APBD	DIY	DPKP DIY

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Program/Kegiatan/Rincian Output (1)				Satuan	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2023	2024	2025	2026	2027				
		3.27.02.1.04.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Laporan	1	1	1	1	1	20,211,450,072	APBD	DIY	DPKP DIY
Kode dan Nama Program: 3.27.03. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN													
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	1	1	1	1	1	1,320,000,000	APBD	DIY	DPKP DIY
		3.27.03.1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Dokumen	3	3	3	3	3	10,503,000,000	APBD	DIY	DPKP DIY
Kode dan Nama Program: 3.27.04. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER													
3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3.27.04.1.01.01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	laporan	1	1	1	1	1	1,941,600,000	APBD	DIY	DPKP DIY
3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	3.27.04.1.02.01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	laporan	1	1	1	1	1	280,540,000	APBD	DIY	DPKP DIY
		3.27.04.1.02.03	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	laporan	1	1	1	1	1	3,298,500,000	APBD	DIY	DPKP DIY
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	3.27.04.1.03.03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen	1	1	1	1	1	6,750,980,000	APBD	DIY	DPKP DIY
3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan	3.27.04.1.05.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Sertifikat	2	2	2	2	2	304,175,000	APBD	DIY	DPKP DIY
Kode dan Nama Program: 3.27.05. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN													
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	3.27.05.1.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Hektar	940	990	1090	1140	1240	6,982,800,000	APBD	DIY	DPKP DIY
Kode dan Nama Program: 3.27.07. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN													
3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.1.01.01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Orang	300	300	300	300	300	3,754,636,500	APBD	DIY	DPKP DIY
		3.27.07.1.01.02	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Orang	90	90	90	90	90	1,098,918,000	APBD	DIY	DPKP DIY
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.1.02.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	1	1	1	1	1	35,770,821,230	APBD	DIY	DPKP DIY
		3.27.07.1.02.02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Kelompok	58	58	58	58	58	1,165,772,000	APBD	DIY	DPKP DIY
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	3.27.07.1.03.02	Pendampingan Manajemen Koperasi Petani	Laporan	1	1	1	1	1	364,292,000	APBD	DIY	DPKP DIY
		3.27.07.1.03.04	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Unit	10	10	10	10	10	915,765,000	APBD	DIY	DPKP DIY
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:													
Kode dan Nama Program: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													
Kode Kegiatan: 1.02.02.1.02	Nama Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kode Sub Kegiatan: 1.02.02.1.02.06	Nama Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rupiah	3,625,060,000	3,650,000,000	3,700,000,000	3,725,000,000		14,700,060,000	APBD		Dinas Kesehatan DIY
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 2.3.1.(a). Peningkatan nilai subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam PDRB (ADHK)													

Program/Kegiatan/Rincian Output (1)				Satuan	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2023	2024	2025	2026	2027				
Kode dan Nama Program: 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP													
Kode Kegiatan: 3.25.03.1.01	Nama Kegiatan: Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Kode Sub Kegiatan: 3.25.03.1.01.03	Nama Sub Kegiatan: Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Unit	2	2	2	2	2	6,140,000,000	APBD	DIY	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY
Kode Kegiatan: 3.25.03.1.03	Nama Kegiatan: Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Kode Sub Kegiatan: 3.25.03.1.03.02	Nama Sub Kegiatan: Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Rekomendasi	10	10	10	10	10	500,000,000	APBD	DIY	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY
Kode dan Nama Program: 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA													
Kode Kegiatan: 3.25.04.1.06	Nama Kegiatan: Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Kode Sub Kegiatan: 3.25.04.1.06.02	Nama Sub Kegiatan: Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	60	60	60	60	60	21,904,696,000	APBD	DIY	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY
Kode Kegiatan: 3.25.04.1.06	Nama Kegiatan: Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Kode Sub Kegiatan: 3.25.04.1.06.01	Nama Sub Kegiatan: Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	7	7	7	7	7	17,080,000,000	APBD	DIY	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY
Kode Kegiatan: 3.25.04.1.01	Nama Kegiatan: Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kode Sub Kegiatan: 3.25.04.1.01.02	Nama Sub Kegiatan: Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Rekomendasi	12	12	12	12	12	2,483,305,760	APBD	DIY	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY
Kode dan Nama Program: 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN													
Kode Kegiatan: 3.25.06.1.03	Nama Kegiatan: Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kode Sub Kegiatan: 3.25.06.1.03.02	Nama Sub Kegiatan: Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Unit Usaha	10	10	10	10	10	3,127,572,600	APBD	DIY	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY
hidupan Sehat dan Sejahtera													
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 3.1.1 Angka Kematian Ibu (AKI)													
Kode dan Nama Program: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													
Kode Kegiatan: 1.02.02.1.02	Nama Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kode Sub Kegiatan: 1.02.02.1.02.17	Nama Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Rupiah	484,050,000	523,100,000	544,410,000	566,851,000		2,118,411,000	APBD		Dinas Kesehatan DIY
		Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan:										
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:													
Kode dan Nama Program: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													
Kode Kegiatan: 1.02.02.1.02	Nama Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kode Sub Kegiatan: 1.02.02.1.02.11	Nama Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Rupiah	1,549,710,000	1,704,681,000	1,720,000,000	1,800,000,000		6,774,391,000	APBD		Dinas Kesehatan DIY
		Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan:										
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 3.b.3 Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan.													
Kode dan Nama Program: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													

Program/Kegiatan/Rincian Output (1)				Satuan	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2023	2024	2025	2026	2027				
Kode Kegiatan: 1.02.02.1.01	Nama Kegiatan: Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kode Sub Kegiatan : 1.02.02.1.01	Nama Sub Kegiatan: Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rupiah	#####	82,642,288,750	#####	#####		804,772,834,851	APBD		Dinas Kesehatan DIY
		Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan:										
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 3.c.1 Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan													
Kode dan Nama Program: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													
Kode Kegiatan: 1.02.02.1.02	Nama Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kode Sub Kegiatan : 1.02.02.1.02.19	Nama Sub Kegiatan: Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Rupiah	487,280,000	557,280,000	561,900,000	566,520,000	0	2,172,980,000	APBD		Dinas Kesehatan DIY
		Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan:										
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 3.5.1.(a) : Jumlah penyalahgunaan napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis													
Kode dan Nama Program: 066.01.BL : Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)													
3260	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	3260.BAA.002	Layanan Rehabilitasi di BNNP dan BNNK/Kota	Orang	53	56	58	61	64	Rp993,863,115	APBN	DIY	BNNP DIY, BNNK Sleman, BNNK Yogyakarta, BNNK Bantul
		3260.BAA.003	Layanan IBM	Orang	153	161	169	177	122	Rp569,080,791	APBN	DIY	BNNP DIY, BNNK Sleman, BNNK Yogyakarta, BNNK Bantul
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 3.5.1.(b) : Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi													
Kode dan Nama Program: 066.01.BL : Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)													
3256	Pascarehabilitasi Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkoba	3256.FAE.001	Data dan Pelaporan Klien Rehabilitasi	Orang	0	0	0	0	0	Rp785,323,433	APBN	DIY	BNNP DIY, BNNK Sleman, BNNK Yogyakarta, BNNK Bantul
4 Pendidikan Berkualitas													
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:													
Kode dan Nama Program: PENDIDIKAN: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													
1.01.02.1	KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS	1.01.02.1.01.47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik										
			Penyelenggaraan Tes Penjurusan Hasil Belajar Siswa SMA	sekolah	169	169	169	169	169	#REF!	APBD	DIY	Disdikpora
			Pendampingan dan monitoring sekolah penggerak	sekolah	15	16	17	18	19	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Layanan Pembelajaran dan Pendampingan TIK dengan Mobile Learning Service	sekolah	40	40	40	40	40	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Talkshow Dan Podcast	sekolah	45	45	45	45	45	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Pengembangan Jogja Belajar (3 Aplikasi)	sekolah						-	APBD	DIY	Disdikpora
			Produksi Konten Media Pembelajaran Berbasis Video dan Audio	sekolah	85	85	85	85	85	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Bimtek Online pengembangan TIK, Bimtek pengembangan sekolah model, Bimtek Produksi Media Pembelajaran	sekolah	168	168	168	168	168	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Pertemuan Pembinaan 6 Komunitas	sekolah	120	120	120	120	120	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Penyusunan Panduan Bauran model pembelajaran	sekolah	100	100	100	100	100	-	APBD	DIY	Disdikpora
		1.01.02.1.01.48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas										
			Pengembangan Model Pembelajaran	sekolah	169	169	169	169	169	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Penyusunan Instrumen Penilaian	sekolah	169	169	169	169	169	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Forum Tim Pengembang Kurikulum	sekolah	169	169	169	169	169	-	APBD	DIY	Disdikpora

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Program/Kegiatan/Rincian Output (1)				Satuan	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2023	2024	2025	2026	2027				
			Pemetaan mutu sekolah jenjang dikmen	sekolah	169	169	169	169	169	-	APBD	DIY	Disdikpora
		1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa										
			Penyelenggaraan, pembinaan dan pengiriman Kompetisi Sains Nasional (KSN) 9 bidang	siswa	180	180	180	180	180	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Penyelenggaraan, pembinaan dan pengiriman Debat Bahasa	siswa	30	30	30	30	30	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Pembinaan Penelitian Siswa 3 bidang	siswa	120	120	120	120	120	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Pembinaan Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia 6 bidang	siswa	120	120	120	120	120	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Pendidikan Karakter dan wawasan kebangsaan	siswa	150	150	150	150	150	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Penyelenggaraan, pembinaan, pengiriman Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN) 10 bidang	siswa	75	75	75	75	75	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Penyelenggaraan, pembinaan, pengiriman Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) 5 bidang	siswa	80	80	80	80	80	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Anugerah prestasi di bidang dikpora	siswa	279	279	279	279	279	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Festival Kihajar dan Literasi TIK	siswa	320	320	320	320	320	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Penyelenggaraan, pembinaan dan pengiriman Kompetisi Sains Nasional (KSN) 9 bidang	siswa	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Penyelenggaraan, pembinaan, pengiriman Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) 5 bidang	siswa	280	280	280	280	280	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Penyelenggaraan, pembinaan, pengiriman Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN) 10 bidang	siswa	400	400	400	400	400	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Penyelenggaraan, pembinaan dan pengiriman Debat Bahasa	siswa	30	30	30	30	30	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Pendidikan Karakter Bagi Siswa	siswa	80	80	80	80	80	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara	siswa	80	80	80	80	80	-	APBD	DIY	Disdikpora
			01. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengiriman Kompetisi Sains Nasional (KSN) 9 bidang	siswa	900	900	900	900	900	-	APBD	DIY	Disdikpora
			02. Penyelenggaraan, pembinaan, pengiriman Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) 5 bidang	siswa	310	310	310	310	310	-	APBD	DIY	Disdikpora
			03. Penyelenggaraan, pembinaan, pengiriman Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN) 10 bidang	siswa	550	550	550	550	550	-	APBD	DIY	Disdikpora
			04. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengiriman Debat Bahasa	siswa	200	200	200	200	200	-	APBD	DIY	Disdikpora
			05. Pendidikan Karakter Bagi Siswa	siswa	86	86	86	86	86	-	APBD	DIY	Disdikpora
			6. Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara	siswa	86	86	86	86	86	-	APBD	DIY	Disdikpora
			01. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengiriman Kompetisi Sains Nasional (KSN) 9 bidang	siswa	350	350	350	350	350	-	APBD	DIY	Disdikpora

Program/Kegiatan/Rincian Output (1)				Satuan	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2023	2024	2025	2026	2027				
			02. Penyelenggaraan, pembinaan, pengiriman Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) 5 bidang	siswa	350	350	350	350	350		APBD	DIY	Disdikpora
			03. Penyelenggaraan, pembinaan, pengiriman Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN) 10 bidang	siswa	360	360	360	360	360		APBD	DIY	Disdikpora
			04. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengiriman Debat Bahasa	siswa	100	100	100	100	100		APBD	DIY	Disdikpora
			05. Pendidikan Karakter Bagi Siswa	siswa	48	48	48	48	48		APBD	DIY	Disdikpora
			6. Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara	siswa	100	100	100	100	100		APBD	DIY	Disdikpora
			01. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengiriman Kompetisi Sains Nasional (KSN) 9 bidang	siswa	340	340	340	340	340		APBD	DIY	Disdikpora
			02. Penyelenggaraan, pembinaan, pengiriman Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) 5 bidang	siswa	350	350	350	350	350		APBD	DIY	Disdikpora
			03. Penyelenggaraan, pembinaan, pengiriman Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN) 10 bidang	siswa	350	350	350	350	350		APBD	DIY	Disdikpora
			04. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengiriman Debat Bahasa	siswa	105	105	105	105	105		APBD	DIY	Disdikpora
			05. Pendidikan Karakter Bagi Siswa	siswa	216	216	216	216	216		APBD	DIY	Disdikpora
			6. Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara	siswa	216	216	216	216	216		APBD	DIY	Disdikpora
			01. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengiriman Kompetisi Sains Nasional (KSN) 9 bidang	siswa	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800		APBD	DIY	Disdikpora
			02. Penyelenggaraan, pembinaan, pengiriman Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) 5 bidang	siswa	500	500	500	500	500		APBD	DIY	Disdikpora
			03. Penyelenggaraan, pembinaan, pengiriman Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN) 10 bidang	siswa	400	400	400	400	400		APBD	DIY	Disdikpora
			04. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengiriman Debat Bahasa	siswa	120	120	120	120	120		APBD	DIY	Disdikpora
			05. Pendidikan Karakter Bagi Siswa	siswa	70	70	70	70	70		APBD	DIY	Disdikpora
			6. Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara	siswa	70	70	70	70	70		APBD	DIY	Disdikpora
		1.01.02.1.01.50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas										
			Bimtek Pemberkasan Tunjangan Profesi Guru (TPG) SMA	guru	304	304	304	304	304		APBD	DIY	Disdikpora
		1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas										
			Penilaian Angka Kredit	orang	5,030	5,030	5,030	5,030	5,030		APBD	DIY	Disdikpora

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Program/Kegiatan/Rincian Output (1)				Satuan	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2023	2024	2025	2026	2027				
			Peningkatan Kompetensi Calon Asesor Penilaian Kinerja Guru	orang	69	69	69	69	69	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Peningkatan Kompetensi Guru Dalam Penelitian Tindakan Kelas	orang	69	69	69	69	69	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Bimtek Penulisan Jurnal	orang	69	69	69	69	69	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Peningkatan Kompetensi PTK Dalam Penyusunan Best Practice	orang	69	69	69	69	69	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Penyediaan Biaya Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dikmensus Kerjasama dengan LPTK	orang	50	50	50	50	50	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Seleksi Pemilihan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Administrasi Berprestasi	orang	60	60	60	60	60	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi							-	APBD	DIY	Disdikpora
			Seleksi Pemilihan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Administrasi Berprestasi	orang	100	100	100	100	100	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi	orang	85	85	85	85	85	-	APBD	DIY	Disdikpora
			1. Seleksi Pemilihan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Administrasi Berprestasi							-			
			a. Kepala Sekolah berprestasi	orang	48	48	48	48	48	-	APBD	DIY	Disdikpora
			b. Pengawas berprestasi	orang	48	48	48	48	48	-	APBD	DIY	Disdikpora
			c. Tenaga Administrasi/ Kepala TU Berprestasi	orang	48	48	48	48	48	-	APBD	DIY	Disdikpora
			2. Pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi							-			
			a. Guru Berprestasi dan Berdedikasi	orang	48	48	48	48	48	-	APBD	DIY	Disdikpora
			b. Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi (Pustakawan Berprestasi, Laboran Berprestasi)	orang	48	48	48	48	48	-	APBD	DIY	Disdikpora
			1. Seleksi Pemilihan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Administrasi Berprestasi							-			
			a. Kepala Sekolah berprestasi	orang	72	72	72	72	72	-	APBD	DIY	Disdikpora
			b. Pengawas berprestasi	orang	15	15	15	15	15	-	APBD	DIY	Disdikpora
			c. Tenaga Administrasi/ Kepala TU Berprestasi	orang	24	24	24	24	24	-	APBD	DIY	Disdikpora
			2. Pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi							-			
			a. Guru Berprestasi dan Berdedikasi	orang	216	216	216	216	216	-	APBD	DIY	Disdikpora
			b. Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi (Pustakawan Berprestasi, Laboran Berprestasi)	orang	72	72	72	72	72	-	APBD	DIY	Disdikpora
			1. Seleksi Pemilihan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Administrasi Berprestasi	orang	60	60	60	60	60	-	APBD	DIY	Disdikpora
			a. Kepala Sekolah berprestasi							-	APBD	DIY	Disdikpora
			b. Pengawas berprestasi							-	APBD	DIY	Disdikpora

Program/Kegiatan/Rincian Output (1)				Satuan	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2023	2024	2025	2026	2027				
			c. Tenaga Administrasi/ Kepala TU Berprestasi							-	APBD	DIY	Disdikpora
			2. Pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi							-	APBD	DIY	Disdikpora
			a. Guru Berprestasi dan Berdedikasi							-	APBD	DIY	Disdikpora
			b. Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi (Pustakawan Berprestasi, Laboran Berprestasi)							-	APBD	DIY	Disdikpora
		1.01.02.1.01.52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas										
			Penguatan kelembagaan bidang pendidikan:										
			1. Penguatan Kelembagaan melalui Dewan Pendidikan							-	APBD	DIY	Disdikpora
			2. Penguatan Kelembagaan melalui GOPTK DIY							-	APBD	DIY	Disdikpora
			3. Penguatan Kelembagaan melalui LOTA DIY							-	APBD	DIY	Disdikpora
			4.Penguatan Kelembagaan melalui PGRI DIY							-	APBD	DIY	Disdikpora
			Penyelenggaraan dan pembinaan Sekolah Sehat										
			01. Pembinaan Manajemen Sekolah	sekolah	169	169	169	169	169	-	APBD	DIY	Disdikpora
			02. Koordinasi Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah	sekolah	169	169	169	169	169	-	APBD	DIY	Disdikpora
			03. Workshop penguatan Waka Kesiswaan	sekolah	50	50	50	50	50	-	APBD	DIY	Disdikpora
			04. Workshop implementasi pendidikan Pancasila, wawasan kebangsaan dan bela negara serta insersi budaya anti korupsi.	sekolah	25	25	25	25	25	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Pembinaan Waka Kesiswaan	sekolah	70	70	70	70	70	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Pembinaan Waka Kurikulum	sekolah	40	40	40	40	40	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Pembinaan Waka Sarpras	sekolah	40	40	40	40	40	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Penguatan Tenaga Administrasi Sekolah (Ka TU)	sekolah	40	40	40	40	40	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Penguatan Dapodik	sekolah	40	40	40	40	40	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Penguatan Manajerial Kepala Sekolah	sekolah	40	40	40	40	40	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Pemberdayaan MGMP	sekolah	95	95	95	95	95	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Pembinaan Sekolah Adiwiyata	sekolah	4	4	4	4	4	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Pembinaan Waka Kesiswaan	sekolah	38	38	38	38	38	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Pembinaan Waka Kurikulum	sekolah	38	38	38	38	38	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Pembinaan Waka Sarpras	sekolah	38	38	38	38	38	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Penguatan Tenaga Administrasi Sekolah (Ka TU)	sekolah	38	38	38	38	38	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Penguatan Dapodik	sekolah	38	38	38	38	38	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Penguatan Manajerial Kepala Sekolah	sekolah	38	38	38	38	38	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Pemberdayaan MGMP	sekolah	86	86	86	86	86	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Pembinaan Sekolah Adiwiyata	sekolah	10	10	10	10	10	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Pembinaan Waka Kesiswaan	sekolah	48	48	48	48	48	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Pembinaan Waka Kurikulum	sekolah	48	48	48	48	48	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Pembinaan Waka Sarpras	sekolah	48	48	48	48	48	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Penguatan Tenaga Administrasi Sekolah (Ka TU)	sekolah	48	48	48	48	48	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Penguatan Dapodik	sekolah	48	48	48	48	48	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Penguatan Manajerial Kepala Sekolah	sekolah	48	48	48	48	48	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Pemberdayaan MGMP	sekolah	48	48	48	48	48	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Pembinaan Sekolah Adiwiyata	sekolah	3	3	3	3	3	-	APBD	DIY	Disdikpora

Program/Kegiatan/Rincian Output (1)			Satuan	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
				2023	2024	2025	2026	2027					
			Pembinaan Waka Kesiswaan	sekolah	25	25	25	25	25	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Pembinaan Waka Kurikulum	sekolah	25	25	25	25	25	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Pembinaan Waka Sarpras	sekolah	25	25	25	25	25	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Penguatan Tenaga Administrasi Sekolah (Ka TU)	sekolah	25	25	25	25	25	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Penguatan Dapodik	sekolah	25	25	25	25	25	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Penguatan Manajerial Kepala Sekolah	sekolah	25	25	25	25	25	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Pemberdayaan MGMP	sekolah	30	30	30	30	30	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Pembinaan Sekolah Adiwiyata	sekolah	50	50	50	50	50	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Pembinaan Waka Kesiswaan	sekolah	52	52	52	52	52	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Pembinaan Waka Kurikulum	sekolah	52	52	52	52	52	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Pembinaan Waka Sarpras	sekolah	52	52	52	52	52	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Penguatan Tenaga Administrasi Sekolah (Ka TU)	sekolah	52	52	52	52	52	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Penguatan Dapodik	sekolah	52	52	52	52	52	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Penguatan Manajerial Kepala Sekolah	sekolah	52	52	52	52	52	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Pemberdayaan MGMP	sekolah	110	110	110	110	110	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Pembinaan Sekolah Adiwiyata	sekolah	10	10	10	10	10	-	APBD	DIY	Disdikpora
1.01.04.1.	KEGIATAN: PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.01.04.1.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan										
			Bimtek Pemetaan Data Kebutuhan Guru Dikmensus	dokumen	1	1	1	1	1	-	APBD	DIY	Disdikpora
1.01.02.1	KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	1.01.02.1.02.39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik										
			1. Diklat Peningkatan Kompetensi Peserta Didik SMK							-	APBD	DIY	Disdikpora
			2. Diklat Peningkatan Kompetensi Guru SMK/Instruktur							-	APBD	DIY	Disdikpora
			3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							-	APBD	DIY	Disdikpora
			4. Diklat Peningkatan Kompetensi Guru SLB							-	APBD	DIY	Disdikpora
			5. Diklat Peningkatan Kompetensi Siswa dan Guru Pendamping SLB							-	APBD	DIY	Disdikpora
			6. Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Bengkel Seksi Yandik							-	APBD	DIY	Disdikpora
			7. Up Skilling untuk Instruktur							-	APBD	DIY	Disdikpora
			8. Pengembangan LSP P2							-	APBD	DIY	Disdikpora
			9. Promosi dan Sosialisasi Kegiatan BLPT							-	APBD	DIY	Disdikpora
			10. Pengembangan Karya Inovasi Pembelajaran (1 Jenis Karya) Seksi Yandik							-	APBD	DIY	Disdikpora
			11. Pemetaan Kebutuhan Diklat SMK se-DIY Seksi Yandik							-	APBD	DIY	Disdikpora
			12. Penyeragaman Kurikulum Kediklatan BLPT dengan IDUKA							-	APBD	DIY	Disdikpora
			Produksi Konten Media Pembelajaran Augmented Reality (4 Judul)	sekolah	30	30	30	30	30	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Biaya Operasional SMK Negeri	sekolah	6	6	6	6	6	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Biaya Operasional SMK Negeri	sekolah	13	13	13	13	13	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Biaya Operasional SMK Negeri	sekolah	8	8	8	8	8	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Biaya Operasional SMK Negeri	sekolah	12	12	12	12	12	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Biaya Operasional SMK Negeri	sekolah	8	8	8	8	8	-	APBD	DIY	Disdikpora

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Program/Kegiatan/Rincian Output (1)				Satuan	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2023	2024	2025	2026	2027				
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	sekolah	1	1	1	1	1	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	sekolah	1	1	1	1	1	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	sekolah	1	1	1	1	1	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	sekolah	1	1	1	1	1	-	APBD	DIY	Disdikpora
		1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa										
			LKS (46 bidang)	siswa	760	760	760	760	760	-	APBD	DIY	Disdikpora
			FLS2N (1. Menyanyi Solo, 2.Gitar solo, 3.monolog,4. film pendek(dokumenter dan Fiksi) 2 orang grup 5.Tari Tradisional 5 orang , 6.Musik Tradisional,7. Pencipta lagu,8 Seni Lukis	siswa	65	65	65	65	65	-	APBD	DIY	Disdikpora
			KOSN (Atletik , karate,Pencak Silat, renang, bulutangkis, tenis meja	siswa	120	120	120	120	120	-	APBD	DIY	Disdikpora
			FIKSI (1.Kewirausahaan, Teknologi, Inovasi terdiri dari a. pertanian, b. kelautan, c. industri kreatif	siswa	115	115	115	115	115	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Penguatan karakter siswa	siswa	150	150	150	150	150	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Penguatan Karakter melalui FKPO (FORUM FKPO DIY)	siswa	100	100	100	100	100	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Kompetisi Olahraga Siswa Nasional-KOSN (6 cabor)	siswa	185	185	185	185	185	-	APBD	DIY	Disdikpora
			FLS2N (8 Bidang)	siswa	450	450	450	450	450	-	APBD	DIY	Disdikpora
			KOSN (6 cabor)	siswa	160	160	160	160	160	-	APBD	DIY	Disdikpora
			FLS2N (8 Bidang)	siswa	340	340	340	340	340	-	APBD	DIY	Disdikpora
			KOSN (6 cabor)	siswa	350	350	350	350	350	-	APBD	DIY	Disdikpora
			FLS2N (8 Bidang)	siswa	360	360	360	360	360	-	APBD	DIY	Disdikpora
			KOSN (6 cabor)	siswa	350	350	350	350	350	-	APBD	DIY	Disdikpora
			FLS2N (8 Bidang)	siswa	350	350	350	350	350	-	APBD	DIY	Disdikpora
			1. KOSN (6 cabor)	siswa	360	360	360	360	360	-	APBD	DIY	Disdikpora
			2.FLS2N (8 Bidang)	siswa	375	375	375	375	375	-	APBD	DIY	Disdikpora
			04. FKPO	siswa	40	40	40	40	40	-	APBD	DIY	Disdikpora
		1.01.02.1.02.42.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan										
			Bimtek Pemberkasan Tunjangan Profesi Guru (TPG) SMK	orang	264	264	264	264	264	-	APBD	DIY	Disdikpora
		1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan										
			Peningkatan Kompetensi Asesor Penilaian Kinerja Guru	orang	49	49	49	49	49	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Peningkatan Kompetensi Guru Dalam Penelitian Tindakan Kelas	orang	49	49	49	49	49	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Bimtek Penulisan Jurnal	orang	49	49	49	49	49	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Peningkatan Kompetensi Literasi dan Numerasi	orang	49	49	49	49	49	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Peningkatan Kompetensi Petugas Perpustakaan Sekolah	orang	49	49	49	49	49	-	APBD	DIY	Disdikpora

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Program/Kegiatan/Rincian Output (1)				Satuan	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2023	2024	2025	2026	2027				
		1.01.02.1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan										
			Sinkronisasi kurikulum dengan DUDI	sekolah	219	219	219	219	219	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Pembinaan Manajemen sekolah	sekolah	219	219	219	219	219	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Workshop BKK/PPKS	sekolah	219	219	219	219	219	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Pendampingan Prakerin Siswa	sekolah	75	75	75	75	75	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Diklat Basic Safety Training (BST)	sekolah	75	75	75	75	75	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Verifikasi Alat UKK	sekolah	30	30	30	30	30	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Pembinaan Waka Kurikulum	sekolah	30	30	30	30	30	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Pembinaan Waka Sarpras	sekolah	30	30	30	30	30	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Penguatan Tenaga Administrasi Sekolah (Ka TU)	sekolah	30	30	30	30	30	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Penguatan Dapodik	sekolah	30	30	30	30	30	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Penguatan Manajerial Kepala Sekolah	sekolah	30	30	30	30	30	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Verifikasi Alat UKK										
			Pembinaan Waka Kesiswaan	sekolah	48	48	48	48	48	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Pembinaan Waka Kurikulum	sekolah	48	48	48	48	48	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Pembinaan Waka Sarpras	sekolah	48	48	48	48	48	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Penguatan Tenaga Administrasi Sekolah (Ka TU)	sekolah	48	48	48	48	48	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Penguatan Dapodik	sekolah	48	48	48	48	48	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Penguatan Manajerial Kepala Sekolah	sekolah	48	48	48	48	48	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Verifikasi Alat UKK	sekolah	33	33	33	33	33	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Pembinaan Waka Kesiswaan	sekolah	48	48	48	48	48	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Pembinaan Waka Kurikulum	sekolah	48	48	48	48	48	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Pembinaan Waka Sarpras	sekolah	48	48	48	48	48	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Penguatan Tenaga Administrasi Sekolah (Ka TU)	sekolah	48	48	48	48	48	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Penguatan Dapodik	sekolah	48	48	48	48	48	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Penguatan Manajerial Kepala Sekolah	sekolah	48	48	48	48	48	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Verifikasi Alat UKK	sekolah	47	47	47	47	47	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Pembinaan Waka Kesiswaan	sekolah	47	47	47	47	47	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Pembinaan Waka Kurikulum	sekolah	47	47	47	47	47	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Pembinaan Waka Sarpras	sekolah	47	47	47	47	47	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Penguatan Tenaga Administrasi Sekolah (Ka TU)	sekolah	47	47	47	47	47	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Penguatan Dapodik	sekolah	47	47	47	47	47	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Penguatan Manajerial Kepala Sekolah	sekolah	47	47	47	47	47	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Verifikasi Alat UKK	sekolah	57	57	57	57	57	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Pembinaan Waka Kesiswaan	sekolah	57	57	57	57	57	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Pembinaan Waka Kurikulum	sekolah	57	57	57	57	57	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Pembinaan Waka Sarpras	sekolah	57	57	57	57	57	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Penguatan Tenaga Administrasi Sekolah (Ka TU)	sekolah	57	57	57	57	57	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Penguatan Dapodik	sekolah	57	57	57	57	57	-	APBD	DIY	Disdikpora
			Penguatan Manajerial Kepala Sekolah	sekolah	57	57	57	57	57	-	APBD	DIY	Disdikpora
an 5 Kesetaraan Gender													
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 5.6.1*Proporsi perempuan usia reproduksi yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan (seluruh wanita usia subur/WUS)													
Kode dan Nama Program: 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)													
Kode Kegiatan: 2.14.03.1.01	Nama Kegiatan: Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kode Sub Kegiatan: 2.14.03.1.01.04	Nama Sub Kegiatan: Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja	Dokumen	6	6	6	6	6	2,991,499,000	APBD	DIY	DP3AP2

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Program/Kegiatan/Rincian Output (1)				Satuan	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2023	2024	2025	2026	2027				
Kode Kegiatan: 2.14.03.1.02	Nama Kegiatan: Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kode Sub Kegiatan: 2.14.03.1.02.02	Nama Sub Kegiatan: Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi	5	5	5	5	5	1,755,216,250	APBD	DIY	DP3AP2
Air Bersih Dan Sanitasi Layak													
6.1.1* : Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.													
Kode dan Nama Program: PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM													
1.03.03.1.01.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	%	100					4,000	APBD	DIY	Dinas PUP ESDM DIY
		1.03.03.1.01.03	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	%		100	100			900	APBD	Gunungkidul	Dinas PUP ESDM DIY
		1.03.03.1.01.05	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	%		100	100	100		21,990	APBD	Kartamantul	Dinas PUP ESDM DIY
		1.03.03.1.01.09	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100		14,877	APBD	Kartamantul	Dinas PUP ESDM DIY
		1.03.03.1.01.10	Survei dan Investigasi untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100		2,900	APBD	Kartamantul	Dinas PUP ESDM DIY
1.03.03.1.01.11	Penyediaan Lahan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	%	100	100	0	100		19,600	APBD	Kartamantul	Dinas PUP ESDM DIY		
6.2.1. (b). Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak													
Kode dan Nama Program: PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH													
1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	1.03.05.1.01.04	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional	%	100	100	100	100		24,600	APBD	DIY	Dinas PUP ESDM DIY
6.2.1. (d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T													
Kode dan Nama Program: PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH													
1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	1.03.05.1.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	%	100	100	100	100		33,375	APBD	Kartamantul	Dinas PUP ESDM DIY
6.6.1.* : Genangan air													
Kode dan Nama Program: PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH													
1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	1.03.06.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	dokumen	1	1	1			1,200	APBD	DIY	Dinas PUP ESDM DIY
		1.03.06.1.01.05	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	unit	3	1	1	1		68,000	APBD	DIY	Dinas PUP ESDM DIY
		1.03.06.1.01.06	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	unit	2	1	4	4		1,900	APBD	DIY	Dinas PUP ESDM DIY
mbah cair industri yg dikelola secara aman													
2.11.0 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)													
2.11.0 6.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	2.11.0 6.1.01. 01	fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH	Rekomendasi/Peretujuan	20	20	20	20		1,478,000,000	APBD		DLHK
2.11.0 6.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	2.11.0 6.1.01. 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Laporan	30	30	30	30		372,000,000	APBD		DLHK
AN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAY A DAN BERACUN (LIMBAH B3)													
2.11.0 5.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.11.0 5.1.01. 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	jumlah Fasilitasi	100%	100%	100%	100%		362,207,500	APBD		DLHK
alitas air tanah sebagai air baku													
CEMAR AN DAN/ATAU KERUSAKA N LINGKUNGA N HIDUP													

Program/Kegiatan/Rincian Output (1)			Satuan	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2023	2024	2025	2026	2027				
2.11.0 3.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.0 3.1.01. 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Lau	umlah Dokum	4	4	4	4		1,461,202,000	APBD	DLHK
as air permukaan sebagai air baku												
PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP												
2.11.0 3.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.0 3.1.01. 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Lau	umlah Dokum	4	4	4	4		1,461,202,000	APBD	DLHK
u bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya												
PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP												
2.11.0 3.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.0 3.1.01. 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Lau	umlah Dokum	4	4	4	4		1,461,202,000	APBD	DLHK
h pengelolaan sumber daya air secara terpadu												
PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP												
2.11.0 3.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.0 3.1.01. 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Lau	umlah Dokum	4	4	4	4		1,461,202,000	APBD	DLHK
ndeks kualitas tutupan lahan												
3.28.0 3 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN												
3.28.0 3.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.0 3.1.04. 04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan	30	30	30	30		2,180,100,000	APBD	DLHK
3.28.0 3.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.0 3.1.04. 02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan (Ha)	200	200	200	250		2,172,210,000	APBD	DLHK
3.28.0 4 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEM NYA												
3.28.0 4.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	3.28.0 4.1.03. 06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah	10	10	10	10		1867000000	APBD	DLHK
Indeks kualitas air sungai												
PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP												
2.11.0 3.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.0 3.1.01. 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Lau	umlah Dokum	4	4	4	4		1,461,202,000	APBD	DLHK
PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP												
2.11.0 3.1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (permukaan dan tanah)	2.11.0 3.1.02. 03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	h Sumber Per	50	50	50	50		1,420,521,850		DLHK
PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP												
2.11.0 3.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.0 3.1.01. 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Lau	umlah Dokum	4	4	4	4		1,461,202,000	APBD	DLHK
PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP												
2.11.0 3.1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.0 3.1.02. 03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	h Sumber Per	50	50	50	50		1,420,521,850	APBD	DLHK
energi Bersih dan Terjangkau												
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN												
7.1.1*: Rasio elektrifikasi												
Kode dan Nama Program: PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN												
3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	3.29.06.1.06.06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	SR	99.99	99.99	99.99	99.99		7,490	APBD	DIY Dinas PUP ESDM DIY

Program/Kegiatan/Rincian Output (1)				Satuan	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2023	2024	2025	2026	2027				
TUJUAN 8 : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA													
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 8.5.2. Tingkat Pengangguran Terbuka													
Kode dan Nama Program: 2.07.03 . PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA													
Kode Kegiatan: 2.07.03.1.01	Nama Kegiatan: Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Kode Sub Kegiatan : 2.07.03.1.01.01	Nama Sub Kegiatan: Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Rupiah	13,370,847,250	12,450,000,000	13,690,000,000	15,059,000,000	#####	71,134,747,250	APBD	DIY	Disnakertrans DIY
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal													
Kode dan Nama Program:Program Pemasaran Pariwisata													
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	2	10	24	24	24	6,966,000,000	APBD		Dinas Pariwisata
			Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	1	3	5	7	9	2,820,000,000	APBD		Dinas Pariwisata
			Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Laporan	N/A	4	6	8	10	7000000000**	APBD		Dinas Pariwisata
			Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	1	4	6	6	6	4,680,749,600	APBD		Dinas Pariwisata
ta dan Permukiman Berkelanjutan													
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN													
11.1.1.(a): Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.													
Kode dan Nama Program: PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN													
1.04.03.1.02.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.04.03.1.02.03	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	%	58,27	62,75	67,24	71,73		285,400	APBD	DIY	Dinas PUP ESDM DIY
Tujuan 14. Ekosistem Lautan													
Kode dan Nama Program: 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG													
Kode Kegiatan: 1.03.13.5.02	Nama Kegiatan: Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Kode Sub Kegiatan:1.03.13.5.02.02	Nama Sub Kegiatan: Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Dokumen	1	1	1	1	1	2,100,000,000	APBD	DIY	Kajian RPZWP3K dan matek
Kode dan Nama Program: 3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL													
Kode Kegiatan: 3.25.02.1.01	Nama Kegiatan: Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Kode Sub Kegiatan:3.25.02.1.01.02	Nama Sub Kegiatan: Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Ha	3248	3248	3248	3,581.43	3,581.43	1,954,648,700	APBD	DIY	sosialisasi swot, pelatihan penggiat konservasi.
Kode Kegiatan: 3.25.02.1.01	Nama Kegiatan: Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Kode Sub Kegiatan:3.25.02.1.01.04	Nama Sub Kegiatan: Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Orang	3248	3248	3248	3,581.43	3,581.43	317,595,200	APBD	DIY	Sosis mitigasi bencana
Kode Kegiatan: 3.25.02.1.02	Nama Kegiatan:Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Kode Sub Kegiatan:3.25.02.1.02.03	Nama Sub Kegiatan: Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	Rekomendasi	1	1	1	1.00	1.00	317,595,200	APBD	DIY	Rekomendasi penerbitan KKPRL
Kode dan Nama Program: 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN													
Kode Kegiatan: 3.25.05.1.01	Nama Kegiatan: Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Kode Sub Kegiatan: 3.25.05.1.01.02	Nama Sub Kegiatan: Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Dokumen	3	3	3	3.00	3.00	654,181,100	APBD	DIY	Wasdu di Laut
Kode Kegiatan: 3.25.05.1.01	Nama Kegiatan: Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Kode Sub Kegiatan: 3.25.05.1.01.04	Nama Sub Kegiatan: Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Kelompok	33	33	33	33.00	33.00	455,000,000	APBD	DIY	Penumbuhan pokmaswas, bimtek pokmaswas, forum pokmaswas

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Program/Kegiatan/Rincian Output (1)				Satuan	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2023	2024	2025	2026	2027				
Kode Kegiatan: 3.25.05.1.02	Nama Kegiatan: Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kode Sub Kegiatan: 3.25.05.1.02.01	Nama Sub Kegiatan: Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Dokumen	20	20	20	20	20	405,000,000	APBD	DIY	Pengawasan PUD
Kode Kegiatan: 3.25.05.1.02	Nama Kegiatan: Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kode Sub Kegiatan: 3.25.05.1.02.03	Nama Sub Kegiatan: Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen	20	20	20	20	20	405,000,000	APBD	DIY	Pengawasan di pasar dan lokasi pengolahan perikanan
Tujuan 16. Pembangunan Hukum dan Tata Kelola													
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 16.10.2.(a) Jumlah Badan Publik yang berkualitas informatif													
Kode dan Nama Program: 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK													
Kode Kegiatan: 2.16.02	Nama Kegiatan: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Kode Sub Kegiatan: 2.16.02.1.01.11		Badan Publik	90	92	95	98	100	6950	APBD	DIY	Dinas Komunikasi dan Informatika

**Matriks 3: Rencana Program/Kegiatan Nonpemerintah (Organisasi Kemasyarakatan/ CSO/Organisasi Pemuda, Filantropi, Akademia)
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian					Alokasi Indikasi Anggaran	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
		2023	2024	2025	2026	2027				
Nama Pemangku Kepentingan: AIESEC										
Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas										
Indikator 4.3.1 tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin										
Nama Program: Jumlah remaja dan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan dan pelatihan non-formal										
Nama Kegiatan: Jumlah remaja dan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan	orang							AIESEC Donatur	DIY	AIESEC
Nama Kegiatan: Jumlah remaja dan pemuda yang berpartisipasi dalam pelatihan non-formal	orang							AIESEC Donatur	DIY	
Tujuan 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab										
Indikator 12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.										
Nama Program : pemuda yang mengikuti kegiatan relawan global										
Nama Kegiatan : Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan relawan global	orang							AIESEC Donatur	DIY	AIESEC
Nama Pemangku Kepentingan : CIQAL										
Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi										
Indikator 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama										
Nama Program : Memperkuat pemahaman tentang ketenagakerjaan inklusif pada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan swasta di seluruh sektor.										
Nama Kegiatan : Menyusun modul pelatihan sensitivitas disabilitas yang digunakan sebagai standar pemberian edukasi oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan swasta di seluruh sektor.	Tersusunnya modul pelatihan sensitivitas disabilitas yang digunakan sebagai standar pemberian edukasi Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan swasta di seluruh sektor.							CIQAL, sumber lainnya dan APBD	DIY	Dinas TK, instansi terkait dan CIQAL

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian					Alokasi Indikasi Anggaran	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
		2023	2024	2025	2026	2027				
Nama Kegiatan : Mengintegrasikan materi pelatihan sensitivitas disabilitas pada pemberian edukasi oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan swasta di seluruh sektor	a. Tersedianya pelatihan sensitivitas disabilitas bagi Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan swasta di seluruh sektor. b. Tersedianya sumber daya manusia di seluruh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan swasta di seluruh sektor yang responsif terhadap Penyandang Disabilitas.							CIQAL, sumber lainnya dan APBD	DIY	Dinas TK, instansi terkait dan CIQAL
Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi										
Indikator 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama										
Nama Program : Memperluas akses lapangan kerja bagi Penyandang Disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.										
Nama Kegiatan : Tersusun panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas bagi sektor publik dan swasta.	Tersedianya panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas di sektor publik dan swasta, mencakup antara lain proses pemagangan, perekrutan, penempatan, pelatihan, dan pengembangan karir.							CIQAL, sumber lainnya dan APBD	DIY	Dinas TK, instansi terkait dan CIQAL
Nama kegiatan : Memastikan penyediaan akomodasi yang layak bagi pekerja penyandang disabilitas.	Tersedianya standar penyediaan akomodasi yang layak bagi pekerja Penyandang Disabilitas.							CIQAL, sumber lainnya dan APBD	DIY	Dinas TK, instansi terkait dan CIQAL

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian					Alokasi Indikasi Anggaran	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2023	2024	2025	2026	2027				
Nama kegiatan : Meningkatkan jumlah Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang melaksanakan panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas.	a. Tersedianya Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang mengimplementasi kan panduan ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas. b. Tercapainya peningkatan Badan Usaha Milik Daerah yang mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. c. Tercapainya peningkatan jumlah perusahaan swasta yang mempekerjakan							CIQAL, sumber lainnya dan APBD	DIY	Dinas TK, instansi terkait dan CIQAL	
Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi											
Indikator 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama											
Nama Program : Memperluas kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas											
Nama kegiatan : Meningkatkan kapasitas Penyandang Disabilitas dalam berusaha.	a. Tersedianya pelatihan dan pemberdayaan keterampilan dan pengelolaan usaha bagi Penyandang Disabilitas di sektor informal. b. Tersedianya permodalan usaha yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.							CIQAL, sumber lainnya dan APBD	DIY	Dinas TK, instansi terkait dan CIQAL	
Nama Kegiatan : Memasukkan Penyandang Disabilitas sebagai kriteria untuk mendapatkan diskresi dalam skema Kredit Usaha Rakyat atau mekanisme kredit sejenis untuk permodalan usaha	Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan akses untuk Kredit Usaha Rakyat atau mekanisme kredit sejenis untuk permodalan usaha.							CIQAL, sumber lainnya dan APBD	DIY	Dinas TK, instansi terkait dan CIQAL	

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian					Alokasi Indikasi Anggaran	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
		2023	2024	2025	2026	2027				
Nama Kegiatan : Memastikan Pelindungan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang mengalami disabilitas akibat kecelakaan kerja.	Tercapainya peningkatan jumlah sosialisasi bagi pekerja peserta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan terkait dengan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi pekerja Penyandang Disabilitas akibat kecelakaan kerja. Tersedianya layanan pengaduan bagi peserta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang mengalami kecelakaan kerja hingga menjadi Penyandang							CIQAL, sumber lainnya dan APBD	DIY	Dinas TK, instansi terkait dan CIQAL
Nama Kegiatan : Mendorong partisipasi perusahaan untuk mendukung Penyandang Disabilitas.	Terlaksananya sosialisasi dan advokasi bagi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta terkait penggunaan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/TJSL (Corporate Sosial Responsibilita/ CSE bagi Penyandang Disabilitas. 2. Tercapainya peningkatan jumlah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang melaksanakan							CIQAL, sumber lainnya dan APBD	DIY	Dinas TK, instansi terkait dan CIQAL
Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi										
Indikator 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama										
Nama Program : Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pedoman dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas.										

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian					Alokasi Indikasi Anggaran	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
		2023	2024	2025	2026	2027				
Nama kegiatan : Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pedoman dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas.	tersedianya laporan tahunan yang mencakup jumlah kementerian/lembaga, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang dipantau terkait kesesuaian pelaksanaan pedoman dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas							CIQAL, sumber lainnya dan APBD	DIY	Dinas TK, instansi terkait dan CIQAL
Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi										
Indikator 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama										
Nama Program : Meningkatkan jejaring untuk perluasan kesempatan kerja yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas										
Nama kegiatan : Menyelenggarakan pelatihan literasi keuangan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas.	Tersedianya kurikulum dan modul pelatihan literasi keuangan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas. 2. Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelatihan literasi keuangan. 3. Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas yang memiliki rekening keuangan.							CIQAL, sumber lainnya dan APBD	DIY	Dinas TK, instansi terkait dan CIQAL

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian					Alokasi Indikasi Anggaran	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2023	2024	2025	2026	2027				
Nama kegiatan : Meningkatkan penyediaan layanan dan fasilitas keuangan inklusif yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.	Tersedianya standar operasional tentang penyediaan layanan keuangan inklusif yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. 2. Tercapainya peningkatan jumlah lembaga keuangan yang inklusif yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.								CIQAL, sumber lainnya dan APBD	DIY	Dinas TK, instansi terkait dan CIQAL
Tujuan : 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur											
Indikator Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada											
Nama Program : Program Peningkatan Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Trotoar, Fasilitas Umum yang ramah untuk semua warganya termasuk di dalamnya Penyandang Disabilitas											
Nama kegiatan : Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan, Trotoar, Fasum lainnya (aksesibel untuk semua)	Pemeliharaan jalan Trotoar, Fasum aksesibel lainnya, kabupaten	ruas							CIQAL, sumber lainnya dan APBD	DIY	Dinas TK, instansi terkait dan CIQAL
	Jumlah Trotoar, Fasum aksesibel lainnya tertangani	unit							CIQAL, sumber lainnya dan APBD	DIY	Dinas TK, instansi terkait dan CIQAL
Nama kegiatan : Kegiatan Peningkatan jalan Trotoar, Fasum lainnya(aksesibel untuk semua)	Peningkatan jalan kabupaten	ruas							CIQAL, sumber lainnya dan APBD	DIY	Dinas TK, instansi terkait dan CIQAL
Nama kegiatan : Kegiatan Peningkatan Jalan Trotoar, Fasum lainnya (aksesibel untuk semua)	Peningkatan jalan (Ramp, guiding blok, toilet akseibel, rambu-rambu, penyeberangan kabupaten	ruas							CIQAL, sumber lainnya dan APBD	DIY	Dinas TK, instansi terkait dan CIQAL
	Peningkatan ruang-ruang outdoor yang inklusif kabupaten	unit							CIQAL, sumber lainnya dan APBD	DIY	
Indikator : 9.2 Program pembangunan Gedung-gedung Pemerintah yang ramah terhadap komunitas penyandang disabilitas											
Nama Program : Program pembangunan Gedung-gedung Pemerintah yang ramah terhadap komunitas penyandang disabilitas											
Nama Kegiatan : Kegiatan pembangunan/Rehabilitas gedung-gedung publik baik milik Pemerintah/ swasta yang inklusif	cakupan penanganan pembangunan/rehabilitasi gedung-gedung publik milik Pemerintah/swasta di Kabupaten berdasar pembangunan yang inklusif								CIQAL, sumber lainnya dan APBD	DIY	Dinas TK, instansi terkait dan CIQAL

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian					Alokasi Indikasi Anggaran	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2023	2024	2025	2026	2027				
Nama kegiatan : Kegiatan Rehabilitasi/ pemeliharaan, pembangunan gedung-gedung publik milik Pemerintah/swasta (aksesibel untuk semua)		Pemeliharaan gedung-gedung publik milik Pemerintah/swasta yang inklusif kabupaten							CIQAL, sumber lainnya dan APBD	DIY	Dinas TK, instansi terkait dan CIQAL
Nama Kegiatan :Kegiatan Peningkatan gedung-gedung publik milik Pemerintah/swasta(aksesibel untuk semua)		Peningkatan gedung-gedung publik milik Pemerintah/swasta yang inklusif kabupaten							CIQAL, sumber lainnya dan APBD	DIY	Dinas TK, instansi terkait dan CIQAL
Nama Pemangku Kepentingan : PKBI											
Tujuan : 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan											
Indikator : 17.19.2 (b) Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)											
Nama Program: Pendampingan dan Sosialisasi pada mitra strategis											
Nama Kegiatan : Mobile Clinic untuk pemeriksaan IVA									PKBI	Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo	PKBI DIY, PKBI Cabang Kota Yogyakarta, PKBI Cabang Sleman, PKBI Cabang Bantul, PKBI Cabang Gunungkidul dan PKBI Cabang Kulon Progo
Nama Kegiatan : Pendampingan LPKA									PKBI	Kabupaten Gunungkidul	PKBI Cabang Gunungkidul
Nama Kegiatan : Pendampingan mitra strategis di kalurahan-kalurahan dampingan oleh PKBI Cabang Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul, Gunungkidul dan Kulon progo									PKBI	Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo	PKBI DIY, PKBI Cabang Kota Yogyakarta, PKBI Cabang Sleman, PKBI Cabang Bantul, PKBI Cabang Gunungkidul dan PKBI Cabang Kulon Progo
Nama Kegiatan : Pendampingan mitra strategis di sekolah-sekolahan dampingan oleh PKBI Cabang Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul, Gunungkidul dan Kulon progo									PKBI	Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo	PKBI DIY, PKBI Cabang Kota Yogyakarta, PKBI Cabang Sleman, PKBI Cabang Bantul, PKBI Cabang Gunungkidul dan PKBI Cabang Kulon Progo
Nama Kegiatan : Pendampingan mitra strategis komunitas-komunitas yang dimarginalkan oleh PKBI Cabang Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul, Gunungkidul dan Kulon progo									PKBI	Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo	PKBI DIY, PKBI Cabang Kota Yogyakarta, PKBI Cabang Sleman, PKBI Cabang Bantul, PKBI Cabang Gunungkidul dan PKBI Cabang Kulon Progo
Nama Kegiatan : Pembuatan profil usaha untuk komunitas									PKBI		
Tujuan : 3 Kehidupan sehat dan sejahtera											
Indikator : 3.7.1 Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern											
Program : Kesehatan Seksual dan Reproduksi											
Nama Kegiatan : Produksi informasi terkait hak kesehatan seksual dan reproduksi (podcast, film pendek, flayer, poster)									PKBI	Daerah Istimewa Yogyakarta	PKBI DIY
Nama Kegiatan : Kampanye mengenai hak kesehatan seksual dan reproduksi via daring dan luring									PKBI	Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo	PKBI DIY, PKBI Cabang Kota Yogyakarta, PKBI Cabang Sleman, PKBI Cabang Bantul, PKBI Cabang Gunungkidul dan PKBI Cabang Kulon Progo

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian					Alokasi Indikasi Anggaran	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
		2023	2024	2025	2026	2027				
Nama Kegiatan : Pengembangan aplikasi kesehatan seksual dan reproduksi							PKBI	Daerah Istimewa Yogyakarta	PKBI DIY	
Nama Kegiatan : Program penanganan TBC							PKBI	Daerah Istimewa Yogyakarta	PKBI DIY	
Nama Kegiatan : Diskusi publik tentang update situasi kesehatan reproduksi dan kekerasan berbasis gender di DIY							PKBI	Daerah Istimewa Yogyakarta	PKBI DIY	
Tujuan 5 Pendidikan Bermutu										
Indikator : 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.										
Program : Pemberian layanan konseling untuk remaja										
Nama Kegiatan : Pemberian layanan konseling untuk remaja							PKBI	Daerah Istimewa Yogyakarta	PKBI DIY	
Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kuda										
Indikator 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.										
Program :										
Nama Kegiatan : Workshop Sistem Informasi Desa							PKBI	Kabupaten Sleman dan Bantul	PKB DIY, PKBI Sleman dan PKBI Bantul	
Nama Kegiatan : Workshop security system di tingkat daerah							PKBI	Daerah Istimewa Yogyakarta	PKBI DIY	
Nama Kegiatan : Diskusi publik terkait situasi Yogyakarta: Klitih							PKBI	Daerah Istimewa Yogyakarta	PKBI DIY	
Tujuan 3 Kesehatan yang Baik dan Sejahtera										
Indikator : 3.b.1 Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional										
Nama Program: VACCINE (Vast and Accountable Vaccine for Marginalised Communities)										
Nama Kegiatan : Identifikasi CSO dan CBO yang terlibat dalam penyampaian informasi covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi covid-19							PKBI	Kulon Progo dan Gunungkidul	PKBI DIY	
Nama Kegiatan : Training kepada CSO dan CBO yang terlibat dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19 yang sensitif GEDSI							PKBI	Daerah Istimewa Yogyakarta	PKBI DIY	
Nama Kegiatan : Workshop pengembangan kerangka kerja Adaptif Sensitif GEDSI untuk peluncuran vaksinasi							PKBI	Daerah Istimewa Yogyakarta	PKBI DIY	
Nama Kegiatan : Diseminasi pelaksanaan vaksinasi yang sensitif GEDSI							PKBI	Kulon Progo dan Gunungkidul	PKBI DIY	
Nama Kegiatan : Pelaksanaan vaksinasi yang sensitif GEDSI dengan cara door to door, membuka sentra vaksin dan melakukan gebyar vaksin							PKBI	Kulon Progo dan Gunungkidul	PKBI DIY	
Nama Kegiatan : Mendorong anak dan remaja menjadi Vaccine Champion (mengajak anggota keluarga dan masyarakat sekitar untuk vaksinasi)							PKBI	Kulon Progo dan Gunungkidul	PKBI DIY	
Nama Program: TRACE (Tackling Rumours Against COVID-19 through Community Engagement)										
Nama Kegiatan : Formative Assesment untuk mengetahui kondisi masyarakat mengenai vaksin, covid-19 dan hoax yang beredar							PKBI	Kulon Progo dan Gunungkidul	PKBI DIY	
Nama Kegiatan : Penanganan informasi terkait rumor dan hoax tentang covid-19 di daerah Kulon Progo dan Gunungkidul							PKBI	Kulon Progo dan Gunungkidul	PKBI DIY	
Nama Kegiatan : Produksi materi kampanye covid-19 dan vaksinasi yang sensitif GEDSI							PKBI	Kulon Progo dan Gunungkidul	PKBI DIY	
Nama Pemangku Kepentingan : UNIVERSITAS WIDYA MATARAM										
Tujuan : 2 Tanpa Kelaparan										
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang										
Nama Program : Zero Hunger										

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian					Alokasi Indikasi Anggaran	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2023	2024	2025	2026	2027					
Kegiatan 1 : Jejaring Ketahanan Pangan berbasis Pedesaan	- pemetaan lumbung pangan yang terbarukan - pemetaan kondisi pertanian pangan yang terbarukan - membangun jejaring lumbung pangan antardesa di DIY (distribusi dan produksi)	Peta jalan ketahanan pangan berbasis pedesaan	75 %	100 %	100 %	100 %	100 %			DIY	UNIVERSITAS WIDYA MATARAM
Kegiatan 2 : Jejaring Kedaulatan Pangan berbasis Pedesaan	- pemetaan potensi pangan lokal yang terbarukan - pemetaan kondisi pertanian pangan lokal yang terbarukan - membangun jejaring kedaulatan pangan antardesa di DIY (distribusi dan produksi)	Peta jalan kedaulatan pangan berbasis pedesaan	75 %	100 %	100 %	100 %	100 %			DIY	UNIVERSITAS WIDYA MATARAM
Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan											
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 1.2.1 Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional											
Nama Program : Kehidupan Sehat dan Sejahtera											
Kegiatan 1 : Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera di PTN/S	- pemetaan keluarga sejahtera di DIY (riset dan aksi) - pelayanan konsultasi mewujudkan keluarga sejahtera oleh PTN/S di DIY	Peta jalan keluarga sejahtera DIY	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			DIY	UNIVERSITAS WIDYA MATARAM
Tujuan 2 Tanpa Kelaparan											
Indikator 2.2.1 Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek)											
Kegiatan 2 : Pusat Studi Penanganan Stunting Dengan Melibatkan PTS/N	- pemetaan kasus stunting di DIY yang terbarukan (riset dan aksi) - pelayanan konsultasi penanganan kasus stunting oleh PTN/S di DIY (riset dan aksi)	Peta jalan penanganan kasus stunting di DIY	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			DIY	UNIVERSITAS WIDYA MATARAM
Tujuan 6 Akses Air Bersih dan sanitasi											
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 6.2.1 Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.											
Nama Program : Air Bersih dan Sanitasi Layak											

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian					Alokasi Indikasi Anggaran	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2023	2024	2025	2026	2027					
Kegiatan 1 : Gerakan Hemat Air Bersih	- pemetaan kondisi sumber air bersih di wilayah DIY yang terbarukan (riset dan aksi) - kampanye penggunaan sumberdaya air bersih secara tepat dan bijaksana	Peta jalan ketahanan pangan berbasis pedesaan	75 %	100 %	100 %	100 %	100 %			DIY	UNIVERSITAS WIDYA MATARAM
Kegiatan 2 : Sanitasi Limbah Rumah Tangga Perkotaan berbasis komunal	- pemetaan dan riset kondisi air tanah di wilayah DIY yang terbarukan - pemetaan kondisi sanitasi limbah rumah tangga di wilayah DIY yang terbarukan - pengelolaan sanitasi limbah rumah tangga perkotaan berbasis komunal di DIY	Peta jalan air tanah bersih dan sehat	75 %	100 %	100 %	100 %	100 %			DIY	UNIVERSITAS WIDYA MATARAM
Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau											
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 7.1 Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua											
Nama Program : Energi Bersih dan Terjangkau											
Kegiatan 1 : Gerakan Hemat Energi	- pemetaan konsumsi energi di wilayah DIY yang terbarukan (riset dan aksi) - kampanye hemat energi	Peta jalan ketahanan energi berbasis rumah tangga	75 %	100 %	100 %	100 %	100 %				UNIVERSITAS WIDYA MATARAM
Kegiatan 2 : Revitalisasi PLT Angin di Pantai Baru dan tempat lainnya	- pemetaan potensi pangan lokal yang terbarukan	Peta jalan ketahanan energi berbasis rumah tangga	50%	100 %	100 %	100 %	100 %				UNIVERSITAS WIDYA MATARAM

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian					Alokasi Indikasi Anggaran	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
		2023	2024	2025	2026	2027				
Kegiatan 3 : Pengembangan PLTS dan Kincir Energi Pantai Selatan DIY	'- pemetaan potensi energi yang terbarukan di wilayah DIY (riset dan aksi) - pemanfaatan lanskap/bentang alam wilayah Pesisir Selatan DIY untuk memanen energi terbarukan (riset dan aksi)	Peta jalan Ketahanan Energi berbasis potensi dan bentang alam	75 %	100 %	100 %	100 %	100 %			UNIVERSITAS WIDYA MATARAM
Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi										
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama										
Nama Program : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi										
Kegiatan 1 : Pusat Konsultasi dan Inkubasi Ekonomi Kreatif di PTN/S berbasis Pedesaan	'- pemetaan potensi ekonomi lokal/desa dalam skema ekonomi-industri kreatif yang terbarukan (riset dan aksi) - belajar bersama pengelolaan potensi ekonomi lokal/desa dalam skema ekonomi-industri kreatif yang terbarukan (riset dan aksi) di wilayah DIY. - membangun jejaring ekonomi antardesa di DIY. (produksi dan distribusi)	Peta jalan Pengembangan Ekonomi Kreatif berbasis potensi desa	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			UNIVERSITAS WIDYA MATARAM
Tujuan 11 Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan										
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 11.6.1 (a) Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampah										
Nama Program : Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan										
Kegiatan 1 : Cerdas Memilah Sampah	'- pemetaan pemilahan sampah rumah tangga yang terbarukan. (riset dan aksi) - membangun jejaring bank sampah di wilayah DIY	Peta jalan pengelolaan sampah berbasis rumah tangga	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			UNIVERSITAS WIDYA MATARAM

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian					Alokasi Indikasi Anggaran	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
		2023	2024	2025	2026	2027				
Kegiatan 2 : Cerdas Mengolah Sampah	- pemetaan pengolahan sampah rumah tangga yang terbarukan (riset dan aksi) - membangun jejaring pengolahan sampah rumah tangga di wilayah DIY	Peta jalan pengelolaan sampah berbasis rumah tangga	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			UNIVERSITAS WIDYA MATARAM
Kegiatan 3 : Pengelolaan Sampah Berbasis Pedukuhan, berawal dari warga berhenti di pedukuhan	- pemetaan pemilahan dan pengolahan sampah rumah tangga yang terbarukan berbasis pedukuhan. (riset dan aksi) - membangun jejaring pengolahan sampah rumah tangga antarpedukuhan di wilayah DIY. (rantai produksi dan distribusi)	Peta jalan pengelolaan sampah berbasis pedukuhan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			
Tujuan 13 Penangan Perubahan Iklim										
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 13.2.2.(a) Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)										
Nama Program : Penanganan Perubahan Iklim										
Kegiatan 1 : Gerakan Tanam Air	- pemetaan lubang air bersih, daerah tangkapan dan resapan air yang terbarukan di wilayah DIY. (riset dan aksi) - Tanam pohon panen air bersih. (riset dan aksi) - membangun jejaring lubang air antardesa di DIY. (riset dan aksi)	Peta jalan penangan perubahan iklim berbasis pedesaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			UNIVERSITAS WIDYA MATARAM
Kegiatan 2 : Gerakan Gunakan Transportasi Massal/umum		Peta jalan penangan perubahan iklim berbasis perkotaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			UNIVERSITAS WIDYA MATARAM

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian					Alokasi Indikasi Anggaran	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2023	2024	2025	2026	2027					
Kegiatan 3 : Transportasi Perkotaan Ramah Lingkungan	'- revitalisasi program Segawe - kampanye wisata pedestrian di berbagai wilayah perkotaan DIY - penyediaan sarana-prasarana transportasi perkotaan raman lingkungan.	Peta jalan penangan perubahan iklim berbasis perkotaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				UNIVERSITAS WIDYA MATARAM
Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh											
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.											
Nama Program : Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang TangguhPerdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh											
Kegiatan 1 : Supporter Sepakbola Senyum Simpatik	'- kampanye simpatik Yogyakarta tanpa konvoi kendaraan bermotor. - aruh warga oleh supporter olahraga. - Gerakan supporter Indonesia taat hukum.	Peta jalan untuk perdamaian, kemanusiaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				UNIVERSITAS WIDYA MATARAM
Kegiatan 2 : Jambore Supporter Sepakbola Indonesia	'- forum dialog antarsupporter olahraga se-Indonesia di DIY. - membangun jejaring supporter olahraga se-Indonesia yang bermartabat, saling menghormati, saling mengingatkan.	Peta jalan untuk perdamaian, kemanusiaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				UNIVERSITAS WIDYA MATARAM

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian					Alokasi Indikasi Anggaran	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2023	2024	2025	2026	2027					
Kegiatan 3 : Pekan Budaya Masuk Kampus Pekan Budaya Masuk Kampus	'- akses panggung kreativitas bagi pelaku seni segala usia. - workshop-pelatihan - panggung seni lintas agama-keyakinan - lomba kethoprak anak se-DIY - panggung seni-budaya mahasiswa se-DIY - bazaar-pameran produk seni-budaya - special perform : seni tradisi Yogyakarta dan Indonesia.	Peta jalan untuk perdamaian, kemanusiaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				UNIVERSITAS WIDYA MATARAM
Kegiatan 4 : Integrasi Sosial Pelajar/Mahasiswa Diaspora di wilayah DIY	'- panggung kreativitas dan seni-budaya pelajar-mahasiswa diaspora di DIY. - forum diskusi-dialog pelajar-mahasiswa diaspora di DIY.	Peta jalan untuk perdamaian, kemanusiaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				UNIVERSITAS WIDYA MATARAM
Nama Pemangku Kepentingan: Yayasan Hijau GPL											
TUJUAN TPB/SDGs Tujuan 2: Tanpa Kelaparan											
Indikator TPB/SDGs : 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi,											
Nama Program: 2.1.2 Jumlah Desa Rawan Pangan											
Nama Kegiatan: Pendampingan kelompok petani muda untuk kemandirian dan kedaulatan dalam praktik budidaya pertanian padi organik/peternakan ramah lingkungan		dusun/desa	1	1					swadaya	DIY	Yayasan Hijau GPL, Sekolah Pagesangan, Raptor Club Indonesia, Lingkar Organik, dll
Nama Kegiatan: Pendampingan kelompok petani muda untuk kemandirian dan kedaulatan dalam pengembangan olahan hasil tani		dusun/desa	1	1							
Indikator TPB/SDGs : 2.3 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktik pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat											
Nama Program : 2.3.1.(a) Nilai tambah pertanian/tenaga kerja pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan)											
Nama Kegiatan: Pendampingan pengembangan produk kreatif dari olahan hasil tani		Rp. juta/ tenaga kerja	1	1					swadaya	DIY	Yayasan Hijau GPL, Poktan Umbi Lokal Mekarsari Kulonprogo, Sekolah Pagesangan, Slow Food Jogja, Bakudapan Yogyakarta, dll
Indikator TPB/SDGs : 2.5 Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianeka-ragamkan											
Nama Program : 2.5.1 Jumlah sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, jangka menengah atau jangka panjang											
Nama Kegiatan: Galeri arsip pengetahuan budaya pangan lokal & sumber daya genetik tanaman		Jumlah Akses SDG tanaman	1	1					swadaya	DIY	Yayasan Hijau GPL, Lingkar Organik, Sekolah Pagesangan, Bakudapan Yogyakarta, dll
TUJUAN TPB/SDGs TUJUAN 6: Air Bersih Dan Sanitasi Layak											

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian					Alokasi Indikasi Anggaran	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
		2023	2024	2025	2026	2027				
Indikator TPB/SDGs : 6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.										
Nama Program: 6.6.1 Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu										
Nama Kegiatan: Pendampingan perlindungan kawasan ekosistem air berbasis masyarakat dan pengetahuan budaya lokal		1	1	1	1			swadaya	DIY	Yayasan Hijau GPL, Walhi Yogyakarta, Indonesian Dragonfly Society, Komunitas Resan Gunungkidul, dll
TUJUAN TPB/SDGs TUJUAN 9: Industri, Inovasi dan Infrastruktur										
Indikator TPB/SDGs : 9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial										
Nama Program: Meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelajaran publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.										
Nama Kegiatan: Simposium & Festival Merengkuh Tepi Bangsa			1					swadaya, sponsorship	DIY	Yayasan Hijau GPL & Laboratorium Antropologi FIB-UGM
TUJUAN TPB/SDGs TUJUAN 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan										
Indikator TPB/SDGs : 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.										
Nama Program: 11.4.1.(a) Konservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP)										
Nama Kegiatan: Pendampingan pengembangan preservasi warisan budaya dan alam, sebagai basis inspirasi dalam pengembangan produk kreatif oleh generasi milenial yang berada dalam kawasan warisan budaya dan alam tersebut.		1	1					swadaya	DIY, & sekitar DIY.	Yayasan Hijau GPL, komunitas Kita Muda Kreatif Yogyakarta, dll
Indikator TPB/SDGs : 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.										
Nama Program : 11.6.1.(a) Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampah										
Nama Kegiatan: Kampanye pendampingan pengembangan pengelolaan sampah berbasis rumah tangga		1	1					swadaya	DIY	Yayasan Hijau GPL, Sumbu Pakarti, Lingkar Organik, dll
Indikator TPB/SDGs : 11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya,										
Nama Program: 11.b.2 Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana										
Nama Kegiatan: Pengembangan strategi penanggulangan bencana yang berbasis pengetahuan budaya lokal		1	1					swadaya, sponsorship	DIY	Yayasan Hijau GPL, Forum PRB DIY, PSMB UPN, Pujiono Center, Karina Kas, dll
TUJUAN TPB/SDGs TUJUAN 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab										
Indikator TPB/SDGs : 12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.										
Nama Program: 12.8.1. (a) Jumlah satuan pendidikan formal dan Lembaga / komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup										
Nama Kegiatan: Pengembangan kampanye dan pendidikan lingkungan tentang pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam, berbasis sekolah dasar.		1	1					swadaya, sponsorship	DIY	Yayasan Hijau GPL, Yayasan Hijau GPL, Sumbu Pakarti, Lingkar Organik, Indonesian Dragonfly Society, dll
Indikator TPB/SDGs : 12.a Mendukung negara-negara berkembang untuk memperkuat kapasitas ilmiah dan teknologi mereka untuk bergerak ke arah pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan.										
Nama Program : Mengembangkan kapasitas ilmiah dan pengetahuan teknologi untuk bergerak ke arah pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan.										
Nama Kegiatan: Riset inovasi dalam pengembangan pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan.		1	1					swadaya	DIY	Yayasan Hijau GPL & Laboratorium Antropologi FIB-UGM, Lingkar Organik, Walhi Yogyakarta, dll
Indikator TPB/SDGs : 12.b Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk										
Nama Program: Mengembangkan kapasitas ilmiah dan pengetahuan teknologi untuk bergerak ke arah pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan										
Nama Kegiatan: Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan infrastruktur industri pariwisata berkelanjutan, yang tetap mengusung misi menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.		1	1					swadaya	DIY	Yayasan Hijau GPL, Greenmap, Combine, Jogja Heritage Society, komunitas Kandang Kebo, dll
TUJUAN TPB/SDGs TUJUAN 13: Penanganan Perubahan Iklim										
Indikator TPB/SDGs : 13.3 Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim										
Nama Program: 13.3.1.(a) Jumlah satuan pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup										

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian					Alokasi Indikasi Anggaran	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
		2023	2024	2025	2026	2027				
Nama Kegiatan: Pengembangan kampanye dan pendidikan lingkungan tentang mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim, berbasis sekolah dasar.	Jumlah satuan pendidikan dan desa/kelurahan	1	1					swadaya, sponsorship	DIY	Yayasan Hijau GPL, Yayasan BISA Indonesia, Walhi Yogyakarta, Sumbu Pakarti, Lingkar Organik, dll
Nama Program: 13.3.1.(a) Terlaksananya pembinaan kelompok masyarakat (Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup)										
Nama Kegiatan: Pengembangan kampanye dan pendidikan lingkungan tentang mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim, berbasis komunitas.	Jumlah satuan pendidikan dan desa/kelurahan	1	1					swadaya, sponsorship	DIY	Yayasan Hijau GPL, Yayasan BISA Indonesia, Walhi Yogyakarta, Sumbu Pakarti, Lingkar Organik, dll
TUJUAN TPB/SDGs TUJUAN 15: Ekosistem Daratan										
Indikator TPB/SDGs : 15.c Meningkatkan dukungan global dalam upaya memerangi perburuan dan perdagangan jenis yang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal mengejar peluang mata pencaharian yang										
Nama Program: Perlindungan jenis berbasis kawasan masyarakat lokal, dan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal mengejar peluang mata pencaharian yang berkelanjutan.										
Nama Kegiatan: Perlindungan satwa liar berbasis masyarakat		1	1					swadaya, sponsorship	DIY, & sekitar DIY.	Yayasan Hijau GPL, Yayasan Kutilang, Suaka Elang, Walhi Yogyakarta, Yayasan BISA Indonesia, COP Yogyakarta, WRC Yogyakarta, Raptor Club Indonesia, Animalika Society, dll
Nama Pemangku Kepentingan: Lazismu										
TUJUAN TPB/SDGs Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan										
Indikator TPB/SDGs Indikator 1.1: Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar amerika per hari.										
Nama Program: Pemberdayaan UMKM										
Nama kegiatan : Pemberdayaan UMKM	terbentuknya kelompok UMKM untuk diberdayakan	600	800						DIY	Lazismu
Nama Program : Tani Bangkit										
Nama kegiatan : Tani Bangkit	terbentuknya kelompok tani untuk diberdayakan	30	40						DIY	Lazismu
Nama Program : Masyarakat Ternak Mandiri										
Nama kegiatan : Masyarakat Ternak Mandiri	terbentuknya kelompok tani dalam klaster unggas & Perikanan	30	40						DIY	Lazismu
Indikator 1.2.1.5 Partisipasi sekolah: Persentase anak usia sekolah 7-18 tahun yang tidak/belum bersekolah, terjadi deprivasi jika ada anak usia sekolah 7 18 tahun yang tidak/belum bersekolah										
Nama Proram : Beasiswa Mentari										
Nama Kegiatan : Beasiswa Mentari	Terbantunya siswa ditingkat pendidikan dasar dan menengah dari kalangan keluarga kurang mampu								DIY	Lazismu
Indikator 1.4.1.2. Persentase penduduk dengan akses pada layanan sanitasi										
Nama Program : Bedah Rumah										
Nama kegiatan : Bedah Rumah	Terbangunya Rumah layak huni bagi penerima	15	20						DIY	Lazismu
Nama Program : Sanitasi untuk masyarakat										
Nama kegiatan : Sanitas untu masyarakat	Terbangunnya sarana Sanitasi	15	20						DIY	Lazismu
Indikator 1.5.4 Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencana										
Nama Program : Siaga Bencana										

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian					Alokasi Indikasi Anggaran	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2023	2024	2025	2026	2027				
Nama Kegiatan : Siaga Bencana	Terbantunya Korban Bencana									DIY	Lazismu
Nama Program : Gudang Kemanusiaan											
Nama Kegiatan : Gudang Kemanusiaan	Terbentuk Gudang Kemanusiaan untuk siaga									DIY	Lazismu
Tujuan SDGs 2 : Tanpa Kelaparan											
Indikator 2.1.2 Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan Skala Pengalaman Kerawanan Pangan (FIES)											
Nama Program : Qurban Ketahanan Pangan & Kemanusiaan											
Nama kegiatan : Qurban Ketahanan Pangan & Kemanusiaan	Terdapat persediaan daging Qurban dalam Kemasan		14000	16000						DIY	Lazismu
Nama Program : Pencegahan Stunting											
Nama kegiatan : Pencegahan Stunting	Terdistribusi bantuan nutrisi untuk ibu dan anak		300	400						DIY	Lazismu
Tujuan SDGs 4 : Pendidikan Berkualitas											
Indikator 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan											
Nama program : Beasiswa Mentari											
Nama Kegiatan : Beasiswa Mentari	Terbantunya siswa ditingkat pendidikan dasar dan menengah dari kalangan keluarga kurang mampu		1500	2000						DIY	Lazismu
Nama Program : Beasiswa Sangsurya											
Nama Kegiatan : Beasiswa Sangsurya	terbantunya siswa ditingkat pendidikan tinggi dari kalangan keluarga kurang mampu		300	400						DIY	Lazismu
Indikator 4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan											
Nama Program : Save Our School											
Nama kegiatan : Save Our School	terbantunya sekolah-sekolah untuk memiliki insfratraktur yang layak		30	40						DIY	Lazismu
Tujuan SDGs 12 : Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab											
Indikator 12.8.1.(a) Jumlah satuan pendidikan formal dan Lembaga / komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup											
Nama Program : Peduli Lingkungan											
Nama kegiatan : Peduli Lingkungan	Terlaksananya kegiatan berbentuk peduli lingkungan baik		15	20						DIY	Lazismu
Program Pemangku Kepentingan : Aisiyiah											
Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera											
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs											
Nama Program 1 : Program Kesehatan Masyarakat											

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian					Alokasi Indikasi Anggaran	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2023	2024	2025	2026	2027					
Nama Kegiatan : Pembinaan Gizi Masyarakat dan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) yang mendapat makanan tambahan jumlahnya menurun		Sinergi dengan dinas kesehatan dan puskesmas untuk mendapatkan data dan pengajuan program pemberian makanan tambahan (PMT) di	Edukasi kolaborasi dengan tenaga kesehatan dan toma di wilayah kasus prioritas	Data ulang monitoring progress capaian penurunan bumil KEK	Meningkatkan sinergisitas ormas, LSM dan pemerintah untuk pencapaian penurunan KEK bumil	Gerakan masive untuk meningkatkan sinergisitas ormas, LSM dan pemerintah untuk pemncapaian penurunan KEK bumil	Kegiatan program kajian data, edukasi, sinergisitas bersama LSM dan ormas	Swadaya masyarakat dan subsidi pemerintah	4 Kabupaten 1 kota DIY	LSM, ORMAS, PKK, Toma dan kader serta dasawisma
Tujuan : 2 Tanpa Kelaparan											
Indikator : 2.2.1 Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita											
Nama Program : Program Kesehatan Masyarakat											
Nama Kegiatan : Pembinaan Gizi Masyarakat dan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Menurunnya angka stunting dan kurus pada anak		Sporting gizi seimbang untuk Anak balita mendapat Suplementasi Gizi Mikro meningkat melalui swadaya masyarakat di yandu, dan dasawisma	Data ulang monitoring progress capaian tujuanpenurunan anak dan balita kurus dan stunting	Data ulang monitoring progress capaian tujuanpenurunan anak dan balita kurus dan stunting	Meningkatkan sinergisitas ormas, LSM dan pemerintah anak dan balita kurus dan stunting	Gerakan masive untuk meningkatkan sinergisitas ormas, LSM dan pemerintah untuk pencapaian anak dan balita kurus dan stunting	Kegiatan program kajian data, edukasi, sinergisitas bersama LSM dan ormas	Swadaya masyarakat dan subsidi pemerintah	4 Kabupaten 1 kota DIY	LSM, ORMAS, PKK, Toma dan kader serta dasawisma
Indikator : 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah lima tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi Program Ibu hamil dan balita yang diberikan pendidikan gizi melalui pemberian makanan tambahan lokal											
Nama Kegiatan : Ibu hamil dan balita yang diberikan pendidikan gizi melalui pemberian makanan tambahan lokal	Edukasi dan motivasi nilai gizi dan konsumsi makanan tambahan lokal dalam pemenuhan gizi seimbang		Program inovatif Aneka ragam makanan lokal gizi tinggi	Pekan UMKM griya menu inovatif makanan lokal dan memasivikan kenal dankonsumsi makanan lokal	Pekan UMKM griya menu inovatif makanan lokal dan memasivikan kenal dankonsumsi makanan lokal	Pekan UMKM griya menu inovatif makanan lokal dan memasivikan kenal dankonsumsi makanan lokal	Kegiatan program kajian data, edukasi, sinergisitas bersama LSM dan ormas		Swadaya masyarakat dan subsidi pemerintah	4 Kabupaten 1 kota DIY	LSM, ORMAS, PKK, Toma dan kader serta dasawisma
Tujuan 3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera											
Indikator : 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan											
Nama Program : Penyehatan Lingkungan											
Penyehatan Lingkungan		Tercipta Lingkungan asri, sehat dan nyaman (3)	Memasivikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan edukasi	Memasivikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan edukasi	Kegiatan lomba kebersihan dan keasrian lingkungan secara berkala	Kegiatan lomba kebersihan dan keasrian lingkungan secara berkala	Memasivikan budaya gotongroyong cipta lingkungan sehat dan asri	Memasivikan budaya gotongroyong cipta lingkungan sehat dan asri	Swadaya masyarakat dan subsidi pemerintah	4 Kabupaten 1 kota DIY	LSM, ORMAS, PKK, Toma dan kader serta dasawisma
Tujuan 5 : Kesetaraan Gender											

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian					Alokasi Indikasi Anggaran	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana	
		2023	2024	2025	2026	2027					
Indikator 5.6.1 (1) Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan (seluruh wanita usia subur/WUS)											
Nama Program : Pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana											
Nama Kegiatan : Pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana		Tersedianya PIK Remaja yang mendapatkan fasilitas dan pembinaan edukasi kespro dan gizi bagi remaja putri sebagai calon ibu serta menurunnya pernikahan dini dan kehamilan yang tidak diinginkan (KTD)	Edukasi melalui PIK KR tentang kespro, gizi, pernikahan dini, bimbingan konseling cegah KTD	Edukasi melalui PIK KR tentang kespro, gizi, pernikahan dini, bimbingan konseling cegah KTD	Edukasi melalui PIK KR tentang kespro, gizi, pernikahan dini, bimbingan konseling cegah KTD	Edukasi melalui PIK KR tentang kespro, gizi, pernikahan dini, bimbingan konseling cegah KTD	Edukasi melalui PIK KR tentang kespro, gizi, pernikahan dini, bimbingan konseling cegah KTD	Edukasi melalui PIK KR tentang kespro, gizi, pernikahan dini, bimbingan konseling cegah KTD	Swadaya masyarakat dan subsidi pemerintah	4 Kabupaten 1 kota DIY	LSM, ORMAS OSIS, PIK-KR SEKOLAH, PUSKESMAS, KUA dan PKBI
Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas											
Indikator : 4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua											
Nama Program : Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini, anak berkebutuhan khusus											
Nama Kegiatan : Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini, anak berkebutuhan khusus		Tersedianya generasi berkualitas di masa depan	Sinergisitas dengan PAUD untuk penyediaan UKS yang baik dan ramah difabel	Edukasi pelaksana PAUD kurikulum yang ramah anak dan sesuai kebutuhan khusus	Edukasi pelaksana PAUD kurikulum yang ramah anak dan sesuai kebutuhan khusus	Edukasi pelaksana PAUD kurikulum yang ramah anak dan sesuai kebutuhan khusus	Edukasi pelaksana PAUD kurikulum yang ramah anak dan sesuai kebutuhan khusus	Edukasi pelaksana PAUD kurikulum yang ramah anak dan sesuai kebutuhan khusus	Swadaya masyarakat dan subsidi pemerintah	4 Kabupaten 1 kota DIY	LSM, ORMAS OSIS, PIK-KR SEKOLAH, PUSKESMAS, KUA dan PKBI
Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan											
Indikator 1.3.1 Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok anak berkebutuhan khusus, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban											
Nama Program : DAY CARE DAN GRIYA LANSIA											
Nama Kegiatan : DAY CARE DAN GRIYA LANSIA serta care giver bagi lansia		Terpenuhinya kebutuhan dan kualitas hidup lansia yang bahagia	Program kesehatan secara holistik sebagai upaya pencapaian hidup lansia yang sehat dan bahagia	Program pelatihan care giver lansia	Program daycare/griya layak sebagai upaya cinta lansia	Edukasi pada keluarga dan masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan secara holistik	Edukasi pada keluarga dan masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan secara holistik	Edukasi kepada keluarga dan masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan secara holistik	Swadaya masyarakat dan subsidi pemerintah	4 Kabupaten 1 kota DIY	LSM, ORMAS, tokoh masyarakat, puskesmas dan yandu
Tujuan 5 Kesenjangan Gender											
Indikator 5.6.1 (1) Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan (seluruh wanita usia subur/WUS)											
Nama Program : Pembinaan Keluarga											

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian					Alokasi Indikasi Anggaran	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
		2023	2024	2025	2026	2027				
Nama Kegiatan :Pembinaan Keluarga Sakinah	Terciptanya keluarga sakinah	Memasivkan program keluarga sakinah sebagai upaya mencegah disharmonisasi keluarga, anak bermasalah dan melanggar hukum	Memasivkan keluarga sakinah sebagai upaya mencegah disharmonisasi keluarga, anak bermasalah dan melanggar hukum	Memasivkan keluarga sakinah sebagai upaya mencegah disharmonisasi keluarga, anak bermasalah dan melanggar hukum	Memasivkan keluarga sakinah sebagai upaya mencegah disharmonisasi keluarga, anak bermasalah dan melanggar hukum	Memasivkan keluarga sakinah sebagai upaya mencegah disharmonisasi keluarga, anak bermasalah dan melanggar hukum	Memasivkan keluarga sakinah sebagai upaya mencegah disharmonisasi keluarga, anak bermasalah dan melanggar hukum	Swadaya masyarakat dan subsidi pemerintah	4 Kabupaten 1 kota DIY	ORMAS, TOMA,KUA
Program Pemangku Kepentingan : Nu Care										
Tujuan : 4 Pendidikan Bermutu										
Indikator : 4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua										
Nama Program :Pendidikan										
Nama Kegiatan : 1. Renovasi bangunan sekolah/ pesantren	1. 10 titik 2. 20 titik						Rp 2.500.000.000			Internal: 1. LP Ma'arif 2. LPTNU 3. JQH 4. LDNU 5. Nahnu TV
Nama Kegiatan : 2. Bantuan sarana-prasarana/alat Pendidikan	3. 500 orang 4. 30 PONPES									
Nama kegiatan : 3. Santunan/ beasiswa bagi murid/ santri yang membutuhkan	5. 25 anak 6. 25 pelajar									
Tujuan : 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi										
Indikator : 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja										
Nama Program :Ekonomi										
Nama Kegiatan : 1. Pengorganisasian masyarakat pedagang untuk mendapatkan akses permodalan	1. 5 Warung 2. 50 Orang 3. 20 orang								DIY	Internal: 1. LPNU 2. LP Maarif 3. LPTNU 4. LAZISNU se-DIY
Nama Kegiatan : 2. Peningkatan kapasitas/keahlian di bidang ekonomi (akses pasar, online-stores, dll)	4. 20 orang 5. 20 orang 6. 5 kali									Eksternal: 1. CSR Perusahaan
Nama Kegiatan : 3. Bantuan tunai bagi masyarakat mustahiq yang membutuhkan	7. 5 kali									
Tujuan : 3 Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan										
Indikator : 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses										
Nama Program :Kesehatan										
Nama Kegiatan ; 1. Pendataan masyarakat miskin/ lansia untuk mendapatkan akses Kesehatan/ BPJS	1. 50 orang 2. 5 kali 3. 5 kali						2.500.000.000		DIY	Internal: 1. LKNU 2. LTMNU 3. LAZISNU se-DIY
Nama Kegiatan : 2. Bekerjasama dengan instansi pemerintah/non-pemerintah dalam program-program Kesehatan (penyuluhan bidang Kesehatan, stunting, dan isu-isu yang lain)	4. 5 kali 5. 5 kali 6. 60 anak 7. 60 orang 8. 60 kali									Eksternal: 1. Dinas Kesehatan 2. PMI 3. Puskkesmas 4. KEMENAG
Nama Kegiatan : Bantuan tunai bagi masyarakat mustahiq yang membutuhkan	9. 5 kali									
Tujuan : 13 Penanganan Perubahan Iklim										
Indikator : 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara										
Nama Program :Bidang Kemanusiaan										
Nama Kegiatan : 1. Bekerjasama dengan instansi pemerintah/ non pemerintah terkait aksi tanggap darurat kebencanaan	1. 5 kali 2. 5 kali 3. 5 kali						2.500.000.000		DIY	Internal: 1. LKNU 2. LAZISNU se-DIY 3. LPBPINU
Nama Kegiatan : 2. Memberikan edukasi/ penyadaran masyarakat terhadap aksi tanggap darurat (sesuai dengan peta wilayah masyarakat, i.e: gempa, banjir. Longsor, dll)										Eksternal: 1. BPBD 2. PMI

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian					Alokasi Indikasi Anggaran	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
		2023	2024	2025	2026	2027				
Nama Kegiatan 3. Memberikan bantuan langsung bagi masyarakat korban bencana alam										3. Dinas Kesehatan 4. CSR Perusahaan 5. BUMN
Tujuan : 1 Tanpa Kemiskinan										
Indikator : 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan										
Nama Program :Kampung Nusantara										
Nama kegiatan : Bekerjasama dengan berbagai stakeholder pada 15 titik kemiskinan di D.I. Yogyakarta untuk memberikan solusi bersama menuju masyarakat yang sejahtera, cerdas, sehat, mandiri, solutif serta berakhlak mulia.							37.500.000.000		DIY	Internal: 1. Lembaga dan Banom NU Eksternal: 1. Organisasi Masyarakat 2. LSM 3. Pemerintah Daerah 4. CSR Perusahaan 5. BUMN 6. Perguruan Tinggi
Program Pemangku Kepentingan : Universitas Adma Jaya										
Tujuan : 10 Berkurangnya Kesenjangan										
Indikator : 10.1. Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.										
Nama Program :Pengabdian KKN										
Nama Kegiatan : Pengabdian KKN									Jawa dan Luar Jawa	Universitas Adma Jaya
Nama Pemangku Kepentingan: Perguruan Tinggi – Univ. Respati Yogyakarta										
Tujuan : 3 Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan										
Indikator : 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan										
Nama Program: Penelitian dan pengabdian masyarakat yang mendukung Program GERMAS										
Nama Kegiatan: Publikasi hasil penelitian yang mendukung Program GERMAS	Buah	46	56	65					DIY	Univ. Respati Yogyakarta
Nama Kegiatan: Pembinaan Desa yang mendukung Program GERMAS.	Desa	16	20	25					DIY	Univ. Respati Yogyakarta
Nama Kegiatan: Pengabdian masyarakat yang dilaksanakan untuk mendukung Program GERMAS.	Buah	24	28	32					DIY	Univ. Respati Yogyakarta
Nama Pemangku Kepentingan: Perguruan Tinggi – Univ Aisyiah Yogyakarta										
Tujuan : 3 Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan										
Indikator : 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan										
Nama Program: Penelitian dan pengabdian masyarakat yang mendukung Program GERMAS										
Nama Kegiatan: Publikasi hasil penelitian yang mendukung Program GERMAS	Buah	74	76	78					DIY	Univ Aisyiah Yogyakarta
Nama Kegiatan: Pembinaan Desa yang mendukung Program GERMAS.	Desa	6	8	10					DIY	Univ Aisyiah Yogyakarta
Nama Kegiatan: Pengabdian masyarakat yang dilaksanakan untuk mendukung Program GERMAS.	Buah	60	65	70					DIY	Univ Aisyiah Yogyakarta
Nama Pemangku Kepentingan: Perguruan Tinggi – Univ Adma Jaya Yogyakarta										
Tujuan : 3 Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan										
Indikator : 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan										
Nama Program: Penelitian dan pengabdian masyarakat yang mendukung Program GERMAS										
Nama Kegiatan: Publikasi hasil penelitian yang mendukung Program GERMAS	Buah	134	145	160					DIY	Univ Alma Ata Yogyakarta
Nama Kegiatan: Pembinaan Desa yang mendukung Program GERMAS.	Desa	10	10	10					DIY	Univ Alma Ata Yogyakarta
Nama Kegiatan: Pengabdian masyarakat yang dilaksanakan untuk mendukung Program GERMAS.	Buah	65	70	75					DIY	Univ Alma Ata Yogyakarta
Nama Pemangku Kepentingan: Perguruan Tinggi – Poltekkes Kemenkes Yogyakarta										
Tujuan : Tujuan : 3 Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan										

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian					Alokasi Indikasi Anggaran	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
		2023	2024	2025	2026	2027				
Indikator : 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan										
Nama Program: Penelitian dan pengabdian masyarakat yang mendukung Program GERMAS										
Nama Kegiatan: Publikasi hasil penelitian yang mendukung Program GERMAS	Buah	22	22	22				DIY	Perguruan Tinggi – Poltekkes Kemenkes Yogyakarta	
Nama Kegiatan: Pembinaan Desa yang mendukung Program GERMAS.	Desa	9	10	11				DIY	Perguruan Tinggi – Poltekkes Kemenkes Yogyakarta	
Nama Kegiatan: Pengabdian masyarakat yang dilaksanakan untuk mendukung Program GERMAS.	Buah	18	20	22				DIY	Perguruan Tinggi – Poltekkes Kemenkes Yogyakarta	
Nama Pemangku Kepentingan: Yayasan Kanker Indonesia Cabang Yogyakarta										
Tujuan : 3 Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan										
Indikator : 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan										
Nama Program: Pemberdayaan Masyarakat Edukasi ke Masyarakat kerjasama dengan TPPKK dengan topik Perilaku Hidup Sehat Mencegah Kanker										
Nama Kegiatan: Pemberdayaan yang dilaksanakan untuk mendukung GERMAS	Kegiatan	6	6	6				DIY	Yayasan Kanker Indonesia Cabang Yogyakarta	
Nama Pemangku Kepentingan: TP PKK DIY										
Tujuan : 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera										
Indikator : 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program										
Nama Program: Pelaksanaan Kesatuan Gerak PKK-Bangga Kencana-Kesehatan										
Nama Kegiatan: Pelaksanaan kegiatan oleh Kab/Kota Kesrak PKK Bangga Kencana Kesehatan	Kab/Kota	5	5	5				DIY	TP PKK DIY	
Nama Program: Pelaksanaan Lomba Kesrak PKK-Bangga Kencana-Kesehatan										
Nama Kegiatan: Lomba Kesrak PKK-Bangga Kencana-Kesehatan yang diikuti oleh Kal/Kel, Kec, Kab/Kota	Kal/Kel, Kec, Kab/Kota	5/5/5	5/5/5	5/5/5				DIY	TP PKK DIY	
Tujuan : 6 Air Bersih Dan Sanitasi Layak										
Indikator : 6.2.1* c. Persentase rumah tangga yang masih melakukan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka										
Nama Program: Pelaksanaan Lomba PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) di Rumah Tangga										
Nama Kegiatan: Lomba PHBS (Indikator: Input, Proses, Output) yang diikuti Kal/Kel	Kal/Kel, Kec, Kab/Kota	5	5	5				DIY	TP PKK DIY	
Nama Program: Pencegahan Stunting										
Nama Kegiatan: Pembinaan pencegahan stunting pada beberapa lokus	Lokasi	3	3	3				DIY	TP PKK DIY	
Nama Program: Pelaksanaan Gerakan Keluarga Sehat Tanggap										
Nama Kegiatan: Pembinaan gerakan keluarga sehat tanggap	Lokasi	5	5	5				DIY	TP PKK DIY	
Nama Program: Pelaksanaan Lomba PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) di Rumah Tangga										
Nama Kegiatan: Lomba PHBS (Indikator Output nomor 9: Rumah Tangga yang melakukan aktifitas fisik) yang diikuti oleh Kal/Kel	Kal/Kel, Kec, Kab/Kota							DIY	TP PKK DIY	
Nama Program: Pelaksanaan Lomba IVA Test										
Nama Kegiatan: Lomba IVA Test yang diikuti oleh Kecamatan	Kecamatan	5	5	5				DIY	TP PKK DIY	
Nama Program: Pelaksanaan Lomba Lingkungan Bersih Sehat (LBS)										
Nama Kegiatan: Lomba LBS yang diikuti oleh Kalurahan/ Kelurahan	Kal/Kel, Kec, Kab/Kota	5	5	5				DIY	TP PKK DIY	
Nama Pemangku Kepentingan: Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DIY										
Tujuan : 3 Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan										
Indikator : 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan										
Nama Program: Kampanye GerMas Hidup Sehat dan meningkatkan advokasi perilaku hidup sehat di kalangan anggota Pramuka.										
Nama Kegiatan: Pelaksanaan GerMas dan advokasi perilaku hidup sehat melalui Saka Bakti Husada dan Saka Kencana Cabang pada Kwardcab, Kab/Kota	Kwardcab	3	4	5				DIY	Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DIY	
Nama Program: Pemberdayaan anggota Pramuka untuk masyarakat dan lingkungan sekitar										

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian					Alokasi Indikasi Anggaran	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
		2023	2024	2025	2026	2027				
Nama Kegiatan: Pelaksanaan penyemprotan fogging, desinfektans, vaksinasi sebagai tenaga pelaksana non medis melalui Pramuka Peduli, Saka Bakti Husada, Saka Wira Kartika, Saka Bhayangkara, Saka Pariwisata.		Kondisional	Kondisional	Kondisional				DIY	Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DIY	
Nama Program: Pemberdayaan anggota Pramuka untuk masyarakat dan lingkungan sekitar										
Nama Kegiatan: Pelaksanaan Pemberdayaan anggota Pramuka Kwardcab Kab/Kota yg melaksanakan kegiatan tersebut		80	100	100				DIY	Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DIY	
Nama Program: Sosialisasi dan meningkatkan edukasi mengenai makanan sehat dan gizi yang seimbang										
Nama Kegiatan: Pelaksanan sosialisasi & edukasi melalui Saka POM, Saka Bakti Husada pada Kwardcab dan Kab/Kota		3	4	5				DIY	Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DIY	
Nama Program: Peningkatan sosialisasi, edukasi mengenai pentingnya deteksi dini beberapa penyakit										
Nama Kegiatan: Pelaksanan sosialisasi & edukasi melalui Saka Kencana dan Saka Bakti Husada pada Kwardcab dan Kab/Kota		4	5	5				DIY	Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DIY	
Nama Program: Pelaksanaan secara fisik dan kampanye lingkungan bersih & sehat										
Nama Kegiatan: Peningkatan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit		3	4	5				DIY	Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DIY	
Nama Pemangku Kepentingan: BPJS Kesehatan KC Sleman dan kota Yogyakarta										
Tujuan : 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera										
Indikator: 3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)										
Nama Program: Peningkatan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit										
Nama Kegiatan: pencegahan sekunder dan pelayanan promotif dan preventif dalam paket jaminan Kesehatan nasional (JKN) termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit	Jiwa (jumlah target)	24.083	24.526	24.816				DIY	BPJS Kesehatan KC Sleman dan kota Yogyakarta	
Indikator: 3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)										
Nama Kegiatan: Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	Jiwa (Sasaran)	3.026.307	3.080.438	3.117.919				DIY	BPJS Kesehatan KC Sleman dan kota Yogyakarta	
Nama Pemangku Kepentingan: PERSADA DIY										
Tujuan : 6 Air Bersih Dan Sanitasi Layak										
Indikator : 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum										
Nama Program: Pesantren Sehat - Peningkatan PHBS di Pesantren										
Nama Kegiatan: Peningkatan Komunitas pesantren yang terdorong untuk memiliki pengetahuan dan pembiasaan perilaku hidup bersih sehat seperti cuci	Ponpes	5	5	5				DIY	PERSADA DIY	
Nama Program: School Health Program - Peningkatan PHBS Sekolah Dasar (SD) dg tujuan mendorong perilaku sehat melalui 7 pembiasaan perilaku hidup sehat meliputi: Cuci Tangan Pakai Sabun; Makanan Beragam Bergizi Seimbang &										
Nama Kegiatan: Kegiatan School Health Program yang menyasar pada beberapa SD	SD	50	50	50				DIY	PERSADA DIY	
Nama Program: Plastic Rescue bertujuan meningkatkan pengumpulan sampah plastik (semua jenis) di masyarakat, baik berupa plastik kemasan maupun plastik non kemasan, baik plastik fleksibel maupun plastik keras (rigid).										
Nama Kegiatan: Bank Sampah / TPS3R yang menjadi sasaran Program Plastic Rescue	TPS3R	2	2	2				DIY	PERSADA DIY	
Nama Program: Program Pengelolaan Sampah di Pesantren - Pembentukan Bank Sampah, Pembuatan Kompos dan Penguatan Urban Farming di Pesantren – bertujuan mendorong para santri yang secara proaktif dapat mengelola sampah										
Nama Kegiatan: Program Pengelolaan Sampah di Pesantren yang menyasar pada Ponpes	Ponpes	1	1	1				DIY	PERSADA DIY	
Nama Pemangku Kepentingan: Perguruan Tinggi - UGM										
Tujuan : 3 Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan										
Indikator : 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan										
Nama Program: Penelitian yang terkait dengan Germas										

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian					Alokasi Indikasi Anggaran	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
		2023	2024	2025	2026	2027				
Nama Kegiatan: Penelitian yang dilakukan yang berkaitan dengan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Buah/Kegiatan	20	23	25					DIY	Perguruan Tinggi - UGM
Nama Program: Publikasi yang terkait dengan Germas										
Nama Kegiatan: Publikasi sivitas UGM yang berkaitan dengan Germas	Buah/Kegiatan	10	13	15					DIY	Perguruan Tinggi - UGM
Nama Program: Peningkatan literasi kesehatan masyarakat melalui program CFHC-IPE FK-KMK UGM (Edukasi kesehatan dan peningkatan perilaku hidup sehat)										
Nama Kegiatan: Pensasaran Peningkatan literasi kesehatan Kelompok masyarakat melalui program CFHC-IPE FK-KMK UGM (Edukasi kesehatan dan peningkatan perilaku hidup sehat)	Buah/Kegiatan	10	13	15					DIY	Perguruan Tinggi - UGM
Nama Program: Pengembangan system dan peningkatan perilaku hidup sehat melalui praktik mahasiswa S2 Promosi kesehatan										
Nama Kegiatan: Pengembangan Unit kegiatan perilaku hidup sehat	Unit	5	5	5					DIY	Perguruan Tinggi - UGM
Nama Program: Peningkatan edukasi dan perilaku hidup sehat melalui program KKN-PPM										
Nama Kegiatan: Sosialisasi Peningkatan edukasi dan perilaku hidup sehat pada beberapa desa yang didampingi KKN-PPM	desa	20	20	20					DIY	Perguruan Tinggi - UGM
Nama Program: Peningkatan edukasi dan perilaku hidup sehat yang dilakukan secara daring oleh civitas UGM										
Nama Kegiatan: Kegiatan edukasi kesehatan dan peningkatan perilaku hidup sehat	kegiatan	100	100	100					DIY	Perguruan Tinggi - UGM
Nama Program: Peningkatan perilaku sehat melalui kegiatan desa / wilayah/kelompok binaan										
Nama Kegiatan: Peningkatan perilaku sehat melalui kegiatan desa / wilayah/kelompok unit binaan	unit	29	29	30					DIY	Perguruan Tinggi - UGM
Nama Program: Peningkatan aktivitas fisik										
Nama Kegiatan: Pensasaran aktivitas fisik	orang	900	950	1000					DIY	Perguruan Tinggi - UGM
Tujuan : 6 Air Bersih Dan Sanitasi Layak										
Indikator : 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum										
Nama Program: Peningkatan perilaku hidup sehat										
Nama Kegiatan: -	-	-	-	-					DIY	Perguruan Tinggi - UGM
Nama Program: Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi										
Nama Kegiatan: Pengelolaan beberapa kantin yang menyediakan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi	unit	95	95	95					DIY	Perguruan Tinggi - UGM
Nama Program: Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi										
Nama Kegiatan: Kegiatan edukasi dan pendampingan untuk pangan sehat	kegiatan	25	25	30					DIY	Perguruan Tinggi - UGM
Nama Program: Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit, melalui kegiatan posbindu dan vaksinasi										
Nama Kegiatan: Pensasaran individu untuk meningkatkan pencegahan dan dan deteksi dini penyakit, melalui kegiatan posbindu dan vaksinasi	orang	1000	1000	1000					DIY	Perguruan Tinggi - UGM
Nama Program: Peningkatan kualitas lingkungan melalui program pendampingan program health promoting university (HPU)										
Nama Kegiatan: Pendampingan beberapa Perguruan Tinggi dalam Peningkatan kualitas lingkungan melalui program pendampingan program health promoting university (HPU)	unit	4	5	6					DIY	Perguruan Tinggi - UGM
Nama Program: Peningkatan edukasi hidup sehat melalui pembuatan video dan berbagai sarana edukasi online										
Nama Kegiatan: Pembuatan produk edukasi hidup sehat dalam bentuk video dan berbagai sarana edukasi online	buah	85	85	90					DIY	Perguruan Tinggi - UGM
Nama Program: Penyediaan dan maintenance lingkungan sehat, aman, nyaman, dan difable friendly										
Nama Kegiatan: Kegiatan maintenance lingkungan sehat, aman, nyaman, dan difable friendly	unit	20	20	21					DIY	Perguruan Tinggi - UGM
Nama Program: Penyediaan pangan sehat pada saat kegiatan akademik maupun non akademik yang diselenggarakan oleh fakultas dan universitas										

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian					Alokasi Indikasi Anggaran	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
		2023	2024	2025	2026	2027				
Nama Kegiatan: Kegiatan Penyediaan pangan sehat pada saat kegiatan akademik maupun non akademik yang diselenggarakan oleh fakultas dan universitas	kegiatan	50	80	100					DIY	Perguruan Tinggi - UGM
Nama Program: Peningkatan kapasitas role model sehat										
Nama Kegiatan: Kegiatan Peningkatan kapasitas role model sehat	kegiatan	10	12	14					DIY	Perguruan Tinggi - UGM
Nama Pemangku Kepentingan: Perguruan Tinggi (Poltekkes Kemenkes Yogyakarta)										
Tujuan : 4 Pendidikan Berkualitas										
Indikator : 4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua										
Nama Program: Pendidikan										
Nama Kegiatan: Terlaksananya pendidikan lintas disiplin dan lintas institusi (IPE dan IPC)	Kali		5	5					DIY	Perguruan Tinggi (Poltekkes Kemenkes Yogyakarta)
Nama Program: Penelitian										
Nama Kegiatan: Terlaksananya penelitian lintas disiplin dan lintas institusi	Kali		4	5					DIY	Perguruan Tinggi (Poltekkes Kemenkes Yogyakarta)
Nama Program: Pengabmas										
Nama Kegiatan: Terlaksananya pengabdian masyarakat lintas disiplin dan lintas institusi (IPE dan IPC)	Kali		4	5					DIY	Perguruan Tinggi (Poltekkes Kemenkes Yogyakarta)
Nama Pemangku Kepentingan: Perguruan Tinggi (UGM)										
Tujuan : 2 Tanpa Kelaparan										
Indikator : 02.02.01 Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita										
Nama Program: Pelaksanaan mata kuliah trans disiplin dan/atau lintas institusi terkait pencegahan dan penangana stunting pada perguruan tinggi di DIY										
Nama Kegiatan: Terlaksananya pembelajaran pada mata kuliah trans disiplin dan/atau trans institusi terkait pencegahan dan penanganan stunting	Kegiatan		3	3					DIY	Perguruan Tinggi (UGM)
Nama Program: Pelaksanaan penelitian trans disiplin dan/atau lintas institusi terkait pencegahan dan penangana stunting pada perguruan tinggi di DIY										
Nama Kegiatan: Terlaksananya penelitian trans disiplin dan/atau trans institusi terkait pencegahan dan penanganan stunting	Kegiatan		4	4					DIY	Perguruan Tinggi (UGM)
Nama Program: Pelaksanaan pengabdian masyarakat trans disiplin dan/atau lintas institusi terkait pencegahan dan penangana stunting pada perguruan tinggi di DIY										
Nama Kegiatan: Terlaksananya pengabdian masyarakat trans disiplin dan/atau trans institusi terkait pencegahan dan penanganan stunting	Kegiatan		4	4					DIY	Perguruan Tinggi (UGM)
Nama Pemangku Kepentingan: HAKLI (Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan)										
Tujuan : 6 Air Bersih Dan Sanitasi Layak										
Indikator :6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum										
Nama Program: Percepatan Desa STBM										
Nama Kegiatan: Persentase Desa STBM	%		42	42.6					DIY	HAKLI (Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan)
Tujuan : 2 Tanpa Kelaparan										
Indikator : 02.02.01 Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita										
Nama Program: Percepatan Desa literasi Kesehatan pencegahan Stunting secara Holistik										
Nama Kegiatan: Pelaksanaan percepatan Desa literasi Kesehatan pencegahan Stunting secara Holistik	Jumlah Desa literasi Kesehatan pencegahan Stunting secara Holistik Desa		3	5					DIY	HAKLI (Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan)
Nama Pemangku Kepentingan: TPPKK										
Tujuan : 5 Kesetaraan Gender										
Indikator : 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.										
Nama Program:Pembinaan 10 Program Pokok PKK										
Nama Kegiatan: Pelaksanaan pembinaan 10 Program Pokok PKK	Jumlah pembinaan yang dilakukan kali		5	5					DIY	TPPKK

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian					Alokasi Indikasi Anggaran	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
		2023	2024	2025	2026	2027				
Nama Program: Sosialisasi program prioritas/ung gulan Nasional dan DIY										
Nama Kegiatan: Pelaksanaan sosialisasi ke TP PKK berjenjang yang dilakukan	Jumlah TP PKK berjenjang	kali	5	5					DIY	TPPKK
Tujuan : 2 Tanpa Kelaparan										
Indikator : 02.02.01 Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita										
Nama Program: Sosialisasi upaya pencegahan stunting										
Nama Kegiatan: Pelaksanaan sosialisasi ke TP PKK DIY berjenjang yang dilakukan	Jumlah TP PKK DIY berjenjang	kali	5	5					DIY	TPPKK
Nama Program: Pembinaan Lokus percontohan Pencegahan Stunting										
Nama Kegiatan: Pembinaan Lokus percontohan Pencegahan Stunting	Jumlah lokus yang dibina	kali	5	5					DIY	TPPKK
Nama Program: Penggerakan kader dan pelaksanaan posyandu untuk pencegahan stunting										
Nama Kegiatan: Pembinaan penggerakan berjenjang kader dan pelaksanaan posyandu untuk pencegahan stunting	Jumlah pembinaan penggerakan berjenjang	kali	5	5					DIY	TPPKK
Nama Program: Penggerakan kader untuk pelaksanaan SIP dan pencatatan data stunting										
Nama Kegiatan: Pembinaan penggerakan berjenjang Penggerak kader untuk pelaksanaan SIP dan pencatatan data stunting	Jumlah pembinaan penggerakan berjenjang	kali	5	5					DIY	TPPKK
Nama Program: Pembinaan Administrasi PKK										
Nama Kegiatan: Pembinaan berjenjang Administrasi PKK	Jumlah pembinaan berjenjang	kali	5	5					DIY	TPPKK
Nama Program: Pembinaan Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR) dengan penuh Cinta dan Kasih Sayang dalam Keluarga										
Nama Kegiatan: Pembinaan pada unit Desa/Kelurahan mengenai Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR) dengan penuh Cinta dan Kasih Sayang dalam Keluarga	Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina	Desa/ke lurahan	5	5					DIY	TPPKK
Nama Program: Pembinaan Kelompok UP2K-PKK										
Nama Kegiatan: Pembinaan Kelompok UP2K-PKK pada beberapa Desa/Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina	Desa/ke lurahan	5	5					DIY	TPPKK
Nama Program: Pembinaan Pemanfaatan Halaman Rumah/HATI NYA PKK										
Nama Kegiatan: Pembinaan Pemanfaatan Halaman Rumah/HATI NYA PKK pada beberapa Desa/Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina	Desa/ke lurahan	5	5					DIY	TPPKK
Tujuan : 6 Air Bersih Dan Sanitasi Layak										
Indikator : 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum										
Nama Program: Pembinaan pencegahan penyakit menular dan tidak menular, terutama IVA Test										
Nama Kegiatan: Pembinaan pencegahan penyakit menular dan tidak menular, terutama IVA Test pada beberapa Kecamatan	Jumlah Kecamatan yang dibina	Kecamatan	5	5					DIY	TPPKK
Nama Program: Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)										
Nama Kegiatan: Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada beberapa Desa/Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina	Desa/ke lurahan	5	5					DIY	TPPKK
Nama Program: Pembinaan Lingkungan Bersih Sehat (LBS)										
Nama Kegiatan: Pembinaan Lingkungan Bersih Sehat (LBS) pada beberapa Desa/Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina	Desa/ke lurahan	5	5					DIY	TPPKK
Tujuan : 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera										
Indikator : 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program										
Nama Program: Pembinaan PKK- Bangsa Kencana Kesehatan										
Nama Kegiatan: Pembinaan PKK- Bangsa Kencana Kesehatan pada beberapa Desa/Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina	Desa/ke lurahan	5	5					DIY	TPPKK

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian					Alokasi Indikasi Anggaran	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
		2023	2024	2025	2026	2027				
Nama Pemangku Kepentingan: LBH APIK										
Tujuan : 5 Kesetaraan Gender										
Indikator : 05.02 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.										
Nama Program: Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan, KBG, dan Tindak Pidana Perdagangan Orang										
Nama Kegiatan: Menyelenggarakan sosialisasi serta penyuluhan hukum terkait TPPO langsung ke Kalurahan/Perangkat Desa		Kali	Menyelenggarakan sosialisasi sebanyak 1 kali	Menyelenggarakan sosialisasi sebanyak 1 kali	Menyelenggarakan sosialisasi sebanyak 1 kali	Menyelenggarakan sosialisasi sebanyak 1 kali			DIY	LBH APIK
Nama Pemangku Kepentingan: PD IBI										
Tujuan : 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera										
Indikator: Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional										
Nama Program: Pelibatan Badan Praktek Mandiri di 5 kab kota terhadap permintaan adopsi bayi										
Nama Kegiatan: Pembekalan tentang peraturan perundangan tentang penjualan anak , cara untuk memberikan konseling		Tentatif	Tentatif	Tentatif	Tentatif	Tentatif			DIY	PD IBI
Nama Program: Workshop / pelatihan tentang kesehatan reproduksi remaja sbgai upaya menurunkan pernikahan dini										
Nama Kegiatan: seminar / pelatihan/ workshop tentang kesehatan reproduksi remaja kepada guru BK dan bidan		Tentatif	Tentatif	Tentatif	Tentatif	Tentatif			DIY	PD IBI
Nama Program: Peningkatan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja di sekolah										
Nama Kegiatan: Menyusun materi kesehatan reproduksi remaja untuk menjadi bagian dari mata pelajaran (Materi kesehatan reproduksi remaja bukan identik dengan pelajaran Biologi dengan Dinas Pendidikan		Tentatif	Tentatif	Tentatif	Tentatif	Tentatif			DIY	PD IBI
Nama Pemangku Kepentingan: LPA										
Tujuan : 5 Kesetaraan Gender										
Indikator : 05.02 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.										
Nama Program: Penyediaan Pendamping Hukum Kasus TPPO Anak										
Nama Kegiatan: Pendampingan Hukum Kasus TPPO Anak		Tentatif	Tentatif	Tentatif	Tentatif	Tentatif			DIY	LPA
Nama Program: Penyediaan Pendamping Psikososial Kasus TPP Anak										
Nama Kegiatan: Pendamping Psikososial Kasus TPP Anak		Tentatif	Tentatif	Tentatif	Tentatif	Tentatif			DIY	LPA
Nama Program :Optimalisasi kerjasama dengan Provinsi lain yang berpotensi sebagai pintu keluar/masuk aksi TPPO										
Nama Kegiatan: Kerjasama LPA Provinsi Lain bila terjadi TPPO Anak		Kesepakatan	Tentatif	Tentatif	Tentatif	Tentatif			DIY	LPA
Nama Pemangku Kepentingan: LPSK DIY										
Tujuan : 5 Kesetaraan Gender										
Indikator : 05.02 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.										
Nama Program : Pembentukan kesepakatan pembagian peran dan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi sosial, reintegrasi dan pemulangan Korban TPPO DIY ditangani oleh LPSK dengan OPD wilayah DIY										
Nama Kegiatan: Pembagian peran dan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi sosial, reintegrasi dan pemulangan Korban TPPO DIY ditangani oleh LPSK dengan OPD wilayah DIY		Kesepakatan	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			DIY	LPSK DIY
Nama Program: Optimalisasi Pengawasan dan pendampingan penanganan korban TPPO Anak										
Nama Kegiatan: Pencermatan pasal- pasal yang dapat melindungi dalam proses pendampingan hukum		jumlah layanan (tentatif)	jumlah layanan (tentatif)	jumlah layanan (tentatif)	jumlah layanan (tentatif)	jumlah layanan (tentatif)			DIY	LPSK DIY
Nama Program: Pembinaan terkait rujukan perlindungan Saksi dan Korban TPPO di DIY dari masyarakat, OPD, Aparat Penegak Hukum kepada LPSK dalam rangka mendorong berjalannya proses peradilan pidana										
Nama Kegiatan: Sosialisasi perlindungan Saksi dan Korban TPPO di DIY dari masyarakat, OPD, Apsosialisasi perlindungan Saksi dan Korban TPPO di DIY dari masyarakat, OPD, Aparat Penegak Hukum kepada LPSK dalam rangka mendorong berjalannya proses peradilan pidana		Sosialisasi	1 sosialisasi perlindungan saksi dan korban	1 sosialisasi perlindungan saksi dan korban	1 sosialisasi perlindungan saksi dan korban	1 sosialisasi perlindungan saksi dan korban			DIY	LPSK DIY

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian					Alokasi Indikasi Anggaran	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
		2023	2024	2025	2026	2027				
Nama Program: Penyusunan regulasi bersama terkait pengaturan pembiayaan korban TPPO (cost sharing budget)										
Nama Kegiatan: Penyusunan regulasi bersama terkait pengaturan pembiayaan korban TPPO (cost sharing budget)	Regulasi	1. penyusunan regulasi bersama terkait pengaturan pembiayaan korban TPPO (cost sharing budget)	1. penyusunan regulasi bersama terkait pengaturan pembiayaan korban TPPO (cost sharing budget)	1. penyusunan regulasi bersama terkait pengaturan pembiayaan korban TPPO (cost sharing budget)	1. penyusunan regulasi bersama terkait pengaturan pembiayaan korban TPPO (cost sharing budget)				DIY	LPSK DIY
Nama Program: Pembinaan pemahaman perlindungan Saksi dan Korban TPPO kepada masyarakat										
Nama Kegiatan: Sosialisasi perlindungan Saksi dan Korban TPPO di DIY kepada masyarakat	Sosialisasi	1 sosialisasi perlindungan saksi dan korban	1 sosialisasi perlindungan saksi dan korban	1 sosialisasi perlindungan saksi dan korban	1 sosialisasi perlindungan saksi dan korban				DIY	LPSK DIY
Nama Pemangku Kepentingan: UPT BP2MI Yogyakarta										
Tujuan : 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi										
Indikator : 8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan										
Nama Program : Peningkatan kolaborasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/Kota serta Pemerintah										
Nama Kegiatan: Sidak ke penampungan ilegal yang disinyalir menjadi tempat transit pemberangkatan PMI unprosedural	Tentatif	Tentatif	Tentatif	Tentatif	Tentatif				DIY	UPT BP2MI Yogyakarta
Nama Program : Upaya pencegahan penempatan PMI unprosedural										
Nama Kegiatan: Sosialisasi Prosedur Penempatan Kerja ke Luar Negeri dan Peluang Kerja ke Luar Negeri	Tentatif	Tentatif	Tentatif	Tentatif	Tentatif				DIY	UPT BP2MI Yogyakarta
Nama Program : Pembinaan dan pengawasan lembaga Penempatan dan Pendukung Penempatan PMI ke Luar Negeri										
Nama Kegiatan: Sosialisasi oleh UPT Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Yogyakarta dalam Mendukung Penempatan PMI ke Luar Negeri	Kali	10 kali	10 kali	10 kali	10 kali				DIY	UPT BP2MI Yogyakarta
Nama Pemangku Kepentingan: PKK										
Tujuan : 6 Air Bersih Dan Sanitasi Layak										
Indikator : 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum										
Nama Program : Meningkatkan peran PKK dalam pendampingan keluarga untuk promosi aktivitas fisik, peningkatan konsumsi buah dan sayur, pembatasan konsumsi gula, garam dan lemak										
Nama Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) oleh Tim Penggerak PKK	Desa/ Kelurahan	5	5					DIY	PKK
Nama Pemangku Kepentingan: Perusahaan Swasta (PT. SGM)										
Tujuan : 2 Tanpa Kelaparan										
Indikator : 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup										
Nama Program : Penguatan peran sektor non- pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi di pusat dan daerah										

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian					Alokasi Indikasi Anggaran	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2023	2024	2025	2026	2027				
<p>Nama Kegiatan : Melibatkan sektor swasta, industri dan perdagangan pangan, serta masyarakat untuk aktivitas melakukan kegiatan komunikasi perubahan perilaku mengenai penyediaan pangan rumah tangga, konsumsi masyarakat, food loss dan food waste, serta kesehatan lingkungan</p>		<p>kelurahan/kecamatan lokasi Program Bunda Mengajar</p>	1 kecamatan	2 kecamatan							
<p>Jumlah lokasi pelatihan/ pendampingan bagi masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan/swasta meliputi: - Pelatihan kader dalam program sosial - Pelatihan tentang kesehatan dan gizi serta perilaku hidup bersih dan sehat - Pelatihan tentang pengelolaan lahan pekarangan - pemeliharaan sarana sanitasi di masyarakat - pembangunan demplot kebun gizi</p>									DIY	PT SGM	
<p>Jumlah lokasi pelatihan/ pendampingan bagi guru dan orangtua siswa yang dilakukan oleh perusahaan/swasta meliputi: - TOT edukasi bagi Guru PAUD tentang kesehatan dan gizi seimbang, pola asuh dan pengelolaan sampah - Kelas parenting/edukasi pola asuh kepada orang tua siswa - Mengintegrasikan buku panduan Isi Piringku ke dalam silabus rencana pembelajaran di PAUD</p>		<p>Kabupaten/ kota lokasi Program Isi Piringku untuk Anak Usia 4-6 Tahun</p>	2 kab	2 kab							
									DIY	Perusahaan Swasta (PT. SGM)	

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian					Alokasi Indikasi Anggaran	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2023	2024	2025	2026	2027				
	Jumlah lokasi pelatihan/ pendampingan bagi ibu hamil dan keluarga baduta yang dilakukan oleh perusahaan/swasta meliputi: - Workshop - pemantauan status kesehatan dan status gizi - pengadaan alat edukasi - home visit dan konseling Gizi	kelurahan/ kecamatan lokasi Program 1000 pelangi	1 kecamatan	1 kecamatan							Perusahaan Swasta (PT. SGM)
									DIY		
Nama Kegiatan : Pelaksanaan penelitian trans disiplin dan/atau lintas institusi terkait pencegahan dan penanganan stunting pada perguruan tinggi di DIY	Jumlah penelitian trans disiplin dan/atau trans institusi terkait pencegahan dan penanganan stunting	kegiatan	4	4						DIY	Perusahaan Swasta (PT. SGM)
Nama Pemangku Kepentingan: Komunitas											
Tujuan : 13 Penanganan Perubahan Iklim											
Indikator : 13.3 Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim											
Nama Program :Mengembangkan sistem informasi mitigasi bencana											
Pengembangan digital database kebencanaan	Presentase peningkatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana		25						APBD	DIY	BPBD DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Bisnis; Komunitas.
Tujuan : 6 Air Bersih Dan Sanitasi Layak											
Indikator : 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum											
Nama Program :Kerja sama antar pemerintah kabupaten dan kota di kawasan perbatasan di DIY											
Pengembangan sistem informasi pengelolaan drainase wilayah di kawasan perbatasan antar kabupaten dan kota	Jumlah sistem informasi pengelolaan drainase			1					APBD	DIY	Dinas Kominfo DIY (PJ); Dinas PUP & ESDM DIY; Dinas PTR DIY; Dinas Kominfo Kab/Kota; Komunitas
Pengembangan platform berbasis big data untuk pemodelan dan peramalan pengelolaan drainase kawasan perkotaan dan kawasan perbatasan	Persentase Perangkat Daerah yang sudah terintegrasi dalam pengelolaan data dan informasi yang berbasis TIK		100						APBD	DIY	Dinas Kominfo DIY (PJ); Dinas PUP & ESDM DIY; Dinas Kominfo Kab/Kota; Komunitas.
Tujuan : 17 Kemitraan untuk Mencapaian Tujuan											
Indikator: 17.8.1* Persentase pengguna internet											
Pemanfaatan infrastruktur telekomunikasi kabel yang dikelola oleh sektor swasta dengan mekanisme sharing bandwidth untuk mendukung kegiatan perekonomian di kawasan perbatasan dan kawasan pedesaan	Persentase pemanfaatan infrastruktur telekomunikasi berbagi pakai		25						APBD	DIY	Dinas Kominfo DIY (PJ); Dinas PUP & ESDM DIY; Dinas PTR DIY; Dinas Kominfo Kab/Kota; Komunitas; Bisnis.

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian					Alokasi Indikasi Anggaran	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2023	2024	2025	2026	2027				
Peningkatan kapasitas internet pedesaan (bandwidth) untuk mendorong penetrasi teknologi dan informasi sekaligus membuka akses ke pasar yang lebih luas.	Persentase pemanfaatan infrastruktur internet pedesaan.		25						APBD	DIY	Dinas Kominfo DIY (PJ); Dinas Kominfo Kab/Kota; Komunitas; Bisnis.
Tujuan : 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan											
Indikator : 17.8 Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang											
Nama Program :1. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang melalui pelaksanaan peraturan zonasi dan mekanisme insentif- disisentif											
Sistem informasi geografis berbasis unit administrasi terkecil (desa dan persil) yang terintegrasi dengan sistem informasi kependudukan dan sistem informasi pertanahan	Persentase Perangkat Daerah yang sudah terintegrasi dalam pengelolaan data dan informasi yang berbasis TIK		50						APBD	DIY	Dinas Kominfo DIY (PJ) Dinas Kominfo Kab/Kota; Dinas PUP & ESDM DIY; Dinas PTR DIY; Komunitas; Bisnis.
Nama Pemangku Kepentingan: Akademisi dan Bisnis											
Tujuan : 11 Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan											
Indikator: Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan											
Nama Program : Pemasarakata n Transportasi Umum, Non- motor dan Pengaturan Lalu Lintas Terpadu											
Pengembangan berupa: 1. modal transportasi; 2. infrastruktur pendukung transportasi; 3. pembayaran biaya transportasi.	Persentase penyediaan layanan angkutan umum dalam trayek		70						APBD	DIY	Dinas Perhubungan (PJ); Dinas Kominfo; Dinas PUP & ESDM; Akademisi; Bisnis.
Tujuan : 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera											
Indikator : 03.04 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan											
Nama Program : Integrasi kesediaan dan pendaftaran layanan kesehatan											
Pilot project integrasi kesediaan dan pemesanan layanan kesehatan.	Persentase pelayanan kesehatan primer, kesehatan rujukan, dan pelayanan kesehatan lainnya sesuai standar pelayanan		30						APBD		Dinas Kesehatan DIY (PJ); Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; Biro Hukum Setda DIY; RSUD dan RSUP; Dinas Kominfo; Akademisi; Bisnis.
Pengembangan peta digital status kesehatan dan penyakit di DIY.	Persentase Perangkat Daerah yang sudah terintegrasi dalam pengelolaan data dan informasi yang berbasis TIK.		25						APBD	DIY	Dinas Kesehatan DIY (PJ); Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; Biro Hukum Setda DIY; RSUD dan RSUP; Dinas Kominfo DIY; Akademisi; Bisnis.
Nama Pemangku Kepentingan :Bisnis, Komunitas dan Media											
Tujuan : 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi											
Indikator : 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.											
Nama Program : Pemanfaatan teknologi digital untuk manajemen pariwisata											
Penggunaan media sosial dan big data untuk Identifikasi daya tarik wisata dan pengaduan wisata.	Persentase Perangkat Daerah yang sudah terintegrasi dalam pengelolaan data dan informasi yang berbasis TIK		20						APBD	DIY	Dinas Pariwisata DIY (PJ); Dinas Kominfo; Dinas Pariwisata Kab/Kota; Bisnis; Komunitas; Media.

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian					Alokasi Indikasi Anggaran	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2023	2024	2025	2026	2027				
Integrasi informasi event dan kegiatan	Persentase Perangkat Daerah yang sudah terintegrasi dalam pengelolaan data dan informasi yang berbasis TIK		20						APBD	DIY	Dinas Pariwisata DIY (PJ); Dinas Pariwisata Kab/Kota; Dinas Kominfo; Bisnis; Komunitas; Media.
Mendorong pelaku wisata lokal untuk melakukan jejaring layanan melalui media digital	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan pelaku pariwisata								APBD	DIY	Dinas Pariwisata DIY (PJ); Dinas Kominfo; Bisnis; Komunitas; Media; Akademik.
Tujuan : 17 Kemitraan untuk Mencapaian Tujuan											
Indikator : 17.6.1.(b) Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif).											
Fasilitasi pendidikan yang komprehensif, kolaboratif, mandiri, berkelanjutan, dan inklusif dengan bantuan teknologi digital											
Pemerataan akses internet jejaring fiber di sekolah-sekolah.	Persentase sarana pendidikan dengan jaringan internet		35						APBD	DIY	Dinas Kominfo (PJ); Bisnis; Akademisi.
Instalasi perangkat Internet of Things sebagai sensor peringatan dini bencana	Jumlah perangkat Pengelolaan kedaruratan dan logistik bencana		1						APBD	DIY	BPBD DIY(PJ); BMKG; Bisnis; Dinas Kominfo; Komunitas.
Tujuan : 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi											
Indikator : 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan											
Pemerataan ekonomi berbasis data terintegrasi dan kolaborasi antar wilayah											
berkolaborasi dengan penyedia jasa layanan antar dan pasar daring serta teknologi finansial pihak ketiga untuk pemerataan ekonomi antar wilayah.	Persentase peningkatan pemerataan ekonomi melalui media modern		25						APBD	DIY	Disperindag DIY(PJ); Dinas Kominfo DIY; Perangkat Daerah Kab/Kota terkait; Komunitas; Bisnis; Media.
Tujuan : 17 Kemitraan untuk Mencapaian Tujuan											
Indikator : 17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.											
Pengembangan dan penataan pusat industri kreatif DIY berbasis data yang terintegrasi dan kolaborasi antar wilayah											
Berkolaborasi dengan perguruan tinggi untuk mengembangkan program studi atau menawarkan mata kuliah terkait ekonomi digital dan kreatif	Jumlah perguruan tinggi yang bekerjasama		10						APBD	DIY	Disperindag DIY(PJ); Dinas Kominfo DIY; Dinas Koperasi dan UMKM; Perguruan tinggi.
Mengundang pemain industri kreatif dari dalam maupun luar negeri untuk membuka kantor dan workshop di DIY	Jumlah pemain industri kreatif yang membuka kantor di DIY		100						APBD	DIY	Disperindag DIY(PJ); Dinas Kominfo DIY; Dinas Koperasi dan UMKM; Perguruan tinggi.
Nama Pemangku Kepentingan :Perguruan Tinggi											
Tujuan : 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan											
Indikator : 17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.											
Monitoring dan memastikan distribusi barang komoditas dan harga-harga terutama sembako lancar											
Kolaborasi dengan produsen, distributor, UMKM, toko jejaring, toko daring, layanan jasa antar daring, serta warung-warung yang beroperasi di wilayah DIY dan merupakan pelaku transaksi barang-barang komoditas untuk menerapkan aplikasi sistem informasi yang disebutkan di atas	Persentase jumlah pihak yang bekerjasama		25						APBD	DIY	Disperindag DIY (PJ); Dinas Kominfo DIY; Dinas Koperasi dan UMK; Perguruan tinggi.
Nama Pemangku Kepentingan :Panti Asuhan Kabupaten Kota											
Tujuan : 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh											
Indikator : 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.											
Nama Program : Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi											

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian					Alokasi Indikasi Anggaran	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
		2023	2024	2025	2026	2027				
Nama Kegiatan : Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi Keterangan : Kegiatan fasilitasi penduduk rentan meliputi fasilitasi anak panti asuhan, penghuni panti milik Dinas Sosial, penyandang disabilitas, ODGJ, Transpuan.	Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi						11.668.000 (2022) 24.474.000 (2023) (fasilitasi)	APBD	DIY	Panti Asuhan Kab/Kota
Nama Pemangku Kepentingan :Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia (KPSI) Simpul Yogyakarta										
Tujuan : 1 Tanpa Kemiskinan										
Indikator : 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial,										
Nama Program : Pelatihan kewirausahaan										
Pelatihan Kewirausahaan	Kemandirian ekonomi anggota		√	√			3 jt rupiah	luran anggota	Umbulharjo Yogyakarta	:Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia (KPSI) Simpul Yogyakarta
Tujuan : 3 Kesehatan yang Baik dan Sejahtera										
Indikator : 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan										
Nama Program : Edukasi kesehatan jiwa										
Edukasi Kesehatan Jiwa	Peningkatan kualitas hidup		√	√			5jt rupiah	luran anggota	Umbulharjo Yogyakarta	:Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia (KPSI) Simpul Yogyakarta
Nama Pemangku Kepentingan :DPC GERKATIN (Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia) Kabupaten Sleman										
Tujuan : 3 Kesehatan yang Baik dan Sejahtera										
Indikator : 3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)										
Nama Program :Pendampingan khusus Tuli										
Pendampingan khusus Tuli	Kartu jaminan kesehatan		√	√	√	√	Semua kabupaten/ kota se DIY		DIY	DPC GERKATIN Kab Sleman
Tujuan : 4 Pendidikn Bermutu										
Indikator : 4.5 Menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan										
Nama Program :Pelatihan bagi penyandang disabilitas Rungu/Wicara (pembelajaran bahasa Indonesia, Isyarat Indonesia, Isyarat hijaiyah, tataboga, dll)										
Pelatihan bagi penyandang disabilitas Rungu/Wicara	Kemampuan/peng etahuan teman-teman meningkat sehingga mampu mandiri dan percaya diri dalam kehidupan sehari-hari		√	√	√	√			DIY	DPC GERKATIN Kab Sleman
Tujuan : 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi										
Indikator : 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama										
Nama Program :Penjualan/pemasaran										
Penjualan/pemasaran	Online bekerjasama dengan mitra yang bersedia membantu		√	√	√	√			DIY	DPC GERKATIN Kab Sleman
Nama Pemangku Kepentingan :FPMI DIY (Forum Pendidik Madrasah Inklusi) DIY										
Tujuan : 4 Pendidikan Bermutu										
Indikator : 4.5 Menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan										
Nama Program :Bimtek guru madrasah inklusif di DIY										
Bimtek guru madrasah inklusif di DIY	Menciptakan tenaga pendidik dan kependidikan yang akses bagi peserta didik difabel di lingkungan madrasah.		√						Kanwil Kemenag DIY	FPMI DIY

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian					Alokasi Indikasi Anggaran	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
		2023	2024	2025	2026	2027				
Nama Pemangku Kepentingan :Yayasan SATUNAMA Yogyakarta										
Tujuan : 1 Tanpa Kemiskinan										
Indikator : 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial,										
Nama Program :Desa Inklusi Disabilitas										
Desa Inklusi Disabilitas	Penyandang Disabilitas menjadi mandiri secara sosial sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan terbebas dari lingkaran kemiskinan	√							DIY	Yayasan SATUNAMA Yogyakarta
Tujuan : 3 Kesehatan yang Baik dan Sejahtera										
Indikator : 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan										
Nama Program :Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental										
Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental	Penyandang disabilitas mental memiliki kesehatan mental yang stabil								Sleman	
Tujuan : 10 Mengurangi Ketimpangan										
Indikator : 10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.										
Nama Program :Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental										
Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental	Penyandang Disabilitas bisa diterima di masyarakat dan menjadi pribadi yang mandiri	√							Duwet, Sendangadi, Kecamatan Mlati	
Nama Pemangku Kepentingan :UCP Roda Untuk Kemanusiaan Indonesia										
Tujuan : 3 Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan										
Indikator : 3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)										
Nama Program :Advokasi Pemenuhan Hak Alat Bantu Adaptif bagi Penyandang Disabilitas										
Advokasi Pemenuhan Hak Alat Bantu Adaptif bagi Penyandang Disabilitas	Terwujudnya komitmen pemerintah dalam memenuhi hak alat bantu adaptif bagi penyandang disabilitas	√							DIY	UCP Roda
Nama Pemangku Kepentingan :Pimpinan wilayah ikatan tunanetra muslim Indonesia daerah istimewa Yogyakarta PW ITMI DIY										
Tujuan : 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi										
Indikator : 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.										
Nama Program :Pelatihan dan sertifikasi untuk disabilitas netra terapis pijat sejumlah 150 orang anggota ikatan tunanetra muslim Indonesia daerah istimewa Yogyakarta										
Pelatihan dan sertifikasi untuk disabilitas netra terapis pijat sejumlah 150 orang anggota ikatan tunanetra muslim Indonesia daerah istimewa Yogyakarta	Peningkatan skill bagi terapis pijat tunanetra sehingga mampu bersaing dan meningkatkan taraf hidup mereka	√							Kota Yogyakarta	Pimpinan wilayah ikatan tunanetra muslim Indonesia
Tujuan : 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi										
Indikator : 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama										
Nama Program :Pelatihan kewirausahaan untuk 150 tunanetra muslim anggota ikatan tunanetra muslim Indonesia se daerah istimewa Yogyakarta										

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian					Alokasi Indikasi Anggaran	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
		2023	2024	2025	2026	2027				
Peningkatan keterampilan tunanetra muslim dalam memasarkan dan memunculkan ide kreatif untuk menghasilkan produk yang mampu bersaing di pasaran										
Pelatihan kewirausahaan untuk 150 tunanetra muslim anggota ikatan tunanetra muslim Indonesia se daerah istimewa Yogyakarta		√							DIY	Pimpinan wilayah ikatan tunanetra muslim Indonesia
Tujuan : 4 Pendidikan Bermutu										
Indikator : 4.5 Menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan										
Nama Program :Pelatihan baca tulis Alquran braille untuk 150 tunanetra muslim anggota ikatan penelitian muslim Indonesia se daerah istimewa Yogyakarta										
Pelatihan baca tulis Alquran braille untuk 150 tunanetra muslim anggota ikatan penelitian muslim Indonesia se daerah istimewa Yogyakarta	Meningkatnya tunanetra muslim daerah istimewa Yogyakarta anggota ikatan tunanetra muslim Indonesia yang mahir membaca dan menulis Alquran dalam huruf braille									
		√	√						Kota Yogyakarta	Pimpinan wilayah ikatan tunanetra muslim Indonesia
Tujuan : 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi										
Indikator : 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama										
Nama Program :Pelatihan soft skill bagi 150 tunanetra anggota ikatan tunanetra muslim Indonesia daerah istimewa Yogyakarta										
Pelatihan soft skill bagi 150 tunanetra anggota ikatan tunanetra muslim Indonesia daerah istimewa Yogyakarta	Terbentuknya kepribadian tunanetra anggota ikatan tunanetra muslim Indonesia daerah istimewa Yogyakarta yang terampil dan siap memasuki dunia kerja									
			√						Kota Yogyakarta	Pimpinan wilayah ikatan tunanetra muslim Indonesia
Nama Pemangku Kepentingan :ORGANISASI HARAPAN NUSANTARA INDONESIA										
Tujuan : 3 Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan										
Indikator : 3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)										
Nama Program :seating clinic										
seating clinic	terpenuhinya kursi roda bagi Penyandang disabilitas Fisik									
		√							Se Indonesia	Organisasi Harapan Nusantara Indonesia
Tujuan : 5 Kesetaraan Gender										
Indikator : 05.02 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.										
Nama Program :Campaign on Gender Based Violence										
Campaign on Gender Based Violence	korban perempuan dengan disabilitas tertangani tepat									
		√							DIY	Organisasi Harapan Nusantara Indonesia
Tujuan : 9 Infrastruktur, Industri dan Inovasi										
Indikator : 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan										
Nama Program :Infrastruktur Gedung layanan publik inklusif										
Infrastruktur Gedung layanan publik inklusif	Infrastruktur Gedung layanan publik inklusif									
		√							DIY	Organisasi Harapan Nusantara Indonesia
Tujuan : 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang kuat										
Indikator : 16.01 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.										

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian					Alokasi Indikasi Anggaran	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2023	2024	2025	2026	2027				
Nama Program :pendirian LBH untuk pendampingan kasus.penyandang disabilitas											
pendirian LBH untuk pendampingan kasus.penyandang disabilitas	kasus korban kekerasan Perempuan dengan disabilitas tertangani dengan tuntas		√							DIY	Organisasi Harapan Nusantara Indonesia
Tujuan : 17 Kemitraan untuk Mencapaian Tujuan											
Indikator : 17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.											
Nama Program :jaringan advokasi											
jaringan advokasi	adanya jaringan dengan berbagai stakeholder		√							DIY	Organisasi Harapan Nusantara Indonesia
Nama Pemangku Kepentingan : Center for Improving Qualified Activity In Live Of people with disabilitie											
Tujuan : 5 Kesetaraan Gender											
Indikator : 05.02 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.											
Nama Program :kampanye kekerasan terhadap perempuan disabilitas											
kampanye kekerasan terhadap perempuan disabilitas	korban kekerasan perempuan disabilitas tertangani dengan tepat		√							DIY	Center for Improving Qualified Activity In Live Of people with disabilitie
Tujuan : 13 Penanganan Perubahan Iklim											
Indikator : 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara											
Nama Program :pencegahan bencana											
pencegahan bencana	bencana apapun dapat tertangani sesuai kebutuhan penyandang disabilitas		√							Sleman dan Bantul	Center for Improving Qualified Activity In Live Of people with disabilitie
Nama Pemangku Kepentingan :PPDI DIY											
Tujuan : 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi											
Indikator : 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama											
Nama Program :Perluasan lapangan kerja informal											
Perluasan lapangan kerja informal	Difabel dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan meskipun tanpa syarat yang bersifat administratif		√	√	√	√	√	√		Caturharjo Sleman Sleman Yogyakarta	PPDI DIY
Tujuan : 2 Mengakhiri Kelaparan											
Indikator : 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup											
Nama Program Ppdi berbagi											
Ppdi berbagi	Difabel mendapatkan bantuan sembako secara gratis		√	√	√	√	√	√		Di sekitar kantor sekretariat ppdi Kabupaten kota se DIY	PPDI DIY
Tujuan : 3 Kesehatan yang Baik dan Sejahtera											
Indikator : 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan											
Nama Program Posbindu											
Posbindu	Difabel mendapatkan layanan kesehatan dan konsultasi kesehatan secara gratis		√	√	√	√	√	√		Di setiap pp di kabupaten kota dan sebagian Kecamatan di	PPDI DIY
Tujuan : 4 Pendidikan Bermutu											
Indikator : 4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua											

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian					Alokasi Indikasi Anggaran	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2023	2024	2025	2026	2027				
Nama Program Beasiswa bagi difabel dan atau keluarga difabel											
Beasiswa bagi difabel dan atau keluarga difabel	Difabel dan atau keluarga difabel mendapatkan keringanan dalam menjalani pendidikan		√	√	√	√	√			Di sekitar kantor sekretariat ppdi DIY dan ppdi kabupaten kota	PPDI DIY
Tujuan : 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi											
Indikator : 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama											
Nama Program Mengembangkan koperasi dan pertumbuhan UKM difabel											
Mengembangkan koperasi dan pertumbuhan UKM difabel	Difabel dapat menikmati manfaat koperasi, dapat berkoperasi dengan maksimal, dan dapat berusaha serta membuka lapangan usaha sendiri		√	√	√	√	√			Bejen caturharjo Sleman Sleman Yogyakarta, nagli Sleman Yogyakarta, Gamping Sleman Yogyakarta dan di setiap kabupaten kota	PPDI DIY
Tujuan : 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi											
Indikator : 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama											
Nama Program Pengembangan kawasan edu wisata Farm terpadu											
Pengembangan kawasan edu wisata Farm terpadu	Membuka lapangan kerja sumber belajar dan inspirasi bagi masyarakat dan kesejahteraan difabel		√	√	√	√	√			Caturharjo Sleman Sleman Yogyakarta	PPDI DIY
Tujuan : 11 Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan											
Indikator : 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.											
Nama Program Pengembangan kawasan edu wisata Farm terpadu											
Sosialisasi program perumahan bersubsidi untuk difabel	Difabel dapat memiliki rumah dengan murah dan layak		√	√						DIY	PPDI DIY
Tujuan : 12 Konsumsi dan Produksi yang bertanggungjawab											
Indikator : 12.a Mendukung negara-negara berkembang untuk memperkuat kapasitas ilmiah dan teknologi mereka untuk bergerak ke arah pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan.											
Nama Program Budidaya dan penggemukan domba untuk konsumsi para pelaku kuliner sate											
Budidaya dan penggemukan domba untuk konsumsi para pelaku kuliner sate	Difabel dapat mengelola usaha penyediaan daging domba dari Hulu sampai Hilir guna meningkatkan kesejahteraan		√	√						Bejen caturharjo Sleman Sleman Yogyakarta	PPDI DIY
Tujuan : 15 Menjaga Ekosistem Darat											
Indikator : 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering.											
Nama Program Pengembangan kawasan budidaya kalian dra dan indigofera untuk pakan ternak											
Pengembangan kawasan budidaya kalian dra dan indigofera untuk pakan ternak	Ppdi dapat menyediakan kebutuhan pakan ternak yang berkualitas untuk anggota dan masyarakat		√	√	√					Di sekitar Kabupaten Sleman	PPDI DIY
Tujuan : 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kuda											
Indikator : 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan											
Nama Program Mendorong partisipasi difabel dalam pemilu dan penguatan organisasi											

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian					Alokasi Indikasi Anggaran	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2023	2024	2025	2026	2027				
Mendorong partisipasi difabel dalam pemilu dan penguatan organisasi	Difabel dapat berpartisipasi menentukan pembangunan negara dan meningkatkan kualitas organisasi		√	√					DIY	PPDI DIY	
Tujuan : 10 Berkurangnya Kesenjangan											
Indikator : 10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.											
Nama Program :Lentera kasih bersama RRI Pro 1 Yogyakarta											
Lentera kasih bersama RRI Pro 1 Yogyakarta	Masyarakat dapat memahami aktivitas dan perlakuan terhadap difabel		√	√					RRI Yogyakarta Jalan Kota Baru	PPDI DIY	
Nama Pemangku Kepentingan :Wahana Keluarga Cerebral Palsy (WKCP)											
Tujuan : 3 Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan											
Indikator : 03.04 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan											
Nama Program :Peningkatan Kapasitas Orang Tua dan Penyandang CP											
Peningkatan Kapasitas Orang Tua dan Penyandang CP	Orang tua dan penyandang CP memahami bagaimana penanganan cerebral palsy								DIY	Wahana Keluarga Cerebral Palsy (WKCP)	
Tujuan : 4 Pendidikan Bermutu											
Indikator : 4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua											
Nama Program :Kelas Edukasi											
Kelas Edukasi	Penyandang CP memiliki kesempatan dan aksesibilitas terhadap pendidikan								DIY	Wahana Keluarga Cerebral Palsy (WKCP)	
Nama Pemangku Kepentingan :UPKM/CD Bethesda YAKKUM (Usaha Peningkatan Kesehatan Masyarakat / Community Development Bethesda YAKKUM)											
Tujuan : 3 Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan											
Indikator : 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya											
Nama Program :Program Pengendalian Terpadu HIV dan AIDS di Kota Yogyakarta											
Program Pengendalian Terpadu HIV dan AIDS di Kota Yogyakarta	Program ini berkontribusi untuk terwujudnya program pencegahan terpadu infeksi baru HIV serta support untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan hidup Orang dengan HIV (ODHIV) dan Orang yang hidup dengan ODHA (OHIDHA) di Kota Yogyakarta		√	√	√				BfdW Jerman	Kelurahan Pringgokusuman dan Sosromenduran - Kecamatan Gedongtengen ; Kelurahan Kricak dan Bener - Kecamatan Tegalorejo ; Kelurahan Warungboto dan Giwangan - Kecamatan Umbulharjo ; Kelurahan Suryodiningratan dan Gedongkiwo - Kecamatan Mantriweron	
Nama Pemangku Kepentingan :Genta Lansia dan Dukungan Kecil											
Tujuan : 3 Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan											
Indikator : 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan											

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian					Alokasi Indikasi Anggaran	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
		2023	2024	2025	2026	2027				
Nama Program : Lansia dan kesehatan jiwa : Genta Lansia Gerakan Cinta Lansia										
Lansia dan kesehatan jiwa : Genta Lansia Gerakan Cinta Lansia	Meningkatkan kualitas hidup lansia lebih sehat dan produktif		√	√	√				Kelurahan Wirogunan	Genta Lansia dan Dukungan Kecil
Tujuan : 5 Kesetaraan Gender										
Indikator: 5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and										
Nama Program :Program Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Disabilitas										
Untuk kekerasan seksual : Dukungan Kecil : Program Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Disabilitas	Tercapainya perilaku pencegahan seksual pada disabilitas		√	√	√				Rumah Bugar Difabel Bantul	Genta Lansia dan Dukungan Kecil
Nama Pemangku Kepentingan :SIGAB (Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel)										
Tujuan : 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi										
Indikator: 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama										
Nama Program : Program SOLIDER-INKLUSI										
Program SOLIDER-INKLUSI	Terbukanya Akses lapangan pekerjaan bagi difabel		√	√	√				Kab. Bantul dan Kab. Kulon Progo	SIGAB (Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel)
Nama Pemangku Kepentingan :PRY - Pusat Rehabilitasi YAKKUM										
Tujuan : 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi										
Indikator: 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama										
Nama Program : Kesehatan Jiwa Berbasis Masyarakat Pelatihan Vokasi bagi orang dengan disabilitas										
Kesehatan Jiwa Berbasis Masyarakat Pelatihan Vokasi bagi orang dengan disabilitas	Adanya orang dengan disabilitas psikososial yang produktif dan mampu berkontribusi di masyarakat Meningkatnya keterampilan orang dengan disabilitas yang dapat digunakan untuk bekerja		√	√				Pendanaan Donor	Kulon Progo, Sleman, Gunungkidul Seluruh DIY	PRY - Pusat Rehabilitasi YAKKUM
Tujuan : 3 Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan										
Indikator: 3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)										
Nama Program : Kesehatan Jiwa Berbasis Masyarakat Penanganan bagi anak dengan kaki pengkor dengan metode ponseti Layanan alat bantu bagi anak usia 0 - 20 tahun dengan amputasi kaki										

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Pencapaian					Alokasi Indikasi Anggaran	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
			2023	2024	2025	2026	2027				
Kesehatan Jiwa Berbasis Masyarakat Penanganan bagi anak dengan kaki pengkor dengan metode ponseti Layanan alat bantu bagi anak usia 0 - 20 tahun dengan amputasi kaki		Orang dengan disabilitas psikososial baik yang tinggal di balai rehabilitasi sosial maupun di masyarakat mendapatkan pelayanan Kesehatan yang memadai anak dengan kaki pengkor dapat pulih dan ditangani menggunakan metode ponsetti Anak dengan amputasi kaki mendapatkan alat bantu kaki palsu	√	√				pendanaan donor	Kulon Progo, Sleman, Gunungkidul Seluruh DIY Seluruh DIY	PRY - Pusat Rehabilitasi YAKKUM	
Tujuan : 4 Pendidikan Bermutu											
Indikator : 4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua											
Nama Program : Beasiswa bagi orang dengan disabilitas untuk belajar di perguruan tinggi Pelatihan Vokasi bagi orang dengan disabilitas											
Beasiswa bagi orang dengan disabilitas untuk belajar di perguruan tinggi Pelatihan Vokasi bagi orang dengan disabilitas		Orang dengan disabilitas mendapatkan akses untuk belajar di pendidikan tinggi di DIY orang dengan disabilitas mendapatkan akses untuk belajar keterampilan vokasi seperti barista, menjahit, batik, dll.	√	√	√			pendanaan donor	Seluruh DIY	PRY - Pusat Rehabilitasi YAKKUM	
Tujuan : 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi											
Indikator : 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama											
Nama Program : Kesehatan Jiwa Berbasis Masyarakat Pelatihan Vokasi bagi orang dengan disabilitas											
Kesehatan Jiwa Berbasis Masyarakat Pelatihan Vokasi bagi orang dengan disabilitas		Adanya orang dengan disabilitas psikososial yang produktif dan mampu berkontribusi di masyarakat Meningkatnya keterampilan orang dengan disabilitas yang dapat digunakan untuk bekerja/membuka usaha	√	√				pendanaan donor	Kulon Progo, Sleman, Gunungkidul Seluruh DIY	PRY - Pusat Rehabilitasi YAKKUM	
Tujuan : 10 Mengurangi Ketimpangan											
Indikator : 10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.											
Nama Program : Kesehatan Jiwa Berbasis Masyarakat Open The Gate											

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian					Alokasi Indikasi Anggaran	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
		2023	2024	2025	2026	2027				
Kesehatan Jiwa Berbasis Masyarakat Open The Gate	Berkurangnya stigma terhadap orang dengan disabilitas psikososial sehingga mampu hidup secara inklusif di masyarakat		√	√				pendanaan donor	Kulon Progo, Sleman, Gunungkidul	PRY - Pusat Rehabilitasi YAKKUM
Tujuan : 11 Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan										
Indikator: 11.2. Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan										
Nama Program :Kesehatan Jiwa Berbasis Masyarakat Open The Gate										
Kesehatan Jiwa Berbasis Masyarakat Open The Gate	Meningkatkan aksesibilitas layanan publik terhadap orang dengan disabilitas psikososial Mendampingi balai rehabilitasi sosial agar lebih terbuka dan terintegrasi dengan masyarakat		√	√				pendanaan donor	Kulon Progo, Sleman, Gunungkidul	PRY - Pusat Rehabilitasi YAKKUM
Nama Pemangku Kepentingan :YEU (YAKKUM Emergency Unit)										
Tujuan :5 Kesetaraan Gender										
Indikator : 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana pun										
Nama Program : Pertemuan Jaringan kelompok Perempuan Tangguh										
Pertemuan Jaringan kelompok Perempuan Tangguh	- meningkatnya kepemimpinan perempuan dalam membangun ketangguhan komunitas thd bencana dan perubahan iklim		√					YEU	DIY	
Nama Program : Pertemuan Jaringan kelompok Perempuan Tangguh										
Pertemuan Jaringan kelompok Perempuan Tangguh	- meningkatnya kepemimpinan perempuan dalam membangun ketangguhan komunitas thd bencana dan perubahan iklim		√					YEU	DIY	
Nama Pemangku Kepentingan :BAZANAS DIY										
Tujuan :4 Pendidikan Bermutu										
Indikator : 4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua										
Nama Program : Beasiswa SLTA										
Beasiswa SLTA	siswa	√					Rp360.000.000	Zakat	DIY	Mitra Dikpora DIY - Kanwil Kemenag DIY
Nama Program :Bantuan Riset S1										
Bantuan Riset S1	mahasiswa	√					Rp75.000.000	Zakat	DIY	Mitra Perguruan Tinggi
Tujuan : 6 Air Bersih Dan Sanitasi Layak										
Indikator : 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum										
Nama Program : Program Sanitasi										
Program Sanitasi		√					Rp185.000.000	Zakat	15 Kecamatan Miskin dan DIY	Mitra Dinas Kesehatan DIY

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian					Alokasi Indikasi Anggaran	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
		2023	2024	2025	2026	2027				
Tujuan : 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi										
Indikator : 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan										
Nama Program : Pemberdayaan Ekonomi										
Pemberdayaan Ekonomi		√					Rp375.000.000	Zakat	15 Kecamatan Miskin	Kalurahan
Tujuan : 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi										
Indikator : 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan										
Nama Program :Bantuan Modal Usaha										
Bantuan Modal Usaha	siswa	√					Rp500.000.000	Zakat	DIY	Mitra Dinas Pemberdayaan, BAPPAS, Dinas Sosial, BAZNAS DIY
Tujuan : 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi										
Indikator : 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan										
Nama Program : Program Zmart, Z Chicken										
Program Zmart, Z Chicken							Rp750.000.000	Zakat	15 Kecamatan Miskin dan DIY	BAZNAS DIY
Tujuan 2 Tanpa Kelaparan										
Indikator 2.2.1 Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek)										
Nama Program :Program Stunting										
Program Stunting							Rp215.000.000	Zakat dan Infak	15 Kecamatan Miskin	Kalurahan
Tujuan : 4 Pendidikan Bermutu										
Indikator : 4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua										
Nama Program :Madrasah Al Qur'an Lapas										
Madrasah Al Qur'an Lapas							Rp250.000.000	Zakat dan Infak	DIY	Mitra Lembaga Masyarakat
Tujuan : 11 Kota dan Permukiman Berkelanjutan										
Indikator : 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.										
Nama Program :Program RTLH										
Program RTLH							Pp1.250.000.000	Zakat	15 Kecamatan Miskin	Mitra PUPR dan BP2P DIY
Tujuan : 1 Tanpa Kemiskinan										
Indikator : 1.3.1 Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok anak berkebutuhan khusus, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban										
Nama Program :Bantuan Logistik Keluarga										
Bantuan Logistik Keluarga							Rp1.100.000.000	Zakat dan Infak	15 Kecamatan Miskin dan DIY	Mitra Dinas Sosial, BKD DIY
Tujuan : 13 Penanganan Perubahan Iklim										
Indikator : 13.3 Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim										
Nama Program :Respon, PRB dan Pasca Bencana										
Respon, PRB dan Pasca Bencana							Rp400.000.000	Infak Terikat	Nasional	BAZNAS DIY
Tujuan : 1 Tanpa Kemiskinan										
Indikator : 1.3.1 Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok anak berkebutuhan khusus, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban										
Nama Program :Bantuan Disabilitas										
Bantuan Disabilitas							Rp75.000.000	Zakat Infak	DIY	Mitra Dinas Sosial DIY

Matriks 4: Rencana Program/Kegiatan NonPemerintah (Pelaku Usaha)

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan		Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan				Target						Alokasi Dana (dalam Rupiah)			
Kode disesuaikan dengan Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-Ite-TJSL)	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor urut (sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/ Program	Indikator Capaian	Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam tahun)	Target Jangka Panjang (hingga tahun 2027)	Target tahun 2023	Target tahun 2024		Target tahun 2025	Target tahun 2026	Target tahun 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Rewulu															
		8.1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang		Edukasi Wirusaha dan Mandiri Pangan (DWIMAPAN)	Parsitipasi petani dalam program sebanyak 25 orang Terciptanya 5 jenis usaha dibidang pertanian	Kelompok Tani	5 tahun		Peningkatan produktifitas hasil panen sebanyak 20% Terciptanya 1 jenis produk	Peningkatan produktifitas hasil panen sebanyak 30% Terciptanya 2 jenis produk	Peningkatan produktifitas hasil panen sebanyak 40% Terciptanya 1 obyek edukasi	Peningkatan produktifitas hasil panen sebanyak 40% Terciptanya 2 obyek edukasi	Peningkatan pendapatan anggota kelompok sebanyak 25% Terciptanya 1 lembaga kepengurusan desa	1756000000
					Pengelolaan Tempe Tradisional (PETRA)	Terdapat 1 rumah produksi pengolahan tempe.	Kelompok usaha tempe Wanita	5 tahun		Adanya 10 orang KK yang sudah mampu mengoperasikan alat pengolahan tempe.	Adanya 1 sertifikat paten untuk alat pengolahan tempe dan juga 1 replikasi kelompok	Adanya 1 jenis jamur pada spesies yg digunakan dalam pengolahan tempe.	Terciptanya 1 desa wisata yang berintegrasi dengan kelompok tempe.	Adanya 1 Replikasi desa wisata dan kelompok pengolahan tempe.	1,507,868,000
					Program Pengembangan Produk Olahan Pisang	Terbentuk 1 kelompok budidaya dan pengolahan produk olahan pisang yang memanfaatkan lahan kosong, menjadi lahan produksi seluas 1,5 Ha	Kelompok Berkah Pisang	5 tahun		Kelompok memiliki 2 pengembangan produk olahan dari Tepung	Terdapat 1 rumah produksi yang digunakan sebagai tempat produksi produk	Terdapat 2 produk olahan pisang yang memiliki kemasan layak	10 Anggota kelompok mampu memasarkan produk olahan	1 Kelompok mampu mengelola dan mengembangkan produk - produk olahan pisang yang	1,970,000,000
					Program Pengembangan Desa Wisata dan Budaya	Terintegrasinya 50% program CSR Fuel Terminal Rewulu dalam	Kelompok	5 tahun		Adanya 1 koperasi kelompok sebagai pendukung	Adanya 1 kolaborasi Desa Wisata dengan salah satu program	Adanya 1 jenis desa wisata baru sebagai pengembangan program	Adanya 1 launching program usaha baru	Terwujudnya kolaborasi 2 Desa Wisata	2,870,000,000
					Rumah Kebugaran Difabel	Sebanyak 45 orang penyandang disabilitas memperoleh layanan kesehatan berkualitas yaitu akupresur, fisioterapi dan bimbingan konseling. Sebanyak 27 orang memiliki ketrampilan wirusaha yaitu usaha batik, jamu dan jamur.	Anggota kelompok	5 tahun		Sebanyak 72 orang penyandang disabilitas memperoleh layanan kesehatan berkualitas yaitu akupresur, fisioterapi dan bimbingan konseling. Sebanyak 27 orang memiliki ketrampilan promosi dan pemasaran produk usaha batik, jamu dan jamur.	Sebanyak 36 penyandang disabilitas memperoleh ketrampilan dalam memberikan layanan kesehatan. Sebanyak 27 orang memiliki unit usaha bersama dengan pemasaran yang lebih luas.	Sebanyak 36 penyandang disabilitas memperoleh ketrampilan dalam memberikan layanan kesehatan masyarakat umum. Sebanyak 27 penyandang disabilitas mandiri dengan program wirusaha	Sebanyak 3 Rumah Kebugaran baru didirikan sebagai replikasi program	Terdapat 3 rumah kebugaran difabel dengan 60 orang yang terlibat pelayanan kesehatan dan 36 wirusaha disabilitas mandiri.	1,832,000,000
					Pengembangan Berbasis Kemandirian Masyarakat	Sebanyak 9 Kelompok Binaan menjadi Kelompok yang Mandiri	Kelompok	5 tahun		2 kelompok binaan menjadi kelompok yang mandiri	2 kelompok binaan menjadi kelompok yang mandiri	2 kelompok binaan menjadi kelompok yang mandiri	1 kelompok binaan menjadi kelompok yang mandiri	9 kelompok binaan menjadi kelompok yang mandiri	1,970,000,000
PT. Bank Mandiri dan Jasindo															
		8.3	Mengalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.		Program Business Matching Ekosistem Ekonomi dan Keuangan		Kelompok Usaha /UKM	1 tahun							
					Program Pembentukan Kampung Digital		Kelompok usaha/UKM	1 tahun							
					Program Lingkup Sekolah Berbudaya Menabung & Wirusaha (Lilah Dana & Usaha) di sekolah pada wilayah dengan kesejahteraan rendah.		Pelajar/siswa	1 tahun							
De Mata Trick Eye															
Kebun Raya Dan Kebun Binatang Gembira Loka															
Gramedia Sudirman Jogja															
XT Square															
Puri Mataram Resto, Cafe 7 Wahana Wisata															
Museum Ullen															
Taman Pintar Yogyakarta															
Grand Puri Water Park Gabusan Bantul															
PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta															
HeHa Sky View															
					Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Pemanfaatan KIA dengan De Mata Trick Eye Museum	instansi	1- 2 tahun			3 instansi				10.167.000 (2022) 4.416.200 (2023) (Fasilitasi)

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan		Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan		Target						Alokasi Dana (dalam Rupiah)				
Kode disesuaikan dengan Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-Ite-TJSL)	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor urut (sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/ Program	Indikator Capaian	Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam tahun)	Target Jangka Panjang (hingga tahun 2027)		Target tahun 2023	Target tahun 2024	Target tahun 2025	Target tahun 2026
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sambimulyo														
Bulog														
		2.1.1	Prevalensi ketidacukupan Konsumsi Pangan		Nama Kegiatan : Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah gelar pangan murah/bazar untuk menjaga pasokan dan pengendalian harga melalui Rumah Pangan Kita (RPK) Bulog	kali	2 tahun		30	30			
					Nama Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Rumah Pangan Kita yang menyediakan dan menjual komoditi pangan sumber protein	RPK	2 tahun		50	50			

Matriks 1: Rencana Capaian Kota Yogyakarta Untuk Setiap Indikator SDGs 2023 - 2027

Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan

Kode Indikator	Indikator Metadata II	Indikator SDG's Kota Yogyakarta	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				Penanggungjawab Pelaksana
						2023	2024	2025	2026	
Target 1.1. Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.										
Target 1.2. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.										
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Angka kemiskinan	RPD Kota Yogyakarta 2023-2026	%	7.69%	6.61%-7,57%	6.41%-7,53%	6.21%-7,41%	6.01%-7,23%	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Target 1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.										
1.3.1	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok anak berkebutuhan khusus, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	RPD Kota Yogyakarta 2023-2026	%	-	88.58%	89.17%	89.74%	90.33%	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.5.4*	Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencana	Jumlah dokumen informasi rawan bencana	RPD Kota Yogyakarta 2023-2026	Dokumen	-	6	6	6	6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tujuan 2. Tanpa Kelaparan

Kode Indikator	Indikator	Indikator SDG's Kota Yogyakarta	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				Penanggungjawab Pelaksana
						2023	2024	2025	2026	
Target 2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi										
2.2.1*	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	Prevalensi stunting	RPD Kota Yogyakarta 2023-2026	%	12%	12%	12%	12%	12%	Dinas Kesehatan
2.2.2*	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang	RPD Kota Yogyakarta 2023-2026	%	7.97	7.97	7.97	7.97	7.97	Dinas Kesehatan

2.2.2(a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka Konsumsi Pangan	RPD Kota Yogyakarta 2023-2026	Poin	89.7	90.4	91.2	92.1	93.1	Dinas Pertanian dan Pangan
----------	---	-----------------------	-------------------------------	------	------	------	------	------	------	----------------------------

Tujuan 3. Kehidupan sehat dan sejahtera

Kode Indikator	Indikator	Indikator SDG's Kota Yogyakarta	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				Penanggungjawab Pelaksana
						2023	2024	2025	2026	
Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.										
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Jumlah kematian ibu	RPD Kota Yogyakarta 2023-2026	Orang	8	8	8	8	8	Dinas Kesehatan
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkannya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	RPD Kota Yogyakarta 2023-2026	%	-	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.										
3.4.1(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Persentase Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	RPD Kota Yogyakarta 2023-2026	%	-	87.50%	90%	92.50%	95%	Dinas Kesehatan
Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.										
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	RPD Kota Yogyakarta 2023-2026	%	-	50.70%	51.00%	51.30%	51.60%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.										
3.8.1*	Cakupan pelayanan kesehatan esensial	Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	RPD Kota Yogyakarta 2017-2022	%	-	90%	90%	90%	90%	Dinas Kesehatan
3.8.1(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	RPD Kota Yogyakarta 2017-2022	%	-	24.12%	23.59%	22.53%	22%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

3.8.2(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Persentase penduduk yang mempunyai JKN	RPD Kota Yogyakarta 2017-2022	%	-	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
----------	---	--	-------------------------------	---	---	------	------	------	------	-----------------

Tujuan 4. Pendidikan berkualitas

Kode Indikator	Indikator	Indikator SDG's Kota Yogyakarta	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				Penanggungjawab Pelaksana
						2023	2024	2025	2026	
Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap										
4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin	persentase Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		%	88.35%	88.66%	88.85%	89.07%	89.17%	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Target 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.										
4.3.1*	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin	Persentase jumlah penduduk usia 12-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar		%	-	111.98%	112.24%	113.38%	114.08%	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Target 4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.										
Target 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.										
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ lakilaki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	RPD Kota Yogyakarta 2023-2026	%	89.43%	98.37%	98.46%	98.55%	98.64%	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Angka Partisipasi Kasar SMP	RPD Kota Yogyakarta 2023-2026	%	97.02%	97.11%	97.20%	97.29%	97%	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Target 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.										
4.6.1	Persentase remaja/dewasa pada kelompok usia tertentu, paling tidak mahir/mampu pada level tertentu dalam keterampilan (i) membaca dan (ii) menghitung, menurut jenis kelamin	Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP	RPD Kota Yogyakarta 2023-2026	nilai	2.33	2.43	2.45	2.47	2.49	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

		Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP	RPD Kota Yogyakarta 2023-2026	nilai	2.00	2.10	2.12	2.14	2.16	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Target 4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.										
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Jumlah Satuan Pendidikan SD yang tercukupi sarana dan prasarana bangunan memadai dan layak guna	RPD Kota Yogyakarta 2023-2026	Satuan Pendidikan	-	59	59	59	59	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Jumlah Satuan Pendidikan SMP yang tercukupi sarana dan prasarana bangunan memadai dan layak guna	RPD Kota Yogyakarta 2023-2026	Satuan Pendidikan	-	4	4	4	4	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Target 4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang										
4.c.1*	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan	Persentase guru sesuai kualifikasi	RPD Kota Yogyakarta 2023-2026	%	-	97.15%	97.20%	97.25%	97.30%	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Tujuan 5. Kesetaraan Gender

Kode Indikator	Indikator	Indikator SDG's Kota Yogyakarta	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				Penanggungjawab Pelaksana
						2023	2024	2025	2026	
Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.										
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	RPD Kota Yogyakarta 2023-2026	%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.09%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tertangani	RPD Kota Yogyakarta 2023-2026	%	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Target 5.c Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan.										

5.c.1	Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Capaian layanan fasilitasi advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta penyediaan data pengendalian penduduk berbasis gender	RPD Kota Yogyakarta 2023-2026	%	-	65%	77%	88%	100%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
-------	---	---	-------------------------------	---	---	-----	-----	-----	------	---

Tujuan 6. Air bersih dan sanitasi layak

Kode Indikator	Indikator	Indikator SDG's Kota Yogyakarta	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				Penanggungjawab Pelaksana
						2023	2024	2025	2026	
Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.										
6.1.1*	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	Persentase capaian kinerja pelayanan air minum PDAM	RPD Kota Yogyakarta 2023-2026	%	-	90.50%	91.00%	91.50%	92.00%	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Target 6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.										

6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	Persentase pelayanan SPALD-S akses aman	RPD Kota Yogyakarta 2023-2026	%	-	60%	70%	80%	90%	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase pelayanan SPALD-T akses aman	RPD Kota Yogyakarta 2023-2026	%	-	15.42%	15.58%	15.74%	15.90%	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tujuan 7. Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern untuk Semua

Kode Indikator	Indikator RAD	Indikator SDG's Kota Yogyakarta	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				Penanggungjawab Pelaksana
						2023	2024	2025	2026	
Target 7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.										
7.2.1*	Bauran energi terbarukan	Persentase kualitas penerangan jalan umum ramah lingkungan	RPD Kota Yogyakarta 2023-2026	%	-	75.92%	81.76%	87.52%	93.20%	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tujuan 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi

Kode Indikator	Indikator	Indikator SDG's Kota Yogyakarta	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				Penanggungjawab Pelaksana
						2023	2024	2025	2026	
Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.										

8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita	Angka Pertumbuhan Ekonomi	RPD Kota Yogyakarta 2023-2026	%	5.09%	4.20% - 5.40%	4.30% - 5.60%	4.40% - 5.80%	4.50% - 6.00%	Dinas Perdagangan
Target 8.3 Mengalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.										
8.3.1.(a)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	Nilai Omset UKM Usaha Mikro tahun n	RPD Kota Yogyakarta 2023-2026	Rupiah	4.969.866.917 Ru piah	5.040.000.000 Ru piah	5.760.000.000 Ru piah	6.480.000.000 Ru piah	7.200.000.000 Ru piah	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Target 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.										
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Tingkat Pengangguran Terbuka	RPD Kota Yogyakarta 2023-2026	%	9.13	8.63%-8.98%	8.41%-8.83%	8.31%-8.68%	8.17%-8.53%	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Target 8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan										
8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3	Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial	RPD Kota Yogyakarta 2023-2026	%	-	40.33%	42.22%	44.12%	46.01%	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.										
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	RPD Kota Yogyakarta 2023-2026	Wisatawan	28.000 Wisatawan	108.000 Wisatawan	200.000 Wisatawan	300.000 Wisatawan	350.000 Wisatawan	Dinas Pariwisata
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	RPD Kota Yogyakarta 2023-2026	Wisatawan	1.372.000 Wisatawan	1.692.000 Wisatawan	2.300.000 Wisatawan	2.700.000 Wisatawan	3.150.000 Wisatawan	Dinas Pariwisata

Tujuan 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Kode Indikator	Indikator	Indikator SDG's Kota Yogyakarta	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				Penanggungjawab Pelaksana
						2023	2024	2025	2026	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.										
9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional	Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan	RPD Kota Yogyakarta 2023-2026	%	-	92.00%	92.25%	92.50%	92.75%	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan

Kode Indikator	Indikator	Indikator SDG's Kota Yogyakarta	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				Penanggungjawab Pelaksana
						2023	2024	2025	2026	
Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada dibawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.										
10.1.1*	Rasio Gini	Rasio gini	RPD Kota Yogyakarta 2023-2026		0.464	0.392-0.457	0.387-0.449	0.379-0.432	0.371-0.418	
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Angka kemiskinan	RPD Kota Yogyakarta 2023-2026	%	7.69%	6.61%-7,57%	6.41%-7,53%	6.21%-7,41%	6.01%-7,23%	Dinas Sosial
Target 10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.										
Target 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi										

10.3.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Persentase perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terselesaikan	RPD Kota Yogyakarta 2023-2026	Persen	-	88%	89%	90%	91%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
------------	--	--	-------------------------------	--------	---	-----	-----	-----	-----	---

Tujuan 11. Kota dan komunitas berkelanjutan

Kode Indikator	Indikator	Indikator SDG's Kota Yogyakarta	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				Penanggungjawab Pelaksana
						2023	2024	2025	2026	
Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.										
11.1.1	Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak.	Persentase permukiman kumuh yang tertangani	RPD Kota Yogyakarta 2023-2026	%	-	20.52%	23.14%	25.75%	28.37%	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Target 11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan Wilayah administrasi: nasional dan provinsi.										
Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.										
Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus										
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Persentase korban kejadian bencana skala kota yang mendapatkan layanan evakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	RPD Kota Yogyakarta 2023-2026	%	-	100%	100%	100%	100%	BPBD
Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.										
11.6.1	Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotaan yang dihasilkan oleh suatu kota.	Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai	RPD Kota Yogyakarta 2023-2026	%	-	88.00%	88.40%	88.80%	89.00%	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya	Persentase Pengelolaan Persampahan	RPD Kota Yogyakarta 2023-2026	%	99.50%	99.60%	99.60%	99.70%	99.70%	Dinas Lingkungan Hidup
Target 11.7. Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.										
11.7.1	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas.	Persentase Ruang Terbuka Hijau	RPD Kota Yogyakarta 2023-2026	%	-	23.548%	23.551%	23.554%	23.557%	Dinas Lingkungan Hidup
Target 11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan										

11.b.2*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi nasional penanggulangan bencana	Jumlah dokumen informasi rawan bencana	RPD Kota Yogyakarta 2023-2026	Dokumen	-	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	BPBD
---------	--	--	-------------------------------	---------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	------

Tujuan 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab

Kode Indikator	Indikator	Indikator SDG's Kota Yogyakarta	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				Penanggungjawab Pelaksana
						2023	2024	2025	2026	
Target 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.										
12.4.1.(a)	Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri	Persentase usaha yang telah memiliki izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	RPD Kota Yogyakarta 2023-2026	%	-	15.58%	17.43%	19.27%	21.08%	Dinas Lingkungan Hidup
Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.										
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Persentase sampah yang terkurangi	RPD Kota Yogyakarta 2023-2026	%	-	15%	16.20%	17.60%	19.20%	Dinas Lingkungan Hidup
Target 12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.										
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Persentase usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan	RPD Kota Yogyakarta 2023-2026	%	-	80.77%	81.21%	81.63%	82.03%	Dinas Lingkungan Hidup
Target 12.b Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.										
12.b.1	Mengimplemen- tasikan perangkat akutansi dasar untuk memantau as- pek ekonomi dan lingkungan dari pariwisata keberlanjutan	Indeks kualitas atraksi pariwisata	RPD Kota Yogyakarta 2023-2026	Skala	-	92.35 Skala 0-156	96.97 Skala 0-156	101.82 Skala 0-156	106.91 Skala 0-156	Dinas Pariwisata
12.b.1(a)	Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development	Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima	RPD Kota Yogyakarta 2023-2026	%	-	58.80%	61.70%	64.70%	65.75%	Dinas Pariwisata

Tujuan 13. Penanganan perubahan iklim

Kode Indikator	Indikator	Indikator SDG's Kota Yogyakarta	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				Penanggungjawab Pelaksana
						2023	2024	2025	2026	
Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.										
13.1.2*	Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015– 2030	Persentase korban kejadian bencana skala kota yang mendapatkan layanan evakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	RPD Kota Yogyakarta 2023-2026	%	-	100%	100%	100%	100%	BPBD

Tujuan 14. Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan

Kode	Indikator RAD	Indikator SDG's Kota Yogyakarta	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				Penanggungjawab
------	---------------	---------------------------------	-------------	--------	-------------	-------------------	--	--	--	-----------------

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Indikator					2023	2024	2025	2026	Pelaksana
-----------	--	--	--	--	------	------	------	------	-----------

Tujuan 15. Ekosistem Daratan

Kode Indikator	Indikator	Indikator SDG's Kota Yogyakarta	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				Penanggungjawab Pelaksana
						2023	2024	2025	2026	
Target 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan										
15.1.1*	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan	Persentase Ruang Terbuka Hijau	RPD Kota Yogyakarta 2023-2026	%	-	23.548%	23.551%	23.554%	23.557%	Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan 16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh

Kode Indikator	Indikator	Indikator SDG's Kota Yogyakarta	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				Penanggungjawab Pelaksana
						2023	2024	2025	2026	
Target 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.										
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Angka kriminalitas	RPD Kota Yogyakarta 2023-2026	Kejadian	534	530	525	520	515	
Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.										
16.2.1.(b)	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya	Prevalensi kekerasan terhadap anak	RPD Kota Yogyakarta 2023-2026	%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.										
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Persentase perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terselesaikan	RPD Kota Yogyakarta 2023-2026	%	-	88.00%	89.00%	90.00%	91.00%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
16.3.1.(b)	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum dan HAM	RPD Kota Yogyakarta 2023-2026	Kasus	-	5	5	5	5	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Target 16.4 Pada tahun 2030 secara signifikan mengurangi aliran dana gelap maupun senjata, menguatkan pemulihan dan pengembalian aset curian dan memerangi segala bentuk kejahatan yang terorganisasi.										
Target 16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.										
Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.										
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	RPD Kota Yogyakarta 2023-2026	Skala	94,08 Skala 1-100	93,72 Skala 1-100	94,36 Skala 1-100	95,60 Skala 1-100	96,24 Skala 1-100	BPKAD
16.6.1.(a)	Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	RPD Kota Yogyakarta 2023-2026		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Sekretariat Daerah

16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan skor SAKIP \geq B	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	RPD Kota Yogyakarta 2023-2026		A	A	A	A	A	Sekretariat Daerah
16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik.	Indeks pelayanan publik	RPD Kota Yogyakarta 2023-2026	Skala	81 Skala 0-100	81,5 Skala 0-100	81,6 Skala 0-100	81,7 Skala 0-100	81,8 Skala 0-100	Sekretariat Daerah
Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.										
Target 16.8 Memperluas dan meningkatkan partisipasi negara berkembang di dalam lembaga tata kelola global.										
Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.										
16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	RPD Kota Yogyakarta 2023-2026	%	-	95%	95.44%	95.88%	96.32%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Target 16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.										
16.10.2.(a)	Jumlah Badan Publik yang berkualifi asi Informatif	Indeks Layanan Informasi Publik	RPD Kota Yogyakarta 2023-2026	Skala	84.19 Skala 0-100	87.10 Skala 0-100	89.91 Skala 0-100	92.72 Skala 0-100	95.53 Skala 0-100	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

Tujuan 17. Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

Kode Indikator	Indikator	Indikator SDG's Kota Yogyakarta	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				Penanggungjawab Pelaksana
						2023	2024	2025	2026	
Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.										
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Nilai Pendapatan Asli Daerah	RPD Kota Yogyakarta 2023-2026	rupiah	572,946,498,463 Rupiah	658,724,912,873 Rupiah	706,603,687,940 Rupiah	739,853,700,334 Rupiah	782,776,222,008 Rupiah	BPKAD
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Nilai pendapatan Pajak Daerah	RPD Kota Yogyakarta 2023-2026	rupiah	-	444.281.800.000 Rupiah	481.723.900.000 Rupiah	503.651.970.000 Rupiah	534.077.000.000 Rupiah	BPKAD
Target 17.5 Mengadopsi dan melaksanakan pemerintahan yang mempromosikan investasi bagi negara kurang berkembang.										
17.5.1	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan rezim promosi investasi untuk negara- negara berkembang termasuk negara- negara kurang berkembang	Nilai investasi	RPD Kota Yogyakarta 2023-2026	%	308.015.205.801 Rupiah	319.966.195.786 Rupiah	332.380.884.182 Rupiah	345.277.262.488 Rupiah	358.674.020.272 Rupiah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Target 17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.										
17.6.1.(b)	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)	Persentase pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik	RPD Kota Yogyakarta 2023-2026	%	-	62.23%	68.11%	73.89%	79.67%	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
Target 17.14 Meningkatkan keterpaduan kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan.										
17.14.1	Jumlah negara yang telah memiliki mekanisme untuk keterpaduan kebijakan pembangunan berkelanjutan.	Indeks pelaksanaan pembangunan	RPD Kota Yogyakarta 2023-2026	Skala	95,4 Skala 0-100	94,6 Skala 0-100	94,8 Skala 0-100	94,9 Skala 0-100	95,6 Skala 0-100	Sekretariat Daerah
Target 17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.										
17.18.1	Indikator-indikator statistik untuk pemantauan SDGs	Indeks perencanaan pembangunan	RPD Kota Yogyakarta 2023-2026	Skala	92,4 Skala 0-100	92,5 Skala 0-100	92,6 Skala 0-100	92,7 Skala 0-100	92,8 Skala 0-100	Bappeda

Matriks 1: Rencana Capaian Kabupaten Sleman Untuk Setiap Indikator SDGs 2023 - 2027

TUJUAN GLOBAL 1. MENGAKHIRI SEGALA BENTUK KEMISKINAN DIMANA PUN

Kode Indikator	Indikator Metadata	Indikator Sleman	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar Baseline	Target Tahunan				
					Tahun 2021	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.										
	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Angka kemiskinan	RPJMD Kab.Sleman	%	8.64	6,83 - 7,33	6,81 - 7,13	6,79 - 6,98	6,77 - 6,83	
		Persentase KK miskin	RPJMD Kab.Sleman	%	9.10	8.00	7.80	7.65	7.50	
		Cakupan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang mendapatkan perlindungan sosial dan jaminan sosial	Renstra Dinas Sosial	%	NA	100.00	100.00	100.00	100.00	
		Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif	Renstra Dinas Sosial	%	93	71	73	75	77	
1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan										
	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.									
	a. Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Pelayanan kesehatan penduduk miskin, rentan miskin, kader kesehatan, kader sosial, kader IMP dan anggota Linmas (PBI APBD)	Renstra Dinas Kesehatan	jiwa	NA	114414	114414	114414	114414	
1.4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar,										
	Proporsi penduduk/ rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar	Persentase cakupan infrastruktur pelayanan dasar	RPJMD Kab.Sleman	%	59.99	53.91	57.51	61.11	64.7	
		Persentase jumlah rumah tangga yg mendapatkan akses terhadap air minum melalui jaringan perpipaan terhadap jumlah rumah tangga di seluruh kabupaten	Renstra DPUPKP	%	20.60	21.75	22.55	23.35	24.15	
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Renstra DLH	%	98.26	99.14	99.55	99.96	100	
		Persentase pengelolaan sampah	Renstra DLH	%	NA	56.71	57.02	57.33	57.64	
1.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi,										

	Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030	Tersedianya Perda Penanggulangan Bencana	BPBD	dokumen	1	1	1	1	1	
--	--	--	------	---------	---	---	---	---	---	--

TUJUAN GLOBAL 2. MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN

Kode Indikator	Indikator Metadata	Indikator Sleman	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar Baseline	Target Tahunan				
					Tahun 2021	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi,										
	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	Penanganan daerah rawan pangan/waspada pangan	RPJMD Kab. Sleman	kalurahan	3	3	3	3	3	
2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi										
		Rerata kinerja pelayanan kesehatan ibu, bayi dan balita (Angka kematian ibu; Angka kematian bayi; Prevalensi balita pendek (stunted) dan sangat pendek (severely stunted); Prevalensi balita berat badan kurang (underweight) dan berat badan sangat kurang (severely underweight)	Renstra Dinas Kesehatan	%	NA	99	99.5	100	100	
		Cakupan standar pelayanan minimal urusan kesehatan bidang Kesehatan Masyarakat	Renstra Dinas Kesehatan; SPM Bidang Kesehatan	%	83.93	100	100	100	100	
	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Prevalensi balita pendek (stunted) dan sangat pendek (severely stunted) dalam Rerata kinerja pelayanan kesehatan ibu, bayi dan balita	Dinas Kesehatan	%	6.92					
	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Prevalensi balita berat badan kurang (underweight) dalam Rerata kinerja pelayanan kesehatan ibu, bayi dan balita	Dinas Kesehatan	%	10.27					
	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun.									
	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).	Skor Pola Pangan Harapan	Renstra Dispartan	%	90.93	91.93	92.43	92.93	93.43	
2.3. Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk										
	Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/peternakan/ perikanan/ kehutanan	Persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan	Renstra Dispartan	%	NA	0.336	0.336	0.336	0.336	
2.4. Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat										

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	Luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	RTRW Kab. Sleman	ha	18,482.04	18,482.04	18,482.04	18,482.04	18,482.04	18,482.04
--	---	---	------------------	----	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TUJUAN GLOBAL 3. MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA

Kode Indikator	Indikator Metadata	Indikator Sleman	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar Baseline	Target Tahunan				
					Tahun 2021	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup										
		Rerata kinerja pelayanan kesehatan ibu, bayi dan balita (Angka kematian ibu; Angka kematian bayi; Prevalensi balita pendek (stunted) dan sangat pendek (severely stunted); Prevalensi balita berat badan kurang (underweight) dan berat badan sangat kurang (severely underweight)	Renstra Dinas Kesehatan	%	NA	99	99.5	100	100	
		Cakupan standar pelayanan minimal urusan kesehatan bidang Kesehatan Masyarakat	Renstra Dinas Kesehatan; SPM Bidang Kesehatan Masyarakat	%	83.93	100	100	100	100	
	Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka kematian ibu dalam Rerata kinerja pelayanan kesehatan ibu, bayi dan balita	Renstra Dinas Kesehatan	per 100.000 KH	363.4					
	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	SPM Bidang Kesehatan	%	99.06	100	100	100	100	100
		Pelayanan kesehatan ibu bersalin	SPM Bidang Kesehatan	%	99.99	100	100	100	100	100
3.2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup)										
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Angka kematian bayi dalam Rerata kinerja pelayanan kesehatan ibu, bayi dan balita	Renstra Dinas Kesehatan	per 1.000 KH	3.71					
		Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	SPM Bidang Kesehatan	%	97.7	100	100	100	100	100
		Pelayanan kesehatan balita	SPM Bidang Kesehatan	%	71.54	100	100	100	100	100
3.3. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya										
	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	SPM Bidang Kesehatan	%	79.6	100	100	100	100	100

	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	Angka Penemuan penderita TB Case Detection Rate (CDR)	Renstra Dinas Kesehatan	%	35.94	45	47	50	52	
		Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	SPM Bidang Kesehatan	%	32.73	100	100	100	100	100
3.4. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan										
	Kematian akibat penyakit kardiovaskuler, kanker, diabetes atau penyakit pernapasan kronis.	Cakupan standar pelayanan minimal urusan kesehatan bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	SPM Bidang Kesehatan	%	67.83	100	100	100	100	100
		Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	SPM Bidang Kesehatan	%	72.17	100	100	100	100	100
	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun.	Persentase RT yang Tidak Merokok di dalam rumah	Renstra Dinas Kesehatan	%	70	66.8	67	67.1	67.2	
	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi	SPM Bidang Kesehatan	%	63.37	100	100	100	100	100
3.6. Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas										
	Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas.	Accident Rate	Renstra Dinas Perhubungan		2.417	2.27	2.247	2.225	2.202	
3.7. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan										
	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern.	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern contraceptive prevalence rate / mCPR)	Renstra Dinas P3AP2KB	%	77.58	76,90	77,00	77,10	77,20	
		Persentase peserta KB aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Renstra Dinas P3AP2KB	%	39.35	39,15	39,17	39,20	39,22	
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed)	Renstra Dinas P3AP2KB	%	7.67	7.90	7.88	7.86	7.84	
	Total Fertility Rate (TFR).	TFR (Total Fertility Rate)	Renstra Dinas P3AP2KB	%	1.90	2.00	2.00	2.00	2.00	
3.8. Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif,										
	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Renstra Dinas Kesehatan	%	90.30	91.00	93.00	94.00	95.00	

TUJUAN GLOBAL 4. MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA

Kode Indikator	Indikator Metadata	Indikator Sleman	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar Baseline	Target Tahunan				
					Tahun 2021	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran										
	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat	Rata-rata lama sekolah	RPJMD Kab. Sleman	tahun	10.92	10.94	10.95	10.96	11.06	
	Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	SPM Bidang Pendidikan	%	NA	100	100	100	100	100
4.2. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas,										
	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	SPM Bidang Pendidikan	%	NA	100	100	100	100	100

4.5. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi										
	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/ SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7 s.d. 15 tahun	Renstra Dinas Pendidikan	%	98.35	98.7	98.7	98.7	98.71	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)	Renstra Dinas Pendidikan	%	NA	89.33	89.33	89.33	89.33	
4.a. Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.										
	Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir.	Persentase satuan pendidikan PAUD terakreditasi A	RPJMD Kab. Sleman	%	33.4	32.77	33.98	33.98	33.98	
		Persentase satuan pendidikan SD terakreditasi A	RPJMD Kab. Sleman	%	70	69.53	69.53	69.53	69.53	
		Persentase satuan pendidikan SMP terakreditasi A	RPJMD Kab. Sleman	%	80.51	82.08	82.08	82.08	82.08	
4.c. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan										
	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan	Persentase pemenuhan PTK pendidikan dasar berkualitas	Renstra Dinas Pendidikan	%	NA	93.97	93.98	93.98	93.99	

TUJUAN GLOBAL 5. MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN

Kode Indikator	Indikator Metadata	Indikator Sleman	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar Baseline	Target Tahunan				
					Tahun 2021	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana pun										
	Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.	Indeks pembangunan gender	RPJMD Kab. Sleman	nilai indeks	96.2	96.21	96.22	96.23	96.24	
		Persentase lembaga PUG (Pengarusutamaan Gender) yang aktif	RPJMD Kab. Sleman	%	100	100	100	100	100	
5.2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.										
	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15- 64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	RPJMD Kab. Sleman	%	100	100	100	100	100	
5.3. Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.										
	Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) seluruh wanita pada usia 15 - 49 tahun	RPJMD Kab. Sleman	%	24	23,20	23,30	23,40	23,50	

5.6. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population										
	Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan.	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern contraceptive prevalence rate / mCPR)	Renstra Dinas P3AP2KB	%	77.58	76,90	77,00	77,10	77,20	

TUJUAN GLOBAL 6. MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA

Kode Indikator	Indikator Metadata	Indikator Sleman	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar Baseline	Target Tahunan				
					Tahun 2021	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.1. Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua										
	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	Persentase Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan pokok Air Minum Sehari Hari	SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	%	100.00	100	100	100	100	100
		Persentase jumlah rumah tangga yg mendapatkan akses terhadap air minum melalui jaringan perpipaan terhadap jumlah rumah tangga di seluruh kabupaten	Renstra DPUPKP	%	20.60	21.75	22.55	23.35	24.15	
6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada										
	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.	Persentase rumah tangga yang menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Renstra Dinas kesehatan	%	NA	51	53	55	58	
		Persentase Edukasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) pada Rumah Tangga (RT)	RPJMD Kab. Sleman	%	87.08	85.5	85.8	86	86.5	
6.3. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah										
	Proporsi limbah cair rumah tangga dan industri cair yang diolah secara aman	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Renstra DLH	%	98.26	99.14	99.55	99.96	100	
		Persentase pengelolaan sampah	Renstra DLH	%	NA	56.71	57.02	57.33	57.64	
	Kualitas air permukaan sebagai air baku	Indeks kualitas air	RPJMD Kab. Sleman	nilai indeks	56.9	42	43	45	47	

TUJUAN GLOBAL 8. MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK

Kode Indikator	Indikator Metadata	Indikator Sleman	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar Baseline	Target Tahunan				
					Tahun 2021	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7% pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang										
	Laju pertumbuhan PDB per kapita	Pertumbuhan ekonomi	RPJMD Kab. Sleman	%	5.56	4,22 – 5,92	4,67 – 5,94	5,02 -5,96	5,31 – 5,98	
8.3. Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil,										
	Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin	Tingkat kesempatan kerja (TKK)	RPJMD Kab. Sleman	%	94.83	94.1	94.2	94.25	94.3	

		Rasio pelaku usaha mikro	RPJMD Kab. Sleman	%	11	11	11	11	11	
		Jumlah investor yang bermitra dengan UMKM	RPJMD Kab. Sleman	%	125	170	180	190	200	
8.5. Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi pemuda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan										
	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Tingkat pengangguran terbuka	RPJMD Kab. Sleman	%	5.17	5.9	5.8	5.75	5.7	
		Persentase peserta yang mendapatkan pekerjaan pasca pelatihan	RPJMD Kab. Sleman	%	46.20	27	28	29	30	
		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (di dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten	RPJMD Kab. Sleman	%	63.31	63.17	63.13	65.23	65.15	
8.8. Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal										
	Peningkatan kepatuhan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif) berdasarkan sumber tekstual ILO dan peraturan perundangundangan negara terkait	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	RPJMD Kab. Sleman	%	8.35	13,3	15	16,7	18,4	
	Jumlah wisatawan mancanegara.	Jumlah wisatawan mancanegara	RPJMD Kab. Sleman	orang	5,162	1,000	2,000	3,500	5,500	
	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Jumlah wisatawan nusantara	RPJMD Kab. Sleman	orang	1,723,256	2,750,000	4,000,000	6,000,000	9,000,000	
	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Pembelanjaan wisatawan Mancanegara	RPJMD Kab. Sleman	US \$	0	500	525	550	575	
		Pembelanjaan wisatawan Nusantara	RPJMD Kab. Sleman	Rupiah	752,232	1,000,000	1,500,000	1,750,000	2,000,000	

TUJUAN GLOBAL 9. MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI

Kode Indikator	Indikator Metadata	Indikator Sleman	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar Baseline	Target Tahunan				
					Tahun 2021	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.1. Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan										
	Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak.	Cakupan pembangunan prasarana dan sarana wilayah kondisi mantap yang mendukung pengembangan ekonomi	RPJMD Kab. Sleman	%	72.60	59.79	63.99	68.19	72.39	
	Kondisi mantap jalan nasional.	Persentase jalan mantap dan jembatan dalam kondisi baik >80%	RPJMD Kab. Sleman	%	84.00	83.21	83.41	83.61	83.81	
		Indeks kinerja lalu lintas dan angkutan jalan	RPJMD Kab. Sleman	nilai indeks	0.43	0,51	0,57	0,62	0,68	
		Rasio konektivitas kabupaten/kota	RPJMD Kab. Sleman	rasio	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	

TUJUAN GLOBAL 10. MENGURANGI KESENJANGAN INTRA DAN ANTARNEGARA

Kode	Indikator Metadata	Indikator Sleman	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar Baseline	Target Tahunan				
------	--------------------	------------------	-------------	--------	----------------------	----------------	--	--	--	--

Indikator					Tahun 2021	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.1. Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional										
	Rasio gini.	Indeks gini	RPJMD Kab. Sleman	nilai indeks	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	
	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Angka kemiskinan	RPJMD Kab.Sleman	%	8.64	6,83 - 7,33	6,81 - 7,13	6,79 - 6,98	6,77 - 6,83	
		Persentase KK miskin	RPJMD Kab.Sleman	%	9.10	8.00	7.80	7.65	7.50	
	Jumlah desa mandiri.	Indeks desa membangun kategori desa mandiri	RPJMD Kab.Sleman	desa	27.00	37.00	42.00	47.00	52.00	
10.2. Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang										
	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Cakupan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang mendapatkan perlindungan sosial dan jaminan sosial	Renstra Dinas Sosial	%	NA	100.00	100.00	100.00	100.00	
10.3. Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar										
	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	RPJMD Kab. Sleman	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
		Persentase anak korban kekerasan yang tertangani	RPJMD Kab. Sleman	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

TUJUAN GLOBAL 11. MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH, DAN BERKELANJUTAN

Kode Indikator	Indikator Metadata	Indikator Sleman	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar Baseline	Target Tahunan				
					Tahun 2021	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.1. Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan										
	Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani terhadap total luas permukiman kumuh seluruh kabupaten	RPJMD Kab. Sleman	%	8.85	49.99	66.66	83.32	100.00	
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Persentase penanganan RTLH diluar kawasan kumuh	RPJMD Kab. Sleman	%	8.29	23.38	31.17	38.96	46.76	
11.2. Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara										
	Proporsi kota dengan struktur partisipasi langsung masyarakat sipil dalam perencanaan dan manajemen kota yang berlangsung secara teratur dan demokratis	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	RPJMD Kab. Sleman	%	80.61	80.00	85.00	90.00	95.00	
11.6. Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota										
	Indeks Kualitas Udara	Indeks kualitas udara	RPJMD Kab. Sleman	Nilai indeks	83.77	86,66	86,66	86,66	88	
11.7. Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas										

	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua	Persentase luas RTH yang tersedia	RPJMD Kab. Sleman	%	7.034	7.034	7.035	7.036	7.037	
11.a. Mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah.										
	Jumlah negara yang memiliki kebijakan perkotaan nasional atau rencana pembangunan daerah yang (a) merespon dinamika penduduk; (b) memastikan keseimbangan perencanaan wilayah; dan (c) meningkatkan ruang fiskal daerah.	Jumlah kebijakan yang dilengkapi dokumen KLHS	DLH (Perda (RTRW dan RPJMD)	dokumen	2	2	2	2	2	2
11.c. Memberikan dukungan kepada negara-negara kurang berkembang, melalui bantuan keuangan dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tangguh, dengan memanfaatkan bahan lokal										
	Persentase Daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan menggunakan Material Lokal	Perda Bangunan Gedung	DPUPKP	perda	1	1	1	1	1	1

TUJUAN GLOBAL 12. MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN

Kode Indikator	Indikator Metadata	Indikator Sleman	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar Baseline	Target Tahunan				
					Tahun 2021	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.4. Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka										
	Persentase penurunan tingkat konsumsi perusak ozon dari baseline									
	(b) Proporsi limbah B3 yang ditangani / diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengolahannya	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten	RPJMD Kab. Sleman	%	NA	20.2	20.3	20.4	20.5	

TUJUAN GLOBAL 13. MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA

Kode Indikator	Indikator Metadata	Indikator Sleman	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar Baseline	Target Tahunan				
					Tahun 2021	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.1. Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara										
	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak langsung bencana per 100.000 orang	Indeks resiko bencana	RPJMD Kab. Sleman	nilai indeks	78.96	76.77	74.77	73.77	72.77	
		Jumlah kampung siaga yang terbentuk	RPJMD Kab. Sleman	kampung	15	20	22	24	26	
	Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030	Tersedianya Perda Penanggulangan Bencana	BPBD	dokumen	1	1	1	1	1	
13.3. Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim										

	Tingkat pengarusutamaan pendidikan warga negara global dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan ke dalam (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru dan (d) asesmen siswa	Persentase perolehan penghargaan bidang lingkungan hidup	RPJMD Kab. Sleman	%	75	75	75	75	75	
--	--	--	-------------------	---	----	----	----	----	----	--

TUJUAN GLOBAL 15. MELINDUNGI, MERESTORASI, DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLA HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN

Kode Indikator	Indikator Metadata	Indikator Sleman	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar Baseline	Target Tahunan				
					Tahun 2021	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.1. Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan										
	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan	Indeks kualitas lahan	RPJMD Kab. Sleman	nilai indeks	30.52	30.52	30.52	30.52	30.54	
15.2. Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan aforestasi										
	Kemajuan menuju pengelolaan hutan lestari	Ketersediaan data kualitas lingkungan dan konservasi lingkungan	RPJMD Kab. Sleman	%	100	100	100	100	100	
15.3. Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan, dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan										
	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan	Persentase Kondisi Infrastruktur Sungai, Embung, Mata Air dan bangunan Penampung Air Lainnya dalam Kondisi Baik	Renstra DPUPKP	%	NA	71.4	71.6	71.8	72	
15.4. Melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan, pada tahun 2020, melindungi dan mencegah lenyapnya spesies yang										
	Indeks Daftar Merah (Red-list index)	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditangani	RPJMD Kab. Sleman	%	100	100	100	100	100	

TUJUAN GLOBAL 16. MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA DAN MEMBANGUN

Kode Indikator	Indikator Metadata	Indikator Sleman	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar Baseline	Target Tahunan				
					Tahun 2021	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.1. Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan angka kematian dimana pun										
	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	Angka kejadian konflik sosial	RPJMD Kab. Sleman	kejadian	0	0	0	0	0	
		Cakupan pengendalian gangguan ketentraman, ketertiban, penegakan perda, dan peningkatan kapasitas perlindungan masyarakat	RPJMD Kab. Sleman	kalurahan	67	57.3	59.3	61.3	62.3	
16.2. Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyalahgunaan terhadap anak										
	Proporsi anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan atau agresi psikologis dari pengasuh dalam sebulan terakhir	Persentase anak korban kekerasan yang tertangani	RPJMD Kab. Sleman	%	100	100	100	100	100	
16.5. Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.										

	Proporsi pelaku usaha yang paling tidak memiliki kontak dengan petugas pemerintah dan yang membayar suap kepada seorang petugas, atau diminta untuk membayar suap oleh petugas-petugas, selama 12 bulan terakhir	Tingkat capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Kabupaten	RPJMD Kab. Sleman	%	89.39	89	91	93	95	
		Persentase nilai hasil audit kinerja perangkat daerah dengan kategori Sangat Baik	RPJMD Kab. Sleman	%	50	85	90	95	100	
16.6. Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat										
	Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini WTP	Indeks pengelolaan keuangan daerah	RPJMD Kab. Sleman	nilai indeks	B	B	B	B	B	
	Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP \geq B	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	RPJMD Kab. Sleman	predikat	A (81,73)	A (81,70)	A (81,78)	A (81,82)	A (81,84)	
	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks RB \geq B	Indeks reformasi birokrasi	RPJMD Kab. Sleman	predikat	BB (76,77)					
	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	RPJMD Kab. Sleman	nilai indeks	83.37	82.09	82.32	82.48	82.56	
	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.	Status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	RPJMD Kab. Sleman	%	NA	Sangat Tinggi 4,2100	Sangat Tinggi 4,2150	Sangat Tinggi 4,2200	Sangat Tinggi 4,2250	
16.9. Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.										
	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	Cakupan dokumen akta kelahiran	RPJMD Kab. Sleman	%	100	100	100	100	100	
		Cakupan dokumen KTP-el	RPJMD Kab. Sleman	%	99.5	99.84	99.85	99.86	99.87	
		Cakupan dokumen KIA	RPJMD Kab. Sleman	%	70.69	70	75	80	85	
16.10. Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.										
	Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	RPJMD Kab. Sleman	%	70	80	85	90	95	

TUJUAN GLOBAL 17. MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Kode Indikator	Indikator Metadata	Indikator Sleman	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar Baseline	Target Tahunan				
					Tahun 2021	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.1. Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya										
	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Persentase peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah	RPJMD Kab. Sleman	%	1.81	7,67	8,85	9,39	10,03	
17.6. Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan										
	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)	Persentase kecamatan yang terkoneksi fiber optik	Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	100	

		Persentase ketersediaan infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	RPJMD Kab. Sleman	%	97.14	85	85	90	95	
17.11. Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2021										
	Pertumbuhan ekspor produk non migas	Nilai ekspor	RPJMD Kab. Sleman	US\$	61025886.17	48848000	50548000	52248000	53947000	

Matriks 1: Rencana Capaian Kabupaten Bantul Untuk Setiap Indikator SDGs 2023 - 2027

Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Bantul	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Angka Dasar (baseline) (7)	Target Tahunan (8)				
					2021	2023	2024	2025	2026	2027
1.2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam									
	Tingkat Kemiskinan		RPJMD Bantul 21-26	Persen	13.5	12.90	12.50	12.05	11.50	-
	Persentase anak berusia 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap		Dinkes Bantul	Persen	97	100	100	100	100	-
	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi		Dinkes Bantul	Persen	100	100	100	100	100	-
	Persentase penurunan atau kenaikan Angka Gizi Buruk	Prevalensi Stunting	RPJMD Bantul	Persen	9	8.5	8	7.5	7	-
	Persentase Penduduk DIY yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Terganggu Aktivitas		Inkesra, BPS							-
	Distribusi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki		Inkesra, BPS							-
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 16-18 tahun									-
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun, Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Tahun		BPS, statistik strategis							-
	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman	Penduduk berakses air minum layak	RPJMD Bantul	Persen	82.36	84.38	85.19	85.98	86.76	-
	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak dan aman	Penduduk berakses sanitasi yang layak	RPJMD Bantul	Persen	84.83	90.89	93.92	96.95	100	-
	Persentase Rumah Tangga menurut Kako dan Luas Hunian per kapita > 7,2 m2		BPS, statistik strategis	-	-	-	-	-	-	-
	Distribusi Rumah Tangga di DIY menurut Bahan Bakar Utama untuk Memasak (LPG 3kg)		Inkesra, BPS	-	-	-	-	-	-	-
	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak / Invers Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	RPJMD Bantul	Persen	96	96	96.1	96.2	96.3	-
	Persentase PPKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dan meningkat keberfungsian sosialnya	Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	RPJMD Bantul	Persen	50	60	70	75	80	-
	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		Dinkes Bantul	Persen	88	95	95	95	95	-
	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Disnaker Bantul	Persen	79.64	81	82	83	84	-
	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman	Penduduk berakses air minum layak	RPJMD Bantul	Persen	82.36	84.38	85.19	85.98	86.76	-
	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak dan aman	Penduduk berakses sanitasi yang layak	RPJMD Bantul	Persen	84.83	90.89	93.92	96.95	100	-
	Proporsi rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar menurut provinsi (Persen): Indeks pada Fasilitas Kesehatan Dasar	Cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin	Dinkes Bantul	Persen	100	100	100	100	100	-

	Presentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Milik Sendiri / Proporsi rumah tangga dengan status kepemilikan rumah milik dan sewa/kontrak menurut provinsi		BPS, Statistik strategis / BPS Pusat, SDGs	-	-	-	-	-	-	-
	Proporsi rumah tangga dengan status kepemilikan rumah milik dan sewa/kontrak menurut provinsi		BPS Pusat, SDGs	-	-	-	-	-	-	-
	RPB Kabupaten/Kota		RPJMD Bantul	Resiko	187,000	-	-	-	-	-
2.1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi									
	Prevalensi ketidakcukupan Konsumsi Pangan	Meningkatkan pola konsumsi pangan	RPJMD Bantul	Angka	91.4	90.4	90.8	91.2	91.2	-
	Jumlah Desa Rawan Pangan	Persentase Desa Rentan Rawan Pangan	RPJMD Bantul	Persen	24	21.33	20	18.67	17.33	-
2.2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk									
	Prevalensi Stunting		RPJMD Bantul	Persen	9	8.5	8	7.5	7	-
	Prevalensi ketidakcukupan gizi (underweight) pada anak	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak Balita	Dinkes	Persen	7.1	8.61	8.6	8.59	8.58	-
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH), berdasarkan standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.100 kkal/kapita/hari (skor)	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	RPJMD Bantul	Persen	91.4	90.8	91	91.2	91.2	-
	Prevalensi anemia pada ibu hamil		Dinkes	Persen	16.7	16.4	16.3	16.2	16.1	-
	Peningkatan nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam PDRB (ADHK)	Pertumbuhan produksi sektor pertanian	Dinas Ketahanan Pangan	Persen	0.98	2.12	2.87	3.64	4.37	-
	Rata-rata persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan	Pertumbuhan produksi sektor pertanian	Dinas Ketahanan Pangan	Persen	0.98	2.12	2.87	3.64	4.37	-
	Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah									
2.3	Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk									
	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta	Proporsi kasus kusta yang ditemukan dan diobati	Dinkes Bantul	persen	100	100	100	100	100	-
	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis	Angka Pencapaian Pengobatan Penyakit Filariasis 100%	Dinkes Bantul	persen	100	100	100	100	100	-
3.4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta									
	Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas menurut apakah selama sebulan terakhir merokok tembakau				-	-	-	-	-	-
	Jumlah Penderita Hipertensi	Prevalensi Hipertensi	Dinkes Bantul	persen	3.85	3.50	3.25	3.15	3.0	-
3.6	Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas.									
	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas: Meninggal Dunia	Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas	RPJMD Bantul	persen	1.83	3.66	5.49	7.32	9.15	-
3.7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan									

	Persentase pemakaian kontrasepsi (modern contraceptive prevalence rate/ CPR)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)			77.2	77.2	77.2	77.2	77.2	-
	Unmet Need kebutuhan ber-KB	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	RPJMD Bantul	persen						
	ASFR 15-19 tahun				9.16	10.03	9.9	9.79	9.73	-
	Total Fertility Rate (TFR)	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate (TFR))	Dp3appkb	persen	1.67	1.65	1.64	1.63	1.62	-
3.8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses									
	Unmet Need Pelayanan Kesehatan Menurut Provinsi	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	RPJMD Bantul		9.16	10.03	9.9	9.79	9.73	-
	Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		Dinkes Bantul	Persen	88	95	95	95	95	-
3.a	Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.									
	Persentase Merokok Pada Penduduk Umur ≥ 15 Tahun Menurut Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.b	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara									
	Anak kurang dari 1 tahun mendapat imunisasi lengkap	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	Dinkes Bantul	persen	100	100	100	100	100	-
4.1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara,									
4.1.1.(a)	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) di kelas 5 yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam:									
	Nilai rata-rata hasil PISA: Membaca	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nilai rata-rata hasil PISA: Matematika	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat									
	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan dan Provinsi: SD/ Sederajat		Dikpora		100	-	-	-	-	-
	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan dan Provinsi: SMP/ Sederajat		Dikpora	-	100	-	-	-	-	-
	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan dan Provinsi: SMA/ Sederajat		-	-	-	-	-	-	-	-
	Angka Putus Sekolah SD/MI		Dikpora	Persen	0.02	-	-	-	-	-
	Angka Putus Sekolah SMP/MTs		Dikpora	Persen	0.02	-	-	-	-	-
	Angka Putus Sekolah SMA/MA									
4.2	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini,									
	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar) menurut provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi,									
4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin									

	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)		-	Persen	20	-	-	-	-	-
4.4	Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan									
	Proporsi Remaja Dan Dewasa Usia 15-24 Tahun Dengan Keterampilan Teknologi Informasi Dan Komputer (TIK) Menurut Provinsi	Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	-	-	-	2.85	-	-	-	-
	Proporsi Remaja Dan Dewasa Usia 15-59 Tahun Dengan Keterampilan Teknologi Informasi Dan Komputer (TIK) Menurut Provinsi	Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	-	-	-	2.85	-	-	-	-
4.5	Menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi									
	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-Laki Menurut Provinsi		-	-	-	-	-	-	-	-
	APK SMP		-	-	104.45	-	-	-	-	-
	Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat		-	Persen	20	-	-	-	-	-
	Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB		-	-	-	-	-	-	-	-
4.6	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi									
	Angka Melek Huruf Penduduk 15 Tahun Ke atas		-	Persen	94.85	-	-	-	-	-
4.c	Pada tahun 2030, secara substansial meningkatkan penyediaan guru-guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional untuk pelatihan									
	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang kompeten	Persentase peningkatan kompetensi guru/kepala sekolah SD/MI dalam pembelajaran	Dikpora	orang	57	-	-	-	-	-
		Persentase peningkatan kompetensi guru/kepala sekolah SMP/MTs dalam pembelajaran	Dikpora	orang	54	-	-	-	-	-
5.2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi									
	Jumlah kasus perkosaan dan kesusilaan	UPT PPPA	orang		18	-	-	-	-	-
5.3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.									
	Rata-rata usia pernikahan pertama perempuan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan									
	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	BPS Bantul	Persen		8.89	-	-	-	-	-
	Persentase Keterwakilan perempuan dalam politik (DPRD, Bupati/walikota dan Bamuskal)	BPS Bantul	Persen		8.89	-	-	-	-	-
	Tingkat Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial menurut provinsi									
5.b	Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan									
	Persentase Penduduk 5 Tahun Ke atas menurut Apakah Menggunakan Telepon Selular dan Memiliki/menguasai Telepon Selular dalam 3 Bulan Terakhir: Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Memiliki/Menguasai Telepon Seluler(HP) dalam 3 Bulan Terakhir: Perempuan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Memiliki/Menguasai Telepon Seluler(HP) dalam 3 Bulan Terakhir: Laki-laki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.										
	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman	Penduduk berakses air m	DPUPKP	Persen	82.36%	84.38%	85.19%	85.98%	86.76%		
6.2.	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di										
	Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Fasilitas Cuci Tangan Dengan Sabun Dan Air Menurut Provinsi										
	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak dan aman	Penduduk berakses sanitasi layak	DPUPKP	Persen	84.83%	87.86%	90.89%	93.92%	96.95%	100%	
6.3.	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan										
	Indeks Kualitas Air Sungai		RPJMD	Persen	51.8	-	-	-	-	-	-
6.5.	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas sesuai kepantasan.										
	Persentase penyediaan infrastruktur sumber daya air	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	DPUPKP	Persen	29.93	30	35	40	45		
6.6.	Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.										
	Pengurangan luasan genangan	Data Penanganan Banjir di Kabupaten Bantul	DPUPKP	Persen	44.6	-	-	-	-	-	-
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan	RPJMD	Persen	n/a	30	32	34	36		
	Indeks Kualitas Air Sungai		RPJMD	Persen	51.8	-	-	-	-	-	-
7.1	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua										
	Persentase Rumah tangga berakses listrik	BPS	RT		359,267	-	-	-	-	-	-
	Penjualan tenaga listrik PLN per kelompok pelanggan	BPS	Kwh		744,181,164.65	-	-	-	-	-	-
7.b	Pada tahun 2030, memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk penyediaan layanan energi modern dan berkelanjutan bagi										
	Kapasitas terpasang pembangkit listrik dari energi terbarukan (dalam watt per kapita)	BPS	Kwh		500,557.86	-	-	-	-	-	-
	Data Jenis Energi Baru Terbarukan										
8.2	Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor ya										
	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja										
8.3	Mengalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi,										
	Proporsi Lapangan Kerja Informal Menurut Provinsi										
	UMKM dengan pinjaman bank (KUR dan pinjaman komersil)										
8.5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan										
	Upah Rata - Rata Per Jam Pekerja Menurut Provinsi										
	Tingkat Pengangguran terbuka		RPJMD	Persen	4.06	3.5	3.4	3.3	3.2		
	Tingkat Setengah Pengangguran Menurut Provinsi		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
8.6	Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.										
	Penduduk Usia Kerja Umur 15 - 24 Tahun yang Tidak Sedang Bekerja, Tidak Sedang Bersekolah, dan Tidak Sedang Mengikuti Pelatihan	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Disnakertrans	Persen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
8.7	Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan										

	Persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja menurut provinsi		Disnakertrans		NA	NA	NA	NA	NA	
8.8	Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran,									
	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kerja dan norma K3		-		-	-	-	-	-	-
8.9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempro									
	Laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB									
	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB									
	Wisatawan Mancanegara (Wisman)									
	Wisatawan Nusantara (Wisnus)		Dispar	orang	1,870,000	2,262,700	2,488,970	2,737,867	3,011,654	
8.10	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi sem									
	Mesin ATM Regional		-		-	-	-	-	-	-
	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit									
9.1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung									
	Persentase kemandapan jalan		RPJMD	Persen	78.02	78.84	79.25	79.66	80.07	-
	Jumlah Penumpang Domestik berdasarkan Moda Transportasi Pesawat Terbang menurut provinsi, Jumlah Penumpang Internasional berdasarkan Moda Transportasi Pesawat Terbang menurut provinsi	Jumlah Penumpang Angkutan Umum di Kabupaten Bantul	RPJMD	Orang	285,506	-	-	-	-	-
	Jumlah bandara				-	-	-	-	-	-
9.2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja									
	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB				-	-	-	-	-	-
	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur per kapita	sektor industri manufaktu	Disnakertrans	Persen	21.7	-	-	-	-	-
	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur									
	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur		Disnakertrans	Persen	18.10%	20.74%	21.80%	22.82%	23.90%	-
9.b	Mendukung pengembangan teknologi domestik, riset dan inovasi di negara-negara berkembang, termasuk dengan memastikan lingkungan kebijakan									
	Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi	-	-		-	-	-	-	-	-
10.1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada ting									
	Indeks Gini		RPJMD Bantul 21-26	Persen	0.42	-	-	-	-	-
	Tingkat Kemiskinan		RPJMD Bantul 21-26	Persen	13.5	12.90	12.50	12.05	11.50	-
	Jumlah desa tertinggal.				-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Jumlah desa Mandiri	Cakupan Pengembangan Desa Mandiri Pangan			30.67	42.67	48	53.33	58.67	-
	Jumlah daerah tertinggal.				-	-	-	-	-	-
10.2	Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku									
	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut provinsi				-	-	-	-	-	-
10.3	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif,									
	IDI Aspek Kebebasan				-	-	-	-	-	-
10.4	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.									
	Jumlah tenaga kerja yang terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan		Disnakertrans	Persen	79.64%	81%	82%	83%	84%	-
11.1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.									
	Persentase rumah tangga yang menempati tempat tinggal layak huni dan terjangkau / Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Dan Terjangkau Menurut Provinsi	Persentase rumah layak huni	RPJMD	Persen	98.75	99.39	99.6	99.8	100	-
11.2.	Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua,									

	Persentase rumah tangga yang memiliki akses nyaman (jarak 0.5 km) ke transportasi umum menurut provinsi									
	Jumlah Penumpang Angkutan Umum		RPJMD	orang	285.506.00	-	-	-	-	-
11.5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi									
	Indeks Risiko Bencana (IRB)		Satu Data bantu	Persen	102.27	-	-	-	-	-
11.6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas									
	Persentase sampah yang terkelola dan ketersediaan alat berat pengelola sampah yang beroperasi	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	RPJMD	Persen	20.91%	21.78%	22.37%	22.81%	-	-
	Terlaksananya penanganan sampah di TPA Regional									
	Indeks Kualitas Udara		RPJMD	Persen	90	87.5	88	88.5	89	
11.7	Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak,									
	Proporsi Penduduk Yang Menjadi Korban Kejahatan Kekerasan Dalam 12 Bulan Terakhir Menurut Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.a	Mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan									
	Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah dilengkapi KLHS									
11.b	Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan									
	Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki RPB			Kota/kabupaten	5					
12.6	Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktik-praktik berkelanjutan dan									
	Jumlah perusahaan yang wajib memiliki dokumen lingkungan dan telah diverifikasi BLH DIY	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.8	Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan									
	Terlaksananya pembinaan kelompok masyarakat (Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara									
	RPB DIY & RAD PRB DIY	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki RPB	-	Kabupaten/kota	5	-	-	-	-	-	-
13.2	Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional									
	Emisi bersih GRK (tCO ₂ -eq) di Daerah Istimewa Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penurunan emisi GRK	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3	Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan									
	Terlaksananya pembinaan kelompok masyarakat (Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.2	Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang									
	Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil diluar minyak dan gas bumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.5	Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan b									
	Persentase target kawasan konservasi yang ditetapkan	RPD DIY	Persen	0	25	50	75	100	-	-
	Persentase status pengelolaan kawasan konservasi yang telah ditetapkan	RPD DIY	Persen	0	25	50	75	100	-	-
14.6	Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan									
	Persentase penurunan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.1	Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya,									

	Kawasan Hutan (luasan)	Kawasan hutan negara	RPD DIY	Ha	19,035.09	-	-	-	-	
	Luas Kawasan Konservasi	Luas Kawasan Konservasi Perairan	DKP	Ha	23,40 juta ha	-	26,90 juta ha	-	-	
15.2	Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang									
	Persentase keterwujudan pengelolaan hutan lestari		RPD DIY	Persen	N/A	68.60%	77.98%	88.13%	100%	
	Persentase kesesuaian pengelolaan hutan	Pengelolaan hutan mangunan	RPD DIY	ha	1.037.791.000	-	-	-	-	
15.3	Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir,									
	Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis		RPD DIY	Persen	0.29	-	-	-	-	
15.4	Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan termasuk keanekaragaman hayatinya untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan									
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)		RPJMD	Persen	61.2	59	61	63	65	
16.1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.									
	Jumlah Kasus Pembunuhan		dataku	kasus	26					
	Korban Pertikaian Antar Warga/Unjuk Rasa		-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Kasus Penganiayaan		-	-	-	-	-	-	-	
16.5	Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.									
	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)									
16.6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.									
	Opini BPK		-	-	-	-	-	-	-	
	Nilai akuntabilitas pemerintah (AKIP)		-	-	-	-	-	-	-	
	Indeks Reformasi Birokrasi		RPD DIY	Persen	81.27				84.38	
16.7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan									
	Keterlibatan Perempuan di Parlemen		BPS Bantul	Persen	8.89	-	-	-	-	
	Indeks Demokrasi Indonesia		RPD DIY	Persen	70.54	-	-	-	-	
	Indeks Demokrasi Aspek Lembaga Demokrasi		-	-	-	-	-	-	-	
	Indeks Demokrasi Aspek Kebebasan Sipil		RPD DIY	Persen	70.54	-	-	-	-	
16.9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.									
	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang lahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil Menurut Provinsi	Jumlah penerbitan akta kelahiran/ jumlah anak usia 0-5 tahun x 100%			99.92	99.93	99.94	99.95	99.96	
	Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Dengan Kepemilikan Akta Lahir (40% Terbawah), Menurut Provinsi (Persen)		Disdukcapil	Persen	98.81	98.83	98.84	98.85	98.86	
	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran Menurut Provinsi (Persen)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran			98.81	98.83	98.84	98.85	98.86	
16.10	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.									
	Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM									
17.1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan k									
	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.		-	-	-	-	-	-	-	
17.6	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses									
	Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (fixed broadband) terhadap total rumah tangga, menurut provinsi									
17.8	Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara									
	Nilai ekspor	RPJMD	USD		122,334,077.34	-	-	-	-	
17.17	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber									
	Buku biru bappenas		-	-	-	-	-	-	-	

Matriks 1: Rencana Capaian Kabupaten Kulon Progo Untuk Setiap Indikator SDGs 2023 - 2027

Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Kulon Progo	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Angka Dasar (baseline) (7)	Target Tahunan (8)				
					2021	2023	2024	2025	2026	2027
Target SDGs (2):										
1.2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi,									
1.2.1	Tingkat Kemiskinan	Angka Kemiskinan	RPD Tahun 2023-2026	Persen	18.38	16.92-17.14	16.34-16.56	15.6-15.98	15.08-15.40	-
1.2.2	1. Persentase anak berusia 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak berusia 12-23 bulan (baduta)	Dinkes	Persen	95.53	95	95	95	95	-
	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	Cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi	Dinkes	Persen	97.96	95	95	95	95	-
	Persentase penurunan atau kenaikan Angka Gizi Buruk	Prevalensi Stunting	RPD Tahun 2023-2026	Persen	10.35	12	-	-	-	-
	Persentase Penduduk DIY yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Terganggu Aktivitas	Persentase capaian pelayanan hipertensi sesuai standar	RPD Tahun 2023-2026	Persen	17.73	61.00	62.00	63.00	64.00	-
		Persentase capaian pelayanan HIV sesuai standar	RPD Tahun 2023-2026	Persen	53.69	61.00	62.01	63.00	64.01	-
		Persentase capaian pelayanan TB sesuai standar	RPD Tahun 2023-2026	Persen	72.93	73.48	74.66	75.84	77.02	-
		Persentase capaian pelayanan DM sesuai standar	RPD Tahun 2023-2026	Persen	38.13	61.00	62.00	63.00	64.00	-
	Distribusi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki		Inkesra, BPS							-
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 16-18 tahun									-
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun, Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Tahun	Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar	RPD Tahun 2023-2026	Persen	93.72	93.8	93.88	93.96	94.04	-
		Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama	RPD Tahun 2023-2026	Persen	95.22	95.42	95.57	95.73	95.89	-
	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman	Rumah tangga berakses air minum layak	RPD Tahun 2023-2026	Persen	93.62	94.12	94.21	94.29	94.35	-
	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak dan aman	Rumah tangga berakses sanitasi yang layak	RPD Tahun 2023-2026	Persen	88.42	88.66	88.71	88.8	88.92	-
	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak / Invers Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	Jumlah Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran usia 0-18 tahun	RPD Tahun 2023-2026	Jiwa	110.743	105.960	105.700	105.715	105.730	-
	Persentase PPKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dan meningkat keberfungsian sosialnya									-
	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Cakupan JKN	Dinkes	Persen	92.68	97	98	-	-	-
	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan									-
	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman	Rumah tangga berakses air minum layak	RPD 2023-2026	Persen	93.62	94.12	94.21	94.29	94.35	-
	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak dan aman	Rumah tangga berakses sanitasi yang layak	RPD 2023-2026	Persen	88.42	88.66	88.71	88.8	88.92	-
	Proporsi rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar menurut provinsi (Persen): Indeks pada Fasilitas Kesehatan Dasar									-
1.5	RPB Kabupaten/Kota	Prosentase Penanggulangan Bencana	RPD 2023-2026	Persen	56.21	68.05	78.41	88.09	100	-
2.1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi,									
	Prevalensi ketidakcukupan Konsumsi Pangan	Meningkatkan pola konsumsi pangan								-
	Jumlah Desa Rawan Pangan	Persentase Desa/Kalurahan Rentan Pangan	RPD 2023-2026	Persen	#N/A	4	4	3	3	-
2.2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di									

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

	Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting	RPD Tahun 2023-2026	Persen	10,35	12	-	-	-	-
	Prevalensi ketidakcukupan gizi (underweight) pada anak	capaian pelayanan balita	Renstra Dinkes	Persen		90,46	90,46	90,46	90,46	-
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH), berdasarkan standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.100 kkal/kapita/hari (skor)	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	RPD 2023-2026	Persen	92,80	93,50	93,70	94,00	94,20	-
	Prevalensi anemia pada ibu hamil	capaian pelayanan ibu hamil	Renstra Dinkes	Persen	100	100	100	100	100	-
	Peningkatan nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam PDRB (ADHK)	Peningkatan nilai sub sektor pertanian	Dinas Pertanian dan Pang	nilai (juta rupiah)	19860,86	606,49-18011	4873,91-20959,	260,68-23749	288,57-24076,2	
	Rata-rata persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan	Pertumbuhan produksi sektor pertanian	Dinas Pertanian dan Pang	Persen	1,62	1,24-1,42	1,16-1,63	1,72-1,82	1,69-1,81	
	Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah									
2.3	Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani,									
3.1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup									
3.1.1	Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka Kematian Ibu	RPD Tahun 2023-2026	Per 100.000 Kelahiran Hidup	222.17	145.08	117.23	94.73	76.55	-
3.2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal									
3.2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Angka Kematian Bayi	RPD Tahun 2023-2026	Per 1.000 Kelahiran Hidup	10.00	7.48	7.33	7.17	7.01	-
3.3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit m									
3.3.3	Kejadian Malaria per 1.000 orang (ada di metadata tapi tidak di RAN)	Angka Kejadian Malaria	RPD Tahun 2023-2026	Per 100.000 penduduk	3.613					
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Jumlah Desa tidak memiliki kasus indogenous Malaria	RPD Tahun 2023-2026	Desa	88					
3.3.5	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta									
4.1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang									
4.1.1.(a)	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) di kelas 5 yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam:									
	Nilai rata-rata hasil PISA: Membaca	Rata-rata nilai kemampuan literasi siswa SD berdasarkan hasil asesmen nasional	RPD Tahun 2023-2026	Nilai	1.85	2.05	2.15	2.25	2.35	-
	Nilai rata-rata hasil PISA: Matematika	Rata-rata nilai kemampuan numerasi siswa SD berdasarkan hasil asesmen nasional	RPD Tahun 2023-2027	Nilai	1.63	1.83	1.93	2.03	2.13	-
	Proporsi anak-anak dan remaja: (c) di usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam:									
	(i) membaca	Rata-rata nilai kemampuan literasi siswa SMP berdasarkan hasil asesmen nasional	RPD Tahun 2023-2026	Nilai	1.85	2.05	2.15	2.25	2.35	-
	(ii) matematika	Rata-rata nilai kemampuan numerasi siswa SMP berdasarkan hasil asesmen nasional	RPD Tahun 2023-2027	Nilai	1.73	1.93	2.03	2.13	2.23	-
4.1.2	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat									
	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan dan Provinsi: SD/ Sederajat	Angka Kelulusan SD	RPD Tahun 2023-2026	Persen	100	100	100	100	100	-
	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan dan Provinsi: SMP/ Sederajat	Angka Kelulusan SMP	RPD Tahun 2023-2026	Persen	100	100	100	100	100	-
	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan dan Provinsi: SMA/ Sederajat		-	-	-	-	-	-	-	-
	Angka Putus Sekolah SD/MI	Angka Putus Sekolah SD	RPD Tahun 2023-2026	Orang	1	0	0	0	0	-
	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	Angka Putus Sekolah SMP	RPD Tahun 2023-2026	Orang	6	0	0	0	0	-
	Angka Putus Sekolah SMA/MA									
4.2	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-									
	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar) menurut provinsi	Angka Partisipasi PAUD	RPD Tahun 2023-2026	Nilai	63.04	64.91	65.09	65.22	65.35	-
4.3	Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang									

4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin										
	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)		-	Persen	20	-	-	-	-	-	-
4.4	Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk										
	Proporsi Remaja Dan Dewasa Usia 15-24 Tahun Dengan Keterampilan Teknologi Informasi Dan Komputer (TIK) Menurut Provinsi		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Proporsi Remaja Dan Dewasa Usia 15-59 Tahun Dengan Keterampilan Teknologi Informasi Dan Komputer (TIK) Menurut Provinsi		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk										
	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki-Laki Menurut Provinsi		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	APK SMP	Angka Partisipasi Kasar SLTP/MTs	RPD Tahun 2023-2026	Persen	98.53	-	-	-	-	-	-
	Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat		-	Persen	20	-	-	-	-	-	-
	Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi										
	Angka Melek Huruf Penduduk 15 Tahun Ke atas	Angka Melek Huruf	RPD Tahun 2023-2026	Persen	95.37	95.47	95.52	95.57	95.62		
4.c	Pada tahun 2030, secara substansial meningkatkan penyediaan guru-guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional untuk pelatihan guru di negaranegara										
	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang kompeten	Indeks Peningkatan Kapasitas Ketenagaan	RPD Tahun 2023-2026	Nilai	86.43	86.8	86.98	87.15	87.31		
5.2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi										
5.2.1	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	RPD Tahun 2023-2026	Kasus	113	48	46	44	42	-	-
5.2.2	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	RPD Tahun 2023-2026	Kasus	113	48	46	44	42	-	-
5.3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.										
	Rata-rata usia pernikahan pertama perempuan		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi	Kasus Pernikahan Usia Dini Perempuan <21 tahun	RPD Tahun 2023-2026	Kasus	191	-	-	-	-	-	-
5.5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan										
	Persentase Keterwakilan perempuan dalam politik (DPRD, Bupati/walikota dan Bamuskal)	Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo Periode 2019	RPD Tahun 2023-2026	Persen	20	-	-	-	-	-	-
	Tingkat Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial menurut provinsi	Jabatan Struktural	RPD Tahun 2023-2026	Persen	40,10						
5.b	Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.										
	Persentase Penduduk 5 Tahun Ke atas menurut Apakah Menggunakan Telepon Selular dan Memiliki/menguasai Telepon Selular dalam 3 Bulan Terakhir: Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Memiliki/Menguasai Telepon Seluler(HP) dalam 3 Bulan Terakhir: Perempuan		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Memiliki/Menguasai Telepon Seluler(HP) dalam 3 Bulan Terakhir: Laki-laki		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.										
	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman	Rumah tangga berakses air minum layak	RPD Tahun 2023-2026	Persen	93.62	94.12	94.21	94.29	94.35		
6.2.	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka,										
	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak dan aman	Rumah tangga berakses sanitasi yang layak	RPD Tahun 2023-2026	Persen	88.42	88.66	88.71	88.8	88.92	100%	

6.3.	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya,									
	Indeks Kualitas Air Sungai	Indeks Kualitas Air	RPD Tahun 2023-2026	Nilai		38		35,5	36	36,5
6.5.	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas sesuai kepastasan.									
	Persentase penyediaan infrastruktur sumber daya air	Indeks ketersediaan air baku, peningkatan pelayanan irigasi, dan drainase pengairan dalam kondisi baik	RPD Tahun 2023-2026	Persen		85,58	86,76	86,77	86,95	87,28
6.6.	Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.									
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan	RPD Tahun 2023-2026	Persen		74,12	64,56	64,56	64,56	64,57
	Indeks Kualitas Air Sungai	Indeks Kualitas Air	RPD Tahun 2023-2026	Nilai		38	35	35,5	36	36,5
7.1	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua									
	Persentase Rumah tangga berakses listrik	Jumlah pelanggan listrik di Kulon Progo	BPS	Pelanggan		139,595	-	-	-	-
	Penjualan tenaga listrik PLN per kelompok pelanggan					-	-	-	-	-
7.b	Pada tahun 2030, memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk penyediaan layanan energi modern dan berkelanjutan bagi semua negara-negara berkembang,									
	Kapasitas terpasang pembangkit listrik dari energi terbarukan (dalam watt per kapita)					-	-	-	-	-
	Data Jenis Energi Baru Terbarukan					-	-	-	-	-
8.1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kur									
	Laju pertumbuhan PDB per kapita	Laju pertumbuhan ekonomi	RPD 2023-2026	Persen	4,9	4,07	5,21	4,33	4,15	-
	PDB per kapita	Pendapatan perkapita penduduk (ADHB)	RPD 2023-2026	juta rupiah	28,07	30,67	32,27	33,67	35,07	-
8.2	Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tin									
	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja									
8.3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi									
	Proporsi Lapangan Kerja Informal Menurut Provinsi					-	-	-	-	-
	UMKM dengan pinjaman bank (KUR dan pinjaman komersil)					-	-	-	-	-
8.5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan									
	Upah Rata - Rata Per Jam Pekerja Menurut Provinsi	Upah Minimum Kabupaten Kulon Progo	BPS	Rp		1770000	-	-	-	-
	Tingkat Pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	RPD 2023-2026	Persen	3,69	2,64 - 3,42	2,13 - 3,17	2,08 - 2,92	2 - 2,67	
	Tingkat Setengah Pengangguran Menurut Provinsi		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
8.6	Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.									
	Penduduk Usia Kerja Umur 15 - 24 Tahun yang Tidak Sedang Bekerja, Tidak Sedang Bersekolah, dan Tidak Sedang Mengikuti Pelatihan	Tingkat Pengangguran Terbuka	RPD 2023-2026	Persen		3,69	2,64 - 3,42	2,13 - 3,17	2,08 - 2,92	2 - 2,67
8.7	Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga									
	Persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja menurut provinsi		Disnakertrans			NA	NA	NA	NA	NA
8.8	Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran									
	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kerja dan norma K3	Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	RPD 2023-2026	perusahaan	-	149		152	155	160
8.9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk									
	Laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB	Laju pertumbuhan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	BPS	persen		6,6-8,6	8,87-9,7	9,68-10,4	6,7-11,04	
	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	Proporsi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDB	BPS	persen		3,5-3,4	3,4-3,3	3,3-3,2	3,3-3,2	
	Wisatawan Mancanegara (Wisman)	Kunjungan Wisatawan	Dispar	orang	909,901	2,407,136	2.621.067	2.835.041	3.068.004	
8.10	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.									
	Mesin ATM Regional					-	-	-	-	-
	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit									
9.1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan									
	Persentase kemantapan jalan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	RPD 2023-2026	Persen		72,01	73,39	74,16	74,92	75,69
	Jumlah Penumpang Domestik berdasarkan Moda Transportasi Pesawat Terbang menurut provinsi, Jumlah Penumpang Internasional berdasarkan Moda Transportasi Pesawat Terbang menurut provinsi	Jumlah Penumpang Angkutan Umum di Kabupaten Kulon Progo	RPD 2023-2026	Orang		179,242	-	-	-	-
	Jumlah bandara	Jumlah Bandara	RPD 2023-2026	Unit		1	1	1	1	1
9.2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto,									

	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB	proposisi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	BPS	persen	11,3	10,3-10,8	10-10,3	9,5,9,8	9,3-9,5	-
	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur per kapita					-	-	-	-	-
	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	laju pertumbuhan sektor pengolahan	BPS	persen	1,71	6,5-6,8	6,19-7,19	6,19-6,72	6,27-6,67	-
	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur									-
9.b	Mendukung pengembangan teknologi domestik, riset dan inovasi di negara-negara berkembang, termasuk dengan memastikan lingkungan kebijakan yang kondusif, antara lain									
	Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata									
	Indeks Gini	Gini Rasio	RPD Tahun 2023-2026	Nilai	0.367	0.361-0.404	0.359-0.399	0.357-0.394	0.355-0.390	-
	Tingkat Kemiskinan	Angka Kemiskinan	RPD Tahun 2023-2026	Persen	18.38	16.92-17.14	16.34-16.56	15.6-15.98	15.08-15.40	-
	Peningkatan Jumlah desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	Ekspose IDM Tahun 2021	Desa	13					-
10.2	Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan									
	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut provinsi				-	-	-	-	-	-
10.3	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi,									
	IDI Aspek Kebebasan				-	-	-	-	-	-
10.4	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.									
	Jumlah tenaga kerja yang terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	RPD 2023-2026	perusahaan	-	149		152	155	160
11.1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.									
	Persentase rumah tangga yang menempati tempat tinggal layak huni dan terjangkau / Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Dan Terjangkau Menurut Provinsi	Persentase jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang ditangani	RPD 2023-2026	Persen	6.3	6.62	7.09	7.63	8.26	-
11.2.	Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas,									
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses nyaman (jarak 0.5 km) ke transportasi umum menurut provinsi				-	-	-	-	-	-
	Jumlah Penumpang Angkutan Umum	Jumlah Penumpang Angkutan Umum di Kulon Progo	RPD 2023-2026	orang	213.777	-	-	-	-	-
11.5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global									
	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Persentase Penanggulangan Bencana	RPD 2023-2026	Persen	56.21	68.73	78.41	88.09	100	-
11.6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan									
	Persentase sampah yang terkelola dan ketersediaan alat berat pengelola sampah yang beroperasi	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Persentase pengurangan s	Jakstrada	Persentase	#N/A	27	28	30	31,05
	Terlaksananya penanganan sampah di TPA Regional	Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	RPD 2023-2026	Persen	21.96	22.57	22.89	23.22	23.22	
	Indeks Kualitas Udara	IKU	RPD 2023-2026	Nilai	92,15	87,00	87,30	87,60	87,90	
11.7	Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang									
	Proporsi Penduduk Yang Menjadi Korban Kejahatan Kekerasan Dalam 12 Bulan Terakhir Menurut Provinsi	Korban Kasus Kekerasanterhadap Perempuan dan Anak	RPD 2023-2026	Orang	113	-	-	-	-	-
11.a	Mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah.									
	Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah dilengkapi KLHS									
11.b	Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang									
	Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki RPB	Prosentase Penanggulangan Bencana	RPD 2023-2026	Persen	93	97.16	98.01	98.86		
12.6	Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktik-praktik berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus									
	Jumlah perusahaan yang wajib memiliki dokumen lingkungan dan telah diverifikasi BLH DIY	Jumlah usaha yang memiliki ijin lingkungan	RPD 2023 - 2026	Usaha	350	350	370	390	410	-
12.8	Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras									
	Terlaksananya pembinaan kelompok masyarakat (Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup)	jumlah kelompok peduli lingkungan hidup (yang aktif)	RPD 2023 - 2026	Kelompok	235	255	265	275	285	-
13.1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara									
	RPB DIY & RAD PRB DIY				-	-	-	-	-	-
	Persentase ketersediaan dokumen rencana kontijensi penanggulangan bencana		Renstra BPBD	persen	0	30	50	70	100	-

13.2	Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional										
	Emisi bersih GRK (tCO2-eq) di Daerah Istimewa Yogyakarta										
	Penurunan emisi GRK										
13.3	Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim										
	Terlaksananya pembinaan kelompok masyarakat (Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup)	jumlah kelompok peduli lingkungan hidup (yang aktif)	RPD 2023 - 2026	Kelompok	235	255	265	275	285	-	
14.2	Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat										
	Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil diluar minyak dan gas bumi										
14.5	Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang										
	Persentase target kawasan konservasi yang ditetapkan		RPD DIY	Persen							-
	Persentase status pengelolaan kawasan konservasi yang telah ditetapkan	Kawasan Sempadan Pantai	RPD DIY	Persen							-
14.6	Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi										
	Persentase penurunan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan	Persentase penurunan temuan pelanggaran penangkapan ikan di perairan umum	RPD 2023 - 2026	Persen	10	10	10	10	10	10	-
15.1	Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan,										
	Kawasan Hutan (luasan)	Kawasan hutan negara	RPD Tahun 2023-2026	Ha	1079,4	-	-	-	-	-	
	Luas Kawasan Konservasi	Luas Kawasan Konservasi Perairan	DKP	Ha	23,40 juta ha	-	26,90 juta ha	-	-	-	
15.2	Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan										
	Persentase keterwujudan pengelolaan hutan lestari		RPD DIY	Persen	N/A	68.60%	77.98%	88.13%	100%		
	Persentase kesesuaian pengelolaan hutan	Pengelolaan hutan mangunan	RPD DIY	ha	1.037.791.000	-	-	-	-	-	
15.3	Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia										
	Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis		RPD DIY	Persen	0.29	-	-	-	-	-	
15.4	Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan termasuk keanekaragaman hayatinya untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting										
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	IKTL	RPD Tahun 2023-2026	Nilai	74,12	64,56	64,56	64,56	64,57		
16.1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.										
	Jumlah Kasus Pembunuhan										
	Korban Pertikaian Antar Warga/Unjuk Rasa	Jumlah Demo	RPD Tahun 2023-2026	Kejadian	2	-	-	-	-	-	
	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Jumlah Kasus Kekerasan	RPD Tahun 2023-2026	Kasus	136	72	68	64	60	-	
16.5	Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.										
	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)										
16.6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.										
	Opini BPK	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	RPD Tahun 2023-2026	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	-	
	Nilai akuntabilitas pemerintah (AKIP)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah (AKIP)	RPD Tahun 2023-2026	Nilai	A	A	A	A	AA	-	
	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	RPD Tahun 2023-2026	Nilai	74.71	75.00	77.00	79.00	81.00	-	
16.7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan										
	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo Periode 2019	RPD Tahun 2023-2026	Persen	20	-	-	-	-	-	
	Indeks Demokrasi Indonesia		RPD DIY	Persen	70.54	-	-	-	-	-	
	Indeks Demokrasi Aspek Lembaga Demokrasi		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Indeks Demokrasi Aspek Kebebasan Sipil		RPD DIY	Persen	70.54	-	-	-	-	-	
16.9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.										
	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil Menurut Provinsi	Jumlah KIA yang diterbitkan	RPD Tahun 2023-2026	Keping	74.043	95.744	96.195	96.520	96.955	-	
	Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Dengan Kepemilikan Akta Lahir (40% Terbawah), Menurut Provinsi (Persen)	Jumlah Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran usia 0-18 tahun	RPD Tahun 2023-2026	Jiwa	110.743	105.960	105.700	105.715	105.730	-	
	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran Menurut Provinsi (Persen)	Jumlah Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran usia 0-18 tahun	RPD Tahun 2023-2026	Jiwa	110.743	105.960	105.700	105.715	105.730	-	
16.10	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.										
16.10.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang ditangani secara komprehensif	RPD Tahun 2023-2026	Kasus	113	48	46	44	42	-	

16.10.2.(a)	Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi informatif	Jumlah Layanan PPID yang informatif	RPD Tahun 2023-2026	PPID	24	28	30	32	34	-
17.1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan									
	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Pajak Daerah hal 396 RPD	-	-	-	-	-	-	-	-
17.6	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan									
	Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (fixed broadband) terhadap total rumah tangga, menurut provinsi		-	-	-	-	-	-	-	-
17.8	Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan									
	Nilai ekspor	Nilai Ekspor	BPS	Rp (Juta Rupiah)	6953,13	-	-	-	-	-
17.17	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.									
	Buku biru bappenas		-	-	-	-	-	-	-	-
17.19	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan									
17.19.2 (b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Jumlah Laporan Perkembangan Kependudukan Semesteran dan tahunan yang tersusun	RPD Tahun 2023-2026	Buku		3	3	3	3	3

Matriks 1: Rencana Capaian Kabupaten Gunungkidul Untuk Setiap Indikator SDGs 2023 - 2027

Target/ Indikator	Indikator dari RAN TPB 2021-2024		Draft Indikator 2023-2027		Sumber	Proyeksi Tahun				
	Nama Indikator	Satuan	Nama Indikator	Satuan		2023	2024	2025	2026	2027
1.1	Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar amerika per hari.									
1.1.1	Tingkat kemiskinan ekstrim	%			Dinsos P3A, DPMK2KB					
1.2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional									
1.2.1	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional	%	Tingkat kemiskinan	%	RPD DIY 2023-2026					
1.2.2	1. Imunisasi Dasar: Persentase imunisasi dasar pada penduduk usia 12 - 23 bulan, terjadi deprivasi jika ada penduduk usia 12- 23 tahun yang tidak mendapatkan imunisasi dasar	%	Persentase anak berusia 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	%	Dinkes, Dataku	95	95	95	95	95
			Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	%	Dinkes, Dataku	100	100	100	100	100
	2. Gizi : Prevalence of Undernourishment (tingkat kekurangan gizi), terjadi deprivasi jika ada anggota rumah tangga yang kekurangan gizi	%	Persentase penurunan atau kenaikan Angka Gizi Buruk	%	Dinkes, Dataku	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3
	3. Indikator Morbiditas: persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan	%	Persentase Penduduk DIY yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Terganggu Aktivitas		Inkesra, BPS					
	4. Lama sekolah: Persentase ART usia 25 – 60 tahun yang tidak tamat SMP, terjadi deprivasi jika ada anggota rumah tangga yang tidak menyelesaikan pendidikan SMP pada usia 25 – 60 tahun	%	Distribusi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki		Inkesra, BPS					
	5. Partisipasi sekolah: Persentase anak usia sekolah 7-18 tahun yang tidak/belum bersekolah, terjadi deprivasi jika ada anak usia sekolah 7 18 tahun yang tidak/belum bersekolah	%	Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 16-18 tahun	%	BPS					
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun, Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Tahun	%	BPS, statistik strategis					
	6. Listrik: Persentase rumah tangga yang sumber penerangan utamanya bukan listrik, terjadi deprivasi jika tanpa listrik	%			PLN	0	0	0	0	0
	7. Air minum: Persentase rumah tangga tanpa akses pada air minum bersih, terjadi deprivasi jika rumahtangga tanpa akses pada air minum bersih atau air bersih yang dapat diperoleh tidak lebih dari 30 menit jalan kaki dari rumah	%	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman	%	RPD DIY 2023-2026					
	8. Sanitasi: Persentase rumahtangga tidak mempunyai WC layak, terjadi deprivasi jika rumahtangga tidak mempunyai WC layak atau menggunakan WC bersama	%	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak dan aman	%	RPD DIY 2023-2026					
9. Lantai: Persentase ruman tangga dengan jenis lantai terluas adalah tanah atau luas lantai per kapita kurang dari 8 m2, terjadi deprivasi jika rumah berlantai tanah, pasir atau lantai tercampur kotoran ternak atau luas lantai per kapita	%	Persentase Rumah Tangga menurut Kako dan Luas Hunian per kapita > 7,2 m2		BPS, statistik strategis						
	%			BPS						

	10. Bahan bakar memasak: Persentase rumah tangga dengan Bahan bakar memasak menggunakan elpiji 3kg, terjadi deprivasi jika memasak menggunakan elpiji 3kg	%	Distribusi Rumah Tangga di DIY menurut Bahan Bakar Utama untuk Memasak (LPG 3kg)		Inkesra, BPS					
	11. Aset: Persentase rumah tangga yang tidak punya aset produktif, terjadi deprivasi jika rumahtangga tidak mempunyai sepeda atau sepeda motor, ternak, lahan, TV, tabung gas, lemari es, emas, mobil.	%			BPS					
	12. Akta kelahiran: Persentase penduduk yang berusia 0-17 tahun yang tidak memiliki akta kelahiran, terjadi deprivasi jika ada anggota rumahtangga yang berusia 0-17 tahun yang tidak memiliki akta kelahiran.	%	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak / Invers Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun		RPD DIY 2023-2026 / BPS Pusat SDGs	97.76	97.81	97.86	97.91	97.96
	13. Akses internet: Persentase rumah tangga yang tidak punya akses internet, terjadi deprivasi jika tidak ada anggota rumah tangga yang bisa mengakses internet	%			BPS					
	14. Pekerjaan: Persentase rumah tangga dengan anggota rumah tangga bekerja, terjadi deprivasi jika tidak ada anggota rumah tangga yang bekerja atau semua anggota rumah tangga yang bekerja kurang dari 20 jam seminggu	%			BPS					
1.3.	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan									
1.3.1	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok anak berkebutuhan khusus, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.	%	Persentase PPKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dan meningkat keberfungsian sosialnya	%	DinsosP3A	20.683	25.503			
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	%	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		Dinkes, Dataku	97	98	99	100	100
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	%	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Jiwa	DinkopUKM					
1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro									
	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar									
1.4.1	1. Persentase penduduk dengan akses pada layanan air minum	%	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman	%	DPUPRKP	70.27	70.5	70.8	71.01	71.27
	2. Persentase penduduk dengan akses pada layanan sanitasi	%	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak dan aman	%	DPUPRKP	65	65.25	65.75	66	66.25
	3. Persentase penduduk dengan akses pada layanan mobilitas Dasar di Pedesaan	%			DPUPRKP					
	4. Persentase penduduk dengan akses pada layanan fasilitas Penyehatan Dasar	%	Proporsi rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar menurut provinsi (Persen): Indeks pada Fasilitas Kesehatan Dasar	%	Dinkes	100	100	100	100	100

1.4.2	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan									
	1. Proporsi rumahtangga dengan Rumah milik	%	Presentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Milik Sendiri / Proporsi rumah tangga dengan status kepemilikan rumah milik dan sewa/kontrak menurut provinsi	%	BPS, Statistik strategis / BPS Pusat, SDGs					
	2. Proporsi rumahtangga dengan Rumah Sewa/Kontrak	%	Proporsi rumah tangga dengan status kepemilikan rumah milik dan sewa/kontrak menurut provinsi	%	BPS Pusat, SDGs					
1.5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana									
1.5.1	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	per 100.000 jiwa			BPBD	0	0	0	0	0
1.5.2	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDB	%				26%	31%	36%	41%	46%
1.5.4	Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencana	%	RPB Kabupaten/Kota	Dokumen	BPBD	1				
1.a	Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi									
Draft Indikator TPB DIY 2023-2027										
Tujuan 2: Tanpa Kelaparan										
Target/ Indikator	Indikator dari RAN TPB 2021-2024		Draft Indikator 2023-2027		Sumber	Proyeksi Tahun				
	Nama Indikator	Satuan	Nama Indikator	Satuan		2023	2024	2025	2026	2027
2.1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun									
2.1.1	Prevalensi ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	Prevalensi ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	BPS Pusat					
2.1.2	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan Skala Pengalaman Kerawanan Pangan (FIES)	%	Jumlah Desa Rawan Pangan	Desa	DPKP, Dataku					

2.2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah lima tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula									
2.2.1	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	Prevalensi Stunting	%	Renstra Dinkes	15.2	14.9	14.6	14.3	14
2.2.2	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) pada balita	%	Prevalensi ketidakcukupan gizi (underweight) pada anak	%	Dinkes, Dataku	7.5	7.3	7.1	7	6.9
2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan, yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor 1-100	Skor Pola Pangan Harapan (PPH), berdasarkan standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.100 kkal/kapita/hari (skor)	Skor	RPD DIY 2023-2026					
2.2.3	Prevalensi anemia pada ibu hamil	%	Prevalensi anemia pada ibu hamil	%	Renstra Dinkes	15	14.8	14.6	14.5	14
2.3	Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non pertanian									
2.3.1	Volume produksi/tenaga kerja pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan)	USD PPP								
2.3.1.(a)	Nilai tambah pertanian/tenaga kerja pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan)	Rp. juta/tenaga kerja								
2.3.2	Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan)	USD PPP	Peningkatan nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam PDRB (ADHK)	Juta Rp	Renstra DPKP					
			Rata-rata persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan	%	Renstra DPKP					
2.4	Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktik pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan									
2.4.1	Proporsi areal pertanian produktif dan berkelanjutan	%	Proporsi areal pertanian produktif dan berkelanjutan	%	DPP	17.24	17.24	17.24	17.24	17.24
2.4.1.(a)	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan, (untuk lahan baku sawah)	%	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan, (untuk lahan baku sawah)	%	DPP	71.44	71.44	71.44	71.44	71.44

2.5	Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianeka-ragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan									
2.5.1	Jumlah sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, jangka menengah atau jangka panjang	Jumlah Akses SDG tanaman								
2.a	Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerja sama internasional yang kuat, dalam infrastruktur perdesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang									
2.a.1	Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah	Indeks	Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah		BPS Pusat					
2.b	Memperbaiki dan mencegah pembatasan dan distorsi dalam pasar pertanian dunia, termasuk melalui penghapusan secara bersamaan segala bentuk subsidi ekspor pertanian dan semua tindakan ekspor dengan efek setara, sesuai dengan amanat the Doha Development Round									
2.c	Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim									
Draft Indikator TPB DIY 2023-2027										
Tujuan 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera										
Target/ Indikator	Indikator dari RAN TPB 2021-2024		Draft Indikator 2023-2027		Sumber	Proyeksi Tahun				
	Nama Indikator		Satuan	Nama Indikator		Satuan	2023	2024	2025	2026
3.1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup									
3.1.1	Angka Kematian Ibu (AKI)	Kematian per 100.000 Kelahiran Hidup	Jumlah Kematian Ibu	Kasus	Dinkes	66.81	67.49	67.49	54.55	53.87
3.1.2	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	%	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	%	Dinkes	100	100	100	100	100

3.2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000									
3.2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Kematian per 1.000 Kelahiran Hidup	Angka Kematian Bayi	Kematian per 1.000 Kelahiran Hidup	BPS, Indikator Kesejahteraan Rakyat					
3.2.2	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Kematian per 1.000 Kelahiran Hidup	Jumlah Kematian Neonatus	Kematian per 1.000 Kelahiran Hidup	Dinkes, Profil Kesehatan DIY					
3.3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya									
3.3.3	Kejadian Malaria per 1.000 orang (ada di metadata tapi tidak di RAN)		Jumlah Kasus Penyakit Malaria	Kasus	Dinkes	0	0	0	0	0
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Kab/ Kota	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Kab/ Kota	Dinkes					
3.3.4	Insiden Hepatitis B	%			Dinkes					
3.3.5	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta				Dinkes	0 dan 6	0 dan 6	0 dan 5	0 dan 5	0 dan 4
3.3.5.(a)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi Kusta	Kab/ Kota	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta	Kab/ Kota	Dinkes	1	1	1	1	1
3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan filariasis yang mencapai eliminasi	Kab/ Kota	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis	Kab/ Kota	Dinkes	1	1	1	1	1
3.4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan									
3.4.1.(a)	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun.	%	Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas menurut apakah selama sebulan terakhir merokok tembakau	%	Dinkes	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi	%	Jumlah Penderita Hipertensi	Kasus	Dinkes	76,783	77,668	78,562	79,465	80,379
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	%			Dinkes	53,280	53,892	54,512	55,139	55,773
3.5	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan									
3.5.1.(a)	Jumlah penyalahgunaan napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis	Orang								
3.5.1.(b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi				Dinkes					
3.6	Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas.									
3.6.1	Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas		Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas: Meninggal Dunia	Jiwa	Dishub, Statistik Transportasi, Data Vertikal Polda DIY					
3.7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional									
3.7.1	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern									

	Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	Persentase pemakaian kontrasepsi (modern contraceptive prevalence rate/ CPR)	%	Renstra DP3AP2					
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	%	<i>Unmet Need</i> kebutuhan ber-KB	%	Dinkes, Dataku					
3.7.2	Angka kelahiran remaja umur 15- 19 tahun per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama	Kelahiran per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun	ASFR 15-19 tahun		BPS Pusat/Statistik Strategis					
3.7.2.(a)	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Jumlah anak per WUS 15-49 tahun	Total Fertility Rate (TFR)		RPD DIY 2023-2026					
3.8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang									
3.8.1	Cakupan pelayanan kesehatan esensial									
3.8.1.(a)	<i>Unmet need</i> pelayanan kesehatan		<i>Unmet Need</i> Pelayanan Kesehatan Menurut Provinsi		%	Dinkes	8.25	8.2	8.15	8.1
3.8.2	Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan		Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan		%	BPS DIY, Susenas				
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		%	Dinkes	97	98	99	100
3.a	Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.									
3.a.1	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.		Persentase Merokok Pada Penduduk Umur ≥ 15 Tahun Menurut Provinsi		%	Dinkes	19.21	19.21	19.21	19.21
3.b	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Publik Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek- Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua									
3.b.1	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional									
	Imunisasi Dasar Lengkap anak usia 12-23 bulan		Anak kurang dari 1 tahun mendapat imunisasi lengkap			Renstra Dinkes	95	95	95	95
3.b.3	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan.						92.6	93	93.6	94

3.c	Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil									
3.c.1	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan				Dinkes					
	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%			Dinkes	100	100	100	100	100
	Persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya	%			Dinkes	50	100	100	100	100
Draft Indikator TPB DIY 2023-2027										
Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas										
Target/ Indikator	Indikator dari RAN TPB 2021-2024		Draft Indikator 2023-2027		Sumber	Proyeksi Tahun				
	Nama Indikator	Satuan	Nama Indikator	Satuan		2023	2024	2025	2026	2027
4.1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif									
4.1.1.(a)	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) di kelas 5 yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam:									
	(i) membaca	%	Nilai rata-rata hasil PISA: Membaca	Skor	Renstra Disdikpora					
	(ii) matematika	%	Nilai rata-rata hasil PISA: Matematika	Skor	Renstra Disdikpora					
	Proporsi anak-anak dan remaja: (b) di kelas 8 yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam:									
	(i) membaca	%								
	(ii) matematika	%								
	Proporsi anak-anak dan remaja: (c) di usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam:									
	(i) membaca	%								
	(ii) matematika	%								
	(iii) sains	%								
4.1.2	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat									
	(a) Persentase siswa yang menyelesaikan pendidikan jenjang SD/ sederajat	%	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan dan Provinsi: SD/ Sederajat	%	BPS Pusat, SDGs	100	100	100	100	100
	(b) Persentase siswa yang menyelesaikan pendidikan jenjang SMP/ sederajat	%	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan dan Provinsi: SMP/ Sederajat	%	Disdik	100	100	100	100	100
	(c) Persentase siswa yang menyelesaikan pendidikan jenjang SMA/ sederajat	%	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan dan Provinsi: SMA/ Sederajat	%	Dikmen	94.50	95.03	95.48	95.59	95.78
4.1.2.(a)	Angka anak tidak sekolah jenjang:									
	SD/ sederajat		Angka Putus Sekolah SD/ MI	%	Disdik	56	48	40	32	24
	SMP/ sederajat		Angka Putus Sekolah SMP/ MTs	%	Disdik	168.7	144.6	120.5	96.4	72.3
	SMA/ sederajat		Angka Putus Sekolah SMA/ MA	%	Dikmen	5.50	4.97	4.52	4.41	4.22

4.2	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar									
4.2.1	Proporsi anak usia 24-59 bulan yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin	%								
4.2.2	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin	%	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar) menurut provinsi		Disdik	92.63	94.21	95.26	95.79	95.80
4.3	Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas									
4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin									
	(1) usia 15 – 24 tahun	%			Disdik	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	(2) usia 15 – 59 tahun	%			Disdik	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	%	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	%	BPS, Statistik strategis	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
4.4	Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan									
4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)									
	(1) usia 15 – 24 tahun	%	Proporsi Remaja Dan Dewasa Usia 15-24 Tahun Dengan Keterampilan Teknologi Informasi Dan Komputer (TIK) Menurut Provinsi	%	Disdik	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	(2) usia 15 – 59 tahun	%	Proporsi Remaja Dan Dewasa Usia 15-59 Tahun Dengan Keterampilan Teknologi Informasi Dan Komputer (TIK) Menurut Provinsi	%	Disdik	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
4.5	Menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan									
4.5.1	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii)									
	(i.a) Rasio APM-SD Perempuan/Laki- laki	%	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki- Laki Menurut Provinsi	%	Disdik	1.0003485	1.0003484	1.00023221	1.00023215	1.0002321
	(i.b) Rasio APM-SD Pedesaan / Perkotaan	%			Disdik	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	(i.c) Rasio APM-SD Kuintil Terendah/ Kuintil Tertinggi	%			Disdik	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

	(i.d) Rasio APM-SD Disabilitas / Tanpa Disabilitas	%			Disdik	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	(ii) Rasio APK Perempuan / Laki-laki pada tingkat:				Disdik	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	SMP/Sederajat	%	APK SMP	%	Disdik	1.0040388	1.0040371	1.00403592	1.0040347	1.0040339
	SMA/SMK/ Sederajat	%	Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat	%	Dikmen	94.50	95.48	99.55	100.28	107.86
	Perguruan Tinggi	%			LLDIKTI					
	(ii) Rasio APK Pedesaan / Perkotaan pada tingkat:									
	SMP/Sederajat	%			Disdik	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	SMA/SMK/ Sederajat	%			Dikmen	92,94	94,93	95,73	96,09	98,33
	Perguruan Tinggi	%			LLDIKTI					
	(ii) Rasio APK Kuintil Terendah / Kuintil Tertinggi pada tingkat:									
	SMP/Sederajat	%			Disdik	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	SMA/SMK/ Sederajat	%			Dikmen	89.72	91.13	94.37	96.02	97.05
	Perguruan Tinggi	%			LLDIKTI					
	(ii) Rasio APK Disabilitas/Tanpa Disabilitas pada tingkat:		Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB	%						
	SMP/Sederajat	%			Disdik	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	SMA/SMK/ Sederajat	%			Dikmen	92.89	94.50	95.48	99.55	100.00
	Perguruan Tinggi	%			LLDIKTI					
4.6	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi									
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	%	Angka Melek Huruf Penduduk 15 Tahun Ke atas	%	BPS, statistik strategis					
4.a	Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua									
4.a.1	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan									
	(1) SD	%								
	(2) SMP	%								
	(3) SMA dan SMK	%								
	(4) SLB	%								
	Proporsi sekolah dengan akses ke (b) internet untuk tujuan pengajaran									
	(1) SD	%								

	(2) SMP	%								
	(3) SMA	%								
	(4) SMK	%								
	Proporsi sekolah dengan akses ke (c) komputer untuk tujuan pengajaran									
	(1) SD	%								
	(2) SMP	%								
	(3) SMA dan SMK	%								
	(4) SLB	%								
	Proporsi sekolah dengan akses ke (d) air minum layak									
	(1) SD	%								
	(2) SMP	%								
	(3) SMA dan SMK	%								
	(4) SLB	%								
	Proporsi sekolah dengan akses ke (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin									
	(1) SD	%								
	(2) SMP	%								
	(3) SMA dan SMK	%								
	(4) SLB	%								
	Proporsi sekolah dengan akses ke (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)									
	(1) SD	%								
	(2) SMP	%								
	(3) SMA dan SMK	%								
	(4) SLB	%								
4.a.1.(a)	Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir	%								
4.b	Pada 2020, secara substansial memperbanyak jumlah beasiswa yang tersedia untuk negara-negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang kepulauan kecil dan negara-negara Afrika, untuk masuk ke pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan dan teknologi informasi dan komunikasi, teknik, program teknik dan sains, di negara-negara maju dan negara berkembang lainnya									
4.b.1	Jumlah bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang. Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang	Orang								
4.c	Pada tahun 2030, secara substansial meningkatkan penyediaan guru-guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional untuk pelatihan guru di negaranegara berkembang, khususnya negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil									
	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan		Persentase guru dan tenaga kependidikan yang kompeten	%	Renstra Disdikpora					
	Persentase guru pada jenjang (i) TK/RA/BA, (ii) SD/ sederajat, (iii) SMP/ sederajat, (iv) SMA/ SMK/ sederajat, dan (v) PLB yang memiliki sertifikat pendidik	78.2								
	(i) PAUD	PM								
	(ii) SD	PM								
	(iii) SMP	PM								
	(iv) SMA	PM								
	(v) SMK	PM								

	Persentase guru pada jenjang (i) TK/RA/BA, (ii) SD/ sederajat, (iii) SMP/ sederajat, (iv) SMA/ SMK/ sederajat, dan (v) PLB yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan									
	(i) PAUD	PM								
	(ii) SD	PM								
	(iii) SMP	PM								
	(iv) SMA	PM								
	(v) SMK	PM								
Draft Indikator TPB DIY 2023-2027										
TUJUAN 5: Kesetaraan Gender										
Target/ Indikator	Indikator dari RAN TPB 2021-2024		Draft Indikator 2023-2027		Sumber	Proyeksi Tahun				
	Nama Indikator	Satuan	Nama Indikator	Satuan		2023	2024	2025	2026	2027
5.1	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana pun									
5.2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.									
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Persen								
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Persen	Jumlah kasus perkosaan dan kesusilaan	Kasus	Polri, Dataku					
5.3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.									
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun	Persen	Rata-rata usia pernikahan pertama perempuan	Tahun	Renstra DP3AP2					
	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 18 tahun	Persen	Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi	%	BPS Pusat, SDGs					
5.5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.									
5.5.1*	(a) Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat (DPR dan DPD RI)		Keterlibatan Perempuan di Parlemen	%	BPS, Statistik Strategis					
	DPR	Persen								
	DPD	Persen								
	(b) Proporsi kursi legislatif dan jabatan pemerintah yang diduduki perempuan di pemerintah daerah yang dipilih melalui pemilu		Persentase Keterwakilan perempuan dalam politik (DPRD, Bupati/walikota dan Bamuskal)	%	Setwan	24.511	25.038	26.196	27.354	28.512
	DPRD Provinsi	Persen								
	DPRD Kab/Kota	Persen			Setwan					
5.5.2*	(a) Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial di pemerintahan		Tingkat Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial menurut provinsi	%	BPS Pusat, SDGs					
	Menteri	Persen								
	Gubernur dan Wakil Gubernur	Persen								
	Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota	Persen	Proporsi Perempuan yang berada di posisi managerial	%	BKPPD	50	50	50	50	50
	Eselon I	Persen			BKPPD					
	Eselon II	Persen	Proporsi Perempuan yang berada di posisi managerial	%	BKPPD	20	22	24	26	28
	(b) Proporsi perempuan yang menduduki posisi managerial di perusahaan publik atau swasta				DinkopUKM					

5.6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.									
5.6.1*	(1) Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan (seluruh wanita usia subur/WUS)	Persen								
	(2) Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun berstatus kawin yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan (hanya Pasangan Usia Subur/PUS)	Persen								
5.6.2*	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.	Dokumen	Jumlah calon pengantin yang mendapatkan pemahaman kesehatan reproduksi	Orang	DPMK2KB	500	500	500	500	500
5.a	Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.									
5.a.1*	(1) Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian;	Persen								
	(2) Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan.	Persen								
5.b	Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.									
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	% total	Persentase Penduduk 5 Tahun ke atas menurut Apakah Menggunakan Telepon Selular dan Memiliki/menguasai Telepon Selular dalam 3 Bulan Terakhir: Jumlah	%	BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat					
		% perempuan	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Memiliki/Menguasai Telepon Seluler(HP) dalam 3 Bulan Terakhir: Perempuan	%	BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat					
		% laki-laki	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Memiliki/Menguasai Telepon Seluler(HP) dalam 3 Bulan Terakhir: Laki-laki	%	BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat					
5.c	Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan.									
Draft Indikator TPB DIY 2023-2027										
TUJUAN 6: Air Bersih Dan Sanitasi Layak										
Target/ Indikator	Indikator dari RAN TPB 2021-2024		Draft Indikator 2023-2027			Sumber	Proyeksi Tahun			
	Nama Indikator	Satuan	Nama Indikator	Satuan		2023	2024	2025	2026	2027

6.1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.									
6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	Persen	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman	%	DPUPRKP	70.27	70.5	70.8	71.01	71.27
6.2.	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.									
6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.									
	a. Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	Persen	Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Fasilitas Cuci Tangan Dengan Sabun Dan Air Menurut Provinsi	%	DPUPRKP/Dinkes					
	b. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak	Persen	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak dan aman	%	DPUPRKP/Dinkes	65	65.25	65.75	66	66.25
	c. Persentase rumah tangga yang masih melakukan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka	Persen			Dinkes	0	0	0	0	0
	d. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T	Persen			Dinkes					
	e. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sistem pengelolaan lumpur tinja	Persen			Dinkes					
6.3.	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.									
6.3.1.(a)	Persentase limbah cair industri yang dikelola secara aman	Persen	Indeks Kualitas Air Sungai	Indeks	DLH	33.50	37.50	40.80	45.10	-
6.4.	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.									
6.4.2.(a)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya	Persen			DPUPRKP					
6.4.2.(b)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaannya	Persen			DPUPRKP					
6.5.	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas sesuai kepantasan.									
6.5.1*	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100).	Persen	Persentase penyediaan infrastruktur sumber daya air	%	Renstra DPUPESDM 2023-2026					
6.6.	Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.									

6.6.1 *	Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu (Indek kualitas tutupan lahan dan gambut)	Indeks								
	Genangan air	Indeks	Pengurangan luasan genangan	Ha	Renstra DPUPESDM 2023-2026					
	Tutupan vegetasi	Indeks	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	DLHK, Dataku					
	Kuantitas air sungai dan estuary	Indeks	Indeks Kualitas Air Sungai	Indeks	DLHK, Dataku					
	Kualitas badan air (permukaan dan tanah)	Indeks								
	Kuantitas akuifer air tanah	Indeks								
Draft Indikator TPB DIY 2023-2027										
TUJUAN 7: Energi Bersih dan Terjangkau										
Target/ Indikator	Indikator dari RAN TPB 2021-2024		Draft Indikator 2023-2027			Sumber	Proyeksi Tahun			
	Nama Indikator	Satuan	Nama Indikator	Satuan		2023	2024	2025	2026	2027
7.1	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua									
7.1.1*	Rasio elektrifikasi	%	Persentase Rumah tangga berakses listrik	%	PLN	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita	kWh/ kapita	Penjualan tenaga listrik PLN per kelompok pelanggan		Statistik Ketenagalistrikan, KESDM					
7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga	%								
7.2	Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.									
7.3	Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.									
7.a	Pada tahun 2030, memperkuat kerjasama internasional untuk memfasilitas akses pada teknologi dan riset energi bersih, termasuk energi terbarukan, efisiensi energi, canggih, teknologi bahan bakar fosil lebih bersih, dan mempromosikan investasi di bidang infrastruktur energi dan teknologi energi bersih.									
7.b	Pada tahun 2030, memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk penyediaan layanan energi modern dan berkelanjutan bagi semua negara-negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil dan negara berkembang									
7.b.1*	Kapasitas terpasang pembangkit listrik dari energi terbarukan (dalam watt per kapita)	Watt per kapita	Kapasitas terpasang pembangkit listrik dari energi terbarukan (dalam watt per kapita)		Statistik Ketenagalistrikan, KESDM					
			Data Jenis Energi Baru Terbarukan		DPUPESDM, Dataku					
Draft Indikator TPB DIY 2023-2027										
TUJUAN 9: Industri, Inovasi dan Infrastruktur										
Target/ Indikator	Indikator dari RAN TPB 2021-2024		Draft Indikator 2023-2027			Sumber	Proyeksi Tahun			
	Nama Indikator	Satuan	Nama Indikator	Satuan		2023	2024	2025	2026	2027

9.1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.									
9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional	Persen	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi baik	%	DPURKP	68.2	72.52	76.84	81.16	85.48
9.1.2*	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi.	Orang	Jumlah Penumpang Domestik berdasarkan Moda Transportasi Pesawat Terbang menurut provinsi, Jumlah Penumpang Internasional berdasarkan Moda Transportasi Pesawat Terbang menurut provinsi	Orang	Dishub	NA	NA	NA	NA	NA
9.1.2.(a)	Jumlah bandara	Bandara	Jumlah bandara	Bandara	Dishub, Transportasi dalam Angka					
9.2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.									
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB	Persen	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB	%	BPS					
	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur per kapita	Persen	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur per kapita	%	BPS					
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	Persen	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	%	BPS					
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	Persen	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	%	BPS					
9.3	Meningkat akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.									
9.4	Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.									
9.4.1*	Rasio emisi CO2/emisi gas rumah kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur	Tingkat emisi CO2 (ton)								
9.4.1.(b)	Intensitas emisi sektor industri	Ton CO2/Miliar Rp								
9.5	Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelajaran publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.									

9.b	Mendukung pengembangan teknologi domestik, riset dan inovasi di negara-negara berkembang, termasuk dengan memastikan lingkungan kebijakan yang kondusif, antara lain untuk diverfikasi industri dan peningkatan nilai tambah komoditas.									
9.b.1.(a)	Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi	Persen	Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi		BPS, Publikasi tahunan, Statistik Ekspor-impor DIY					
9.c	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.									
Draft Indikator TPB DIY 2023-2027										
TUJUAN 10: Berkurangnya Kesenjangan										
Target/ Indikator	Indikator dari RAN TPB 2021-2024		Draft Indikator 2023-2027		Sumber	Proyeksi Tahun				
	Nama Indikator	Satuan	Nama Indikator	Satuan		2023	2024	2025	2026	2027
10.1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.									
10.1.1*	Rasio Gini	Nilai	Indeks Gini	Rasio	RPD DIY 2023-2026					
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Persen	Tingkat Kemiskinan	%	BPS					
10.1.1.(b)	Jumlah desa tertinggal.	Desa	Jumlah desa tertinggal.		IDM, Kemen. PD TT, baseline 2022: 0					
10.1.1.(c)	Jumlah Desa Mandiri.	Desa	Peningkatan Jumlah desa Mandiri	Desa	RPD DIY 2023-2026					
10.1.1.(d)	Jumlah daerah tertinggal.	Kabupaten	Jumlah daerah tertinggal.		IDM, Kemen. PD TT, baseline 2022: 0					
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	Persen								
10.2	Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.									
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Persen	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut provinsi		BPS					
10.3	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.									
10.3.1(a)	Indeks Kebebasan.	Nilai	IDI Aspek Kebebasan		BPS Pusat					
10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	Aduan								
10.3.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Kasus								
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Kebijakan/ Dokumen			Setda-Hukum	0	0	0	0	0

10.4	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.									
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Persen	Jumlah tenaga kerja yang terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan		DinkopUKM					
10.5	Memperbaiki regulasi dan pengawasan pasar dan lembaga keuangan global, dan memperkuat pelaksanaan regulasinya.									
10.6	Memastikan peningkatan representasi dan suara bagi negara berkembang dalam pengambilan keputusan di lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan internasional global, untuk membentuk kelembagaan yang lebih efektif, kredibel, akuntabel dan terlegitimasi.									
10.7.	Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan dikelola dengan baik.									
10.7.2.(b)	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi.	Fasilitasi TKLN								
10.a	Menerapkan prinsip perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang, khususnya negara yang kurang berkembang, sesuai dengan kesepakatan World Trade Organization									
10.b	Mendorong bantuan pembangunan dan arus keuangan yang resmi, termasuk investasi asing secara langsung, ke negara-negara yang paling membutuhkan, terutama negara kurang berkembang, negara-negara Afrika, n									
10.c	Memperbesar pemanfaatan jasa keuangan bagi pekerja									
Draft Indikator TPB DIY 2023-2027										
TUJUAN 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan										
Target/ Indikator	Indikator dari RAN TPB 2021-2024		Draft Indikator 2023-2027		Sumber	Proyeksi Tahun				
	Nama Indikator	Satuan	Nama Indikator	Satuan		2023	2024	2025	2026	2027
11.1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.									
11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Persen	Persentase rumah tangga yang menempati tempat tinggal layak huni dan terjangkau / Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Dan Terjangkau Menurut Provinsi	%	Renstra PUPESDM 2023-2026 / BPS Pusat, SDGs					
11.2.	Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.									
11.2.1.(a)	Proporsi populasi yang mendapat akses yang nyaman pada transportasi publik	Persen	Persentase rumah tangga yang memiliki akses nyaman (jarak 0.5 km) ke transportasi umum menurut provinsi	%	BPS Pusat, SDGs					
11.2.1.(b)	Persentase penduduk terlayani transportasi umum	Persen	Jumlah Penumpang Angkutan Umum	Orang	Dishub, Statistik Transportasi					

11.3	Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.									
11.3.1.(a)	Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk.	Persen	Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk.		DPUPRKP					
11.4										
11.4.1.(a)	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP)		Nilai Belanja wisatawan	Rupiah	Dispar	110,000	135,000	190,000	200,000	225,000
	1. Kemenkeu 2. KLHK 3. Kemenparekraf 4. ANRI 5. Kemendikbud 6. LIPI 7. Kementerian PUPR 8. Pemerintah Daerah	Miliar Rupiah								
	Kemendikbud	Miliar Rupiah								
	Kememparekraf	Miliar Rupiah								
11.5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.									
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang				BPBD					
	a. Meninggal	Orang				0	0	0	0	0
	b. Luka/Cedera	Orang				0	0	0	0	0
	c. Mengungsi	Orang				0	0	0	0	0
11.5.2.(a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB.	Persen			BPBD	26%	31%	36%	41%	46%
			Indeks Risiko Bencana (IRB)		RPD DIY 2023-2026	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
11.6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.									
11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampah	Persen			DLH	-	-	-	-	-
11.6.1.(b)	Persentase sampah nasional yang terkelola	Persen	Persentase sampah yang terkelola dan ketersediaan alat berat pengelola sampah yang beroperasi	%	RPD DIY 2023-2026					
			Tertindakannya penanganan sampah di TPA Regional		Renstra DLHK 2023-2026					
11.6.2.(a)	Rata-rata tahunan materi partikulat halus PM 10	µgram/m ³			DLH	-	-	-	-	-

11.6.2.(b)	Indeks kualitas udara	Indeks	Indeks Kualitas Udara		DLH	95.42	95.54	95.90	96.20	-
11.7	Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.									
11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua	Persen			DLH	3.09	3.11	3.14	3.17	3.19
11.7.2 (a)	Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Persen	Proporsi Penduduk Yang Menjadi Korban Kejahatan Kekerasan Dalam 12 Bulan Terakhir Menurut Provinsi		BPS Pusat, SDGs					
11.a	Mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah.									
11.a.1.(a)	Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah dilengkapi KLHS*	Persen	Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah dilengkapi KLHS	Kabupaten	Bappeda					
11.b	Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.									
11.b.2*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana	Persen	Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki RPB		BPBD					
11.c	B. Luka/Cedera									
11.c.1.(a)	Persentase Daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan menggunakan Material Lokal	Persen			DPUPRKP	0	0	0	0	0
Draft Indikator TPB DIY 2023-2027										
TUJUAN 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab										
Target/ Indikator	Indikator dari RAN TPB 2021-2024		Draft Indikator 2023-2027		Sumber	Proyeksi Tahun				
	Nama Indikator	Satuan	Nama Indikator	Satuan		2023	2024	2025	2026	2027
12.1	Melaksanakan the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang.									
12.3	Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan									
12.3.1.(a)	Persentase Sisa makanan	Persen			DLH	-	-	-	-	-

12.4	Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.									
12.4.1.(a)	Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari <i>baseline</i> 50 ton penggunaan merkuri	Persen		DLH	100	100	100	100	100	100
12.4.1.(b)	Persentase penurunan tingkat konsumsi perusak ozon dari <i>baseline</i>	Persen								
12.4.2*	(a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita	Juta Ton		DLH	-	-	-	-	-	-
	(b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya/ pengolahannya.	Persen		DLH	-	-	-	-	-	-
12.5	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali									
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Juta Ton		DLH	10,000	12,000	13,000	14,000	15,000	
12.6	Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktik-praktik berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.									
12.6.1*	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya.	Perusahaan	Jumlah perusahaan yang wajib memiliki dokumen lingkungan dan telah diverifikasi BLH DIY	DPMPSTP	-	-	-	-	-	-
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Unit		DPMPSTP	-	-	-	-	-	-
12.7	Mempromosikan praktik pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional									
12.8	Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.									
12.8.1.(a)	Jumlah satuan pendidikan formal dan Lembaga / komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	Unit	Terlaksananya pembinaan kelompok masyarakat (Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup)	Renstra DLHK 2023-2026						
12.8.1.(b)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Unit		Setda						
12.a	Mendukung negara-negara berkembang untuk memperkuat kapasitas ilmiah dan teknologi mereka untuk bergerak ke arah pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan.									
12.b	Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.									
12.b.1.(a)	Jumlah lokasi penerapan <i>sustainable tourism development</i>	Lokasi		Dispar						
Draft Indikator TPB DIY 2023-2027										
TUJUAN 13: Penanganan Perubahan Iklim										

Target/ Indikator	Indikator dari RAN TPB 2021-2024		Draft Indikator 2023-2027		Sumber	Proyeksi Tahun				
	Nama Indikator	Satuan	Nama Indikator	Satuan		2023	2024	2025	2026	2027
13.1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara									
13.1.1. (a)	Jumlah korban meninggal dan hilang akibat terkena dampak bencana hidrometeorologi per 100.000 orang	Per 100.000 orang			BPBD	0	0	0	0	0
13.1.1. (b)	Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim	% PDB				22%	27%	32%	37%	42%
13.1.2 *	Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030	Dokumen	RPB DIY & RAD PRB DIY	Dokumen	BPBD DIY					
13.1.3*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional	Persen	Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki RPB	Kabupaten/Kota	BPBD DIY					
13.2	Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional									
13.2.2*	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun	MTon CO2e	Emisi bersih GRK (tCO2-eq) di Daerah Istimewa Yogyakarta		INCAS KLHK					
13.2.2.(a)	Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	Persen	Penurunan emisi GRK	CO2-eq	RPD DIY 2023-2026					
13.2.2.(b)	Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)	Persen								
13.3	Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim									
13.3.1.(a)	Jumlah satuan pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	Jumlah satuan pendidikan dan desa/kelurahan	Terlaksananya pembinaan kelompok masyarakat (Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup)		Renstra DLHK 2023-2026					
		Jumlah peserta Sekolah Adiwiyata								
		Jumlah kampung iklim								
		Jumlah peserta Sekolah Lapang Iklim dan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan								

		Jumlah desa tangguh bencana								
13.a	Melaksanakan komitmen negara maju pada the United Nations Framework Convention on Climate Change untuk tujuan mobilisasi dana sebesar 100 miliar dolar Amerika per tahun pada tahun 2020 dari semua sumber untuk mengatasi kebutuhan negara berkembang dalam konteks aksi mitigasi yang bermanfaat dan transparansi dalam pelaksanaannya dan mengoperasionalisasi secara penuh the Green Climate Fund melalui kapitalisasi dana tersebut sesegera mungkin.									
Draft Indikator TPB DIY 2023-2027										
TUJUAN 16: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh										
Target/ Indikator	Indikator dari RAN TPB 2021-2024		Draft Indikator 2023-2027		Sumber	Proyeksi Tahun				
	Nama Indikator	Satuan	Nama Indikator	Satuan		2023	2024	2025	2026	2027
16.1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.									
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	Kasus	Jumlah Kasus Pembunuhan		Polri, Dataku					
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	Orang	Korban Pertikaian Antar Warga/Unjuk Rasa		Polres					
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Persentase	Jumlah Kasus Penganiayaan		Polri, Dataku					
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	Persentase								
16.2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.									
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Persentase								
16.2.1.(b)	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya	Persentase								
16.2.2*	Angka korban perdagangan manusia per 100,000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi	Persentase			Polres					
16.3	Megalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.									
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Persentase								
16.3.1.(b)	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi	Persentase			Setda-hukum	0	0	0	0	0
16.3.1.(c)	Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara	Persentase								
16.3.2. (a)	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.	Persentase								
16.5	Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.									
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Indeks	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)		BPS, Statistik Strategis					
16.6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.									

16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui	Persentase								
16.6.1.(a)	Persentase instansi pemerintah yang mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Persentase	Opini BPK		Setda					
16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) $\geq B$	Persentase	Nilai akuntabilitas pemerintah (AKIP)		Setda					
16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) $\geq B$	Persentase	Indeks Reformasi Birokrasi		Setda					
16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.	Persentase			Setda					
16.7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan									
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Persentase	Keterlibatan Perempuan di Parlemen		Setwan	24.511	25.038	26.196	27.354	28.512
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Persentase	Keterlibatan Perempuan di lembaga eksekutif	%	BKPPD	20	22	24	26	28
			Indeks Demokrasi Indonesia		RPD DIY 2023-2026					
16.7.2.(a)	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	Indeks	Indeks Demokrasi Aspek Lembaga Demokrasi		BPS, Statistik strategis					
16.7.2.(b)	Indeks Aspek Kebebasan	Indeks	Indeks Demokrasi Aspek Kebebasan Sipil		BPS, Statistik strategis					
16.7.2.(c)	Indeks Kesetaraan	Indeks								
16.8	Memperluas dan meningkatkan partisipasi negara berkembang di dalam lembaga tata kelola global.									
16.8.1 (a)	Jumlah keanggotaan dan kontribusi dalam forum dan organisasi internasional	Jumlah Lembaga								
16.9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.									
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	Persentase	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil Menurut Provinsi		Disdukcapil	99.2	99.25	99.3	99.35	99.4
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah	Persentase	Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Dengan Kepemilikan Akta Lahir (40% Terbawah), Menurut Provinsi (Persen)		Disdukcapil	97.76	97.81	97.86	97.91	97.96
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	Persentase	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran Menurut Provinsi (Persen)		Disdukcapil	97.76	97.81	97.86	97.91	97.96
16.10	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.									
16.10.1 (a)	Indikator Kebebasan dari kekerasan bagi jurnalis dan awak media	Indeks								
16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	Kasus	Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM		Polri, Dataku					
16.10.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Jumlah								
16.10.2*	Jumlah Negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.	UU								
16.10.2.(a)	Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi informatif	Persentase			Diskominfo					
16.10.2.(b)	Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.	Persentase								

16.a	Memperkuat lembaga-lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerjasama internasional, untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara berkembang, untuk mencegah kekerasan serta memerangi terorisme dan kejahatan.									
16.a.1*	Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan Paris Principles.	Lembaga								
16.b	Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.									
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Kebijakan/ Dokumen			Setda-Hukum		0	0	0	0

Matriks 2b: Rencana Program/Kegiatan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta

Program/Kegiatan/Rincian Output (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)		
			2023	2024	2025	2026						
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH												
Tujuan 1 : Tanpa kemiskinan												
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 1.2.1* Angka kemiskinan												
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 1.3.1 Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)												
Kode dan Nama Program 1: PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL												
1.6.2.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.6.2.2.03	Jumlah PSKS yang difasilitasi	Lembaga	6 Lembaga	6 Lembaga	6 Lembaga	6 Lembaga	2,295,681,580	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kode dan Nama Program 2: PROGRAM REHABILITASI SOSIAL												
1.6.4.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.6.4.2.01	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	Orang	330 Orang	331 Orang	332 Orang	333 Orang	1,889,314,160	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		1.6.4.2.01	Jumlah lansia terlantar yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	Orang	70 orang	72 orang	74 orang	76 orang	6,176,130,336	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		1.6.4.2.01	Jumlah Anak Terlantar yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	Orang	360 orang	360 orang	360 orang	360 orang	127,684,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		1.6.4.2.01	Jumlah Anak Terlantar yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial (RPA WILOSO PROJO)	Orang	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	3,328,638,880	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		1.6.4.2.01	Jumlah kelompok masyarakat miskin dan rentan yang tergabung dalam KUBE dan USEP	Orang	362 orang	362 orang	362 orang	362 orang	3,598,367,200	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.6.4.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1.6.4.2.02	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang tertangani	Orang	45 orang	45 orang	45 orang	45 orang	255,984,480	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		1.6.4.2.02	Jumlah tuna sosial khususnya gelandangan pengemis yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	Orang	195 orang	195 orang	195 orang	195 orang	969,408,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		1.6.4.2.02	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	500 orang	500 orang	500 orang	500 orang	555,550,480		Kota Yogyakarta	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kode dan Nama Program 3: PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL												
1.6.5.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.6.5.2.02	Jumlah dokumen database Fakir Miskin (PPKS dan PSKS)	Dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	6,649,705,120	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		1.6.5.2.02	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	32438 keluarga	32748 keluarga	33058 keluarga	33368 keluarga	5,793,683,760	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kode dan Nama Program 4: PROGRAM PENANGANAN BENCANA												
1.6.6.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.6.6.2.01	Jumlah Orang yang Mendapatkan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Orang	1000 orang	1000 orang	1000 orang	1000 orang	4,023,084,480	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

1.6.6.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	1.6.6.2.02	Jumlah organisasi sosial masyarakat yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pemberdayaan dalam kesiapsiagaan bencana	Organisasi	3 organisasi sosial	3 organisasi sosial	3 organisasi sosial	3 organisasi sosial	3 organisasi sosial	1,415,800,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
------------	---	------------	--	------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	------	-----------------	--

Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 1.5.4* Jumlah dokumen informasi rawan bencana (PPKS)

Kode dan Nama Program 1: PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

1.5.3.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.5.3.2.02	Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan	23 Kawasan	23 Kawasan	20 Kawasan	20 Kawasan	6,418,893,820	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1.5.3.2.02	Jumlah dokumen informasi rawan bencana	Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6,429,686,360	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1.5.3.2.02	Jumlah personil TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya	Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	136,766,000	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tujuan 2 : Tanpa Kelaparan

Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 2.2.1* Prevalensi stunting

Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 2.2.2* Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang

Kode dan Nama Program 1: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

1.2.2.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.2.2.2.01	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (berupa Antropometri Kit)	unit	20 unit	25 unit	30 unit	35 unit	706,534,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
		1.2.2.2.01	Jumlah Puskesmas yang terpenuhi terhadap Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai, Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik sesuai jenis pelayanan yang diberikan	puskesmas	18 puskesmas	18 puskesmas	18 puskesmas	18 puskesmas	11,797,942,096	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
		1.2.2.2.01	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Penggunaan Obat Rasional	puskesmas	18 puskesmas	18 puskesmas	18 puskesmas	18 puskesmas	47,479,875,124	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
		1.2.2.2.01	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	puskesmas	18 puskesmas	18 puskesmas	18 puskesmas	18 puskesmas	800,000,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
		1.2.2.2.01	Jumlah Laporan Kunjungan Keluarga dan Kunjungan Intervensi Keluarga dengan Masalah Kesehatan di Wilayah Kerja 18 Puskesmas	laporan	18 laporan	18 laporan	18 laporan	18 laporan	1,600,000,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
		1.2.2.2.01	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan di UPT Laboratorium Kesehatan	laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	16,450,000,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
		1.2.2.2.01	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Obat dan Vaksin, Bahan Habis Pakai serta Dokumen Laporan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik di RS Pratama	dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12,600,000,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
		1.2.2.2.01	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Keluarga dan Kunjungan Intervensi Keluarga yang memiliki Masalah Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	3,371,294,880	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
		1.2.2.2.01	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk Pengembangan Rumah Sakit Pratama	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	26,000,000,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.2.2.2.02	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	2236 orang	2013 orang	1812 orang	1631 orang	515,292,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
		1.2.2.2.02	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	2236 orang	2013 orang	1812 orang	1631 orang	401,160,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
		1.2.2.2.02	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	2200 orang	1980 orang	1782 orang	1604 orang	741,700,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
		1.2.2.2.02	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	10250 orang	10300 orang	10300 orang	10300 orang	90,200,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
		1.2.2.2.02	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	29700 orang	29750 orang	29800 orang	29850 orang	553,880,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
		1.2.2.2.02	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	19000 orang	19000 orang	19000 orang	19000 orang	352,720,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
		1.2.2.2.02	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	582,520,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

		1.2.2.2.02	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga, Kesehatan Lingkungan serta Penyelenggaraan Kota Sehat	dokumen	21 dokumen	21 dokumen	21 dokumen	21 dokumen	5,617,806,634	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
		1.2.2.2.02	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan GERMAS bersama Lintas Sektoral di wilayah Kemanren	laporan	14 laporan	14 laporan	14 laporan	14 laporan	2,641,548,342	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
		1.2.2.2.02	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita Tuberkulosis Sesuai Standar	laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	491,379,200	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
		1.2.2.2.02	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita HIV Sesuai Standar	laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	206,674,240	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
		1.2.2.2.02	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	1,773,718,240	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
		1.2.2.2.02	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Surveilans Kesehatan	dokumen	64 dokumen	64 dokumen	64 dokumen	64 dokumen	1,006,134,240	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
		1.2.2.2.02	Jumlah Laporan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kota Yogyakarta	laporan	33 laporan	33 laporan	34 laporan	34 laporan	4,392,966,600	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
		1.2.2.2.02	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	unit	3 unit	4 unit	5 unit	6 unit	1,600,000,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
		1.2.2.2.02	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Laboratorium Kesehatan	dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	2,290,000,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
		1.2.2.2.02	Jumlah Laporan Hasil Operasional Pelayanan PSC 119 YES yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	1,622,514,304	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
		1.2.2.2.02	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta	laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	51,057,160,502	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
		1.2.2.2.02	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penduduk Usia Produktif Sesuai Standar	laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	837,441,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
		1.2.2.2.02	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penderita Hipertensi Sesuai Standar	laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	46,966,200	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
		1.2.2.2.02	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	51,884,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
		1.2.2.2.02	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	183,568,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
		1.2.2.2.02	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) Sesuai Standar	laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	46,000,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
		1.2.2.2.02	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	212,938,798,160	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
1.2.2.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.2.2.2.03	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan (Profil Kesehatan)	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	678,492,080	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
		1.2.2.2.03	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	1,336,582,880	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
1.2.2.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.2.2.2.04	Jumlah Laporan Hasil pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	373,280,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
		1.2.2.2.04	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	unit	34 unit	34 unit	34 unit	34 unit	3,477,904,980	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
Kode dan Nama Program 2: PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA												
1.2.3.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	1.2.3.2.01	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan di wilayah Kota Yogyakarta	dokumen	6500 dokumen	6500 dokumen	6500 dokumen	6500 dokumen	602,953,280	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

1.2.3.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.2.3.2.02	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan, Distribusi, Pemerataan, Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	854,313,488	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
		1.2.3.2.02	Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Laboratorium Kesehatan Kota Yogyakarta	laporan	6 laporan	7 laporan	8 laporan	8 laporan	800,358,240	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
		1.2.3.2.02	Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di PSC 119 YES Kota Yogyakarta	laporan	33 laporan	33 laporan	33 laporan	33 laporan	4,078,646,160	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
		1.2.3.2.02	Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta	laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	32,848,924,284	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
		1.2.3.2.02	Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di RS Pratama	laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	21,436,120,196	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
1.2.3.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah	1.2.3.2.03	Jumlah Laporan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kota Yogyakarta yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	laporan	30 laporan	30 laporan	30 laporan	30 laporan	2,531,428,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
Kode dan Nama Program 3: PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN												
1.2.4.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1.2.4.2.01	Jumlah Dokumen Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	dokumen	30 dokumen	30 dokumen	30 dokumen	30 dokumen	69,372,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
1.2.4.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1.2.4.2.03	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT	dokumen	120 dokumen	120 dokumen	120 dokumen	120 dokumen	506,160,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
		1.2.4.2.03	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	238,720,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
1.2.4.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	1.2.4.2.06	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar	laporan	65 laporan	65 laporan	65 laporan	65 laporan	407,320,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
Kode dan Nama Program 4: PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN												
1.2.5.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.2.5.2.01	Jumlah Kelurahan Siaga Aktif yang dilakukan pembinaan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	kelurahan	39 kelurahan	39 kelurahan	42 kelurahan	45 kelurahan	768,465,423	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
Kode dan Nama Program 5: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
1.2.2.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.2.2.2.01	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	27,846,000,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
		1.2.2.2.01	Jumlah bahan habis pakai yang disediakan	paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	18,564,000,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
		1.2.2.2.01	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	unit	13 unit	14 unit	15 unit	16 unit	11,603,000,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
		1.2.2.2.01	Jumlah sarana di fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	58,748,936,986	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
		1.2.2.2.01	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan program rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit	paket	9 paket	4 paket	1 paket	1 paket	800,000,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
		1.2.2.2.01	Jumlah prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	paket	9 paket	5 paket	2 paket	2 paket	2,000,000,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

		1.2.2.2.01	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	paket	7 paket	6 paket	5 paket	5 paket	27,000,000,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
1.2.2.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.2.2.2.03	Jumlah alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet yang disediakan	unit	4 unit	3 unit	3 unit	3 unit	1,380,000,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
Kode dan Nama Program 6: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
1.2.1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.2.1.2.10	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di 18 Puskesmas	laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	95,639,713,904	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
		1.2.1.2.10	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di RS Pratama	laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	74,795,947,197	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 2.2.2(a) Angka Konsumsi Pangan												
Kode dan Nama Program 1: PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN												
2.9.2.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.9.2.2.01	Peningkatan jumlah kawasan yang dikembangkan menjadi kawasan pangan lestari	kawasan	13 kawasan	17 kawasan	21 kawasan	25 kawasan	3,016,650,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pertanian dan Pangan
Kode dan Nama Program 2: PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT												
2.9.3.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.9.3.2.01	Jumlah laporan informasi ketahanan pangan	dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	1,483,314,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pertanian dan Pangan
2.9.3.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan	2.9.3.2.02	Jumlah cadangan pangan pemerintah daerah yang dikelola	ton	65.05 ton	83.35 ton	101.65 ton	120 ton	815,010,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pertanian dan Pangan
2.9.3.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	2.9.3.2.04	Jumlah dokumen penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun dan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	821,457,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pertanian dan Pangan
Kode dan Nama Program 3: PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN												
2.9.4.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	2.9.4.2.01	Jumlah informasi kerawanan pangan	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	492,642,150	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pertanian dan Pangan
Kode dan Nama Program 4: PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN												
2.9.5.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	2.9.5.2.01	Jumlah informasi hasil pengawasan keamanan pangan segar daerah Kabupaten/Kota	laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	1,996,688,573	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pertanian dan Pangan
Kode dan Nama Program 5: PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA												
3.25.4.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	3.25.4.2.02	Peningkatan jumlah pembudidaya ikan yang berizin	orang	9 orang	12 orang	15 orang	18 orang	1,878,800,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pertanian dan Pangan
3.25.4.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan	3.25.4.2.04	Peningkatan produksi benih ikan	ekor	80000 ekor	85000 ekor	90000 ekor	95000 ekor	2,254,560,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pertanian dan Pangan
Kode dan Nama Program 6: PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN												
3.25.6.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	3.25.6.2.02	Jumlah pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi bagi pelaku usaha pengolahan dan pemasaran perikanan serta masyarakat	jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	456,280,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pertanian dan Pangan
Kode dan Nama Program 7: PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN												
3.27.2.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.27.2.2.01	Jumlah petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan	petani	130 petani	130 petani	130 petani	130 petani	112,246,459	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.2.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan	3.27.2.2.02	Peningkatan jumlah tanaman buah yang bersertifikat/berlabel	varietas	7 varietas	12 varietas	16 varietas	24 varietas	5,517,692,885	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.2.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	3.27.2.2.04	Jumlah pengecer obat hewan yang dtibina dan diawasi	unit usaha	25 unit usaha	30 unit usaha	35 unit usaha	40 unit usaha	230,000,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pertanian dan Pangan

Kode dan Nama Program 8: PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN													
3.27.3.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	3.27.3.2.02	Peningkatan jumlah prasarana pertanian yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	unit	18 unit	19 unit	20 unit	23 unit		5,138,015,500	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pertanian dan Pangan
Kode dan Nama Program 9: PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER													
3.27.4.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah	3.27.4.2.01	Jumlah penyakit hewan menular strategis dan Zoonosis yang terkendali	jenis	21 jenis	21 jenis	21 jenis	21 jenis		740,000,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.4.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah	3.27.4.2.03	Peningkatan jumlah pelayanan jasa medik veteriner	tindakan	14138 tindakan	14983 tindakan	15486 tindakan	16118 tindakan		2,190,000,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.4.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	3.27.4.2.04	Jumlah laporan pengawasan dan pengujian pangan segar asal hewan dan perikanan	laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan		3,006,660,016	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pertanian dan Pangan
		3.27.4.2.04	Jenis pelayanan pemotongan hewan di Rumah Pemotongan Hewan	jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis		1,975,000,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pertanian dan Pangan
Kode dan Nama Program 10: PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN													
3.27.5.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	3.27.5.2.01	Jenis pencegahan dan KIE Bencana Non Alam yang bersifat Zoonosis	jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis		1,100,000,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pertanian dan Pangan
Kode dan Nama Program 11: PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN													
3.27.7.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.27.7.2.01	Peningkatan jumlah Kelompok Tani kelas Lanjut	kelompok	84 kelompok	88 kelompok	92 kelompok	96 kelompok		4,298,105,444	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pertanian dan Pangan
Tujuan 3 : Kehidupan sehat dan sejahtera													
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 3.1.1* Jumlah kematian ibu													
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 3.1.2* Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan													
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 3.4.1(b) Persentase Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan													
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 3.8.1* Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar													
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 3.8.2(a) Persentase penduduk yang mempunyai JKN													
Kode dan Nama Program 1: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													
1.2.2.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.2.2.2.01	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (berupa Antropometri Kit)	unit	20 unit	25 unit	30 unit	35 unit		706,534,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
		1.2.2.2.01	Jumlah Puskesmas yang terpenuhi terhadap Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai, Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik sesuai jenis pelayanan yang diberikan	puskesmas	18 puskesmas	18 puskesmas	18 puskesmas	18 puskesmas		11,797,942,096	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
		1.2.2.2.01	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Penggunaan Obat Rasional	puskesmas	18 puskesmas	18 puskesmas	18 puskesmas	18 puskesmas		47,479,875,124	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
		1.2.2.2.01	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	puskesmas	18 puskesmas	18 puskesmas	18 puskesmas	18 puskesmas		800,000,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
		1.2.2.2.01	Jumlah Laporan Kunjungan Keluarga dan Kunjungan Intervensi Keluarga dengan Masalah Kesehatan di Wilayah Kerja 18 Puskesmas	laporan	18 laporan	18 laporan	18 laporan	18 laporan		1,600,000,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
		1.2.2.2.01	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan di UPT Laboratorium Kesehatan	laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan		16,450,000,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
		1.2.2.2.01	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Obat dan Vaksin, Bahan Habis Pakai serta Dokumen Laporan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik di RS Pratama	dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen		12,600,000,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
		1.2.2.2.01	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Keluarga dan Kunjungan Intervensi Keluarga yang memiliki Masalah Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan		3,371,294,880	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
		1.2.2.2.01	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk Pengembangan Rumah Sakit Pratama	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		26,000,000,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.2.2.2.02	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	2236 orang	2013 orang	1812 orang	1631 orang		515,292,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
		1.2.2.2.02	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	2236 orang	2013 orang	1812 orang	1631 orang		401,160,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
		1.2.2.2.02	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	2200 orang	1980 orang	1782 orang	1604 orang		741,700,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
		1.2.2.2.02	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	10250 orang	10300 orang	10300 orang	10300 orang		90,200,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

1.2.2.2.02	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	29700 orang	29750 orang	29800 orang	29850 orang	553,880,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan		
1.2.2.2.02	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	19000 orang	19000 orang	19000 orang	19000 orang	352,720,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan		
1.2.2.2.02	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	582,520,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan		
1.2.2.2.02	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga, Kesehatan Lingkungan serta Penyelenggaraan Kota Sehat	dokumen	21 dokumen	21 dokumen	21 dokumen	21 dokumen	5,617,806,634	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan		
1.2.2.2.02	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan GERMAS bersama Lintas Sektoral di wilayah Kemanren	laporan	14 laporan	14 laporan	14 laporan	14 laporan	2,641,548,342	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan		
1.2.2.2.02	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita Tuberkulosis Sesuai Standar	laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	491,379,200	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan		
1.2.2.2.02	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita HIV Sesuai Standar	laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	206,674,240	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan		
1.2.2.2.02	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	1,773,718,240	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan		
1.2.2.2.02	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Surveilans Kesehatan	dokumen	64 dokumen	64 dokumen	64 dokumen	64 dokumen	1,006,134,240	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan		
1.2.2.2.02	Jumlah Laporan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kota Yogyakarta	laporan	33 laporan	33 laporan	34 laporan	34 laporan	4,392,966,600	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan		
1.2.2.2.02	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	unit	3 unit	4 unit	5 unit	6 unit	1,600,000,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan		
1.2.2.2.02	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Laboratorium Kesehatan	dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	2,290,000,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan		
1.2.2.2.02	Jumlah Laporan Hasil Operasional Pelayanan PSC 119 YES yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	1,622,514,304	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan		
1.2.2.2.02	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta	laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	51,057,160,502	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan		
1.2.2.2.02	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penduduk Usia Produktif Sesuai Standar	laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	837,441,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan		
1.2.2.2.02	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penderita Hipertensi Sesuai Standar	laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	46,966,200	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan		
1.2.2.2.02	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	51,884,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan		
1.2.2.2.02	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	183,568,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan		
1.2.2.2.02	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) Sesuai Standar	laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	46,000,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan		
1.2.2.2.02	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	laporan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	212,938,798,160	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan		
1.2.2.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.2.2.2.03	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan (Profil Kesehatan)	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	678,492,080	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
		1.2.2.2.03	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	1,336,582,880	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
1.2.2.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.2.2.2.04	Jumlah Laporan Hasil pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	373,280,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
		1.2.2.2.04	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	unit	34 unit	34 unit	34 unit	34 unit	3,477,904,980	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan

Kode dan Nama Program 2: PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

1.2.3.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	1.2.3.2.01	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan di wilayah Kota Yogyakarta	dokumen	6500 dokumen	6500 dokumen	6500 dokumen	6500 dokumen	602,953,280	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
1.2.3.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.2.3.2.02	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan, Distribusi, Pemerataan, Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	854,313,488	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
		1.2.3.2.02	Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Laboratorium Kesehatan Kota Yogyakarta	laporan	6 laporan	7 laporan	8 laporan	8 laporan	800,358,240	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
		1.2.3.2.02	Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di PSC 119 YES Kota Yogyakarta	laporan	33 laporan	33 laporan	33 laporan	33 laporan	4,078,646,160	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
		1.2.3.2.02	Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta	laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	32,848,924,284	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
		1.2.3.2.02	Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di RS Pratama	laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	21,436,120,196	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
1.2.3.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah	1.2.3.2.03	Jumlah Laporan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kota Yogyakarta yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	laporan	30 laporan	30 laporan	30 laporan	30 laporan	2,531,428,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
Kode dan Nama Program 3: PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN												
1.2.4.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1.2.4.2.01	Jumlah Dokumen Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	dokumen	30 dokumen	30 dokumen	30 dokumen	30 dokumen	69,372,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
1.2.4.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1.2.4.2.03	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT	dokumen	120 dokumen	120 dokumen	120 dokumen	120 dokumen	506,160,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
		1.2.4.2.03	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	238,720,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
1.2.4.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	1.2.4.2.06	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar	laporan	65 laporan	65 laporan	65 laporan	65 laporan	407,320,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
Kode dan Nama Program 4: PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN												
1.2.5.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.2.5.2.01	Jumlah Kelurahan Siaga Aktif yang dilakukan pembinaan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	kelurahan	39 kelurahan	39 kelurahan	42 kelurahan	45 kelurahan	768,465,423	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
Kode dan Nama Program 5: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
1.2.2.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.2.2.2.01	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	27,846,000,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
		1.2.2.2.01	Jumlah bahan habis pakai yang disediakan	paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	18,564,000,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
		1.2.2.2.01	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	unit	13 unit	14 unit	15 unit	16 unit	11,603,000,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
		1.2.2.2.01	Jumlah sarana di fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	58,748,936,986	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

		1.2.2.2.01	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan program rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit	paket	9 paket	4 paket	1 paket	1 paket	800,000,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
		1.2.2.2.01	Jumlah prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	paket	9 paket	5 paket	2 paket	2 paket	2,000,000,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
		1.2.2.2.01	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	paket	7 paket	6 paket	5 paket	5 paket	27,000,000,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
1.2.2.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.2.2.2.03	Jumlah alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet yang disediakan	unit	4 unit	3 unit	3 unit	3 unit	1,380,000,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
Kode dan Nama Program 6: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
1.2.1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.2.1.2.10	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di 18 Puskesmas	laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	95,639,713,904	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
		1.2.1.2.10	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di RS Pratama	laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	74,795,947,197	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 3.7.1* CPR (Contraceptive Prevalence Rate)												
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 3.8.1(a) Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)												
Kode dan Nama Program 1: PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK												
2.14.2.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	2.14.2.2.01	Jumlah organisasi yang mendapatkan advokasi, sosialisasi, dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, jalur non formal dan informal, dan pemanfaatan kajian dampak kependudukan	organisasi	25 organisasi	35 organisasi	44 organisasi	53 organisasi	527,356,480	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.2.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.14.2.2.02	Jumlah dokumen Penyediaan, Pengolahan, dan Pelaporan Data Kependudukan berbasis gender, Data dan Informasi Keluarga, Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB, serta Pembentukan Rumah data Kependudukan	dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	643,183,928	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kode dan Nama Program 2: PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)												
2.14.3.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.14.3.2.01	Jumlah dokumen pelaksanaan Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan budaya Lokal	dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	1,937,872,160	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.3.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.14.3.2.02	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	orang	662 orang	662 orang	662 orang	662 orang	864,000,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.3.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.14.3.2.03	Jumlah dokumen Pelaksanaan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Kota	dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	3,659,617,600	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.3.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan	2.14.3.2.04	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	kampung	45 kampung	45 kampung	45 kampung	45 kampung	1,863,000,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kode dan Nama Program 3: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)												
2.14.4.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.4.2.01	Jumlah laporan pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	8,033,696,480	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.4.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.4.2.02	Jumlah laporan pelaksanaan dan peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	148,600,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Tujuan 4 : Pendidikan berkualitas													
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 4.2.2* Persentase Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD													
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 4.3.1* Persentase jumlah penduduk usia 12-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar													
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 4.5.1* Angka Partisipasi Murni (APM) SD													
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 4.5.1* Angka Partisipasi Kasar SMP													
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 4.6.1 Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP													
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 4.6.1 Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP													
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 4.a.1* Jumlah Satuan Pendidikan SD yang tercukupi sarana dan prasarana bangunan memadai dan layak guna													
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 4.a.1* Jumlah Satuan Pendidikan SMP yang tercukupi sarana dan prasarana bangunan memadai dan layak guna													
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 4.c.1* Persentase guru sesuai kualifikasi													
Kode dan Nama Program 1: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													
1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.1.2.2.01	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian bagi Satuan Pendidikan dalam rangka evaluasi dan peningkatan kualitas lulusan SD	Satuan Pendidikan	164 Satuan Pendidikan	164 Satuan Pendidikan	164 Satuan Pendidikan	164 Satuan Pendidikan	164 Satuan Pendidikan	5,645,901,600	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		1.1.2.2.01	Jumlah Siswa SD yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	peserta	1500 peserta	1500 peserta	1500 peserta	1500 peserta	1500 peserta	5,506,207,440	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		1.1.2.2.01	Jumlah Satuan Pendidikan SD yang tercukupi sarana dan prasarana bangunan memadai dan layak guna	Satuan Pendidikan	164 Satuan Pendidikan	164 Satuan Pendidikan	164 Satuan Pendidikan	164 Satuan Pendidikan	164 Satuan Pendidikan	292,181,344,484	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		1.1.2.2.01	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	konten digital	7 konten digital	7 konten digital	7 konten digital	7 konten digital	7 konten digital	5,268,450,040	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		1.1.2.2.01	Jumlah Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusi Sekolah Dasar	Satuan Pendidikan	92 Satuan Pendidikan	92 Satuan Pendidikan	92 Satuan Pendidikan	92 Satuan Pendidikan	92 Satuan Pendidikan	15,645,715,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		1.1.2.2.01	Jumlah Peserta didik yang menerima Biaya Personil	peserta didik	5600 peserta didik	5600 peserta didik	5600 peserta didik	5600 peserta didik	5600 peserta didik	21,870,518,960	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1.1.2.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.1.2.2.02	"Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian bagi Satuan Pendidikan dalam rangka evaluasi dan peningkatan kualitas lulusan SMP"	Satuan Pendidikan	59 Satuan Pendidikan	59 Satuan Pendidikan	59 Satuan Pendidikan	59 Satuan Pendidikan	59 Satuan Pendidikan	3,537,080,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		1.1.2.2.02	Jumlah Siswa SMP yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	peserta	750 peserta	800 peserta	850 peserta	900 peserta	900 peserta	5,110,292,800	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		1.1.2.2.02	Jumlah Satuan Pendidikan SMP yang tercukupi sarana dan prasarana bangunan memadai dan layak guna	Satuan Pendidikan	4 Satuan Pendidikan	4 Satuan Pendidikan	4 Satuan Pendidikan	4 Satuan Pendidikan	4 Satuan Pendidikan	93,839,883,600	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		1.1.2.2.02	Jumlah Peserta didik yang menerima Biaya Personil Sekolah Menengah Pertama	peserta didik	5992 peserta didik	5992 peserta didik	5992 peserta didik	5992 peserta didik	5992 peserta didik	39,253,430,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		1.1.2.2.02	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 1	peserta didik	788 peserta didik	788 peserta didik	788 peserta didik	788 peserta didik	788 peserta didik	7,668,480,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		1.1.2.2.02	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 2	peserta didik	671 peserta didik	671 peserta didik	671 peserta didik	671 peserta didik	671 peserta didik	6,289,680,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		1.1.2.2.02	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 3	peserta didik	597 peserta didik	597 peserta didik	597 peserta didik	597 peserta didik	597 peserta didik	5,601,600,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		1.1.2.2.02	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 4	peserta didik	492 peserta didik	492 peserta didik	492 peserta didik	492 peserta didik	492 peserta didik	4,627,920,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		1.1.2.2.02	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 5	peserta didik	913 peserta didik	913 peserta didik	913 peserta didik	913 peserta didik	913 peserta didik	8,559,360,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		1.1.2.2.02	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 6	peserta didik	700 peserta didik	700 peserta didik	700 peserta didik	700 peserta didik	700 peserta didik	6,570,240,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		1.1.2.2.02	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 7	peserta didik	606 peserta didik	606 peserta didik	606 peserta didik	606 peserta didik	606 peserta didik	5,690,400,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		1.1.2.2.02	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 8	peserta didik	952 peserta didik	952 peserta didik	952 peserta didik	952 peserta didik	952 peserta didik	9,271,680,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		1.1.2.2.02	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 9	peserta didik	605 peserta didik	605 peserta didik	605 peserta didik	605 peserta didik	605 peserta didik	5,676,480,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		1.1.2.2.02	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 10	peserta didik	533 peserta didik	533 peserta didik	533 peserta didik	533 peserta didik	533 peserta didik	5,007,120,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		1.1.2.2.02	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 11	peserta didik	393 peserta didik	393 peserta didik	393 peserta didik	393 peserta didik	393 peserta didik	3,701,280,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		1.1.2.2.02	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 12	peserta didik	483 peserta didik	483 peserta didik	483 peserta didik	483 peserta didik	483 peserta didik	4,566,480,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		1.1.2.2.02	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 13	peserta didik	399 peserta didik	399 peserta didik	399 peserta didik	399 peserta didik	399 peserta didik	4,020,880,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		1.1.2.2.02	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 14	peserta didik	395 peserta didik	395 peserta didik	395 peserta didik	395 peserta didik	395 peserta didik	3,715,440,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		1.1.2.2.02	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 15	peserta didik	989 peserta didik	989 peserta didik	989 peserta didik	989 peserta didik	989 peserta didik	9,608,520,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

		1.1.2.2.02	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 16	peserta didik	711 peserta didik	711 peserta didik	711 peserta didik	711 peserta didik	6,677,760,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1.1.2.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.1.2.2.03	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar PAUD	siswa	16774 siswa	16774 siswa	16774 siswa	16774 siswa	51,415,063,360	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		1.1.2.2.03	Jumlah Satuan Pendidikan PAUD yang tercurukupi sarana dan prasarana bangunan memadai serta layak guna	Satuan Pendidikan	3 Satuan Pendidikan	4 Satuan Pendidikan	5 Satuan Pendidikan	6 Satuan Pendidikan	23,277,230,112	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		1.1.2.2.03	Jumlah Peserta didik TK yang menerima Biaya Personil	peserta didik	763 peserta didik	763 peserta didik	763 peserta didik	763 peserta didik	4,990,400,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1.1.2.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.1.2.2.04	Jumlah Peserta Didik yang berpartisipasi dalam Pusat Kegiatan belajar Masyarakat	peserta didik	1483 peserta didik	1483 peserta didik	1483 peserta didik	1483 peserta didik	14,973,865,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		1.1.2.2.04	Jumlah Peserta didik Nonformal Kesetaraan yang menerima Biaya Personil	peserta didik	250 peserta didik	250 peserta didik	250 peserta didik	250 peserta didik	4,000,000,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		1.1.2.2.04	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Non Formal Kesetaraan	peserta didik	251 peserta didik	251 peserta didik	251 peserta didik	251 peserta didik	4,155,600,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kode dan Nama Program 2: PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN												
1.1.4.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.1.4.2.01	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memiliki Kompetensi dan Kualifikasi pendidikan sesuai standar	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	81,724,403,840	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		1.1.4.2.01	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menerima Kompensasi untuk peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi pendidikan	orang	6442 orang	6442 orang	6442 orang	6442 orang	102,428,662,112	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Tujuan 5: Kesetaraan Gender												
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 5.2.1* Prevalensi kekerasan terhadap perempuan												
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 5.2.1* Persentase Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tertangani												
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 5.c.1 Capaian layanan fasilitasi advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta penyediaan data pengendalian penduduk berbasis gender												
Kode dan Nama Program 1: PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN												
2.8.2.2.01	Nama Kegiatan: Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	2.8.2.2.01	Jumlah dokumen koordinasi, sosialisasi, dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	452,320,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.8.2.2.01	Jumlah dokumen hasil sosialisasi, advokasi Kebijakan, dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi kewenangan Kab/Kota	Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	655,652,360	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.8.2.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.8.2.2.03	jumlah dokumen hasil advokasi kebijakan dan komunikasi informasi edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota	Dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	2,025,120,324	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kode dan Nama Program 4: PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK												
2.8.7.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.8.7.2.01	Jumlah lembaga yang berkoordinasi, bersinkronisasi, dan mendapat Advokasi Kebijakan serta Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	Lembaga	5 lembaga	5 lembaga	5 lembaga	5 lembaga	3,007,912,180	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.8.7.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.8.7.2.02	Jumlah Anak yang Terlayani Pengaduan dan Rujukan Lanjutan bagi Anak korban kekerasan, diskriminasi dan yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Kabupaten/Kota	Orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	576,838,376	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2.8.7.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.8.7.2.03	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	119,680,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kode dan Nama Program 5: PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK												
2.14.2.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	2.14.2.2.01	Jumlah organisasi yang mendapatkan advokasi, sosialisasi, dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, jalur non formal dan informal, dan pemanfaatan kajian dampak kependudukan	Organisasi	25 organisasi	35 organisasi	44 organisasi	53 organisasi	527,356,480	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.2.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.14.2.2.02	Jumlah dokumen Penyediaan, Pengolahan, dan Pelaporan Data Kependudukan berbasis gender, Data dan Informasi Keluarga, Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB, serta Pembentukan Rumah data Kependudukan	Dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	643,183,928	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tujuan 6: Air bersih dan sanitasi layak												
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 6.1.1* Persentase capaian kinerja pelayanan air minum PDAM												
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 6.2.1* Persentase pelayanan SPALD-S akses aman												
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 6.2.1* Persentase pelayanan SPALD-T akses aman												
Kode dan Nama Program 1: PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM												
1.3.3.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.3.3.2.01	Jumlah Badan Usaha yang menyelenggarakan SPAM yang terbina dan terawasi	Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	30,830,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kode dan Nama Program 2: PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH												
1.3.5.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.3.5.2.01	Jumlah rumah tangga yang tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat skala kota	SR	157 SR	200 SR	200 SR	200 SR	10,052,493,040	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		1.3.5.2.01	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota	SR	100 SR	100 SR	100 SR	100 SR	8,926,944,075	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		1.3.5.2.01	Jumlah unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dioperasikan dan dipelihara	Unit	7 Unit	18 Unit	18 Unit	18 Unit	18,061,563,804	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tujuan 7: Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern untuk Semua												
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 7.2.1* Persentase kualitas penerangan jalan umum ramah lingkungan												
Kode dan Nama Program 1: PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)												
2.15.2.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.2.2.02	Jumlah perlengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	21.272 Unit	23.072 Unit	24.872 Unit	26.672 Unit	126,005,555,996	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tujuan 8: Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi												
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 8.1.1* Angka Pertumbuhan Ekonomi												
Kode dan Nama Program 1: PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN												
3.30.2.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	3.30.2.2.06	Jumlah Laporan Pengawasan peredaran barang berbahaya dan pengujian sampel BTM/P di toko modern produsen dan pasar rakyat	laporan	10 laporan	10 laporan	10 laporan	10 laporan	175,933,750	APBD	Yogyakarta	Dinas Perdagangan
Kode dan Nama Program 2: PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN												
3.30.3.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.30.3.2.01	Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan penyediaan sarana distribusi perdagangan	pasar	29 Pasar	29 Pasar	29 Pasar	29 Pasar	5,964,384,000	APBD	Yogyakarta	Dinas Perdagangan
		3.30.3.2.01	Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan UPT Wilayah I	pasar	15 Pasar	15 Pasar	15 Pasar	15 Pasar	7,224,603,400	APBD	Yogyakarta	Dinas Perdagangan
		3.30.3.2.01	Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan UPT Pasar Wilayah II	pasar	15 Pasar	15 Pasar	15 Pasar	15 Pasar	7,633,473,700	APBD	Yogyakarta	Dinas Perdagangan
		3.30.3.2.01	Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan UPT PASTY	pasar	1 Pasar	1 Pasar	1 Pasar	1 Pasar	3,940,446,400	APBD	Yogyakarta	Dinas Perdagangan
		3.30.3.2.01	Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan fasilitasi, koordinasi, pemanfaatan dan pengelolaan terhadap sarana distribusi perdagangan	pasar	29 Pasar	29 Pasar	29 Pasar	29 Pasar	5,539,465,200	APBD	Yogyakarta	Dinas Perdagangan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

3.30.3.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	3.30.3.2.02	Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan Pembinaan dan Pengendalian Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	pasar	29 Pasar	29 Pasar	29 Pasar	29 Pasar	38,652,045,400	APBD	Yogyakarta	Dinas Perdagangan
Kode dan Nama Program 3: PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING												
3.30.4.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	3.30.4.2.01	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	118,865,500	APBD	Yogyakarta	Dinas Perdagangan
3.30.4.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	3.30.4.2.02	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar	laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	559,750,400	APBD	Yogyakarta	Dinas Perdagangan
Kode dan Nama Program 4: PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI												
3.30.7.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	3.30.7.2.01	Jumlah UMK yang mendapatkan fasilitasi promosi penggunaan produk dalam negeri	UMK	100 UMK	100 UMK	100 UMK	100 UMK	5,692,903,600	APBD	Yogyakarta	Dinas Perdagangan
		3.30.7.2.01	Jumlah UMK yang mendapatkan fasilitasi pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	UMK	300 UMK	300 UMK	300 UMK	300 UMK	540,948,625	APBD	Yogyakarta	Dinas Perdagangan
Kode dan Nama Program 5: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
3.30.1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	3.30.1.2.10	Layanan BLUD UPT Pusat Bisnis (kios dan konter pusat perbelanjaan Beringharjo, Ruang Ekraf Prawirotaman)	Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	24,983,977,392	APBD	Yogyakarta	Dinas Perdagangan
Kode dan Nama Program 6: PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI												
3.31.2.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.31.2.2.01	Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	122,577,912	APBD	Yogyakarta	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		3.31.2.2.01	Jumlah IKM yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	IKM	200 IKM	200 IKM	200 IKM	200 IKM	926,114,467	APBD	Yogyakarta	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		3.31.2.2.01	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	939,955,938	APBD	Yogyakarta	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		3.31.2.2.01	Jumlah Sentra yang mendapatkan monitoring dan evaluasi	Sentra	30 Sentra	30 Sentra	30 Sentra	30 Sentra	80,000,000	APBD	Yogyakarta	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		3.31.2.2.01	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100,000,000	APBD	Yogyakarta	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		3.31.2.2.01	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2,954,169,697	APBD	Yogyakarta	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kode dan Nama Program 7: PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI												
3.31.3.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	3.31.3.2.01	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	320,000,000	APBD	Yogyakarta	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kode dan Nama Program 8: PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL												
3.31.4.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	3.31.4.2.01	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINAS	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	520,000,000	APBD	Yogyakarta	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kode dan Nama Program 9: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
3.31.1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	3.31.1.2.10	Layanan UPT Logam	Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,778,150,000	APBD	Yogyakarta	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kode dan Nama Program 10: PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA												
3.26.2.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.2.2.03	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan standar layanan.	Lokasi	20 Lokasi	21 Lokasi	22 Lokasi	23 Lokasi	12,129,717,600	APBD	Yogyakarta	Dinas Pariwisata
		3.26.2.2.03	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Terkelola	DTW	4 DTW	4 DTW	5 DTW	5 DTW	9,230,633,412	APBD	Yogyakarta	Dinas Pariwisata
Kode dan Nama Program 11: PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA												
3.26.3.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.3.2.01	Nilai hasil pemasaran dan Promosi Dalam dan Luar Negeri	Rupiah	831.600.000 Rupiah	914.760.000 Rupiah	1.006.236.000 Rupiah	1.106.859.000 Rupiah	8,395,396,000	APBD	Yogyakarta	Dinas Pariwisata
		3.26.3.2.01	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3,266,489,960	APBD	Yogyakarta	Dinas Pariwisata
Kode dan Nama Program 12: PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

3.26.5.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	3.26.5.2.01	Jumlah laporan hasil fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi, dan konservasi ekonomi kreatif	Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	1,125,000,000	APBD	Yogyakarta	Dinas Pariwisata
		3.26.5.2.01	Jumlah rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	925,000,000	APBD	Yogyakarta	Dinas Pariwisata
		3.26.5.2.01	Jumlah dokumen Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	3,591,080,000	APBD	Yogyakarta	Dinas Pariwisata
		3.26.5.2.01	Jumlah laporan pengembangan dan sertifikasi SDM Pariwisata Tingkat Dasar	Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	2,287,568,000	APBD	Yogyakarta	Dinas Pariwisata
Kode dan Nama Program 13: PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAHAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN													
2.22.8.5.02	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	2.22.8.5.02	Jumlah objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dikelola	objek	1 objek	1 objek	1 objek	1 objek	1 objek	40,658,400,000	APBD	Yogyakarta	Dinas Kebudayaan (Kudha Kabudayan)
2.22.8.5.03	Pengelolaan Taman Budaya	2.22.8.5.03	Jumlah event seni budaya yg terlaksana di Taman Budaya Embung Giwangan	event	1 event	2 event	3 event	4 event	4 event	226,241,000,000	APBD	Yogyakarta	Dinas Kebudayaan (Kudha Kabudayan)
Kode dan Nama Program 14: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
2.22.1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.22.1.2.10	Jumlah bulan pelaksanaan layanan BLUD (UPT PTB)	bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	20,680,000,000	APBD	Yogyakarta	Dinas Kebudayaan (Kudha Kabudayan)
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 8.3.1.(a) Nilai Omset UKM Usaha Mikro tahun n													
Kode dan Nama Program 1: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)													
2.17.7.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.7.2.01	Jumlah wirasaha baru yang mendapat pembinaan dan pendampingan	Wirasaha baru	100 Wirasaha baru	100 Wirasaha baru	100 Wirasaha baru	100 Wirasaha baru	100 Wirasaha baru	1,587,378,047	APBD	Yogyakarta	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		2.17.7.2.01	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	596,386,437	APBD	Yogyakarta	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		2.17.7.2.01	Jumlah pelaku yang mendapatkan fasilitasi perizinan usaha mikro	Unit Usaha	120 Unit Usaha	120 Unit Usaha	120 Unit Usaha	120 Unit Usaha	120 Unit Usaha	96,741,950	APBD	Yogyakarta	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		2.17.7.2.01	Jumlah pelaku yang mendapatkan pemberdayaan kelembagaan, penataan manajemen dan restrukturisasi usaha	UMKM	400 UMKM	400 UMKM	400 UMKM	400 UMKM	400 UMKM	1,076,878,192	APBD	Yogyakarta	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kode dan Nama Program 2: PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM													
2.17.8.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	2.17.8.2.01	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	UKM	265 UKM	265 UKM	265 UKM	265 UKM	265 UKM	3,327,669,418	APBD	Yogyakarta	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 8.5.2* Tingkat Pengangguran Terbuka													
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 8.8.1.(a) Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial													
Kode dan Nama Program 1: PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA													
2.7.2.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	2.7.2.2.01	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	631,173,600	APBD	Yogyakarta	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kode dan Nama Program 2: PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA													
2.7.3.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.7.3.2.01	Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi	orang	320 orang	320 orang	320 orang	320 orang	320 orang	5,474,537,040	APBD	Yogyakarta	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.7.3.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	2.7.3.2.02	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang dibina	LPK	51 LPK	51 LPK	51 LPK	51 LPK	51 LPK	455,888,800	APBD	Yogyakarta	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.7.3.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	2.7.3.2.04	Jumlah Perusahaan, UKM dan IKM yang ditingkatkan Produktivitasnya	Perusahaan/UKM/IKM	40 perusahaan/UKM/IKM	40 perusahaan/UKM/IKM	40 perusahaan/UKM/IKM	40 perusahaan/UKM/IKM	40 perusahaan/UKM/IKM	138,120,000	APBD	Yogyakarta	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kode dan Nama Program 3: PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA													
2.7.4.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	2.7.4.2.01	Jumlah layanan perluasan kesempatan kerja	layanan	5 layanan	5 layanan	5 layanan	5 layanan	5 layanan	4,788,132,000	APBD	Yogyakarta	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.7.4.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2.7.4.2.03	Jumlah pencari kerja dan pemberi kerja yang terdaftar di IPK Online dan dari Pameran Bursa Kerja/Job Fair	orang	1350 orang	1350 orang	1350 orang	1350 orang	1350 orang	817,359,360	APBD	Yogyakarta	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kode dan Nama Program 4: PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL													
2.7.5.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya	2.7.5.2.01	Jumlah perjanjian kerja di perusahaan	perusahaan	423 perusahaan	448 perusahaan	479 perusahaan	517 perusahaan	517 perusahaan	245,848,000	APBD	Yogyakarta	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		2.7.5.2.01	Jumlah perusahaan yang menerapkan struktur skala upah	persen	39.26 %	40.26 %	41.26 %	42.26 %	42.26 %	701,872,000	APBD	Yogyakarta	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.7.5.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	2.7.5.2.02	Jumlah perselisihan hubungan industrial	perkara	24 perkara	22 perkara	20 perkara	18 perkara	18 perkara	1,114,234,000	APBD	Yogyakarta	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		2.7.5.2.02	Jumlah perusahaan yang sudah menyediakan fasilitas kesejahteraan pekerja	persen	39.26 %	40.26 %	41.26 %	42.26 %	42.26 %	1,392,888,000	APBD	Yogyakarta	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 8.9.1.(a) Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara													
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara													
Kode dan Nama Program 1: PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA													

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

3.26.2.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.2.2.03	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan standar layanan.	Lokasi	20 Lokasi	21 Lokasi	22 Lokasi	23 Lokasi	12,129,717,600	APBD	Yogyakarta	Dinas Pariwisata
		3.26.2.2.03	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Terkelola	DTW	4 DTW	4 DTW	5 DTW	5 DTW	9,230,633,412	APBD	Yogyakarta	Dinas Pariwisata
Kode dan Nama Program 2: PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA												
3.26.3.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.3.2.01	Nilai hasil pemasaran dan Promosi Dalam dan Luar Negeri	Rupiah	831.600.000 Rupiah	914.760.000 Rupiah	1.006.236.000 Rupiah	1.106.859.000 Rupiah	8,395,396,000	APBD	Yogyakarta	Dinas Pariwisata
		3.26.3.2.01	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3,266,489,960	APBD	Yogyakarta	Dinas Pariwisata
Kode dan Nama Program 3: PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF												
3.26.5.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	3.26.5.2.01	Jumlah laporan hasil fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi, dan konservasi ekonomi kreatif	Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	1,125,000,000	APBD	Yogyakarta	Dinas Pariwisata
		3.26.5.2.01	Jumlah rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	925,000,000	APBD	Yogyakarta	Dinas Pariwisata
		3.26.5.2.01	Jumlah dokumen Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	3,591,080,000	APBD	Yogyakarta	Dinas Pariwisata
		3.26.5.2.01	Jumlah laporan pengembangan dan sertifikasi SDM Pariwisata Tingkat Dasar	Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	2,287,568,000	APBD	Yogyakarta	Dinas Pariwisata
Tujuan 9: Industri, Inovasi dan Infrastruktur												
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 9.1.1.(a) Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan												
Kode dan Nama Program 1: PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE												
1.3.6.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.3.6.2.01	Panjang saluran drainase perkotaan yang dibangun	meter	1150 m	1200 m	1200 m	1200 m	52,864,995,229	APBD	Yogyakarta	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman
		1.3.6.2.01	Panjang saluran drainase yang dioperasikan dan dipelihara	meter	10.000 m	10.000 m	10.000 m	10.000 m	11,886,750,331	APBD	Yogyakarta	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman
Kode dan Nama Program 2: PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN												
1.3.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.3.10.2.01	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara berkala	kilometer	0,726 km	6,8 km	6,8 km	6,8 km	18,372,749,495	APBD	Yogyakarta	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman
		1.3.10.2.01	Panjang jalan dan jembatan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	kilometer	9,1 km	10,2 km	10,2 km	10,2 km	36,015,837,907	APBD	Yogyakarta	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman
Kode dan Nama Program 3: PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)												
2.15.2.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.2.2.02	Jumlah perlengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	21.272 Unit	23.072 Unit	24.872 Unit	26.672 Unit	126,005,555,996	APBD	Yogyakarta	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman
Tujuan 10: Berkurangnya Kesenjangan												
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 10.1.1* Rasio gini												
Kode dan Nama Program 1: PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA												
2.7.2.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	2.7.2.2.01	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	631,173,600	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kode dan Nama Program 2: PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA												
2.7.3.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.7.3.2.01	Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi	orang	320 orang	320 orang	320 orang	320 orang	5,474,537,040	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.7.3.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	2.7.3.2.02	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang dibina	LPK	51 LPK	51 LPK	51 LPK	51 LPK	455,888,800	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.7.3.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	2.7.3.2.04	Jumlah Perusahaan, UKM dan IKM yang ditingkatkan Produktivitasnya	perusahaan/UKM/IKM	40 perusahaan/UKM/IKM	40 perusahaan/UKM/IKM	40 perusahaan/UKM/IKM	40 perusahaan/UKM/IKM	138,120,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kode dan Nama Program 3: PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA												
2.7.4.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	2.7.4.2.01	Jumlah layanan perluasan kesempatan kerja	layanan	5 layanan	5 layanan	5 layanan	5 layanan	4,788,132,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.7.4.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2.7.4.2.03	Jumlah pencari kerja dan pemberi kerja yang terdaftar di IPK Online dan dari Pameran Bursa Kerja/Job Fair	orang	1350 orang	1350 orang	1350 orang	1350 orang	817,359,360	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kode dan Nama Program 4: PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL												
2.7.5.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya	2.7.5.2.01	Jumlah perjanjian kerja di perusahaan	perusahaan	423 perusahaan	448 perusahaan	479 perusahaan	517 perusahaan	245,848,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		2.7.5.2.01	Jumlah perusahaan yang menerapkan struktur skala upah	persen	39.26 %	40.26 %	41.26 %	42.26 %	701,872,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.7.5.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan	2.7.5.2.02	Jumlah perselisihan hubungan industrial	perkara	24 perkara	22 perkara	20 perkara	18 perkara	1,114,234,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

	Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	2.7.5.2.02	Jumlah perusahaan yang sudah menyediakan fasilitas kesejahteraan pekerja	persen	39.26 %	40.26 %	41.26 %	42.26 %		1,392,888,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kode dan Nama Program 5: PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI													
3.32.3.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.32.3.2.01	Jumlah KK yang ditempatkan	KK	5 KK	6 KK	7 KK	8 KK		773,695,160	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kode dan Nama Program 6: PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI													
2.17.3.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	2.17.3.2.01	Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku	Unit Usaha	115 Unit Usaha	115 Unit Usaha	115 Unit Usaha	115 Unit Usaha		732,598,506	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kode dan Nama Program 7: PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI													
2.17.4.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.17.4.2.01	Jumlah Koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat	Unit	115 Unit	115 Unit	115 Unit	115 Unit		214,000,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		2.17.4.2.01	Jumlah Koperasi simpan pinjam yang mendapat penghargaan	Koperasi	20 Koperasi	20 Koperasi	20 Koperasi	20 Koperasi		73,263,977	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kode dan Nama Program 8: PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN													
2.17.5.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.17.5.2.01	Jumlah SDM koperasi yang mendapatkan peningkatan kapasitas dan kompetensi	Orang	540 Orang	615 Orang	690 Orang	765 Orang		1,433,847,255	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kode dan Nama Program 9: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI													
2.17.6.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah	2.17.6.2.01	Jumlah koperasi yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan	Unit	12 Unit	18 Unit	24 Unit	30 Unit		1,352,126,695	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kode dan Nama Program 10: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)													
2.17.7.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.7.2.01	Jumlah wirausaha baru yang mendapat pembinaan dan pendampingan	Wirausaha baru	100 Wirausaha baru	100 Wirausaha baru	100 Wirausaha baru	100 Wirausaha baru		1,587,378,047	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		2.17.7.2.01	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		596,386,437	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		2.17.7.2.01	Jumlah pelaku yang mendapatkan fasilitasi perizinan usaha mikro	Unit Usaha	120 Unit Usaha	120 Unit Usaha	120 Unit Usaha	120 Unit Usaha		96,741,950	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		2.17.7.2.01	Jumlah pelaku yang mendapatkan pemberdayaan kelembagaan, penataan manajemen dan restrukturisasi usaha	UMKM	400 UMKM	400 UMKM	400 UMKM	400 UMKM		1,076,878,192	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kode dan Nama Program 11: PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM													
2.17.8.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	2.17.8.2.01	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	UKM	265 UKM	265 UKM	265 UKM	265 UKM		3,327,669,418	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 10.1.1.(a) Angka kemiskinan													
Kode dan Nama Program 1: PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL													
1.6.2.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.6.2.2.03	Jumlah PSKS yang difasilitasi	Lembaga	6 Lembaga	6 Lembaga	6 Lembaga	6 Lembaga		2,295,681,580	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kode dan Nama Program 2: PROGRAM REHABILITASI SOSIAL													
1.6.4.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantli Sosial	1.6.4.2.01	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	orang	330 orang	330 orang	330 orang	330 orang		1,889,314,160	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		1.6.4.2.01	Jumlah lansia terlantar yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	orang	70 orang	72 orang	74 orang	76 orang		6,176,130,336	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		1.6.4.2.01	Jumlah Anak Terlantar yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	orang	360 orang	360 orang	360 orang	360 orang		127,684,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		1.6.4.2.01	Jumlah Anak Terlantar yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial (RPA WILOSO PROJIO)	orang	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang		3,328,638,880	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		1.6.4.2.01	Jumlah kelompok masyarakat miskin dan rentan yang tergabung dalam KUBE dan USEP	orang	362 orang	362 orang	362 orang	362 orang		3,598,367,200	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.6.4.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantli Sosial	1.6.4.2.02	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantli Sosial yang tertangani	orang	45 orang	45 orang	45 orang	45 orang		255,984,480	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		1.6.4.2.02	Jumlah tuna sosial khususnya gelandangan pengemis yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	orang	195 orang	195 orang	195 orang	195 orang		969,408,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		1.6.4.2.02	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	500 orang	500 orang	500 orang	500 orang		555,550,480	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kode dan Nama Program 3: PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL													

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

1.6.5.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.6.5.2.02	Jumlah dokumen database Fakir Miskin (PPKS dan PSKS)	dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	6,649,705,120	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		1.6.5.2.02	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	keluarga	32438 keluarga	32748 keluarga	33058 keluarga	33368 keluarga	5,793,683,760	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kode dan Nama Program 4: PROGRAM PENANGANAN BENCANA												
1.6.6.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.6.6.2.01	Jumlah Orang yang Mendapatkan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	orang	1000 orang	1000 orang	1000 orang	1000 orang	4,023,084,480	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.6.6.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	1.6.6.2.02	Jumlah organisasi sosial masyarakat yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pemberdayaan dalam kesiapsiagaan bencana	organisasi sosial	3 organisasi sosial	3 organisasi sosial	3 organisasi sosial	3 organisasi sosial	1,415,800,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 8.1.1* Angka Pertumbuhan Ekonomi												
Kode dan Nama Program 1: PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN												
3.30.2.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	3.30.2.2.06	Jumlah Laporan Pengawasan peredaran barang berbahaya dan pengujian sampel BTM/P di toko modern produsen dan pasar rakyat	Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	175,933,750	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Perdagangan
Kode dan Nama Program 2: PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN												
3.30.3.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.30.3.2.01	Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan penyediaan sarana distribusi perdagangan	Pasar	29 Pasar	29 Pasar	29 Pasar	29 Pasar	5,964,384,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Perdagangan
		3.30.3.2.01	Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan UPT Wilayah I	Pasar	15 Pasar	15 Pasar	15 Pasar	15 Pasar	7,224,603,400	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Perdagangan
		3.30.3.2.01	Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan UPT Pasar Wilayah II	Pasar	15 Pasar	15 Pasar	15 Pasar	15 Pasar	7,633,473,700	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Perdagangan
		3.30.3.2.01	Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan UPT PASTY	Pasar	1 Pasar	1 Pasar	1 Pasar	1 Pasar	3,940,446,400	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Perdagangan
		3.30.3.2.01	Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan fasilitasi, koordinasi , pemanfaatan dan pengelolaan terhadap sarana distribusi perdagangan	Pasar	29 Pasar	29 Pasar	29 Pasar	29 Pasar	5,539,465,200	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Perdagangan
3.30.3.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	3.30.3.2.02	Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan Pembinaan dan Pengendalian Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Pasar	29 Pasar	29 Pasar	29 Pasar	29 Pasar	38,652,045,400	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Perdagangan
Kode dan Nama Program 3: PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING												
3.30.4.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	3.30.4.2.01	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	118,865,500	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Perdagangan
3.30.4.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	3.30.4.2.02	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	559,750,400	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Perdagangan
Kode dan Nama Program 4: PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI												
3.30.7.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	3.30.7.2.01	Jumlah UMK yang mendapatkan fasilitasi promosi penggunaan produk dalam negeri	UMK	100 UMK	100 UMK	100 UMK	100 UMK	5,692,903,600	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Perdagangan
		3.30.7.2.01	Jumlah UMK yang mendapatkan fasilitasi pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	UMK	300 UMK	300 UMK	300 UMK	300 UMK	540,948,625	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Perdagangan
Kode dan Nama Program 5: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
3.30.1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	3.30.1.2.10	Layanan BLUD UPT Pusat Bisnis (kios dan konter pusat belanjaan Beringharjo, Ruang Ekraf Prawirotaman)	Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	24,983,977,392	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Perdagangan
Kode dan Nama Program 6: PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI												
3.31.2.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.31.2.2.01	Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	122,577,912	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		3.31.2.2.01	Jumlah IKM yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	IKM	200 IKM	200 IKM	200 IKM	200 IKM	926,114,467	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		3.31.2.2.01	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	939,955,938	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		3.31.2.2.01	Jumlah Sentra yang mendapatkan monitoring dan evaluasi	Sentra	30 Sentra	30 Sentra	30 Sentra	30 Sentra	80,000,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

		3.31.2.2.01	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100,000,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		3.31.2.2.01	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2,954,169,697	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kode dan Nama Program 7: PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI												
3.31.3.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	3.31.3.2.01	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	320,000,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Perdagangan/Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kode dan Nama Program 8: PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL												
3.31.4.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	3.31.4.2.01	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIIInas	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	520,000,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Perdagangan/Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kode dan Nama Program 9: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
3.31.1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	3.31.1.2.10	Layanan UPT Logam	Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,778,150,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Perdagangan/Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kode dan Nama Program 10: PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA												
3.26.2.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.2.2.03	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan standar layanan.	Lokasi	20 Lokasi	21 Lokasi	22 Lokasi	23 Lokasi	12,129,717,600	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pariwisata
		3.26.2.2.03	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Terkelola	DTW	4 DTW	4 DTW	5 DTW	5 DTW	9,230,633,412	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pariwisata
Kode dan Nama Program 11: PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA												
3.26.3.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.3.2.01	Nilai hasil pemasaran dan Promosi Dalam dan Luar Negeri	Rupiah	831.600.000 Rupiah	914.760.000 Rupiah	1.006.236.000 Rupiah	1.106.859.000 Rupiah	8,395,396,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pariwisata
		3.26.3.2.01	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3,266,489,960	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pariwisata
Kode dan Nama Program 12: PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF												
3.26.5.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	3.26.5.2.01	Jumlah laporan hasil fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi, dan konservasi ekonomi kreatif	Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	1,125,000,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pariwisata
		3.26.5.2.01	Jumlah rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	925,000,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pariwisata
		3.26.5.2.01	Jumlah dokumen Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	3,591,080,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pariwisata
		3.26.5.2.01	Jumlah laporan pengembangan dan sertifikasi SDM Pariwisata Tingkat Dasar	Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	2,287,568,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pariwisata
Kode dan Nama Program 13: PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN												
2.22.8.5.02	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	2.22.8.5.02	Jumlah objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dikelola	Objek	1 objek	1 objek	1 objek	1 objek	40,658,400,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
2.22.8.5.03	Pengelolaan Taman Budaya	2.22.8.5.03	Jumlah event seni budaya yg terlaksana di Taman Budaya Embung Giwangan	Event	1 event	2 event	3 event	4 event	226,241,000,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
Kode dan Nama Program 14: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
2.22.1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.22.1.2.10	Jumlah bulan pelaksanaan layanan BLUD (UPT PTB)	Bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	20,680,000,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Perdagangan/Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 10.3.1.(c) Persentase perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terselesaikan												
Kode dan Nama Program 1: PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN												
2.8.3.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.8.3.2.01	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	300,900,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.8.3.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.8.3.2.02	Jumlah Orang yang Terlayani Tindak Lanjut Pengaduan dan Rujukan lanjutan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	2,273,150,584	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.8.3.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.8.3.2.03	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	210 orang	210 orang	210 orang	210 orang	548,956,160	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tujuan 11: Kota dan komunitas berkelanjutan												
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 11.1.1 Persentase permukiman kumuh yang tertangani												
Kode dan Nama Program 1: PROGRAM PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN												
1.4.3.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.4.3.2.03	Jumlah rencana tapak (site plan) dan Detail Engineering Design (DED) perencanaan/pemugaran permukiman kumuh	Dokumen	4 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	3,017,338,460	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		1.4.3.2.03	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki	Unit Rumah	140 Unit Rumah	130 Unit Rumah	130 Unit Rumah	130 Unit Rumah	21,704,906,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 11.5.1* Persentase korban kejadian bencana skala kota yang mendapatkan layanan evakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap												
Kode dan Nama Program 1: PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA												
1.5.3.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.5.3.2.02	Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan	23 Kawasan	23 Kawasan	20 Kawasan	20 Kawasan	6,418,893,820	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1.5.3.2.02	Jumlah dokumen informasi rawan bencana	Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6,429,686,360	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1.5.3.2.02	Jumlah personel TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya	Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	136,766,000	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.3.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.5.3.2.03	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi	Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	13,662,209,268	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1.5.3.2.03	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	4,009,145,600	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.3.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.5.3.2.04	Jumlah laporan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	1,842,212,160	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 11.6.1 Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai												
Kode dan Nama Program 1: PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH												
1.3.5.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.3.5.2.01	Jumlah rumah tangga yang tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat skala kota	SR	157 SR	200 SR	200 SR	200 SR	10,052,493,040	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		1.3.5.2.01	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota	SR	100 SR	100 SR	100 SR	100 SR	8,926,944,075	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		1.3.5.2.01	Jumlah unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dioperasikan dan dipelihara	Unit	7 Unit	18 Unit	18 Unit	18 Unit	18,061,563,804	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 11.6.1.(a) Persentase Pengelolaan Persampahan												
Kode dan Nama Program 1: PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN												
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01	Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA Kota Yogyakarta	ton/hari	284.35 ton/hari	281.82 ton/hari	278.90 ton/hari	274.91 ton/hari	72,988,222,192	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.11.2.01	Jumlah laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendaur ulang dan pemanfaatan kembali	laporan	8 laporan	8 laporan	8 laporan	8 laporan	7,045,064,392	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Lingkungan Hidup
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 11.7.1 Persentase Ruang Terbuka Hijau												
Kode dan Nama Program 1: PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)												
2.11.4.2.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2.11.4.2.01	Luasan RTHP lingkungan permukiman yang dikelola	Hektar	2.76 Ha	2.86 Ha	2.96 Ha	3.06 Ha	6,564,720,181	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.4.2.01	Luasan taman kota dan jalur hijau yang dikelola	Hektar	76.7 Ha	76.7 Ha	76.7 Ha	76.7 Ha	23,789,158,222	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Lingkungan Hidup
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 11.b.2* Jumlah dokumen informasi rawan bencana												
Kode dan Nama Program 1: PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA												
1.5.3.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.5.3.2.02	Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan	23 Kawasan	23 Kawasan	20 Kawasan	20 Kawasan	6,418,893,820	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1.5.3.2.02	Jumlah dokumen informasi rawan bencana	Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6,429,686,360	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1.5.3.2.02	Jumlah personel TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya	Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	136,766,000	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tujuan 12: Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab												
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 12.4.1.(a) Persentase usaha yang telah memiliki izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)												
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 12.6.1.(a) Persentase usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan												
Kode dan Nama Program 1: PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2.11.6.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.11.6.2.01	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	dokumen	56 dokumen	156 dokumen	156 dokumen	156 dokumen	1,576,690,304	APDB	Kota Yogyakarta	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.6.2.01	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	dokumen	215 dokumen	251 dokumen	287 dokumen	323 dokumen	561,571,517	APDB	Kota Yogyakarta	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.6.2.01	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	24 laporan	26 laporan	26 laporan	26 laporan	330,534,620	APDB	Kota Yogyakarta	Dinas Lingkungan Hidup

Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 12.5.1.(a) Persentase sampah yang berkurang

2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01	Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA Kota Yogyakarta	ton/hari	284.35 ton/hari	281.82 ton/hari	278.90 ton/hari	274.91 ton/hari	72,988,222,192	APDB	Kota Yogyakarta	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.11.2.01	Jumlah laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendaur ulang dan pemanfaatan kembali	laporan	8 laporan	8 laporan	8 laporan	8 laporan	7,045,064,392	APDB	Kota Yogyakarta	Dinas Lingkungan Hidup

Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 12.b.1 Indeks kualitas atraksi pariwisata

Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 12.b.1(a) Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima

3.26.2.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.2.2.03	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan standar layanan.	Lokasi	20 Lokasi	21 Lokasi	22 Lokasi	23 Lokasi	12,129,717,600	APDB	Kota Yogyakarta	Dinas Pariwisata
		3.26.2.2.03	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Terkelola	DTW	4 DTW	4 DTW	5 DTW	5 DTW	9,230,633,412	APDB	Kota Yogyakarta	Dinas Pariwisata

Tujuan 13: Penanganan perubahan iklim

Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 13.1.2* Persentase korban kejadian bencana skala kota yang mendapatkan layanan evakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap

Kode dan Nama Program 1: PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

1.5.3.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.5.3.2.02	Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan	23 Kawasan	23 Kawasan	20 Kawasan	20 Kawasan	6,418,893,820	APBD	Yogyakarta	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1.5.3.2.02	Jumlah dokumen informasi rawan bencana	Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6,429,686,360	APBD	Yogyakarta	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1.5.3.2.02	Jumlah personel TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya	Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	136,766,000	APBD	Yogyakarta	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.3.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.5.3.2.03	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi	Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	13,662,209,268	APBD	Yogyakarta	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1.5.3.2.03	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	4,009,145,600	APBD	Yogyakarta	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.3.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.5.3.2.04	Jumlah laporan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	1,842,212,160	APBD	Yogyakarta	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tujuan 15: Ekosistem Daratan

Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 15.1.1* Persentase Ruang Terbuka Hijau

Kode dan Nama Program 1: PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

2.11.4.2.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2.11.4.2.01	Luasan RTHP lingkungan permukiman yang dikelola	Ha	2.76 Ha	2.86 Ha	2.96 Ha	3.06 Ha	6,564,720,181	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.4.2.02	Luasan taman kota dan jalur hijau yang dikelola	Ha	76.7 Ha	76.7 Ha	76.7 Ha	76.7 Ha	23,789,158,222	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan 16: Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh

Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 16.1.3.(a) Angka kriminalitas

Kode dan Nama Program 1: PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1.5.2.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah	1.5.2.2.01	Jumlah laporan pengamanan kegiatan/event Pemkot dan tempat penting/obyek vital Pemkot Yogyakarta	kasus	210 kasus	210 kasus	120 kasus	120 kasus	32,735,357,696	APBD	Kota Yogyakarta	Satuan Polisi Pamong Praja
------------	--	------------	--	-------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------------	------	-----------------	----------------------------

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Kabupaten/Kota	1.5.2.01	Jumlah laporan hasil monitoring dan penyelidikan operasi pengamanan tertutup	kasus	36 kasus	36 kasus	36 kasus	36 kasus	677,948,000	APBD	Kota Yogyakarta	Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.5.2.01	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan bimbingan intelektual/konseling SDM Pol PP dan Linmas	dokumen	24 dokumen	24 dokumen	24 dokumen	24 dokumen	382,400,000	APBD	Kota Yogyakarta	Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.5.2.01	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang memperoleh pelatihan pengembangan Kapasitas dan Profesionalisme	orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	1,116,848,000	APBD	Kota Yogyakarta	Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.5.2.01	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan dan mobilisasi petugas Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	8,088,303,408	APBD	Kota Yogyakarta	Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.5.2.01	Jumlah dokumen Kampung dan Sekolah Panca Tertib yang dideklarasikan dan ditubuhkan serta kerjasama dengan mitra kerja	dokumen	156 dokumen	174 dokumen	191 dokumen	208 dokumen	5,786,390,996	APBD	Kota Yogyakarta	Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.5.2.01	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang terlayani	laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	600,000,000	APBD	Kota Yogyakarta	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.5.2.02	1.5.2.02	Jumlah dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada Kota Yogyakarta secara non yustisi	laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	44,451,863,464	APBD	Kota Yogyakarta	Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.5.2.02	Jumlah dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada Kota Yogyakarta secara yustisi	laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	1,247,483,848	APBD	Kota Yogyakarta	Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.5.2.02	Jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas pejabat PPNS	laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	28,000,000	APBD	Kota Yogyakarta	Satuan Polisi Pamong Praja	
Kode dan Nama Program 2: PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan												
8.1.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.1.2.01	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Pelaksanaan, dan Monev di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	laporan	7 laporan	7 laporan	7 laporan	7 laporan	7,357,641,000	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kode dan Nama Program 3: PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik												
8.1.3.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8.1.3.01	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Pelaksanaan, dan Monev di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	59,565,573,832	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kode dan Nama Program 4: PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan												
8.1.4.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.1.4.01	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan, dan Monev di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	1,483,366,176	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kode dan Nama Program 5: PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya												
8.1.5.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	8.1.5.01	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Pelaksanaan, dan Monev di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4,327,001,080	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kode dan Nama Program 6: PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial												
8.1.6.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.1.6.01	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Pelaksanaan, dan Monev di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	6,828,706,192	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kode dan Nama Program 7: PROGRAM Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan												
2.19.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirasaha Muda Pemuda, dan Pemuda	2.19.2.01	Jumlah Pemuda yang memiliki kapasitas daya saing sebagai Pemuda pelopor, Wirasaha pemuda dan Pemuda Kader kabupaten/Kota	orang	19850 orang	19900 orang	19950 orang	20000 orang	12,981,546,560	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
2.19.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.19.2.02	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1,397,470,480	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kode dan Nama Program 8: PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN													
2.19.3.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.19.3.2.01	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	12,439,820,984	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
2.19.3.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.19.3.2.02	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	orang	300 orang	350 orang	400 orang	450 orang	500 orang	5,051,780,888	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
2.19.3.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	2.19.3.2.03	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota Secara Berkelanjutan	orang	500 orang	550 orang	600 orang	650 orang	700 orang	10,780,060,960	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
2.19.3.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	2.19.3.2.04	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	30,434,571,760	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
2.19.3.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	2.19.3.2.05	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival Olahraga Rekreasi, Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	4,309,720,100	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kode dan Nama Program 9: PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN													
2.19.4.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	2.19.4.2.01	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	organisasi	2 organisasi	2 organisasi	2 organisasi	2 organisasi	2 organisasi	1,192,000,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 16.2.1.(b) Prevalensi kekerasan terhadap anak													
Kode dan Nama Program 1: PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)													
2.8.6.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2.8.6.2.01	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang berkoordinasi, bersinkronisasi, serta mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak	organisasi	143 organisasi	153 organisasi	163 organisasi	173 organisasi	183 organisasi	5,043,776,044	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.8.6.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2.8.6.2.02	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	324,619,772	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kode dan Nama Program 2: PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK													
2.8.7.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.8.7.2.01	Jumlah lembaga yang berkoordinasi, bersinkronisasi, dan mendapat Advokasi Kebijakan serta Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	lembaga	5 lembaga	5 lembaga	5 lembaga	5 lembaga	5 lembaga	3,007,912,180	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.8.7.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.8.7.2.02	Jumlah Anak yang Terlayani Pengaduan dan Rujukan Lanjutan bagi Anak korban kekerasan, diskriminasi dan yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Kabupaten/Kota	orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	576,838,376	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.8.7.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.8.7.2.03	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	119,680,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 16.3.1.(a) Persentase perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terselesaikan													
Kode dan Nama Program 1: PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN													
2.8.3.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.8.3.2.01	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	300,900,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.8.3.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.8.3.2.02	Jumlah Orang yang Terlayani Tindak Lanjut Pengaduan dan Rujukan lanjutan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	2,273,150,584	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.8.3.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.8.3.2.03	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	orang	210 orang	210 orang	210 orang	210 orang	210 orang	548,956,160	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 16.3.1.(b) Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum dan HAM													
Kode dan Nama Program 1: PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT													
4.1.2.2.03	Fasilitas dan Koordinasi Hukum	4.1.2.2.03	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum dan HAM	Kasus	5 Kasus	5 Kasus	5 Kasus	5 Kasus	5 Kasus	2,075,336,000	APBD	Kota Yogyakarta	Sekretariat Daerah
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 16.6.1* Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah													

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Kode dan Nama Program 1: PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH												
5.2.2.2.01	Koordinas dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.2.2.2.01	Jumlah dokumen rencana anggaran	Dokumen	89 Dokumen	89 Dokumen	89 Dokumen	89 Dokumen	170,153,899	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.2.2.2.01	Jumlah dokumen pengendalian anggaran	SKPD	88 SKPD	88 SKPD	88 SKPD	88 SKPD	458,966,074	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.2.2.2.02	Koordinas dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	5.2.2.2.02	Jumlah dokumen dan laporan pengelolaan kas daerah	Dokumen	220 Dokumen	220 Dokumen	220 Dokumen	220 Dokumen	85,859,431,047	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.2.2.2.02	Jumlah dokumen dan laporan pembinaan dan pengelolaan belanja daerah	Laporan	92 Laporan	92 Laporan	92 Laporan	92 Laporan	627,686,223	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.2.2.2.03	Koordinas dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5.2.2.2.03	"Jumlah Laporan Hasil pembinaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah"	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	951,170,636	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.2.2.2.03	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Dokumen	57 Dokumen	57 Dokumen	57 Dokumen	57 Dokumen	281,514,250	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.2.2.2.03	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	13,824,000	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.2.2.2.03	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang dibina	BLUD	23 BLUD	23 BLUD	23 BLUD	23 BLUD	134,924,000	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kode dan Nama Program 2: PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH												
5.2.3.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.2.3.2.01	Jumlah kebijakan perencanaan pengelolaan barang milik daerah	Dokumen	6 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	5 Dokumen	601,272,396	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.2.3.2.01	Jumlah Penghapusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Pemkot Yogyakarta dan Jasa konsultasi penelitian jasa appraisal	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2,041,583,368	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.2.3.2.01	"Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah"	Laporan	20 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	5,007,454,604	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.2.3.2.01	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	OPD	41 OPD	41 OPD	41 OPD	41 OPD	228,830,000	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.2.3.2.01	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	850,912,172	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kode dan Nama Program 3: PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH												
5.2.4.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.2.4.2.01	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang terlayani dalam rangka optimalisasi pajak daerah	Berkas	39466 Berkas	40255 Berkas	41060 Berkas	41881 Berkas	1,639,733,991	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.2.4.2.01	Jumlah Laporan Hasil Pendataan, Pendaftaran, Pemeliharaan, dan Pelaporan Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1,400,000,000	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.2.4.2.01	Jumlah Ketetapan Pajak Daerah yang diterbitkan.	Ketetapan	111466 Ketetapan	114253 Ketetapan	117109 Ketetapan	120037 Ketetapan	2,163,000,000	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.2.4.2.01	Jumlah Dokumen Penagihan, Penyuluhan, dan Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	1087 Dokumen	1032 Dokumen	1030 Dokumen	1032 Dokumen	2,391,966,816	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.2.4.2.01	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	4,943,198,055	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.2.4.2.01	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak, Hasil Analisis Pajak, Pembinaan Pengelolaan Retribusi, dan Elektronifikasi Transaksi	Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	545,260,000	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 16.6.1.(a) Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah												
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 16.6.1.(b) Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah												
Kode dan Nama Program 1: PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH												
5.1.2.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	5.1.2.2.01	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian program kegiatan bersumber pendanaan dari Dana Keistimewaan, APBD DIY dan APBN Non Reguler	Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	284,108,000	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5.1.2.2.01	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	6 Dokumen	751,600,000	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.1.2.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	5.1.2.2.02	Jumlah dokumen data dan informasi pembangunan daerah	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	526,104,000	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.1.2.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	5.1.2.2.03	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	812,788,816	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kode dan Nama Program 2: PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH												
5.1.3.2.01	Koordinas Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.1.3.2.01	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor pemerintahan	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	229,486,080	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5.1.3.2.01	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor pembangunan manusia	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	216,726,080	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

		5.1.3.2.01	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor kesejahteraan rakyat	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	1,005,228,000	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.1.3.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	5.1.3.2.02	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor perekonomian	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	504,499,360	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5.1.3.2.02	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor pariwisata dan kebudayaan	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	300,000,000	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5.1.3.2.02	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor pengembangan dunia usaha	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	807,403,184	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.1.3.2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.1.3.2.03	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor pekerjaan umum dan perhubungan	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	428,954,848	APBD	Kota Yogyakarta
	5.1.3.2.03		Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor lingkungan hidup dan tata ruang	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	492,835,488	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.1.3.2.03		Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan sektor permukiman dan pengembangan wilayah	Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	1,761,792,128	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kode dan Nama Program 3: PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH													
5.2.2.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.2.2.2.01	Jumlah dokumen rencana anggaran	Dokumen	89 Dokumen	89 Dokumen	89 Dokumen	89 Dokumen	89 Dokumen	170,153,899	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.2.2.2.01	Jumlah dokumen pengendalian anggaran	SKPD	88 SKPD	88 SKPD	88 SKPD	88 SKPD	88 SKPD	458,966,074	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.2.2.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	5.2.2.2.02	Jumlah dokumen dan laporan pengelolaan kas daerah	Dokumen	220 Dokumen	220 Dokumen	220 Dokumen	220 Dokumen	220 Dokumen	85,859,431,047	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.2.2.2.02	Jumlah dokumen dan laporan pembinaan dan pengelolaan belanja daerah	Laporan	92 Laporan	92 Laporan	92 Laporan	92 Laporan	92 Laporan	627,686,223	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.2.2.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5.2.2.2.03	"Jumlah Laporan Hasil pembinaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah"	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	951,170,636	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.2.2.2.03	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Dokumen	57 Dokumen	57 Dokumen	57 Dokumen	57 Dokumen	57 Dokumen	281,514,250	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.2.2.2.03	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	13,824,000	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.2.2.2.03	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang dibina	BLUD	23 BLUD	23 BLUD	23 BLUD	23 BLUD	23 BLUD	134,924,000	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kode dan Nama Program 4: PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH													
5.2.3.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.2.3.2.01	Jumlah kebijakan perencanaan pengelolaan barang milik daerah	Dokumen	6 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	601,272,396	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.2.3.2.01	Jumlah Penghapusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Pemkot Yogyakarta dan Jasa konsultansi penelitian jasa appraisal	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2,041,583,368	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.2.3.2.01	"Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah"	Laporan	20 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	5,007,454,604	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.2.3.2.01	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	OPD	41 OPD	41 OPD	41 OPD	41 OPD	41 OPD	228,830,000	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.2.3.2.01	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	850,912,172	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kode dan Nama Program 5: PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH													
5.2.4.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.2.4.2.01	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang terlayani dalam rangka optimalisasi pajak daerah	Berkas	39466 Berkas	40255 Berkas	41060 Berkas	41881 Berkas	41881 Berkas	1,639,733,991	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.2.4.2.01	Jumlah Laporan Hasil Pendataan, Pendaftaran, Pemeliharaan, dan Pelaporan Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1,400,000,000	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.2.4.2.01	Jumlah Ketetapan Pajak Daerah yang diterbitkan.	Ketetapan	111466 Ketetapan	114253 Ketetapan	117109 Ketetapan	120037 Ketetapan	120037 Ketetapan	2,163,000,000	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.2.4.2.01	Jumlah Dokumen Penagihan, Penuluhan, dan Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	1087 Dokumen	1032 Dokumen	1030 Dokumen	1032 Dokumen	1032 Dokumen	2,391,966,816	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.2.4.2.01	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	4,943,198,055	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.2.4.2.01	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak, Hasil Analisis Pajak, Pembinaan Pengelolaan Retribusi, dan Elektronifikasi Transaksi	Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	545,260,000	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode dan Nama Program 6: PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN													
4.1.4.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	4.1.4.5.02	Jumlah laporan hasil diklat keistimewaan kabupaten/kota yang diselenggarakan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2,385,824,000	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Kode dan Nama Program 7: PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH													
5.3.2.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	5.3.2.2.01	Jumlah dokumen penyusunan, rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3,813,080,000	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
		5.3.2.2.01	Jumlah dokumen hasil koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian dan evaluasi ASN	Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	1,326,984,000	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
		5.3.2.2.01	Jumlah dokumen pengelolaan sistem informasi kepegawaian, data kepegawaian dan evaluasi data informasi dan sistem informasi kepegawaian	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	353,885,440	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5.3.2.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	5.3.2.2.02	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1,196,652,000	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
		5.3.2.2.02	Jumlah dokumen pengelolaan mutasi ASN antar daerah dan pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	881,960,000	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5.3.2.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	5.3.2.2.03	Jumlah dokumen pengelolaan assesment center	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	983,200,000	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
		5.3.2.2.03	Jumlah dokumen hasil sosialisasi, pembinaan, peningkatan karir, dan evaluasi Jabatan Fungsional ASN	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	1,011,700,000	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
		5.3.2.2.03	Jumlah dokumen peningkatan kapasitas ASN, pengelolaan administrasi kediklatan, koordinasi, kerjasama dan fasilitasi sertifikasi jabatan ASN.	Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	1,606,584,000	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5.3.2.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5.3.2.2.04	Jumlah dokumen peningkatan disiplin ASN, penyelesaian pelanggaran disiplin ASN, evaluasi disiplin ASN dan pelayanan proses ijin perceraian.	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	675,312,000	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
		5.3.2.2.04	Jumlah ASN yang menerima penghargaan, tandajasa, dan evaluasi pemberian penghargaan dan tanda jasa bagi ASN.	Orang	310 Orang	310 Orang	310 Orang	310 Orang	310 Orang	1,758,756,000	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
		5.3.2.2.04	Jumlah dokumen pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur.	Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	2,525,160,000	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Kode dan Nama Program 8: PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA													
5.4.2.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	5.4.2.2.01	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis, Rencana Pengembangan Kompetensi, dan standar perangkat pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum.	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	891,520,000	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
		5.4.2.2.01	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai dengan tatakala.	Orang	771 Orang	509 Orang	600 Orang	650 Orang	650 Orang	27,766,792,112	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Kode dan Nama Program 9: PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN													
6.1.2.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.1.2.2.01	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengawasan Internal di Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	114,039,392	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM/Inspektorat Daerah
		6.1.2.2.01	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengawasan Internal di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	32,146,015	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM/Inspektorat Daerah
		6.1.2.2.01	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengawasan Internal di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Dalam Hal Penyelesaian Tindak lanjut Eksternal	Laporan	35 Laporan	35 Laporan	35 Laporan	35 Laporan	35 Laporan	182,344,094	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM/Inspektorat Daerah
		6.1.2.2.01	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengawasan Internal di Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Laporan	56 Laporan	56 Laporan	56 Laporan	56 Laporan	56 Laporan	303,294,796	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM/Inspektorat Daerah
		6.1.2.2.01	Jumlah Dokumen Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	28,365,730	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM/Inspektorat Daerah
		6.1.2.2.01	Jumlah Dokumen Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu di Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	Laporan	25 Laporan	25 Laporan	25 Laporan	25 Laporan	25 Laporan	470,646,527	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM/Inspektorat Daerah
Kode dan Nama Program 10: PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI													
6.1.3.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	6.1.3.2.01	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun pada Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	61,330,724	APBD	Kota Yogyakarta	Inspektorat Daerah

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

		6.1.3.2.01	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun pada Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	168,520,521	APBD	Kota Yogyakarta	Inspektorat Daerah
6.1.3.2.02	Pendampingan dan Asistensi	6.1.3.2.02	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi di Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Perangkat Daerah	44 Perangkat Daerah	44 Perangkat Daerah	44 Perangkat Daerah	44 Perangkat Daerah	1,176,740,625	APBD	Kota Yogyakarta	Inspektorat Daerah
		6.1.3.2.02	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi di Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	Perangkat Daerah	44 Perangkat Daerah	44 Perangkat Daerah	44 Perangkat Daerah	44 Perangkat Daerah	147,160,486	APBD	Kota Yogyakarta	Inspektorat Daerah
Kode dan Nama Program 11: PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA												
2.16.3.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.3.2.01	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	19,209,391,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.16.3.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.3.2.02	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1,156,800,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
		2.16.3.2.02	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	27,041,087,360	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
		2.16.3.2.02	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1,133,904,480	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
		2.16.3.2.02	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan	Unit	20 unit	20 unit	20 unit	20 unit	4,077,219,200	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
		2.16.3.2.02	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	2,557,700,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
		2.16.3.2.02	Jumlah laporan penyelenggaraan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kota Cerdas	Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	660,489,600	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
		2.16.3.2.02	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Layanan	4 layanan	4 layanan	4 layanan	4 layanan	829,130,168	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Kode dan Nama Program 12: PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN												
4.1.4.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	4.1.4.5.01	Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli	Lembaga	3 Lembaga	3 Lembaga	3 Lembaga	3 Lembaga	253,444,000	APBD	Kota Yogyakarta	Sekretariat Daerah
4.1.4.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	4.1.4.5.02	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	242,812,000	APBD	Kota Yogyakarta	Sekretariat Daerah
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 16.6.2 Indeks pelayanan publik												
Kode dan Nama Program 1: PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN												
4.1.4.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	4.1.4.5.01	Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli	Lembaga	3 Lembaga	3 Lembaga	3 Lembaga	3 Lembaga	253,444,000	APBD	Kota Yogyakarta	Sekretariat Daerah
4.1.4.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	4.1.4.5.02	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	242,812,000	APBD	Kota Yogyakarta	Sekretariat Daerah
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 16.9.1.(b) Persentase kepemilikan dokumen kependudukan												
Kode dan Nama Program 1: PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK												
2.12.2.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.12.2.2.01	Jumlah Dokumen Hasil Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan, serta Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Dokumen	7135 dokumen	7280 dokumen	7325 dokumen	7370 dokumen	197,274,240	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2.12.2.2.01	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk, serta Laporan Hasil Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dokumen	60010 dokumen	59030 dokumen	60010 dokumen	60010 dokumen	4,674,290,416	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.2.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	2.12.2.2.03	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Laporan	14 laporan	14 laporan	14 laporan	14 laporan	301,393,600	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 16.10.2.(a) Indeks Layanan Informasi Publik												
Kode dan Nama Program 1: PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK												
2.16.2.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.2.2.01	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah : analisis media cetak, analisis media online, analisis media sosial, dan penyusunan IKM survei persepsi	Dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	875,520,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
		2.16.2.2.01	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik, Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, dan Layanan Hubungan Media	Dokumen	14 dokumen	14 dokumen	14 dokumen	14 dokumen	8,848,408,024	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

		2.16.2.2.01	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik dan sumber daya komunikasi publik yang meningkat.	Dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	1,884,948,960	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Tujuan 17: Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan												
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 17.1.1* Nilai Pendapatan Asli Daerah												
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 17.1.1.(a) Nilai pendapatan Pajak Daerah												
Kode dan Nama Program 1: PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH												
5.2.2.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.2.2.2.01	Jumlah dokumen rencana anggaran	Dokumen	89 Dokumen	89 Dokumen	89 Dokumen	89 Dokumen	170,153,899	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.2.2.2.01	Jumlah dokumen pengendalian anggaran	SKPD	88 SKPD	88 SKPD	88 SKPD	88 SKPD	458,966,074	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.2.2.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	5.2.2.2.02	Jumlah dokumen dan laporan pengelolaan kas daerah	Dokumen	220 Dokumen	220 Dokumen	220 Dokumen	220 Dokumen	85,859,431,047	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.2.2.2.02	Jumlah dokumen dan laporan pembinaan dan pengelolaan belanja daerah	Laporan	92 Laporan	92 Laporan	92 Laporan	92 Laporan	627,686,223	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.2.2.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5.2.2.2.03	"Jumlah Laporan Hasil pembinaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah"	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	951,170,636	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.2.2.2.03	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Dokumen	57 Dokumen	57 Dokumen	57 Dokumen	57 Dokumen	281,514,250	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.2.2.2.03	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	13,824,000	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.2.2.2.03	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang dibina	BLUD	23 BLUD	23 BLUD	23 BLUD	23 BLUD	134,924,000	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kode dan Nama Program 2: PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH												
5.2.3.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.2.3.2.01	Jumlah kebijakan perencanaan pengelolaan barang milik daerah	Dokumen	6 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	5 Dokumen	601,272,396	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.2.3.2.01	Jumlah Penghapusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Pemkot Yogyakarta dan Jasa konsultansi penelitian jasa appraisal	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2,041,583,368	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.2.3.2.01	"Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah"	Laporan	20 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	5,007,454,604	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.2.3.2.01	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	ODP	41 OPD	41 OPD	41 OPD	41 OPD	228,830,000	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.2.3.2.01	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	850,912,172	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kode dan Nama Program 3: PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH												
5.2.4.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.2.4.2.01	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang terlayani dalam rangka optimalisasi pajak daerah	Berkas	39466 Berkas	40255 Berkas	41060 Berkas	41881 Berkas	1,639,733,991	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.2.4.2.01	Jumlah Laporan Hasil Pendataan, Pendaftaran, Pemeliharaan, dan Pelaporan Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1,400,000,000	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.2.4.2.01	Jumlah Ketetapan Pajak Daerah yang diterbitkan.	Ketetapan	111466 Ketetapan	114253 Ketetapan	117109 Ketetapan	120037 Ketetapan	2,163,000,000	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.2.4.2.01	Jumlah Dokumen Penagihan, Penyuluhan, dan Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	1087 Dokumen	1032 Dokumen	1030 Dokumen	1032 Dokumen	2,391,966,816	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.2.4.2.01	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	4,943,198,055	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.2.4.2.01	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak, Hasil Analisis Pajak, Pembinaan Pengelolaan Retribusi, dan Elektronifikasi Transaksi	Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	545,260,000	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 17.5.1 Nilai investasi												
Kode dan Nama Program 1: PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL												
2.18.2.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.18.2.2.01	Jumlah dokumen terlaksananya kajian pengembangan investasi	Dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	2,285,130,400	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.2.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2.18.2.2.02	Jumlah terlaksananya media promosi investasi	Jenis media promosi	10 jenis media promosi	10 jenis media promosi	10 jenis media promosi	10 jenis media promosi	3,044,223,248	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kode dan Nama Program 2: PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL												
2.18.4.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.18.4.2.01	Jumlah perizinan dan non perizinan yang dilayani	Pelayanan	12000 pelayanan	12000 pelayanan	12000 pelayanan	12000 pelayanan	1,812,814,064	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2.18.4.2.01	Jumlah Pelayanan Konsultasi, Informasi dan Pengaduan yang dilayani	Pelayanan	4800 pelayanan	4800 pelayanan	4800 pelayanan	4800 pelayanan	974,255,200	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Kode dan Nama Program 3: PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL												
2.18.5.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.18.5.2.01	Jumlah tersedianya investor wajib LKPM yang telah menyampaikan LKPM	Investor	234 investor	259 investor	284 investor	309 investor	950,874,720	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2.18.5.2.01	Jumlah tersedianya jumlah pelaku usaha yang menjadi sasaran pembinaan	Pelaku usaha	253 pelaku usaha	253 pelaku usaha	253 pelaku usaha	253 pelaku usaha	1,799,683,296	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kode dan Nama Program 4: PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL												
2.18.6.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.18.6.2.01	Jumlah tersedianya layanan yang dikelola	Layanan	10 layanan	10 layanan	10 layanan	10 layanan	1,387,819,344	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2.18.6.2.01	Jumlah tersedianya arsip yang dikelola	Arsip	4000 arsip	4000 arsip	4000 arsip	4000 arsip	327,140,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 17.6.1.(b) Persentase pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik												
Kode dan Nama Program 1: PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA												
2.16.3.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.3.2.01	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	19,209,391,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
		2.16.3.2.02	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1,156,800,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
		2.16.3.2.02	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	27,041,087,360	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
		2.16.3.2.02	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1,133,904,480	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
		2.16.3.2.02	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan	Unit	20 unit	20 unit	20 unit	20 unit	4,077,219,200	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
		2.16.3.2.02	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	2,557,700,000	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
		2.16.3.2.02	Jumlah laporan penyelenggaraan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kota Cerdas	Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	660,489,600	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
		2.16.3.2.02	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Layanan	4 layanan	4 layanan	4 layanan	4 layanan	829,130,168	APBD	Kota Yogyakarta	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 17.14.1 Indeks pelaksanaan pembangunan												
Kode dan Nama Program 1: PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN												
4.1.3.2.01	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	4.1.3.2.01	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	962,722,400	APBD	Kota Yogyakarta	Sekretariat Daerah
		4.1.3.2.01	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	397,107,240	APBD	Kota Yogyakarta	Sekretariat Daerah
		4.1.3.2.01	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	591,440,320	APBD	Kota Yogyakarta	Sekretariat Daerah
4.1.3.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4.1.3.2.03	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	783,982,256	APBD	Kota Yogyakarta	Sekretariat Daerah
		4.1.3.2.03	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	853,607,784	APBD	Kota Yogyakarta	Sekretariat Daerah
		4.1.3.2.03	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	749,809,856	APBD	Kota Yogyakarta	Sekretariat Daerah
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 17.18.1 Indeks perencanaan pembangunan												
Kode dan Nama Program 1: PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH												
5.1.2.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	5.1.2.2.01	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian program kegiatan bersumber pendanaan dari Dana Keistimewaan, APBD DIY dan APBN Non Reguler	Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	284,108,000	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5.1.2.2.01	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	6 Dokumen	751,600,000	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.1.2.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	5.1.2.2.02	Jumlah dokumen data dan informasi pembangunan daerah	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	526,104,000	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.1.2.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	5.1.2.2.03	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	812,788,816	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kode dan Nama Program 2: PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH												
5.1.3.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.1.3.2.01	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor pemerintahan	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	229,486,080	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

		5.1.3.2.01	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor pembangunan manusia	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	216,726,080	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5.1.3.2.01	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor kesejahteraan rakyat	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	1,005,228,000	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.1.3.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	5.1.3.2.02	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor perekonomian	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	504,499,360	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5.1.3.2.02	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor pariwisata dan kebudayaan	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	300,000,000	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5.1.3.2.02	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor pengembangan dunia usaha	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	807,403,184	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.1.3.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.1.3.2.03	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor pekerjaan umum dan perhubungan	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	428,954,848	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5.1.3.2.03	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor lingkungan hidup dan tata ruang	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	492,835,488	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		5.1.3.2.03	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan sektor permukiman dan pengembangan wilayah	Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	1,761,792,128	APBD	Kota Yogyakarta	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Matriks 2b: Rencana Program/Kegiatan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta

TUJUAN GLOBAL 1. MENGAKHIRI SEGALA BENTUK KEMISKINAN DIMANA PUN

Program/Kegiatan/Rincian Output		Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2023	2024	2025	2026	2027				
1	2	3					4	5	6	7	
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH											
1.2. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.											
Program Pemberdayaan Sosial											
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten	Peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten	Fasilitasi Forum Komunikasi IPSM Kabupaten Sleman	kali	4	4	4	4	8,492.96	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Sosial
		Bimbingan teknis PSM	kali	1	1	1	1				
		Pembinaan PSM	kali	17	17	17	17				
		Forum PSM	kali	2	2	2	2				
	Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota	Forum TKSK	kali	13	13	13	13				
	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten	Hibah Lembaga	LKS	45	50	55	60				
		Jejaring FORKAPA	kali	3	4	4	4				
		Jejaring Karang Taruna	kali	17	17	20	20				
		Jejaring Komda Lansia	kali	6	6	8	8				
		Jejaring LKKS	kali	15	16	16	16				
		Jejaring WKSBM	kali	15	20	20	20				
	Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan lembaga konsultasi	Pemilihan PSKS berprestasi (KT, PSM, TKSK, LKS, WKSBM)	PSKS	5	5	5	5				
		CC penanganan kasus	kali	40	40	40	40				
		Home visit penanganan kasus	kali	30	30	30	30				
		Operasional LK3	bulan	12	12	12	12				
Program Rehabilitasi Sosial											
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	Bantuan kebutuhan dasar bagi Anak Terlantar	orang	1034	1137	1251	1376	79,851.23	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Sosial
		Bantuan kebutuhan dasar bagi Disabilitas	orang	400	400	400	400				
		Bantuan kebutuhan dasar bagi Lanjut Usia Terlantar	orang	5248	5772	6350	7683				
	Penyediaan Sandang	Bantuan kebutuhan dasar bagi Anak Terlantar	orang	1034	1137	1251	1376				
		Bantuan kebutuhan dasar bagi Disabilitas	orang	400	400	400	400				
		Bantuan kebutuhan dasar bagi Lanjut Usia Terlantar	orang	5248	5772	6350	7683				
	Pemberian bimbingan fisik, mental, spritual, dan sosial	Bantuan OT kehabisan bekal	orang	65	70	75	80				
		Operasional Rumah Singgah Sementara (RPS)	bulan	12	12	12	12				
		Pemeliharaan gedung RPS	bulan	12	12	12	12				
		Penanganan adopsi anak	kali	11	12	13	14				
		Penanganan anjal, gelandangan psikotik, gelandangan dan pengemis	bulan	12	12	12	12				
		Penanganan kasus temuan bayi	kali	11	12	13	14				
		Perawatan, visum dan pemakaman jenazah terlantar	kali	4	4	4	4				
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	pemulangan/tukar informasi ke daerah asal (Jawa Tengah)	kali	30	40	45	50				
	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar,	Jejaring kelembagaan	lembaga	5	5	5	5				
		Operasional jamkesus	kali	1	1	1	1				
		Pelatihan boga bagi disabilitas	angkatan	4	4	4	4				
		Penyelenggaraan HDI	kali	1	1	1	1				
	Pemberian Layanan Rujukan	Laporan penanganan pengaduan	dokumen	1	1	1	1				

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

		Layanan Data dan Pengaduan	Pelayanan pengaduan masyarakat	bulan	12	12	12	12					
		Layanan Kedaruratan	Pelayanan Kedaruratan untuk masyarakat	bulan	12	12	12	12					
		Penyediaan Alat Bantu	Penyediaan Alat Bantu untuk Disabilitas	bulan	12	12	12	12					
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	bulan	12	12	12	12					
		Fasilitasi Pembuatan NIK, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan KIA	Fasilitasi Pembuatan NIK, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan KIA	bulan	12	12	12	12					
		Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Pemberikan akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	bulan	12	12	12	12					
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Pelayanan Penelusuran Keluarga	bulan	12	12	12	12					
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan													
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Fasilitasi pemulangan warga negara migran Indonesia korban tindak kekerasan	kali	1	1	1	1		27.85	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Sosial
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial													
	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten	Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten	Cetak kartu miskin	kalurahan	86	86	86	86		36,276.07	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Sosial
Data kemiskinan			dokumen	1	1	1	1						
Profil keluarga miskin dan rentan miskin			dokumen	2	2	2	2						
Data PBI			dokumen	1	1	1	1						
PPKS 86 Kalurahan 17 Kapanewon		dokumen	1	1	1	1							
Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten		Forum TKPKD											
		Penguatan TPK kalurahan	kalurahan	7	7	8	8						
		Laporan hasil survey indeks kepuasan masyarakat	dokumen	1	1	1	1						
		Laporan penanganan pengaduan	dokumen	1	1	1	1						
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Pelayanan pengaduan masyarakat	bulan	12	12	12	12						
		Pendistribusian bantuan sosial pangan bagi KPM	bulan	12	12	12	12						
		Pendistribusian bantuan sosial pangan daerah bagi KPM (BPNT Daerah)	bulan	12	12	12	12						
		Fasilitasi pertemuan P2K2 bidang kesehatan dan gizi tingkat kecamatan	bulan	12	12	12	12						
		Forum PKH tingkat kabupaten	kali	12	12	12	12						
		Forum PKH tingkat kecamatan	kali	34	34	34	34						
		Penyaluran bantuan program keluarga harapan bagi KPM	bulan	12	12	12	12						
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Bantuan sosial pengembangan kelompok KUBE/USEP	kelompok	10	10	10	10							
	Bantuan sosial pengembangan kelompok PRSE	kelompok	12	12	12	12							
1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.													
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat													

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

1.02.02 .2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02 .2.02.2 6	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pelayanan kesehatan penduduk miskin, rentan miskin, kader kesehatan, kader sosial, kader IMP dan anggota Linmas (PBI APBD)	jiwa	114414	114414	114414	114414		171,900.16	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Kesehatan
				Operasional pelayanan Jampersal (DAK)	bulan	12	12	12	12					
				Pelayanan kesehatan penduduk miskin, rentan miskin, kader kesehatan, kader sosial, kader IMP, anggota Linmas, PBI APBN Non Aktif, Ketua RT/RW, relawan bencana, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), penderita penyakit kronis, Rois, pengurus tempat ibadah	bulan	12	12	12	12					
1.4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya														
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)														
1.03.02 .2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02 .2.01.2 1	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Terlaksananya Penanganan Rehabilitasi Embung dan Penampung Lainnya;	lokasi	7	6	6	6		7,657.65	APBD Kab	Kab. Sleman	DPUPKP
				Tersedianya Data - Data Pendukung (Panjang, Lebar dan Debit)	lokasi	36	36	36	36					
		1.03.02 .2.01.4 6	Normalisasi/Restorasi Sungai	Terlaksananya Pemeliharaan Sungai, Embung dan Mata Air;	kali	10	10	10	10		7,657.65	APBD Kab	Kab. Sleman	DPUPKP
				Terlaksananya Penanganan Pengendalian Daya Rusak Sungai;	kali	15	15	15	15					
				Terlaksananya Penanganan Talud Pengaman;	lokasi	5	5	5	5					
				Terlaksananya penanganan Waled Sungai dalam kondisi terpelihara	lokasi	9	9	9	9					
		1.03.02 .1.01.4 7	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	pembangunan Infrastruktur untuk melindungi mata air (PUPM);	paket	1	1	1	1		6,636.63	APBD Kab	Kab. Sleman	DPUPKP
				Pembangunan/peningkatan kuantitas dan kualitas mata air	lokasi	4	4	4	4					
		1.03.02 .1.01.6 1	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Gerakan Irigasi Bersih ;	kali	2	2	2	2		1,949.01	APBD Kab	Kab. Sleman	DPUPKP
				Hari Air Dunia untuk Sasaran Konservasi ;	kali	1	1	1	1					
				Pemberdayaan Kelompok GP3A ;	kelompok	3	3	3	3					
				Sidang Komisi Irigasi	kali	3	3	3	3					
		1.03.02 .1.01.6 2	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (REKOMTEK) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	rekomendasi	225	225	225	225		842.34	APBD Kab	Kab. Sleman	DPUPKP
				Perizinan Bidang Irigasi	lokasi									
		1.03.02 .1.01.6 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberdayaan dan Pembinaan Kelembagaan mata air	lokasi	4	4	4	4		361.18	APBD Kab	Kab. Sleman	DPUPKP
		1.03.02 .2.01.4 9	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air, pengukuran debit mata air	lokasi	79	79	79	79		8,107.80	APBD Kab	Kab. Sleman	DPUPKP
				Pemeliharaan Embung;	lokasi	12	12	12	12					
				Pemeliharaan Mata Air;	lokasi	14	14	14	14					
				Pengangkatan Sedimen Bendung dengan cara Manual;	lokasi	19	19	19	19					

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

				Pengawasan Terhadap Pemanfaatan Air Tanah	kali	48	48	48	48						
1.03.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Dokumen perencanaan Teknis Jaringan Irigasi;	paket	5	5	5	5	8,581.20	APBD Kab	Kab. Sleman	DPUPKP		
.2.02.01		Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem irigasi (E-PAKSI)		dokumen	1	1	1	1							
1.03.02		Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Peningkatan Jaringan Irigasi	Peningkatan Jaringan Irigasi	DI	45	45	45	45	106,264.01	APBD Kab	Kab. Sleman	DPUPKP		
.2.02.08				Peningkatan Jaringan Irigasi DAK Fisik	DI	3	3	3	3						
1.03.02		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi	DI	58	58	58	58	86,378.37	APBD Kab	Kab. Sleman	DPUPKP		
.2.02.14				Rehabilitasi Bendung dan Saluran Irigasi (DAK)	lokasi	2	2	2	2						
1.03.02		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Fungsi Jaringan Irigasi Meningkatkan;	Kualitas Infrastruktur Pengambilan dan Saluran Pembawa Baik;	Peningkatan Fungsi Daerah irigasi;	kapanewon	17	17	17	17	28,275.54	APBD Kab	Kab. Sleman	DPUPKP	
.2.02.21						lokasi	7	7	7	7					
						DI	55	55	55	55					
						buah	16	16	16	16					
	km					225	225	225	225						
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)															
1.03.03	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Data air minum	paket	1	1	1	1	2,319.30	APBD Kab	Kab. Sleman	DPUPKP		
.2.01.01		Baseline HAMP Kabupaten Sleman;		paket	1	1	1	1							
		Kajian Potensi Air Baku;		paket	1	1	1	1							
		Perencanaan SPAM Perdesaan		paket	3	3	3	3							
1.03.03		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Pembangunan distribusi SPAM	Pembangunan jaringan perpipaan (APBD)	LS	1	1	1	1	41,375.74	APBD Kab	Kab. Sleman	DPUPKP		
.2.01.03															
1.03.03		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Peningkatan jaringan perpipaan (DAK)	LS	1	1	1	1	1	2,291.45	APBD Kab	Kab. Sleman	DPUPKP		
.2.01.06															
1.03.03		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Fasilitasi teknis pengelolaan air bersih tingkat desa ;	Lomba teknis pengelolaan air bersih tingkat desa ;	Pembinaan dan fasilitasi Air Baku Kawasan Kekeringan ;	Pembinaan teknis pengelolaan air bersih tingkat desa	LS	1	1	1	1	2,249.63	APBD Kab	Kab. Sleman	DPUPKP
.2.01.11							kali	1	1	1	1				
	LS						1	1	1	1					
	LS						1	1	1	1					
1.03.03	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Hibah Air Minum Perdesaan (HAMP) PAMSIMAS	HID	Pameran / Gelar Potensi BKM, Uji Petik BKM, FGD Pendampingan eks PNPM Perkotaan / KOTAKU	Program PISEW	desa	5	5	5	5	22,475.71	APBD Kab	Kab. Sleman	DPUPKP	
.2.01.14						desa	1	1	1	1					
						kecamatan	15	15	15	15					
						kecamatan	15	15	15	15					
1.03.03	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Perluasan jaringan perpipaan (DAK)	LS	1	1	1	1	1	27,258.07	APBD Kab	Kab. Sleman	DPUPKP			
Program Pengembangan Perumahan															

1.04.02 .2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02 .2.03.0 5	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pengawasan Pekerjaan Penyempurnaan PSD Hunian Tetap	paket	1	1	1	1	17,789.67	APBD Kab	Kab. Sleman	DPUPKP
				Penyempurnaan PSD Hunian Tetap ;	paket	1	1	1	1				
				Penyusunan DED Penyempurnaan PSD Hunian Tetap ;	dokumen	1	1	1	1				
				Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana	dokumen	1	1	1	1				
1.04.02 .2.05	2. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1.04.02 .2.05.0 1	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan /atau Rumah Khusus	pemeliharaan bangunan rusunawa	lokasi	5	5	5	5	14,855.97	APBD Kab	Kab. Sleman	DPUPKP
				pemeliharaan mechanical electrical dengan baik	paket	1	1	1	1				
				pengelolaan rusunawa di 1 lokasi	block	1	1	1	1				
				Pengelolaan rusunawa di 4 lokasi	twinblock	11	11	11	11				
Program Kawasan Permukiman													
1.04.03 .2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1.04.03 .2.01.0 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Implementasi Penataan Lingkungan Kawasan Kumuh Perkotaan	paket	1	1	1	1	4,594.59	APBD Kab	Kab. Sleman	DPUPKP
				Pengawasan Implementasi Penataan Lingkungan kawasan rumah	lokasi	4	4	4	4				
				Pengawasan Penyempurnaan Penataan Lingkungan Kawasan Kumuh Perkotaan	dokumen	1	1	1	1				
				Terawasinya penuntasan Implementasi Penataan Lingkungan Kawasan Kumuh Perkotaan	paket	1	1	1	1				
				Tersusunnya Dokumen DED Penuntasan Implementasi Penataan Lingkungan Kawasan Kumuh Perkotaan	dokumen	1	1	1	1				
				Tertatanya kawasan kumuh perkotaan beserta penuntasannya	lokasi	4	4	4	4				
1.04.03 .2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1.04.03 .2.01.0 3	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Implementasi Penataan Padukuhan Rawan Kumuh Tahun 2021	lokasi	5	5	5	5	36,246.06	APBD Kab	Kab. Sleman	DPUPKP
				Konsultasi Manajemen Teknis Pendamping Implementasi Penataan Kawasan Padukuhan Rawan Kumuh	paket	1	1	1	1				
				Penyusunan Dokumen Teknis Penataan Lingkungan (DTPL) Padukuhan Rawan Kumuh	lokasi	3	3	3	3				
				Penyusunan Rencana Penataan Permukiman (RPP) Padukuhan Rawan Kumuh	lokasi	2	2	2	2				
1.04.03 .2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1.04.03 .2.03.0 2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Pengawasan dan Pendampingan Bantuan Sosial RTLH (APBD, BSPS kemenpupera, CSR, DAK);	kapanewon	17	17	17	17	42,525.20	APBD Kab	Kab. Sleman	DPUPKP
				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni;	unit	235	235	235	235				
				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (DAK) Fisik	unit	40	40	40	40				
				Perbaikan rumah tidak layak huni Pokir Dewan	unit	68	68	68	68				
				Sosialisasi dan Persiapan Bantuan Sosial RTLH;	kapanewon	17	17	17	17				
		1.04.03 .2.03.0 6	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Pembangunan Baru Rumah Secara Swadaya	unit	38	38	38	38	10,660.97	APBD Kab	Kab. Sleman	DPUPKP
					Pengawasan dan Pendampingan Bantuan Sosial RTLH (DAK)	kapanewon	2	2	2				
			Sosisalisasi dan Persiapan Bantuan Sosial RTLH	kapanewon	2	2	2	2					

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh														
1.04.04 .2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah	1.04.04 .2.01.0 1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar	Pengawasan dan pendampingan bantuan sosial RTLH	kanawon	17	17	17	17		53,000.00	APBD Kab	Kab. Sleman	DPUPKP
				Perbaikan RTLH	unit	400	400	400	400					
				Perbaikan RTLH Pokir Dewan	unit	100	100	100	100					
				Sosialisasi dan persiapan Bantuan RTLH	kanawon	17	17	17	17					
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)														
1.04.05 .2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.04.05 .2.01.0 2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Pembangunan PSD TPU	lokasi	1	1	1	1		69,829.10	APBD Kab	Kab. Sleman	DPUPKP
				Penataan PSD lingkungan Rusunawa	lokasi	1	1	1	1					
				Pengawasan Pembangunan PSD TPU	lokasi	1	1	1	1					
				Pengawasan Penataan PSD lingkungan Rusunawa	lokasi	1	1	1	1					
				Penyusunan DED typical Rusun Desa @ 5 M	paket	1	1	1	1					
				Pembuatan Grobog / Pusara / Nisan	lokasi	2	2	2	2					
				Terawasinya Pembangunan Rusun Desa	paket	1	0	0	0					
				Terbangunnya PSD TPU Madurejo dan Seyegan	paket	2	2	2	2					
				Terbangunnya Rusun Desa	paket	1	0	0	0					
				Tertatnya Permukiman dalam kawasan Desa Wisata	paket	1	1	1	1					
				Penyusunan Review DED	paket	1	0	0	0					
				Terawasinya Pembangunan	paket	1	1	1	1					
				Terawasinya Pengawasan	paket	1	1	1	1					
		Terbangunnya PSD	paket	1	1	1	1							
1.04.05 .2.01.0 2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	PelayananPemukaman	kali	144	144	144	144		9,141.65	APBD Kab	Kab. Sleman	DPUPKP		
		PemberianPerijinanPemukaman	ijin	770	770	770	770							
		PemeliharaanPrasarana danSarana TPU	bulan	12	12	12	12							
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah														
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan Pembangunan SPALD-S Skala Individu	paket	11	11	11	11		6,900.00	APBD Kab	Kab. Sleman	DLH
				Perencanaan Rehabilitasi Lokasi Jaringan Terpusat	paket	1	1	1	1					
				Perencanaan Penyempurnaan IPLT	paket	1								
				Perencanaan Pemb. Jaringan Pipa Servis dan SR SPALD-T Kawasan Depok	paket	2	2	2	2					
				Perencanaan Pemb. Jaringan Pipa Servis dan SR SPALD-T Sewon (Wilayah Sleman)	paket	2	2	2	2					
				Perencanaan Penyempurnaan SPALD-T Kawasan Berbah	paket	1	1							
				Perencanaan Rehabilitasi Lokasi Jaringan SPALD-T Kawasan Berbah	paket	1	1	1	1					
				Perencanaan Rehabilitasi Lokasi Jaringan SPALD-T Kawasan Depok (Nologaten)	paket			1	1					
				Perencanaan Penyempurnaan SPALD-T Kawasan Depok (Nologaten)	paket			1	1					
				Perencanaan Pemb. Jaringan Pipa Servis dan SR SPALD-T Kawasan Berbah	paket		1	1	1					

Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Supervisi Rehabilitasi Lokasi Jaringan Terpusat	paket	1	1	1	1		687.50	APBD Kab	Kab. Sleman	DLH
	Supervisi Pemb. Jaringan Pipa Servis dan SR SPALD-T Sewon (Wilayah Sleman)	paket	2	2	2	2					
Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Pembangunan Jaringan Pipa Servis dan SR SPALD-T Sewon (Wilayah Sleman)	SR	150	150	150	150		7,816.95	APBD Kab	Kab. Sleman	DLH
Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Rehabilitasi Lokasi Jaringan Terpusat	paket	1	1	1	1		850.40	APBD Kab	Kab. Sleman	DLH
Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Penyempurnaan SPALD-T Kawasan Berbah	paket	1					1,148.38	APBD Kab	Kab. Sleman	DLH
	Rehabilitasi Lokasi Jaringan SPALD-T Kawasan Berbah	paket	1	1	1	1					
	Penyempurnaan SPALD-T Kawasan Depok (Nologaten)	paket			1	1					
	Rehabilitasi Lokasi Jaringan SPALD-T Kawasan Depok (Nologaten)	paket			1	1					
Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Pembangunan SPALD-S Skala Individu (DAK)	unit	254	254	254	254		41,880.13	APBD Kab; DAK, SANDES	Kab. Sleman	DLH
	Pembangunan SPALD-S Skala Individu	unit	416	416	416	416					
	Pembangunan SPALD-S Skala Individu (SANDES)	unit	300	300	300	300					
Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	kali	2	2	2	2		287.00	APBD Kab	Kab. Sleman	DLH
Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Sosialisasi Pembangunan SPALD-S Skala Individu	kali	11	11	11	11		1,208.60	APBD Kab	Kab. Sleman	DLH
	Sosialisasi Pemeliharaan Jaringan Terpusat/SPALD-T Skala Permukiman/IPAL Kawasan	kali	18	18	18	18					
	Sosialisasi Rehabilitasi Lokasi Jaringan IPAL Terpusat	kali	1	1	1	1					
	Sosialisasi Pembangunan SPALD-S Skala Individu (DAK)	kali	3	3	3	3					
	Sosialisasi Pembangunan Jaringan Pipa Servis dan SR SPALD-T Kawasan Depok	kali	8	8	8	8					
	Sosialisasi Pembangunan Jaringan Pipa Servis dan SR SPALD-T Sewon (Wilayah Sleman)	kali	4	4	4	4					
	Sosialisasi Rehabilitasi Lokasi Jaringan SPALD-T Kawasan Berbah	kali	1	1	1	1					
	Sosialisasi Pembangunan Jaringan Pipa Servis dan SR SPALD-T Kawasan Berbah	kali		2	2	2					
	Sosialisasi Rehabilitasi Lokasi Jaringan SPALD-T Kawasan Depok	kali			1	1					

	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	FGD Penarikan Retribusi Pengelolaan Limbah Cair	kali	1	1	1	1		147.60	APBD Kab	Kab. Sleman	DLH	
		FGD Pengelolaan SPALD-T Skala Permukiman	kali	1	1	1	1						
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Pemeliharaan Rutin Jaringan Air Limbah Jaringan Terpusat dan IPAL Kawasan	bulan	12	12	12	12		19,479.90	APBD Kab	Kab. Sleman	DLH	
		Penarikan Retribusi Pengelolaan Air Limbah	bulan	12	12	12	12						
		Pengelolaan IPAL Kawasan Berbah	bulan	12	12	12	12						
		Pengelolaan IPLT	bulan	12	12	12	12						
		Tenaga Fasilitator Lapangan	orang	10	10	10	10						
		Pengelolaan IPAL Kawasan Depok	bulan	12	12	12	12						
		Pendampingan KPP SPALD-T Skala Permukiman	lokasi	20	15	5	5						
		Fasilitasi KPP SPALD-T Skala Permukiman	lokasi	15	5	5	5						
	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Supervisi Pembangunan Jaringan Pipa Servis dan SR SPALD-T Kawasan Depok	paket	2	2	2	2		1,024.20	APBD Kab	Kab. Sleman	DLH	
		Supervisi Penyempurnaan SPALD-T Kawasan Berbah	paket	1	1								
		Supervisi Rehabilitasi Lokasi Jaringan SPALD-T Kawasan Berbah	paket	1	1	1	1						
		Supervisi Pembangunan Jaringan Pipa Servis dan SR SPALD-T Kawasan Berbah	paket		1	1	1						
		Supervisi Penyempurnaan SPALD-T Kawasan Depok	paket			1	1						
		Supervisi Rehabilitasi Lokasi Jaringan SPALD-T Kawasan Depok	paket			1	1						
	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Pembangunan Jaringan Pipa Servis dan SR SPLAD-T Kawasan Berbah	SR		50	50	50		20,446.95	APBD Kab; APBN	Kab. Sleman	DLH	
		Pembangunan Jaringan Pipa Servis dan SR SPLAD-T Kawasan Depok	SR	250	250	250	250						
		Pembangunan sanimas	unit	3	3	3	3						
	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Pengadaan Kendaraan Sedot Lumpur Tinja Roda Tiga	unit	-		2	-		1,800.00	APBD Kab	Kab. Sleman	DLH	
		Pengadaan truck Tinja	unit		1	1	-						
	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Pelayanan penyedotan lumpur tinja	lokasi	500	1000	1000	1000		1,007.98	APBD Kab	Kab. Sleman	DLH	
	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Pembangunan bak pelengkap dewatering (aerasi, maturasi, bioindikator)	paket	1	-	-	-		1,502.00	APBD Kab	Kab. Sleman	DLH	
	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Penyempurnaan IPLT	paket	1	1	1	1		927.98	APBD Kab	Kab. Sleman	DLH	
	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Supervisi Penyempurnaan IPLT	paket	1	1	1	1		162.06	APBD Kab	Kab. Sleman	DLH	
Program Pengelolaan Persampahan													
	Pengelolaan Sampah	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Laporan Pengelolaan Sampah	dokumen	1	1	1	1		145.00	APBD Kab	Kab. Sleman	DLH

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

		Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Gerobak sampah	buah	50	50	50	50		2,457.99	APBD Kab	Kab. Sleman	DLH
			Komposter	unit	125	125	125	125					
			Mesin pencacah	unit		5							
			Motor roda tiga	unit	5	5	5	5					
			Papan larangan	buah	15	15	15	15					
			Drum plastik	buah	150	150	150	150					
			Kompartemen	unit	100	100	100	100					
		Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Pelayanan sampah perumahan dan Niaga 600m3/hari	bulan (26 hari)	12	12				48,697.67	APBD Kab	Kab. Sleman	DLH
			Pelayanan sampah perumahan dan Niaga 700m3/hari	bulan (26 hari)			12	12					
			Pembayaran retribusi sampah ke TPA Piyungan	bulan	12	12	12	12					
			Pemeliharaan Transfer Depo	lokasi	6	6	6	6					
			Penyapuan Jalan Protokol 28 Lokasi	bulan	12	12	12	12					
		Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Fasilitasi kelompok sampah mandiri	kali	20	20	20	20		2,137.69	APBD Kab	Kab. Sleman	DLH
			Pelatihan pengelolaan sampah mandiri	kali	20	20	20	20					
			Sosialisasi persampahan	kali	20	20	20	20					
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Terbangunnya TPS 3R/TPS/Rumah Sampah	unit	6	6	6	6		11,077.74	APBD Kab	Kab. Sleman	DLH
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Patroli Sampah Liar	kali	90	90	90	90		738.45	APBD Kab	Kab. Sleman	DLH
			Pendataan pengelolaan sampah swasta										
			Pendampingan masyarakat dalam menangani sampah liar	lokasi	2	2	2	2					
			Penanganan aduan sampah liar	aduan	30	30	30	30					
1.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.													
Program Penanggulangan Bencana													
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten / Kota	Dokumen kajian risiko bencana Kabupaten Sleman	dokumen	1	-	1	-		2,661.58	APBD Kab	Kab. Sleman	BPBD
			Pemutakhiran dan evaluasi KRB	dokumen	-	1	-	1					
			Peta Risiko Bencana Kabupaten Sleman Skala 1 : 25.000	peta	7	7	7	7					
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah aparaturnya dan warga negara yang ikut pelatihan	orang	103	133	133	133		664.85	APBD Kab	Kab. Sleman	BPBD
			Sosialisasi bencana	orang	550	750	950	1150					

Program/Kegiatan/Rincian Output		Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana				
			2023	2024	2025	2026	2027								
1		2	3					4	5	6	7				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH															
2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun															
Program Penanganan Kerawanan Pangan															
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Pengembangan sistem kewaspadaan pangan dan gizi	dokumen	1	1	1	1		161.70	APBD Kab	Kab. Sleman	BPBD	
2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula															
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan															
1.02.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Bantuan operasional kesehatan (BOK) pelayanan kesehatan ibu hamil	bulan	12	12	12	12		5,345.02	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Kesehatan	
.02				Bimtek Deteksi Faktor Resiko Ibu Hamil	faskes	35	35	35	35						
				Data PWS-Kesehatan Ibu Hamil	puskesmas	25	25	25	25						
				Seminar Hasil Rekomendasi Audit	kali	1	1	1	1						
				Cetak Buku KIA	buku	14715	14715	14715	14715						
			1.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Bantuan operasional kesehatan (BOK) pelayanan kesehatan ibu bersalin	bulan	12	12	12	12		15,475.58	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Kesehatan
					Bimtek KB Pasca Salin	kali	1	1	1	1					
					Bimtek Pemanfaatan Buku KIA Ibu	angkatan	2	2	2	2					
					Bimtek SIM KIA Sembada Ibu Bersalin dan Nifas	faskes	50	50	50	50					
					Evaluasi SIM KIA Sembada	kali	4	4	4	4					
					Pertemuan KB Pasca Salin	kali	3	3	3	3					
			1.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Bantuan operasional kesehatan (BOK) kesehatan bayi baru lahir	bulan	12	12	12	12		1,412.49	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Kesehatan
					Bimtek Penanganan Asfiksia dan Bayi Baru Lahir	faskes	50	50	50	50					
					Bimtek SDIDTK	angkatan	2	2	2	2					
					Pertemuan Koordinasi Program Bayi Baru Lahir dengan Linsek	kali	1	1	1	1					
					Pertemuan Program Bayi Baru Lahir dan Anak	kali	4	4	4	4					
			1.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Bantuan operasional kesehatan (BOK) pelayanan kesehatan balita	bulan	12	12	12	12		3,441.63	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Kesehatan
					Bimtek Pemeriksaan Kesehatan Balita	kali	1	1	1	1					
					Data Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Balita	dokumen	1	1	1	1					
					Seminar Child Health Check Up	kali	1	1	1	1					
			Workshop penguatan pelayanan kesehatan balita		kali	1	1	1	1						
		1.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Terlaksana Kegiatan Bersumber Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	dokumen	1	1	1	1		4,123.27	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Kesehatan	
				Ketersediaan Data penjarangan anak	dokumen	1	1	1	1						
				Ketersediaan Data Kesehatan Reproduksi	dokumen	1	1	1	1						
				Ketersediaan Buku Raport Kesehatanku	puskesmas	25	25	25	25						

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

1.02.02 .2.02.0 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Bantuan operasional kesehatan (BOK) pelayanan kesehatan lansia	bulan	12	12	12	12	3,232.30	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Kesehatan
		Bimtek Pencatatan Pelaporan	puskesmas	25	25	25	25				
		Pertemuan Programmer Lansia	kali	4	4	4	4				
		Seminar Hari Lanjut Usia (Halun)	kali	1	1	1	1				
1.02.02 .2.02.1 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Data Implementasi 10 Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui	dok	1	1	1	1	22,439.89	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Kesehatan
		Data surveilans gizi	dok	4	4	4	4				
		Nutrisionis update	kali	1	1	1	1				
		Sosialisasi dalam rangka pekan ASI	kali	1	1	1	1				
		Tenaga kesehatan terupdate tatalaksana gizi buruk	nakes	24	24	24	24				
		Workshop penguatan jejaring sub klaster	kali	1	1	1	1				
1.02.02 .2.02.1 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Data Implementasi 10 Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui	dok	1	1	1	1	1,785.93	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Kesehatan
		Data surveilans gizi	dok	4	4	4	4				
		Nutrisionis update	kali	1	1	1	1				
		Sosialisasi dalam rangka pekan ASI Sedunia	kali	1	1	1	1				
		Tenaga kesehatan terupdate tatalaksana gizi buruk	nakes	24	24	24	24				
		Workshop penguatan jejaring sub klaster gizi	kali	1	1	1	1				
1.02.02 .2.02.1 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Bimtek Inspeksi Kesehatan Lingkungan TTU	kali	3	3	3	3	14,660.80	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Kesehatan
		Bimtek kesehatan lingkungan Fasyankes	kali	2	2	2	2				
		Bimtek pasar sehat	kali	2	2	2	2				
		Bimtek pembinaan Penyehatan Kualitas air Minum	kali	2	2	2	2				
		Fasilitasi Pelaksanaan STBM	kali	10	10	10	10				
		Monev ABJ bagi Pokjanal tingkat	kali	2	2	2	2				
		Pelaksanaan kegiatan Evaluasi kegiatan Lingkungan Bersih Sehat (LBS)	kali	17	17	17	17				
		Pemeriksaan sampel air bersih	spl	100	100	100	100				
Pemeriksaan sampel air Minum	spl	300	300	300	300						
1.02.02 .2.02.1 8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	pelayanan promosi kesehatan meningkat	bulan	12	12	12	12	10,835.49	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Kesehatan
1.02.02 .2.02.2 9	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Bimtek forkom desa sehat tingkat kecamatan	kec	17	17	17	17	1,543.76	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Kesehatan
		Bimtek Pokja Kab. Sehat tingkat Desa	kec	17	17	17	17				
		Pelaksanaan verifikasi Kab. Sehat	kali	1	1	1	1				

Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan

	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai dengan kewenangan daerah kabupaten/kota		Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Pelatihan pengelola lumbung kali	1	1	1	1		229.52	APBD Kab	Kab. Sleman	Dispertan
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat													
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pelatihan Pemanfaatan pekarangan kali	12	12	12	12		1,605.52	APBD Kab	Kab. Sleman	Dispertan
	Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka sosialisasi pasokan dan harga pangan		Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah	Peningkatan jumlah toko mitra tani di Kabupaten Sleman	TTI/TMT	2	2	2	2	1,488.47	APBD Kab	Kab. Sleman	Dispertan
				Monitoring gapoktan pengelola akses pangan	gapoktan	8	8	8	8				
					Monitoring harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional	lokasi	6	6	6				
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya		Perkembangan kegiatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat	gapoktan	14	14	14	14					
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Penambahan cadangan pangan pemerintah daerah	Ton	15	15	15	15	780.10	APBD Kab	Kab. Sleman	Dispertan
Program Penanganan Kerawanan Pangan													
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	dokumen	1	1	1	1	425.05	APBD Kab	Kab. Sleman	Dispertan
Program Pengawasan Keamanan Pangan													
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan penerapan jaminan mutu produk pangan	kali	3	3	3	3	508.44	APBD Kab	Kab. Sleman	Dispertan
2.3. Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan													
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian													
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Sekolah Lapang Pertanian Tanaman Pangan	unit	5	5	5	5	13,110.10	APBD Kab	Kab. Sleman	Dispertan
			Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Sekolah Lapang Pertanian Tanaman Hortikultura/perkebunan	unit	5	5	5	5				
	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Pengaawasan Mutu benih/bibit ternah bahan pakan/pakan/tanaman skala kecil	Pelatihan budidaya peternakan	kelompok	8	8	8	8	5,218.92	APBD Kab	Kab. Sleman	Dispertan
				Pelatihan Pembuatan Pakan Ternak	kelompok	7	7	7	7				
				Penguatan Sapi Betina Bunting	ekor	150	150	150	150				
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian													

	Pengembangan Prasarana Pertanian		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pengadaan alat - alat pertanian (hortikultura dan perkebunan)	unit	15	15	15	15	2,834.36	APBD Kab	Kab. Sleman	Dispertan
			Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Pelatihan pengolahan dan pemasaran Hasil Tanaman Pangan	kelompok	2	2	2	2				
	Pembangunan Sarana Pertanian		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Meningkatnya keterpenuhan prasarana dan sarana pertanian tanaman pangan	unit	3	3	3	3	15,316.24	APBD Kab	Kab. Sleman	Dispertan
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Pembangunan/rehabilitasi gedung BP4 serta sarana pendukungnya	BPP	5	6	7	8				
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner													
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah W abah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Pemeriksaan Hewan Kurban	kecamatan	17	17	17	17	2,448.44	APBD Kab	Kab. Sleman	Dispertan
				Pemeriksaan Sampel Laboratorium Rujukan Diagnostik	sampel	13	13	13	13				
				Pemrosesan Rekomendasi Perijinan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	rekomendasi	10	10	10	10				
	Pengolaan Pelayanan Jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten kota		Penyediaan Pelayanan Jasa medik veteriner	monitoring puskesmas, pelayanan puskesmas keliling, pengadaan bahan laboratorium, pengadaan obat-obatan, penyelenggaraan pelayanan kesehatan hewan	bulan	12	12	12	12	2,316.19	APBD Kab	Kab. Sleman	Dispertan
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan		pendampingan Unit Usaha hewan dan produk hewan	Pelatihan pembuatan pupuk organik	kali	5	5	5	5	1,826.74	APBD Kab	Kab. Sleman	Dispertan
				Pelatihan olahan produk peternakan	kali	3	3	3	3				
			Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Pengawasan produk olahan hasil peternakan	kali	100	100	100	100				
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian													
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Gerakan Pengendalian Hama penyakit	kali	60	60	60		3,399.66	APBD Kab	Kab. Sleman	Dispertan
			Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Gerakan pengendalian OPT Hortikultura dan Perkebunan	kali	50	50	50	50				
Program Penyuluhan Pertanian													
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Persentase peningkatan fasilitas yang diterima penyuluh	%	2	2	2	2	14,606.93	APBD Kab	Kab. Sleman	Dispertan
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Pelatihan kelembagaan petani	kali	12	12	12	12				
			Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Pelatihan pengolahan hasil produksi hortikultura dan perkebunan	kali	12	12	12	12				
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap													

	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Penambahan populasi ikan lokal di perairan umum	kg	2000	2000	2200	2200		664.26	APBD Kab	Kab. Sleman	Dispertan
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya														
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Kursus budidaya ikan	kali	4	4	4	4		2,368.34	APBD Kab	Kab. Sleman	Dispertan
			Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pertemuan forum Perikanan	kali	5	5	5	5					
			Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Pelatihan budidaya ikan	kali	6	6	6	6					
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Media promosi dan informasi perikanan	lembar	65	65	65	65		5,298.71	APBD Kab	Kab. Sleman	Dispertan
			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana perikanan	paket	2	2	2	2					
			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi BBI	bulan	12	12	12	12					
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan														
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	pelatihan bagi pengolah dan pemasar hasil perikanan	kali	1	1	1	1		167.72	APBD Kab	Kab. Sleman	Dispertan
	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Forum perikanan	kali	8	8	8	8		401.72	APBD Kab	Kab. Sleman	Dispertan
			Pemberian fasilitasi bagi pelaku usaha perikanan skal mikro dan kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelatihan olahan perikanan	kali	6	6	6	6					
2.4. Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir,														
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Perorangan Dan											10,937.97	APBD Kab	Kab. Sleman	DPTR

Kordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota		Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Sistem Informasi penataan ruang untuk mewujudkan rencana tata ruang; Jumlah aplikasi pengelolaan data dan informasi geospasial yang mendukung kebijakan Satu Peta dan Satu data Indonesia	SIM; aplikasi	3 ; 2	3 ; 2	3 ; 2	3 ; 2	
		Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah	Persentase rekomendasi TKPRD yang diterbitkan	rekomendasi	50	50	50	50	
Kordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten /kota		Koordinasi dan sinkronisasi pemberian insentif dan disinsentif bidang penataan ruang	Jumlah peraturan /keputusan pemberian insentif dan disinsentif yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku	dokumen	1	1	1	1	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah berita acara monitoring dan evaluasi perizinan dan pengawasan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang dan keputusan yang diterbitkan	BA	54	56	58	60	
		Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang untuk pelaksanaan Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitik)	lokasi	-	-	1	1	
		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah rencana tata ruang yang dilakukan audit tata ruang	dokumen	1	1	1	1	
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/kota		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	penetapan RTRW Kabupaten	dokumen	1	1	1	1	
		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Penetapan RRTR Kabupaten	dokumen	2	3	3	4	
		Sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	Jenis media /acara penyebaran informasi penataan ruang kepada masyarakat	media/acara	4	5	5	5	
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten / Kota		Koordinasi dan Sinkronisasi penyusunan RTRW Kabupaten / Kota	Dokumen Sinkronisasi kebijakan tata ruang secara umum Nasional dan Keistimewaan	dokumen	-	1	-	-	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Program Penataan Bangunan dan Lingkungan										486.32	APBD Kab	Kab. Sleman	DPTR
	Penyelenggaraan Penataan bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		Penataan Bangunan dan Lingkungan	Terselesaikannya dokumen penataan bangunan dan lingkungan	dokumen	2	3	4	5				
Program Penataan Bangunan Gedung										86.04	APBD Kab	Kab. Sleman	DPTR
	Penyelenggaraan Penataan bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		Penyelenggaraan Penataan bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terselesaikannya dokumen pengesahan uraian pertelaan dan akta pemisahan SKBG	dokumen	2	3	4	5				
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang										517,912.46	DAIS	Kab. Sleman	DPTR
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten		Pemanfaatan ruang satuan ruang strategis merapi	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi pemanfatan Ruang	dokumen	1	1	1	1				
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan kadipaten		Pemanfaatan ruang satuan ruang strategis kawasan Candi Prambanan - Candi Ijo	Persentase tahapan pengadaan lahan ruas jalan Prambanan - Lemahbang	%	100	-	-	-				

TUJUAN GLOBAL 3. MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA

Program/Kegiatan/Rincian Output		Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana				
1		2	2023	2024	2025	2026					2027	3	4	5
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
3.1. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup														
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat														
1.02.02	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pembangunan Sarana fasilitas pelayanan laboratorium	bulan	12	12	12	12		357.15	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Kesehatan
.2.01		.2.01.0												
		3												
		1.02.02	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	rehabilitasi Puskesmas Ngemplak I	unit	1	1	1	1		6,642.21	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Kesehatan
		.2.01.0												
		9												
		1.02.02	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	sarana fasilitas pelayanan kesehatan	paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket		13,477.46	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Kesehatan
		.2.01.1												
		2												
		1.02.02	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	IPAL (Tempel II dan Depok III) DAK Fisik	unit	1	1	1	1		49,698.41	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Kesehatan
		.2.01.1												
		3												
				Pengadaan Mobil Promkes	paket	25	25	25	25					
				Pengadaan antropometri kit	paket	1	1	1	1					
				Pengadaan kesling kit	Paket	10	10	10	10					

1.02.02 .2.01.1 4	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket		50,238.92	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Kesehatan	
		Pengadaan alat kedokteran umum	paket	1	1	1	1						
		Pengadaan alat laboratorium klinik	paket	1	1	1	1						
		Pengadaan co analyser	unit	12	12	12	12						
1.02.02 .2.01.1 5	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Tes kalibrasi alat kesehatan	paket	1	1	1	1		147.03	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Kesehatan	
		Pengadaan alat kedokteran umum	paket	1	1	1	1						
		Pengadaan alat laboratorium klinik	paket	1	1	1	1						
		Pengadaan alat fogging	unit	5	5	5	5						
1.02.02 .2.01.1 6	Pengadaan Obat, Vaksin	Distribusi dan supervisi obat, vaksin	Puskesmas	25	25	25	25		40,096.44	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Kesehatan	
		Obat	Jenis	150	150	150	150						
		Obat dan Perbekalan kesehatan dikelola dengan baik dan benar	Puskesmas	25	25	25	25						
		Pembayaran Pest Control	Bulan	12	12	12	12						
		Perbekalan kesehatan habis pakai	Jenis	50	50	50	50						
		Reagen	Jenis	40	40	40	40						
		Terkalibrasi alat pendukung kesehatan	Paket	1	1	1	1						
obat dan vaksin	paket	1	1	1	1								
1.02.02 .2.01.1 7	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Perbekalan kesehatan Habis Pakai	jenis	13	13	13	13		32,531.36	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Kesehatan	
1.02.02 .2.01.1 8	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan lingkungan	Bulan	12	12	12	12		1,767.12	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Kesehatan	
1.02.02 .2.01.1 9	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Layanan penyediaan BBM kendaraan operasional	Bulan	12	12	12	12		3,301.54	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Kesehatan	
1.02.02 .2.01.2 0	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pemeliharaan rutin berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fesyankes	Bulan	12	12	12	12		707.75	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Kesehatan	
1.02.02 .2.01.2 1	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Penggunaan aplikasi e logistik di puskesmas Terdistribusinya vaksin ke Puskesmas	puskesmas	-	25	25	25		119.58	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Kesehatan	
1.02.02 .2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02 .2.02.0 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Bantuan operasional kesehatan (BOK) pelayanan kesehatan ibu hamil	bulan	12	12	12	12	5,345.02	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Kesehatan
				Bimtek Deteksi Faktor Resiko Ibu Hamil	faskes	35	35	35	35				
				Data PWS-Kesehatan Ibu Hamil	puskesmas	25	25	25	25				
				Seminar Hasil Rekomendasi Audit	kali	1	1	1	1				
				Cetak Buku KIA	buku	14715	14715	14715	14715				
1.02.02 .2.02.0 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Bantuan operasional kesehatan (BOK) pelayanan kesehatan ibu bersalin	bulan	12	12	12	12		15,475.58	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Kesehatan	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

		Bimtek KB Pasca Salin	kali	1	1	1	1					
		Bimtek Pemanfaatan Buku KIA Ibu	angkatan	2	2	2	2					
		Bimtek SIM KIA Sembada Ibu Bersalin dan Nifas	faskes	50	50	50	50					
		Evaluasi SIM KIA Sembada	kali	4	4	4	4					
		Pertemuan KB Pasca Salin	kali	3	3	3	3					
1.02.02 .2.02.0 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Terlaksana Kegiatan Bersumber Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	dokumen	1	1	1	1		4,123.27	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Kesehatan
		Ketersediaan Data penjarangan anak	dokumen	1	1	1	1					
		Ketersediaan Data Kesehatan Reproduksi	dokumen	1	1	1	1					
		Ketersediaan Buku Raport Kesehatanku	puskesmas	25	25	25	25					
1.02.02 .2.02.0 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Bantuan operasional kesehatan (BOK) pelayanan kesehatan lansia	bulan	12	12	12	12		3,232.30	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Kesehatan
		Bimtek Pencatatan Pelaporan	puskesmas	25	25	25	25					
		Pertemuan Programmer Lansia	kali	4	4	4	4					
		Seminar Hari Lanjut Usia (Halun)	kali	1	1	1	1					
1.02.02 .2.02.1 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Data Implementasi 10 Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui	dok	1	1	1	1		22,439.89	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Kesehatan
		Data surveilans gizi	dok	4	4	4	4					
		Nutrisionis update	kali	1	1	1	1					
		Sosialisasi dalam rangka pekan ASI	kali	1	1	1	1					
		Tenaga kesehatan terupdate tatalaksana gizi buruk	nakes	24	24	24	24					
		Workshop penguatan jejaring sub klaster	kali	1	1	1	1					
1.02.02 .2.02.1 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Data Implementasi 10 Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui	dok	1	1	1	1		1,785.93	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Kesehatan
		Data surveilans gizi	dok	4	4	4	4					
		Nutrisionis update	kali	1	1	1	1					
		Sosialisasi dalam rangka pekan ASI Sedunia	kali	1	1	1	1					
		Tenaga kesehatan terupdate tatalaksana gizi buruk	nakes	24	24	24	24					
		Workshop penguatan jejaring sub klaster gizi	kali	1	1	1	1					
1.02.02 .2.02.1 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Bimtek Inspeksi Kesehatan Lingkungan TTU	kali	3	3	3	3		14,660.80	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Kesehatan
		Bimtek kesehatan lingkungan Fasyankes	kali	2	2	2	2					
		Bimtek pasar sehat	kali	2	2	2	2					
		Bimtek pembinaan Penyehatan Kualitas air Minum	kali	2	2	2	2					
		Fasilitasi Pelaksanaan STBM	kali	10	10	10	10					
		Monev ABJ bagi Pokjanal tingkat	kali	2	2	2	2					
		Pelaksanaan kegiatan Evaluasi kegiatan Lingkungan Bersih Sehat (LBS)	kali	17	17	17	17					
		Pemeriksaan sampel air bersih	spl	100	100	100	100					
		Pemeriksaan sampel air Minum	spl	300	300	300	300					
1.02.02 .2.02.1 8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	pelayanan promosi kesehatan meningkat	bulan	12	12	12	12		10,835.49	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Kesehatan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

		1.02.02 .2.02.2 9	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Bimtek forkom desa sehat tingkat kecamatan	kec	17	17	17	17	1,543.76	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Kesehatan						
				Bimtek Pokja Kab. Sehat tingkat Desa	kec	17	17	17	17										
				Pelaksanaan verifikasi Kab. Sehat	kali	1	1	1	1										
		1.02.02 .2.02.3 5	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Maintenance Akreditasi Puskesmas dan UPT	Puskesmas, UPT	26	26	26	26	8,021.77	APBD Kab; DAK	Kab. Sleman	Dinas Kesehatan						
				Monev Akreditasi di 25 Puskesmas	kali	1	1	1	1										
				Pasca Akreditasi Puskesmas (DAK)	pusk	25	25	25	25										
				Refresing Akreditasi	upt	25	25	25	25										
		1.02.02 .2.02.3 8	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Pelayanan SES	Bulan	12	12	12	12	4,103.77	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Kesehatan						
				Bimtek SPGDT	kali	2	2	2	2										
1.02.02 .2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	1.02.02 .2.03.0 1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Laporan Kesehatan Gigi dan Mulut	bulan	12	12	12	12	166.70	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Kesehatan						
				Laporan Kesehatan Indera	bulan	12	12	12	12										
				Laporan Klinik	bulan	12	12	12	12										
				Laporan Perkesmas	bulan	12	12	12	12										
				Laporan PIS PK	bulan	12	12	12	12										
				Laporan SP2TP	bulan	12	12	12	12										
1.02.02 .2.03.0 2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Draft raperbup	Draft	Draft	1	1	1	1	1,221.51	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Kesehatan							
			Indeks kepuasan masyarakat	UPT,	28	28	28	28											
			Pembinaan dan pengembangan SIK dan bank data	Puskesmas,	26	26	26	26											
			Perjanjian kerjasama institusi pendidikan	Institusi	38	38	38	38											
1.02.02 .2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02 .2.04.0 1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah sakit yang di bina dalam aspek perizinan	RS	27	27	27	27	441.59	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Kesehatan						
				1.02.02 .2.04.0 2	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Audit klinis dan Update knowledge	Puskesma	25	25 Puskesmas					25 Puskesmas	25 Puskesmas	19,421.05	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Kesehatan
						Bimtek ATLM	kali	2	2 kali					2 kali	2 kali				
				Pelayanan darah masyarakat Sleman gratis	bulan	12	12 bulan	12 bulan	12 bulan										
				Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	Puskesmas	25	25 Puskesmas	25 Puskesmas	25 Puskesmas										
1.02.02 .2.04.0 3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Pembinaan Penerapan SMM ISO 9001:2015	Dinas, POAK	1	1 Din, POAK	1 Din, POAK	1 Din, POAK	1 Din, POAK	637.32	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Kesehatan							
			Penilaian Sertifikasi SMM ISO 17025:2017	UPTDLabkes	1	1 UPTDLabkes	1 UPTDLabkes	1 UPTDLabkes											
			Penilaian Sertifikasi SMM ISO 9001:2015	Dinas, POAK	1	1 Din, POAK	1 Din, POAK	1 Din, POAK											

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

		1.02.02 .2.04.0 4	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Laporan kunjungan Rumah Sakit	bulan	12	12	12	12		154.58	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan														
1.02.03 .2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	1.02.03 .2.01.0 1	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Penerbitan data perizinan	dok	2	2	2	2		270.57	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Kesehatan
				Jumlah penerbitan perizinan praktek perorangan	izin	1800	1800	1800	1800					
		1.02.03 .2.01.0 2	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Penerbitan data perizinan	dokumen	2	2	2	2		102.10	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Kesehatan
1.02.03 .2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.02.03 .2.02.0 3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Memenuhi standar kompetensi Nakes	RS	1	1	1	1		321.62	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Kesehatan
				Monev SPMKK	puskesmas	25	25	25	25					
				Pendataan SDM Kesehatan	fasyankes	5	5	5	5					
		1.02.03 .2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan nakes fungsional yang mengumpulkan DUPAK tepat waktu	%	85.5	85.75	86	86.25		852.01	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Kesehatan
1.02.03 .2.03.0 1	Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.03 .2.03.0 1	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Penilaian angka kredit Jabatan Fungsional	Jabfung	16	16	16	16		852.01	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Kesehatan
				Uji kompetensi jabatan fungsional	Jabfung	5	5	5	5					
				Penilaian angka kredit Jabatan	Jabfung	16	16	16	16					
				Uji kompetensi jabatan fungsional	Jabfung	5	5	5	5					
				Memenuhi standar kompetensi Nakes	RS	1	1	1	1					
				Monev SPMKK	puskesmas	25	25	25	25					
				Pendataan SDM Kesehatan	Fasyankes	5	5	5	5					
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman														
1.02.04 .2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1.02.04 .2.01.0 1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pemantauan setempat sarana produksi dan distribusi obat, obat tradisional dan alat kesehatan	sarana	80	80	80	80		685.56	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Kesehatan
		1.02.04 .2.01.0 3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah penerbitan rekomendasi komitmen izin	dok	25	25	25	25		127.63	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Kesehatan
				Penerbitan data Perizinan	dok	2	2	2	2					

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

1.02.04 .2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1.02.04 .2.03.0 1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT)	IRTTP	250	250	250	250		898.70	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Kesehatan
1.02.04 .2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1.02.04 .2.04.0 1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Sertifikat laik higiene sanitasi bagi TPM	TPM	40	40	40	40		34.08	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Kesehatan
1.02.04 .2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1.02.04 .2.05.0 1	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Stiker keamanan makanan jajanan	pelaku majkan	400	400	400	400		519.38	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Kesehatan
1.02.04 .2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	1.02.04 .2.06.0 1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Pemantauan post market tempat produksi dan produk pangan IRTTP	IRTTP	60	60	60	60		920.28			
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan														
1.02.05 .2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah/ Kabupaten	1.02.05 .2.01.0 1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan, dan Pemberdayaan Masyarakat	Kelembagaan Desa Siaga	kali	2	2	2	2		12,039.36	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Kesehatan
				Pelaksanaan Kampanye GERMAS	kali	1	1	1	1					
				Pelaksanaan Peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia (HTTS)	kali	1	1	1	1					
				Pemantauan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	lokasi	10	10	10	10					
				Publikasi melalui media sosial	paket	2	2	2	2					
1.02.05 .2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1.02.05 .2.02.0 1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Pengadaan Media Cetak	paket	1	1	1	1		5,620.19	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Kesehatan
				Publikasi Media Elektronik	jenis media	2	2	2	2					
				Media Cetak Outdoor	paket	1	1	1	1					

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

1.02.05 .2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05 .2.03.0 1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Pembinaan Kader Posyandu Aktif	kali	2	2 kali	2 kali	2 kali		2,723.68	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Kesehatan
				Pembinaan PHBS	kali	6	6 kali	6 kali	6 kali					
				Pembinaan Poskestren Seha	kali	4	4 kali	4 kali	4 kali					
				Pembinaan SBH	kali	8	8 kali	8 kali	8 kali					
				Pembinaan TOGA dan Akupresur	kali	6	6 kali	6 kali	6 kali					

3.2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02.02 .2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02 .2.02.0 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Bantuan operasional kesehatan (BOK) kesehatan bayi baru lahir	bulan	12	12	12	12		1,412.49	APBD Kab; DAK	Kab. Sleman	Dinas Kesehatan
				Bimtek Penanganan Asfiksia dan Bayi Baru Lahir	faskes	50	50	50	50					
				Bimtek SDIDTK	angkatan	2	2	2	2					
				Pertemuan Koordinasi Program Bayi Baru Lahir dengan Linsek	kali	1	1	1	1					
				Pertemuan Program Bayi Baru Lahir dan Anak	kali	4	4	4	4					
		1.02.02 .2.02.0 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Bantuan operasional kesehatan (BOK) pelayanan kesehatan balita	bulan	12	12	12	12		3,441.63	APBD Kab; DAK	Kab. Sleman	Dinas Kesehatan
				Bimtek Pemeriksaan Kesehatan Balita	kali	1	1	1	1					
				Data Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Balita	dokumen	1	1	1	1					
				Seminar Child Health Check Up	kali	1	1	1	1					
				Workshop penguatan pelayanan kesehatan balita	kali	1	1	1	1					

3.3. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02.02 .2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02 .2.02.1 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Data TB yang valid dari aplikasi SITT dan SITB	Triwulan	4	4	4	4		2,894.22	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Kesehatan
				Dokumen data HIV/AIDS	Dokumen	4	4	4	4					
		1.02.02 .2.02.1 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pelayanan konseling dan test/KT HIV	Puskesmas	25	25	25	25		1,514.19	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Kesehatan
				Pelacakan kasus dari investigasi wabah dan analisisnya	Bulan	12	12	12	12					
1.02.02 .2.02.1 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1.02.02 .2.02.1 3	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen DBD	Dokumen	1	1	1	1		14,666.51	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Kesehatan
				Dusun yang dipantau angka bebas jentik	Lokasi	5	5	5	5					
				Pelayanan Diare sesuai standar	Puskesmas	25	25	25	25					

Pelayanan ISPA dan Pneumonia sesuai standar	Puskesmas	25	25	25	25	
Pemeriksaan serologi antraks	Sampel	100	100	100	100	
Pemeriksaan serologi Pes pada manusia dan tikus	Sampel	250	250	250	250	
Penanggulangan Penyakit P2B2 dan Pengadaan larvasida	Puskesmas	25	25	25	25	
	Kg	750	750	750	750	

3.4. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02.02 .02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02 .02.0 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Bimtek Posbindu institusi	Institusi	6	6	6	6		4,222.97	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Kesehatan
				Buku Pedoman panduan Charta	buah	100	100	100	100					
				Faskes swasta mengirimkan Laporan	FKTP	25	25	25	25					
				KMS Posbindu	lembar	2000	2000	2000	2000					
				Puskesmas dengan SIPTM		25	25	25	25					
				Workshop Penguatan Jejaring IVA Test dan SADANIS	Dokumen	1	1	1	1					
		1.02.02 .02.0 8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Bimtek Pengelolaan Pelayanan kesehatan Hipertensi	Puskesmas	25	25	25	25		2,495.28	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Kesehatan
				Peningkatan kapasitas petugas dalam pelayanan hipertensi	Puskesmas	25	25	25	25					
				Peningkatan pemahaman tentang Hipertensi dan peran lintas sektor	Kecamatan	17	17	17	17					
		1.02.02 .02.0 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Bimtek pengelolaan pelayanan Diabetes Mellitus	Puskesmas	25	25	25	25		1,491.83	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Kesehatan
				Cetak buku manajemen kaki Diabet	Buku	115	115	115	115					
				Peningkatan kapasitas petugas dalam pengelolaan DM	Puskesmas	25	25	25	25					
				Peningkatan pemahaman tentang Diabetes Mellitus dan peran lintas sektor	Kecamatan	17	17	17	17					
		1.02.02 .02.1 0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Desa Siaga Sehat Jiwa	Desa	2	2	2	2		3,703.83	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Kesehatan
				Laporan kesehatan jiwa	Bulan	12	12	12	12					
				Peningkatan kapasitas petugas dalam pelayanan keswa	Puskesmas	25	25	25	25					
				Sekolah Sehat Jiwa	Sekolah	2	2	2	2					
		1.02.02 .02.2 0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pelayanan imunisasi anak sekolah	SD/MI	565	565	565	565		5,160.11	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Kesehatan
				Pelayanan Imunisasi balita	Puskesmas	25	25	25	25					
				Pelayanan imunisasi bayi	Puskesmas	25	25	25	25					
				Pelayanan imunisasi calon pengantin	Puskesmas	25	25	25	25					
				Pelayanan imunisasi ibu hamil	Puskesmas	25	25	25	25					
				Pelayanan pemeriksaan kesehatan haji	Calhaj	1200	1200	1200	1200					

		1.02.02 .2.02.2 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Pemenuhan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	bulan	12	12	12	12		203.03	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Kesehatan
		1.02.02 .2.02.2 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Cetak Buku Saku	Buku	1200	1200	1200	1200		847.29	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Kesehatan
				Cetak leaflet bahaya narkoba	Lembar	1200	1200	1200	1200					
				Peningkatan kapasitas petugas dalam penanggulangan Napza	Puskesmas	25	25	25	25					
		1.02.02 .2.02.3 7	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji dan pemantauan kesehatan pasca haji							722.81	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Kesehatan
				Pencatatan pelaporan kasus-kasus epidemiologi (KLB)										
				Surveilans terpadu penyakit berbasis puskesmas (kasus baru)										
3.6. Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas														
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)														
2.15.02 .2.08	Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan	2.15.02 .2.08.0 2	Pelaksanaan inspeksi audit dan pemantauan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor	Persentase pengendalian dan pengawasan lalu lintas	%	37	39	43	50		3,460.56	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Perhubungan
		2.15.02 .2.08.0 4	Pelaksanaan inspeksi audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kabupaten/kota	Terlaksananya pemilihan awak kendaraan umum teladan dan penyuluhan bagi pengemudi angkutan umum	%	100,00	100,00	100,00	100,00		310.74	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Perhubungan
3.7. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional														
Program Pengendalian Penduduk														
2.14.02 .2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten / kota	2.14.02 .2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Terlaksananya sosialisasi dan koordinasi pendataan keluarga	kali	1	1	1	1		271.37	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas P3AP2KB
				Update data keluarga di Kabupaten Sleman	lembar	250	250	250	250					
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)														
2.14.03 .2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal Budaya Lokal	2.14.03 .2.01.0 7 1	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Operasional balai penyuluhan KB	kanewon	16	16	16	16		4,697.59	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas P3AP2KB
				Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern contraceptive prevalence rate / mCPR)	%	76.90	77.00	77.10	77.20					
2.14.03 .2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.14.03 .2.02.0 4 1	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Operasional Kader PPKBD dan Sub PPKBD	Kalurahan	86	86	86	86		1,692.89	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas P3AP2KB

2.14.03 .2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.14.03 .2.03.0 3	Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka Panjang (MKJP)	Bimtek KBPPPK	kali	1	1	1	1		3,962.41	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas P3AP2KB						
				Penjaringan bhakti sosial	kali	17	17	17	17											
				Sosialisasi distribusi alat kontrasepsi	kali	1	1	1	1											
				Sosialisasi Kesehatan reproduksi	kali	1	1	1	1											
2.14.03 .2.03.0 6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Pengadaan sarana penunjang	paket	1	1	1	1			4,118.75	DAK	Kab. Sleman	Dinas P3AP2KB							
2.14.03 .2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2.14.03 .2.04.0 3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Operasional Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok Kegiatan	kali	8	8	8	8		3,908.82	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas P3AP2KB						
				Pelaksanaan Mekanisme Operasional Lini Lapangan	kali	6	6	6	6											
				Pertemuan Kelompok Kerja di Kampung KB	kali	8	8	8	8											
3.8. Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang																				
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat																				
1.02.02 .2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02 .2.02.1 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Orang terlatih penanganan kegawatdaruratan dalam bencana bagi masyarakat	orang	250	250	250	250		6,928.72	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Kesehatan						
				1.02.02 .2.02.1 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Pembinaan program pelayanan kesehatan tradisional	kali	3	3	3					3		430.90	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Kesehatan
						Pembinaan program pelayanan kesehatan tradisional	kali	2	2	2					2					
				1.02.02 .2.02.2 3	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Pembinaan program pelayanan rehabilitasi medis	kali	3	3	3					3		385.78	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Kesehatan
						Pembinaan program pelayanan rehabilitasi medis	kali	2	2	2					2					
1.02.02 .2.02.2 6	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pelayanan kesehatan penduduk miskin, rentan miskin, kader kesehatan, kader sosial, kader IMP dan anggota Linmas (PBI APBD)	jiwa	114414	114414	114414	114414		171,900.16	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Kesehatan								
	Operasional pelayanan Jampersal (DAK)	bulan	12	12	12	12														

			Pelayanan kesehatan penduduk miskin, rentan miskin, kader kesehatan, kader sosial, kader IMP, anggota Linmas, PBI APBN Non Aktif, Ketua RT/RW, relawan bencana, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), penderita penyakit kronis, Rois, pengurus tempat ibadah	bulan	12	12	12	12				
--	--	--	--	-------	----	----	----	----	--	--	--	--

TUJUAN GLOBAL 4. MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA

Program/Kegiatan/Rincian Output				Satuan	Target Tahunan				Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana		
1				2	2023	2024	2025	2026					2027	3
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH										4.00	5	6	7	
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif														
4.5. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi														
4.a. Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.														
Program Pengelolaan Pendidikan														
1.01.02	.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru	%						411,480.80	APBD Kab, DAK	Kab. Sleman	Dinas Pendidikan
.2.01.0		2												
1.01.02		1.01.02	Penambahan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/Tata Usaha	Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tata Usaha Baru	%									
.2.01.0		3												
1.01.02		1.01.02	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah Baru	%									
.2.01.0		4												
1.01.02		1.01.02	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang Perpustakaan Baru	%									
.2.01.0		5												
1.01.02		1.01.02	Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah	Prasarana/Utilitas Sekolah Baru	%									
.2.01.0		6												
1.01.02		1.01.02	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Ruang Kelas Terehabilitasi	%									
.2.01.0		8												
1.01.02		1.01.02	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tata Usaha	Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tata Usaha Terehabilitasi	%									
.2.01.0		9												
1.01.02	1.01.02	Rehabilitasi Sedang/Berat Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah Terehabilitasi	%										
.2.01.1	0													
1.01.02	1.01.02	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang Perpustakaan Sekolah Terehabilitasi	%										
.2.01.1	1													
1.01.02	1.01.02	Rehabilitasi Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah	Prasarana/Utilitas Sekolah Terehabilitasi	%										
.2.01.1	2													
1.01.02	1.01.02	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang Perpustakaan Sekolah Terehabilitasi	%										
.2.01.1	3													
1.01.02	1.01.02	Pengadaan Mebel Sekolah	Penyediaan Mebel Sekolah	%										
.2.01.1	4													
1.01.02	1.01.02	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Penyediaan Perlengkapan Sekolah	%										
.2.01.1	6													
1.01.02	1.01.02	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Penyediaan Perlengkapan Siswa/Peserta Didik	%										
.2.01.1	7													

		1.01.02 .2.01.2 1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Bantuan Pendidikan bagi Peserta Didik Miskin/Rentan Miskin	%												
				Verifikasi Data Peserta Didik Penerima PIP													
		1.01.02 .2.01.2 2	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Penyediaan Alat Praktik & Peraga Siswa	%												
		1.01.02 .2.01.2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Dukungan Pengembangan Kurikulum SD	Dokumen												
				Dukungan Penyelenggaraan Ujian SD	%												
				Peta Hasil Proses Belajar Mengajar SD	Dokumen												
		1.01.02 .2.01.2 5	Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa	Dukungan Pengembangan Karakter Peserta Didik	%												
				Dukungan Pengembangan Minat, Bakat, & Kreativitas Siswa	%												
		1.01.02 .2.01.2 6	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) bagi Satuan Pendidikan SD	Dokumen Nominatif PTK SD	Dokumen												
				Penyediaan Penghargaan & Tambahan Kesejahteraan PTK SD	Bulan												
		1.01.02 .2.01.2 7	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) SD	Pembinaan Kompetensi PTK SD	%												
				Pengawasan Kinerja PTK SD	%												
				Pengembangan Karir PTK SD	%												
		1.01.02 .2.01.2 8	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Izin Operasional Sekolah	Dokumen												
				Pembinaan Kelembagaan Sekolah	%												
				Penerimaan Peserta Didik Baru	%												
		1.01.02 .2.01.2 9	Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD	Dokumen RAPBS/APBS	Dokumen												
				Laporan Pengelolaan Dana BOS	Dokumen												
1.01.02 .2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1.01.02 .2.02.0 1	Penambahan Unit Sekolah Baru	Unit SMP Baru	%								105,800.00	APBD Kab, DAK	Kab. Sleman	Dinas Pendidikan	
		1.01.02 .2.02.0 2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru	%												
		1.01.02 .2.02.0 3	Penambahan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/Tata Usaha	Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tata Usaha Baru	%												
		1.01.02 .2.02.0 4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah Baru	%												
		1.01.02 .2.02.0 5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang Perpustakaan Baru	%												
		1.01.02 .2.02.0 6	Pembangunan Laboratorium	Laboratorium SMP Baru	%												
		1.01.02 .2.02.1 2	Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah	Prasarana/Utilitas Sekolah Baru	%												
		1.01.02 .2.02.1 4	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Ruang Kelas Terehabilitasi	%												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

1.01.02 .2.02.1 5	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru	Ruang Guru Terehabilitasi	%				
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Ruang Kepala Sekolah Terehabilitasi	%				
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Tata Usaha	Ruang Tata Usaha Terehabilitasi	%				
1.01.02 .2.02.1 6	Rehabilitasi Sedang/Berat Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah Terehabilitasi	%				
1.01.02 .2.02.1 7	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang Perpustakaan Sekolah Terehabilitasi	%				
1.01.02 .2.02.1 8	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Ruang Laboratorium sekolah Terehabilitasi	%				
1.01.02 .2.02.2 4	Rehabilitasi Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah	Prasarana/Utilitas Sekolah Terehabilitasi	%				
1.01.02 .2.02.2 5	Pengadaan Mebel Sekolah	Penyediaan Mebel Sekolah	%				
1.01.02 .2.02.2 6	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Mebel Sekolah Terpelihara	%				
1.01.02 .2.02.2 7	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Penyediaan Perlengkapan Sekolah	%				
1.01.02 .2.02.2 8	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Penyediaan Perlengkapan Siswa/Peserta Didik	%				
1.01.02 .2.02.3 2	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Bantuan Pendidikan bagi Peserta Didik Miskin/Rentan Miskin	%				
		Verifikasi Data Peserta Didik Penerima PIP	%				
1.01.02 .2.02.3 5	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Penyediaan Alat Praktik & Peraga Siswa	%				
1.01.02 .2.02.3 6	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Dukungan Pengembangan Kurikulum SMP	Dokumen				
		Dukungan Penyelenggaraan Ujian SMP	%				
		Peta Hasil Proses Belajar Mengajar SMP	Dokumen				
1.01.02 .2.02.3 8	Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa	Dukungan Pengembangan Karakter Peserta Didik	%				
		Dukungan Pengembangan Minat, Bakat, & Kreativitas Siswa	%				
1.01.02 .2.02.3 9	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) bagi Satuan Pendidikan SMP	Dokumen Nominatif PTK SMP	Dokumen				
		Penyediaan Penghargaan & Tambahan Kesejahteraan PTK SMP	Bulan				
1.01.02 .2.02.4 0	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) SMP	Pembinaan Kompetensi PTK SMP	%				
		Pengawasan Kinerja PTK SMP	%				
		Pengembangan Karir PTK SMP	%				
1.01.02 .2.02.4 1	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Izin Operasional Sekolah	Dokumen				

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

			Pembinaan Kelembagaan Sekolah	%															
			Penerimaan Peserta Didik Baru	%															
		1.01.02 .2.02.4 2	Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP	Dokumen RAPBS/APBS	Dokumen														
				Laporan Pengelolaan Dana BOS	Dokumen														
1.01.02 .2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02 .2.04.0 1	Penbanguan Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru Nonformal/ Kesetaraan	Ruang Kelas/Guru Baru	%									20,000.00	APBD Kab, DAK	Kab. Sleman	Dinas Pendidikan		
		1.01.02 .2.04.0 2	Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah	Prasarana/Utilitas Sekolah Baru	%														
		1.01.02 .2.04.0 3	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas/Guru Nonformal/ Kesetaraan	Ruang Kelas/Guru Terehabilitasi	%														
		1.01.02 .2.04.0 5	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Ruang Kelas/Guru Terpelihara	%														
		1.01.02 .2.04.0 6	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah	Prasarana/Utilitas Sekolah Terehabilitasi	%														
		1.01.02 .2.04.0 7	Pengadaan Mebel Sekolah	Penyediaan Mebel Sekolah	%														
			Pemeliharaan Mebel Sekolah	Mebel Sekolah Terpelihara	%														
		1.01.02 .2.04.0 8	Pengadaan Alat Rumah Tangga Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Alat Rumah Tangga Nonformal/Kesetaraan															
		1.01.02 .2.04.0 9	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Perlengkapan Sekolah	%														
		1.01.02 .2.04.1 0	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Bantuan Pendidikan bagi Peserta Didik Miskin/Rentan Miskin	%														
				Verifikasi Data Peserta Didik Penerima PIP	%														
		1.01.02 .2.04.1 1	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Penyediaan Alat Praktik & Peraga Siswa	%														
		1.01.02 .2.04.1 2	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Dukungan Pengembangan Kurikulum Nonformal/Kesetaraan	Dokumen														
		1.01.02 .2.04.1 4	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen Nominatif PTK Nonformal/Kesetaraan	Dokumen														
				Penyediaan Penghargaan & Tambahan Kesejahteraan PTK Nonformal/Kesetaraan	Bulan														
		1.01.02 .2.04.1 5	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Nonformal/Kesetaraan	Pembinaan Kompetensi PTK Nonformal/Kesetaraan	%														
				Pengawasan Kinerja PTK Nonformal/Kesetaraan	%														
				Pengembangan Karir PTK Nonformal/Kesetaraan	%														
		1.01.02 .2.04.1 6	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Izin Operasional Sekolah	Dokumen														
				Pembinaan Kelembagaan Sekolah	%														

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikasi elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

1.01.02 .2.04.1 7	Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Nonformal/Kesetaraan	Dokumen RAPBS/APBS	Dokumen						
		Laporan Pengelolaan Dana BOS	Dokumen						
	Pembangunan Laboratorium Nonformal/Kesetaraan	Laboratorium Nonformal/Kesetaraan	%						
	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Nonformal/Kesetaraan	Ruang Laboratorium Nonformal/Kesetaraan	%						
	Penyelenggaraan Ujian Bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Dukungan Penyelenggaraan Ujian Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	%						

4.2. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar

Program Pengelolaan Pendidikan						187,800.00	APBD Kab, DAK	Kab. Sleman	Dinas Pendidikan
1.01.02 .2.03 Anak Usia Dini	1.01.02 .2.03.0 1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	%					
	1.01.02 .2.03.0 2	Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah	Prasarana/Utilitas Sekolah Baru	%					
	1.01.02 .2.03.0 3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Guru PAUD	Ruang Kelas/Guru Terehabilitasi	%					
	1.01.02 .2.03.0 5	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Ruang Kelas/Guru Terpelihara	%					
	1.01.02 .2.03.0 6	Rehabilitasi Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah	Prasarana/Utilitas Sekolah Terehabilitasi	%					
	1.01.02 .2.03.0 7	Pengadaan Mebel Sekolah	Penyediaan Mebel Sekolah	%					
		Pemeliharaan Mebel Sekolah	Mebel Sekolah Terpelihara	%					
	1.01.02 .2.03.0 8	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Penyediaan Alat Rumah Tangga PAUD						
	1.01.02 .2.03.0 9	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Penyediaan Perlengkapan PAUD	%					
	1.01.02 .2.03.1 0	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Penyediaan Perlengkapan Siswa/Peserta Didik PAUD	%					
	1.01.02 .2.03.1 1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Bantuan Pendidikan bagi Peserta Didik Miskin/Rentan Miskin	%					
			Verifikasi Data Peserta Didik Penerima PIP	%					
	1.01.02 .2.03.1 2	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Penyediaan Alat Praktik & Peraga Siswa	%					
	1.01.02 .2.03.1 3	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Dukungan Pengembangan Kurikulum PAUD	Dokumen					
	1.01.02 .2.03.1 5	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) bagi Satuan Pendidikan PAUD	Dokumen Nominatif PTK PAUD	Dokumen					
			Penyediaan Penghargaan & Tambahan Kesejahteraan PTK PAUD	Bulan					

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

		1.01.02 .2.03.1 6	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) PAUD	Pembinaan Kompetensi PTK PAUD	%													
				Pengawasan Kinerja PTK PAUD	%													
				Pengembangan Karir PTK PAUD	%													
		1.01.02 .2.03.1 7	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Izin Operasional Sekolah	Dokumen													
				Pembinaan Kelembagaan Sekolah	%													
				Penerimaan Peserta Didik Baru	%													
		1.01.02 .2.03.1 8	Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	Dokumen RAPBS/APBS	Dokumen													
				Laporan Pengelolaan Dana BOP	Dokumen													
4.c. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil																		
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan												959.07	APBD Kab, DAK	Kab. Sleman	Dinas Pendidikan			
1.01.04 .2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.04 .2.01.0 1	Perhitungan dan Pemetaan PTK bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Dokumen Nominatif PTK SD & SMP														
				Penyediaan Penghargaan & Tambahan Kesejahteraan PTK SD & SMP														
				Pembinaan Kompetensi PTK SD & SMP														
				Pengawasan Kinerja PTK SD & SMP														
				Pengembangan Karir PTK SD & SMP														
		1.01.04 .2.01.0 2	Penataan Pendistribusian PTK bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen Nominatif PTK PAUD & Nonformal/Kesetaraan														
				Penyediaan Penghargaan & Tambahan Kesejahteraan PTK PAUD & Nonformal/Kesetaraan														
				Pembinaan Kompetensi PTK PAUD & Nonformal/Kesetaraan														
				Pengawasan Kinerja PTK PAUD & Nonformal/Kesetaraan														
				Pengembangan Karir PTK PAUD & Nonformal/Kesetaraan														

TUJUAN GLOBAL 5. MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN

Program/Kegiatan/Rincian Output		Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana			
			2023	2024	2025	2026	2027							
1		2	3					4	5	6	7			
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
5.1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana pun														
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan														
2.08.02 .2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kot a	2.08.02 .2.01.0 3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Pendampingan penyusunan RA PUG	kali	2	2	-	-		1,407.30	APBD Kab, DAK	Kab. Sleman	Dinas P3AP2KB
				Kalurahan										
				Pertemuan Pokja PUG	kali	1	1	1	1					
				Review dan Evaluasi PPRG	dokumen	1	1	1	1					
				Sosialisasi PUG dan PPRG bagi Karang taruna	kali	1	1	1	1					
				Temu Forum PUG Bidang Agama	kali	1	1	1	1					
				Temu Forum PUG Bidang Budaya	kali	1	1	1	1					

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

				Temu Forum PUG Bidang Kebencanaan	kali	1	1	1	1					
				Temu Forum PUG Bidang Lingkungan Hidup	kali	1	1	1	1					
				Temu Forum PUG Bidang Pariwisata	kali	1	1	1	1					
				Temu Forum PUG Bidang Ketenaga kerjaan	kali	1	1	1	1					
				Dokumen analisis pelaksanaan n PUG Bidang Kesehatan	dokumen	1	-	-	-					
				Forum PUG Bidang Kesehatan	kali	-	1	1	1					
				Evaluasi RA PUG Tk Kalurahan	dokumen	-	-	2	2					
				Temu PUSPA	kali	1	1	1	1					
2.08.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02	Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Pembinaan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Sleman	kali	12	12	12	12		710.95	APBD Kab, DAK	Kab. Sleman	Dinas P3AP2KB
				Pembinaan organisasi perempuan (GOW)	kali	12	12	12	12					
				Peringatan Hari Ibu	kali	1	1	1	1					
				Peringatan hari kartini	kali	1	1	1	1					
				Peringatan HUT DWP	kali	1	1	1	1					
5.2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.														
Program Perlindungan Perempuan														
2.08.03	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	2.08.03	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten /kota	Implementasi keluarga sadar gender	kali	5	5	5	3		2,569.93	APBD Kab, DAK	Kab. Sleman	Dinas P3AP2KB
				Penguatan FPKK	kali	2	2	2	2					
				Penguatan GT TPPO	kali	2	2	2	2					
				Penguatan HWDI	kali	2	2	2	2					
				Sosialisasi UU KDRT / TPPO	kali	5	6	7	3					
2.08.03	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Operasional UPTD PPA	bulan	12	12	12	12		1,797.51	APBD Kab, DAK	Kab. Sleman	Dinas P3AP2KB
5.3. Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.														
Program Pengendalian Penduduk														
2.14.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten / kota	2.14.02	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Terlaksananya sosialisasi dan koordinasi pendataan keluarga	kali	1	1	1	1		271.37	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas P3AP2KB
				Update data keluarga di Kabupaten Sleman	lembar	250	250	250	250					
5.6. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumendokumen hasil revidi dari Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)														

2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal Budaya Lokal	2.14.03.2.01.071	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBP	Operasional balai penyuluhan KB	kapanewon	16	16	16	16		4,697.59	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas P3AP2KB
				Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern contraceptive prevalence rate / mCPR)	%	76.90	77.00	77.10	77.20					
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.14.03.2.02.041	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Operasional Kader PPKBD dan Sub PPKBD	Kalurahan	86	86	86	86		1,692.89	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas P3AP2KB
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.14.03.2.03.03	Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka Panjang (MKJP)	Bimtek KBPPPK	kali	1	1	1	1		3,962.41	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas P3AP2KB
				Penjaringan bhakti sosial	kali	17	17	17	17					
				Sosialisasi distribusi alat kontrasepsi	kali	1	1	1	1					
				Sosialisasi Kesehatan reproduksi	kali	1	1	1	1					
		2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Pengadaan sarana penunjang	paket	1	1	1	1		4,118.75	DAK	Kab. Sleman	Dinas P3AP2KB
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB	Operasional Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok Kegiatan	kali	8	8	8	8		3,908.82	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas P3AP2KB
				Pelaksanaan Mekanisme Operasional Lini Lapangan	kali	6	6	6	6					
				Pertemuan Kelompok Kerja di Kampung KB	kali	8	8	8	8					

TUJUAN GLOBAL 6. MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA

Program/Kegiatan/Rincian Output		Satuan	Target Tahunan					Indikator Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana			
			2023	2024	2025	2026	2027							
1		2	3					4	5	6	7			
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
6.1. Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua														
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Data air minum	paket	1	1	1	1		2,319.30	APBD Kab	Kab. Sleman	DPUPKP
				Baseline HAMP Kabupaten Sleman;	paket	1	1	1	1					
				Kajian Potensi Air Baku;	paket	1	1	1	1					
				Perencanaan SPAM Perdesaan	paket	3	3	3	3					

1.03.03 .2.01.0 3	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Pembangunan distribusi SPAM	paket	4	4	4	4		41,375.74	APBD Kab	Kab. Sleman	DPUPKP
1.03.03 .2.01.0 4	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Pembangunan Jaringan Perpipaan (APBD)	LS	1	1	1	1		35,539.59	APBD Kab	Kab. Sleman	DPUPKP
1.03.03 .2.01.0 6	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Peningkatan jaringan perpipaan (DAK)	LS	1	1	1	1		2,291.45	APBD Kab	Kab. Sleman	DPUPKP
1.03.03 .2.01.1 1	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Fasilitasi teknis pengelolaan air bersih tingkat desa ;	LS	1	1	1	1		2,249.63	APBD Kab	Kab. Sleman	DPUPKP
		Lomba teknis pengelolaan air bersih tingkat desa ;	kali	1	1	1	1					
		Pembinaan dan fasilitasi Air Baku Kawasan Kekeringan ;	LS	1	1	1	1					
		Pembinaan teknis pengelolaan air bersih tingkat desa	LS	1	1	1	1					
1.03.03 .2.01.1 4	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Hibah Air Minum Perdesaan (HAMP) PAMSIMAS	desa	5	5	5	5		22,475.71	APBD Kab	Kab. Sleman	DPUPKP
		HID	desa	1	1	1	1					
		Pameran / Gelar Potensi BKM, Uji Petik BKM, FGD Pendampingan eks PNPM Perkotaan / KOTAKU	kecamatan	15	15	15	15					
		Program PISEW	kecamatan	15	15	15	15					
1.03.03 .2.01.1 9	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Perluasan jaringan perpipaan (DAK)	LS	1	1	1	1		27,258.07	APBD Kab	Kab. Sleman	DPUPKP

6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan

Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Pengadaan Media Cetak	paket	1	1	1	1		5,620.19	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Kesehatan
		Publikasi Media Elektronik	jenis media	2	2	2	2					
		Media Cetak Outdoor	paket	1	1	1	1					
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Pembinaan Kader Posyandu Aktif	kali	2	2	2	2		2,723.68	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Kesehatan
		Pembinaan PHBS	kali	6	6	6	6					
		Pembinaan Poskestren Sehat	kali	4	4	4	4					
		Pembinaan SBH	kali	8	8	8	8					
		Pembinaan TOGA dan Akupresur	kali	6	6	6	6					
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah/ Kabupaten	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan, dan Pemberdayaan Masyarakat	Kelembagaan Desa Siaga	kali	2	2	2	2		12,039.36	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Kesehatan
		Pelaksanaan Kampanye GERMAS	kali	1	1	1	1					
		Pelaksanaan Peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia (HTTS)	kali	1	1	1	1					

Pemantauan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	lokasi	10	10	10	10	
Publikasi melalui media sosial	paket	2	2	2	2	

6.3. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan Pembangunan SPALD-S Skala Individu	paket	11	11	11	11		6,900.00	APBD Kab	Kab. Sleman	DLH
		Perencanaan Rehabilitasi Lokasi Jaringan Terpusat	paket	1	1	1	1					
		Perencanaan Penyempurnaan IPLT	paket	1								
		Perencanaan Pemb. Jaringan Pipa Servis dan SR SPALD-T Kawasan Depok	paket	2	2	2	2					
		Perencanaan Pemb. Jaringan Pipa Servis dan SR SPALD-T Sewon (Wilayah Sleman)	paket	2	2	2	2					
		Perencanaan Penyempurnaan SPALD-T Kawasan Berbah	paket	1	1							
		Perencanaan Rehabilitasi Lokasi Jaringan SPALD-T Kawasan Berbah	paket	1	1	1	1					
		Perencanaan Rehabilitasi Lokasi Jaringan SPALD-T Kawasan Depok (Nologaten)	paket			1	1					
		Perencanaan Penyempurnaan SPALD-T Kawasan Depok (Nologaten)	paket			1	1					
		Perencanaan Pemb. Jaringan Pipa Servis dan SR SPALD-T Kawasan Berbah	paket		1	1	1					
Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota		Supervisi Rehabilitasi Lokasi Jaringan Terpusat	paket	1	1	1	1		687.50	APBD Kab	Kab. Sleman	DLH
		Supervisi Pemb. Jaringan Pipa Servis dan SR SPALD-T Sewon (Wilayah Sleman)	paket	2	2	2	2					
Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota		Pembangunan Jaringan Pipa Servis dan SR SPALD-T Sewon (Wilayah Sleman)	SR	150	150	150	150		7,816.95	APBD Kab	Kab. Sleman	DLH
Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota		Rehabilitasi Lokasi Jaringan Terpusat	paket	1	1	1	1		850.40	APBD Kab	Kab. Sleman	DLH
Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman		Penyempurnaan SPALD-T Kawasan Berbah	paket	1					1,148.38	APBD Kab	Kab. Sleman	DLH
		Rehabilitasi Lokasi Jaringan SPALD-T Kawasan Berbah	paket	1	1	1	1					
		Penyempurnaan SPALD-T Kawasan Depok (Nologaten)	paket			1	1					
		Rehabilitasi Lokasi Jaringan SPALD-T Kawasan Depok (Nologaten)	paket			1	1					

Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Pembangunan SPALD-S Skala Individu (DAK)	unit	254	254	254	254	41,880.13	APBD Kab; DAK, SANDES	Kab. Sleman	DLH
	Pembangunan SPALD-S Skala Individu	unit	416	416	416	416				
	Pembangunan SPALD-S Skala Individu (SANDES)	unit	300	300	300	300				
Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	kali	2	2	2	2	287.00	APBD Kab	Kab. Sleman	DLH
Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Sosialisasi Pembangunan SPALD-S Skala Individu	kali	11	11	11	11	1,208.60	APBD Kab	Kab. Sleman	DLH
	Sosialisasi Pemeliharaan Jaringan Terpusat/SPALD-T Skala Permukiman/IPAL Kawasan	kali	18	18	18	18				
	Sosialisasi Rehabilitasi Lokasi Jaringan IPAL Terpusat	kali	1	1	1	1				
	Sosialisasi Pembangunan SPALD-S Skala Individu (DAK)	kali	3	3	3	3				
	Sosialisasi Pembangunan Jaringan Pipa Servis dan SR SPALD-T Kawasan Depok	kali	8	8	8	8				
	Sosialisasi Pembangunan Jaringan Pipa Servis dan SR SPALD-T Sewon (Wilayah Sleman)	kali	4	4	4	4				
	Sosialisasi Rehabilitasi Lokasi Jaringan SPALD-T Kawasan Berbah	kali	1	1	1	1				
	Sosialisasi Pembangunan Jaringan Pipa Servis dan SR SPALD-T Kawasan Berbah	kali		2	2	2				
	Sosialisasi Rehabilitasi Lokasi Jaringan SPALD-T Kawasan Depok	kali			1	1				
Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	FGD Penarikan Retribusi Pengolahan Limbah Cair	kali	1	1	1	1	147.60	APBD Kab	Kab. Sleman	DLH
	FGD Pengelolaan SPALD-T Skala Permukiman	kali	1	1	1	1				
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Pemeliharaan Rutin Jaringan Air Limbah Jaringan Terpusat dan IPAL Kawasan	bulan	12	12	12	12	19,479.90	APBD Kab	Kab. Sleman	DLH
	Penarikan Retribusi Pengelolaan Air Limbah	bulan	12	12	12	12				
	Pengelolaan IPAL Kawasan Berbah	bulan	12	12	12	12				
	Pengelolaan IPLT	bulan	12	12	12	12				
	Tenaga Fasilitator Lapangan	orang	10	10	10	10				
	Pengelolaan IPAL Kawasan Depok	bulan	12	12	12	12				
	Pendampingan KPP SPALD-T Skala Permukiman	lokasi	20	15	5	5				
	Fasilitasi KPP SPALD-T Skala Permukiman	lokasi	15	5	5	5				
Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Supervisi Pembangunan Jaringan Pipa Servis dan SR SPALD-T Kawasan Depok	paket	2	2	2	2	1,024.20	APBD Kab	Kab. Sleman	DLH
	Supervisi Penyempurnaan SPALD-T Kawasan Berbah	paket	1	1						
	Supervisi Rehabilitasi Lokasi Jaringan SPALD-T Kawasan Berbah	paket	1	1	1	1				

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

		Supervisi Pembangunan Jaringan Pipa Servis dan SR SPALD-T Kawasan Berbah	paket		1	1	1					
		Supervisi Penyempurnaan SPALD-T Kawasan Depok	paket			1	1					
		Supervisi Rehabilitasi Lokasi Jaringan SPALD-T Kawasan Depok	paket			1	1					
	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Pembangunan Jaringan Pipa Servis dan SR SPLAD-T Kawasan Berbah	SR		50	50	50		20,446.95	APBD Kab; APBN	Kab. Sleman	DLH
		Pembangunan Jaringan Pipa Servis dan SR SPLAD-T Kawasan Depok	SR	250	250	250	250					
		Pembangunan sanitas	unit	3	3	3	3					
	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Pengadaan Kendaraan Sedot Lumpur Tinja Roda Tiga	unit	-		2	-		1,800.00	APBD Kab	Kab. Sleman	DLH
		Pengadaan truck Tinja	unit		1	1	-					
	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Pelayanan penyedotan lumpur tinja	lokasi	500	1000	1000	1000		1,007.98	APBD Kab	Kab. Sleman	DLH
	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Pembangunan bak pelengkap dewatering (aerasi, maturasi, bioindikator)	paket	1	-	-	-		1,502.00	APBD Kab	Kab. Sleman	DLH
	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluas Sarana dan Prasarana IPLT	Penyempurnaan IPLT	paket	1	1	1	1		927.98	APBD Kab	Kab. Sleman	DLH
	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Supervisi Penyempurnaan IPLT	paket	1	1	1	1		162.06	APBD Kab	Kab. Sleman	DLH

Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Pengujian / pemeriksaan kualitas air badan air	sampel	60	60	60	60		1,695.00	APBD Kab	Kab. Sleman	DLH
		Pengujian / pemeriksaan kualitas air bersih	sampel	50	50	50	50					
		Pengujian / pemeriksaan kualitas air embung	sampel	25	25	25	25					
		Pengujian / pemeriksaan kualitas air hujan	sampel	6	6	6	6					
		Pengujian / pemeriksaan kualitas air mata air	sampel	20	20	20	20					
		Pengujian / pemeriksaan sampel tanah	sampel	23	23	23	23					
		Pengujian / pemeriksaan kualitas udara ambien passive sampler	periode	2	2	2	2					
		Pengujian Emisi kendaraan bermotor	kali	1	1	1	1		3,240.00	APBD Kab	Kab. Sleman	DLH
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Pembinaan Kalpataru	kategori	4	4	4	4					
		Pembinaan Kampung Iklim	kali	10	10	10	10					
		Inventarisasi GRK	dokumen	1	1	1	1					
		Kompartemen	buah	100	100	100	100					
		Komposter	buah	50	50	50	50					
		Penghijauan Lingkungan	batang	2000	2000	2000	2000					
Pembinaan Lahan Kritis dan GRK		kali	5	5	5	5						
Sosialisasi	kali	20	20	20	20							
	Bibit Tanaman Pemeliharaan Hutan Rakyat	batang	1300	1300	1300	1300						

Bibit Tanaman Sekitar Sumber Air	batang	2600	2600	2600	2600		
Inventarisasi Kerusakan Lahan Kritis dan Penghijauan	dokumen	1	1	1	1		
Pengadaan Tanaman	batang	3400	3400	3400	3400		
Alat Bor Biopori	buah	200	200	200	200		
Tutup Lubang Biopori	buah	2000	2000	2000	2000		
Pembangunan SPAH	unit	150	150	150	150		
Evaluasi Kalpataru							
Evaluasi Kampung Iklim							

Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Pembinaan sekolah	kali	9	9	9	9		1,833.84	APBD Kab	Kab. Sleman	DLH	
		Pembinaan Pondok Pesantren Berwawasan lingkungan	kali	3	3	3	3						
		Pembinaan film dokumenter	kali	5	5	5	5						
		Pembinaan saka kalpataru	kali	4	4	4	4						
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Buku Monitoring dan evaluasi kegiatan sanitasi	Gerakan Kebersihan Sungai	lokasi	30	30	30	30		3,350.00	APBD Kab	Kab. Sleman	DLH
			Pengujian Kualitas air limbah Ipal Komunal	kali	50	50	50	50					
			Pertemuan jejaring pengelola Ipal Komunal	kali	2	2	2	2					
			Pertemuan Masyarakat peduli sungai	kali	6	6	6	6					
			Buku Inventarisasi Sumber Pencemar sungai	dokumen	3	2	2	-					
			Pelaksanaan Merti Kali	kali	kali	kali	kali	kali					
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Sosialisasi pengelolaan lingkungan hidup		kali	20	20	20	20		300.00	APBD Kab	Kab. Sleman	DLH
			Pembinaan pengelolaan lingkungan hidup	kali	5	5	5	5					

Program Pengelolaan Persampahan

Pengelolaan Sampah	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Laporan Pengelolaan Sampah	dokumen	1	1	1	1		145.00	APBD Kab	Kab. Sleman	DLH		
		Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Gerobak sampah		buah	50	50	50	50		2,457.99	APBD Kab	Kab. Sleman	DLH
				Komposter	unit	125	125	125	125					
				Mesin pencacah	unit	5	5	5	5					
				Motor roda tiga	unit	5	5	5	5					
				Papan larangan	buah	15	15	15	15					
				Drum plastik	buah	150	150	150	150					
				Kompartemen	unit	100	100	100	100					
		Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Pelayanan sampah perumahan dan Niaga 600m3/hari		bulan (26 hari)	12	12				48,697.67	APBD Kab	Kab. Sleman	DLH

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

			Pelayanan sampah perumahan dan Niaga 700m3/hari	bulan (26 hari)			12	12					
			Pembayaran retribusi sampah ke TPA Piyungan	bulan	12	12	12	12					
			Pemeliharaan Transfer Depo	lokasi	6	6	6	6					
			Penyapuan Jalan Protokol 28 Lokasi	bulan	12	12	12	12					
		Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Fasilitas kelompok sampah mandiri	kali	20	20	20	20		2,137.69	APBD Kab	Kab. Sleman	DLH
			Pelatihan pengelolaan sampah mandiri	kali	20	20	20	20					
			Sosialisasi persampahan	kali	20	20	20	20					
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Terbangunnya TPS 3R/TPS/Rumah Sampah	unit	6	6	6	6		11,077.74	APBD Kab	Kab. Sleman	DLH
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Patroli Sampah Liar	kali	90	90	90	90		738.45	APBD Kab	Kab. Sleman	DLH
			Pendataan pengelolaan sampah swasta										
			Pendampingan masyarakat dalam menangani sampah liar	lokasi	2	2	2	2					
			Penanganan aduan sampah liar	aduan	30	30	30	30					

TUJUAN GLOBAL 8. MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA

Program/Kegiatan/Rincian Output		Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
1		2	2023	2024	2025	2026	2027	4	5	6	7	
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH												
8.1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7% pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang												
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian												
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Sekolah Lapang Pertanian Tanaman Pangan	unit	5	5	5	5		13,110.10	APBD Kab	Kab. Sleman	Dispertan
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Sekolah Lapang Pertanian Tanaman Hortikultura/perkebunan	unit	5	5	5	5					
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Mutu benih/bibit ternah bahan pakan/pakan/tanaman skala kecil	Pelatihan budidaya peternakan	pelatihan	8	8	8	8		5,218.92	APBD Kab	Kab. Sleman	Dispertan
		Pelatihan Pembuatan Pakan Ternak	pelatihan	7	7	7	7					
		Penguatan Sapi Betina Bunting	ekor	150	150	150	150					
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian												
Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pengadaan alat - alat pertanian (hortikultura dan perkebunan)	unit	15	15	15	15		2,834.36	APBD Kab	Kab. Sleman	Dispertan
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Pelatihan pengolahan dan pemasaran Hasil Tanaman Pangan	pelatihan	2	2	2	2					

	Pembangunan Sarana Pertanian		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Meningkatnya keterpenuhan prasarana dan sarana pertanian tanaman pangan	pelatihan	3	3	3	3		15,316.24	APBD Kab	Kab. Sleman	Dispertan
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Pembangunan/rehabilitasi gedung BP4 serta sarana pendukungnya	paket	5	6	7	8					
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner														
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah W abah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Pemeriksaan Hewan Kurban	kecamatan	17	17	17	17		2,448.44	APBD Kab	Kab. Sleman	Dispertan
				Pemeriksaan Sampel Laboratorium Rujukan Diagnostik	sampel	13	13	13	13					
				Pemrosesan Rekomendasi Perijinan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	rekomendasi	10	10	10	10					
	Pengolaan Pelayanan Jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten kota		Penyediaan Pelayanan Jasa medik veteriner	monitoring puskesmas, pelayanan puskesmas keliling, pengadaan bahan laboratorium, pengadaan obat-obatan, penyelenggaraan pelayanan kesehatan hewan	bulan	12	12	12	12		2,316.19	APBD Kab	Kab. Sleman	Dispertan
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan		pendampingan Unit Usaha hewan dan produk hewan	Pelatihan pembuatan pupuk organik	pelatihan	5	5	5	5		1,826.74	APBD Kab	Kab. Sleman	Dispertan
				Pelatihan olahan produk peternakan	pelatihan	3	3	3	3					
				Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Pengawasan produk olahan hasil peternakan	sampel	100	100	100	100				
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian														
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Gerakan Pengendalian Hama penyakit		60	60	60			3,399.66	APBD Kab	Kab. Sleman	Dispertan
			Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Gerakan pengendalian OPT, Pembelian bahan obat-obatan- pengamatan OPT tanaman hortikultura dan perkebunan; pengendalian hama pada tanaman hortibun	kali	50	50	50	50					
Program Penyuluhan Pertanian														
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	1. Diseminasi Teknologi Pertanian 2. Evaluasi BP4, PPL PNS dan THL-TBPP / P3K, PPS, dan Petani berprestasi 3. Media Penyuluhan Audio Visual 4. Pelatihan peningkatan kapasitas Kelompok Penyuluh Swadaya 5. Pembuatan Folder/Leaflet 6. Penyediaan Sarana/Media Penyuluhan Bagi Penyuluh (PPA, PPL, P3K, Penyuluh swadaya) 7. Profil 8. Programa Penyuluhan Tingkat Kabupaten 9. RDKK tk Kabupaten	%	2	2	2	2	2	14,606.93	APBD Kab	Kab. Sleman	Dispertan
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Pelatihan kelembagaan petani	pelatihan	12	12	12	12					

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

			Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Pelatihan pengolahan hasil produksi hortikultura dan perkebunan	pelatihan	12	12	12	12					
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap														
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Penambahan populasi ikan lokal di perairan umum	kg	2000	2000	2200	2200		664.26	APBD Kab	Kab. Sleman	Dispertan
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya														
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Kursus budidaya ikan	pelatihan	4	4	4	4		2,368.34	APBD Kab	Kab. Sleman	Dispertan
			Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pertemuan forum Perikanan	kali	5	5	5	5					
			Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Pelatihan budidaya ikan	pelatihan	6	6	6	6					
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	media promosi dan informasi perikanan	media	65	65	65	65		5,298.71	APBD Kab	Kab. Sleman	Dispertan
			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana perikanan	paket	2	2	2	2					
			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi BBI	bulan	12	12	12	12					
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan														
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	pelatihan bagi pengolah dan pemasar hasil perikanan	pelatihan	1	1	1	1		167.72	APBD Kab	Kab. Sleman	Dispertan
	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Forum perikanan	kali	8	8	8	8		401.72	APBD Kab	Kab. Sleman	Dispertan
			Pemberian fasilitasi bagi pelaku usaha perikanan skal mikro dan kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	optimalisasi UPI (Unit Pengolah Ikan)	pelatihan	6	6	6	6					
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan														

	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Pelatihan pengelola lumbung	pelatihan	1	1	1	1		229.52	APBD Kab	Kab. Sleman	Dispertan
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat														
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragama n Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pelatihan Pemanfaatan pekarangan	Pelatihan	12	12	12	12		1,448.47	APBD Kab	Kab. Sleman	Dispertan
			Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah	Peningkatan jumlah toko mitra tani di Kabupaten Sleman	TTI/TMT	2	2	2	2					
			Pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan	Monitoring gapoktan pengelola akses pangan	gapoktan	8	8	8	8					
				Monitoring harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional	lokasi	6	6	6	6					
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Perkembangan kegiatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat	gapoktan	14	14	14	14								
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Penambahan cadangan pangan pemerintah daerah	Ton	15	15	15	15		780.10	APBD Kab	Kab. Sleman	Dispertan
Program Penanganan Kerawanan Pangan														
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	dokumen	1	1	1	1		161.70	APBD Kab	Kab. Sleman	Dispertan
Program Pengawasan Keamanan Pangan														
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan penerapan jaminan mutu produk pangan	pelatihan	3	3	3	3		508.44	APBD Kab	Kab. Sleman	Dispertan
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan														
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Bangunan pasar terpelihara baik	pasar	31	31	31	31		5,026.33	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Laporan monitoring dan evaluasi sarpras pasar rakyat	dokumen	1	1	1	1					
			Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Evakuasi sampah pasar Gerakan bersih pasar	UPTD pelayanan pasar	5	5	5	5		8,489.12	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Kerja bakti persiapan Adipura	kali	25	25	25	25					
				Laporan Monitoring kesiapan petugas keamanan pasar	pasar	2	2	2	2					
Sarana dan prasarana kebersihan pasar	dokumen	1	1	1	1									

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikasi elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerja	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Operasional UPTD Pelayanan Pasar							674.61	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
		Penataan PKL	lokasi di luar pasar	2	5	5	5									
		Penataan pedagang, tempat dagangan, dan monitoring	pasar	2	10	10	10									
		Penerbitan Ijin PKL	ijin	2	200	200	200									
		Sewa Lahan Pasar Untuk Relokasi	pasar	200	4	4	4									
	Updating data PKL	kecamatan	-	17	17	17										
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kewirausahaan Sekolah pasar	pedagang pasar	80	80	80	80						967.14	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Pemantauan bantuan modal pedagang pasar	kelompok pedagang	100	100	100	100									
		Pembinaan Organisasi Paguyuban PKL	paguyuban	3	3	3	3									
		Pembinaan pedagang pasar	UPTD pelayanan pasar	3	3	3	3									
		Pembinaan Organisasi PKL	lokasi	1	1	1	1									
		Pendampingan pengelolaan administrasi penguatan modal	kelompok pedagang	10	10	10	10									
		Pengembangan potensi paguyuban pedagang pasar	paguyuban	3	3	3	3									
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri															
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dokumen rencana pembangunan industri kabupaten (RPIK) Sleman	dokumen	1	-	-	-		109.69	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kelompok/sentra IKM diverifikasi	sentra										669.17	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Pendampingan Kelompok/sentra industri Sentra yang dikukuhkan berdasarkan SK Bupati		2	2	2	2									
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Pelayanan Rumah Kreatif Sleman	bulan	12	12	12	12						2,340.43	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Pemohon dana penguatan modal sektor industri yang diverifikasi	pemohon	25	25	25	25									
Peserta Bimtek AMT (Achievement Motivation Training)																
Peserta Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dekranasda		orang	150	150	150	150										
	Bimtek Manajemen Usaha Industri	orang	20	20	20	20										
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Bimtek produksi industri	angkatan	9	9	9	9		6,752.54	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Perindustrian dan Perdagangan					
Program Pengendalian Izin Usaha Industri																

Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IKUI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	IKM pangan yang diawasi	IKM	35	35	35	35		549.03	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Jumlah peserta sosialisasi SP-PIRT	IKM	60	60	60	60					
		Jumlah peserta sosialisasi GMP/Keamanan pangan	pelaku usaha	30	30	30	30					
		Jumlah peserta sosialisasi ijin edar BPOM /MD Pelaku usaha yang diverifikasi	pelaku usaha	20	20	20	20					
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional												
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Buku Industri Kabupaten Sleman	buku	20	20	20	20		356.30	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan												
Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Distribusi Minuman beralkohol yang dimonitor	ijin	15	15	15	15		277.82	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Ijin usaha perdagangan yang dimonitor	ijin SIUP	60	60	60	60					
		TDG yang dimonitor	TDG	20	20	20	20					
		Toko Modern yang ditertibkan	toko	15	15	15	15					
Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen B2 (PB2)	Laporan monitoring pengawasan pangan dan bahan berbahaya	dokumen	1	1	1	1		389.58	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Lokasi pengawasan pangan dan bahan berbahaya	lokasi	2	2	2	2					
		Lokasi pengawasan pangan dan bahan berbahaya	PKL	27	27	27	27					
		Sosialisasi bahan berbahaya	pasar	3	3	3	3					
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelayanan Perijinan SITU/SPTD	SPTD	2200	2200	2200	2200		505.35	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Pemungutan retribusi secara online	pasar	15	15	15	15					
		Pencapaian target PAD Pendampingan administrasi bagi pengelola retribusi	%	100	100	100	100					
Program Pengembangan Ekspor												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Laporan realisasi ekspor dari pelaku usaha Kabupaten Sleman selama satu tahun berjalan	dokumen	1	1	1	1		60.41	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	Pameran Dagang Nasional	Keikutsertaan dalam APKASI Otonomi Expo 2021	kali	1	1	1	1		1,441.64	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Keikutsertaan dalam Promosi Bersama 2021 Pameran Virtual	kali	1	1	1	1						
		Keikutsertaan dalam pameran IFEX	kali	1	1	1	1						
		Peningkatan Citra Produk Ekspor	Laporan IMA Chapter Sleman	kali	1	1	1	1					382.62
	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Temu Bisnis	kali	1	1	1	1		329.59	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Virtual Business Matching	kali	1	1	1	1						
		Fasilitasi paguyuban eksportir	kali	1	1	1	1						
			Pendampingan pengembangan ekspor	kali	1	1	1	1					
	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen												
Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera dan tera ulang	Persentase UTTP yang bertanda Tera Sah	%	20	21	22	23		2,192.44	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri													
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Kajian omzet pasar	omzet	1	1	1	1		1,544.99	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Kajian pengembangan pasar rakyat	dokumen	1	1	1	1						
		Pemasaran pasar-pasar tradisional	bulan	12	12	12	12						
		Pengelolaan radio pasar	pasar	2	2	2	2						
		Promosi pasar dimedia massa	kali	5	5	5	5						
		Undian belanja berhadiah di pasar	kali (22 pasar)	1	1	1	1						
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Keikutsertaan dalam Pameran HUT Dekranas	kali	1	1	1	1		4,354.69	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Penyelenggaraan Pameran PPD	kali	1	1	1	1						
		Peserta Pameran Jakarta Fair	UKM	21	21	21	21						
		Promosi tetap produk IKM di Galeri Upakarti Sleman	IKM	150	150	150	150						
Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Promosi tetap produk IKM di Showroom Dekranasda	IKM	50	50	50	50		4,076.37	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
	Pelatihan Manajemen Pemasaran	orang	20	20	20	20							
	Pembinaan Paguyuban Ritel Sleman (PRS) UKM	orang	60	60	60	60							
	peserta pembinaan usaha dagang UKM	orang	30	30	30	30							
		peserta pembinaan usaha ritel lokal	orang	20	20	20	20						
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting													

Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Monitoring barang rusak dan kadaluwarsa	toko	30	30	30	30		154.53	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Monitoring gas bersubsidi	kecamatan	17	17	17	17					
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan monitoring harga barang kebutuhan pokok dan barang penting Pemetaan rantai distribusi barang kebutuhan pokok	dokumen	12	12	12	12		1,351.87	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Monitoring pupuk bersubsidi	kecamatan	17	17	17	17		67.35	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual									11.444834	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Pariwisata
Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/ Ruang Kreatif/ Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi insan kreatif di daerah Kabupaten	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Capaian Jumlah panggung/ruang yang dibangun/dipergunakan untuk bazaar/atraksi/ fasilitas produk kreatif pada tahun t	jumlah	1	1	1	1					
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif									8330.650503	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Pariwisata
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Bimtek Usaha Pariwisata, Pelatihan SDM Usaha Pariwisata, Pelatihan Jeep	jumlah	10	10	10	10					
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	PUPM, Pendampingan Desa Wisata, Kampanye Sadar Wisata, Pembinaan pedagang, Forkom Pokdarwis dan Desa Wisata										
	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata Bagi Masyarakat, Guru Dan Pelajar (Mahasiswa Dan/Atau Siswa)											
	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Pelatihan SDM Desa Wisata	jumlah	46	46	46	46					
	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	FGD Tim Ekonomi kreatif dan FGD lintas komunitas Ekraf	jumlah	15	15	15	15					
	Terlaksananya kegiatan Sleman Creative Week	jumlah	1	1	1	1						
8.3. Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan												
8.5. Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi pemuda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan												
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)									15,343.10	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Koperasi dan UKM

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Bimtek AMT Bagi anggota forkom UMKM Moyudan Bimtek dan Pelatihan DAK- @30 orang Bimtek Kewirausahaan Bimtek Pengembangan Diri dan manajemen usaha bagi pelaku UMKM Bimtek Pengembangan Kapasitas SDM Pengelola Usaha dan Anggota BUMDes Fasilitasi pengembangan usaha KK miskin dan masyarakat pelaku usaha melalui Bimtek peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Pengelola Usaha Sistem Satu Data dan Bimtek Operator Sistem (bagi 86 Kalurahan dan 17 Kapanewon) Workshop Kewirausahaan Pemuda	orang; angkatan; sistem	20 orang 3 angkatan 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 40 orang 20 orang 20 orang 1 sistem 13 angkatan	20 orang 3 angkatan 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 40 orang 20 orang 20 orang 1 sistem 13 angkatan	20 orang 3 angkatan 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 40 orang 20 orang 20 orang 1 sistem 13 angkatan	20 orang 3 angkatan 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 40 orang 20 orang 20 orang 1 sistem 13 angkatan								
	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Bimtek Desain Grafis tingkat dasar bagi UMKM Bimtek kemasan dan label produk Bimtek Pemasaran online dan temu usaha perdagangan mikro kecil dan warga miskin Bimtek pemotretan produk Forum UMKM	orang; angkatan	20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 2 angkatan	20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 2 angkatan	20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 2 angkatan	20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 2 angkatan								
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang mendapatkan informasi perizinan	UMKM	75 UMKM	75 UMKM	75 UMKM	75 UMKM								
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Bimtek dan Implementasi Digital Marketing bagi generasi muda untuk menciptakan Reseller Handal untuk UMKM Bimtek dan pendampingan warga miskin atau penganggur untuk menjadi kelompok reseller online Bimtek dan pendampingan warga miskin atau penganggur untuk menjadi kelompok reseller online Jumlah kelompok wanita keluarga miskin yang mendapat penguatan modal untuk berusaha Jumlah pemuda yang mendapat bimbingan menjadi wirausaha Jumlah UMKM anggota Forkom yang mendapat informasi tentang kelembagaan UMKM Jumlah UMKM yang medapatkan informasi PIRT Jumlah warga miskin yang mendapat penguatan modal untuk menjadi reseller online Pembentukan dan pemberdayaan kelompok wanita dari keluarga miskin untuk menjadi usaha kecil mikro Pengurusan PIRT Workshop Kewirausahaan Pemuda	orang; angkatan; UMKM	20 orang 5 angkatan 20 orang 40 UMKM 20 UMKM 50 UMKM 30 UMKM 1 angkatan 20 orang 20 orang 14 angkatan 12 angkatan	20 orang 5 angkatan 20 orang 40 UMKM 20 UMKM 50 UMKM 30 UMKM 1 angkatan 20 orang 20 orang 14 angkatan 12 angkatan	20 orang 5 angkatan 20 orang 40 UMKM 20 UMKM 50 UMKM 30 UMKM 1 angkatan 20 orang 20 orang 14 angkatan 12 angkatan	20 orang 5 angkatan 20 orang 40 UMKM 20 UMKM 50 UMKM 30 UMKM 1 angkatan 20 orang 20 orang 14 angkatan 12 angkatan								
Program Pengembangan UMKM									3,641.03	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Koperasi dan UKM			

	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Bimtek dan implementasi digital marketing - forkom UMKM (PUPM Kap Turi) Bimtek Pemasaran berbasis Digital untuk UMKM (PUPM-Kalurahan Sumberadi) Bimtek Pemasaran berbasis Digital untuk UMKM (PUPM-Kap Mlati) Bimtek pemasaran/ digital marketing (PUPM Kap Seyegan) Bimtek pemasaran/ digital marketing (PUPM Margokaton) Bimtek pemasaran/ digital marketing (PUPM Margoluwih) Bimtek Usaha Mikro (PUPM-Ambarketawang) Fasilitasi Pemasaran online Kendi Sembada Pelatihan pemasaran/ marketing (POKIR- Maguwoharjo, Sariharjo, Sumberadi, Tlogoadi, Trihanggo))	orang; paket; kali; angkatan	20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 1 paket 1 kali 5 angkatan	20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 1 paket 1 kali 5 angkatan	20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 1 paket 1 kali 5 angkatan	20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 1 paket 1 kali 5 angkatan					
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal														
	Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota		Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Berita Acara Tinjau Lokasi Keputusan Izin Prinsip dan Izin Lokasi izin akomodasi, restoran, rumah makan, rekreasi hiburan umum, biro perjalanan wisata, dan izin pemondokan layanan pengelolaan dokumen izin kesehatan Pelayanan izin usaha peternakan dan perikanan	dokumen dokumen Izin Izin Izin	0 0 45 30 3	0 0 45 30 3	0 0 45 30 3	0 0 45 30 3		220.86	APBD Kab	Kab. Sleman	DPMPTSP
			Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen laporan penyelenggaraan pembinaan perizinan di kecamatan Draft Peraturan Bupati Sleman tentang Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Fasilitasi dan Sinkronisasi pemenuhan komitmen perizinan sektor perdagangan dan industri di OSS	dokumen dokumen Perusahaan	0 0 50	0 0 50	0 0 50	0 0 50		191.30	APBD Kab	Kab. Sleman	DPMPTSP
			Investasi Izin Perdagangan, Industri dan IUMK	Izin		3500	3500	3500	3500					
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang	Layout peta lampiran SK IPPT dan Plotting Lokasi IPPT/RTB Ploting Bangunan yang memiliki IMB Plotting Perizinan Prasarana Bangunan Berita Acara Tinjau Lokasi Keputusan Izin Prinsip dan Izin Lokasi	bidang bidang lokasi dokumen dokumen	0 0 0 30 30	0 0 0 30 30	0 0 0 30 30	0 0 0 30 30		498.82	APBD Kab	Kab. Sleman	DPMPTSP
Program Promosi Penanaman Modal														
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman	Layanan Pendampingan OSS Layanan pengambilan/pengiriman SK Izin Pembayaran retribusi Pendaftaran perizinan melalui aplikasi SINOM Layout peta lampiran SK IPPT dan ploting lokasi IPPT	Pemohon SK SKRD Pemohon Bidang	0 0 0 2500	0 0 0 2500	0 0 0 2500	0 0 0 2500		465.43	APBD Kab	Kab. Sleman	DPMPTSP
			Ploting Bangunan Yang memiliki IMB	Bidang		1800	1800	1800	1800					
			Ploting perizinan prasarana bangunan	Lokasi		160	160	160	160					

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

		Pelaksanaan Kegiatan Promosi	Buku materi promosi investasi Kajian Potensi Investasi Temu Kemitraan 5 PMA-PMDN Analisis ekonomi terhadap investasi baru APKASI/AITIS Dokumen pemetaan potensi investasi Materi promosi (pemeliharaan sistem aplikasi materi promosi)	dokumen dokumen UKM dokumen Kali dokumen Kali	1 1 15 1 1 1 1	1 1 15 1 1 1 1	1 1 15 1 1 1 1	1 1 15 1 1 1 1		1,672.81	APBD Kab	Kab. Sleman	DPMPTSP
			Pameran Potensi Pameran Potensi Daerah	Kali	1	1	1	1					
			Promosi Bersama Pemkab. Sleman	Kali	1	1	1	1					
Program Pelayanan Penanaman Modal													
	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan	Fasilitasi pelayanan izin akomodasi, restoran, Fasilitasi pelayanan izin kesehatan Fasilitasi pelayanan izin usaha peternakan dan Layanan OSS Layanan Pengambilan/pengiriman SK jadi Pembayaran SKRD Pendaftaran Perizinan	izin izin izin Pemohon SK SKRD Pemohon	0 0 0 2000 6000 3000 1000	0 0 0 2000 6000 3000 1000	0 0 0 2000 6000 3000 1000	0 0 0 2000 6000 3000 1000		909.35	APBD Kab	Kab. Sleman	DPMPTSP
		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non-Perizinan Penanaman Modal	Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan IMB Menara Seluler IMB prasarana konstruksi bangunan jenis Izin Mendirikan Bangunan Gedung Sosialisasi	izin izin izin izin kali	5000 40 120 1800 0	5000 40 120 1800 0	5000 40 120 1800 0	5000 40 120 1800 0		3,003.83	APBD Kab	Kab. Sleman	DPMPTSP
		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non-Perizinan	Layanan konsultasi pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi Izin Mendirikan Bangunan Layanan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Surat Aduan	10 25	10 25	10 25	10 25		91.62	APBD Kab	Kab. Sleman	DPMPTSP
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Pelayanan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Non Usaha Dokumen laporan penyelenggaraan pembinaan perizinan di kecamatan Fasilitasi realisasi investasi Forum komunikasi bagi petugas pengelola perizinan kecamatan Pemberian insentif dan kemudahan investasi Pembinaan kemitraan pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi	Berkas Dokumen Perusahaan Orang Perusahaan UKM	0 1 2 0 3 15	0 1 2 0 3 15	0 1 2 0 3 15	0 1 2 0 3 15		256.37	APBD Kab	Kab. Sleman	DPMPTSP
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal													
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan	Dokumen Laporan Perkembangan Penanaman Pelayanan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Usaha Pelayanan RTB Pemantauan Perusahaan Profil Pemantauan Perusahaan	Dokumen Berkas Berkas Perusahaan Dokumen	0 950 250 200 1	0 950 250 200 1	0 950 250 200 1	0 950 250 200 1		879.03	APBD Kab	Kab. Sleman	DPMPTSP
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan	Forum komunikasi penanaman modal	Kali	11021	11688	12397	13153		606.54	APBD Kab	Kab. Sleman	DPMPTSP

		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Fasilitasi dan sinkronisasi pemenuhan komitmen perizinan sektor perdagangan dan industri di OSS Inventarisasi izin perdagangan dan industri Pengawasan Perusahaan Profil Pengawasan Perusahaan Pelayanan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah untuk non usaha	Perusahaan Izin Perusahaan Dokumen Berkas	0 0 1 1250	0 0 1 1250	0 0 1 1250	0 0 1 1250		662.15	APBD Kab	Kab. Sleman	DPMPTSP
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal													
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Booklet Perizinan Pelayanan informasi dan data Pemeliharaan dan evaluasi Aplikasi Sistem Perizinan (penambahan konten pendaftaran) Publikasi lewat media TV Leaflet perizinan	Buku Pemohon Paket Paket Lembar	0 0 1 4 0	0 0 1 4 0	0 0 1 4 0	0 0 1 4 0		748.63	APBD Kab	Kab. Sleman	DPMPTSP
Program Perencanaan Tenaga Kerja													
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Perencanaan Tenaga Kerja Makro Dokumen perencanaan tenaga Kerja kabupaten/kota (IKK) Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga Kerja (IKK output) Pengelolaan Simetakerja Updating Data Ketenagakerjaan	dokumen dokumen % paket dokumen	1 1 106 1 1	1 1 106 1 1	1 1 106 1 1	1 1 106 1 1		1,195.00	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Tenaga Kerja
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga Kerja di kabupaten/kota (IKK output)	perusahaan perusahaan	20 40	20 40	20 40	20 40		300.00	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Tenaga Kerja
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja													
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi	Monitoring dan evaluasi lulusan dan informasi pelatihan Pelatihan bagi pencari Kerja melalui swadana, Pelatihan non institusional, Pelatihan untuk disabilitas, Pelatihan institusional, Pemeliharaan sarana dan prasarana BLK, Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi kluster (IKK output) Persentase instruktur bersertifikat kompetensi (IKK output) Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan (IKK output) Jumlah penganggur yang dilatih (IKK output) Persentase lulusan bersertifikat pelatihan (IKK output) Persentase penyerapan lulusan (IKK output) Lulusan bersertifikat kompetensi (IKK output)	kali orang paket paket paket unit % % % orang % % %	336 10 20 2 3 11 83.33 43.75 1.84 480 100 29 10	336 10 20 2 3 11 83.33 43.75 1.84 480 100 30 10	336 10 20 2 3 11 83.33 43.75 1.84 480 100 31 10	336 10 20 2 3 11 83.33 43.75 1.84 480 100 31 10		22,000.00	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Tenaga Kerja

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

			Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	%	100	100	100	100					
			Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	paket	1	1	1	1					
		Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kerjasama penyelenggaraan pelatihan bagi pencari Kerja di LPK Terakreditasi,	LPK	22	22	22	22		8,100.00	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Tenaga Kerja
			Pemagangan bagi peserta pasca pelatihan Kerja	orang	60	60	60	60					
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Fasilitasi forkom (Himpunan Lembaga Latihan Seluruh Indonesia (HILLSI),	kali	4	4	4	4		192.00	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Tenaga Kerja
			Monitoring LPK,	LPK	15	15	15	15					
			Pembinaan LPK	kali	1	1	1	1					
	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Verifikasi perijinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja	LPK	10	10	10	10		102.00	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Tenaga Kerja
			Persentase LPK yang terakreditasi (IKK output)	%	20	20	20	20					
			Persentase LPK yang memiliki perijinan (IKK output)	%	100	100	100	100					
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Bimbingan teknis peningkatan produktifitas bagi perusahaan kecil	kali	1	1	1	1		190.00	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Tenaga Kerja
			Pengukuran produktifitas individual pada perusahaan kecil	perusahaan	2	2	2	2					
			Penyuluhan produktifitas bagi masyarakat dan perusahaan kecil		1	1	1	1					
			Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas (IKK output)	%	0	0	0	0					
			Data tingkat produktivitas total (IKK output)	%	-13.56	-13.56	-13.56	-13.56					
Program Penempatan Tenaga Kerja													
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan antar Kerja	Dokumen ketenagaKerjaan	dokumen	1	1	1	1		720.00	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Tenaga Kerja
			Dokumen AK I,	lbr	2000	2000	2000	2000					
			Dokumen AK II	lbr	2000	2000	2000	2000					
			Dokumen AK III	lbr	2000	2000	2000	2000					
			Forum komunikasi petugas penempatan tenaga Kerja D.I Yogyakarta,		1	1	1	1					
			Pelayanan penempatan tenaga Kerja	orang	1010	1060	1065	1065					
			Jumlah lowongan Kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota (IKK output)	orang	870	900	1065	1065					
			Jumlah pencari Kerja yang terdaftar di kabupaten/kota (IKK output)	orang	970	1000	1030	1030					

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

			Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja (IKK output)	orang	3	3	3	3					
			Jumlah penempatan tenaga Kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (IKK output)(SISNAKER)	orang	6	6	6	6					
		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Forum komunikasi pencari Kerja dengan perusahaan	kali	1	1	1	1		240.00	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Tenaga Kerja
			Informasi pasar kerja keliling (sekeliling)	kali	40	40	40	40					
			Pembekalan calon tenaga Kerja yang lolos seleksi	org	150	150	150	150					
			Penyiapan seleksi calon tenaga Kerja	orang	150	150	150	150					
			Jumlah Perjanjian Kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan kab/kota (IKK output)	perjanjian	850	850	850	850					
		Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Laporan hasil koordinasi penyelenggaraan ULD	dokumen	1	1	1	1		32.00	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Tenaga Kerja
		Perluasan Kesempatan Kerja	Pembekalan dan pelatihan calon tenaga Kerja sukarela	orang	5	5	5	5		2,000.00	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Tenaga Kerja
			Pembinaan kewirausahaan bagi TKM	orang	20	20	20	20					
			Pendampingan kewirausahaan bagi TKM	orang	20	20	20	20					
			Pelaksanaan padat karya	lokasi	5	5	5	5					
			Verifikasi calon lokasi padat karya	lokasi	9	9	9	9					
	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Forum komunikasi BKK	kali	1	1	1	1		200.00	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Tenaga Kerja
			Pembinaan Bursa Kerja Khusus (BKK)	kali	1	1	1	1					
			Pembinaan lembaga penempatan tenaga Kerja (Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS))	kali	1	1	1	1					
			Penerbitan tanda daftar BKK	BKK	5	5	5	5					
			Jumlah Bursa Kerja Khusus wilayah kab/kota (IKK output)	buah	76	78	80	80					
			Jumlah Lembaga penempatan tenaga Kerja swasta (LPTKS) antar Kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota (IKK output)	buah									
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Pemeliharaan Aplikasi Simpencaker	paket	1	1	1	1			APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Tenaga Kerja
		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Penyediaan informasi lowongan kerja	paket	1	1	1	1			APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Tenaga Kerja
		Job Fair/Bursa Kerja	Pameran kesempatan Kerja	kali	1	1	1	1		480.00	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Tenaga Kerja

Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pelindungan dan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/PeKerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah calon pekerja migran Indonesia (CPMI)/ Calon tenaga kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja (IKK output)	orang	5	5	5	5			APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Tenaga Kerja	
		Penyediaan layanan terpadu pada calon peKerja migran	Forkom PMI purna penempatan (data PMI Purna)	kali	1	1	1	1		40.00	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Tenaga Kerja
			Monitoring pengembalian pinjaman dana penguatan modal (DPM) TKI	orang	10	10	10	10					
			Rekomendasi pinjaman dana penguatan modal (DPM) TKI	orang	3	3	3	3					
			Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi (IKK output)	orang	20	20	20	20					
			Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata (IKK output)	orang	20	20	20	20					
Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (L TSA) yang dibentuk (IKK output)	unit			1	1								
Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya (IKK output)	orang	25	25	25	25		480.00	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Tenaga Kerja		
Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring perusahaan pengguna Tenaga Kerja Asing	kali	10	10	10	10		94.00	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Tenaga Kerja	
		Pelayanan validasi penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	orang	20	20	20	20						
		Sosialisasi peraturan Tenaga Kerja Asing	kali	1	1	1	1						

8.8. Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal

Program Hubungan Industrial

Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Bimbingan teknis penyusunan peraturan perusahaan	perusahaan	30	30	30	30		156.00	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Tenaga Kerja
		Bimbingan teknis penyusunan perjanjian Kerja	perusahaan	30	30	30	30					
		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan perusahaan	perusahaan	15	15	15	15					
		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja	perusahaan	15	15	15	15					
		Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan perusahaan (PP)(IKK output)	%	6.07	6.07	6.07	6.07					

	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Bimbingan teknis penyusunan perjanjian Kerja bersama bagi pengurus SP/SB dan HRD	perusahaan	30	30	30	30		117.00	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Tenaga Kerja
		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PKB di perusahaan	perusahaan	15	15	15	15					
		Pembinaan pelaksanaan pemborongan pekerjaan/ penyediaan jasa tenaga Kerja,	perusahaan	20	20	20	20					
		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemborongan pekerjaan/ penyediaan jasa TK	perjanjian	20	20	20	20					
		Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) (IKK output)	%	5.43	5.43	5.43	5.43					
		Rekapitulasi tahunan Jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	S BSP/SB	92	92	92	92					
	Penyelenggaraan Pen- dataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta pengupahan	Informasi dan pendataan sarana kelengkapan hubungan industrial di perusahaan (50 perusahaan)	dokumen	1	1	1	1		375.00	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Tenaga Kerja
		Laporan pengembalian pinjaman penguatan modal pengguliran 2007-2009	bulan	12	12	12	12					
		Pendataan Pekerja Anak dan Disabilitas	dokumen	1	1	1	1					
		Pemetaan Hubungan Industrial di perusahaan	perush	30	30	30	30					
		Monitoring pemanfaatan pinjaman penguatan modal	orang	10	10	10	10					
		Rekomendasi calon penerima pinjaman penguatan modal	orang	5	5	5	5					
		Sosialisasi dan evaluasi pelaksanaan BPJS Kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan	perusahaan	80	80	80	80					
		Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan (IKK output)	%	19.9	19.9	19.9	19.9					
		Sidang dewan pengupahan kabupaten	kali	10	10	10	10					
		Analisis dan kajian terkait kebijakan pengupahan	dokumen	1	1	1	1					
	Pencegahan dan Penyelesaian Perse lishan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan dan Penutu pan Perusahaan di Daerah Kab/Kota	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	perusahaan	30	30	30	30		215.00	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Tenaga Kerja
		Deteksi dini kerawanan perselisihan hubungan industrial	perusahaan	30	30	30	30					
		Klarifikasi PHI/PHK	kasus	20	20	20	20					
		Bimbingan mekanisme penyelesaian dan dasar PHK	perusahaan/SP /SB	30	30	30	30					
		Temu konsultasi AMHI	kali	1	1	1	1					

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Mediasi PHK/PHI	kasus	30	30	30	30		155.00	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Tenaga Kerja
	Memantau pelaksanaan Perjanjian bersama	PB	10	10	10	10					
	Pendataan PHK di perusahaan	perusahaan	30	30	30	30					
	Persentase Jumlah perusahaan yang berselisih (IKK output)	%	1.87	1.87	1.87	1.87					
	Jumlah Mogok Kerja (IKK output)		0	0	0	0					
	Jumlah penutupan perusahaan (IKK output)										
	Jumlah perselisihan kepentingan (IKK output)										
	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/ Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan (IKK output)										
	Jumlah perselisihan PHK(IKK output)	kasus	36	36	36	36					
	Jumlah pekerja/buruh yang ter PHK (IKK output)	orang									
	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartit (IKK output)	orang									
	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial (IKK output)	%	53.85	53.85	53.85	53.85					
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi, dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Forum komunikasi HRD,	perusahaan	100	100	100	100				
Pelatihan hubungan industrial bagi SP/SB,		SP/SB	50	50	50	50					
LKS Bipartit Award Tingkat Kabupaten		kali	1	1	1	1					
Pembinaan LKS bipartit		perusahaan	25	25	25	25					
Verifikasi keanggotaan SP/SB		perusahaan	20	20	20	20					
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan teknis penyusunan struktur skala upah bagi perusahaan	perusahaan	100	100	100	100		1,720.00	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Tenaga Kerja
	Koordinasi LKS tripartit	kali	1	1	1	1					
	Pemantauan pelaksanaan THR di perusahaan	perusahaan	20	20	20	20					
	Workshop Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit	kali	1	1	1	1					
	Pendataan pelaksanaan struktur skala upah di perusahaan,	perusahaan	20	20	20	20					
	Peringatan hari buruh internasional	orang	1000	1000	1000	1000					
	Sidang dewan pengupahan kabupaten										

			Sosialisasi pelaksanaan UMK	perusahaan	150	150	150	150					
			Survey KHL		0	0	0	0					
			Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah. (IKK output)	%	100	100	100	100					
			Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan (IKK output)	buah	1	1	1	1					
		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan PeKerja	Pendataan Fasilitas Kesejahteraan pekerja di perusahaan	dokumen	1	1	1	1		8,340.00	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Tenaga Kerja
			Cakupan keberhasilan penempatan transmigran asal Kabupaten Sleman	%	90	90	90	90					
			Cakupan keberhasilan penempatan transmigran asal Kabupaten Sleman	%	90	90	90	90					
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata										15379.25944	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Pariwisata
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten Sleman		Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah atraksi seni dan event yang terselenggara	event	50	55	60	70				
			Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah kajian pengembangan daya tarik wisata di Kab. Sleman	dokumen	2	2	3	3				
			Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah monitoring dan evaluasi penarikan retribusi tempat rekreasi dan pelatihan motivasi pengelola DTW	lokasi	13	13	14	15				
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota		Pengadaan atau Pemeliharaan atau Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah pemeliharaan dan penataan sarana dan prasarana pariwisata di DTW	paket	6	6	7	7				
			Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota	Jumlah kajian pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan	dokumen	1	1	1	1				
			Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	dokumen	1	1	1	1				
	Penetapan Tanda Daftar usaha Pariwisata Daerah Kabupaten		Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah kelompok usaha jasa pariwisata yang termonitoring dan terdata	lokasi	13	13	13	13				
Program Pemasaran Pariwisata										22398.89953	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Pariwisata
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten		Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	%	23.01	20.37	15.38	10.67				

	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah acara event promosi yang diikuti	event	1	1	1	1	
		Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	jumlah industri	4	4	4	4	
	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Persentase peningkatan belanja wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	%	12.00	17.86	9.09	11.11	
		Persentase peningkatan belanja wisatawan mancanegara yang	%	11.11	5.00	4.76	4.55	
	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri	Jumlah anggota Java Promo	kabupaten/kota	4	4	4	4	
		Jumlah kegiatan promosi pariwisata yang diselenggarakan BPPS	kegiatan	1	1	1	1	

TUJUAN GLOBAL 12. MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN

Program/Kegiatan/Rincian Output		Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
			2023	2024	2025	2026	2027				
1		2	3					4	5	6	7
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH											
12.4. Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktik-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka											
Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)											
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH- nya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Berkas pemeriksaan dan/atau surat rekomendasi UKL-UPL atau setara UKL-UPL	berkas	60	60	60	60	1,755.36	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Lingkungan Hidup
		Berkas Permohonan dan/atau berkas persetujuan SPPL	berkas	1000	1000	1000	1000				
		Dokumen proses izin lingkungan atau sebutan lainnya yang setara dan sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku	dokumen	5	5	5	5				
		Dokumen proses izin PPLH (izin pembuangan/pemanfaatan air limbah) atau sebutan lainnya yang setara dan sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku	dokumen	10	10	10	10				
		Dokumen proses penapisan jenis dokumen lingkungan yang harus disusun	dokumen	10	10	10	10				
		Surat Keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan atau sebutan lainnya yang setara dan sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku	dokumen	5	5	5	5				

	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Data hasil pemantauan dan pembinaan bidang Lingkungan Hidup	U/K	100	100	100	100		514.50	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Lingkungan Hidup
		Bimbingan teknis Sistem pelaporan	kali	4	4	4	4					
		Updating sistem	sistem	1	1	1	1					

TUJUAN GLOBAL 13. MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA

Program/Kegiatan/Rincian Output		Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
1		2	2023	2024	2025	2026	2027	3	4	5	6	7
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH												
13.1. Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara												
Program Penanggulangan Bencana												
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten / Kota	Dokumen kajian risiko bencana Kabupaten Sleman	dokumen	1	-	1	-		2,661.58	APBD Kab	Kab. Sleman	BPBD
		Pemutakhiran dan evaluasi KRB	dokumen	-	1	-	1					
		Peta Risiko Bencana Kabupaten Sleman Skala 1 : 25.000	peta	7	7	7	7					
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah aparaturnya dan warga negara yang ikut pelatihan	orang	103	133	133	133		664.85	APBD Kab	Kab. Sleman	BPBD
Sosialisasi bencana		orang	550	750	950	1150						
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Tersedianya data/informasi tentang rencana penanggulangan bencana dalam bentuk dokumen resmi	dokumen	1	1	1	1		161.70	APBD Kab	Kab. Sleman	BPBD
		Pemutakhiran dan evaluasi KRB	dokumen		1		1					
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Pembentukan Desa Tangguh Bencana	desa	86	86	86	86		1,436.10	APBD Kab	Kab. Sleman	BPBD
		Peningkatan Kapasitas Desa Tangguh Bencana	kali	-	5	10	15					
		Forum Guru	orang	60	90	120	150					
		Forum Pengurangan Risiko Bencana	orang	100	150	200	250					
		Fasilitasi Sister School	%	100	100	100	100					
		Fasilitasi Sister Village	%	100	100	100	100					
		Satuan Pendidikan Aman Bencana	%	90	96	102	108					
	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Pelatihan Relawan	orang	210	270	330	390					
		Gladi Kesiapsiagaan Desa Tangguh Bencana	kali	86	91	96	101		308.86	APBD Kab	Kab. Sleman	BPBD
	Gladi Kesiapsiagaan Satuan Pendidikan Aman Bencana	Gladi Kesiapsiagaan Satuan Pendidikan Aman Bencana	kali	90	96	102	108					
Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Persentase data informasi kebencanaan	%	86	86	93	100		2,531.75	APBD Kab	Kab. Sleman	BPBD	
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase Early Warning System yang berfungsi baik	%	80	80	80	80		2,531.75	APBD Kab	Kab. Sleman	BPBD	
Penyediaan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Operasional pemeliharaan bunker	lokasi	2	2	2	2			APBD Kab	Kab. Sleman	BPBD	

			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Akses jalur evakuasi terhubung dengan titik kumpul	lokasi	3	3	3	3		8,561.80	APBD Kab	Kab. Sleman	BPBD
				Penyusunan Perbup Jalur Evakuasi	dokumen	-	1	-	-					
				Penguatan Tebing	lokasi	3	3	3	3					
			Penanganan Pascabencana Kab/Kota	Persentase fasum dan fasos rusak akibat bencana yang tertangani	%	80	80	80	80		2,094.39	APBD Kab	Kab. Sleman	BPBD
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			Respon cepat kejadian luar biasa penyakit / wabah zoonosis	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang wabah zoonosis	orang	205	255	305	355		152.38	APBD Kab	Kab. Sleman	BPBD
			Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Status tanggap darurat bencana ditetapkan untuk penanganan bencana	status	1	1	1	1		930.60	APBD Kab	Kab. Sleman	BPBD
			Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Operasional Tim Reaksi Cepat (TRC)	bulan	12	12	12	12		6,264.87	APBD Kab	Kab. Sleman	BPBD
				Pelatihan Tim Reaksi Cepat	kali	1	1	1	1					
				Penanganan Covid-19	%	100	-	-	-					
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya distribusi bantuan logistik penanggulangan bencana	bulan	12	12	12	12		3,473.33	APBD Kab	Kab. Sleman	BPBD
				Pelatihan pengelolaan barak pengungsi bencana	orang	950	1000	1050	1100					
				Pelatihan pengelolaan dapur umum bencana	orang	950	1000	1050	1100					
				Pengelolaan barak pengungsi	bulan	12	12	12	12					
				Pengadaan logistik penanggulangan bencana	paket	1	1	1	1					
	Pengelolaan gudang logistik			bulan	12	12	12	12						
		Aktivasi Sistem Komando, Penanganan Darurat Bencana	Data Kejadian Bencana bulanan	bulan	12	12	12	12		1,507.39	APBD Kab	Kab. Sleman	BPBD	
			Operasional Rupidalops	bulan	12	12	12	12						
			Pelatihan Teknisi Sarana Prasarana pada Pusalops	kali	1	1	1	1						
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase bantuan sosial penanganan korban dampak bencana kabupaten	%	80	80	80	80		405.31	APBD Kab	Kab. Sleman	BPBD
			Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen pendataan rumah yang berada di wilayah KRB III dan II yang telah dilaksanakan	dokumen	2	3	4	5		748.63	APBD Kab	Kab. Sleman	BPBD
			Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah barak pengungsian yang telah dilakukan perbaikan atau penyempurnaan	barak	6	9	11	13		1,838.54	APBD Kab	Kab. Sleman	BPBD
			Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen monitoring dan evaluasi hasil pekerjaan fisik kegiatan rehab rekon	dokumen	4	5	6	7		498.82	APBD Kab	Kab. Sleman	BPBD
13.3. Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim														
Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat														
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Peringatan hari lingkungan hidup	kali	1	1	1	1		2,144.00	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Lingkungan Hidup

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

			Penghargaan di bidang lingkungan hidup	jenis penghargaan	3	3	3	3				
			Evaluasi Adiwiyata									
			Evaluasi Proklamasi									
			pendampingan titik pantau ADIPURA	lokasi	50	50	50	50				

TUJUAN GLOBAL 15. MELINDUNGI, MERESTORASI, DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLA HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN

Program/Kegiatan/Rincian Output			Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2023	2024	2025	2026	2027				
1	2	3					4	5	6	7		
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH												
15.1. Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional												
15.2. Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan aforestasi dan reforestasi secara global												
15.4. Melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan, pada tahun 2020, melindungi dan mencegah lenyapnya spesies yang terancam punah												
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)												
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pengendalian penebangan pohon perindang jalan	pemohon/aduan	40	40	40	40		67,000.00	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Lingkungan Hidup
		Terpeliharanya tanaman perindang jalan	ruas jalan	20	20	20	20					
		Terpeliharanya taman dan lahan terbuka hijau	lokasi	70	70	70	70					
		Pembangunan/penataan taman/RTH	lokasi	3	3	3	3					
Perencanaan Lingkungan Hidup												
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen daya dukung daya tampung	dokumen	1	1	0	0		1,250.00	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Lingkungan Hidup
		Tersusunnya dokumen RPPLH	dokumen	1	1	0	0					
		Tersusunnya Draf Perda RPPLH	dokumen	0	1	0	0					
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dok DIKPLHD	dokumen	1	1	1	1		255.00	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Lingkungan Hidup
Dokumen IKLH		dokumen	1	1	1	1						
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	dokumen			1		500,000,000	500.00	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Lingkungan Hidup
Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat												
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Peringatan hari lingkungan hidup	kali	1	1	1	1		2,144.00	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Lingkungan Hidup
		Penghargaan di bidang lingkungan hidup	jenis penghargaan	3	3	3	3					
		Evaluasi Adiwiyata										
		Evaluasi Proklamasi										
		pendampingan titik pantau ADIPURA	lokasi	50	50	50	50					
Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup												

	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Penanganan dan/ atau penyelesaian aduan dugaan pencemaran/ kerusakan lingkungan hidup	aduan	30	30	30	30		355.00	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Lingkungan Hidup						
Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup																				
15.3. Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan, dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Pengujian / pemeriksaan kualitas air badan air	sampel	60	60	60	60		1,695.00	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Lingkungan Hidup						
				Pengujian / pemeriksaan kualitas air bersih	sampel	50	50	50	50											
				Pengujian / pemeriksaan kualitas air embung	sampel	25	25	25	25											
				Pengujian / pemeriksaan kualitas air hujan	sampel	6	6	6	6											
				Pengujian / pemeriksaan kualitas air mata air	sampel	20	20	20	20											
				Pengujian / pemeriksaan sampel tanah	sampel	23	23	23	23											
				Pengujian / pemeriksaan kualitas udara ambien passive sampler	periode	2	2	2	2											
				Pengujian Emisi kendaraan bermotor	kali	1	1	1	1											
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim			Pembinaan Kalpataru	kategori	4	4	4	4		3,240.00	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Lingkungan Hidup						
					Pembinaan Kampung Iklim	kali	10	10	10	10										
					Inventarisasi GRK	dokumen	1	1	1	1										
					Kompartemen	buah	100	100	100	100										
					Komposter	buah	50	50	50	50										
					Penghijauan Lingkungan	batang	2000	2000	2000	2000										
					Pembinaan Lahan Kritis dan GRK	kali	5	5	5	5										
					Sosialisasi	kali	20	20	20	20										
					Bibit Tanaman Pemeliharaan Hutan Rakyat	batang	1300	1300	1300	1300										
Bibit Tanaman Sekitar Sumber Air					batang	2600	2600	2600	2600											
15.3. Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan, dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1.03.02	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	lokasi	7	6	6	6		7,657.65	APBD Kab	Kab. Sleman	DPUPKP							
				Tersedianya Data - Data Pendukung (Panjang, Lebar dan Debit)	lokasi	36	36	36	36											
				1.03.02	Normalisasi/Restorasi Sungai	lokasi	10	10	10					10		7,657.65	APBD Kab	Kab. Sleman	DPUPKP	
				2.01.4		Terlaksananya Pemeliharaan Sungai, Embung dan Mata Air;	kali	10	10					10	10					
				6																

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

		Terlaksananya Penanganan Pengendalian Daya Rusak Sungai;	kali	15	15	15	15					
		Terlaksananya Penanganan Talud Pengaman;	lokasi	5	5	5	5					
		Terlaksananya penanganan Waled Sungai dalam kondisi terpelihara	lokasi	9	9	9	9					
1.03.02	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	pembangunan Infrastruktur untuk melindungi mata air (PUPM);	paket	1	1	1	1		6,636.63	APBD Kab	Kab. Sleman	DPUPKP
.1.01.4	7	Pembangunan/peningkatan kuantitas dan kualitas mata air	lokasi	4	4	4	4					
1.03.02	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Gerakan Irigasi Bersih ;	kali	2	2	2	2		1,949.01	APBD Kab	Kab. Sleman	DPUPKP
.1.01.6	1	Hari Air Dunia untuk Sasaran Konservasi ;	kali	1	1	1	1					
		Pemberdayaan Kelompok GP3A ;	kelompok	3	3	3	3					
		Sidang Komisi Irigasi	kali	3	3	3	3					
1.03.02	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (REKOMTEK) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	rekomendasi	225	225	225	225		842.34	APBD Kab	Kab. Sleman	DPUPKP
.1.01.6	2	Perizinan Bidang Irigasi	lokasi									
1.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberdayaan dan Pembinaan Kelembagaan mata air	lokasi	4	4	4	4		361.18	APBD Kab	Kab. Sleman	DPUPKP
.1.01.6	3											
1.03.02	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air, pengukuran debit mata air	lokasi	79	79	79	79		8,107.80	APBD Kab	Kab. Sleman	DPUPKP
.2.01.4	9	Pemeliharaan Embung;	lokasi	12	12	12	12					
		Pemeliharaan Mata Air;	lokasi	14	14	14	14					
		Pengangkatan Sedimen Bendung dengan cara Manual;	lokasi	19	19	19	19					
		Pengawasan Terhadap Pemanfaatan Air Tanah	kali	48	48	48	48					

TUJUAN GLOBAL 16. MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL DAN INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN

Program/Kegiatan/Rincian Output	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana		
		2023	2024	2025	2026	2027						
1	2	3					4	5	6	7		
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH												
16.1. Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan angka kematian dimana pun												
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan												
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pendampingan Desa Berkarakter Pancasila	kali	10	10	10	10		189.18	APBD Kab	Kab. Sleman	Badan Kesbangpol

		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	- Forum Pembauran Kebangsaan - Implementasi wasbang - Peringatan Hari Bela Negara - Peringatan Hari Kebangkitan Nasional - Peringatan Hari Kesaktian Pancasila - Peringatan Hari Lahir pancasila - Peringatan Hari Pahlawan - Peringatan Hari Sumpah pemuda - Pusat pendidikan Wawasan Kebangsaan - Wasbang Goes To School	kali	- 1 kali - 5 kali - 1 kali - 1 kali - 1 kali - 1 kali - 1 kali - 1 kali - 4 kali - 2 kali	- 1 kali - 5 kali - 1 kali - 1 kali - 1 kali - 1 kali - 1 kali - 1 kali - 4 kali - 2 kali	- 1 kali - 5 kali - 1 kali - 1 kali - 1 kali - 1 kali - 1 kali - 1 kali - 4 kali - 2 kali	- 1 kali - 5 kali - 1 kali - 1 kali - 1 kali - 1 kali - 1 kali - 1 kali - 4 kali - 2 kali		2,066.71	APBD Kab	Kab. Sleman	Badan Kesbangpol
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan pelaporan di Bidang Ideologi wawasan Kebangsaan, Belanegara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	- Monev Desa Berkarakter Pancasila - Monev Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) - Monev Kegiatan Pembauran Kebangsaan - Pembentukan Desa Berkarakter Pancasila - Penyusunan dan Pengiriman laporan Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila - Seminar Pancasila - Workshop Kader Pancasila	kali; desa; dokumen	- 1 kali - 1 kali - 1 kali - 3 desa - 1 dok - 1 kali - 1 kali	- 1 kali - 1 kali - 1 kali - 3 desa - 1 dok - 1 kali - 1 kali	- 1 kali - 1 kali - 1 kali - 3 desa - 1 dok - 1 kali - 1 kali	- 1 kali - 1 kali - 1 kali - 3 desa - 1 dok - 1 kali - 1 kali		1,290.32	APBD Kab	Kab. Sleman	Badan Kesbangpol
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik													
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai politik, Pemilihan Umum/pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, perwakilan dan Partai Politik, pemilihan Umum/Pemilihan Umum kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	- Seminar Pemahaman Demokrasi dan HAM - Seminar Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik	kali	- 1 kali - 1 kali	- 1 kali - 1 kali	- 1 kali - 1 kali	- 1 kali - 1 kali		463.06	APBD Kab	Kab. Sleman	Badan Kesbangpol
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, perwakilan dan Partai Politik, pemilihan Umum/Pemilihan Umum kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	- Bimtek Pengelolaan Keunagnan Bantuan Keuangan kepada parpol - Hibah Banpol - Lap. Koor Forum Diskusi Politik - seminar FKAP - Verifikasi Permohonan dan Pertanggungjawaban banpol	kali; parpol; dokumen	- 1 kali - 8 parpol - 1 kali - 1 kali - 16 Dok	- 1 kali - 8 parpol - 1 kali - 1 kali - 16 Dok	- 1 kali - 8 parpol - 1 kali - 1 kali - 16 Dok	- 1 kali - 8 parpol - 1 kali - 1 kali - 16 Dok		11,891.22			
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan													

	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	- Laporan Kegiatan Pemantaun Ormas/LSM - Pelayanan Registrasi Ormas/LSM - Pembinaan Ormas/LSM - Seminar Ormas dan LSM se Kabupaten Sleman	dokumen; bulan; kali	- 1 dok - 12 bulan - 1 kali - 1 kali	- 1 dok - 12 bulan - 1 kali - 1 kali	- 1 dok - 12 bulan - 1 kali - 1 kali	- 1 dok - 12 bulan - 1 kali - 1 kali		17,074.76	APBD Kab	Kab. Sleman	Badan Kesbangpol
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya													
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	- Bimtek Pelaporan Rencana Aksi P4GN - Pembentukan Satgas Anti Narkoba - Penyuluhan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di ponpes - Rintisan Desa Bebas Narkoba - Seminar Peringatan Hari Anti Narkoba (HANI)	kali; desa	- 4 kali - 3 desa - 2 kali - 3 desa - 1 kali	- 4 kali - 3 desa - 2 kali - 3 desa - 1 kali	- 4 kali - 3 desa - 2 kali - 3 desa - 1 kali	- 4 kali - 3 desa - 2 kali - 3 desa - 1 kali		1,384.60	APBD Kab	Kab. Sleman	Badan Kesbangpol
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	- Anjngsana Ke Stakeholder - FGD Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya - Pemantauan Tempat Ibadah - Pembinaan Aliran Kepercayaan - Seminar FKUB - Verifikasi Rumah Ibadah	kali	- 4 kali - 1 kali - 12 kali - 1 kali - 2 kali - 12 kali	- 4 kali - 1 kali - 12 kali - 1 kali - 2 kali - 12 kali	- 4 kali - 1 kali - 12 kali - 1 kali - 2 kali - 12 kali	- 4 kali - 1 kali - 12 kali - 1 kali - 2 kali - 12 kali		2,947.02	APBD Kab	Kab. Sleman	Badan Kesbangpol
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial													
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	- FGD Pengawasan Orang Asing - Lap. Renaksi Penanganan Konflik Sosial - Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan - Pemutakhiran Data Asmara mahasiswa - Raker peningkatan Kerjasama Intelijen - Seminar Pengendalian Keamanan Lingkungan	kali; bulan	- 1 kali - 1 kali - 1 kali - 12 bulan - 12 kali - 1 kali	- 1 kali - 1 kali - 1 kali - 12 bulan - 12 kali - 1 kali	- 1 kali - 1 kali - 1 kali - 12 bulan - 12 kali - 1 kali	- 1 kali - 1 kali - 1 kali - 12 bulan - 12 kali - 1 kali		1,820.73	APBD Kab	Kab. Sleman	Badan Kesbangpol
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	- Peninjauan FKDM - Raker FKDM - Sosialisasi Kewaspadaan Dini	kali	- 6 kali - 6 kali - 2 kali	- 6 kali - 6 kali - 2 kali	- 6 kali - 6 kali - 2 kali	- 6 kali - 6 kali - 2 kali		1,070.42	APBD Kab	Kab. Sleman	Badan Kesbangpol

		<p>Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan pelaporan di Bidang Ideologi wawasan Kebangsaan, Belanegara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</p>	<p>- Monev Desa Berkarakter Pancasila - Monev Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) - Monev Kegiatan Pembauran Kebangsaan - Pembentukan Desa Berkarakter Pancasila - Penyusunan dan Pengiriman laporan Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila - Seminar Pancasila - Workshop Kader Pancasila</p>	<p>kali; desa; dokumen</p>	<p>- 1 Kali - 1 kali - 1 kali - 3 desa - 1 dok - 1 kali - 1 kali</p>	<p>- 1 Kali - 1 kali - 1 kali - 3 desa - 1 dok - 1 kali - 1 kali</p>	<p>- 1 Kali - 1 kali - 1 kali - 3 desa - 1 dok - 1 kali - 1 kali</p>	<p>- 1 Kali - 1 kali - 1 kali - 3 desa - 1 dok - 1 kali - 1 kali</p>	<p>1,290.32</p>	<p>APBD Kab</p>	<p>Kab. Sleman</p>	<p>Badan Kesbangpol</p>
		<p>Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>- Raker/Rakor Forkopimda - FGD Forkopimda dan forum kemitran</p>	<p>kali</p>	<p>- 8 kali - 4 kali</p>	<p>- 8 kali - 4 kali</p>	<p>- 8 kali - 4 kali</p>	<p>- 8 kali - 4 kali</p>	<p>1,012.24</p>	<p>APBD Kab</p>	<p>Kab. Sleman</p>	<p>Badan Kesbangpol</p>
<p>Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum</p>												
<p>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p>		<p>Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan</p>	<p>Pam Hari Besar dan Keagamaan Pam Pejabat VVIP Pam & Voorijder Pejabat Patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masy Penanganan dan antisipasi kerawanan</p>	<p>kali; bulan</p>	<p>28 kali 10 kali 30 kali 12 bulan 12 bulan</p>	<p>28 kali 10 kali 30 kali 12 bulan 12 bulan</p>	<p>28 kali 10 kali 30 kali 12 bulan 12 bulan</p>	<p>28 kali 10 kali 30 kali 12 bulan 12 bulan</p>		<p>APBD Kab</p>	<p>Kab. Sleman</p>	<p>Satpol PP</p>
		<p>Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa</p>	<p>evakuasi PKL monitoring/penjangkauan Anjal/Gepeng/ODGJ Penanganan dan antisipasi tawuran pelajar Penertiban Minol Ilegal Penertiban PKL Penertiban spanduk/reklame ilegal/APK</p>	<p>kali</p>	<p>4 kali 40 kali 5 kali 3 kali 10 kali 65 kali</p>	<p>4 kali 40 kali 5 kali 3 kali 10 kali 65 kali</p>	<p>4 kali 40 kali 5 kali 3 kali 10 kali 65 kali</p>	<p>4 kali 40 kali 5 kali 3 kali 10 kali 65 kali</p>		<p>APBD Kab</p>	<p>Kab. Sleman</p>	<p>Satpol PP</p>
		<p>Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Kerjasama Aparat Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</p>	<p>Bintek Tupoksi Sat Pol. PP Forkom Trantib Kerjasama Aparat Kesamaptaan Pol PP Kesamaptaan Satpam Mediasi Pembinaan Satpam Rakor Data Trantib Rakor Kapanewon Sambang Kamling</p>	<p>kali</p>	<p>2 kali 3 kali 6 kali 10 kali 10 kali 3 kali 5 kali 3 kali 4 kali 17 kali</p>	<p>2 kali 3 kali 6 kali 10 kali 10 kali 3 kali 5 kali 3 kali 4 kali 17 kali</p>	<p>2 kali 3 kali 6 kali 10 kali 10 kali 3 kali 5 kali 3 kali 4 kali 17 kali</p>	<p>2 kali 3 kali 6 kali 10 kali 10 kali 3 kali 5 kali 3 kali 4 kali 17 kali</p>		<p>APBD Kab</p>	<p>Kab. Sleman</p>	<p>Satpol PP</p>
<p>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p>		<p>Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota</p>	<p>Karya Bhakti Linmas dalam mendukung TMMD Koordinasi penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Operasional Korsik Gita Praja Sembada Operasional Satlinmas Rescu Istimewa Wil VII Operasional Satlinmas Inti Kabupaten</p>	<p>kali; bulan</p>	<p>3 kali 12 kali 12 bulan 12 bulan 12 bulan</p>	<p>3 kali 12 kali 12 bulan 12 bulan 12 bulan</p>	<p>3 kali 12 kali 12 bulan 12 bulan 12 bulan</p>	<p>3 kali 12 kali 12 bulan 12 bulan 12 bulan</p>		<p>APBD Kab</p>	<p>Kab. Sleman</p>	<p>Satpol PP</p>
		<p>Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum</p>	<p>Peningkatan Kapasitas Linmas Sosialisasi dan Rakor Kasatgas Linmas Desa dan Kecamatan Update data Linmas Pembentukan Jaga Warga</p>	<p>orang; kali; dokumen jaga warga</p>	<p>510 orang 1 kali 1 dok 21</p>	<p>510 orang 1 kali 1 dok 24</p>	<p>510 orang 1 kali 1 dok 27</p>	<p>510 orang 1 kali 1 dok 29</p>		<p>APBD Kab</p>	<p>Kab. Sleman</p>	<p>Satpol PP</p>

Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Sosialisasi Dana Bagi Hasil Cukai (DBH CHT) Sosialisasi Perbup Ramadhan Sosialisasi Perda dan Perbup	kali	1 kali 1 kali 2 kali	1 kali 1 kali 2 kali	1 kali 1 kali 2 kali	1 kali 1 kali 2 kali			APBD Kab	Kab. Sleman	Satpol PP
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Pembinaan dan Pengawasan Cukai Rokok Binwas Pelaksanaan Perbup Ramadhan Pembinaan dan Pengawasan Pemondokan Pembinaan dan pengawasan Perizinan Usaha Penanganan aduan masyarakat Penanganan Pelanggaran Perda	kali	2 kali 2 kali 10 kali 10 kali 5 kali 5 kali	2 kali 2 kali 10 kali 10 kali 5 kali 5 kali	2 kali 2 kali 10 kali 10 kali 5 kali 5 kali	2 kali 2 kali 10 kali 10 kali 5 kali 5 kali			APBD Kab	Kab. Sleman	Satpol PP
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Forkom Penegakan Perda Kegiatan Pulbaket Koordinasi Kasi Trantib Operasi Non Yustisi Operasi Salon dan Spa Operasi Tempat Hiburan Malam Sidang di Tempat Sidang Tipiring	kali	2 kali 25 kali 2 kali 25 kali 15 kali 2 kali 5 kali 12 kali	2 kali 25 kali 2 kali 25 kali 15 kali 2 kali 5 kali 12 kali	2 kali 25 kali 2 kali 25 kali 15 kali 2 kali 5 kali 12 kali	2 kali 25 kali 2 kali 25 kali 15 kali 2 kali 5 kali 12 kali			APBD Kab	Kab. Sleman	Satpol PP
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Seminar PPNS	kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali			APBD Kab	Kab. Sleman	Satpol PP

Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	operasional pemadaman kebakaran pemeliharaan alat komunikasi pemeliharaan alat pemadam kebakaran pemeliharaan mobil damkar pengamanan RI 1 234 Tamu VIP kenegaraan Pengisian Tabung APAR piket posko siaga PBK 24 jam	bulan; unit	12 bulan 23 unit 6 unit 8 unit 12 bulan 51 unit 12 bulan	12 bulan 23 unit 6 unit 8 unit 12 bulan 51 unit 12 bulan	12 bulan 23 unit 6 unit 8 unit 12 bulan 51 unit 12 bulan	12 bulan 23 unit 6 unit 8 unit 12 bulan 51 unit 12 bulan			APBD Kab	Kab. Sleman	Satpol PP
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Pelatihan SAR bagi Petugas pengadaan alat-alat evakuasi dan penyelamatan alat SRT penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran Belanja pengadaan PDL	kali; set; bulan	4 kali - 12 bulan -	4 kali 2 set 12 bulan 48 set	4 kali - 12 bulan -	4 kali 2 set 12 bulan 48 set			APBD Kab	Kab. Sleman	Satpol PP
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Pelaksanaan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebak	obyek	30	30	30	30			APBD Kab	Kab. Sleman	Satpol PP
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran pada masyarakat dan Sosialisasi dan Pembentukan Satlakar Desa di wil. Perkotaan	kali	38	38	38	38			APBD Kab	Kab. Sleman	Satpol PP

16.2. Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiaksan terhadap anak

Program Peningkatan Kualitas Keluarga

2.08.04 .2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.04 .2.01.0 3	Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	Pelatihan Desa PRIMA	kali	8	8	8	8		2,011.94	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas P3AP2KB
				Pelatihan energi terbarukan	kali	1	1	1	1					

				Pelatihan Industri rumahan	kali	8	8	8	8					
				Pelatihan keterampilan bagi perempuan disabilitas	kali	1	1	1	1					
				Pembinaan Desa PRIMA	kali	4	4	4	4					
				Pembinaan Industri rumahan	kali	4	4	4	4					
				Pembinaan PPEP	kali	5	5	5	5					
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.08.04.2.02.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota: Terlayannya perempuan dan anak korban kekerasan	Operasional UPTD PPA	bulan	12	12	12	12		1,448.09	APBD Kab, DAK	Kab. Sleman	Dinas P3AP2KB
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak														
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Profil Kabupaten Layak Anak	dokumen	1	1	1	1		267.58	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas P3AP2KB
Program Perlindungan Khusus Anak														
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pelatihan Bahasa Isyarat dan Mendongeng	kali	1	1	1	1		432.56	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas P3AP2KB
				Pendampingan Forum AMPK	kali	4	4	4	4					
				Penguatan Forum AMPK	kali	1	1	1	1					
				Penguatan Forum Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Terpadu	kali	2	2	2	2					
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat kabupaten/ Kota	2.08.07.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	Bimbingan TeTBM	kali	1	1	1	1		277.48	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas P3AP2KB
				Inisiasi Masjid Ramah Anak	kali	2	2	2	2					
				Inisiasi Pondok Pesantren Ramah Anak	kali	2	2	2	2					
				Penguatan Keluarga Ramah Anak melalui Simulasi	kali	2	2	2	2					

2.08.07 .2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	2.08.07 .2.03.0 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pelatihan Bagi SDM dan Jejaring UPTD PPA	kali	1	1	1	1		429.15	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas P3AP2KB
				Pelatihan sistem pendataan kasus kekerasan terhadap perempuan dan Anak melalui Simfoni PPA	kali	1	1	1	1					
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)														
2.08.06 .2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	2.08.06 .2.01.0 1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintahan, Non Pemerintahan, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	Penyelenggaraan Peringatan Hari Anak Nasional Kabupaten Sleman	orang	150	200	500	500		594.98	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas P3AP2KB
				Temu Hati Anak Sleman	orang	249	250	250	250					
2.08.06 .2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	2.08.06 .2.02.0 3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Penyusunan Grand Design KLA	perbup	1	-	-	-		2,939.40	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas P3AP2KB
				Pengembangan Kabupaten Layak Anak	kabupaten	1	1	1	1					
				Penguatan dan pengembangan kapasitas forum anak kalurahan dan kapanewon	paket	37	37	37	37					
				Pelayanan PUSPAGA	puspaga	1	1	1	1					
16.5. Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.														
Program Penyelenggaraan Pengawasan														
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Pengawasan kinerja pemerintah daerah	Laporan Hasil Pemeriksaan	LHP	8	8	8	8		2,067.12	APBD Kab	Kab. Sleman	Inspektorat
			Pengawasan keuangan pemerintah daerah	Laporan Hasil Pemeriksaan	LHP	8	8	8	8					
			Pengawasan desa	Laporan Hasil Pemeriksaan	LHP	16	16	16	16					
			Review laporan kinerja	Laporan Hasil Review RPJMD Laporan Hasil Review RKPD N+1 Laporan Hasil Review RKPD Perubahan tahun N Laporan Hasil Review LPPD Laporan Hasil Review Renja N+1 Laporan Hasil Review Renja Perubahan tahun N Laporan Hasil Review laporan Kinerja Daerah Laporan Hasil Review Renstra Laporan Hasil Evaluasi LKJIP PD Laporan Hasil Telaah Sejawat	LHR	8	8	8	10					

			Reviu laporan Keuangan	Laporan Hasil Review LKPD Laporan Hasil Review KUA- PPAS tahun N+1 Laporan Hasil Review KUA- PPAS tahun N Laporan Hasil Review RKA tahun N+1 Laporan Hasil Review RKA tahun N Laporan Hasil Reviu Penyerapan Anggaran Laporan Hasil Review DAK	LHR	7	7	7	7					
			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Laporan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI	dokumen	2	2	2	2					
				Laporan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten	dokumen	2	2	2	2					
				Laporan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP lainnya	dokumen	2	2	2	2					
				Rakorwasda	kali	1	1	1	1					
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Pengawasan dengan tujuan tertentu	Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu Laporan hasil pemeriksaan kasus	LHP	40	40	40	40		2,242.69	APBD Kab	Kab. Sleman	Inspektorat
			Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Laporan hasil pemeriksaan	LHP	5	5	5	5					
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi														
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	dokumen	1	1	1	1		166.04	APBD Kab	Kab. Sleman	Inspektorat
	Pendampingan dan Asistensi		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan hasil pendampingan dan asistensi	dokumen	1	1	1	1		4,371.96	APBD Kab	Kab. Sleman	Inspektorat
				Workshop penyusunan manajemen resiko dan RTP	angkatan	2	2	2	2					
			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Laporan hasil verifikasi LHKASN Laporan Evaluasi SPIP PD Laporan hasil evaluasi kapabilitas APIP Laporan hasil evaluasi SPIP Kabupaten Laporan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi Laporan hasil pembinaan dan penilaian ZI-WBK dan WBBM	dokumen	5	4	6	4					
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Laporan pengendalian gratifikasi Laporan hasil monev terhadap pungutan liar	dokumen	2	2	2	2					
			Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegekan Integritas	Laporan Survey Penilaian Integritas Laporan monev rencana aksi percepatan pencegahan korupsi terintegrasi	dokumen	2	2	2	2					
16.6. Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat														
Program Pengelolaan Keuangan Daerah														
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Dokumen KUA Dokumen minat baseline verifikasi dan pengajuan emburse dana hibah sanitasi Dokumen minat baseline, verifikasi dan pengajuan reimburse hibah air minum Dokumen Perubahan KUA Dokumen Perubahan PPAS Dokumen PPAS	dokumen	1 4 4 1 1 1	2 4 4 1 1 1	3 4 4 1 1 1	4 4 4 1 1 1			APBD Kab	Kab. Sleman	BKAD

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Instruksi Anggaran Instruksi Anggaran Perubahan Penelitian RKA Penelitian RKA Perubahan	dokumen; OPD	1 Dokumen 1 Dokumen 46 OPD 46 OPD	1 Dokumen 1 Dokumen 46 OPD 46 OPD	1 Dokumen 1 Dokumen 46 OPD 46 OPD	1 Dokumen 1 Dokumen 46 OPD 46 OPD			APBD Kab	Kab. Sleman	BKAD
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah	DPA DPPA Jawaban PU Fraksi DPRD APBD	dokumen; buku	510 Dokumen 5 Dokumen	510 Dokumen 5 Dokumen	510 Dokumen 5 Dokumen	510 Dokumen 5 Dokumen			APBD Kab	Kab. Sleman	BKAD
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Analisis standar belanja Appraisal tunjangan perumahan DPRD Kajian perjalanan dinas Kajian tunjangan transportasi SHBJ	dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen			APBD Kab	Kab. Sleman	BKAD
	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen pajak rokok sesuai dengan ketentuan yang berlaku Dokumen pemanfaatan DBH Cukai tembakau Laporan posisi kas bulanan Perbup tentang Juklak pengelolaan keuangan daerah Perkiraan belanja operasi, belanja modal, transfer bagi hasil Ringkasan realisasi bulanan	dokumen	2 Dokumen 1 Dokumen 12 Dokumen 1 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen	2 Dokumen 1 Dokumen 12 Dokumen 1 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen	2 Dokumen 1 Dokumen 12 Dokumen 1 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen	2 Dokumen 1 Dokumen 12 Dokumen 1 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen			APBD Kab	Kab. Sleman	BKAD
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Laporan rekonsiliasi Bank Nota debit pengembalian penerimaan Perjanjian pengelolaan idle cash	bulan; dokumen; perjanjian	12 bulan 1 Dokumen 6 Perjanjian	12 bulan 1 Dokumen 6 Perjanjian	12 bulan 1 Dokumen 6 Perjanjian	12 bulan 1 Dokumen 6 Perjanjian			APBD Kab	Kab. Sleman	BKAD
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Aplikasi SP2D Online Penelitian SPM Penerbitan SP2D	perangkat; SP; SP2D	1 Perangkat 1200 SPM 1200 SP2D	1 Perangkat 1200 SPM 1200 SP2D	1 Perangkat 1200 SPM 1200 SP2D	1 Perangkat 1200 SPM 1200 SP2D			APBD Kab	Kab. Sleman	BKAD
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Laporan pengembangan dan evaluasi penyertaan modal Rekonsiliasi atas penyertaan modal pada PDAM Tirta Sembada, PT BPR Bank Sleman (Perseroda) dan PT. Bank BPD DIY	dokumen	1 1	1 1	1 1	1 1			APBD Kab	Kab. Sleman	BKAD
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Pelaporan penggunaan dana transfer Pencairan dana transfer propinsi Pencairan dana transfer pusat	kali	4 4 4	4 4 4	4 4 4	4 4 4			APBD Kab	Kab. Sleman	BKAD
	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen rekapitulasi gaji PNS Pencetakan Data Gaji PNS Pencetakan kesanggupan bayar Pencetakan surat keterangan pemberhentian penghasilan (SKPP) Pencetakan susulan gaji, kekurangan gaji dan terusan gaji Peremajaan Data Gaji	OPD; set; berkas; SKPP	127 OPD 127 Set 15 Berkas 600 SKPP 49 OPD 127 OPD	127 OPD 127 Set 15 Berkas 600 SKPP 49 OPD 127 OPD	127 OPD 127 Set 15 Berkas 600 SKPP 49 OPD 127 OPD	127 OPD 127 Set 15 Berkas 600 SKPP 49 OPD 127 OPD			APBD Kab	Kab. Sleman	BKAD

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan Gaji Pegawai ke DJPK, PT Taspen, BPJS Kesehatan Pembinaan Pengelola Gaji Sosialisasi Revisi Buku pedoman pengelolaan gaji Sosialisasi SPT Masa dan SPT Tahunan PPh 21	pegawai; pengelola gaji	9000 Pegawai 127 Pengelola Gaji 127 Pengelola Gaji 127 Pengelola Gaji	9000 Pegawai 127 Pengelola Gaji 127 Pengelola Gaji 127 Pengelola Gaji	9000 Pegawai 127 Pengelola Gaji 127 Pengelola Gaji 127 Pengelola Gaji	9000 Pegawai 127 Pengelola Gaji 127 Pengelola Gaji 127 Pengelola Gaji			APBD Kab	Kab. Sleman	BKAD
		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Berita acara rekonsiliasi SP2D	dokumen	12	12	12	12			APBD Kab	Kab. Sleman	BKAD
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan penerimaan SK Bendahara dan perubahannya Validasi pendapatan dan belanja SKPD	laporan; SK; OPD	24 laporan 7 SK 177 OPD	24 laporan 7 SK 177 OPD	24 laporan 7 SK 177 OPD	24 laporan 7 SK 177 OPD			APBD Kab	Kab. Sleman	BKAD
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Laporan keuangan daerah LRA Perbup Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	dokumen	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1			APBD Kab	Kab. Sleman	BKAD
		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Integrasi sistem Pengembangan modul sistem keuangan	software	1	1	1	1			APBD Kab	Kab. Sleman	BKAD
		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Pendampingan	kali	4	4	4	4			APBD Kab	Kab. Sleman	BKAD
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Bagi hasil pemerintah desa Distribusi BKK Desa Distribusi BKK Pilkades Distribusi dana desa dari APBN Kompensasi Dampak Negatif Sharing pembangunan IPAL	desa; paket	86 Desa 86 Desa 35 Desa 86 Desa 1 Paket	86 Desa 86 Desa 35 Desa 86 Desa 1 Paket	86 Desa 86 Desa 35 Desa 86 Desa 1 Paket	86 Desa 86 Desa 35 Desa 86 Desa 1 Paket			APBD Kab	Kab. Sleman	BKAD
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Belanja tak terduga	BTT	1	1	1	1			APBD Kab	Kab. Sleman	BKAD
		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Bagi hasil pajak bagi pemerintah desa Bagi hasil retribusi bagi pemerintah desa Bagi hasil retribusi desa	desa	86 86 15	86 86 16	86 86 17	86 86 18			APBD Kab	Kab. Sleman	BKAD
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah													

Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen RKBMD Pensertifikatan tanah Standar barang milik daerah Standar kebutuhan Kab Sleman	dokumen; sertifikat	1 Dokumen 10 sertifikat 1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen 10 sertifikat 1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen 10 sertifikat 1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen 10 sertifikat 1 Dokumen Dokumen			APBD Kab	Kab. Sleman	BKAD
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan hasil evaluasi Laporan penyelesaian barang hilang Rekon aset tetap Rekon persediaan	laporan; dokumen	2 laporan 1 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen	2 laporan 1 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen	2 laporan 1 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen	2 laporan 1 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen			APBD Kab	Kab. Sleman	BKAD
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan pemanfaatan aset Perbaikan barang milik daerah sesuai kewenangan	dokumen	1 1	1 1	1 1	1 1			APBD Kab	Kab. Sleman	BKAD
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Pengelolaan aset daerah Penghapusan aset tetap	jenis	1 Jenis 3 jenis	1 Jenis 3 jenis	1 Jenis 3 jenis	1 Jenis 3 jenis			APBD Kab	Kab. Sleman	BKAD
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan pengelola barang daerah Penyempurnaan SIDIAN Penyempurnaan SIM aset	2 kali 1 paket 1 paket	2 kali 1 paket 1 paket	2 kali 1 paket 1 paket	2 kali 1 paket 1 paket	2 kali 1 paket 1 paket			APBD Kab	Kab. Sleman	BKAD

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Dokumen evaluasi target dan penerimaan PAD	dokumen	12	12	12	12			APBD Kab	Kab. Sleman	BKAD
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Dokumen kajian potensi pajak dan retribusi daerah	dokumen	2	2	2	2			APBD Kab	Kab. Sleman	BKAD
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Sosialisasi paket regulasi tentang pajak daerah	kali	8	8	8	8			APBD Kab	Kab. Sleman	BKAD
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Administrasi PBB Analisis data PBB P2 Cetak SPPT PBB P2 Pemantauan dan evaluasi penyampaian SPPT PBB P2 Pemuthakiran dan pemeliharaan aplikasi Pemuthakiran data PBB Penyampaian SPPT PBB yang diterbitkan secara masal Penyusunan SK Bupati tentang NJOP PBB P2 Signature tanda tangan elektronik SK NJOP Verifikasi SPPT PBB P2	dokuem; SPPT; kali; paket; OP	86 Dokumen 1 Dokumen 630000 SPPT 34 kali 1 paket 20000 OP 630000 SPPT 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 630000 SPPT	86 Dokumen 1 Dokumen 630000 SPPT 34 kali 1 paket 20000 OP 630000 SPPT 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 630000 SPPT	86 Dokumen 1 Dokumen 630000 SPPT 34 kali 1 paket 20000 OP 630000 SPPT 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 630000 SPPT	86 Dokumen 1 Dokumen 630000 SPPT 34 kali 1 paket 20000 OP 630000 SPPT 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 630000 SPPT			APBD Kab	Kab. Sleman	BKAD
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kajian pengelolaan tentang BPHTB Laporan hasil penelitian kantor dan lapangan Tercapainya target penerimaan BPHTB Validasi SSPD BPHTB	dokumen; laporan; Rp; OP	1 Dokumen 2000 laporan Rp19000000 0 13000 OP	1 Dokumen 2000 laporan Rp19000000 0 13000 OP	1 Dokumen 2000 laporan Rp19000000 0 13000 OP	1 Dokumen 2000 laporan Rp19000000 0 13000 OP			APBD Kab	Kab. Sleman	BKAD

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Surat Ketetapan pajak daerah	SKPD	24250	24250	24250	24250			APBD Kab	Kab. Sleman	BKAD
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	laporan data wajib pajak Pelayanan wajib pajak Wajib pajak baru	jenis; bulan; wp	6 jenis 12 bulan 600 wp	6 jenis 12 bulan 600 wp	6 jenis 12 bulan 600 wp	6 jenis 12 bulan 600 wp			APBD Kab	Kab. Sleman	BKAD
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Pembinaan Wp Verifikasi SPTPD	kali; SPTPD	80 Kali 150 SPTPD	80 Kali 150 SPTPD	80 Kali 150 SPTPD	80 Kali 150 SPTPD			APBD Kab	Kab. Sleman	BKAD
	Penagihan Pajak Daerah	Bahan perhitungan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Intensifikasi penagihan PBB P2 di 86 desa Laporan perkembangan piutang pajak daerah Laporan realisasi pajak daerah Pemanggilan wp daerah Pembayaran PBB P2 Panutan Pemberian penghargaan lunas PBB P2 Pemberian penghargaan lunas PBB P2 Pemberian penghargaan lunas PBB P2	dokumen; kali; WP; kec; desa; dukuh	3 Dokumen 172 kali 12 Dokumen 12 Dokumen 18 kali 180 WP 5 Kec 29 Desa 500 Dukuh	3 Dokumen 172 kali 12 Dokumen 12 Dokumen 18 kali 180 WP 5 Kec 29 Desa 500 Dukuh	3 Dokumen 172 kali 12 Dokumen 12 Dokumen 18 kali 180 WP 5 Kec 29 Desa 500 Dukuh	3 Dokumen 172 kali 12 Dokumen 12 Dokumen 18 kali 180 WP 5 Kec 29 Desa 500 Dukuh			APBD Kab	Kab. Sleman	BKAD
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Surat keputusan keberatan, pengurangan keringanan, pnghapusan sanksi administrasi pajak daerah	SK	500	500	500	500			APBD Kab	Kab. Sleman	BKAD
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen pemeriksaan WP dan dokumen pemeriksaan KAP	LHP	28	28	28	28			APBD Kab	Kab. Sleman	BKAD
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen Evaluasi Target dan Penerimaan PAD	dokumen	12	12	12	12			APBD Kab	Kab. Sleman	BKAD

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									APBD Kab	Kab. Sleman	Semua PD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									APBD Kab	Kab. Sleman	Semua PD
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									APBD Kab	Kab. Sleman	Semua PD
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah									APBD Kab	Kab. Sleman	Semua PD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									APBD Kab	Kab. Sleman	Semua PD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah									APBD Kab	Kab. Sleman	Semua PD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									APBD Kab	Kab. Sleman	Semua PD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									APBD Kab	Kab. Sleman	Semua PD

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											APBD Kab	Kab. Sleman	Semua PD
Peningkatan Pelayanan BLUD											APBD Kab	Kab. Sleman	Semua PD
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah											APBD Kab	Kab. Sleman	Semua PD
Fasilitasi Kerumah-tanggaan Sekretariat Daerah											APBD Kab	Kab. Sleman	Semua PD
Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan											APBD Kab	Kab. Sleman	Semua PD
Fasilitasi Keprotokolan											APBD Kab	Kab. Sleman	Semua PD
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD											APBD Kab	Kab. Sleman	Semua PD
Layanan Administrasi DPRD											APBD Kab	Kab. Sleman	Semua PD

Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan

Administrasi Tata Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen kajian Penanganan Kasus Permasalahan Pemerintahan Umum	dokumen	1	1	1	1		7,783.64	APBD Kab	Kab. Sleman	Sekretariat Daerah
		luran APKASI	kali	1	1	1	1					
		luran Forsesdasi	kali	1	1	1	1					
		Kajian kebijakan Bidang Pemerintahan	dokumen	1	1	1	1					
		Kajian Kebijakan Pemerintah Daerah	dokumen	1	1	1	1					
		rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	kali	12	12	12	12					
		Rapat Koordinasi Pimpinan	kali	12	12	12	12					
		Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan	kali	2	2	2	2					
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Pembuatan Peta Batas Kalurahan	kalurahan	5	5	5	5		3,907.80	APBD Kab	Kab. Sleman	Sekretariat Daerah
		Pemutakhiran Buku Kode dan Data Administrasi Pemerintahan Kabupaten Sleman	dokumen	1	1	1	1					
		Pemutakhiran Toponimi Kabupaten Sleman	dokumen	1	1	1	1					
		Penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Batas Kalurahan	kalurahan	5	5	5	5					
		Laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	dokumen	1	1	1	1					
		Sinkronisasi Garis Batas Wilayah Kabupaten Sleman dan Kabupaten/Kota Berbatasan	kab/kota	4	4	4	4					
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen pendukung EKPPD	dokumen	1	1	1	1		3,315.29	APBD Kab	Kab. Sleman	Sekretariat Daerah
		Dokumen SPM	dokumen	1	1	1	1					
		Dokumen Evaluasi Laporan Tahunan	dokumen	1	1	1	1					
		Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja	dokumen	1	1	1	1					
		LKPI Bupati Sleman	dokumen	4	4	4	4					

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

			LPPD kepada Pemerintah	dokumen	2	2	2	2				
			Modul penyusunan LPPD	dokumen	1	1	1	1				
			Pengelolaan SIM LPPD	SIM	1	1	1	1				
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen penyelenggaraan MTQ DIY, Nasional dan dokumen kegiatan Masjid Agung	dokumen	2	2	2	2		9,348.05	APBD Kab	Kab. Sleman	Sekretariat Daerah
			dokumen	6	6	6	6					
			dokumen	2	2	2	2					
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Dokumen kajian dan monev pemberian bantuan hibah uang dan rakor kegiatan masyarakat	dokumen	1	1	1	1		10,555.64	APBD Kab	Kab. Sleman	Sekretariat Daerah
			dokumen	1	1	1	1					
			dokumen	1	1	1	1					
			dokumen	7	7	7	7					
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Dokumen kajian/penyusunan materi rumusan kebijakan bidang kesejahteraan masyarakat	dokumen	1	1	1	1		1,713.89	APBD Kab	Kab. Sleman	Sekretariat Daerah
			dokumen	1	1	1	1					
			dokumen	5	5	5	5					
			dokumen	3	3	3	3					
	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum	Draft Perjanjian	perjanjian	20	20	20	20		1,929.10	APBD Kab	Kab. Sleman
Evaluasi/ Fasilitasi			raperda	7	7	7	7					
Jawaban/ pandangan Bupati atas Raperda			raperda	7	7	7	7					
Kajian			dokumen	2	2	2	2					
Keputusan Bupati			keputusan	300	300	300	300					
Keputusan Sekretariat Daerah			SK	20	20	20	20					
Konsultasi Pakar			kali	10	10	10	10					
Konsultasi Raperda			raperda	4	4	4	4					
Peraturan Bupati			peraturan	25	25	25	25					
Propemperda			dokumen	2	2	2	2					
Raperda		raperda	5	5	5	5						
Fasilitasi Bantuan Hukum		Laporan peduli Hak Asasi Manusia	laporan	1	1	1	1		2,943.64	APBD Kab	Kab. Sleman	Sekretariat Daerah
			laporan	3	3	3	3					
			jenis	30	30	30	30					

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

			Penanganan kasus sengketa perdata, Tata Usaha Negara (TUN) dan sengketa informasi yang ditangani (ligitasi)	perkara	7	7	7	7					
			Relaas panggilan sidang	relasi	250	250	250	250					
			Fasilitasi Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin	perkara	10	10	10	10					
			Tata Usaha Negara (TUN) dan sengketa informasi yang ditangani (ligitasi)	perkara	3	3	3	3					
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Himpunan produk hukum	dokumen	4	4	4	4		1,329.78	APBD Kab	Kab. Sleman	Sekretariat Daerah
			Pembinaan Anggota JDIH	kali	17	17	17	17					
			Pendokumentasian produk hukum	buku	100	100	100	100					
			Penyusunan abstrak produk hukum	dokumen	1	1	1	1					
			Penyusunan Berita Daerah	perbup	20	20	20	20					
			Penyusunan lembaran daerah	perda	10	10	10	10					
			Publikasi media cetak	kali	4	4	4	4					
			Sosialisasi	kali	8	8	8	8					
	Fasilitasi Kerjasama	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Evaluasi kerjasama daerah	dokumen	1	1	1	1		1,526.46	APBD Kab	Kab. Sleman	Sekretariat Daerah
			Fasilitasi kerjasama daerah dengan pihak ketiga	dokumen	50	50	50	50					
			Fasilitasi kerjasama wajib antar daerah perbatasan	dokumen	3	3	3	3					
		Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Fasilitasi kerjasama daerah dengan pemerintah luar negeri	kali	2	2	2	2		33.08	APBD Kab	Kab. Sleman	Sekretariat Daerah
			Fasilitasi kerjasama dengan lembaga non Pemerintah Luar Negeri	kali	2	2	2	2					
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan													
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Sleman	Dokumen monitoring pelaksanaan kelembagaan asli	dokumen	1	1	1	1		510.51	APBD Kab	Kab. Sleman	Sekretariat Daerah
		Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Produk hukum tentang kalurahan	dokumen	1	1	1	1					
	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Implementasi Budaya Pemerintahan Sleman	Laporan Pelaksanaan Budaya Pemerintahan	laporan	1	1	1	1		1,123.12	APBD Kab	Kab. Sleman	Sekretariat Daerah
Program Pengelolaan Perbatasan													
	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Pelayanan pemerintahan di Jakarta							889.09	APBD Kab	Kab. Sleman	Sekretariat Daerah
	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Dokumen laporan kegiatan	dokumen	1	1	1	1		582.88	APBD Kab	Kab. Sleman	Sekretariat Daerah
			Dokumen kerja sama wilayah perbatasan	dokumen	1	1	1	1					
			Inventarisasi Potensi Permasalahan di Wilayah Perbatasan dan rekomendasi Tindak Lanjut Penanganan	dokumen	1	1	1	1					
Program Perekonomian Dan Pembangunan													

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Laporan monitoring dan evaluasi BUMD	dokumen	1	1	1	1		436.46	APBD Kab	Kab. Sleman	Sekretariat Daerah
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Agenda promosi daerah	dokumen	1	1	1	1		621.40	APBD Kab	Kab. Sleman	Sekretariat Daerah
		Laporan Kajian Produk Unggulan Daerah	dokumen	1	1	1	1					
		Laporan monev promosi daerah	dokumen	1	1	1	1					
Laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal, pariwisata dan kehutanan	dokumen	1	1	1	1							
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	dokumen	1	1	1	1		212.90	APBD Kab	Kab. Sleman	Sekretariat Daerah	
Pemantauan Kebijakan Sumber Sumber Daya Alam	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Laporan monev pengendalian inflasi daerah	dokumen	1	1	1	1		860.70	APBD Kab	Kab. Sleman	Sekretariat Daerah
		Laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang energi dan sumberdaya mineral	dokumen	1	1	1	1					
		Laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pertanian, pangan dan perikanan yang ditindaklanjuti	dokumen	1	1	1	1					
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Laporan evaluasi dan monitoring pengembangan sarana dan prasarana publik	dokumen	1	1	1	1		766.51	APBD Kab	Kab. Sleman	Sekretariat Daerah
		Laporan kebijakan bidang pembangunan	dokumen	1	1	1	1					
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Dokumen daftar prioritas pengendalian pembangunan	dokumen	1	1	1	1		435.21	APBD Kab	Kab. Sleman	Sekretariat Daerah
		Laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan per bulan	dokumen	8	8	8	8					
		Laporan pengendalian pembangunan per triwulan	dokumen	4	4	4	4					
		Laporan peninjauan lapangan	dokumen	1	1	1	1					
		Laporan realisasi fisik dan keuangan pengadaan barang dan jasa	dokumen	12	12	12	12					
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Berita Acara Penyerahan hasil pelaksanaan kegiatan APBD	dokumen	1	1	1	1		1,711.91	APBD Kab	Kab. Sleman	Sekretariat Daerah
		Laporan realisasi fisik dan keuangan pemerintah daerah	dokumen	12	12	12	12					
		Laporan Penyelesaian Permasalahan Pembangunan, masyarakat dan pemerintahan	dokumen	1	1	1	1					
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pendataan bahan/material major item pendukung infrastruktur	kali	1	1	1	1		4,338.51	APBD Kab	Kab. Sleman	Sekretariat Daerah
		Pengelolaan pengadaan barang dan jasa	paket	150	150	150	150					
	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Bimtek operasional pengadaan barang/jasa	kali	10	10	10	10		1,033.58	APBD Kab	Kab. Sleman	Sekretariat Daerah
		Operasional e-procurement	bulan	12	12	12	12					

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

			Sertifikasi ISO	ls	1	1	1	1				
			Software/aplikasi pendukung e-procurement	unit	1	1	1	1				
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Forum Komunikasi Pengadaan Barang/Jasa	kali	2	2	2	2	496.74	APBD Kab	Kab. Sleman	Sekretariat Daerah
			Pembinaan pengadaan barang/jasa	kali	3	3	3	3				
			Penilaian angka kredit jabfung pengelola PBJ	kali	2	2	2	2				
			Pendampingan Advokasi	bulan	12	12	12	12				
Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah												
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Naskah akademik raperda RPJPD Tahun 2025-2045	dokumen	-	1	-	-	285.33	APBD Kab	Kab. Sleman	Bappeda	
		Naskah akademik raperda RPJMD Tahun 2026-2031 dan rancangan teknokratik	dokumen	-	1	-	-					
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Dokumen usulan kegiatan Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa tahun n+1	dokumen	1	1	1	1		APBD Kab	Kab. Sleman	Bappeda	
		Dokumen usulan kegiatan DAK Fisik tahun n+1	dokumen	1	1	1	1					
		Dokumen usulan kegiatan keistimewaan DIY Tahun n+2	dokumen	1	1	1	1					
		Dokumen usulan kegiatan TJSP Tahun n+1	dokumen	1	1	1	1					
	Pelaksanaan konsultasi Publik	Dokumen hasil forum konsultasi publik RKPDP	dokumen	1	1	1	1	320.69	APBD Kab	Kab. Sleman	Bappeda	
		Dokumen hasil forum konsultasi publik RPJMD	dokumen	1	-	-	1					
		Dokumen hasil forum konsultasi publik RPJPD	dokumen	-	1	-	-					
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Dokumen hasil forum perangkat daerah	dokumen	1	2	1	2	771.19	APBD Kab	Kab. Sleman	Bappeda	
		Dokumen hasil Musrenbang kecamatan	dokumen	1	1	1	1					
		Dokumen hasil forum perangkat daerah RPJPD	dokumen		1							
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Dokumen hasil Musrenbang RKPDP	dokumen	1	1	1	1	2,315.20	APBD Kab	Kab. Sleman	Bappeda	
		Dokumen hasil Musrenbang RPJMD	dokumen	-	1	-	1					
Dokumen hasil Musrenbang RPJPD		dokumen		1								
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Peraturan Bupati tentang pengesahan Perubahan Renja PD Tahun n	dokumen	1	1	1	1	1,805.93	APBD Kab	Kab. Sleman	Bappeda		
	Dokumen Peraturan Bupati tentang pengesahan Renja PD tahun n+2	dokumen	1	1	1	1						

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

			Dokumen Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD Tahun n	dokumen	1	1	1	1				
			Dokumen Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun n+2	dokumen	1	1	1	1				
			Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Sleman tahun 2021-2026	dokumen	-	1	-	1				
			Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Sleman tahun 2026-2031 (penetapan RPJMD baru menyesuaikan regulasi pemerintah pusat dapat di 2024 atau 2026)	dokumen	-	1	-	1				
			Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Sleman tahun 2025-2045	dokumen	-	1	-	-				
Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Buku informasi progam dan kegiatan pembangunan tahun n	dokumen	1	1	1	1		389.29	APBD Kab	Kab. Sleman	Bappeda
		Dokumen data RKPD Tahun n	dokumen	1	1	1	1					
		Buku saku data urusan komunikasi informasi, perpustakaan dan kearsipan	dokumen	1	1	1	1					
		Dokumen perencanaan pembangunan urusan komunikasi informasi, perpustakaan dan kearsipan sebagai bahan masukan RKPD Tahun n+2	dokumen	1	1	1	1					
		Dokumen rancangan kebijakan pembangunan urusan komunikasi informasi, perpustakaan dan kearsipan sebagai bahan masukan RPJMD Tahun 2021-2026	dokumen	1	-	-	-					
		Dokumen rancangan kebijakan pembangunan jangka panjang urusan komunikasi informasi, perpustakaan dan kearsipan sebagai bahan masukan RPJPD Tahun 2025-2045	dokumen	1	-	-	-					
		Pengelolaan DATAKU	bulan	12	12	12	12					
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Pemeliharaan dan operasional sistem informasi/aplikasi	bulan	12	12	12	12		1,148.99	APBD Kab	Kab. Sleman	Bappeda
		Pengelolaan forum satu data kabupaten	bulan	12	12	12	12					
		Pengelolaan informasi dan dokumentasi	bulan	12	12	12	12					
		Pengelolaan website perangkat daerah	bulan	12	12	12	12					
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja Perangkat Daerah	dokumen	1	1	1	1		371.97	APBD Kab	Kab. Sleman	Bappeda

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

			Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RKPD	dokumen	1	1	1	1					
			Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja perangkat daerah	dokumen	2	2	2	2					
			Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKP	dokumen									
			Festival pengendalian dan evaluasi	kali	1	1	1	1					
			Laporan monitoring dan evaluasi Dana BKK Provinsi ke kabupaten tahun n	dokumen	4	4	4	4					
			Laporan monitoring dan evaluasi Dana Keistimewaan tahun n	dokumen	4	4	4	4					
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dokumen evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Pemerintahan Daerah tahun n	dokumen	4	4	4	4		533.72	APBD Kab	Kab. Sleman	Bappeda
			Dokumen evaluasi terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun n	dokumen	4	4	4	4					
			Dokumen evaluasi terhadap hasil RPJMD tahun kelima (tahun 2020)	dokumen	1	1	1	1					
			Dokumen evaluasi terhadap hasil RPJMD tahun n-1	dokumen	1	1	1	1					
			Dokumen laporan akhir DAK tahun n	dokumen	1	1	1	1					
			Dokumen laporan triwulan DAK tahun n	dokumen	4	4	4	4					
			Dokumen monitoring pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) tahun n-1	dokumen	1	1	1	1					
			Dokumen evaluasi terhadap hasil RPJPD	dokumen	1	1	1	1					
Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan													
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen usulan perencanaan kegiatan dana keistimewaan tahun n+2	dokumen	1	1	1	1		1,233.41	APBD Kab	Kab. Sleman	Bappeda
			Dokumen perubahan/redesain I perencanaan kegiatan dana keistimewaan tahun n	dokumen	1	1	1	1					
			Dokumen perubahan/redesain II perencanaan kegiatan dana keistimewaan tahun n	dokumen	1	1	1	1					
			Dokumen perubahan/penyesuaian perencanaan kegiatan dana keistimewaan tahun n+1	dokumen	1	1	1	1					
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah													
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, RKP)	Buku saku urusan pemerintahan	dokumen	1	1	1	1			APBD Kab	Kab. Sleman	Bappeda
			Dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan urusan pemerintahan sebagai bahan masukan RKP tahun n+2	dokumen	1	1	1	1					

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

		Dokumen hasil monitoring dan evaluasi RAD Kependudukan tahun n-1	dokumen	1	1	1	1					
		Dokumen rancangan kebijakan pembangunan urusan pemerintahan sebagai bahan masukan RPJMD Tahun 2021-2026	dokumen	1	-	-	-					
		Dokumen rancangan kebijakan pembangunan jangka panjang urusan pemerintahan sebagai bahan masukan RPJPD Tahun 2025-2045	dokumen	1	-	-	-					
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi RAD Kependudukan tahun n-1	dokumen							APBD Kab	Kab. Sleman	Bappeda
		Dokumen RAD Kependudukan tahun 2021-2026	dokumen									
		Dokumen review Grand Design Kependudukan (GDPK) 2015-2035	dokumen									
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPDP)	Buku saku kesehatan dan sosial	dokumen	1	1	1	1		241.12	APBD Kab	Kab. Sleman	Bappeda
		Dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan urusan kesehatan dan sosial sebagai bahan masukan RKPDP tahun n+2	dokumen	1	1	1	1					
		Dokumen aksi stunting	dokumen	1	1	1	1					
		Dokumen rancangan kebijakan pembangunan urusan kesehatan dan sosial sebagai bahan masukan RPJMD Tahun 2021-2026	dokumen	1	-	-	-					
		Dokumen rancangan kebijakan pembangunan jangka panjang urusan kesehatan dan sosial sebagai bahan masukan RPJPD Tahun 2025-2045	dokumen	1	-	-	-					
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2022-2026	dokumen	-	-	-	1		569.09	APBD Kab	Kab. Sleman	Bappeda
		Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan	dokumen	1	1	1	1					
		Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan	dokumen	1	1	1	1					
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Buku saku urusan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga	dokumen	1	1	1	1		78.01	APBD Kab	Kab. Sleman	Bappeda
		Dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan urusan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga sebagai bahan masukan RKPDP tahun n+2	dokumen	1	1	1	1					

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

			Dokumen rancangan kebijakan pembangunan urusan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga sebagai bahan masukan RPJMD Tahun 2021-2026	dokumen	1	-	-	-				
			Dokumen rancangan kebijakan pembangunan jangka panjang urusan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga sebagai bahan masukan RPJPD Tahun 2025-2045	dokumen	1	-	-	-				
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Buku saku urusan pertanian, pangan, perikanan dan pemberdayaan masyarakat	dokumen	1	1	1	1			APBD Kab	Kab. Sleman	Bappeda
		Dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan urusan pertanian, pangan, perikanan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bahan masukan RKPD tahun n+2	dokumen	1	1	1	1					
		Dokumen rancangan kebijakan pembangunan urusan pertanian, pangan, perikanan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bahan masukan RPJMD Tahun 2021- 2026	dokumen	1	-	-	-					
		Dokumen rancangan kebijakan pembangunan jangka panjang urusan pertanian, pangan, perikanan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bahan masukan RPJPD Tahun 2025-2045	dokumen	1	-	-	-					
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Buku saku urusan pariwisata, tenaga kerja dan transmigrasi	dokumen	1	1	1	1		500.45	APBD Kab	Kab. Sleman	Bappeda
		Dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan urusan pariwisata, tenaga kerja dan transmigrasi sebagai bahan masukan RKPD tahun n+2	dokumen	1	1	1	1					
		Dokumen rancangan kebijakan pembangunan urusan pariwisata, tenaga kerja dan transmigrasi sebagai bahan masukan RPJMD Tahun 2021-2026	dokumen	1	-	-	-					
		Dokumen rancangan kebijakan pembangunan jangka panjang urusan pariwisata, tenaga kerja dan transmigrasi sebagai bahan masukan RPJPD Tahun 2025- 2045	dokumen	1	-	-	-					
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Buku saku urusan perindustrian, perdagangan, koperasi dan penanaman modal	dokumen	1	1	1	1		520.70	APBD Kab	Kab. Sleman	Bappeda
		Dokumen pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP)	dokumen	1	1	1	1					

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

			Dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan urusan perindustrian, perdagangan, koperasi dan penanaman modal sebagai bahan masukan RKPD tahun n+2	dokumen	1	1	1	1					
			Dokumen rancangan kebijakan pembangunan urusan perindustrian, perdagangan, koperasi dan penanaman modal sebagai bahan masukan RPJMD Tahun 2021-2026	dokumen	1	-	-	-					
			Dokumen rancangan kebijakan pembangunan jangka panjang urusan perindustrian, perdagangan, koperasi dan penanaman modal sebagai bahan masukan RPJPD Tahun 2025-2045	dokumen	1	-	-	-					
Koordinasi Perencanaan Bidang infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Buku saku urusan pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman	dokumen	1	1	1	1		202.56	APBD Kab	Kab. Sleman	Bappeda	
		Dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan urusan pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman sebagai bahan masukan RKPD tahun n+2	dokumen	1	1	1	1						
		Dokumen rancangan kebijakan pembangunan urusan pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman sebagai bahan masukan RPJMD Tahun 2021-2026	dokumen	1	-	-	-						
		Dokumen rancangan kebijakan pembangunan jangka panjang urusan pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman sebagai bahan masukan RPJPD Tahun 2025-2045	dokumen	1	-	-	-						
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Buku saku urusan pertanahan dan penataan ruang	dokumen	1	1	1	1		667.61	APBD Kab	Kab. Sleman	Bappeda	
		Dokumen rancangan kebijakn pembangunan urusan pertanahan dan penataan ruang sebagai bahan masukan RPJMD Tahun 2021-2026	dokumen	1	-	-	-						
		Dokumen rancangan kebijakan pembangunan jangka panjang urusan pertanahan dan penataan ruang sebagai bahan masukan RPJPD Tahun 2025-2045	dokumen	1	-	-	-						
		Dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan urusan pertanahan dan penataan ruang sebagai bahan masukan RKPD tahun n+2	dokumen	1	1	1	1						
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Dokumen updating data dan evaluasi sanitasi	dokumen	1	1	1	1		157.12	APBD Kab	Kab. Sleman	Bappeda	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

			Laporan pelaksanaan kebijakan sanitasi dan air minum	dokumen	1	1	1	1					
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Buku saku urusan lingkungan hidup dan perhubungan	dokumen	1	1	1	1		1,231.58	APBD Kab	Kab. Sleman	Bappeda
			Dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan urusan lingkungan hidup dan perhubungan sebagai bahan masukan RKPDP tahun n+2	dokumen	1	1	1	1					
			Hibah Sekber Kartamantul	bulan	12	12	12	12					
			Dokumen rancangan kebijakan urusan lingkungan hidup dan perhubungan sebagai bahan masukan RPJMD Tahun 2021-2026	dokumen	1	-	-	-					
			Dokumen rancangan kebijakan pembangunan jangka panjang urusan lingkungan hidup dan perhubungan sebagai bahan masukan RPJPD Tahun 2025-2045	dokumen	1	-	-	-					
Penelitian dan Pengembangan Daerah													
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan pengembangan partisipasi masyarakat	Laporan kegiatan	dokumen	1	1	1	1		235.00	APBD Kab	Kab. Sleman	Bappeda
			Pemberian rekomendasi izin KKN	bulan	12	12	12	12					
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Dimensi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat inovatif	Laporan analisis dan olah data inovasi daerah	dokumen	1	1	1	1		1,425.00	APBD Kab	Kab. Sleman	Bappeda
		Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan pelaksanaan pembinaan sertifikasi hak kekayaan intelektual	dokumen	1	1	1	1		435.00	APBD Kab	Kab. Sleman	Bappeda
			Sosialisasi HKI	kali	1	1	1	1					
	Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintah dan pengkajian peraturan	Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan otonomi daerah	Buku Jurnal	dokumen	1	1	1	1		1,919.00	APBD Kab	Kab. Sleman	Bappeda
			Dokumen Dewan Litbang	dokumen	1	1	1	1					
			Dokumen Inventarisasi hasil penelitian di Kabupaten Sleman	dokumen	1	1	1	1					
			Dokumen penelitian tematis hasil seleksi proposal perguruan tinggi tahun n	dokumen	1	1	1	1					
			Dokumen Rencana Induk Kelitbangan 2023 - 2026	dokumen	1	-	-	-					
		Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Laporan kegiatan		-	-	-	-			APBD Kab	Kab. Sleman	Bappeda
			Pelayanan pemberian rekomendasi penelitian bagi WNA		-	-	-	-					

Program Kepegawaian Daerah

Pengembangan Kompetensi ASN	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Izin belajar dan tugas belajar Laporan selesai pendidikan Pemantauan alumni tugas belajar Pemantauan perkembangan studi peserta TB/IB Penyaluran biaya pengembangan SDM	surat; dokumen; kali; orang	50 surat 50 surat 1 dok 5 kali 24 orang	50 surat 50 surat 1 dok 5 kali 24 orang	50 surat 50 surat 1 dok 5 kali 24 orang	50 surat 50 surat 1 dok 5 kali 24 orang		135.22	APBD Kab	Kab. Sleman	BKPP
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pemantauan kinerja pegawai Sosialisasi Pelaporan penilaian kinerja pegawai	OPD	48 48 48	48 48 48	48 48 48	48 48 48		439.52	APBD Kab	Kab. Sleman	BKPP
	Pembinaan Disiplin ASN	Kompilasi LHKPN Kab Sleman Pemantauan dan pembinaan disiplin pegawai Pemantauan kinerja pegawai Pembinaan perkawinan dan konseling pegawai Pengujian kesehatan bagi PNS yang mengalami gangguan jasmani dan rohani Pertimbangan penyelesaian kasus Uji narkoba	orang; OPD; kasus	144 orang 48 OPD 48 OPD 80 orang 15 orang 15 kasus 100 orang	144 orang 48 OPD 48 OPD 90 orang 15 orang 15 kasus 100 orang	144 orang 48 OPD 48 OPD 100 orang 15 orang 15 kasus 100 orang	144 orang 48 OPD 48 OPD 110 orang 15 orang 15 kasus 100 orang		239.40	APBD Kab	Kab. Sleman	BKPP
Pengembangan Kompetensi Teknis	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Balon calon peserta UPKP Balon peserta ujian dinas Kajian pengangkatan atau pemberhentian, KP atau alih fungsi JFT Pelaksanaan seleksi substansi calon kepek Pelaksanaan ujikom calon pejabat Seleksi JPT Pratama	orang; dokumen	8 orang 103 orang 1 dok 40 orang 100 orang 7 orang	6 orang 33 orang 1 dok 40 orang 100 orang 7 orang	5 orang 6 orang 1 dok 40 orang 100 orang 2 orang	5 orang 3 orang 1 dok 40 orang 100 orang 3 orang		838.70	APBD Kab	Kab. Sleman	BKPP
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Formasi Non PNS	OPD	48 45	49 45	50 45	51 45		217.32	APBD Kab	Kab. Sleman	BKPP
Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Bimtek infografis Bimtek pengelolaan desk pelayanan informasi public Bimtek pengelolaan template website danc-panel Buku pedoman pembinaan Pelaksanaan scanning dokumen, editing dan upload hasil scanning Pembinaan, pemantauan dan penatan file Pemeliharaan tata naskah kepegawaian Penataan dokumen kepegawaian Pengelolaan PPID Perangkat daerah Pengelolaan website Penyusunan FIP pegawai baru	orang; file; dokumen; bulan	16 orang 16 orang 16 orang 30 file 6000 dok 2000 file 2500 dok 2500 dok 12 bulan 12 bulan 1000 dok	16 orang 16 orang 16 orang 30 file 6000 dok 2000 file 2500 dok 2500 dok 12 bulan 12 bulan 1000 dok	16 orang 16 orang 16 orang 30 file 6000 dok 2000 file 2500 dok 2500 dok 12 bulan 12 bulan 1000 dok	16 orang 16 orang 16 orang 30 file 6000 dok 2000 file 2500 dok 2500 dok 12 bulan 12 bulan 1000 dok		111.99	APBD Kab	Kab. Sleman	BKPP
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Penyajian data kepegawaian Rekonsiliasi/ pengembangan database Updating database kepegawaian Workshop pengelolaan simpeg instansi	buku; data; orang	48 buku 500 data 3500 data 48 orang	49 buku 500 data 3500 data 48 orang	50 buku 500 data 3500 data 48 orang	51 buku 500 data 3500 data 48 orang		48.93	APBD Kab	Kab. Sleman	BKPP

Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Kartu pengenalan pegawai Pengusulan dan penetapan Karis/Karsu Pengusulan dan penetapan Karpeg Pengusulan dan penetapan Taspen Rekomendasi Taperum Rekomendasi KGB Rekomendasi cuti Pengelolaan TPP Dokumentasi rekapitulasi kenaikan gaji berkala PNS Sosialisasi bidang kepegawaian Penganugerahan SLKS Pengusulan, penetapan JKK dan JKM Bimtek pengelolaan TPP	buah; orang; rekom; kali; OPD	1000 buah 100 buah 20 buah 20 orang 30 rekom 23 orang 200 orang 12 kali 48 OPD 2 kali 250 orang 5 orang -	1000 buah 100 buah 20 buah 20 orang 30 rekom 23 orang 200 orang 12 kali 48 OPD 2 kali 250 orang 5 orang -	1000 buah 100 buah 20 buah 20 orang 30 rekom 23 orang 200 orang 12 kali 48 OPD 2 kali 250 orang 5 orang -	1000 buah 100 buah 20 buah 20 orang 30 rekom 23 orang 200 orang 12 kali 48 OPD 2 kali 250 orang 5 orang -		142.03	APBD Kab	Kab. Sleman	BKPP
Mutasi dan Promosi ASN		Pengelolaan Mutasi ASN	Pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat struktural dan kepala sekolah Rekomendasi dan penugasan guru sebagai kepala sekolah Seleksi PNS mutasi antar daerah masuk dan keluar SK penempatan JFU dan JFT	orang; SK	107 orang 30 orang 100 orang 400 SK	117 orang 34 orang 100 orang 400 SK	92 orang 24 orang 100 orang 400 SK	105 orang 29 orang 100 orang 400 SK		91.47	APBD Kab	Kab. Sleman	BKPP
		Pengelolaan Promosi ASN	Pertimbangan jabatan dan kepangkatan PNS	orang	300	300	300	300		593.25	APBD Kab	Kab. Sleman	BKPP
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Data administrasi calon purna tugas Data administrasi CPNS Data administrasi kenaikan pangkat Data administrasi penempatan pegawai Data administrasi pengangkatan, pemindahan pejabat struktural dan tugas tambahan guru sebagai kep sek Nota persetujuan teknis dan penetapan SK kenaikan pangkat Nota persetujuan teknis dan penetapan SK peninjauan masa kerja Pengendalian dalam penetapan angka kredit bagi JFT	orang	548 orang 100 orang 800 orang 500 orang 173 orang 800 orang 10 orang 900 orang	548 orang 100 orang 1500 orang 500 orang 173 orang 1500 orang 10 orang 900 orang	548 orang 100 orang 1500 orang 500 orang 173 orang 1500 orang 10 orang 900 orang	548 orang 100 orang 1500 orang 500 orang 173 orang 1500 orang 10 orang 900 orang		251.59	APBD Kab	Kab. Sleman	BKPP
Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Pendaftar dan seleksi PNS Pendaftar dan seleksi PPPK Penetapan formasi ASN Penetapan formasi PPPK	orang; dokumen	5750 orang 3000 org 1 dok 1 dok	5750 orang 3500 org 1 dok 1 dok	6000 orang 4000 org 1 dok 1 dok	6000 orang 4500 org 1 dok 1 dok		4,827.11	APBD Kab	Kab. Sleman	BKPP
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Pembekalan PNS calon purna tugas Penerbitan KARIP dan TASPEN Penerbitan SK pensiun	orang	515 orang 515 orang 515 orang	548 orang 548 orang 548 orang	633 orang 633 orang 633 orang	533 orang 533 orang 533 orang		176.36	APBD Kab	Kab. Sleman	BKPP

		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Evaluasi perumusan program kerja/rakorkab KORPRI MTQ KORPRI Pembinaan dan menjangkau aspirasi unit KORPRI Pembinaan kelompok kesenian KORPRI Penerbitan buletin KORPRI Pengelolaan dana sosial anggota KORPRI Pengelolaan dan penyampaian tali asih KORPRI Peringatan HUT KORPRI Family gathering Penyelenggaraan kegiatan olah raga	kali; unit; kel; bulan	1 kali 1 kali 60 unit 3 kel 1 kali 12 bulan 2 kali 1 kali 1 kali 1 kali	1 kali 1 kali 60 unit 3 kel 1 kali 12 bulan 2 kali 1 kali 1 kali 1 kali	1 kali 1 kali 60 unit 3 kel 1 kali 12 bulan 2 kali 1 kali 1 kali 1 kali	1 kali 1 kali 60 unit 3 kel 1 kali 12 bulan 2 kali 1 kali 1 kali 1 kali		307.34	APBD Kab	Kab. Sleman	BKPP
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia													
	Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Pengukuran tingkat kepuasan pengguna alumni diklat Penyempurnaan program diklat dan data AKD Penyusunan Kurikulum Diklat Presentasi Hasil Diklat	dokumen; kurikulum; presentasi	1 dokumen - 5 kurikulum 2 presentasi	1 dokumen 1 dokumen 5 kurikulum 2 presentasi	1 dokumen 1 dokumen 5 kurikulum 2 presentasi	1 dokumen 1 dokumen 5 kurikulum 2 presentasi		244.20	APBD Kab	Kab. Sleman	BKPP
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Pengiriman diklat teknis Pengiriman pelatihan dan ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa Penyelenggaraan diklat bahasa jawa bagi guru SD Penyelenggaraan diklat manajemen kepegawaian Penyelenggaraan diklat manajemen pelayanan Penyelenggaraan diklat analisis abatan Penyelenggaraan orientasi CPNS Penyelenggaraan diklat manajemen kearsipan Penyelenggaraan diklat pengelolaan BMD	orang	100 orang 60 orang 30 orang 30 orang 30 orang - 300 orang 30 orang 30 orang	100 orang 60 orang 30 orang 30 orang 30 orang - 300 orang 30 orang 30 orang	100 orang 60 orang 30 orang 30 orang 30 orang - 300 orang 30 orang 30 orang	100 orang 600 orang 30 orang 30 orang - 30 orang - - -		7,432.52	APBD Kab	Kab. Sleman	BKPP
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Pengiriman Pelatihan Calon Kepala Sekolah Pengiriman Pelatihan Calon Pengawas Sekolah Pengiriman diklat fungsional Pengiriman diklat fungsional auditor	orang	- 30 orang 40 orang - 5 orang 10 orang	32 orang - 50 orang - 5 orang 10 orang	- 30 orang 60 orang - 5 orang 10 orang	32 orang - 70 orang - 5 orang 10 orang		37,441.00	APBD Kab	Kab. Sleman	BKPP
			Pengiriman diklatpim II Pengiriman diklatpim TK III Pengiriman diklatpim IV Pengiriman Latihan Dasar (prajabatan) CPNS golongan II dan III Pengiriman diklat tenaga kependidikan Pengiriman diklat tenaga kesehatan	orang	40 300 60 50	41 300 60 50	42 300 60 50	43 300 60 50					

16.9. Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.

Program Pendaftaran Penduduk

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pendataan penduduk non permanen dan rentan adminduk	Pendataan penduduk non permanen	dokumen	2	3	4	5			APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Dukcapil	
		Penanganan penduduk rentan administrasi kependudukan	dokumen	1	1	1	1						
		Pemutakhiran Kartu Keluarga (KK)	KK	10000	10000	10000	10000						
	Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	KTP-el	keping	50000	50000	50000	50000				APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Dukcapil
		Kartu Keluarga (KK)	lembar	60000	60000	60000	60000						
		Kartu Identitas Anak (KIA)	keping	30000	30000	30000	30000						
		Surat Keterangan Tinggal Tetap (SKTT)	lembar	50	50	50	50						
		Layanan jemput bola	kali	50	50	50	50						
		Layanan sistem paket	jenis	2	2	2	2						
		Pembinaan adminduk bagi pelajar SMA/SMK/MA	kali	10	10	10	10						
Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	Sisir Adminduk	kali	17	17	17	17							
	Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI (SKPWNI)	permohonan	10000	10000	10000	10000				APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Dukcapil	
	Surat Keterangan Datang Penduduk WNI (SKDWNI)	permohonan	7000	7000	7000	7000							

Program Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan Sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Akta kelahiran	akta	12000	12000	12000	12000			APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Dukcapil	
		Akta kelahiran bagi keluarga miskin	akta	300	300	300	300						
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Akta kematian	akta	8000	8000	8000	8000				APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Dukcapil
		Akta kematian bagi keluarga miskin	akta	10	10	10	10						
	Pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak	permohonan	55	55	55	55							

Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Akta perceraian	akta	100	100	100	100			APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Dukcapil
		Akta perkawinan	akta	550	550	550	550					
		Akta perkawinan bagi keluarga miskin	akta	10	10	10	10					
		Pelaporan perceraian islam	laporan									
		Pelaporan perkawinan islam	laporan									

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Bimtek Aplikasi Petugas Register Desa Pelaksanaan SIAK	orang	86	86	86	86			APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Dukcapil
		Pelaksanaan SIAK	PD	18	18	18	18					
	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumentasi inovasi pelayanan	paket	2	2	2	2				APBD Kab	Kab. Sleman
Monitoring Pemanfaatan Data Kependudukan		lokasi	14	14	14	14						
Pemanfaatan data kependudukan		lembaga	10	10	10	10						

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Digitalisasi Akta	akta	50,000	50,000	50,000	50,000		APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Dukcapil
			Monitoring dan Evaluasi Tertib Adminduk	padukuhan	17	17	17	17				
			Pembinaan Petugas Register Desa	desa	86	86	86	86				
			Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	bulan	12	12	12	12				
			Sosialisasi	kali	20	20	20	20				

Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Penyusunan Profil Kependudukan		Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/ Kota	Buku Agregat Kependudukan Semester I dan II	dokumen	1	1	1	1		APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Dukcapil
			Buku profil perkembangan kependudukan	dokumen	1	1	1	1				
			Indikator Kependudukan	dokumen	1	1	1	1				
			Penjilidan dokumen akta capil	buku	500	500	500	500				

16.10. Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.

Program Informasi dan Komunikasi Publik

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	dokumen	3	3	3	3		9,701.86	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	dokumen	5	5	5	5					
		Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	layanan	2	2	2	2					
		Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	dokumen	1	1	1	1					
		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	orang	50	50	50	50					
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	dokumen	2	2	2	2					

TUJUAN GLOBAL 17. MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Program/Kegiatan/Rincian Output	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2023	2024	2025	2026	2027				
1	2	3					4	5	6	7

PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

17.1. Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Dokumen evaluasi target dan penerimaan PAD	dokumen	12	12	12	12		APBD Kab	Kab. Sleman	BKAD
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Dokumen kajian potensi pajak dan retribusi daerah	dokumen	2	2	2	2		APBD Kab	Kab. Sleman	BKAD
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Sosialisasi paket regulasi tentang pajak daerah	kali	8	8	8	8		APBD Kab	Kab. Sleman	BKAD

	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Administrasi PBB Analisis data PBB P2 Cetak SPPT PBB P2 Pemantauan dan evaluasi penyampaian SPPT PBB P2 Pemuthakiran dan pemeliharaan aplikasi Pemuthakiran data PBB Penyampaian SPPT PBB yang diterbitkan secara masal Penyusunan SK Bupati tentang NJOP PBB P2 2021 Signature tanda tangan elektronik SK NJOP Verifikasi SPPT PBB P2	dokuem; SPPT; kali; paket; OP	86 Dokumen 1 Dokumen 630000 SPPT 34 kali 1 paket 20000 OP 630000 SPPT 1 Dokumen paket 1 Dokumen 630000 SPPT	86 Dokumen 1 Dokumen 630000 SPPT 34 kali 1 paket 20000 OP 630000 SPPT 1 Dokumen paket 1 Dokumen 630000 SPPT	86 Dokumen 1 Dokumen 630000 SPPT 34 kali 1 paket 20000 OP 630000 SPPT 1 Dokumen paket 1 Dokumen 630000 SPPT	86 Dokumen 1 Dokumen 630000 SPPT 34 kali 1 paket 20000 OP 630000 SPPT 1 Dokumen paket 1 Dokumen 630000 SPPT			APBD Kab	Kab. Sleman	BKAD
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kajian pengelolaan tentang BPHTB Laporan hasil penelitian kantor dan lapangan Tercapainya target penerimaan BPHTB Validasi SSPD BPHTB	dokumen; laporan; Rp; OP	1 Dokumen 2000 laporan Rp190000000 0 13000 OP	1 Dokumen 2000 laporan Rp190000000 0 13000 OP	1 Dokumen 2000 laporan Rp190000000 0 13000 OP	1 Dokumen 2000 laporan Rp190000000 0 13000 OP			APBD Kab	Kab. Sleman	BKAD
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Surat Ketetapan pajak daerah	SKPD	24250	24250	24250	24250			APBD Kab	Kab. Sleman	BKAD
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	laporan data wajib pajak Pelayanan wajib pajak Wajib pajak baru	jenis; bulan; wp	6 jenis 12 bulan 600 wp	6 jenis 12 bulan 600 wp	6 jenis 12 bulan 600 wp	6 jenis 12 bulan 600 wp			APBD Kab	Kab. Sleman	BKAD
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Pembinaan Wp Verifikasi SPTPD	kali; SPTPD	80 Kali 150 SPTPD	80 Kali 150 SPTPD	80 Kali 150 SPTPD	80 Kali 150 SPTPD			APBD Kab	Kab. Sleman	BKAD
	Penagihan Pajak Daerah	Bahan perhitungan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Intensifikasi penagihan PBB P2 di 86 desa Laporan perkembangan piutang pajak daerah Laporan realisasi pajak daerah Pemanggilan wp daerah Pembayaran PBB P2 Panutan Pemberian penghargaan lunas PBB P2 Pemberian penghargaan lunas PBB P2 Pemberian penghargaan lunas PBB P2	dokumen; kali; WP; kec; desa; dukuh	3 Dokumen 172 kali 12 Dokumen 12 Dokumen 18 kali 180 WP 5 Kec 29 Desa 500 Dukuh	3 Dokumen 172 kali 12 Dokumen 12 Dokumen 18 kali 180 WP 5 Kec 29 Desa 500 Dukuh	3 Dokumen 172 kali 12 Dokumen 12 Dokumen 18 kali 180 WP 5 Kec 29 Desa 500 Dukuh	3 Dokumen 172 kali 12 Dokumen 12 Dokumen 18 kali 180 WP 5 Kec 29 Desa 500 Dukuh			APBD Kab	Kab. Sleman	BKAD
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Surat keputusan keberatan, pengurangan keringanan, pnghapusan sanksi administrasi pajak daerah	SK	500	500	500	500			APBD Kab	Kab. Sleman	BKAD
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen pemeriksaan WP dan dokumen pemeriksaan KAP	LHP	28	28	28	28			APBD Kab	Kab. Sleman	BKAD
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen Evaluasi Target dan Penerimaan PAD	dokumen	12	12	12	12			APBD Kab	Kab. Sleman	BKAD

17.6. Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih Program Aplikasi Informatika

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

	Pengelolaan Nama <i>Domain</i> yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub <i>Domain</i> di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	unit	36	36	36	36		11,556.38	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Penatalaksanaan dan Pengawasan Egovernment dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan EGovernment dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	1	1	1		36,002.10	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	unit	1	1	1	1					
			Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	dokumen	14	14	14	14					
			Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	PD	50	50	50	50					
			Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	unit	1	1	1	1					
			Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	dokumen	1	1	1	1					
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi														
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	PD	48	48	48	48		9,261.15	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Komunikasi dan Informatika
17.11. Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2021														
Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan														
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Distribusi Minuman beralkohol yang dimonitor	ijin	15	15	15	15		277.82	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Ijin usaha perdagangan yang dimonitor	ijin SIUP	60	60	60	60					
				TDG yang dimonitor	TDG	20	20	20	20					
				Toko Modern yang ditertibkan	toko	15	15	15	15					
	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen B2 (PB2)	Laporan monitoring pengawasan pangan dan bahan berbahaya	dokumen	1	1	1	1		389.58	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Lokasi pengawasan pangan dan bahan berbahaya	lokasi	2	2	2	2					
				Lokasi pengawasan pangan dan bahan berbahaya	PKL	27	27	27	27					
				Sosialisasi bahan berbahaya	pasar	3	3	3	3					

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelayanan Perijinan SITU/SPTD	SPTD	2200	2200	2200	2200		505.35	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Pemungutan retribusi secara online	pasar	15	15	15	15					
			Pencapaian target PAD Pendampingan administrasi bagi pengelola retribusi	%	100	100	100	100					
Program Pengembangan Ekspor													
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Laporan realisasi ekspor dari pelaku usaha Kabupaten Sleman selama satu tahun berjalan	dokumen	1	1	1	1		60.41	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Pameran Dagang Nasional	Keikutsertaan dalam APKASI Otonomi Expo 2021	kali	1	1	1	1		1,441.64	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Keikutsertaan dalam Promosi Bersama 2021 Pameran Virtual	kali	1	1	1	1					
			Keikutsertaan dalam pameran IFEX	kali	1	1	1	1					
		Peningkatan Citra Produk Ekspor	Laporan IMA Chapter Sleman	kali	1	1	1	1		382.62	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Temu Bisnis	kali	1	1	1	1					
			Virtual Business Matching	kali	1	1	1	1					
		Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Fasilitasi paguyuban eksportir	kali	1	1	1	1		329.59	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Pendampingan pengembangan ekspor	kali	1	1	1	1					
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen													
	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera dan tera ulang	Persentase UTP yang bertanda Tera Sah	%	20	21	22	23		2,192.44	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri													
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Kajian omzet pasar	omzet	1	1	1	1		1,544.99	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Kajian pengembangan pasar rakyat	dokumen	1	1	1	1					
			Pemasaran pasar-pasar tradisional	bulan	12	12	12	12					
			Pengelolaan radio pasar	pasar	2	2	2	2					
			Promosi pasar dimedia massa	kali	5	5	5	5					
			Undian belanja berhadiah di pasar	kali (22 pasar)	1	1	1	1					
		Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Keikutsertaan dalam Pameran HUT Dekranas	kali	1	1	1	1		4,354.69	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Penyelenggaraan Pameran PPD	kali	1	1	1	1					
			Peserta Pameran Jakarta Fair	UKM	21	21	21	21					

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

			Promosi tetap produk IKM di Galeri Upakarti Sleman	IKM	150	150	150	150					
			Promosi tetap produk IKM di Showroom Dekranasda	IKM	50	50	50	50					
		Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Pelatihan Manajemen Pemasaran	orang	20	20	20	20		4,076.37	APBD Kab	Kab. Sleman	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Pembinaan Paguyuban Ritel Sleman (PRS) UKM	orang	60	60	60	60					
			peserta pembinaan usaha dagang UKM	orang	30	30	30	30					
			peserta pembinaan usaha ritel lokal	orang	20	20	20	20					

Matriks 2b: Rencana Program/Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

Program/Kegiatan/Rincian Output (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2023	2024	2025	2026	2027				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH													
Target 1.2. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.													
INDIKATOR SDG's : '1.2.1 Tingkat kemiskinan daerah													
INDIKATOR SDG's : '1.2.2 Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.													
INDIKATOR SDG's : '1.3.1 (c) Presentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasar dan inklusifnya													
INDIKATOR SDG's : 1.3.1. (d) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/PKHnasional.													
1.6.4.201	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.6.4.201.1	Penyediaan Permakanan	orang	900	900	900	900	-	27,689,011,638	APBD	Bantul	Dinas Sosial
		1.6.4.201.12	Pemberian Layanan Rujukan	orang	10	10	10	10		32,324,687	APBD	Bantul	Dinas Sosial
		1.6.4.201.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang	20	20	20	20		626,789,299		Bantul	Dinas Sosial
		1.6.4.201.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	orang	20	20	20	20		7,986,367,117		Bantul	Dinas Sosial
		1.6.4.201.8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	50	50	50	50		325,078,000		Bantul	Dinas Sosial
		1.6.4.201.7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	50	50	50	50		367,513,425		Bantul	Dinas Sosial
		1.6.4.201.6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Orang	20	20	20	20		52,938,300		Bantul	Dinas Sosial
		1.6.4.201.5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Orang	100	100	100	100		121,081,0302		Bantul	Dinas Sosial
		1.6.4.201.4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang	5	5	5	5		64,121,582		Bantul	Dinas Sosial
		1.6.4.201.3	Penyediaan Alat Bantu	Orang	10	10	10	10		21,196,516		Bantul	Dinas Sosial
		1.6.4.201.2	Penyediaan Sandang	Orang	50	50	50	50		29,675,123		Bantul	Dinas Sosial
1.6.4.202	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1.6.4.202.5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Orang	20	20	20	20		262,151,811			

1.6.5 PROGRAM PERLINDUNG AN DAN JAMINAN SOSIAL													
1.6.5.202	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.6.5.202.4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Orang	200	200	200	200	2,220,004,713		Bantul	Dinas Sosial	
		1.6.5.202.3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Orang	100	100	100	100	7,816,032,040		Bantul	Dinas Sosial	
		1.6.5.202.2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Keluarga	20	20	20	20	33,217,592,738		Bantul	Dinas Sosial	
		1.6.5.202.1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Orang	100	100	100	100	4,174,248,563		Bantul	Dinas Sosial	
1.6.2 PROGRAM PEMBERDAYA AN SOSIAL													
1.6.2.202	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.6.2.202.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen	1	1	1	1	22,460,410		Bantul	Dinas Sosial	
1.6.2.203	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.6.2.203.5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Sertifikat	12	12	12	12	23,524,948		Bantul	Dinas Sosial	
		1.6.2.203.4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten	lembaga	60	60	60	60	915,717,643		Bantul	Dinas Sosial	
		1.6.2.203.3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	50	50	50	50	507,678,771				
		1.6.2.203.2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	17	17	17	17	536,775,046				

		1.6.2.203.1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	75	75	75	75	89,680,974		Bantul	Dinas Sosial
1.6.6 PROGRAM PENANGANAN BENCANA												
1.6.6.202	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	1.6.6.202.2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Orang	137	137	137	137	1,176,153,096		Bantul	Dinas Sosial
		1.6.6.202.1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kampung	36	36	36	36	269,510,904		Bantul	Dinas Sosial
1.6.6.201	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.6.6.201.5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Orang	15	15	15	15	46,035,558		Bantul	Dinas Sosial
		1.6.6.201.1	Penyediaan Makanan	Orang	100	100	100	100	184,512,042		Bantul	Dinas Sosial
		1.6.6.201.2	Penyediaan Sandang	Orang	50	50	50	50	49,426,367		Bantul	Dinas Sosial
		1.6.6.201.3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	desa	75	75	75	75	453,254,780		Bantul	Dinas Sosial
		1.6.6.201.4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Orang	4	4	4	4	39,790,630		Bantul	Dinas Sosial
1.2.2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGA N DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
1.2.2.201	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah	1.2.2.201.1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Unit	1	1	1	1	12,405,950,012		Bantul	Dinas Kesehatan
		1.2.2.201.2	Pembangunan Puskesmas	Unit	1	1	1	1	1,297,929,251		Bantul	Dinas Kesehatan
		1.2.2.201.6	Pengembangan Puskesmas	Unit	2	2	2	2	6,000,000,000		Bantul	Dinas Kesehatan
		1.2.2.201.9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Unit	165	165	165	165	1,050,000,000		Bantul	Dinas Kesehatan
		1.2.2.201.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	unit	3	4	4	5	1,550,000,000		Bantul	Dinas Kesehatan
		1.2.2.201.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	unit	500	600	700	800	1,490,000,000		Bantul	Dinas Kesehatan

		1.2.2.201.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Paket	45	45	45	45		2,984,575,000		Bantul	Dinas Kesehatan
		1.2.2.201.20	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan / alat penunjang medis fasilitas pelayanan kesehatan	unit	170	170	170	170		150,000,000		Bantul	Dinas Kesehatan
		1.2.2.201.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	paket	40	40	40	40		1,682,315,500		Bantul	Dinas Kesehatan
		1.2.2.201.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	paket	324	324	324	324		804,080,000		Bantul	Dinas Kesehatan
		1.2.2.201.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	keluarga	340,049	346,925	353,940	361,096		146,000,000		Bantul	Dinas Kesehatan
1.2.2.202	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.2.2.202.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Orang	14,565	15,388	16,156	16,964		17,288,096,999		Bantul	Dinas Kesehatan
		1.2.2.202.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orang	14,565	15,388	16,156	16,964		979,370,399		Bantul	Dinas Kesehatan
		1.2.2.202.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	15,958	14,656	15,388	16,156		882,945,399		Bantul	Dinas Kesehatan
		1.2.2.202.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Orang	56,954	57,381	57,811	58,244		1,062,900,399		Bantul	Dinas Kesehatan
		1.2.2.202.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	121,590	121,590	121,590	121,590		1,850,132,900		Bantul	Dinas Kesehatan
		1.2.2.202.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Orang	665,519	758,691	864,908	985,995		1,359,695,400		Bantul	Dinas Kesehatan
		1.2.2.202.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	135,226	136,579	137,945	139,324		1,375,520,400		Bantul	Dinas Kesehatan
		1.2.2.202.8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Orang	78,717	89,737	102,300	116,622		1,139,570,400		Bantul	Dinas Kesehatan
		1.2.2.202.9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Orang	26,722	30,463	34,728	39,590		1,139,570,400		Bantul	Dinas Kesehatan
		1.2.2.202.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	2,623	2,990	3,408	3,885		1,290,070,400		Bantul	Dinas Kesehatan
		1.2.2.202.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	11,800	11,786	11,786	11,786		1,285,270,400		Bantul	Dinas Kesehatan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

		1.2.2.202.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang	16,491	16,787	17,090	17,398		1,225,370,400	Bantul	Dinas Kesehatan
		1.2.2.202.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Dokumen	1	1	1	1		2,130,014,477	Bantul	Dinas Kesehatan
		1.2.2.202.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1	1	1		5,635,727,800	Bantul	Dinas Kesehatan
		1.2.2.202.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	1	1	1		555,459,000	Bantul	Dinas Kesehatan
		1.2.2.202.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	62	65	70	75		2,825,441,000	Bantul	Dinas Kesehatan
		1.2.2.202.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	1	1	1		2,390,344,080	Bantul	Dinas Kesehatan
		1.2.2.202.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional lainnya	Dokumen	1	1	1	1		14,500,000	Bantul	Dinas Kesehatan
		1.2.2.202.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1404	1404	1404	1404		1,295,244,080	Bantul	Dinas Kesehatan
		1.2.2.202.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Dokumen	9	9	9	9		830,000,000	Bantul	Dinas Kesehatan
		1.2.2.202.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Orang	1,329	1,234	1,200	1,150		2,355,307,300	Bantul	Dinas Kesehatan
		1.2.2.202.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	7	7	7	7		735,089,600	Bantul	Dinas Kesehatan
		1.2.2.202.32	Operasional pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	16,500	17,000	17,500	18,250		34,058,267,788	Bantul	Dinas Kesehatan
		1.2.2.202.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	1	1	1	1		2,457,705,500	Bantul	Dinas Kesehatan
1.2.2.203	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi	1.2.2.203.1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dokumen	1	1	1	1		1,945,420,500	Bantul	Dinas Kesehatan
1.2.2.204	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.2.2.204.3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Unit	4	5	6	7		645,885,280	Bantul	Dinas Kesehatan
1.2.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN											

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

1.2.5.201	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.2.5.201.1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	44	44	44	44	1,285,089,600	Bantul	Dinas Kesehatan
1.2.5.202	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.2.5.202.1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	1	1	1	1	975,675,000	Bantul	Dinas Kesehatan
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	1	1	1	1	2,479,400,000	Bantul	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN											
	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Puskesmas	17	17	17	17	10,749,050,000	Bantul	Dinas Kesehatan
1.2.2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											
1.2.2.102	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.2.2.102.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jiwa	80,000	80,000	80,000	80,000	185,000,000,000	Bantul	UPT JAMKESDA
		1.2.2.102.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Klaim	36000	36000	36000	36000	650,755,263	Bantul	UPT JAMKESDA
1.2.2.202	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.2.2.202.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	2	2	2	2	3,000,000,000	Bantul	UPT LABKESDA
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang	3	3	3	3	130,000,000	Bantul	Dikpora

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

		1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Ruang	4	4	4	4	130,000,000		Bantul	Dikpora
		1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	2	2	2	2	130,000,000		Bantul	Dikpora
		1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	6	6	6	6	130,000,000		Bantul	Dikpora
		1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	1	1	1	1	211,000,000		Bantul	Dikpora
		1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Unit	1	1	1	1	211,000,000		Bantul	Dikpora
		1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Peserta Didik	58590	58590	58590	58590	194,791,337,916		Bantul	Dikpora
		1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Satuan Pendidikan	1	1	1	1	320,837,336		Bantul	Dikpora
		1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta Didik	250	250	250	250	5,373,526,800		Bantul	Dikpora
		1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	1	1	1	1	40,000,000		Bantul	Dikpora
		1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	365	365	365	365	69,760,084		Bantul	Dikpora
		1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Satuan Pendidikan	365	365	365	365	40,000,000		Bantul	Dikpora
		1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang	1	1	1	1	40,000,000		Bantul	Dikpora
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang	1	1	1	1	30,000,000		Bantul	Dikpora
		1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	unit	1	1	1	1	30,000,000		Bantul	Dikpora
		1.01.02.2.02.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	unit	1	1	1	1	30,000,000		Bantul	Dikpora
		1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	1	1	1	1	281,840,000		Bantul	Dikpora
		1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Ruang	1	1	1	1	40,000,000		Bantul	Dikpora
		1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang	1	1	1	1	40,000,000		Bantul	Dikpora
		1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Ruang	1	1	1	1	40,000,000		Bantul	Dikpora

		1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	1	1	1	1		40,000,000	Bantul	Dikpora
		1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	1	1	1	1		1,128,000,000	Bantul	Dikpora
		1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Paket	1	1	1	1		1,128,000,000	Bantul	Dikpora
		1.01.02.2.02.33	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Paket	1	1	1	1		40,000,000	Bantul	Dikpora
		1.01.02.2.02.34	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Paket	1	1	1	1		40,000,000	Bantul	Dikpora
		1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	1	1	1	1		40,000,000	Bantul	Dikpora
		1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta Didik	24790	24790	24790	24790		103,744,441,040	Bantul	Dikpora
		1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Satuan Pendidikan	95	95	95	95		45,000,000	Bantul	Dikpora
		1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta Didik	500	500	500	500		4,779,351,200	Bantul	Dikpora
		1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	1	1	1	1		40,000,000	Bantul	Dikpora
		1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	95	95	95	95		185,200,000	Bantul	Dikpora
		1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Satuan Pendidikan	95	95	95	95		40,000,000	Bantul	Dikpora
		1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang	1	1	1	1		40,000,000	Bantul	Dikpora
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Unit	1	1	1	1		40,000,000	Bantul	Dikpora
		1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit	1	1	1	1		40,000,000	Bantul	Dikpora
		1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Unit	1	1	1	1		40,000,000	Bantul	Dikpora
		1.01.02.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Paket	1	1	1	1		1,128,000,000	Bantul	Dikpora
		1.01.02.2.03.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Paket	1	1	1	1		1,128,000,000	Bantul	Dikpora
		1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Peserta Didik	1	1	1	1		40,000,000	Bantul	Dikpora

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

		1.01.02.203.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Paket	1	1	1	1	500,000,000		Bantul	Dikpora
		1.01.02.203.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Peserta Didik	450	450	450	450	1,175,000,000		Bantul	Dikpora
		1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Satuan Pendidikan	1	1	1	1	62,000,000		Bantul	Dikpora
		1.01.02.203.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Orang	1	1	1	1	40,000,000		Bantul	Dikpora
		1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan Pendidikan	1295	1295	1295	1295	2,487,351,200		Bantul	Dikpora
		1.01.02.203.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Satuan Pendidikan	1295	1295	1295	1295	124,437,000,000		Bantul	Dikpora
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.204.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Unit	1	1	1	1	40,000,000		Bantul	Dikpora
		1.01.02.2.04.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Unit	1	1	1	1	40,000,000		Bantul	Dikpora
		1.01.02.204.07	Pengadaan Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Paket	1	1	1	1	40,000,000		Bantul	Dikpora
		1.01.02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Paket	1	1	1	1	1,301,487,084		Bantul	Dikpora
		1.01.02.204.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal / Kesetaraan	Paket	1	1	1	1	40,000,000		Bantul	Dikpora
		1.01.02.204.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan	Peserta Didik	2592	2592	2592	2592	23,887,851,200		Bantul	Dikpora
		1.01.02.204.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan	1	1	1	1	57,000,000		Bantul	Dikpora
		1.01.02.204.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Orang	1	1	1	1	40,000,000		Bantul	Dikpora
		1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan	27	27	27	27	45,000,000		Bantul	Dikpora

		1.01.02.204.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan	27	27	27	27		40,000,000		Bantul	Dikpora
1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN													
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik & Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, & Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen	1	1	1	1		1,091,372,035,000		Bantul	Dikpora
		1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Laporan	1	1	1	1		881,175,600		Bantul	Dikpora
2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK													
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dokumen	2	2	2	2		607,745,891.00		Bantul	Disdukcapil
		2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Dokumen	2	2	2	2		1,010,932,254.00		Bantul	Disdukcapil
		2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	12	12	12	12		814,598,436.00		Bantul	Disdukcapil
		2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Dokumen	2	2	2	2		642,338,289.00		Bantul	Disdukcapil
2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL													
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	2 12 03 2.01 01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	27800	27900	28000	28600		915,711,850.00		Bantul	Disdukcapil
		2 12 03 2.01 02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil		30000	31000	32000	33000		790,272,827.00		Bantul	Disdukcapil

2 12 03 2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	2 12 03 2.02 04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Laporan	12	12	12	12	386,685,196.00		Bantul	Disdukcapil
2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN												
2 12 04 2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	2 12 04 2.01 02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	3	3	3	3	197,665,391.00		Bantul	Disdukcapil
		2 12 04 2.01 03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Laporan	12	12	12	12	984,502,024.00		Bantul	Disdukcapil
2 12 04 2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 12 04 2.03 04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	2	2	2	2	516,172,227.00		Bantul	Disdukcapil
		2 12 04 2.03 05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	4	4	4	4	600,754,696.00		Bantul	Disdukcapil
		2 12 04 2.03 07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Laporan	12	12	12	12	43,164,417.00		Bantul	Disdukcapil
2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)												
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Uppks)	Laporan	1	1	1	1	717,370,500		Bantul	DP3AP2KB

		2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang	400	400	400	500	1,496,391,230	Bantul	DP3AP2KB
		2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang	1218	1218	1218	1218	717,000,000	Bantul	DP3AP2KB
		2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Laporan	1	1	1	1	530,800,000	Bantul	DP3AP2KB
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.02.01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Organisasi	4	4	4	4	593,200,000	Bantul	DP3AP2KB
		2.14.04.2.02.02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	1	1	1	1	779,612,985	Bantul	DP3AP2KB

		2.14.04.2.02.03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Organisasi	4	4	4	4	484,566,660		Bantul	DP3AP2KB
		2.14.04.2.02.04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Laporan	1	1	1	1	473,000,000			
2.14.02 PROGRAM PENGENDALI AN PENDUDUK												
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kualitas Penduduk	2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	10	10	10	10	48,044,950		Bantul	DP3AP2KB
		2.14.02.2.01.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Laporan	12	12	12	12	99,000,000		Bantul	DP3AP2KB
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.14.02.2.02.02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Dokumen	3	3	3	3	154,000,000		Bantul	DP3AP2KB
		2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Dokumen	1	1	1	1	107,200,000		Bantul	DP3AP2KB
		2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	1	1	1	1	107,200,000		Bantul	DP3AP2KB
		2.14.02.2.02.14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Laporan	1	1	1	1	326,500,000		Bantul	DP3AP2KB
2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)												

2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPk kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi	9	3	6	19	582,500,000	Bantul	DP3AP2KB
		2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPk sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dokumen	1	1	1	1	2,242,500,000	Bantul	DP3AP2KB
		2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPk Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	1	1	1	1	1,708,751,250	Bantul	DP3AP2KB
		2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPk melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	1	1	1	1	1,155,000,000	Bantul	DP3AP2KB
		2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPk	Laporan	1	1	1	1	778,870,385	Bantul	DP3AP2KB
		2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPk	Laporan	1	1	1	1	1,612,000,000	Bantul	DP3AP2KB
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPk untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Laporan	12	12	12	12	1,453,300,000	Bantul	DP3AP2KB
		2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	34	34	34	34	4,692,448,110	Bantul	DP3AP2KB
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	12	12	12	12	248,000,000	Bantul	DP3AP2KB

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

		2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	750	750	800	900		336,000,000		Bantul	DP3AP2KB
		2.14.03.2.03.04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Laporan	1	1	1	1		50,000,000		Bantul	DP3AP2KB
		2.14.03.2.03.06	Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB	Unit	1	1	2	7		130,000,000		Bantul	DP3AP2KB
		2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	1	1	1	1		142,000,000		Bantul	DP3AP2KB
		2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Orang	10	10	20	20		113,000,000		Bantul	DP3AP2KB
		2.14.03.2.03.10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Orang	17	17	17	17		176,000,000		Bantul	DP3AP2KB
		2.14.03.2.03.13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Orang	50	50	65	75		390,000,000		Bantul	DP3AP2KB
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi	25	25	35	50		373,149,775		Bantul	DP3AP2KB
		2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kampung KB	47	47	47	47		267,600,000		Bantul	DP3AP2KB
		2.14.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Laporan	1	1	1	1		364,047,130		Bantul	DP3AP2KB

2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYA AN LEMBAGA KEMASYARAK ATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT													
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	1	1	1	1	14,088,894,157		Bantul	DPMK	
		2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	lembaga	3	3	3	3	2,050,000,000		Bantul	DPMK	
		2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	1	1	1	1	720,251,000		Bantul	DPMK	
		2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	1	1	1	1	1,076,992,500		Bantul	DPMK	
		2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	1	1	1	1	3,250,000,000		Bantul	DPMK	
1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN													

1.04.03.2.03	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1.04.03.2.03.01	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Dokumen	2	2	2	2	400,000,000		Bantul	DPUPKP
		1.04.03.2.03.02	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Unit	190	190	190	190	18,961,876,559		Bantul	DPUPKP
		1.04.03.2.03.06	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Ha	50	50	50	50	7,744,208,495		Bantul	DPUPKP
		1.04.03.2.03.08	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Unit	100	100	100	100	6,000,000,000		Bantul	DPUPKP
1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH												
1.04.04.2.01	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.04.04.2.01.01	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Unit	100	110	120	130	10,084,832,515		Bantul	DPUPKP
2.9.3 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT												
2.9.3.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga	2.9.3.2.01.1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan	Laporan	3	3	3	3	329,435,120		Bantul	DKPP
		2.9.3.2.01.4	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen	12	12	12	12	283,000,000		Bantul	DKPP
		2.9.3.2.01.5	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Unit	18	18	18	18	97,650,000		Bantul	DKPP

			Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Unit	18	18	18	18		57,000,000	Bantul	DKPP
2.9.3.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	2.9.3.2.02.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan	3	3	3	3		198,750,000	Bantul	DKPP
		2.9.3.2.02.3	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton	70	70	70	70		2,900,000,000	Bantul	DKPP
		2.9.3.2.02.4	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton	295	295	295	295		26,050,000	Bantul	DKPP
2.9.3.2.03	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	2.9.3.2.03.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Laporan	1	n/a	n/a	n/a	n/a		Bantul	DKPP
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	2.9.3.2.04.1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Dokumen	1	1	1	1		260,000,000	Bantul	DKPP
		2.9.3.2.04.2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	4	4	4	4		1,723,750,000	Bantul	DKPP
2.9.4	PROGRAM											
PROGRAM												
KERAWANAN												
PANGAN												
2.9.4.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	2.9.4.2.01.1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Dokumen	14	14	14	14		272,887,000	Bantul	DKPP
2.9.4.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.9.4.2.02.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	1	1	N/A		Bantul	DKPP
			Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	3	3	3	3		732,400,000	Bantul	DKPP

2.9.5 PROGRAM PENGAWASA N KEAMANAN PANGAN												
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	2.9.5.2.01.1	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	3	3	3	3		210,000,000	Bantul	DKPP
		2.9.5.2.01.4	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	2	2		90,000,000	Bantul	DKPP
3.27.2 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBAN GAN SARANA PERTANIAN												
3.27.2.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.27.2.2.01.1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	2	2	2	2		221,500,000	Bantul	DKPP
		3.27.2.2.01.2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	12	12	12	12		3,050,305,550	Bantul	DKPP
3.27.2.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	3.27.2.2.02.2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	3	3	3	3		4,889,495,480	Bantul	DKPP
3.27.2.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	3.27.2.2.06.1	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ekor	33,500	33,500	33,500	33,500		6,271,100,600	Bantul	DKPP
		3.27.2.2.06.2	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ton	16	16	16	16		688,351,200	Bantul	DKPP
3.27.3 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBAN GAN PRASARANA PERTANIAN												

3.27.3.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	3.27.3.2.01.1	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Dokumen	1	1	1	1	170,000,000	Bantul	DKPP
		3.27.3.2.01.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Laporan	2	2	2	2	193,125,000	Bantul	DKPP
3.27.3.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	3.27.3.2.02.1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Unit	3	3	3	3	2,635,000,000	Bantul	DKPP
		3.27.3.2.02.2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Unit	1	1	1	1	850,000,000	Bantul	DKPP
		3.27.3.2.02.4	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Unit	1	1	1	1	850,000,000	Bantul	DKPP
		3.27.3.2.02.7	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Unit	1	1	1	1	246,950,000	Bantul	DKPP
		3.27.3.2.02.8	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Unit	1	1	1	1	500,000,000	Bantul	DKPP
		3.27.3.2.02.9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Unit	1	1	1	1	600,000,000	Bantul	DKPP
3.27.3.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	3.27.3.2.03.1	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Laporan	2	2	2	2	312,500,000	Bantul	DKPP
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP										
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.25.03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Dokumen	1	1	1	1	66,000,000	Bantul	Dinas Kelautan Dan Perikanan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

		3.25.03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Unit	N/A	1	2	2	10,000,000	Bantul	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Orang	25	30	35	40	310,800,000	Bantul	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		3.25.03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Kelompok	8	12	15	18	128,500,000	Bantul	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		3.25.03.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Unit usaha	15	15	15	15	15,000,000	Bantul	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	3.25.03.2.03.01	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Dokumen	1	1	1	1	20,000,000	Bantul	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		3.25.03.2.03.02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	layanan	1	1	1	1	1,244,690,480	Bantul	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.25.04											
PROGRAM											
PENGELOLAA											
N											
PERIKANAN											
BUDIDAYA											
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	3.25.04.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kelompok	5	35	46	54	209,813,760	Bantul	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	20	24	26	27	3,002,750,000	Bantul	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3.25.04.2.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	154,000,000	Bantul	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		3.25.04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	360,101,280	Bantul	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		3.25.04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Orang	20	25	40	40	35,950,000	Bantul	Dinas Kelautan Dan Perikanan

3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan (UPTD BBI)	3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	5	5	5	5	6,407,283,800	Bantul	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN											
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	87,250,000	Bantul	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Unit	5	8	10	15	309,800,000	Bantul	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ton	100	100	100	100	40,000,000	Bantul	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaku usaha	8	10	10	15	360,500,000	Bantul	Dinas Kelautan Dan Perikanan
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM											
1.03.03.2.01	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Dokumen	4	4	4	4	1,502,284,440	Bantul	DPUPKP
		1.03.03.2.01.02	Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/Perba ikan SPAM	Dokumen	3	3	3	3	1,410,000,000	Bantul	DPUPKP

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

		1.03.03.2.01.03	Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	liter/detik	25	25	25	25	20,000,000		Bantul	DPUPKP
		1.03.03.2.01.04	Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	SR	50	50	50	50	2,000,000,000		Bantul	DPUPKP
		1.03.03.2.01.05	Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	liter/detik	30	30	30	30	5,477,949,331		Bantul	DPUPKP
		1.03.03.2.01.06	Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	liter/detik	5	5	5	5	2,261,293,637		Bantul	DPUPKP
		1.03.03.2.01.07	Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	SR	1000	1000	1000	1000	16,000,000,000		Bantul	DPUPKP
		1.03.03.2.01.08	Sub Kegiatan Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	unit	1	1	1	1	40,000,000		Bantul	DPUPKP
		1.03.03.2.01.09	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum	Penyelenggara SPAM	1	1	1	1	8,000,000		Bantul	DPUPKP
		1.03.03.2.01.10	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri	Badan Usaha	1	1	1	1	8,000,000		Bantul	DPUPKP
		1.03.03.2.01.11	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Kelompok	20	20	20	20	40,000,000		Bantul	DPUPKP
		1.03.03.2.01.12	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Unit	1	1	1	1	12,000,000		Bantul	DPUPKP
		1.03.03.2.01.13	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama SPAM	unit	1	1	1	1	12,000,000		Bantul	DPUPKP
		1.03.03.2.01.14	Sub Kegiatan Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Penyelenggara SPAM	5	5	5	5	998,183,850		Bantul	DPUPKP

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

		1.03.03.2.01.15	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Unit	1	1	1	1	12,000,000		Bantul	DPUPKP
		1.03.03.2.01.16	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Unit	1	1	1	1	12,000,000		Bantul	DPUPKP
		1.03.03.2.01.17	Sub Kegiatan Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Rumah Tangga	5	5	5	5	200,000,000		Bantul	DPUPKP
		1.03.03.2.01.18	Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Unit	2	2	2	2	12,000,000		Bantul	DPUPKP
		1.03.03.2.01.19	Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	SR	320	330	430	450	7,906,200,000		Bantul	DPUPKP
		1.03.03.2.01.20	Sub Kegiatan Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Unit	1	1	1	1	12,000,000		Bantul	DPUPKP
		1.03.03.2.01.21	Sub Kegiatan Perbaikan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Unit	1	1	1	1	12,000,000		Bantul	DPUPKP
1.2.2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
1.2.2.201	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah	1.2.2.201.1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Unit	1	1	1	1	12,405,950,012	APBD	Bantul	Dinas Kesehatan
		1.2.2.201.2	Pembangunan Puskesmas	Unit	1	1	1	1	1,297,929,251	APBD	Bantul	Dinas Kesehatan
		1.2.2.201.6	Pengembangan Puskesmas	Unit	2	2	2	2	6,000,000,000	APBD	Bantul	Dinas Kesehatan
		1.2.2.201.9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Unit	165	165	165	165	1,050,000,000	APBD	Bantul	Dinas Kesehatan
		1.2.2.201.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	unit	3	4	4	5	1,550,000,000	APBD	Bantul	Dinas Kesehatan
		1.2.2.201.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	unit	500	600	700	800	1,490,000,000	APBD	Bantul	Dinas Kesehatan
		1.2.2.201.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Paket	45	45	45	45	2,984,575,000	APBD	Bantul	Dinas Kesehatan

		1.2.2.201.20	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan / alat penunjang medis fasilitas pelayanan kesehatan	unit	170	170	170	170		150,000,000	APBD	Bantul	Dinas Kesehatan
		1.2.2.201.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	paket	40	40	40	40		1,682,315,500	APBD	Bantul	Dinas Kesehatan
		1.2.2.201.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	paket	324	324	324	324		804,080,000	APBD	Bantul	Dinas Kesehatan
		1.2.2.201.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	keluarga	340,049	346,925	353,940	361,096		146,000,000	APBD	Bantul	Dinas Kesehatan
1.2.2.202	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.2.2.202.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Orang	14,565	15,388	16,156	16,964		17,288,096,999	APBD	Bantul	Dinas Kesehatan
		1.2.2.202.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orang	14,565	15,388	16,156	16,964		979,370,399	APBD	Bantul	Dinas Kesehatan
		1.2.2.202.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	15,958	14,656	15,388	16,156		882,945,399	APBD	Bantul	Dinas Kesehatan
		1.2.2.202.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Orang	56,954	57,381	57,811	58,244		1,062,900,399	APBD	Bantul	Dinas Kesehatan
		1.2.2.202.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	121,590	121,590	121,590	121,590		1,850,132,900	APBD	Bantul	Dinas Kesehatan
		1.2.2.202.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Orang	665,519	758,691	864,908	985,995		1,359,695,400	APBD	Bantul	Dinas Kesehatan
		1.2.2.202.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	135,226	136,579	137,945	139,324		1,375,520,400	APBD	Bantul	Dinas Kesehatan
		1.2.2.202.8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Orang	78,717	89,737	102,300	116,622		1,139,570,400	APBD	Bantul	Dinas Kesehatan
		1.2.2.202.9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Orang	26,722	30,463	34,728	39,590		1,139,570,400	APBD	Bantul	Dinas Kesehatan
		1.2.2.202.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	2,623	2,990	3,408	3,885		1,290,070,400	APBD	Bantul	Dinas Kesehatan
		1.2.2.202.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	11,800	11,786	11,786	11,786		1,285,270,400	APBD	Bantul	Dinas Kesehatan

		1.2.2.202.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang	16,491	16,787	17,090	17,398		1,225,370,400	APBD	Bantul	Dinas Kesehatan
		1.2.2.202.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Dokumen	1	1	1	1		2,130,014,477	APBD	Bantul	Dinas Kesehatan
		1.2.2.202.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1	1	1		5,635,727,800	APBD	Bantul	Dinas Kesehatan
		1.2.2.202.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	1	1	1		555,459,000	APBD	Bantul	Dinas Kesehatan
		1.2.2.202.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	62	65	70	75		2,825,441,000	APBD	Bantul	Dinas Kesehatan
		1.2.2.202.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	1	1	1		2,390,344,080	APBD	Bantul	Dinas Kesehatan
		1.2.2.202.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional lainnya	Dokumen	1	1	1	1		14,500,000	APBD	Bantul	Dinas Kesehatan
		1.2.2.202.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1404	1404	1404	1404		1,295,244,080	APBD	Bantul	Dinas Kesehatan
		1.2.2.202.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Dokumen	9	9	9	9		830,000,000	APBD	Bantul	Dinas Kesehatan
		1.2.2.202.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Orang	1,329	1,234	1,200	1,150		2,355,307,300	APBD	Bantul	Dinas Kesehatan
		1.2.2.202.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	7	7	7	7		735,089,600	APBD	Bantul	Dinas Kesehatan
		1.2.2.202.32	Operasional pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	16,500	17,000	17,500	18,250		34,058,267,788	APBD	Bantul	Dinas Kesehatan
		1.2.2.202.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	1	1	1	1		2,457,705,500	APBD	Bantul	Dinas Kesehatan
1.2.2.203	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi	1.2.2.203.1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dokumen	1	1	1	1		1,945,420,500	APBD	Bantul	Dinas Kesehatan
1.2.2.204	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.2.2.204.3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Unit	4	5	6	7		645,885,280	APBD	Bantul	Dinas Kesehatan
1.2.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN										APBD		

1.2.5.201	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.2.5.201.1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	44	44	44	44	1,285,089,600	APBD	Bantul	Dinas Kesehatan
1.2.5.202	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.2.5.202.1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	1	1	1	1	975,675,000	APBD	Bantul	Dinas Kesehatan
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	1	1	1	1	2,479,400,000	APBD	Bantul	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN												
	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Puskesmas	17	17	17	17	10,749,050,000	APBD	Bantul	Dinas Kesehatan
1.2.2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
1.2.2.102	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.2.2.102.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jiwa	80,000	80,000	80,000	80,000	185,000,000,000	APBD	Bantul	UPT JAMKESDA
		1.2.2.102.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Klaim	36000	36000	36000	36000	650,755,263	APBD	Bantul	UPT JAMKESDA
1.2.2.202	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.2.2.202.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	2	2	2	2	3,000,000,000	APBD	Bantul	UPT LABKESDA
1.6.4 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL										APBD		

1.6.4.201	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.6.4.201.1	Penyediaan Permakanan	orang	900	900	900	900	-	27,689,011,638	APBD	Bantul	Dinas Sosial
		1.6.4.201.12	Pemberian Layanan Rujukan	orang	10	10	10	10		32,324,687	APBD	Bantul	Dinas Sosial
		1.6.4.201.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang	20	20	20	20		626,789,299	APBD	Bantul	Dinas Sosial
		1.6.4.201.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	orang	20	20	20	20		7,986,367,117	APBD	Bantul	Dinas Sosial
		1.6.4.201.8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	50	50	50	50		325,078,000	APBD	Bantul	Dinas Sosial
		1.6.4.201.7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	50	50	50	50		367,513,425	APBD	Bantul	Dinas Sosial
		1.6.4.201.6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Orang	20	20	20	20		52,938,300	APBD	Bantul	Dinas Sosial
		1.6.4.201.5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Orang	100	100	100	100		121,081,0302	APBD	Bantul	Dinas Sosial
		1.6.4.201.4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang	5	5	5	5		64,121,582	APBD	Bantul	Dinas Sosial
		1.6.4.201.3	Penyediaan Alat Bantu	Orang	10	10	10	10		21,196,516	APBD	Bantul	Dinas Sosial
		1.6.4.201.2	Penyediaan Sandang	Orang	50	50	50	50		29,675,123	APBD	Bantul	Dinas Sosial
1.6.4.202	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1.6.4.202.5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Orang	20	20	20	20		262,151,811	APBD		
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)												
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi	9	3	6	19		582,500,000	APBD	Bantul	DP3AP2KB

		2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPk sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dokumen	1	1	1	1	2,242,500,000	APBD	Bantul	DP3AP2KB
		2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPk Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	1	1	1	1	1,708,751,250	APBD	Bantul	DP3AP2KB
		2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPk melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	1	1	1	1	1,155,000,000	APBD	Bantul	DP3AP2KB
		2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPk	Laporan	1	1	1	1	778,870,385	APBD	Bantul	DP3AP2KB
		2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPk	Laporan	1	1	1	1	1,612,000,000	APBD	Bantul	DP3AP2KB
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPk untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Laporan	12	12	12	12	1,453,300,000	APBD	Bantul	DP3AP2KB
		2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	34	34	34	34	4,692,448,110	APBD	Bantul	DP3AP2KB
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	12	12	12	12	248,000,000	APBD	Bantul	DP3AP2KB
		2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	750	750	800	900	336,000,000	APBD	Bantul	DP3AP2KB

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

		2.14.03.2.03.04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Laporan	1	1	1	1	50,000,000	APBD	Bantul	DP3AP2KB
		2.14.03.2.03.06	Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB	Unit	1	1	2	7	130,000,000	APBD	Bantul	DP3AP2KB
		2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	1	1	1	1	142,000,000	APBD	Bantul	DP3AP2KB
		2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Orang	10	10	20	20	113,000,000	APBD	Bantul	DP3AP2KB
		2.14.03.2.03.10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Orang	17	17	17	17	176,000,000	APBD	Bantul	DP3AP2KB
		2.14.03.2.03.13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Orang	50	50	65	75	390,000,000	APBD	Bantul	DP3AP2KB
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi	25	25	35	50	373,149,775	APBD	Bantul	DP3AP2KB
		2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kampung KB	47	47	47	47	267,600,000	APBD	Bantul	DP3AP2KB
		2.14.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Laporan	1	1	1	1	364,047,130	APBD	Bantul	DP3AP2KB
1.6.5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL											
1.6.5.202	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.6.5.202.4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Orang	200	200	200	200	2,220,004,713	APBD	Bantul	Dinas Sosial

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

		1.6.5.202.3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Orang	100	100	100	100		7,816,032,040	APBD	Bantul	Dinas Sosial
		1.6.5.202.2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Keluarga	20	20	20	20		33,217,592,738	APBD	Bantul	Dinas Sosial
		1.6.5.202.1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Orang	100	100	100	100		4,174,248,563	APBD	Bantul	Dinas Sosial
8.01.05													
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBAN GAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA													
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	08.01.05.2.0.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	1250	1250	1250	1250		1,600,000,000	APBD	Bantul	Bakesbangpol
Target 4.1. Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada													
INDIKATOR SDG's : 4.1.1* Proporsi anak-anak/anak muda: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 3 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii)													
INDIKATOR SDG's : 4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.													
INDIKATOR SDG's : 4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.													
INDIKATOR SDG's : 4.1.1.(g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun													
Target 4.5. Pada Tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk													
INDIKATOR SDG's : 4.5.1.* Rasio APM di SD/MI/ sederajat													
INDIKATOR SDG's : 4.5.1.* Rasio APM di SMP/MTs/ sederajat													
1.01.02													
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													
		1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	1	1	1	1		281.840.000	APBD	Kab. Bantul	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
		1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Ruang	1	1	1	1		40.000.000	APBD	Kab. Bantul	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
		1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	95	95	95	95		185.200.000	APBD	Kab. Bantul	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

1.01.02.2.02	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (SMP)	Peserta Didik	500	500	500	500		3.809.880.960	APBD	Kab. Bantul	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
		1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit		1	1	1		30.000.000	APBD	Kab. Bantul	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
		1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	1	1	1	1		281.840.000	APBD	Kab. Bantul	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
		1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Ruang	1	1	1	1		40.000.000	APBD	Kab. Bantul	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
		1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang	1	1	1	1		40.000.000	APBD	Kab. Bantul	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
		1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Ruang	1	1	1	1		40.000.000	APBD	Kab. Bantul	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
		1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	1	1	1	1		40.000.000	APBD	Kab. Bantul	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
1.01.02.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasa	1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	2	2	2	2		130.000.000	APBD	Kab. Bantul	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
		1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang	3	3	3	3		130.000.000	APBD	Kab. Bantul	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
		1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	6	6	6	6		130.000.000	APBD	Kab. Bantul	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
		1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	4	4	4	4		130.000.000	APBD	Kab. Bantul	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
		1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (SD)	Peserta Didik	250	250	250	250		5.373.526.800	APBD	Kab. Bantul	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN													

1.01.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Laporan	1	1	1	1		881.175.600	APBD	Kab. Bantul	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
		1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen	1	1	1	1		1.091.372.035.000	APBD	Kab. Bantul	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
		1.01.02.2.04.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	1	1	1	1		40.000.000	APBD	Kab. Bantul	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
		1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Orang	1	1	1	1		40.000.000	APBD	Kab. Bantul	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
		1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	1	1	1	1		40.000.000	APBD	Kab. Bantul	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
		1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	1	1	1	1		40.000.000	APBD	Kab. Bantul	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
INDIKATOR SDG's : 4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)													
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													
		1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Peserta Didik	1	1	1	1		40.000.000	APBD	Kab. Bantul	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

1.01.02.2.03	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Unit	1	1	1	1		40.000.000	APBD	Kab. Bantul	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
		1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit	1	1	1	1		40.000.000	APBD	Kab. Bantul	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
		1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Unit	1	1	1	1		40.000.000	APBD	Kab. Bantul	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	1	1	1	1		30.000.000	APBD	Kab. Bantul	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
		1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Ruang	4	4	4	4		130.000.000	APBD	Kab. Bantul	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
		1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	2	2	2	2		130.000.000	APBD	Kab. Bantul	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
		1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	6	6	6	6		130.000.000	APBD	Kab. Bantul	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
		1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	1	1	1	1		211.000.000	APBD	Kab. Bantul	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
		1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta Didik	250	250	250	250		4.294.821.440	APBD	Kab. Bantul	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	1	1	1	1		281.840.000	APBD	Kab. Bantul	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
		1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Ruang	1	1	1	1		40.000.000	APBD	Kab. Bantul	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
		1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Ruang	1	1	1	1		40.000.000	APBD	Kab. Bantul	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
		1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	1	1	1	1		30.000.000	APBD	Kab. Bantul	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
		1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	1	1	1	1		40.000.000	APBD	Kab. Bantul	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

		1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	1	1	1	1		40.000.000	APBD	Kab. Bantul	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
		1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta Didik	500	500	500	500		3.809.880.960	APBD	Kab. Bantul	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
		1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	95	95	95	95		185.200.000	APBD	Kab. Bantul	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Unit	1	1	1	1		40.000.000	APBD	Kab. Bantul	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
		1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit	1	1	1	1		40.000.000	APBD	Kab. Bantul	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
		1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Unit	1	1	1	1		40.000.000	APBD	Kab. Bantul	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
		1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Paket	1	1	1	1		400.000.000	APBD	Kab. Bantul	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
		1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Peserta Didik	1	1	1	1		40.000.000	APBD	Kab. Bantul	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
		1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Satuan Pendidikan	1295	1295	1295	1295		124.437.000.000	APBD	Kab. Bantul	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Siswa									
		1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan	27	27	27	27		40.000.000	APBD	Kab. Bantul	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
1.01.04 PROGRAM PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN													

1.01.04.2.01	Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik & Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, & Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Laporan	1	1	1	1		881.175.600	APBD	Kab. Bantul	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
		1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen	1	1	1	1		874.137.628.000	APBD	Kab. Bantul	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
		1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	1	1	1	1		40.000.000	APBD	Kab. Bantul	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
		1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	1	1	1	1		40.000.000	APBD	Kab. Bantul	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
Target 4.6. Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi													
INDIKATOR SDG's : 4.6.1 (a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun													

1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													
		1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (SMP)	Peserta Didik	500	500	500	500		3.809.880.960	APBD	Kab. Bantul	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
		1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	1	1	1	1		30.000.000	APBD	Kab. Bantul	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
		1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	1	1	1	1		281.840.000	APBD	Kab. Bantul	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
		1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Ruang	1	1	1	1		40.000.000	APBD	Kab. Bantul	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
1.01.02.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	2	2	2	2		130.000.000	APBD	Kab. Bantul	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
		1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang	3	3	3	3		130.000.000	APBD	Kab. Bantul	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
		1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Ruang	4	4	4	4		130.000.000	APBD	Kab. Bantul	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
		1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta Didik	250	250	250	250		4.294.821.440	APBD	Kab. Bantul	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	1	1	1	1		30.000.000	APBD	Kab. Bantul	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
		1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Ruang	4	4	4	4		130.000.000	APBD	Kab. Bantul	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
		1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	2	2	2	2		130.000.000	APBD	Kab. Bantul	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
		1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	1	1	1	1		211.000.000	APBD	Kab. Bantul	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

		1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta Didik	250	250	250	250		4.294.821.440	APBD	Kab. Bantul	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN													
1.01.04.2.01	Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik & Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, & Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Laporan	1	1	1	1		704.940.480	APBD	Kab. Bantul	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
		1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen	1	1	1	1		874.137.628.000	APBD	Kab. Bantul	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
		1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	1	1	1	1		40.000.000	APBD	Kab. Bantul	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
		1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	1	1	1	1		40.000.000	APBD	Kab. Bantul	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

<p>Target 4.c. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.</p>													
<p>INDIKATOR SDG's : 4.c.1* Persentase guru (SD, dan SMP) yang bersertifikat pendidik</p>													
<p>INDIKATOR SDG's : 4.c.1* Jumlah guru TK dan SD dan SMP yang bersertifikat pendidik</p>													
<p>INDIKATOR SDG's : 4.c.1* Jumlah guru TK, SD dan SMP dengan kualifikasi minimal S1/D4</p>													

1.01.04 PROGRAM PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKA N													
1.01.04.2.01	Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik & Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, & Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Laporan	1	1	1	1		704.940.480	APBD	Kab. Bantul	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
		1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen	1	1	1	1		1.091.372.035.000	APBD	Kab. Bantul	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
		1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	1	1	1	1		40.000.000	APBD	Kab. Bantul	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
		1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	1	1	1	1		40.000.000	APBD	Kab. Bantul	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
Target 5.1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.													
5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.													
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN													
2.08.02.2.01	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.01.03	Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Perangkat Daerah	45	45	45	45		755.460.000	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB
2.08.02.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan	Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Organisasi	40	40	40	40		310.112.000	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB
2.08.02.2.03		2.08.02.2.03.01	Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	12	15	17	20		220.000.000	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB

Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.03.02	Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	55	60	60	280.000.000	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB
	2.08.02.2.03.03	Sub kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	10	35	40	40	125.000.000	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB
	2.08.03.2.03.04	Sub kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	85.000.000	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB

Target 5.2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.

5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan

2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

2.08.03.2.02	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.03.2.02.01	Sub kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	120	130	140	145	1.428.315.779	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB
		2.08.03.2.02.02	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	6	6	6	6	1.207.692.499	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB
			Sub kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	155	160	160	160	922.110.000	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB

5.2.1.(a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.

2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

2.08.03.2.02	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.03.2.02.01	Sub kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	120	130	140	145	1.428.315.779	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB
		2.08.03.2.02.02	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	6	6	6	6	1.207.692.499	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB
		2.08.07.2.02.01	Sub kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	155	160	160	160	922.110.000	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB

5.2.2* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.

2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

2.08.03.2.02	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.03.2.02.01	Sub kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	120	130	140	145	1.428.315.779	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB
		2.08.03.2.02.02	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	6	6	6	6	1.207.692.499	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB
		2.08.07.2.02.01	Sub kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	155	160	160	160	922.110.000	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB

2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

2.08.07.2.02	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang	2.08.07.2.02.02	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	6	6	6	6	912.526.225	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB
--------------	--	-----------------	--	---------	---	---	---	---	-------------	------	-------------	----------

	Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.03	Sub kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	918.652.475	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB
5.2.2.(a) Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.												
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN												
2.08.03.2.02	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.03.2.02.01	Sub kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	120	130	140	145	1.428.315.779	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB
		2.08.03.2.02.02	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	6	6	6	6	1.207.692.499	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB
		2.08.07.2.02.01	Sub kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	155	160	160	160	922.110.000	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB
Target 5.3. Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.												
5.3.1* Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.												
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN												
2.08.03.2.02	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.03.2.02.01	Sub kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	120	130	140	145	1.428.315.779	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB
		2.08.03.2.02.02	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	6	6	6	6	1.207.692.499	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB

		2.08.07.2.02.01	Sub kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	155	160	160	160	922.110.000	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB
2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK												
2.08.07.2.02	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.02	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	6	6	6	6	912.526.225	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB
		2.08.07.2.02.03	Sub kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	918.652.475	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN												
2.08.03.2.02	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.03.2.02.01	Sub kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	120	130	140	145	1.428.315.779	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB
		2.08.03.2.02.02	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	6	6	6	6	1.207.692.499	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB
		2.08.07.2.02.01	Sub kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	155	160	160	160	922.110.000	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB
Target 5.5. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.												
5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen daerah dan pemerintah daerah.												
5.5.2* Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.												
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN												
2.08.02.2.01	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.01.03	Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Perangkat Daerah	45	45	45	45	755.460.000	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB

2.08.02.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan	Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Organisasi	40	40	40	40	310.112.000	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB
2.08.02.2.03	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.03.01	Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	12	15	17	20	220.000.000	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB
		2.08.02.2.03.02	Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	55	60	60	280.000.000	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB
		2.08.02.2.03.03	Sub kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	10	35	40	40	125.000.000	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB
		2.08.03.2.03.04	Sub kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	85.000.000	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB
5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH												
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	5.03.02.2.01.02	Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (pengadaan CPNS)	Dokumen	1	1	1	1	58.500.000	APBD	Kab. Bantul	BKPSDM
		5.03.02.2.01.11	Sub. Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	24	24	24	24	267.482.600	APBD	Kab. Bantul	BKPSDM
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	5.03.02.2.02.01	Sub. Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	Dokumen	800	800	800	800	1.885.021.000	APBD	Kab. Bantul	BKPSDM
		5.03.02.2.02.02	Sub. Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	800	800	800	800	749.979.180	APBD	Kab. Bantul	BKPSDM
		5.03.02.2.03.01	Sub. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Orang	40	40	53	50	64.000.000	APBD	Kab. Bantul	BKPSDM

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	5.03.02.2.03.04	Sub. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Orang	70	80	90	90		795.500.000	APBD	Kab. Bantul	BKPSDM
		5.03.02.2.03.05	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Dokumen	10	10	10	10		14.906.397.600	APBD	Kab. Bantul	BKPSDM
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5.03.02.2.04	Sub. Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	914	914	914	914		143.200.000	APBD	Kab. Bantul	BKPSDM
		5.03.02.2.04.04	Sub. Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Orang	896	896	896	896		1.391.336.000	APBD	Kab. Bantul	BKPSDM
		5.03.02.2.04.07	Sub. Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	Orang	143	141	139	137		300.300.000	APBD	Kab. Bantul	BKPSDM

4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

4 02 02 201	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	4 02 02 201 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	6	6	6	6		2.515.048.989	APBD	Kab. Bantul	Sekretaris Dewan
		4 02 02 201 02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	9	9	9	9		4.218.169.067	APBD	Kab. Bantul	Sekretaris Dewan
		4 02 02 201 03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Dokumen	5	5	5	5		1.048.561.252	APBD	Kab. Bantul	Sekretaris Dewan
		4 02 02 201 04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Dokumen	5	5	5	5		154.872.388	APBD	Kab. Bantul	Sekretaris Dewan
4 02 02 202	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	4 02 02 202 03	Pembahasan APBD	Dokumen	8	8	8	8		2.733.276.274	APBD	Kab. Bantul	Sekretaris Dewan
4 02 02 203	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	4 02 02 203 07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	16	16	16	16		6.381.887.108	APBD	Kab. Bantul	Sekretaris Dewan
4 02 02 204	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	4 02 02 204 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	42	42	42	42		187.222.840	APBD	Kab. Bantul	Sekretaris Dewan
		4 02 02 204 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Orang	96	96	96	96		473.797.724	APBD	Kab. Bantul	Sekretaris Dewan
		4 02 02 204 06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	132	132	132	132		1.259.896.633	APBD	Kab. Bantul	Sekretaris Dewan
4 02 02 205	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	4 02 02 205 03	Pelaksanaan Reses	Dokumen	4	4	4	4		2.247.170.406	APBD	Kab. Bantul	Sekretaris Dewan
4 02 02 206	Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	4 02 02 206 02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	1	1	1	1		540.109.661	APBD	Kab. Bantul	Sekretaris Dewan
4 02 02 208	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	4 02 02 208 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	20	20	20	20		2.414.447.530	APBD	Kab. Bantul	Sekretaris Dewan
		4 02 02 208 02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Laporan	1	1	1	1		19.986.774	APBD	Kab. Bantul	Sekretaris Dewan
		4 02 02 208 04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	60	60	60	60		602.551.965	APBD	Kab. Bantul	Sekretaris Dewan

Target 5.6. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan *Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the*

5.6.1.(a) Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).

5.6.1.(b) Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)												
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBP Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	1	1	1	1	1.210.751.250	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB
		2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBP melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	1	1	1	1	805.000.000	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB
		2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBP	Laporan	1	1	1	1	578.870.385	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB
		2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBP	Laporan	1	1	1	1	1.060.000.000	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBP untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Laporan	12	12	12	12	1.011.300.000	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB
		2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	34	34	34	34	3.192.048.110	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	12	12	12	12	73.000.000	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB
		2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	750	750	800	900	226.000.000	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB
		2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit	1	1	1	2	90.000.000	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB
		2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Orang	10	10	20	20	88.000.000	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB
		2.14.03.2.03.10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Orang	17	17	17	17	131.000.000	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB

		2.14.03.2.03.13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Orang	50	50	65	75		240.000.00	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi	25	25	35	50		233.149.775	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB
		2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kampung KB	47	47	47	47		172.600.000	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB

Target 6.1. Pada Tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua

6.1.1(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak

1.03.03 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air

1.03.03.2.01	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.01	Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Dokumen	4	4	4	4		1,404,614,200	APBD	Kab. Bantul	DPUPKP
		1.03.03.2.01.04	Sub. Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	SR	50	50	50	50		2,000,000,000	APBD	Kab. Bantul	DPUPKP
		1.03.03.2.01.07	Sub. Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	SR	1000	1000	1000	1000		16,000,000,000	APBD	Kab. Bantul	DPUPKP
		1.03.03.2.01.14	Sub. Kegiatan Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Penyelenggara SPAM	5	5	5	5		998,183,850	APBD	Kab. Bantul	DPUPKP
		1.03.03.2.01.19	Sub. Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	SR	320	330	430	450		6,962,200,000	APBD	Kab. Bantul	DPUPKP

Target 7.2. Pada Tahun 2030, meningkatkan secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global

7.2.1*Bauran energi terbarukan

7.2.1*Bauran energi terbarukan

Kode dan Nama Program:

Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan:	Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan:										
		Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan:										
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan:	Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan:										
		Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan:										

Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang

8.1.1*Laju pertumbuhan PDB per kapita

8.1.1.(a)PDB per kapita

8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.

INDIKATOR SDG's : 8.2.1*Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun

2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

		2.07.04.201.02	Pelayanan antar Kerja	Orang	2500	2500	2750	2750		111,783,092	APBD	Kab. Bantul	Disnakertrans
--	--	----------------	-----------------------	-------	------	------	------	------	--	-------------	------	-------------	---------------

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2.07.04.201.	Keg Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.201.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	BKK	680	720	760	800		195,002,144	APBD	Kab. Bantul	Disnakertrans
		2.07.04.201.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Orang	20	20	60	60		673,809,923	APBD	Kab. Bantul	Disnakertrans
		2.07.04.201.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	1900	1900	1900	1900		30,018,193,383	APBD	Kab. Bantul	Disnakertrans
2.07.04.203	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2.07.04.203.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Orang	3000	3200	3400	3500		1,070,674,022	APBD	Kab. Bantul	Disnakertrans
		2.07.04.203.03	Job Fair/Bursa Kerja	Orang	100	150	200	250		450,074,028	APBD	Kab. Bantul	Disnakertrans
2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA													
2.07.03.01	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.07.03.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Orang	368	400	480	560		7,513,350,000	APBD	Kab. Bantul	Disnakertrans
2.07.03.02	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	2.07.03.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	LPK	5	5	5	5		1,668,350,000	APBD	Kab. Bantul	Disnakertrans
2.07.03.05	Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.07.03.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dokumen	5	5	5	5		1,724,000,000	APBD	Kab. Bantul	Disnakertrans
2.07.03.01	KEG Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.07.03.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	5	5	5	5		1,724,000,000	APBD	Kab. Bantul	Disnakertrans
		2.07.03.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dokumen	5	5	5	5		1,724,000,000	APBD	Kab. Bantul	Disnakertrans
Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil,													
8.3.1*Proporsi lapangan kerja informal sektor nonpertanian, berdasarkan jenis kelamin													
8.3.1.(a)Persentase tenaga kerja formal													
8.3.1.(b)Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian													
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA													
2.07.04.201.	Keg Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.201.02	Pelayanan antar Kerja	Orang	2500	2500	2750	2750		111,783,092	APBD	Kab. Bantul	Disnakertrans
		2.07.04.201.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	BKK	680	720	760	800		195,002,144	APBD	Kab. Bantul	Disnakertrans
		2.07.04.201.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Orang	20	20	60	60		673,809,923	APBD	Kab. Bantul	Disnakertrans
		2.07.04.201.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	1900	1900	1900	1900		30,018,193,383	APBD	Kab. Bantul	Disnakertrans
2.07.04.203	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2.07.04.203.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Orang	3000	3200	3400	3500		1,070,674,022	APBD	Kab. Bantul	Disnakertrans
		2.07.04.203.03	Job Fair/Bursa Kerja	Orang	100	150	200	250		450,074,028	APBD	Kab. Bantul	Disnakertrans
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA													
2.07.03.02	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	2.07.03.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	LPK	5	5	5	5		1,668,350,000	APBD	Kab. Bantul	Disnakertrans

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2.07.03.05	keg Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.07.03.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dokumen	5	5	5	5		1,724,000,000	APBD	Kab. Bantul	Disnakertrans
2.07.03.01	KEG Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.07.03.01.02	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	Orang	368	400	480	560		7,513,350,000	APBD	Kab. Bantul	Disnakertrans
		2.07.03.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	5	5	5	5		1,724,000,000	APBD	Kab. Bantul	Disnakertrans
		2.07.03.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dokumen	5	5	5	5		1,724,000,000	APBD	Kab. Bantul	Disnakertrans
8.3.1.(c) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan												Kab. Bantul	
2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)												Kab. Bantul	
2.17.07.201	Keg. Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, penguatan Kelembagaan dan koordinasi dengan Para Pemangku	2.17.07.201.01	Pendataan Potensi dan pengembangan Usaha Mikro	Dokumen	2	2	2	2		746,054,901	APBD	Kab. Bantul	DKUKMPP
		2.17.07.201.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	30	30	30	30		337,923,000	APBD	Kab. Bantul	DKUKMPP
3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI												Kab. Bantul	
3.31.02.201	Keg. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.31.02.201.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1		110,000,000	APBD	Kab. Bantul	DKUKMPP
		3.31.02.201.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	26	38	39	39		5,979,825,214	APBD	Kab. Bantul	DKUKMPP
		3.31.02.201.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	7	7	8	12		2,738,568,503	APBD	Kab. Bantul	DKUKMPP
2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM												Kab. Bantul	
2.17.08.201	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	2.17.08.201.01	Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	300	300	300	300		1,523,145,500	APBD	Kab. Bantul	DKUKMPP
Target 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang 8.5.1*Upah rata-rata per jam pekerja													
Target 8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam													
8.8.1.(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.													
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL													
	Keg Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran	2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Perusahaan	150	175	200	210		937,801,563	APBD	Kab. Bantul	Disnakertrans

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2.07.05.2.01	Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Laporan	4	5	5	5		352,422,344	APBD	Kab. Bantul	Disnakertrans
2.07.05.2.02	Keg Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.05.2.02,01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Perkara	20	20	20	20		1,002,879,375	APBD	Kab. Bantul	Disnakertrans
		2.07.05.2.02,02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Perkara	20	20	20	20		543,075,750	APBD	Kab. Bantul	Disnakertrans
		2.07.05.2.02,03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Perusahaan	100	100	100	100		365,283,093	APBD	Kab. Bantul	Disnakertrans
		2.07.05.2.02,04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	LKS	1	1	1	1		268,537,875	APBD	Kab. Bantul	Disnakertrans
8.5.2*Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur												Kab. Bantul	Disnakertrans
8.5.2.(a)Persentase setengah pengangguran												Kab. Bantul	Disnakertrans
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA												Kab. Bantul	Disnakertrans
2.07.04.201.	Keg Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.201.02	Pelayanan antar Kerja	Orang	2500	2500	2750	2750		111,783,092	APBD	Kab. Bantul	Disnakertrans
		2.07.04.201.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	BKK	680	720	760	800		195,002,144	APBD	Kab. Bantul	Disnakertrans
		2.07.04.201.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Orang	20	20	60	60		673,809,923	APBD	Kab. Bantul	Disnakertrans
		2.07.04.201.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	1900	1900	1900	1900		30,018,193,383	APBD	Kab. Bantul	Disnakertrans
2.07.04.203	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2.07.04.203.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Orang	3000	3200	3400	3500		1,070,674,022	APBD	Kab. Bantul	Disnakertrans

		2.07.04.203.03	Job Fair/Bursa Kerja	Orang	100	150	200	250		450,074,028	APBD	Kab. Bantul	Disnakertrans
Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.													
8.9.1*Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB													
8.9.1.(a)Jumlah wisatawan mancanegara													
8.9.1.(b)Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.													
8.9.1.(c)Jumlah pendapatan retribusi sektor pariwisata													
8.9.2*Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja													
3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA													
3.26.02.201	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	3.26.02.201.04	Subkegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dokumen	5	5	5	5		6,999,714,960	APBD	Kab. Bantul	DISPAR
3.26.02.203	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.203.04	Subkegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Parasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Unit	2	2	2	2		1,314,095,664	APBD	Kab. Bantul	DISPAR
3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA													Kab. Bantul
3.26.03.201	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.03.201.04	Subkegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	7	4	4	4		800,000,000	APBD	Kab. Bantul	DISPAR
		3.26.03.201.03	Subkegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi	Dokumen	2	2	2	2		800,000,000	APBD	Kab. Bantul	DISPAR
3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF													Kab. Bantul
3.26.05.201	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	3.26.05.201.01	Subkegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Orang	120	120	120	120		269,000,000	APBD	Kab. Bantul	DISPAR
		3.26.05.201.02	Subkegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Orang	120	120	120	120		876,000,000	APBD	Kab. Bantul	DISPAR
2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN													Kab. Bantul
2.22.08.203	Kegiatan Pengelolaan Taman Budaya	Kode Sub Kegiatan	Sub. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	Objek	0	0	1	1		2,200,000,000	APBD	Kab. Bantul	Disbud
2.22.08.507	Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	2.22.08.507.02	Sub. Kegiatan Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Lembaga	10	12	12	12		6,307,692,000	APBD	Kab. Bantul	Disbud
		2.22.08.507.03	Sub. Kegiatan Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Laporan	4	9	9	9		6,162,056,000	APBD	Kab. Bantul	Disbud
		2.22.08.507.04	Sub. Kegiatan Penghargaan Seniman dan Budayawan	Orang	15	15	15	15		1,379,300,000	APBD	Kab. Bantul	Disbud
		2.22.08.507.05	Sub. Kegiatan Festival Kebudayaan Yogyakarta	Laporan	9	9	9	9		2,363,500,000	APBD	Kab. Bantul	Disbud

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

		2.22.08.507.06	Sub. Kegiatan Gelar Budaya Jogja	Laporan	8	16	16	16		14,015,671,950	APBD	Kab. Bantul	Disbud
		2.22.08.507.07	Sub. Kegiatan Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Dokumen	13	13	15	15		1,780,105,000	APBD	Kab. Bantul	Disbud
		2.22.08.507.08	Sub. Kegiatan Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	Orang	240	240	240	240		381,280,000	APBD	Kab. Bantul	Disbud
		2.22.08.507.09	Sub. Kegiatan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Laporan	3	4	4	4		993,407,000	APBD	Kab. Bantul	Disbud
		2.22.08.507.10	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	Laporan	178	283	284	400		21,649,724,330	APBD	Kab. Bantul	Disbud
		2.22.08.507.11	Sub. Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Laporan	55	55	55	55		4,043,175,959	APBD	Kab. Bantul	Disbud

Target 8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.

8.10.1.(b) Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit

2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

2.17.07.201	Keg. Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, penguatan Kelembagaan dan koordinasi dengan Para Pemangku	2.17.07.201.01	Pendataan Potensi dan pengembangan Usaha Mikro	Dokumen	2	2	2	2		746,054,901	APBD	Kab. Bantul	DKUKMPP
		2.17.07.201.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	30	30	30	30		337,923,000	APBD	Kab. Bantul	DKUKMPP

3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

3.31.02.201	Keg. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.31.02.201.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1		110,000,000	APBD	Kab. Bantul	DKUKMPP
		3.31.02.201.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	26	38	39	39		5,979,825,214	APBD	Kab. Bantul	DKUKMPP
		3.31.02.201.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	7	7	8	12		2,738,568,503	APBD	Kab. Bantul	DKUKMPP

2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

2.17.08.201	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	2.17.08.201.01	Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	300	300	300	300		1,523,145,500	APBD	Kab. Bantul	DKUKMPP
-------------	--	----------------	---	------------	-----	-----	-----	-----	--	---------------	------	-------------	---------

Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang

9.1.1.(a) Kondisi Mantap Jalan Kabupaten

9.1.1.(b) Panjang Peningkatan Jalan Kabupaten

1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

		1.03.10.2.01.02	Sub. Kegiatan Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	m ²	1000	1000	1000	1000		2,000,000,000	APBD	Kab. Bantul	DPUPKP
--	--	-----------------	--	----------------	------	------	------	------	--	---------------	------	-------------	--------

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

1.03.10.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.03	Sub. Kegiatan Pengelolaan Leger Jalan	Dokumen	1	1	1	1		3,942,500,000	APBD	Kab. Bantul	DPUPKP
		1.03.10.2.01.04	Sub. Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Dokumen	1	1	1	1		400,000,000	APBD	Kab. Bantul	DPUPKP
		1.03.10.2.01.09	Sub. Kegiatan Rehabilitasi Jalan	Km	15	15	15	15		108,825,403,341	APBD	Kab. Bantul	DPUPKP
		1.03.10.2.01.18	Sub. Kegiatan Rehabilitasi Jembatan	m	45	80	50	30		26,946,347,872	APBD	Kab. Bantul	DPUPKP
1.03.07 Program Pengembangan Permukiman													
1.03.07.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.03.07.2.01.01	Sub. Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Sistem Jaringan	70	70	70	70		92,009,666,444	APBD	Kab. Bantul	DPUPKP
3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI													
3.31.02.2.01	Keg. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.31.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1		110,000,000	APBD	Kab. Bantul	DKUKMPP
		3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	26	38	39	39		6,674,310,774	APBD	Kab. Bantul	DKUKMPP
		3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	7	7	8	12		2,738,568,503	APBD	Kab. Bantul	DKUKMPP
9.3.2*Cakupan industri kecil menengah dengan pinjaman atau kredit.												Kab. Bantul	
2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM												Kab. Bantul	
2.17.08.2.01	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	300	300	300	300		1,523,145,500	APBD	Kab. Bantul	DKUKMPP
2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)													
2.17.07.2.01	Keg. Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, penguatan Kelembagaan dan koordinasi dengan Para Pemangku kepentingan	2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan pengembangan Usaha Mikro	Dokumen	2	2	2	2		113,890,460	APBD	Kab. Bantul	DKUKMPP
		2.17.07.2.01.02	Pemberdayan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	30	30	30	30		337,923,000	APBD	Kab. Bantul	DKUKMPP
		2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan pengembangan Usaha Mikro	Unit Usaha	80	80	80	80		635,707,599	APBD	Kab. Bantul	DKUKMPP
9.c.1.(b)Proporsi individu yang menggunakan internet													
2.16.03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA													
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.16.03.2.02.10	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	1	1	1		3,582,083,863	APBD	Kab. Bantul	Kominfo

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan dari 40 persen populasi paling bawah pada tingkat yang lebih tinggi daripada rata-rata nasional

10.1.1*Koefisien Gini.

10.1.1.(a)Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.

1.6.5 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

1.6.5.2.02	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.6.5.2.02.02	Sub kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	keluarga	20	20	20	20		33,217,592,738	APBD	Kab. Bantul	Dinsos
------------	--	---------------	--	----------	----	----	----	----	--	----------------	------	-------------	--------

Target 10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.

10.2.1*Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.

1.6.5 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

1.6.5.2.02	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.6.5.2.02.02	Sub kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Keluarga	20	20	20	20		33,217,592,738	APBD	Kab. Bantul	Dinsos
1.6.5.2.02	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.6.5.2.02.03	Sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Keluarga	100	100	100	100		7,816,032,040	APBD	Kab. Bantul	Dinsos
		1.6.5.2.02.04	Sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Orang	200	200	200	200		2,220,004,713	APBD	Kab. Bantul	Dinsos

Target 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan

10.3.1.(a)Aspek Kebebasan Sipil dalam Indeks Demokrasi Indonesia

10.3.1.(b)Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

10.3.1.(c)Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.

2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

2.08.02.2.01	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.01.03	Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Perangkat daerah	45	45	45	45		755,460,000	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB
2.08.02.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.02.02	Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Organisasi	40	50	52	55		310,112,000	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB
2.08.02.2.03	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	2.08.02.2.03.01	Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	12	15	17	20		220,000,000	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB
		2.08.02.2.03.02	Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	40	50	55	60		280,000,000	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB

	Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.03.03	Sub kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1		125,000,000	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB
		2.08.03.2.03.04	Sub kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1		85,000,000	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB
2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK													
2.08.05.2.01	Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.05.2.01.02	Sub kegiatan Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1		916,460,120	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB
2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)													
2.08.06.2.02	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.06.2.02.02	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1		1,349,999,745	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB
		2.08.06.2.02.03	Sub kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1		136,625,000	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB
2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK													
2.08.07.2.02	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.04	Sub kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1		279,940,000	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN													
		2.08.03.2.02.01	Sub kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	120	130	140	145		1,428,315,779	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2.08.03.2.02	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.03.2.02.02	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	6	6	6	6		1,207,692,499	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB
		2.08.07.2.02.01	Sub kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	155	160	160	160		922,110,000	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB
8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA													
8.01.05.2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	08.01.05.2.0.01.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	1,250	1,250	1,250	1,250		1,600,000,000	APBD	Kab. Bantul	Kesbangpol
8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN													
8.01.02.2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.01.02.2.01.04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	500	550	500	550		1,657,000,000	APBD	Kab. Bantul	Kesbangpol
Target 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.													
10.4.1.(a)Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial													
10.4.1.(b)Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.													
2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL													
2.07.05.2.01	Keg Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Perusahaan	150	175	200	210		937.801.563	APBD	Kab. Bantul	Disnakertrans
		2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Laporan	4	5	5	5		852,422,844	APBD	Kab. Bantul	Disnakertrans

2.07.05.2.02	Keg Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Perkara	20	20	20	20		1,002,879,375	APBD	Kab. Bantul	Disnakertrans
		2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Perkara	20	20	20	20		138,915,000	APBD	Kab. Bantul	Disnakertrans
		2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Perusahaan	100	100	100	100		365,283,093	APBD	Kab. Bantul	Disnakertrans
		2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	LKS	1	1	1	1		268,537,875	APBD	Kab. Bantul	Disnakertrans
Target 10.7. Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana													
10.7.2.(a)Jumlah dokumen kerja sama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara daerah.													
2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA													
2.07.04.201	Keg Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.201.02	Pelayanan antar Kerja	Orang	2,500	2,500	2,750	2,750		111,783,092	APBD	Kab. Bantul	Disnakertrans
		2.07.04.201.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Orang	680	720	760	800		195,002,144	APBD	Kab. Bantul	Disnakertrans
		2.07.04.201.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Orang	20	20	60	60		673,809,923	APBD	Kab. Bantul	Disnakertrans
		2.07.04.201.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	1,900	1,900	1,900	1,900		30,018,193,383	APBD	Kab. Bantul	Disnakertrans
2.07.04.203	Keg Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2.07.04.203.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Orang	8,000	8,200	8,400	8,500		1,070,674,022	APBD	Kab. Bantul	Disnakertrans
		2.07.04.203.03	Job Fair/Bursa Kerja	Orang	100	150	200	250		450,074,028	APBD	Kab. Bantul	Disnakertrans
2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL													
	Keg Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran	2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Perusahaan	150	175	200	210		937,801,563	APBD	Kab. Bantul	Disnakertrans

2.07.05.2.01	Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Laporan	4	5	5	5		852,422,844	APBD	Kab. Bantul	Disnakertrans
2.07.05.2.02	Keg Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Perkara	20	20	20	20		1,002,879,375	APBD	Kab. Bantul	Disnakertrans
		2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Perkara	20	20	20	20		138,915,000	APBD	Kab. Bantul	Disnakertrans
		2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Perusahaan	100	100	100	100		365,283,093	APBD	Kab. Bantul	Disnakertrans
		2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	LKS	1	1	1	1		268,537,875	APBD	Kab. Bantul	Disnakertrans

Target 11.1. Pada Tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh

11.1.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau

1.2.2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

122.2.02	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	122.2.02.17	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	62	65	70	75		2.825.441.000	APBD	Kab. Bantul	Dinas Kesehatan
		122.2.02.18	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	1	1	1		2.390.344.080	APBD	Kab. Bantul	Dinas Kesehatan

1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

1.04.03.2.03	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1.04.03.2.03.02	Sub. Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Unit Rumah	190	190	190	190		18,961,876,559	APBD	Kab. Bantul	DPUPKP
		1.04.03.2.03.06	Sub. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Unit Rumah	100	100	100	100		6,000,000,000	APBD	Kab. Bantul	DPUPKP

1.04.02 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

1.04.02.2.05	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1.04.02.2.05.02	Sub. Kegiatan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Dokumen	12	12	12	12	13,322,601,883	APBD	Kab. Bantul	DPUPKP
1.04.02.2.06	Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1.04.02.2.06.01	Sub. Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Dokumen	12	12	12	12	1,700,460,720	APBD	Kab. Bantul	DPUPKP
Target 11.2. Pada Tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas												
11.2.1.(a) Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan												
2.15.02 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)												
2.15.02.2.02	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.02.01	Subkegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Unit	1	1	1	1	290.255.000	APBD	Kab. Bantul	Dishub
		2.15.02.2.02.02	Subkegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Unit	950	950	950	950	25.362.993.012	APBD	Kab. Bantul	Dishub
		2.15.02.2.02.04	Subkegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Unit	800	800	800	800	4.625.858.738	APBD	Kab. Bantul	Dishub
2.15.02.2.06	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.06.01	Subkegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	3	3	3	3	2.091.048.960	APBD	Kab. Bantul	Dishub
		2.15.02.2.06.02	Subkegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Unit	163	163	163	163	5.870.423.000	APBD	Kab. Bantul	Dishub
		2.15.02.2.06.03	Subkegiatan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen	3	3	3	3	25.525.500	APBD	Kab. Bantul	Dishub
2.15.02.2.09	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota	2.15.02.2.09.02	Subkegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	3	3	3	3	387.867.680	APBD	Kab. Bantul	Dishub

2.15.02.2.11	Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.15.02.2.11.02	Subkegiatan Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	3	3	3	3	534.894.560	APBD	Kab. Bantul	Dishub
2.15.02.2.14	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.15.02.2.14.01	Subkegiatan Fasilitas pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Laporan	1	1	1	1	167.447.280	APBD	Kab. Bantul	Dishub

Target 11.3.1 Rasio laju peningkatan konsumsi tanah dengan laju pertumbuhan penduduk.

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

1.03.12.2.01	Kegiatan Penetapan Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW) dan rencana Rinci Tata ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1.03.12.2.01.02	Sub kegiatan pelaksanaan persetujuan substansi, evaluasi, onultasi evaluasi dan penetapan RTRW Kabupaten / Kota	Dokumen	1	1	1	1	1,840,000,000	APBD	Kab. Bantul	DPTR
			Sub kegiatan Pelaksanaan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi, evaluasi dan penetapan RRTR Kabupaten / Kota	Dokumen	1	1	1	1	1,840,000,000	APBD	Kab. Bantul	DPTR
1.03.12.2.04	Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pemanfaatan ruang Daerah Kabupaten /Kota	1.03.12.2.04.02	Sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang	Dokumen	8	8	8	8	1,610,000,000	APBD	Kab. Bantul	DPTR

2.10.10 Program Penatagunaan Tanah

2.10.10.2.01	Kegiatan Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah Kabupaten/ kota	2.10.10.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah	Laporan	50	47	46	45	35,080,000,000	APBD	Kab. Bantul	DPTR
		2.10.10.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/ Kota	Dokumen	3	3	3	3	520,000,000	APBD	Kab. Bantul	DPTR

Target 11.5. Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana,

11.5.1*Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang

11.5.1.(b)Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk

1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

1.05.03.2.01	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.01.02	Sub. Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Orang	1,680	1,700	1,800	1,800		452,000,000	APBD	Kab. Bantul	BPBD
1.05.03	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.02	Sub. Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Orang	400	400	400	400		2,805,532,000	APBD	Kab. Bantul	BPBD
		1.05.03.2.02.04	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Unit	48	55	34	28		2,910,000,000	APBD	Kab. Bantul	BPBD
		1.05.03.2.02.06	Sub. Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kawasan	8	16	16	226		729,927,000	APBD	Kab. Bantul	BPBD
		1.05.03.2.02.09	Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi	Dokumen	2	2	2	2		1,000,875,000	APBD	Kab. Bantul	BPBD
1.05.03.2.04	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04.01	Sub. Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	2	2		41,000,000	APBD	Kab. Bantul	BPBD
		1.05.03.2.04.03	Sub. Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	1	1	1		15,000,000	APBD	Kab. Bantul	BPBD
		1.05.03.2.04.04	Sub. Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen	12	12	12	12		215.500.000	APBD	Kab. Bantul	BPBD
		1.05.03.2.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1		260,475,000	APBD	Kab. Bantul	BPBD
Indikator TPB/SDGs: 11.6.1a. Persentase sampah perkotaan yang tertangani													
Indikator TPB/SDGs:11.6.1b. Persentase sampah yang terangkut													
2.11.11 Program Pengelolaan Persampahan													
		2.11.11.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Dokumen	1	1	1	1		230,000,000	APBD	Kab. Bantul	DLH

2.11.11.2.01	Kegiatan Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.03	Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Ton	33,200	34,400	35,600	36,800		22,713,887,840	APBD	Kab. Bantul	DLH
		2.11.11.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1		315,000,000	APBD	Kab. Bantul	DLH
		2.11.11.2.01.04	Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kelompok	103	112	120	129		6,205,000,000	APBD	Kab. Bantul	DLH

Target 11.7. Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang disabilitas

11.7.1.(a)Jumlah ruang terbuka hijau

2.11.03 Program Pengendalian Pencemaran dan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

2.11.03.2.01	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	4	4	4	4		3,950,000,000	APBD	Kab. Bantul	DLH
		2.11.03.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Dokumen	1	1	1	1		270,000,000	APBD	Kab. Bantul	DLH
2.11.03.2.01	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.01.03	Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	2	2		1,400,000,000	APBD	Kab. Bantul	BPBD
2.11.03.2.03	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03.2.03.04	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Dokumen	2	2	2	2		1,045,000,000	APBD	Kab. Bantul	DLH

2.11.04 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

2.11.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	2.11.04.2.01.07	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Unit	3	3	3	3		1,870,000,000	APBD	Kab. Bantul	DLH
--------------	--	-----------------	---	------	---	---	---	---	--	---------------	------	-------------	-----

	Kabupaten/Kota	2.11.04.2.01.04	Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Ha	28,961	31,961	34,961	37,961		11.410.936.560,00	APBD	Kab. Bantul	DLH
2.11.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2.11.04.2.01.04	Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Ha	28961	31961	34961	37961		11.410.936.560,00	APBD	Kab. Bantul	DLH
2.11.09 Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat													
2.11.09.2.01	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah	2.11.09.2.01.01	Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Entitas	3	3	3	3		189,000,000	APBD	Kab. Bantul	DLH
Target 11.7. Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang disabilitas													
11.7.1.(a)Jumlah ruang terbuka hijau													
Target 11.b. Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasikan kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya,													
11.b.2*Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah													
1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA													
1.05.03.2.01	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.01.02	Sub. Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Orang	1,680	1,700	1,800	1,800		452.000.000	APBD	Kab. Bantul	BPBD
1.05.03	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.02	Sub. Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Orang	400	400	400	400		2.805.532.000	APBD	Kab. Bantul	BPBD
		1.05.03.2.02.04	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Unit	48	55	84	28		2.910.000.000	APBD	Kab. Bantul	BPBD
		1.05.03.2.02.06	Sub. Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kawasan	8	16	16	16		729.927.000	APBD	Kab. Bantul	BPBD
		1.05.03.2.02.09	Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi	Dokumen	2	2	2	2		1.000.875.000	APBD	Kab. Bantul	BPBD
1.05.03.2.04	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04.01	Sub. Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	2	2		41.000.000	APBD	Kab. Bantul	BPBD
		1.05.03.2.04.03	Sub. Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	1	1	1		15.000.000	APBD	Kab. Bantul	BPBD

		1.05.03.2.04.04	Sub. Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen	12	12	12	12		215.500.000	APBD	Kab. Bantul	BPBD
		1.05.03.2.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1		260.475.000	APBD	Kab. Bantul	BPBD
1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN													
1.05.04.2.01	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.05.04.2.01.01	Sub. Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1		69.650.000	APBD	Kab. Bantul	BPBD
		1.05.04.2.01.02	Sub. Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	150	150	150	150		392.980.000	APBD	Kab. Bantul	BPBD
		1.05.04.2.01.06	Sub. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	8	5	4	8		639.250.000	APBD	Kab. Bantul	BPBD
1.05.04.2.04.	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1.05.04.2.04.01	Sub. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Orang	50	50	50	50		107.750.000	APBD	Kab. Bantul	BPBD
		1.05.04.2.04.02	Sub. Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Kalurahan	3	3	10	10		335.000.000	APBD	Kab. Bantul	BPBD
Target 12.1 Melaksanakan the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan													
12.1.1*Jumlah kolaborasi tematik quickwins program.													
Target 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan													
12.4.1.(a)Jumlah peserta Proper (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan) yang mencapai minimal ranking BIRU.													
12.4.2.(a)Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).													
Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.													
12.6.1.a. Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.													
12.7.1.a. Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister. .													
2.11.11 Program Pengelolaan Persampahan													
		2.11.11.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Dokumen		1	1	1		230.000,000	APBD	Kab. Bantul	DLH

2.11.11.2.01	Kegiatan Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.03	Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Ton	33,300	34,400	35,600	36,800	22,713,887,840	APBD	Kab. Bantul	DLH
		2.11.11.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	315,000,000	APBD	Kab. Bantul	DLH
		2.11.11.2.01.04	Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kelompok	103	112	120	129	6,205,000,000	APBD	Kab. Bantul	DLH
2.11.05 Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)												
2.11.05.2.01	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	2.11.05.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dokumen	1	1	1	1	53,500,000	APBD	Kab. Bantul	DLH
		2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Laporan	4	4	4	4	28,000,000	APBD	Kab. Bantul	DLH
2.11.03 Program Pengendalian Pencemaran dan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup												
2.11.03.2.01	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	4	4	4	4	3,950,000,000	APBD	Kab. Bantul	DLH
		2.11.03.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Dokumen	1	1	1	1	270,000,000	APBD	Kab. Bantul	DLH
2.11.03.2.01	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan	2.11.03.2.01.03	Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan	Dokumen	2	2	2	2	1,400,000,000	APBD	Kab. Bantul	DLH

2.11.03.2.03	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	2.11.03.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan	Dokumen	2	2	2	2		1,045,000,000	APBD	Kab. Bantul	DLH
2.11.06 Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)													
2.11.06.2.01	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha	2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban	Dokumen	1	1	1	1		91,000,000	APBD	Kab. Bantul	DLH
Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.													
13.1.1* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.													
13.1.2* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang													
1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA													
1.05.03.2.01	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.01.02	Sub. Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan	Orang	1680	1700	1800	1800		452.000.000	APBD	Kab. Bantul	BPBD
1.05.03	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.02	Sub. Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Orang	400	400	400	400		2.805.532.000	APBD	Kab. Bantul	BPBD
		1.05.03.2.02.04	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Unit	48	55	34	28		2.910.000.000	APBD	Kab. Bantul	BPBD
		1.05.03.2.02.06	Sub. Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kawasan	8	16	16	16		729.927.000	APBD	Kab. Bantul	BPBD
		1.05.03.2.02.09	Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi	Dokumen	2	2	2	2		1.000.875.000	APBD	Kab. Bantul	BPBD
1.05.03.2.04	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04.01	Sub. Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	2	2		41.000.000	APBD	Kab. Bantul	BPBD
		1.05.03.2.04.03	Sub. Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	1	1	1		15.000.000	APBD	Kab. Bantul	BPBD
		1.05.03.2.04.04	Sub. Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen	12	12	12	12		215.500.000	APBD	Kab. Bantul	BPBD
1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN													
1.05.04.2.01	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.05.04.2.01.01	Sub. Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1		69.650.000	APBD	Kab. Bantul	BPBD
		1.05.04.2.01.02	Sub. Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	150	150	150	150		392.980.000	APBD	Kab. Bantul	BPBD
		1.05.04.2.01.06	Sub. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	8	5	4	3		639.250.000	APBD	Kab. Bantul	BPBD

1.05.04.2.04.	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1.05.04.2.04.01	Sub. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Orang	50	50	50	50	107.750.000	APBD	Kab. Bantul	BPBD
		1.05.04.2.04.02	Sub. Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Kalurahan	3	3	10	10	335.000.000	APBD	Kab. Bantul	BPBD

Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.

13.2.1.(a)Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).

2.11.03 Program Pengendalian Pencemaran dan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

2.11.03.2.01	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	4	4	4	4	8.475.319.760	APBD	Kab. Bantul	DLH
		2.11.03.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Dokumen	1	1	1	1	337.175.000	APBD	Kab. Bantul	DLH
2.11.03.2.01	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan	2.11.03.2.01.03	Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan	Dokumen	2	2	2	2	1.597.742.240	APBD	Kab. Bantul	DLH
2.11.03.2.03	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	2.11.03.2.03.04	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan	Dokumen	2	2	2	2	1.145.000.000	APBD	Kab. Bantul	DLH

Target 14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap

14.6.1.(a)Persentase kepatuhan pelaku usaha.

Target 14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.

14.b.1*Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk

3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

3.25.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah	3.25.03.2.02.01	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas	Orang	25	30	35	40	310.800.000	APBD	Kab. Bantul	DKP
3.25.03.2.03	Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat	3.25.03.2.03.02	Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat	Layanan	1	1	1	1	1.244.690.480	APBD	Kab. Bantul	DKP

3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

3.25.06.2.02	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi	3.25.06.2.02.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan	Unit Usaha	5	8	10	15	309.800.000	APBD	Kab. Bantul	DKP
--------------	---	-----------------	--	------------	---	---	----	----	-------------	------	-------------	-----

14.b.1.(a)Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan.

3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

3.25.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah	3.25.03.2.02.01	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas	Orang	25	30	35	40	310.800.000	APBD	Kab. Bantul	DKP
3.25.03.2.03	Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat	3.25.03.2.03.02	Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat	Layanan	1	1	1	1	1.244.690.480	APBD	Kab. Bantul	DKP

3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

3.25.06.2.02	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi	3.25.06.2.02.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan	Unit Usaha	5	8	10	15	309.800.000	APBD	Kab. Bantul	DKP
--------------	---	-----------------	--	------------	---	---	----	----	-------------	------	-------------	-----

Target 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan												
15.1.1.(a).Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.												
Target 15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan												
15.2.1.(a).Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.												
Target 15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.												
15.3.1.(a).Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.												
2.11.03 Program Pengendalian Pencemaran dan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup												
2.11.03.2.01	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	4	4	4	4	8.475.319.760	APBD	Kab. Bantul	DLH
			Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Dokumen	1	1	1	1	337.175.000	APBD	Kab. Bantul	DLH
2.11.03.2.01	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan	2.11.03.2.01.03	Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan	Dokumen	2	2	2	2	1.597.742.240	APBD	Kab. Bantul	DLH
2.11.03.2.03	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	2.11.03.2.03.04	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan	Dokumen	2	2	2	2	1.145.000.000	APBD	Kab. Bantul	DLH
2.11.04 Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati)												
2.11.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2.11.04.2.01.07	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati	Unit	3	3	3	3	2.358.314.560	APBD	Kab. Bantul	DLH
		2.11.04.2.01.04	Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Ha	2,8961	3,1961	3,4961	3,7961	8.650.000.000	APBD	Kab. Bantul	DLH
2.11.09 Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat												
2.11.09.2.01	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	2.11.09.2.01.01	Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga	Entitas	3	3	3	3	205.310.000	APBD	Kab. Bantul	DLH
Target 15.7 Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal.												
15.7.1.(a).Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.												
2.11.10 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup												
2.11.10.2.01	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang	2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH	Dokumen	1	1	1	1	62.300.000	APBD	Kab. Bantul	DLH
15.c Meningkatkan dukungan global dalam upaya memerangi perburuan dan perdagangan jenis yang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal mengejar peluang mata pencaharian yang												
15.c.1.(a).Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.												
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup												
2.11.10.2.01	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang	2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH	Dokumen	1	1	1	1	62.300.000	APBD	Kab. Bantul	DLH
Target 16.1. Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun												
16.1.2.(a) Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk												
16.1.3.(a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir												
16.1.4* Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.												
1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM												

1.05.02.2-01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.05.02.2-01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kasus	300	300	300	300		8.163.992.910	APBD	Kab. Bantul	Satpol PP
		1.05.02.2-01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kasus	300	300	300	300		2.003.170.410	APBD	Kab. Bantul	Satpol PP
		1.05.02.2-01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	12	12	12	12		2.157.743.237	APBD	Kab. Bantul	Satpol PP
		1.05.02.2-01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Orang	100	100	100	100	100	572.933.109	APBD	Kab. Bantul	Satpol PP
		1.05.02.2-01.08	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Unit	30	30	30	30	30	73.261.200	APBD	Kab. Bantul	Satpol PP
1.05.02.2-02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.05.02.2-02.0	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	12	12	12	12	12	561.316.417	APBD	Kab. Bantul	Satpol PP
		1.05.02.2-02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	12	12	12	12	12	2.184.526.080	APBD	Kab. Bantul	Satpol PP
Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak													
16.2.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir													
2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)													
2.08.06.2.02	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.06.2.02.02	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1		1349999745	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB

		2.08.06.2.02.03	Sub kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1		136625000	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB
2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK													
2.08.07.2.02	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		1	1	1	1	279.940.000	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB
		2.08.07.2.02.01	Sub kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	155	160	160	160		922110000	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN													
2.08.03.2.02	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.03.2.02.01	Sub kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	120	130	140	145		1.428.315.779	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB
		2.08.03.2.02.02	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	6	6	6	6		1.207.692.499	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB
16.2.1.(b)Prevelensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan													
2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)													
2.08.06.2.02	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.06.2.02.02	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		1	1	1	1	1349999745	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB

		2.08.06.2.02.03	Sub kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1		136625000	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB
2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK													
2.08.07.2.02	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1		279.940.000	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB
		2.08.07.2.02.01	Sub kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	155	160	160	160		922110000	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN													
2.08.03.2.02	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.03.2.02.01	Sub kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	120	130	140	145		1.428.315.779	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB
		2.08.03.2.02.02	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	6	6	6	6		1.207.692.499	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB
16.2.3.(a) Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun													
2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)													
2.08.06.2.02	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.06.2.02.02	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1		1349999745	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB

		2.08.06.2.02.03	Sub kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1		136625000	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB
2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK													
2.08.07.2.02	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1		279.940.000	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB
		2.08.07.2.02.01	Sub kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	155	160	160	160		922110000	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN													
2.08.03.2.02	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.03.2.02.01	Sub kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	120	130	140	145		1.428.315.779	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB
		2.08.03.2.02.02	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	6	6	6	6		1.207.692.499	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB
16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya													
16.5.1.(a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).													
8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN													
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjangan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	500	550	500	550		1,657,000,000			
8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK													

8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi	8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Orang	1000	1200	900	950	41,349,935,980			
16.6.1.(a)Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)												
4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN												
4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	4.01.04.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen	3	3	3	3	1.309.845.500			
			Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	Laporan	3	3	3	3	1.310.250.000			
5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH												
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Dokumen	1	1	1	1	568.735.000			
		5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	1	1	1	1	568.735.000			
		5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Dokumen	396	396	396	396	175.505.000			
		5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2	2	2	2	2.721.997.500			
		5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	2	2	2	2	2.113.942.500			
		5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	1	1	1	1	121.240.000			
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	64	64	64	64	621.900.000			
		5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	452	452	452	452	175.505.000			

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

		5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	88	88	88	88	121.475.000			
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	649	649	649	649	422.068.632			
		5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Dokumen	2	2	2	2	47.700.000			
		5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	12	12	12	12	90.800.000			
		5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	2	2	1.625.850.000			
		5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	1	1	1	59.000.000			
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan keuangan Daerah	5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	68	68	68	68	1.446.212.188.700			
		5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	1	1	1	1	44.736.457.024			
		5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan	75	75	75	75	130.516.991.250			
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH												
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Dokumen	4	4	4	4	409.495.000	APBD	Kab. Bantul	BPKPAD
		5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	12	12	12	12	13.928.776.920	APBD	Kab. Bantul	BPKPAD

		5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	4	4	4	4	10.646.107.800	APBD	Kab. Bantul	BPKPAD
		5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	7	7	7	7	1.842.090.000	APBD	Kab. Bantul	BPKPAD
		5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Laporan	12	12	12	12	136.952.875	APBD	Kab. Bantul	BPKPAD
		5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	3	3	3	3	2.453.877.625	APBD	Kab. Bantul	BPKPAD
		5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Objek Pajak	8	10	12	12	241.730.000	APBD	Kab. Bantul	BPKPAD
		5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Dokumen	12	12	12	12	11.790.148.610	APBD	Kab. Bantul	BPKPAD
		5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	11	11	11	11	7.187.696.620	APBD	Kab. Bantul	BPKPAD
		5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Dokumen	12	12	12	12	1.094.470.200	APBD	Kab. Bantul	BPKPAD
		5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	12	12	12	12	9.956.425.340	APBD	Kab. Bantul	BPKPAD
		5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	12	12	12	12	131.400.000	APBD	Kab. Bantul	BPKPAD
		5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	12	12	12	12	2.726.035.840	APBD	Kab. Bantul	BPKPAD
		5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	15	15	15	15	290.826.000	APBD	Kab. Bantul	BPKPAD

1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1.05.02.2-01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.05.02.2-01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kasus	300	300	300	300	8.163.992.910			Satpol PP
		1.05.02.2-01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kasus	300	300	300	300	2.003.170.410			

		1.05.02.2-01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	12	12	12	12		2.157.743.237			
		1.05.02.2-01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Orang	100	100	100	100		572.933.109			
		1.05.02.2-01.08	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Unit	30	30	30	30		73.261.200			
1.05.02.2-02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.05.02.2-02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	12	12	12	12		561.316.417			
		1.05.02.2-02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	12	12	12	12		2.184.526.080			
16.6.1.(c) Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan													
4 01 03 Program Perekonomian dan Pembangunan													
4 01 03 2.03	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4 01 03 2.03 01	Sub Kegiatan Pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	161	161	161	161		3.175.013.900			Bagian Pengadaan barang dan Jasa
16.6.1.(d) Persentase instansi pemerintah yang memiliki Indeks Reformasi Birokrasi baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)													
Target 16.7 menjamin pengambilan keputusan yang responsif inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan													
16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)													
16.7.1.(b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)													
5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH													
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	5.03.02.2.01.02	Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (pengadaan CPNS)	Dokumen	1	1	1	1		58.500.000	APBD	Kab. Bantul	BKPSDM
		5.03.02.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	504	396	402	427		361.382.500	APBD	Kab. Bantul	BKPSDM
		5.03.02.2.01.11	Sub. Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	24	24	24	24		330.602.840	APBD	Kab. Bantul	BKPSDM
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	5.03.02.2.02.01	Sub. Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	Dokumen	800	800	800	800		1.898.022.500	APBD	Kab. Bantul	BKPSDM

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

		5.03.02.2.02.02	Sub. Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	800	800	800	800		750.109.000	APBD	Kab. Bantul	BKPSDM
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	5.03.02.2.03.01	Sub. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Orang	40	40	53	53		77.750.000	APBD	Kab. Bantul	BKPSDM
		5.03.02.2.03.02	Sub. Kegiatan Pengelolaan Assessment Center	Dokumen	500	500	500	500		343.000.000	APBD	Kab. Bantul	BKPSDM
		5.03.02.2.03.04	Sub. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Orang	70	80	90	90		795.500.000	APBD	Kab. Bantul	BKPSDM
		5.03.02.2.03.05	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Dokumen	10	10	10	10		21.203.952.100	APBD	Kab. Bantul	BKPSDM
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5.03.02.2.04.02	Sub. Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	9149	9149	9149	9149		173.700.000	APBD	Kab. Bantul	BKPSDM
		5.03.02.2.04.04	Sub. Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Orang	896	896	896	896		1.703.776.000	APBD	Kab. Bantul	BKPSDM
		5.03.02.2.04.07	Sub. Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	Orang	143	141	139	137		358.805.000	APBD	Kab. Bantul	BKPSDM
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN													
2.08.02.2.01	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.01.03	Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Perangkat Daerah	45	45	45	45		755.460.000			
2.08.02.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.02.02	Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Organisasi	40	50	52	55		310.112.000			
2.08.02.2.03	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.03.01	Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	12	15	17	20		220.000.000			
		2.08.02.2.03.02	Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	40	50	55	60		280.000.000			

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

		2.08.02.2.03.03	Sub kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	125.000.000			
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN												
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.2.03.04	Sub kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	85.000.0000			
Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran												
16.9.1*Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang lahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur												
16.9.1.(a)Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah												
16.9.1.(b)Persentase anak yang memiliki akta kelahiran												
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK											
2.12.02.2.01	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.01.01	Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dokumen	2	2	2	2	607,745,891			
		2.12.02.2.01.02	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Dokumen	2	2	2	2	1,010,932,254			
			Sub Kegiatan Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Dokumen	2	2	2	2	642,338,289			
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL											
2.12.03.2.01	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	2 12 03 2.01 01	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	27800	27900	28000	28600	915,711,850			
		2 12 03 2.01 02	Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Layanan	30000	31000	32000	33000	790,272,827			

2 12 03 2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	2 12 03 2.02 04	Sub Kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Laporan	12	12	12	12	386,685,196.00			
2 12 04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN											
2 12 04 2.01	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	2 12 04 2.01 02	Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	3	3	3	3	197,665,391			
		2 12 04 2.01 03	Sub Kegiatan Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Laporan	12	12	12	12	984,502,024			
2 12 04 2.03	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 12 04 2.03 05	Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	4	4	4	4	600,754,696			
		2 12 04 2.03 07	Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Laporan	4	4	4	4	43,164,417			
2 12 05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN											
2 12 05 2.01	Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	2 12 05 2.01 02	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Dokumen	1	1	1	1	441,478,927			
Target 16.10 menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional												
16.10.1.(a)Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran HAM												
16.10.1.(b)Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran HAM perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan												
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN												
2.08.02.2.01	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.01.03	Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Perangkat Daerah	45	45	45	45	755.460.000			

2.08.02.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.02.02	Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Organisasi	40	50	52	55		310.112.000			
2.08.02.2.03	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.03.01	Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	12	15	17	20		220.000.0000			
		2.08.02.2.03.02	Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	40	50	55	60		280.000.000			
		2.08.02.2.03.03	Sub kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1		125.000.000			
2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)													
2.08.06.2.02	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.06.2.02.02	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1		134999745	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB
		2.08.06.2.02.03	Sub kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1		136625000	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB
2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK													

2.08.07.2.02	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	279.940.000	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB
		2.08.07.2.02.01	Sub kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	155	160	160	160	922110000	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN												
2.08.03.2.02	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.03.2.02.01	Sub kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	120	130	140	145	1.428.315.779	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB
		2.08.03.2.02.02	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	6	6	6	6	1.207.692.499	APBD	Kab. Bantul	DP3AP2KB
2.16.02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK												
2.16.02.201	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	16 02 201 02	Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen	12	12	12	12	1.642.660.956	APBD	Kab. Bantul	Diskominfo
		2.16 02 201 05	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	12	12	12	12	3.340.960.739	APBD	Kab. Bantul	Diskominfo
16.10.2*Jumlah instansi yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi												
16.10.2.(a)Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik												
2.16.02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK												
2.16.02.201	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	16 02 201 02	Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen	12	12	12	12	1.642.660.956	APBD	Kab. Bantul	Diskominfo
		2.16 02 201 05	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	12	12	12	12	3.340.960.739	APBD	Kab. Bantul	Diskominfo
2.16.03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA												
2.16.03.201	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.201.03	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Unit	1	1	1	1	29.520.300.797	APBD	Kab. Bantul	Diskominfo

2 16 03 202	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 16 03 202 08	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Layanan	1	3	5	7	1.487.927.805	APBD	Kab. Bantul	Diskominfo
			Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	1	1	1	3.582.083.863	APBD	Kab. Bantul	Diskominfo
16.10.2.(b)Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi												
2.16.02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK												
2.16.02.201	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	16 02 201 02	Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen	12	12	12	12	1.642.660.956	APBD	Kab. Bantul	Diskominfo
		2.16 02 201 05	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	12	12	12	12	3.340.960.739	APBD	Kab. Bantul	Diskominfo
2 16 03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA												
2 16 03 201	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 16 03 201 03	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Unit	1	1	1	1	29.520.300.797	APBD	Kab. Bantul	Diskominfo
2 16 03 202	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 16 03 202 08	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Layanan	1	3	5	7	1.487.927.805	APBD	Kab. Bantul	Diskominfo
			Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	1	1	1	3.582.083.863	APBD	Kab. Bantul	Diskominfo
16.10.2.(c)Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelolaan Informasi dan dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan												
2.16.02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK												
2.16.02.201	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	16 02 201 02	Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen	12	12	12	12	1.642.660.956	APBD	Kab. Bantul	Diskominfo
		2.16 02 201 05	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	12	12	12	12	3.340.960.739	APBD	Kab. Bantul	Diskominfo
2 16 03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA												
2 16 03 201	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 16 03 201 03	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Unit	1	1	1	1	29.520.300.797	APBD	Kab. Bantul	Diskominfo
2 16 03 202	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 16 03 202 08	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Layanan	1	3	5	7	1.487.927.805	APBD	Kab. Bantul	Diskominfo

			Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	1	1	1		3.582.083.863	APBD	Kab. Bantul	Diskominfo
Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.													
17.1.1*Total pendapatan pemerintah kabupaten sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.													
17.1.1.(a)Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.													
17.1.2*Proporsi anggaran daerah yang didanai oleh pajak daerah													
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH													
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Dokumen	4	4	4	4		409.495.000	APBD	Kab. Bantul	BPKPAD
		5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	12	12	12	12		13.928.776.920	APBD	Kab. Bantul	BPKPAD
		5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	4	4	4	4		10.646.107.800	APBD	Kab. Bantul	BPKPAD
		5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	7	7	7	7		1.842.090.000	APBD	Kab. Bantul	BPKPAD
		5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Laporan	12	12	12	12		136.952.875	APBD	Kab. Bantul	BPKPAD
		5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	3	3	3	3		2.453.877.625	APBD	Kab. Bantul	BPKPAD
		5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Objek Pajak	8	10	12	12		241.730.000	APBD	Kab. Bantul	BPKPAD
		5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Dokumen	12	12	12	12		11.790.148.610	APBD	Kab. Bantul	BPKPAD
		5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	11	11	11	11		7.187.696.620	APBD	Kab. Bantul	BPKPAD
		5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Dokumen	12	12	12	12		1.094.470.200	APBD	Kab. Bantul	BPKPAD
		5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	12	12	12	12		9.956.425.340	APBD	Kab. Bantul	BPKPAD
		5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	12	12	12	12		131.400.000	APBD	Kab. Bantul	BPKPAD
		5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	12	12	12	12		2.726.035.840	APBD	Kab. Bantul	BPKPAD

		5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	15	15	15	15		290.826.000	APBD	Kab. Bantul	BKPAD
Target 17.6 Meningkatkan kerja sama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerja sama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan													
17.6.2.(a) Persentase jaringan tulang punggung serat optik daerah yang menghubungkan kecamatan.													
2.16.02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK													
2.16.02.201	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	16 02 201 02	Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen	12	12	12	12		1.642.660.956	APBD	Kab. Bantul	Diskominfo
		2.16 02 201 05	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	12	12	12	12		3.340.960.739	APBD	Kab. Bantul	Diskominfo
2 16 03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA													
2 16 03 201	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 16 03 201 03	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Unit	1	1	1	1		29.520.300.797	APBD	Kab. Bantul	Diskominfo
2 16 03 202	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 16 03 202 08	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Layanan	1	3	5	7		1.487.927.805	APBD	Kab. Bantul	Diskominfo
			Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	1	1	1		3.582.083.863	APBD	Kab. Bantul	Diskominfo
3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR													
3.30.05.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.30.05.2.01.01	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	pelaku usaha	80	60	60	60		248162700	APBD	Kab. Bantul	Diskominfo
Target 17.17 Mendorong dan meningkatkan kerja sama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerja sama.													
17.17.1.(a) Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).													
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT													
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	54	58	62	66		795.321.000	APBD	Kab. Bantul	Bagian Tata Pemerintahan
Target 17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan													
17.19.1.(a) Jumlah pejabat fungsional prnata komputer pada Pemerintah Daerah													
5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH													
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	5.03.02.2.01.02	Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (pengadaan CPNS)	Dokumen	1	1	1	1		58.500.000	APBD	Kab. Bantul	BKPSDM

		5.03.02.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	504	396	402	427		361.382.500	APBD	Kab. Bantul	BKPSDM
		5.03.02.2.01.11	Sub. Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	24	24	24	24		330.602.840	APBD	Kab. Bantul	BKPSDM
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	5.03.02.2.02.01	Sub. Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	Dokumen	800	800	800	800		1.898.022.500	APBD	Kab. Bantul	BKPSDM
		5.03.02.2.02.02	Sub. Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	800	800	800	800		750.109.000	APBD	Kab. Bantul	BKPSDM
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	5.03.02.2.03.01	Sub. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Orang	40	40	53	53		77.750.000	APBD	Kab. Bantul	BKPSDM
		5.03.02.2.03.02	Sub. Kegiatan Pengelolaan Assessment Center	Dokumen	500	500	500	500		343.000.000	APBD	Kab. Bantul	BKPSDM
		5.03.02.2.03.04	Sub. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Orang	70	80	90	90		795.500.000	APBD	Kab. Bantul	BKPSDM
		5.03.02.2.03.05	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Dokumen	10	10	10	10		21.203.952.100	APBD	Kab. Bantul	BKPSDM
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5.03.02.2.04.02	Sub. Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	9149	9149	9149	9149		173.700.000	APBD	Kab. Bantul	BKPSDM
		5.03.02.2.04.04	Sub. Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Orang	896	896	896	896		1.703.776.000	APBD	Kab. Bantul	BKPSDM
		5.03.02.2.04.07	Sub. Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	Orang	143	141	139	137		358.805.000	APBD	Kab. Bantul	BKPSDM

17.19.1.(b) Persentase OPD yang sudah memiliki pejabat fungsional statistisi dan/atau pranata komputer.

5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	5.03.02.2.01.02	Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (pengadaan CPNS)	Dokumen	1	1	1	1		58.500.000	APBD	Kab. Bantul	BKPSDM
		5.03.02.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	504	396	402	427		361.382.500	APBD	Kab. Bantul	BKPSDM
		5.03.02.2.01.11	Sub. Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	24	24	24	24		330.602.840	APBD	Kab. Bantul	BKPSDM
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	5.03.02.2.02.01	Sub. Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	Dokumen	800	800	800	800		1.898.022.500	APBD	Kab. Bantul	BKPSDM
		5.03.02.2.02.02	Sub. Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	800	800	800	800		750.109.000	APBD	Kab. Bantul	BKPSDM

5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	5.03.02.2.03.01	Sub. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Orang	40	40	53	53		77.750.000	APBD	Kab. Bantul	BKPSDM
		5.03.02.2.03.02	Sub. Kegiatan Pengelolaan Assessment Center	Dokumen	500	500	500	500		343.000.000	APBD	Kab. Bantul	BKPSDM
		5.03.02.2.03.04	Sub. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Orang	70	80	90	90		795.500.000	APBD	Kab. Bantul	BKPSDM
		5.03.02.2.03.05	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Dokumen	10	10	10	10		21.203.952.100	APBD	Kab. Bantul	BKPSDM
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5.03.02.2.04.02	Sub. Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	9149	9149	9149	9149		173.700.000	APBD	Kab. Bantul	BKPSDM
		5.03.02.2.04.04	Sub. Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Orang	896	896	896	896		1.703.776.000	APBD	Kab. Bantul	BKPSDM
		5.03.02.2.04.07	Sub. Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	Orang	143	141	139	137		358.805.000	APBD	Kab. Bantul	BKPSDM

17.19.1.(c) Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer OPD

5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	5.03.02.2.01.02	Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (pengadaan CPNS)	Dokumen	1	1	1	1		58.500.000	APBD	Kab. Bantul	BKPSDM
		5.03.02.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	504	396	402	427		361.382.500	APBD	Kab. Bantul	BKPSDM
		5.03.02.2.01.11	Sub. Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	24	24	24	24		330.602.840	APBD	Kab. Bantul	BKPSDM
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	5.03.02.2.02.01	Sub. Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	Dokumen	800	800	800	800		1.898.022.500	APBD	Kab. Bantul	BKPSDM
		5.03.02.2.02.02	Sub. Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	800	800	800	800		750.109.000	APBD	Kab. Bantul	BKPSDM
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	5.03.02.2.03.01	Sub. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Orang	40	40	53	53		77.750.000	APBD	Kab. Bantul	BKPSDM
		5.03.02.2.03.02	Sub. Kegiatan Pengelolaan Assessment Center	Dokumen	500	500	500	500		343.000.000	APBD	Kab. Bantul	BKPSDM
		5.03.02.2.03.04	Sub. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Orang	70	80	90	90		795.500.000	APBD	Kab. Bantul	BKPSDM

		5.03.02.2.03.05	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Dokumen	10	10	10	10		21.203.952.100	APBD	Kab. Bantul	BKPSDM
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5.03.02.2.04.02	Sub. Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	9149	9149	9149	9149		173.700.000	APBD	Kab. Bantul	BKPSDM
		5.03.02.2.04.04	Sub. Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Orang	896	896	896	896		1.703.776.000	APBD	Kab. Bantul	BKPSDM
		5.03.02.2.04.07	Sub. Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	Orang	143	141	139	137		358.805.000	APBD	Kab. Bantul	BKPSDM
17.19.2.(c) Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.													
2.16.02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK													
2.16.02.201	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	16 02 201 02	Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen	12	12	12	12		1.642.660.956	APBD	Kab. Bantul	Diskominfo
		2.16 02 201 05	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	12	12	12	12		3.340.960.739	APBD	Kab. Bantul	Diskominfo

Matriks 2b: Rencana Program/Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo

Program/Kegiatan/Rincian Output (1)			Satuan (2)	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta) (4)	Instansi Pelaksana (7)
				2023	2024	2025	2026	2027		
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH										
Target 1.2. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai										
INDIKATOR SDG's : '1.2.1 Tingkat kemiskinan daerah										
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat										
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	orang	-	-	-	26915	-	232.00	DINKES
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	orang	-	-	-	6528	-	232.00	DINKES
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	orang	-	-	-	6528	-	232.00	DINKES
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	orang	-	-	-	6961	-	542.997	DINKES
INDIKATOR SDG's : '1.2.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun, Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Tahun										
Program Pengelolaan Pendidikan										
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	unit	1	1	1	-	-	48,800.00	DIKPORA
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sara, Prasarana dan Utilitas Sekolah	sekolah	1	5	5	5	-	84,913.50	DIKPORA
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Peserta Didik	35250	-	-	-	-	16,981.21	DIKPORA
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	satuan pendidikan	337	337	337	337	-	2,625.00	DIKPORA
		Pembinaan Minat, Bakat dan Keaktivitas Siswa SD	siswa	3000	3000	3000	3000	-	2,050.00	DIKPORA
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	orang	1485	-	-	-	-	50,114.76	DIKPORA
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	orang	907	-	-	-	-	2,005.74	DIKPORA

		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	satuan pendidikan	337	337	337	337	-	540.00	DIKPORA
		Pengelolaan Dana BOS SD	satuan pendidikan	337	337	337	337	-	125,022.72	DIKPORA
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS SD	orang	350	350	350	350	-	470.00	DIKPORA
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	unit	1	1	1	-	-	10,000.00	DIKPORA
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	ruang	1	-	-	-	-	351.00	DIKPORA
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	peserta didik	18248	18498	18498	18498	-	13,012.65	DIKPORA
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	peserta didik	15421	-	-	-	-	317.03	DIKPORA
		Pembinaan Minat, Bakat dan Keativitas Siswa	peserta didik	4000	4000	4000	4000	-	1,786.05	DIKPORA
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan SMP	orang	96	94	94	94	-	9,062.67	DIKPORA
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	orang	872	872	872	872	-	1,655.52	DIKPORA
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	kegiatan	5	5	5	5	-	628.06	DIKPORA
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	satuan pendidikan	65	65	65	65	-	84,471.05	DIKPORA
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	orang	130	130	130	130	-	305.65	DIKPORA
INDIKATOR SDG's : '1.2.2 Jumlah Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran usia 0-18 tahun										
PROGRAM										
PENCATATAN										
SIPLCAKUPA										
N PELAYANAN										
PENCATATAN										
SIPIIL										
2.12.03.201	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Pencatatan Penata Usahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	5000	5000	5000	5000	-	460.00	Dinas Dukcapil
INDIKATOR SDG's : '1.2.2 Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.										
1.2.2.7										

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM										
		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Sambungan Rumah (SR)	1350	4661	642	637	-	19,512	DPUPKP
			liter/detik	6	6	6	6	-		
		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Sambungan Rumah (SR)	220	219	219	219	-	7,119	DPUPKP
		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan (DAK Fisik)	Sambungan Rumah (SR)	660	658	658	658	-	16,146	DPUPKP
1.5										
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			%	68.05	78.41	88.09	100	-	4222.51	BPBD
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota								
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana								
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana								
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana								
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM										
		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Sambungan Rumah (SR)	1350	4661	642	637	-	19,512	DPUPKP
			liter/detik	6	6	6	6	-		
		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Sambungan Rumah (SR)	220	219	219	219	-	7,119	DPUPKP

		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan (DAK Fisik)	Sambungan Rumah (SR)	660	658	658	658	-	16,146	DPUPKP
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL										
		Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Rumah tangga Terlayani	750	750	750	750	-	7,245	DPUPKP
		Penyediaan Sarana Persampahan	Unit	1	1	1	1	-	13,619	DPUPKP
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH										
		Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Rumah Tangga dengan Tanki Septic	279	273	278	274	-	7,350	DPUPKP
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit SPAL	1	1	1	1	-	680	DPUPKP
		Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Rumah Tangga IPLT	692	725	760	796	-	21,269	DPUPKP
INDIKATOR SDG's : 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk										
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP									979.251	Dinas Kesehatan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		orang	5310	5360	5410	5460			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		orang	5100	5250	5200	5250			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		orang	5100	5150	5200	5250			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		orang	21216	21216	21216	21216			
3.1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per									
3.1.1	Angka Kematian Ibu (AKI)									

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	orang	4488	5310	5460	5410	5460	343.101		Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	orang	4488	5100	5150	5200	5250	232.05		Dinas Kesehatan
3.2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat										
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	orang	4488	5100	5150	5200	5250	232.05		Dinas Kesehatan
3.3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit										
3.4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak										
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	orang	4803	4883	4963	5043	5123	232.05		Dinas Kesehatan

3.6											
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan(LLAJ)			%							6,347.86	Dinas Perhubungan
				49.13	54.48	61.53	69.77				
		1. Penyediaan Perlengkapan Jalandi Jalan Kabupaten/Kota									
		Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Unit LPJU							2,102.60	Dinas Perhubungan
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Cermin Tikungan							1,992.00	Dinas Perhubungan
			Guardrail								
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Bahan/Material LPJU							1,338.00	Dinas Perhubungan
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Paket Pemel Fasilitas Lalu Lintas	1	1	1	1	-		865.00	Dinas Perhubungan
		2. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	unit	5	5	5	5	-		1,242.00	Dinas Perhubungan
		3. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kendaraan Parkir	320000	325000	330000	335000	-		1,242.00	Dinas Perhubungan
		4.Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								1,559.00	Dinas Perhubungan
		Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kendaraan Bermotor Diuji								Dinas Perhubungan
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Paket	1	1	1	1	-			Dinas Perhubungan
		5.Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota								2,454.22	Dinas Perhubungan
		Koordinasi Permasalahan LLAJ	Dokumen	1	1	1	1			1,414.48	Dinas Perhubungan
		Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	Kali	1	1	1	1	-			Dinas Perhubungan
		Sosialisasi Etika Berjalan Lintas	Orang	80	80	80	80	-			Dinas Perhubungan

		Pengaturan Persimpangan sebidang	Bulan	12	12	12	12	-		Dinas Perhubungan
		Survey Lalu Lintas	Dokumen	1	1	1	1			Dinas Perhubungan
		Kajian Studi evaluasi kinerja jalan dan simpang	dokumen	1	1	1	1	-		Dinas Perhubungan
		Operasi Yustisi	Kali	24	24	24	24	-		Dinas Perhubungan
		Pengawasan Angkutan tambang dan Patroli kewilayahan	Kali	30	30	30	30	-		Dinas Perhubungan
		Pengendalian Hari Besar	Kali	3	3	3	3	-		Dinas Perhubungan
		6.Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	dokumen	4	4	4	4	-	72.15	Dinas Perhubungan

PROPGRAM PEMERINTAH DAERAH

Target 4.1. Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas,

INDIKATOR SDG's : 4.1.1* Proporsi anak-anak/anak muda: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 3 yang mencapai standar kemampuan minimum

INDIKATOR SDG's : 4.1.1.(a) Proporsi anak-anak dan remaja: (a) di kelas 5 yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam Nilai rata-rata hasil PISA: Membaca

Program Pengelolaan Pendidikan										
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	unit	1	1	1	-	-	48,800.00	DIKPORA
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sara, Prasarana dan Utilitas Sekolah	sekolah	1	5	5	5	-	84,913.50	DIKPORA
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Peserta Didik	35250	-	-	-	-	16,981.21	DIKPORA
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	satuan pendidikan	337	337	337	337	-	2,625.00	DIKPORA
		Pembinaan Minat, Bakat dan Keativitas Siswa SD	siswa	3000	3000	3000	3000	-	2,050.00	DIKPORA
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	orang	1485	-	-	-	-	50,114.76	DIKPORA
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	orang	907	-	-	-	-	2,005.74	DIKPORA
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	satuan pendidikan	337	337	337	337	-	540.00	DIKPORA
		Pengelolaan Dana BOS SD	satuan pendidikan	337	337	337	337	-	125,022.72	DIKPORA
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS SD	orang	350	350	350	350	-	470.00	DIKPORA

INDIKATOR SDG's : 4.1.1.(a) Proporsi anak-anak dan remaja: (a) di kelas 5 yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam Nilai rata-rata hasil PISA: Matematika

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Program Pengelolaan Pendidikan										
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	unit	1	1	1	-	-	48,800.00	DIKPORA
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sara, Prasarana dan Utilitas Sekolah	sekolah	1	5	5	5	-	84,913.50	DIKPORA
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Peserta Didik	35250	-	-	-	-	16,981.21	DIKPORA
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	satuan pendidikan	337	337	337	337	-	2,625.00	DIKPORA
		Pembinaan Minat, Bakat dan Keativitas Siswa SD	siswa	3000	3000	3000	3000	-	2,050.00	DIKPORA
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	orang	1485	-	-	-	-	50,114.76	DIKPORA
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	orang	907	-	-	-	-	2,005.74	DIKPORA
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	satuan pendidikan	337	337	337	337	-	540.00	DIKPORA
		Pengelolaan Dana BOS SD	satuan pendidikan	337	337	337	337	-	125,022.72	DIKPORA
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS SD	orang	350	350	350	350	-	470.00	DIKPORA
INDIKATOR SDG's : 4.1.1.(a) Proporsi anak-anak dan remaja: (c) di usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam membaca										
Program Pengelolaan Pendidikan										
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	unit	1	1	1	-	-	10,000.00	DIKPORA
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	ruang	1	-	-	-	-	351.00	DIKPORA
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	peserta didik	18248	18498	18498	18498	-	13,012.65	DIKPORA
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	peserta didik	15421	-	-	-	-	317.03	DIKPORA
		Pembinaan Minat, Bakat dan Keativitas Siswa	peserta didik	4000	4000	4000	4000	-	1,786.05	DIKPORA
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan SMP	orang	96	94	94	94	-	9,062.67	DIKPORA
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	orang	872	872	872	872	-	1,655.52	DIKPORA

		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	kegiatan	5	5	5	5	-	628.06	DIKPORA
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	satuan pendidikan	65	65	65	65	-	84,471.05	DIKPORA
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	orang	130	130	130	130	-	305.65	DIKPORA
INDIKATOR SDG's : 4.1.1.(a) Proporsi anak-anak dan remaja: (c) di usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam matematika										
Program Pengelolaan Pendidikan										
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	unit	1	1	1	-	-	10,000.00	DIKPORA
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	ruang	1	-	-	-	-	351.00	DIKPORA
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	peserta didik	18248	18498	18498	18498	-	13,012.65	DIKPORA
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	peserta didik	15421	-	-	-	-	317.03	DIKPORA
		Pembinaan Minat, Bakat dan Keaktivitas Siswa	peserta didik	4000	4000	4000	4000	-	1,786.05	DIKPORA
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan SMP	orang	96	94	94	94	-	9,062.67	DIKPORA
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	orang	872	872	872	872	-	1,655.52	DIKPORA
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	kegiatan	5	5	5	5	-	628.06	DIKPORA
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	satuan pendidikan	65	65	65	65	-	84,471.05	DIKPORA
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	orang	130	130	130	130	-	305.65	DIKPORA
INDIKATOR SDG's : 4.1.2 Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat										
Program Pengelolaan Pendidikan										
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	unit	1	1	1	-	-	48,800.00	DIKPORA
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sara, Prasarana dan Utilitas Sekolah	sekolah	1	5	5	5	-	84,913.50	DIKPORA
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Peserta Didik	35250	-	-	-	-	16,981.21	DIKPORA

		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	satuan pendidikan	337	337	337	337	-	2,625.00	DIKPORA
		Pembinaan Minat, Bakat dan Keativitas Siswa SD	siswa	3000	3000	3000	3000	-	2,050.00	DIKPORA
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	orang	1485	-	-	-	-	50,114.76	DIKPORA
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	orang	907	-	-	-	-	2,005.74	DIKPORA
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	satuan pendidikan	337	337	337	337	-	540.00	DIKPORA
		Pengelolaan Dana BOS SD	satuan pendidikan	337	337	337	337	-	125,022.72	DIKPORA
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS SD	orang	350	350	350	350	-	470.00	DIKPORA
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	unit	1	1	1	-	-	10,000.00	DIKPORA
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	ruang	1	-	-	-	-	351.00	DIKPORA
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	peserta didik	18248	18498	18498	18498	-	13,012.65	DIKPORA
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	peserta didik	15421	-	-	-	-	317.03	DIKPORA
		Pembinaan Minat, Bakat dan Keativitas Siswa	peserta didik	4000	4000	4000	4000	-	1,786.05	DIKPORA
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan SMP	orang	96	94	94	94	-	9,062.67	DIKPORA
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	orang	872	872	872	872	-	1,655.52	DIKPORA
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	kegiatan	5	5	5	5	-	628.06	DIKPORA
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	satuan pendidikan	65	65	65	65	-	84,471.05	DIKPORA
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	orang	130	130	130	130	-	305.65	DIKPORA
INDIKATOR SDG's : 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini,										
Program Pengelolaan Pendidikan										

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD	unit	3	-	-	-	-	454.40967	DIKPORA
		Penyediaan Biaya Personil peserta didik PAUD	peserta didik	390	-	-	-	-	53.2	DIKPORA
		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	peserta didik	16056	-	-	-	-	361.7061	DIKPORA
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan PAUD	orang	2750	2750	2750	2750	-	18674.051	DIKPORA
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidik PAUD	orang	814	830	850	850	-	1333.5156	DIKPORA
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	satuan pendidikan	830	830	830	830	-	540	DIKPORA
		Pengelolaan DANA BOP PAUD	orang	1636	-	-	-	-	27.1678	DIKPORA
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan DANA BOP PAUD	orang	1058	-	-	-	-	73.2878	DIKPORA
INDIKATOR SDG's : 4.5 Menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi										
Program Pengelolaan Pendidikan										
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	unit	1	1	1	-	-	10,000.00	DIKPORA
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	ruang	1	-	-	-	-	351.00	DIKPORA
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	peserta didik	18248	18498	18498	18498	-	13,012.65	DIKPORA
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	peserta didik	15421	-	-	-	-	317.03	DIKPORA
		Pembinaan Minat, Bakat dan Keaktivitas Siswa	peserta didik	4000	4000	4000	4000	-	1,786.05	DIKPORA
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan SMP	orang	96	94	94	94	-	9,062.67	DIKPORA
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	orang	872	872	872	872	-	1,655.52	DIKPORA
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	kegiatan	5	5	5	5	-	628.06	DIKPORA
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	satuan pendidikan	65	65	65	65	-	84,471.05	DIKPORA
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	orang	130	130	130	130	-	305.65	DIKPORA
INDIKATOR SDG's : 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi										

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Program terkait angka melek huruf											
INDIKATOR SDG's : 4.c Pada tahun 2030, secara substansial meningkatkan penyediaan guru-guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional untuk pelatihan guru di											
Program Pengelolaan Pendidikan											
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	orang	1485	-	-	-	-		50,114.76	DIKPORA
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	orang	907	-	-	-	-		2,005.74	DIKPORA
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	satuan pendidikan	337	337	337	337	-		540.00	DIKPORA
		Pengelolaan Dana BOS SD	satuan pendidikan	337	337	337	337	-		125,022.72	DIKPORA
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS SD	orang	350	350	350	350	-		470.00	DIKPORA
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan SMP	orang	96	94	94	94	-		9,062.67	DIKPORA
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	orang	872	872	872	872	-		1,655.52	DIKPORA
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	kegiatan	5	5	5	5	-		628.06	DIKPORA
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	satuan pendidikan	65	65	65	65	-		84,471.05	DIKPORA
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	orang	130	130	130	130	-		305.65	DIKPORA
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH											
Target 6.1. Pada Tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua											
6.1.1(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak											
1.03.03 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air											
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM											
		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Sambungan Rumah (SR)	1350	4661	642	637	-		19,512	DPUPKP
			liter/detik	6	6	6	6	-			

		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Sambungan Rumah (SR)	220	219	219	219	-	7,119	DPUPKP
		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan (DAK Fisik)	Sambungan Rumah (SR)	660	658	658	658	-	16,146	DPUPKP
6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.										
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL										
		Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Rumah tangga Terlayani	750	750	750	750	-	7,245	DPUPKP
		Penyediaan Sarana Persampahan	Unit	1	1	1	1	-	13,619	DPUPKP
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH										
		Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Rumah Tangga dengan Tanki Septic	279	273	278	274	-	7,350	DPUPKP
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit SPAL	1	1	1	1	-	680	DPUPKP
		Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Rumah Tangga IPLT	692	725	760	796	-	21,269	DPUPKP
6.3.	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan									
6.3.1	Indeks Kualitas Air									
Program Perencanaan Lingkungan Hidup										
	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	3	3	3	2		1.276	DLH
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup										

	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	7	92	138	184			1	DLH
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat											
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Sub Kegiatan Jumlah lembaga/ kelompok masyarakat/ institusi yang terdaftar yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	laporan	10	10	10	10			357	DLH
	Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Sub Kegiatan Jumlah masyarakat/ kelompok masyarakat/ pelaku usaha/ kegiatan yang terlibat	orang	375	375	375	375			250	DLH
6.3 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas sesuai kepantasan.											
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)											
	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya		Unit	5	5	5	5	-		1359	DPUPKP
	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota		orang	300	301	302	303	-		1421	DPUPKP

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

	Pembangunan Jaringan Irigasi		km saluran irigasi	0.7	0.7	1	0.7	-	12002	DPUPKP
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan		km saluran irigasi	1	2.2	1	1	-	15196	DPUPKP
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan (DAK Fisik)		Bendung	8	4	3	4	-	65155	DPUPKP
			km saluran irigasi	2	2	3.2	2.9	-		
6.6.	Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.									
6.6.2	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)									
Program Perencanaan Lingkungan Hidup										
	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	3	3	3	2		1	DLH
Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (KEHATI)										
	Kegiatan Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati	unit	1525	700	700	700		1	DLH
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat										
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Sub Kegiatan Jumlah lembaga/ kelompok masyarakat/ institusi yang terdaftar yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	laporan	10	10	10	10		357	DLH
	Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Sub Kegiatan Jumlah masyarakat/ kelompok masyarakat/ pelaku usaha/ kegiatan yang terlibat	orang	375	375	375	375		250	DLH
6.6.3	Indeks Kualitas Air Sungai									
Program Perencanaan Lingkungan Hidup										

	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	3	3	3	2			1	DLH
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup											
	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	7	92	138	184			1	DLH
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat											
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Sub Kegiatan Jumlah lembaga/ kelompok masyarakat/ institusi yang terdaftar yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	laporan	10	10	10	10			357	DLH
	Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Sub Kegiatan Jumlah masyarakat/ kelompok masyarakat/ pelaku usaha/ kegiatan yang terlibat	orang	375	375	375	375			250	DLH
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH											
Target 7.2. Pada Tahun 2030, meningkatkan secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global											
7.1 Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua											
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)											
		Penyediaan Tenaga Listrik untuk Masyarakat	Unit rumah	70	70	70	70	-		800	DPUPKP
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH											
Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara											
8.1.1*Laju pertumbuhan PDB per kapita											
8.1.1.(a)PDB per kapita											
8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi											
INDIKATOR SDG's : 8.2.1*Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun											
2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA											
2.07.04.201.	Keg Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan antar Kerja	Orang	1680	1680	1920	1920			30.845,00	Disnakertrans
		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Orang	1680	1680	1920	1920			578,80	Disnakertrans
		Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	600	620	640	660			30.266,24	Disnakertrans
2.07.04.203	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Orang	3600	3600	3840	3840			542,60	Disnakertrans
		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Orang	3600	3600	3840	3840			542,60	Disnakertrans
2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA											

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2.07.03.01	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Orang	96	128	160	192		3.879,18	Disnakertrans
2.07.03.02	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	LPK	2	2	2	2		635,23	Disnakertrans
Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi										
8.3.1*Proporsi lapangan kerja informal sektor nonpertanian, berdasarkan jenis kelamin										
8.3.1.(a)Persentase tenaga kerja formal										
8.3.1.(b)Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian										
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA										
2.07.04.201.	Keg Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan antar Kerja	Orang	1680	1680	1920	1920		30.845,00	Disnakertrans
		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Orang	1680	1680	1920	1920		578,80	Disnakertrans
		Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	600	620	640	660		30.266,24	Disnakertrans
2.07.04.203	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Orang	3600	3600	3840	3840		542,60	Disnakertrans
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH										
Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan										
9.1.1.(a)Kondisi Mantap Jalan Kabupaten										
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN										
			dokumen	2	2	2	2	-	22000	DPUPKP
			km	0.5	0.5	0.5	0.5	-	10300	DPUPKP
			km	10	10	10	10	-	158312	DPUPKP
			km	3	3	3	3	-	25100	DPUPKP
			km	90	90	90	90	-	31150	DPUPKP
			meter	20	20	20	20	-	10300	DPUPKP
			meter	10	10	10	10	-	4350	DPUPKP
			meter	50	50	50	50	-	4350	DPUPKP
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN DAK										DPUPKP
			km	24.85	18.35	11	9	-	316000	DPUPKP
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI										DPUPKP
			laporan	85	90	95	100	-	859	DPUPKP

	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Sub. Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Unit Rumah	400	400	400	400		13,422	DPUPKP
		Pembangunan Rumah Baru Layak Huni (DAK Fisik)	Unit Rumah	100	100	100	100		4,000	DPUPKP
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			%	68.05	78.41	88.09	100	-	4222.51	BPBD
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota								
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana								
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana								
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana								
Target 11.6. Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan										
11.6.1. Persentase sampah yang terkelola dan ketersediaan alat berat pengelola sampah yang beroperasi										
Program Pengelolaan Sampah										
	Pengelolaan Sampah									
		Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Laporan	1	1	1	1		350.431	DLH
		Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kelompok	96	96	96	96		268.802	DLH
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Unit	16	20	20	20		849.477	DLH
		Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Rumah Tangga	750	750	750	750		7245	DPU
		Penyediaan Sarana Persampahan	Unit	1	1	1	1		13629.1763	DPU
11.6.3. Indeks Kualitas Udara										
Program Perencanaan Lingkungan Hidup										
	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	3	3	3	2		1,276	DLH
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup										
	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	7	92	138	184		1,359.18	DLH

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)											
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	KBWU	-	-	-	-			1,225.00	Dishub
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	paket	1	1	1	1			334.191	Dishub
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH											
Target 12.1 Melaksanakan the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju,											
12.1.1*Jumlah kolaborasi tematik quickwins program.											
Target 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang											
12.4.1.(a)Jumlah peserta Proper (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan) yang mencapai minimal ranking BIRU.											
12.4.2.(a)Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).											
Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.											
12.6.1.a. Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.											
12.7.1.a. Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister. .											
2.11.11 Program Pengelolaan Persampahan											
Target 12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktik-praktik berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam											
12.6.1. Jumlah perusahaan yang wajib memiliki dokumen lingkungan dan telah diverifikasi BLH DIY											
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)											
2.11.06.2.01	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH	Laporan	60	71	81	91			186	DLH
Target 12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras											
12.8.1. Terlaksananya pembinaan kelompok masyarakat (Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup)											
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat											
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Sub Kegiatan Jumlah lembaga/ kelompok masyarakat/ institusi yang terdaftar yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	laporan	10	10	10	10			357	DLH
	Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Sub Kegiatan Jumlah masyarakat/ kelompok masyarakat/ pelaku usaha/ kegiatan yang terlibat	orang	375	375	375	375			250	DLH
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH											
Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.											
13.1.1*Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.											
13.1.2*Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang											
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA											
			%	68.05	78.41	88.09	100	-		4222.51	BPBD
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota									BPBD
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana									BPBD

Matriks 2b: Rencana Program/Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul

Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan

Program/Kegiatan/Rincian Output (1)			Satuan (2)	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
				2023	2024	2025	2026	2027				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH												
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional												
Kode dan Nama Program: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan: Pengelolaan Surveilans Kesehatan	dokumen	2	2	2	2			APBD	Dinas Kesehatan
		Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	dokumen	4	4	4	4			APBD	Dinas Kesehatan
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan												
Kode dan Nama Program: PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL												
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan: Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan: Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	9	9	9	9			APBD	Dinsos P3A
		Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan: Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	18	18	18	18			APBD	Dinsos P3A
		Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan: Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	4	4	4	4			APBD	Dinsos P3A
		Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan: Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	lembaga	1	1	1	1			APBD	Dinsos P3A
		Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan: Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	lembaga	1	1	1	1			APBD	Dinsos P3A
Kode dan Nama Program: PROGRAM REHABILITASI SOSIAL												
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan: Penyediaan Permakanan	orang	100	100	100	100			APBD	Dinsos P3A
		Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan: Penyediaan Alat Bantu	orang	108	108	108	108			APBD	Dinsos P3A

		Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan: Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	orang	90	90	90	90					Dinsos P3A
		Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan: Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	orang	60	60	60	60					
		Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan: Pemberian Layanan Kedaruratan	orang	10	10	10	10					
		Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan: Pemberian Layanan Rujukan	orang	6	6	6	6					
Kode dan Nama Program: PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL													
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan: Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan: Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	orang	583972	583972	583972	583972				APBD	Dinsos P3A
		Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan: Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	keluarga	213231	213231	213231	213231				APBD	Dinsos P3A
		Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan: Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	keluarga	279	279	279	279					Dinsos P3A
		Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan: Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	orang	3270	3270	3270	3270					
Kode dan Nama Program: PROGRAM PENANGANAN BENCANA													
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan: Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan: Penyediaan Makanan	orang	150	150	150	150				APBD	Dinsos P3A
		Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan: Penyediaan Sandang	orang	100	100	100	100				APBD	Dinsos P3A
		Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan: Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	orang	80	80	80	80					Dinsos P3A

Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan: Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan: Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	kampung	9	9	9	9		APBD	Dinsos P3A
		Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan: Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	orang	2952	2952	2952	2952		APBD	Dinsos P3A
Kode dan Nama Program: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan: Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	dokumen	4	4	4	4		APBD	Dinas Kesehatan

Tujuan 2: Tanpa Kelaparan

Program/Kegiatan/Rincian Output (1)	Satuan (2)	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)		
		2023	2024	2025	2026	2027						
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH												
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah lima tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui												
Kode dan Nama Program: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	orang	8662	8662	8662	8662		1.808.037.000	APBD	Dinas Kesehatan
		Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	orang	7723	7568	7719	7719				
		Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	orang	38453	38543	38453	38453				
		Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	orang	8724	8724	8724	8724				
		Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	orang	516023	516023	516023	516023				
		Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	orang	153755	153755	153755	153755				
		Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	dokumen	4	4	4	4				

Tujuan 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Program/Kegiatan/Rincian Output (1)	Satuan (2)	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)		
		2023	2024	2025	2026	2027						
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH												
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup												
Kode dan Nama Program: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	orang	8662	8662	8662	8662		1.808.037.000	APBD	Dinas Kesehatan
		Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	orang	7723	7568	7719	7719				
		Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	orang	38453	38543	38453	38453				

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

		Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	orang	8724	8724	8724	8724					
		Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	orang	516023	516023	516023	516023					
		Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	dokumen	4	4	4	4					
		Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	dokumen	7	7	7	7					
		Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	7	7	7	7					

PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit besumber air, serta penyakit menular lainnya

Kode dan Nama Program: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	orang	4024	4269	4397	4397		1.808.037.000	APBD	Dinas Kesehatan
		Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	orang	9813	10108	10108	10108				
		Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	dokumen	7	7	7	7				
		Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	7	7	7	7				
		Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan: Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	dokumen	4	4	4	4				
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan:	Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan:									
		Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan:									

PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan

Kode dan Nama Program: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	orang	516023	516023	516023	516023		1.808.037.000	APBD	Dinas Kesehatan
		Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	orang	153755	153755	153755	153755				
		Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	orang	35260	35260	35260	35260				
		Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	orang	8546	8546	8546	8546				
		Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	orang	1612	1612	1612	1612				
		Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	dokumen	4	4	4	4				
		Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	7	7	7	7				
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan:	Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan:									
		Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan:									

PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang

Kode dan Nama Program: PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan: Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan	Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan: Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Laporan	18	18	18	18			APBD	DPMKP2KB
----------------	---	--------------------	---	---------	----	----	----	----	--	--	------	----------

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Kode dan Nama Program: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan: Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	dokumen	4	4	4	4			APBD	Dinas Kesehatan
		Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan: Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	7	7	7	7				
		Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan: Pengelolaan Surveilans Kesehatan	dokumen	2	2	2	2			APBD	Dinas Kesehatan
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan:	Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan:									
		Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan:									

Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas

Program/Kegiatan/Rincian Output (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2023	2024	2025	2026	2027				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH													
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:													
Kode dan Nama Program: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan SD	Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan: Pengadaan Perlengkapan Siswa	unit	4821	4821	4821	4821			APBD	Dinsos P3A	
		Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan: Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	peserta didik	805	805	805	805			APBD	Dinas Pendidikan	
		Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan: Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Satuan pendidikan	468	468	468	468			APBD	Dinas Pendidikan	
		Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan:										
	Nama Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan: Pengadaan Perlengkapan Siswa	paket	19585	19585	19585	19585			APBD	Dinas Pendidikan	
		Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan: Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	peserta didik	761	761	761	761			APBD	Dinas Pendidikan	
		Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan: Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Satuan pendidikan	103	103	103	103					
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan: Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	paket	4047	4452	4452	4452			APBD	Dinsos P3A	
		Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan: Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	peserta didik	14376	15040	15379	16471			APBD	Dinas Pendidikan	
		Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan: Pengelolaan Dana BOP PAUD	Satuan pendidikan	1198	1198	1198	1198			APBD	Dinas Pendidikan	

		Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan:										
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan: Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	paket	29	29	29	29			APBD		Dinsos P3A
		Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan: Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	warga pelajar	80	80	80	80			APBD		Dinas Pendidikan
		Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan: Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Satuan pendidikan	29	29	29	29			APBD		Dinas Pendidikan
		Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan:										

TUJUAN 5: Kesetaraan Gender

Program/Kegiatan/Rincian Output (1)	Satuan (2)	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
		2023	2024	2025	2026	2027				

PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

Kode dan Nama Indikator: TPB/SDGs: Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.

Kode dan Nama Program: PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan: Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	1	1	1			APBD		Dinsos P3A
		Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan: Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	perangkat daerah	18	18	18	18			APBD		Dinsos P3A
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan: Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan: Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	0	0	0	0			APBD		Dinsos P3A
		Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	layanan	6	6	6	6					
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan: Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	0	0	0	0			APBD		Dinsos P3A

Kode dan Nama Program: PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan: Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan: Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	perangkat daerah	7	7	7	7			APBD		Dinsos P3A
----------------	---	-------------------	--	------------------	---	---	---	---	--	--	------	--	------------

	(KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan: Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1			APBD	Dinsos P3A	
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan: Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan: Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	lembaga	1	1	1	1			APBD	Dinsos P3A	
		Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan: Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	41	41	41	41			APBD	Dinsos P3A	
		Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan:										
		Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan:										
Kode dan Nama Program: PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK													
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan: Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan: Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	2	2			APBD	Dinsos P3A	
Kode dan Nama Program: PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK													
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan: Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	360	360	360	360			DAK Non Fisik	Dinsos P3A	
	Nama Kegiatan: Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	layanan	1	1	1	1			DAK Non Fisik		
	Nama Kegiatan: Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	1	1	1			DAK Non Fisik		

NAMA TUJUAN SDGs: Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Program/Kegiatan/Rincian Output (1)	Satuan (2)	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)		
		2023	2024	2025	2026	2027						
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH												
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.												
Kode dan Nama Program: PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA												
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan: Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan: Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	dokumen	4	4	4	4			APBD	Dispar
		Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan: Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	laporan	5	5	5	5			APBD	Dispar

		Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan: Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	dokumen	5	5	5	5			APBD		Dispar
		Kode Sub Kegiatan	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	dokumen	3	4	5	5			APBD		Dispar
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.													
Kode dan Nama Program: PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA													
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan: Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan: Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	lokasi	18	18	15	18			APBD		Dispar
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan: Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan: Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	lokasi	2						DAK Non Fisik		Dispar
		Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan: Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	unit	4	4	4	4			APBD		Dispar
		Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	laporan	2	2	2	2			APBD		Dispar

NAMA TUJUAN SDGs: Kota dan Permukiman Berkelanjutan

Program/Kegiatan/Rincian Output (1)	Satuan (2)	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
		2023	2024	2025	2026	2027				

PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs:

Kode dan Nama Program: PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan: Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan: Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	orang	150	150	150	150			APBD		Dispar
		Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan: Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	orang	80	80	80	80			DAK Non Fisik		Dispar
		Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan: Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	orang	90	90	90	90			APBD		Dispar
		Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan: Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	orang	30	40	40	50			APBD		Dispar
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan: Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan: Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	orang	10	10	10	10			APBD		Dispar
		Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan: Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	orang	10	10	10	10			APBD		Dispar

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEmia) KOTA YOGYAKARTA

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian					Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
		2022	2023	2024	2025	2026				
Nama Pemangku Kepentingan: Universitas Negeri Yogyakarta										
Tujuan 11: Kota dan komunitas berkelanjutan										
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 11.6.1.(a) Presentase Pengelolaan Persampahan										
Nama Program : Kuliah Kerja Nyata										
Nama Kegiatan: Perbaikan Sarana Prasarana Sampah	Kelurahan	9 Kelurahan							Kelurahan Kricak, Kelurahan Karangwaru, Kelurahan Bener, Kelurahan Sorosutan, Kelurahan Giwangan, Kelurahan Warungboto, Kelurahan Tahunan, Kelurahan Ngupasan, Kelurahan Pawirodrjan	Universitas Negeri Yogyakarta
Tujuan 4 : Pendidikan berkualitas										
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 4.2.2* Presentase Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD										
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 4.3.1* Presentase jumlah penduduk usia 12-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar										
Nama Program : Kuliah Kerja Nyata										
Nama Kegiatan: Penyuluhan Semangat Belajar	Kelurahan	9							Kelurahan Kricak, Kelurahan Karangwaru, Kelurahan Bener, Kelurahan Sorosutan, Kelurahan Giwangan, Kelurahan Warungboto, Kelurahan Tahunan, Kelurahan Ngupasan, Kelurahan Pawirodrjan	Universitas Negeri Yogyakarta
Tujuan 1 : Tanpa kemiskinan										
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 1.2.1* Angka kemiskinan										
Nama Program : Kuliah Kerja Nyata										
Nama Kegiatan: Pemberdayaan UMKM	Kelurahan	9							Kelurahan Kricak, Kelurahan Karangwaru, Kelurahan Bener, Kelurahan Sorosutan, Kelurahan Giwangan, Kelurahan Warungboto, Kelurahan Tahunan, Kelurahan Ngupasan, Kelurahan Pawirodrjan	Universitas Negeri Yogyakarta
Nama Pemangku Kepentingan: Universitas Gadjah Mada										
Tujuan 1 : Tanpa kemiskinan										
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 1.2.1* Angka kemiskinan										
Nama Program : Kuliah Kerja Nyata										
Nama Kegiatan: Pengembangan Kawasan melalui Peningkatan Ekonomi	Kemantren	1							Kemantren Gondokusuman	Universitas Gadjah Mada
Tujuan 8: Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi										
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 8.1.1* Angka Pertumbuhan Ekonomi										
Nama Program : Penelitian Strategis										
Nama Kegiatan: Kajian Terminal Bus Pariwisata Giwangan	Laporan	1							Kelurahan Giwangan	Universitas Gadjah Mada
Nama Pemangku Kepentingan: Universitas Teknologi Yogyakarta										
Tujuan 16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh										
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 16.1.3.(a) Angka kriminalitas										
Nama Program : Magang										
Nama Kegiatan: Kajian SOP Pengelolaan CCTV	Laporan	1							Kemantren Umbulharjo dan Kemantren Ngampilan	Universitas Teknologi Yogyakarta
Nama Pemangku Kepentingan: Universitas Sebelas Maret										
Tujuan 4 : Pendidikan berkualitas										
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 4.2.2* Presentase Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD										
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 4.3.1* Presentase jumlah penduduk usia 12-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar										
Nama Program : Kuliah Kerja Nyata										
Nama Kegiatan: Pengajaran di Sekolah	Kelurahan	4							Kelurahan Muja -Muju, Kelurahan Giwangan ,Kelurahan Ngampilan dan Kelurahan Klitren	Universitas Negeri Sebelas Maret
Tujuan 1 : Tanpa kemiskinan										
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 1.2.1* Angka kemiskinan										
Nama Program : Kuliah Kerja Nyata										
Nama Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat	Kelurahan	4							Kelurahan Muja -Muju, Kelurahan Giwangan ,Kelurahan Ngampilan dan Kelurahan Klitren	Universitas Negeri Sebelas Maret
Nama Pemangku Kepentingan: Universitas Diponegoro										
Tujuan 1 : Tanpa kemiskinan										
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 1.2.1* Angka kemiskinan										
Nama Program : Kuliah Kerja Nyata										
Nama Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat	Kampung	1							Kampung Wirogunan, Kelurahan Wirogunan	Universitas Diponegoro
Tujuan 4 : Pendidikan berkualitas										
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 4.2.2* Presentase Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD										

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 4.3.1* Persentase jumlah penduduk usia 12-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar										
Nama Program : Kuliah Kerja Nyata										
Nama Kegiatan: Penyuluhan Semangat Belajar	Sekolah Dasar	1							Kampung Wirogunan, Kelurahan Wirogunan	Universitas Diponegoro
Tujuan 16: Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh										
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 16.1.3.(a) Angka kriminalitas										
Nama Program : Kuliah Kerja Nyata										
Nama Kegiatan: Penyuluhan Hukum	Kampung	1							Kampung Wirogunan, Kelurahan Wirogunan	Universitas Diponegoro
Nama Pemangku Kepentingan: Universitas Sanata Dharma										
Tujuan 1 : Tanpa kemiskinan										
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 1.2.1* Angka kemiskinan										
Nama Program : Kuliah Kerja Nyata										
Nama Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat	Kampung	3							Kampung Sagan , Kampung Penumpang dan Kampung Jogonegaran	Universitas Sanata Dharma
Nama Pemangku Kepentingan: Universitas Ahmad Dahlan										
Tujuan 1 : Tanpa kemiskinan										
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 1.2.1* Angka kemiskinan										
Nama Program : Kuliah Kerja Nyata										
Nama Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat	Kelurahan	1							Kelurahan Sorosutan	Universitas Ahmad Dahlan
Tujuan 8: Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi										
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 8.1.1* Angka Pertumbuhan Ekonomi										
Nama Program : Kuliah Kerja Nyata										
Nama Kegiatan: Penyuluhan Pengembangan UMKM untuk Membuka Lapangan Kerja	Kelurahan	1							Kelurahan Sorosutan	Universitas Ahmad Dahlan
Tujuan 11: Kota dan komunitas berkelanjutan										
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 11.6.1.(a) Presentase Pengelolaan Persampahan										
Nama Program : Kuliah Kerja Nyata										
Nama Kegiatan: Peningkatan Kepedulian Lingkungan pada Masyarakat Perkotaan	Kelurahan	10							Prawirodirjan, Ngupasan, Ngampilan; Notoprajan, Kadipaten, Patehan, Panembahan, Bausasran; Suryatmajan, Tegal Panggung	Universitas Ahmad Dahlan
Tujuan 8: Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi										
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 8.1.1* Angka Pertumbuhan Ekonomi										
Nama Program : Penelitian Tematis										
Nama Kegiatan: PEMANFAATAN TEKNOLOGI 3D UNTUK SITUS PENJUALAN PRODUK UMKM	Laporan	1							Kota Yogyakarta	Universitas Ahmad Dahlan
Nama Pemangku Kepentingan: STIE Widya Wiwaha										
Tujuan 11: Kota dan komunitas berkelanjutan										
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 11.6.1.(a) Presentase Pengelolaan Persampahan										
Nama Program : Penelitian Tematis										
Nama Kegiatan: EMAS (EDUKASI DAN MOTIVASI MASYARAKAT) SEBAGAI PECUT CHANGING BEHAVIOR DALAM	Laporan	1							Kelurahan Sorosutan	STIE Widya Wiwaha
Nama Pemangku Kepentingan: UNIVERSITAS AMIKOM Yogyakarta										
Tujuan 8: Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi										
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 8.1.1* Angka Pertumbuhan Ekonomi										
Nama Program : Penelitian Tematis										
Nama Kegiatan: MODEL PENGEMBANGAN KAMPUNG WISATA BERBASIS KETAHANAN IKLIM	Laporan	1							Kampung Kauman, Ngupasan, Kampung Pathuk, Ngampilan, dan Kampung Brontokusuman, Brontokusuman	Universitas AMIKOM Yogyakarta
Nama Pemangku Kepentingan: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa										
Tujuan 8: Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi										
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 8.1.1* Angka Pertumbuhan Ekonomi										
Nama Program : Penelitian Tematis										
Nama Kegiatan: PEMBERDAYAAN DISABILITAS DALAM MENINGKATKAN INDUSTRI JASA MELALUI PENINGKATAN KOMPETENSI, SELF EFFICACY DAN KEPERCAYAAN DIRI	Laporan	1							Kota Yogyakarta	Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
Nama Pemangku Kepentingan: Universitas Islam Indonesia										
Tujuan 8: Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi										
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 8.1.1* Angka Pertumbuhan Ekonomi										
Nama Program : Penelitian Strategis										
Nama Kegiatan: Kajian Dukungan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Yogyakarta	Laporan	1							Kota Yogyakarta	Universitas Islam Indonesia
Nama Pemangku Kepentingan: Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta										
TUJUAN TPB/SDGs Tujuan XVI - Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh										
Indikator TPB/SDGs - Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya										
Nama Program : Magang										
Nama Kegiatan: Kajian Webservices Pengelolaan CCTV Kampung	Laporan	1							Kemantren di Kota Yogyakarta	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta
Nama Pemangku Kepentingan: Watch Relation Of Corruption										
TUJUAN TPB/SDGs Tujuan XVI - Perdamaian, Keadilan Dan Kelembagaan Yang Tangguh										
Indikator TPB/SDGs - Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui										
Nama Program : Penelitian Strategis										
Nama Kegiatan: Kajian Musyawarah Perencanaan Pembangunan Lebih Baik	Laporan	1							Kota Yogyakarta	Watch Relation Of Corruption
Nama Pemangku Kepentingan: Universitas Aisyiah Yogyakarta										
Tujuan 1 : Tanpa kemiskinan										
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 1.2.1* Angka kemiskinan										
Nama Program : Kuliah Kerja Nyata										

Nama Kegiatan: Pemulihan Pasca Pandemi	Kelurahan	3								Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Mantrijeron, Kelurahan Suryodiningratan.	Universitas Aisyiah Yogyakarta
--	-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA) KABUPATEN SLEMAN

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian					Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
		2023	2024	2025	2026	2027				
YAYASAN SATU NAMA YOGYAKARTA										
TUJUAN GLOBAL 3. MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA										
3.5.1. Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi, psikososial, rehabilitasi dan layanan pasca intervensi) bagi gangguan penyalahgunaan zat.										
Program: Rumah Pembelajaran Kesehatan Jiwa										
1. Jemput Rawat bagi Gelandangan Jiwa										
2. Pembelajaran dan peningkatan kapasitas diri										
3. Bengkel Kerja										
4. Day Care										
5. Rawat Seling										
6. Home Visit										
LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK, SHADAQAH MUHAMMADIYAH (LAZISMU)										
TUJUAN GLOBAL 2. MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN										
2.1.2. Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan Skala Pengalaman Kerawanan Pangan										
Program: Tani Bangkit										
1. Bantuan Benih Padi		kelompok tani								
2. Budidaya Porang										
2.2.1. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita										
Program: Tingkatkan Kemampuan Gizi Seimbang (TIMBANG)										
1. Penyusunan konsep program bersama BKBBN dan Aisyiyah		konsep								
2. Distribusi bantuan nutrisi sehat kepada anak dan ibu hamil										
3. Monitoring dan evaluasi		kajian								
TUJUAN GLOBAL 3. MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA										
3.8.1. Cakupan pelayanan kesehatan esensial										
Program: Pelayanan Sosial										
1. Rumah Singgah Pasien Muhammadiyah		pasien								
3.b.1. Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional										
Program: Sosial Jogja Berwakaf										
1. Vaksinasi		orang								
TUJUAN GLOBAL 10. MENGURANGI KESENJANGAN INTRA DAN ANTARNEGARA										
10.1.1.(a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.										
Program: Sosial Dakwah										
1. Bedah rumah		jumlah rumah								
2. Bantuan Paket Sembako untuk Yatim Piatu Terdampak Covid-19		anak								
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA										
TUJUAN GLOBAL 4. MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA										
4.3.1. Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.										
Program: Pendidikan dan Pelatihan										
Program: Praktek Kerja Lapangan (PKL), Kuliah Kerja Nyata (KKN), dan atau kegiatan dengan nama lain yang sejenis										

Program: Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya										
Program: Pengabdian Kepada Masyarakat										
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA										

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMIA) KABUPATEN SLEMAN

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian					Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
		2023	2024	2025	2026	2027				
TUJUAN GLOBAL 3. MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA										
Program: Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya										
TUJUAN GLOBAL 4. MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA										
4.3.1. Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.										
Program: Pendidikan dan Pelatihan										
Program: Praktek Kerja Lapangan (PKL), Kuliah Kerja Nyata (KKN), dan atau kegiatan dengan nama lain yang sejenis										
AKADEMI FARMASI INDONESIA YOGYAKARTA										
TUJUAN GLOBAL 3. MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA										
3.c.1. Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.										
Program: Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya										
TUJUAN GLOBAL 4. MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA										
4.3.1. Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.										
Program: Pendidikan dan Pelatihan										
Program: Praktek Kerja Lapangan (PKL), Kuliah Kerja Nyata (KKN), dan atau kegiatan dengan nama lain yang sejenis										

Matriks 3: Program/Kegiatan Nonpemerintah TPB/SDGs (Organisasi Masyarakat/CSO, Filantropi & Akademia) Kabupaten Bantul

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian					Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
		2023	2024	2025	2026	2027				
Nama Pemangku Kepentingan: Universitas Alma Ata										
TUJUAN TPB/SDGs Tanpa Kemiskinan										
Indikator TPB/SDGs										
Nama Program: Sistem surveilans Kesehatan Gizi Ibu Dan Anak dengan dinas kesehatan Di Kecamatan Sedaayu										
Cakupan jumlah calon pengantin, ibu hamil dan Baduta yang terdata dan didampingi										
Calon pengantin putri	Persen	35	40	45	50	-				
Ibu Hamil	Persen	30	35	40	45	-				
Badut						-				
program penelitian Multilevel promotion Breast feeding										
Terlaksananya kegiatan penelitian	Ibu Hamil	kegiatan	-	1	1	-	-			
program Kegiatan KKN dengan tema penanggulangan stunting										
terlaksananya kegiatan KKN tematik		kegiatan	1	2	2	2	-			
Nama Pemangku Kepentingan: STIKES AKBID YO										
TUJUAN TPB/SDGs sehat dan sejahtera										
Indikator TPB/SDGs										
Nama Program: penyuluhan penggunaan obat, vitamin, herbal, pada ibu hamil triimester I,II,III										
sasaran										
Pemahaman penggunaan obat herbal pada ibu hamil meningkat	Ibu hamil	orang	30	30	30	30	-			
Semester VI Yang diLakukan Secara										
Terlaksananya Asuhan Kebidanan Berkelanjutan Pada Ibu Hamil Sampai Menyusui	Ibu hamil	orang	30	30	30	30				
Pendampingan pencegahan stunting pada kelompok pranikah										
Kesiapan calon pengantin untuk menjadi orangtua paham stunting	Calon pengantin	orang	20	20	20	20				
Upaya penanggulangan stunting dan gizi buruk melalui pendidikan kesehatan pola asuh anak dan remaja di Posyandu Glugo										
pemahaman tentang cara penanggulangan gizi buruk dan stunting meningkat	Anak dan Remaja	orang	30	30	30	30				
Edukasi ibu tentang peran ortu dalam mencegah stunting di Randubelang										

Orangtua paham tentang pencegahan stunting	Orangtua	Orang	50	50	50	50					
Sosialisasi Aplikasi EIsimil (Aplikasi elektronik siap nikah dan hamil) kepada calon pengantin											
pengetahuan caten tentang kehamilan yang sehat dalam mencegah stunting meningkat	Calon pengantin	orang	20	20	20	20					
Pendampingan calon penganten dalam persiapan kehamilan untuk mencegah stunting di Bangunharjo											
pengetahuan caten tentang kehamilan yang sehat dalam mencegah stunting meningkat	Calon pengantin	orang	20	20	20	20					
Edukasi pada ibu hamil tentang mental health untuk mempersiapkan pencegahan stunting pada janin di Bangunharjo											
pengetahuan ibu hamil tentang kehamilan yang sehat dalam mencegah stunting meningkat	Ibu hamil	orang	20	20	20	20					
Program PIKM (Pusat Layanan Informasi Kesehatan) Program											
Paham tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	remaja	orang	30	30	30	30					
Indikator TPB/SDGs : tanpa kelaparan											
Nama Program :Pemanfaatan pangan fungsional dalam upaya pencegahan stunting											
Tercipta produk pangan fungsional	Masyarakat	orang	20	20	20	20					
Nama Pemangku Kepentingan: UMMI KHASANAH											
TUJUAN TPB/SDGs sehat dan sejahtera											
Indikator TPB/SDGs											
SDIDTK pada anak usia pra sekolah											
Data Screening Tumbang dan kesehatan mental emosional	Anak Usia Pra Sekolah	Orang	80	100	120	140					
Penyuluhan Parenting											
Pemahaman Tumbang Anak, pemahaman pengolahan makanan, pemahaman nutrisi dan	wali murid	Orang	80	100	120	140					
Revitalisasi Posyandu											
Optimalisasi Fungsi Posyandu	Posyandu	Unit	4	6	8	10					
Pendidikan dan Pendampingan Kader											

Peningkatan Pemahaman Kader Posyandu	Kader posyandu	Orang	40	50	60	70					
Bidan Cilik											
Konselor teman sebaya	Siswa SD	orang	60	80	100	120					
Bidan Remaja											
Konselor teman sebaya	Siswa SMP-SMA	orang	80	100	120	140					
Konsultasi Kesehatan Online											
Peningkatan Pemahaman Kesehatan (Promotif Preventif) Masyarakat	Masyarakat	orang	30	40	50	60					
Pra Nikah											
Peningkatan Pemahaman pra konsepsi	Pasangan Pra nikah	Orang	20	20	20	20					
One Student One Client (OSOC)											
Pendampingan Pra Konsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, Bayi, Balita, Apras	Pasangan Pra Konsepsi	orang	20	20	20	20					
Indikator TPB/SDGs : tanpa kelaparan											
Nama Program : Pemanfaatan pangan fungsional dalam upaya pencegahan stunting											

MATRIKS 3: PROGRAM/KEGIATAN NONPEMERINTAH TPB/SDGs (ORGANISASI KEMASYARAKATAN/CSO, FILANTROPI & AKADEMI) KABUPATEN KULON PROGO

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Pencapaian					Alokasi Indikasi Anggaran 5 Tahun Rupiah (Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Lembaga Pelaksana
		2023	2024	2025	2026	2027				
Nama Pemangku Kepentingan: Baznas Kabupaten Kulon Progo										
TUJUAN TPB/SDGs Tanpa Kemiskinan										
Indikator TPB/SDGs										
Nama Program: Bantuan Bedah Rumah Swadaya Berbantuan										
Terlaksananya bantuan bedah rumah dengan permohonan ke Bupati Cq Kabag. Adm. Kesra dan Kemasyarakatan	KK Miskin	Kegiatan					-			
Nama Program : Bantuan Program Aladin (Atap Lantai dan Dinding)										
Terlaksananya bantuan aladin	KK Miskin	kegiatan	-				-			
Nama Program : Bantuan Biaya Hidup										
Tersalurkannya bantuan biaya hidup bagi lansia	Lansia	kegiatan					-			
Nama Program : Bantuan Biaya Pengobatan /Transportasi Pengobatan										
Tersalurkannya bantuan biaya pengobatan untuk mustahik yang sakit	KK Miskin	kegiatan					-			
Nama Program : Bantuan Pendidikan										
Tersalurkannya bantuan biaya pendidikan	Siswa dari KK Miskin	kegiatan					-			
Nama Program : Beasiswa Muallaf										
Tersalurkannya bantuan biaya pendidikan bagi siswa /anak dari muallaf	Siswa / Anak dari Muallaf	kegiatan					-			
Nama Program : Bantuan Korban Kecelakaan Penderes										
Tersalurkannya bantuan biaya pengobatan kecelakaan bagi penderes	Penderes	kegiatan					-			
Nama Program : Bantuan Insentif Rois										
Tersalurkannya bantuan insentif bagi Rois	Rois	kegiatan					-			

**Matriks 4: Rencana Program/Kegiatan NonPemerintah (Pelaku Usaha) Kota Yogyakarta
Tahun (2022 - 2026)**

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan		Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan					Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam tahun)	Target						Alokasi Dana (dalam Rupiah)	
Kode disesuaikan dengan Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-ite-TJSL)	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor urut (sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/ Program	Indikator Capaian			Target Jangka Panjang (hingga tahun 2026)	Target tahun 2022	Target tahun 2023	Target tahun 2024	Target tahun 2025	Target tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)	
				Nama Pemangku Kepentingan: BPD DIY Cabang Senopati												
Aspek Sosial Eksternal																
					Program: Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kelompok UMKM											
A.6.c.3.a	Pemanfaatan peluang dan prospek usaha dalam bentuk kemitraan dengan pemerintah, LSM, dan/atau investor asing	12.6.1.	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya.	1	Pelatihan Kuliner Olahan Pangan	Jumlah kelompok UKM yang dilatih	Kelompok UKM		1						10000000	
		12.6.1.	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya.	2	Pelatihan Kombinasi Batik dan Ecoprint	Jumlah kelompok UKM yang dilatih	Kelompok UKM		1						10000000	
		12.6.1.	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya.	3	Pelatihan Kuliner Olahan Snack Bakpia, Bolen Pisang, Korean Garlic Bread	Jumlah kelompok UKM yang dilatih	Kelompok UKM		1						10000000	
		12.6.1.	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya.	4	Pelatihan Budidaya Jamur, Olahan Makanan Jamur dan Sarana Prasarana Alat Produksi	Jumlah Kelompok Tani yang dilatih	Kelompok Tani		1						15000000	
		12.6.1.	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya.	5	Pelatihan Membuat Makanan dan Minuman Tradisional serta Makanan Kekinian	Jumlah kelompok UKM yang dilatih	Kelompok UKM		1						15000000	
		12.6.1.	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya.	6	Pelatihan Kuliner Olahan Masakan Chinese, Olahan Masakan dari Sauce Bolognaise, dan Olahan Sayur Mayur Nasi Box	Jumlah kelompok UKM yang dilatih	Kelompok UKM		1						10000000	
		12.6.1.	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya.	7	Pelatihan Batik Kontemporer dan Pelatihan Kaos Tie-Dye	Jumlah kelompok UKM yang dilatih	Kelompok UKM		1						10000000	
		12.6.1.	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya.	8	Kegiatan Kurasi Produk dan Pelatihan Kuliner	Jumlah kelompok UKM yang dilatih	Kelompok UKM		1						15000000	
		12.6.1.	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya.	9	Pelatihan Memasak Krispi Bunga Pisang dan Kue Kekinian	Jumlah kelompok UKM yang dilatih	Kelompok UKM		1						10000000	
		12.6.1.	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya.	10	Pelatihan Ecoprint	Jumlah kelompok UKM yang dilatih	Kelompok UKM		1						15000000	
		12.6.1.	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya.	11	Pelatihan Kuliner Olahan Masakan Chicken Katsu Frozen, Kebab Frozen, Banana Roll Cake, Aneka Sus, dan Dimsum	Jumlah PKK RW yang dilatih	Kelompok PKK RW		1						10000000	
		12.6.1.	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya.	12	Pelatihan IKM Pangan Meningkatkan Keterampilan Keluarga Disabilitas	Jumlah kelompok IKM yang dilatih	Kelompok IKM		1						15000000	
		12.6.1.	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya.	13	Pelatihan Memasak Membuat Olahan Frozen Food (Bakpao, Lumpia, Ayam Kodok, Rice Bowl, dan Chicken Nugget)	Jumlah kelompok UKM yang dilatih	Kelompok UKM		1						10000000	
		12.6.1.	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya.	14	Pelatihan Pembuatan Aneka Roti	Jumlah kelompok UKM yang dilatih	Kelompok UKM		1						10000000	
		12.6.1.	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya.	15	Pelatihan Inovasi Produk dan Sarana Prasarana Alat Produksi	Jumlah kelompok Tani yang dilatih	Kelompok Tani		1						15000000	
		12.6.1.	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya.	16	Pelatihan Pembuatan Nugget Ayam dan Abon Ayam	Jumlah kelompok Tani yang dilatih	Kelompok Tani		1						10000000	
		12.6.1.	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya.	17	Nama Kegiatan: Pelatihan Olahan Bakpia dan Abon Lele, Pelatihan Budidaya Bunga Asoka, dan Penyulingan Bunga Asoka Sebagai Pewarna Alami	Jumlah kelompok Tani yang dilatih	Kelompok Tani		1						15000000	

		12.6.1.	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya.	18	Kurasi Produk dan Pemasaran Online	Jumlah kelompok UKM yang dilatih	Kelompok UKM			1				10000000
		12.6.1.	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya.	19	Pelatihan Kuliner Meracik Kopi	Jumlah kelompok UKM yang dilatih	Kelompok UKM			1				10000000
		12.6.1.	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya.	20	Pelatihan Batik Cap Kombinasi Kontemporer	Jumlah kelompok UKM yang dilatih	Kelompok UKM			1				15000000
		12.6.1.	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya.	21	Pelatihan Pengolahan Limbah Batik dengan Teknologi Sederhana Bagi Kelompok Rintisan Usaha Perajin Batik Yogyakarta	Jumlah kelompok UKM yang dilatih	Kelompok UKM			1				15000000
		12.6.1.	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya.	22	Pelatihan Pembuatan Anak Panah	Jumlah kelompok UKM yang dilatih	Kelompok UKM			1				10000000
		12.6.1.	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya.	23	Pelatihan Kuliner	Jumlah kelompok UKM yang dilatih	Kelompok UKM			1				15000000
		12.6.1.	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya.	24	Pelatihan Budidaya Tanaman Sayur dan Buah dalam Pot Bagi Disabilitas	Jumlah kelompok UKM yang dilatih	Kelompok UKM			1				15000000
		12.6.1.	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya.	25	Pelatihan Kuliner	Jumlah kelompok UKM yang dilatih	Kelompok UKM			1				15000000
		12.6.1.	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya.	26	Pelatihan Daur Ulang Sampah dan Sarasehan untuk ODGJ melalui Dana CSR Bank BPD DIY Tahun 2022	Jumlah kelompok UKM yang dilatih	Kelompok UKM			1				15000000
Aspek Ekonomi														
					Program: Pasar Murah									
A.3.c.1.a.	Skala usaha LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik	8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita	1	Tebus Murah di Kemantren Umbulharjo dan Mergangsan	Jumlah Kemantren tempat penyelenggaraan Kegiatan Tebus Murah	Kemantren			2				45000000
Aspek Ekonomi														
					Program: Pembangunan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)									
A.6.c.3.c	Pemanfaatan peluang dan prospek usaha dalam bentuk kemitraan dengan pemerintah, LSM, dan/atau investor asing	11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	1	RTLH	Jumlah rumah yang diperbaiki	Unit Rumah			5				100000000
					Nama Pemangku Kepentingan: BNI 46									
Aspek Sosial														
Eksternal														
					Program: Sembako untuk Dapur Balita Sehat									
A.6.c.3.c	Pemanfaatan peluang dan prospek usaha dalam bentuk kemitraan dengan pemerintah, LSM, dan/atau investor asing	2.2.1 (a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta	1	113 Dapur Balita - 3502 Balita	Jumlah Dapur Balita yang mendapatkan bantuan sembako	Jumlah Dapur Balita			113				19640000
					Nama Pemangku Kepentingan: PT Sarihusada Generasi Mahardika dan Human Initiative									
Aspek Sosial														
Eksternal														
					Program: Bunda Mengajar									
A.6.c.3.c	Pemanfaatan peluang dan prospek usaha dalam bentuk kemitraan dengan pemerintah, LSM, dan/atau investor asing	2.2.1 (a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta	1	Edukasi Kesehatan,Gizi, Pola Asuh	Jumlah Kader Posyandu /PKK di Kota Yogyakarta yang mendapatkan Edukasi Kesehatan,Gizi, Pola Asuh	Kader Posyandu /PKK							
		2.2.1 (a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta	2	Pendampingan dan atau Support untuk Posyandu dan Kelompok Tani/Pelaku Urban Farming	Jumlah Posyandu dan Kelompok Tani/Pelaku Urban Farming yang mendapatkan pendampingan	Kelompok Tani/Pelaku Urban Farming							
		6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	3	Support Perbaikan Fasilitas Sanitasi (Pengecatan WC Umum dan Perbaikan Wastafel)	Jumlah Fasilitas Sanitasi yang diperbaiki	Kelurahan			2				
		2.2.1 (a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta	4	Pembuatan edukasi gizi dan sanitasi berupa mural, roll banner, dan lembar balik	Jumlah kelurahan yang dibantu dalam membuat edukasi gizi dan sanitasi	Kelurahan			3				
					Nama Program : 1000 Pelangi									
		2.2.1 (a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta	1	Pelatihan Kader	Jumlah Posyandu /PKK di Kota Yogyakarta yang mengikuti pelatihan	Posyandu							

		2.2.1 (a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta	2	Workshop 1000 Pelangi	Jumlah Posyandu /PKK di Kota Yogyakarta yang mengikuti workshop	Posyandu										
				Nama Pemangku Kepentingan: PT Sarihusada Generasi Mahardika dan Human Initiative													
Aspek Ekonomi																	
				Program: Pasar Murah													
A.3.c.1.a.	Skala usaha LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik	8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita	1	Pasar murah untuk pelaku dipasar, petugas parkir, tukang becak, sopir, andong, difabel, pelaku usaha ojek online	Jumlah Pasar Murah	pasar Murah										10000000
				Nama Pemangku Kepentingan: PD Jogjatama Vishesha													
Aspek Ekonomi																	
				Program: Keringanan Harga Sewa Tenant Kuliner													
A.3.c.1.a.	Skala usaha LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik	8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita	1	Pemberian keringanan harga sewa untuk 24 kios	Jumlah kios yang mendapatkan keringanan harga sewa	Kios										48000000

Matriks 4: Rencana Program/Kegiatan NonPemerintah (Pelaku Usaha) Kabupaten Sleman

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan			Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan					Target						Alokasi Dana (dalam Rupiah)		
Kode disesuaikan dengan Lampiran POJK 51/2017 (1)	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-Ite-TJSL) (2)	Kode Indikator SDGs (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Nomor urut (sesuai Aspek) (5)	Kegiatan/Proyek/ Program (6)	Indikator Capaian (7)	Satuan Ukur (8)	Data Dasar (tahun 2021) (9)	Jangka Waktu Penerapan (dalam tahun) (10)	Target Jangka Panjang (hingga tahun XXXX) (11)	Target tahun 2023 (12)	Target tahun 2024 (13)	Target tahun 2025 (14)		Target tahun 2026 (15)	Target tahun 2027 (16)
PT. BANK BPD DIY KC. SLEMAN																
Eksternal																
A.6.c.3.c	Pemanfaatan peluang dan prospek usaha dalam bentuk kemitraan dengan pemerintah, LSM, dan/atau investor asing	4.1.1.(a)	Proporsi anak-anak dan remaja di: (1) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.		Perform Sekolah - sekolah Musik dan ketrampilan lainnya	>30 sekolah	sekolah	>30								
					Perform sanggar - sanggar tradisional	>50 sanggar	sanggar	>50								
		3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional		Sentra Vaksin SCH	>100.000 orang	orang	>100.000								
					Vaksin panita pemilihan lurah											
					Vaksin serentak polres sleman dosis 1											
					Vaksin pelaku publik dosis 2											
		3.b.3*	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan		Donor Darah dalam rangka hari PMI	250 orang	orang	orang								
					Donor Darah dalam rangka HUT Lions Group	250 orang	orang	250								
					Donor Darah dalam rangka 3rd Anniversary Sleman City Hall	250 orang	orang	250								
					Donor Darah dalam rangka 14th Anniversary Plawang Community	250 orang	orang	250								
					Suntik Sehat Vitamin bekerjasama dengan Kalbe											
		3.3.1*	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi		Pemilihan Duta HIV AIDS											
		1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok		JCM Spirit of Caring, Berbagi dengan Anak Panti		anak	77								
		8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis		JCM Spirit of Caring: Tenant Donation		orang	100								
					Sleman Creative Bazaar : UMKM Lokal DIY		brand	30								
					Jogja Recovery Market		brand	31								
					SCH Royal Aquatic		komunitas	3								
					Jogja Fashion Parade		desainer	40								
		15.1.1*	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan		Bagi Bibit Tanaman dalam rangka hari Bumi		orang	100								
		6.3.2(a)	Kualitas air permukaan sebagai air baku .		Reresik Kali dalam rangka hari lingkungan hidup		lokasi	1								
Eksternal																
A.6.c.3.c	Pemanfaatan peluang dan prospek usaha dalam bentuk kemitraan dengan pemerintah, LSM, dan/atau	4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat		Sekolah Ramah Anak SMP (Badan KB)		sekolah	1								
					Beasiswa Pendidikan Untuk Masyarakat Marginal di Desa Caturtunggal		orang	60								
					Beasiswa Pendidikan Untuk Anak Sekolah di Desa Condongcatur		orang	100								
					Beasiswa SMA & SMK		orang	51								
					Beasiswa SMK Putra Samodra		orang	6								
		4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)		Beasiswa Mahasiswa STTN BATAN		orang	2								
					Beasiswa STIKES'Guna Bangsa		orang	4								
					Beasiswa INSTIPER		orang	5								
					Beasiswa UNRIYO			4								
					Beasiswa STIPRAM			3								
					Beasiswa Politeknik Mekatronika Sanata Dharma		orang	4								
					Beasiswa Mahasiswa UNY		orang	7								
		3.b.3*	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan		Ambulance Kalurahan Sendangadi		unit	1								
		8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran		Loka Wira Usaha Muda UNY		event	1								
		8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis		Pengembangan Kampung Mina Padi Samberembe Pakem		lokasi	1								
					Penataan PKL di Lokasi Wisata Watu Purbo, Tempel		lokasi	1								

		10.1.1.(c)	Jumlah desa mandiri		Maintenance Fasilitas Desa Ramah Anak Kalurahan Candibinangun		kalurahan	1											
		8.9.1*	Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB		Pembangunan gerbang wisata Kalurahan Sambirejo Prambanan		lokasi	1											
					Pembangunan wisata air kolam ikan Dusun Gamping Lor Ambarketawang Gamping		lokasi	1											
		15.1.1*	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan		Penanaman pohon lahan kritis Dinas Lingkungan Hidup		lokasi	1											
PT. MEGA ANDALAN KALASAN																			
Internal																			
A.6.c.2.c.1.	Lingkungan kerja yang layak	8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3		Donasi perayaan serikat pekerja MAK		event	1											
					Donasi paket buka puasa		event	1											
					Donasi paket pengamanan lebaran		event	1											
					Donasi keanggotaan APINDO		lokasi	1											
Eksternal																			
A.6.c.3.c	Pemanfaatan peluang dan prospek usaha dalam bentuk kemitraan dengan pemerintah, LSM, dan/atau	4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat		Beasiswa putra-putri berprestasi karyawan MAK Group	63 orang	orang	63											
		4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)		Beasiswa pendidikan mahasiswa ATMA Akademi Teknik Mega Andalan, periode Januari-oktober 2021	Mahasiswa aktif	PT	1											
		3.b.3*	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan		Pencegahan dan penanganan pandemi covid-19 Hospital bed, mattress foam	18 lembaga	lembaga	18											
		1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok		Donasi paket sembako masyarakat lingkungan sekitar perusahaan	57 orang	orang	57											
		10.1.1.(c)	Jumlah desa mandiri		Donasi renovasi gapura identitas kampung		lokasi	1											
		9.1.1*	Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap		Donasi penyediaan lampu penerangan		lokasi	1											
					Donasi lingkungan perusahaan RT dan RW Januari-september 2021		lokasi	1											
			Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas		Donasi renovasi lantai		lokasi	1											
					Donasi partisipasi kegiatan perayaan		event	1											
PT BPR BANK SLEMAN PERSEKUTUAN																			
a Berkelanjutan Perusahaan																			
A.3.g.1.	Komunikasi dan Pelatihan anti korupsi	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)		Mengembangkan, menerapkan dan mengawasi sistem tata kelola perusahaan yang baik	Assesment tata kelola perusahaan oleh institusi yang	nilai					baik	baik	baik					
A.3.g.2.					Mengembangkan, menerapkan dan mengawasi pedoman manajemen risiko BPR	Assesment manajemen risiko oleh institusi yang	nilai					baik	baik	baik					
A.3.g.3.					Melaksanakan pembekalan ujian sertifikasi manajemen risiko, mengikutsertakan pengurus dan pejabat eksekutif dalam ujian sertifikasi manajemen risiko level 1 serta sertifikasi direktur BPR kepada pejabat eksekutif	Sertifikasi manajemen risiko minimum level 1	level sertifikat						min level 1	min level 1	min level 1				
A.3.g.4.					Memperkuat sistem pengendalian intern bank, memperkuat peran dan fungsi satuan kerja audit intern serta meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku	Audit keuangan oleh auditor independen	pendapat						WTP	WTP	WTP				
						Pemeriksaan oleh OJK	jumlah temuan						tanpa temuan	tanpa temuan	tanpa temuan				
A.3.g.5.					Melakukan sosialisasi budaya perusahaan, mengawasi penerapannya serta membentuk gugus kendali mutu (agent of change) budaya perusahaan	Diterapkannya budaya perusahaan (nilai perusahaan DO IT)	%												
A.3.g.6.					Mengembangkan teknologi perbankan serta meningkatkan kualitas layanan perbankan (layanan prima)	Assesment layanan dari institusi yang berkompeten	nilai						terbaik	terbaik	terbaik				
Aspek Ekonomi																			
A.3.c.1.a.	Skala usaha LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik	8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita		Meningkatkan penghimpunan dana pihak ketiga, meningkatkan setoran modal serta enyalurkan dana dengan kualitas baik	BPR dengan aset terbesar di DIY	Juta rupiah												

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

A.3.c.1.b.				Meningkatkan efisiensi operasi, produktivitas aset serta menyusun strategi penetapan harga (pricing)	Total kewajiban (dalam jutaan rupiah);	Juta rupiah													
					ROA	%						≥2	≥2	≥2					
					ROE	%						≥20	≥20	≥20					
					BOPO	%						≤80	≤80	≤80					
					NIM	%						≥7	≥7	≥7					
A.3.c.1.c.				Meningkatkan modal serta kualitas aset tertimbang menurut risiko	CAR	%						≥15	≥15	≥15					
Aspek Sosial Internal																			
A.6.c.2.c.1.	Lingkungan kerja yang layak	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Kesejahteraan pegawai, lingkungan kerja dan kesetaraan kesempatan	Persentase karyawan yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan	%	100					100	100	100					
A.6.c.2.c.2.		1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Kesejahteraan pegawai, lingkungan kerja dan kesetaraan kesempatan	Persentase karyawan yang memiliki BPJS Kesehatan	%	100					100	100	100					
A.6.c.2.c.7.	Lingkungan kerja yang aman	8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3	Pengembangan SDM	Perusahaan menerapkan norma K3	%	100					100	100	100					
A.6.c.2.d.1.	Pelatihan dan pengembangan kemampuan pegawai	4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut	Pengembangan SDM	Rata-rata pelatihan dan pengembangan kemampuan setiap karyawan dalam setahun	kali	1					1	1	1					
Eksternal																			
A.6.c.3.c	Pemanfaatan peluang dan prospek usaha dalam bentuk kemitraan dengan pemerintah, LSM, dan/atau investor asing	8.3.1.a	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	Memperluas customer base kredit UMKM, kompetensi analis kredit UMKM serta penyaluran / ekspansi kredit UMKM	Portofolio kredit UMKM dari modal setor	%						≥50							
		4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat,	Beasiswa pelajar SD dan SMP		siswa	105												
				Bantuan kepada pondok pesantren dan panti asuhan		lembaga	2												
				Bantuan pembangunan gedung madrasah aliyah berubah		paket	1												
		4.1.1.(a)	Proporsi anak-anak dan remaja di: (1) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Bantuan kegiatan menulis peringatan hari kemerdekaan RI		event	1												
		3.b.3*	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan	Bantuan 1 unit mobil ambulance bekerjasama		unit	1												
				Bantuan seragam APD dan perlengkapan medis melalui tim pusat koordinasi DPRD Sleman															
				Bantuan seragam APD bagi relawan PMI		unit	50												
				Pemberian 250 botol handsanitizer kepada masyarakat dalam rangka HUT RI ke 76		buah	250												
		3.8.1*	Cakupan pelayanan kesehatan	Sumbangan bulian dana PMI		paket	1												
				Bantuan bagi anggota KORPRI yang terpapar covid 19															
				Bantuan bagi warga yang terpapar covid 19		orang	157												
				Bantuan 50 paket sembako untuk relawan PMI		paket	50												
		3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional	Penyelenggara vaksinasi sinopharm dosis 1 dan 2		orang	1000												
				Bantuan penyelenggaraan vaksinasi dosis 2 oleh dinas pariwisata															
		3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Bantuan iuran JKN-KIS BPJS kesehatan		orang	15												
		1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok	Bantuan 200 paket sembako		orang	200												
		8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis	Partisipasi pasar lebaran		event	1												
				Bantuan pameran koperasi dan UMKM EXPO		event	1												
				Bantuan 230 pcs seragam celemek para pedagang pasar		pedagang	230												
				Bantuan gerobak usaha angkringan dan bakso		orang	15												
				Pemberian kredit kemitraan bagi para pelaku UMKM		UMKM	200												
		6.1.1*	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	Bantuan dropping air bersih		paket	1												

		17.8.1*	Persentase pengguna internet		Bantuan penyelenggaraan lomba free wifi		event	1									
		8.9.1*	Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB		Bantuan pengembangan pariwisata BUMDES		BUMDes	2									
		10.1.1.(c)	Jumlah desa mandiri		Bantuan renovasi tempat ibadah		3	lokasi									
PT. BANK MANDIRI PERSERO TBK																	
Eksternal																	
A.6.c.3.c	Pemanfaatan peluang dan prospek usaha dalam bentuk kemitraan dengan pemerintah, LSM, dan/atau	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).		Paket Nutrisi dan Vitamin		paket	1000									
		3.b.3*	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan		Bantuan Alat Kesehatan		paket	1									
					Bantuan Alat Kesehatan Produksi Oksigen Cair		paket	1									
					Bantuan Alat Kesehatan Produksi Oksigen Cair		paket	1									
PT. BANK BRI KC SLEMAN																	
Eksternal																	
A.6.c.3.c	Pemanfaatan peluang dan prospek usaha dalam bentuk kemitraan dengan pemerintah, LSM, dan/atau	3.b.3*	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan		Mobil ambulans		unit	1									
		8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis		Bantuan sarana untuk adaptasi baru		lokasi	1									
					Bantuan sarana untuk adaptasi baru		lokasi	1									
		10.1.1.(c)	Jumlah desa mandiri		Bantuan renovasi tempat ibadah		lokasi	1									
PT. PRIMISSIMA																	
Eksternal																	
A.6.c.3.c	Pemanfaatan peluang dan prospek usaha dalam bentuk kemitraan dengan pemerintah, LSM, dan/atau	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin.		PKBL Program Kemitraan dan Bina Lingkungan		paket	1									
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA																	
Eksternal																	
A.6.c.3.c	Pemanfaatan peluang dan prospek usaha dalam bentuk kemitraan dengan pemerintah, LSM, dan/atau	4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat		Bantuan biaya pendidikan		orang	150									
					Bantuan biaya pendidikan		orang	68									
					Beasiswa tahfidz		orang	150									
					Bantuan smart phone belajar daring		orang	10									
					Bantuan pembangunan Masjid		lokasi	1									
					Bantuan pembangunan gedung sekolah		lokasi	1									
		4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)		Al Quran		lokasi	1									
		3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional		Sembako bagi mahasiswa		orang	44									
					Vaksin		orang	100									
		1.3.1*	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok		Bantuan kursi roda		unit	1									
		3.b.3*	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan		Bantuan APD		paket	6									
					Bantuan APD		paket	6									
					Bantuan APD		paket	6									
		3.8.1*	Cakupan pelayanan kesehatan		Khitan masal		orang	30									
		1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok		Penyaluran hewan qurban		ekor	2									
					Penyaluran hewan qurban		ekor	10									
		10.1.1.(c)	Jumlah desa mandiri		Bantuan mushola		lokasi	1									
		8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis		Pemberian emas bantuan modal pengembangan usaha		orang	5									
PT. SARIMELATI KENCANA TBK.																	
Eksternal																	
A.6.c.3.c	Pemanfaatan peluang dan prospek usaha dalam bentuk kemitraan dengan pemerintah, LSM, dan/atau	3.8.1*	Cakupan pelayanan kesehatan esensial		Donasi Covid / Pizza Tenaga Medis Berbagi Berkah (Scope Nasional)		paket	1									
PT. INDOMARCO PRISMATAMA																	
Eksternal																	
A.6.c.3.c	Pemanfaatan peluang dan prospek usaha dalam bentuk kemitraan dengan pemerintah, LSM, dan/atau	3.b.3*	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan		Bantuan masker untuk penanganan covid 19		paket	1									

		3.b.3*	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan		Bantuan masker untuk penanganan covid 19		paket	1										
					Bantuan sembako warga terdampak covid 19		paket	1										
					Bantuan masker untuk penanganan covid 19		paket	1										
		3.8.1*	Cakupan pelayanan kesehatan esensial		Bantuan sembako dan operasional penanganan covid 19		paket	1										
					Bantuan sembako dan kampung tangguh		paket	1										
					Bantuan sembako untuk warga terdampak covid 19		paket	1										
		8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis		Launching produk UMKM		paket	1										

PDAM TIRTA

Eksternal																		
A.6.c.3.c	Pemanfaatan peluang dan prospek usaha dalam bentuk kemitraan dengan pemerintah, LSM, dan/atau	4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar).		Bantuan CSR untuk tenaga pendidikan PAUD di kecamatan Minggir		paket	1										
					Bantuan CSR untuk tenaga pendidikan di kapanewon Kalasan		paket	1										
					Bantuan CSR untuk tenaga pendidikan PAUD Kecamatan Moyudan		paket	1										
					Bantuan CSR untuk tenaga pendidik PAUD di Kapanewon Prambanan		paket	1										
		4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat		Bantuan pembangunan perpustakaan dan Lab sekolah SMP DA aru		paket	1										
					Bantuan pembangunan gedung serbaguna/olahraga SD Negeri Kaliduren Kapanewon Moyudan		paket	1										
		5.1.1*	Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi		Bantuan CSR dalam rangka kegiatan Forum Anak Sleman (FORANS)		paket	1										
		3.b.3*	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan		Bantuan Mobil Ambulance untuk masyarakat Kelurahan Candibangun, Kapanewon Pakem		paket	1										
		1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok		Bantuan panti asuhan		paket	1										
					Bantuan Berbagi sembako		paket	1										
		10.1.1.(c)	Jumlah desa mandiri		Bantuan pengadaan tanah untuk pengembangan pembangunan masjid Al-Huda		paket	1										

PT. FRASTA SURVEY INDONESIA

Eksternal																		
A.6.c.3.c	Pemanfaatan peluang dan prospek usaha dalam bentuk kemitraan dengan pemerintah, LSM, dan/atau	15.1.1*	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan		Penanaman pohon		paket	1										

PC. GKBI

Eksternal																		
A.6.c.3.c	Pemanfaatan peluang dan prospek usaha dalam bentuk kemitraan dengan pemerintah, LSM, dan/atau	3.8.1*	Cakupan pelayanan kesehatan esensial		Pemeriksaan warga lingkungan		event											
		1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok		Bantuan rutin untuk anak yatim		Orang	41										
					Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap		Lampu penerangan jalan		paket	1								
		15.1.1*	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan		Penanaman pohon buah kelengkeng		buah	100										

PT. INDMIRA

Eksternal																		
A.6.c.3.c	Pemanfaatan peluang dan prospek usaha dalam bentuk kemitraan dengan pemerintah, LSM, dan/atau	4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat		Beasiswa		siswa	11										
		10.1.1.(c)	Jumlah desa mandiri		Pembuatan lapangan Volly		paket	1										
		1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok		Takjil bulan puasa		paket	1										
					Hari raya idul adha		paket	1										
					Peringatan agustus kemerdekaan HUT RI		paket	1										
		8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis		H2B indmira Kelompok wanita tani		lokasi	1										
					H2B indmira Kelompok wanita tani		lokasi	1										

					H2B Indmira Kelompok wanita tani		lokasi	1									
					H2B Indmira Kelompok wanita tani		lokasi	1									
PT. PUTERA MATARAM MITRA SEJAHTERA																	
Eksternal																	
A.6.c.3.c	Pemanfaatan peluang dan prospek usaha dalam bentuk kemitraan dengan pemerintah, LSM, dan/atau	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok		Sumbangan tali asih		paket	1									
PT. PAKUWON PERMAI																	
Eksternal																	
A.6.c.3.c	Pemanfaatan peluang dan prospek usaha dalam bentuk kemitraan dengan pemerintah, LSM, dan/atau	3.b.3*	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan		Bantuan Peralatan Medis Ke Puskesmas		paket	1									

Matriks 4: Rencana Program/Kegiatan NonPemerintah (Pelaku Usaha) Kabupaten Bantul

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan		Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan		Alokasi Dana (dalam Rupiah)	Lembaga Pelaksana		
Kode disesuaikan dengan Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-Ite-TJSL)	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs			Nomor urut (sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/ Program
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(16)	
PT Madu Baru							
			Tujuan 1		Bantuan Modal Kerja	Rp780,000,000	PT Madu Baru
					Bantuan Bazar Ramadhan Pasar Niten	Rp500,000	PT Madu Baru
					Dana Sosial Keluarga Karyawan	Rp10,000,000	PT Ide Studio Indonesia (Karpenter)
					Program Tahunan Boga Sehat	Rp11,250,000	PT Ide Studio Indonesia (Karpenter)
Pamela Supermarket							
					Bantuan untuk warga kurang mampu	Rp7,200,000	Pamela Supermarket
					Bantuan Biaya Pendidikan	Rp4,920,000	Pamela Supermarket
					Bantuan paket sembako	Rp7,500,000	Pamela Supermarket
					Bantuan beras untuk warga di wilayah Baturetno, Sitimulyo, dan Banguntapan	Rp15,000,000	PT Suradi Sejahtera Raya
					Bantuan untuk masyarakat sekitar perusahaan	Rp35,500,000	PT Suradi Sejahtera Raya
					Bantuan Sembako	Rp143,074,200	RS PKU Muhammadiyah Bantul
					Sumbangan untuk Panti Asuhan per bulan Maret 2021	Rp3,000,000	PT. Sinar Kencana Makmurjaya
					Sumbangan Untuk Panti Asuhan Periode April 2021	Rp3.245.200	PT. Sinar Kencana Makmurjaya
					Sumbangan dalam rangka Bakti Sosial Sembako	Rp750,000	PT. Sinar Kencana Makmurjaya
					Sumbangan untuk Panti Asuhan Periode Mei 2021	Rp3,625,000	PT. Sinar Kencana Makmurjaya
					Sumbangan Panti Asuhan Periode Juni 2021	Rp3,007,500	PT. Sinar Kencana Makmurjaya
					Sumbangan Panti Asuhan Periode Juli 2021	Rp2,918,000	PT. Sinar Kencana Makmurjaya
					Sumbangan Panti Asuhan Periode Agustus	Rp2,000,200	PT. Sinar Kencana Makmurjaya
					Sumbangan Panti Asuhan Periode September 2021	Rp1,617,000	PT. Sinar Kencana Makmurjaya
					Sumbangan Panti Asuhan Periode Oktober	Rp1,973,100	PT. Sinar Kencana Makmurjaya
					Sumbangan Panti Asuhan Periode November	Rp1,486,500	PT. Sinar Kencana Makmurjaya
					Sumbangan Panti Asuhan periode Desember	Rp1,640,000	PT. Sinar Kencana Makmurjaya
					Sumbangan Bakti Sosial Khitanan Massal-Padokan Kidul Kasihan	Rp700,000	PT. Sinar Kencana Makmurjaya
					Sumbangan untuk Panti Asuhan Al Falah Rat	Rp1,000,000	PT. Yogyakarta Tembakau Indonesia

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

					Sumbangan untuk masyarakat peduli penyandang disabilitas (pembuatan kaki palsu)	Rp10,000,000	PT. Yogyakarta Tembakau Indonesia
					Iuran Pondok Lansia Dusun Randubelang	Rp3,000,000	PT. Yogyakarta Tembakau Indonesia
					Santunan untuk anak Yatim Piatu	Rp29,500,000	PT. Ameya Livingstyle Indonesia
					Zakat		PT. Ameya Livingstyle Indonesia
					Bantuan APD dan Sembako untuk penangan	Rp16,290,400	PT. Ameya Livingstyle Indonesia
					Bantuan untuk pembangunan fasilitas Pendid	Rp1.500.000	PT. Ameya Livingstyle Indonesia
					Sumbangan uang dan sembako disalurkan melalui LazisMu, Rumah Zakat, Yayasan Indonesia Cerdas dan Panti Asuhan	Rp26,731,900	PT. Busanaremaja Agracipta
					Sumbangan beras saat Hari Raya Idul Fitri disalurkan ke masjid-masjid di sekitar pabrik	Rp4,000,000	PT. Busanaremaja Agracipta
					Sumbangan berupa Bingkisan Parcel Lebaran untuk tetangga sekitar pabrik	Rp375,000	PT. Busanaremaja Agracipta
					Sumbangan saat Idul Adha berupa 10 ekor kambing dan beras untuk 8 Masjid, 1 Pondok Pesantren dan 1 Panti Asuhan	Rp21,401,000	PT. Busanaremaja Agracipta
					Santunan Anak Yatim di Panti Asuhan Bina S	Rp2,500,000	PT. BANK PANIN DUBAI SYARIAH
					Bantuan atap tenda pedagang kaki lima depan Pasar Bantul	Rp38,000,000	PT. BPR Bank Bantul
					Santunan Keluarga Miskin	Rp229,761,800	BMT Artha Amanah Sanden
					Santunan Anak Yatim	Rp51,630,000	BMT Artha Amanah Sanden
					Tanggap Bencana	Rp46,817,300	BMT Artha Amanah Sanden
					Santunan Difabel	Rp9,750,000	BMT Artha Amanah Sanden
					Bakti Sosial Hewan Qurban	Rp66,252,000	BMT Artha Amanah Sanden
					Renovasi Rumah Keluarga Pra Sejahtera	Rp4,946,500	BMT Artha Amanah Sanden
					Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin	Rp66.985.500	BMT Artha Amanah Sanden
					Pentasyarufan Langsung Perorangan Untuk Kaum Miskin Dhuafa (Uang Tunai)	Rp5,780,000	KSPPS TAMZIS BINA UTAMA
					Bahagia Bersama 1000 Yatim Dan Dhuafa (Paket Sembako Dan Tunai)	Rp8,472,000	KSPPS TAMZIS BINA UTAMA
					Pentasyarufan Langsung Perorangan Untuk Kaum Miskin Dhuafa (Sembako)	Rp5,400,000	KSPPS TAMZIS BINA UTAMA
					Program Peduli Bencana Banjir From Bantul	Rp2,516,136	KSPPS TAMZIS BINA UTAMA
					Program Bedah Rumah Bapak Ngadiman	Rp12,944,500	KSPPS TAMZIS BINA UTAMA
					Santunan Untuk Anak Yatim, Piatu Dan Dhuafa Yang Dibina Oleh Yayasan Yakiba Bantul	Rp200,000	KSPPS TAMZIS BINA UTAMA
					Santunan Kematian	Rp11,100,000	Koperasi Kredit Adil Dlingo
					Sembako Untuk Bakti Sosial	Rp10,037,600	Koperasi Kredit Adil Dlingo
					Bantuan Untuk Penyintas Covid Yang Isoman Di Wilayah Kapanewon Dlingo	Rp6,389,000	Koperasi Kredit Adil Dlingo

					Santunan Meninggal	Rp600,000	Kopwan BMT An-Nisa
					Santunan Sakit	Rp400,000	Kopwan BMT An-Nisa
					Kegiatan Sosial	Rp1,320,000	Kopwan BMT An-Nisa
					Santunan anak Yatim	Rp1,000,000	KSPPS KUBE Sejahtera 23
					Dana Sosial untuk Pengemis	Rp50,000	KSPPS BMT Sabilul Muhtadin
					Dana Sosial untuk Orang Meninggal & Orang Sakit	Rp1,844,000	KSPPS BMT Sabilul Muhtadin
					Santunan Anak Yatim, Dhuafa, dan Tunjangan Ustad	Rp8,600,000	KSPPS BMT Sabilul Muhtadin
					Santunan fakir miskin	Rp15,000,000	KSPPS BMT Sabilul Muhtadin
					Santunan Pendidikan 20 anak	Rp5,000,000	Koperasi Amrih Makmur
					Sembako Utk Warga Jompo & Lansia	Rp4,500,000	KSPPS BMT RIZQI BAROKAH
					Santunan untuk anak yatim/piatu	Rp7,000,000	BMT INSAN SADAR USAHA
					Bantuan Seragam untuk anak2 yatim/piatu	Rp5,250,000	BMT INSAN SADAR USAHA
					Paket Sembako untuk (Dhuafa, Anggota,Karyawan)	Rp10,750,000	BMT INSAN SADAR USAHA
					Sumbangan untuk Panti Asuhan Dharul Chadhonah	Rp1,000,000	BMT INSAN SADAR USAHA
					Sedekah Nasi Bungkus tiap Jumat di : Masjid, Panti Asuhan , Masyarakat (tukang becak, dhuafa, pemulung)	Rp57,600,000	BMT INSAN SADAR USAHA
					Bantuan untuk keperluan sekolah anak yatim/piatu.	Rp3,500,000	BMT INSAN SADAR USAHA
					Pembagian paket sembako untuk Anggota dan masyarakat sekitar di bulan Ramadhan	Rp7,113,400	Koptan BMT Barokah
					Sumbangan Kegiatan Keagamaan	Rp600,000	KSPPS BMT Mitrama
					Sumbangan untuk anggota yang positif Covid-19	Rp9,042,200	KSPPS BMT Mitrama
					Pentasyarufan paket sembako untuk anak yatim dan dhu'afa edisi lebaran	Rp13,361,900	KSPPS BMT Mitrama
					Pentasyarufan paket sembako untuk anak yatim dan dhu'afa edisi Milad ke-19	Rp9,042,200	KSPPS BMT Mitrama
					Sumbangan di Pondok Pesantren untuk anak yatim	Rp2,600,000	KSPPS BMT Mitrama
					Peduli Sosial pada anggota	Rp895,000	KSPPS BMT Mitrama
					Sumbangan pembangunan Masjid	Rp2,500,000	KSPPS BMT Mitrama
					Bantuan dana bagi masyarakat kurang mam	Rp3,000,000	KSU Amanah Insani Makmur
					Paket Sembako untuk (Dhuafa, Anggota, Karyawan dan Masyarakat) terdampak bencana Covid-19	Rp10,221,850	KSPPS BMT NITI TENTREM NUGRAHA (NITEN)
					Bantuan untuk gharimin dan Fakir Miskin	Rp20,162,100	KSPPS BMT NITI TENTREM NUGRAHA (NITEN)
					Sedekah Nasi Bungkus Jum'at berkah di Masjid Nyemengan	Rp700,000	KSPPS BMT NITI TENTREM NUGRAHA (NITEN)

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

				Bantuan sumbangan proposal masuk (Yayasan, dan Komunitas Paguyuban becak)	Rp16,780,100	KSPPS BMT NITI TENTREM NUGRAHA (NITEN)
				Bakti Sosial di wilayah Bantul	Rp5,000,000	KSP Graha Mandiri
				Bakti Sosial di Panti Asuhan Banguntapan	Rp1,000,000	KSP Graha Mandiri
				Bakti Sosial di Panti Asuhan Piyungan	Rp1,000,000	KSP Graha Mandiri
				Ransum warga yang terdampak Covid 19	Rp49,558,900	BMT EL BUMMI 381
				Peduli Guru Honorer	Rp45,622,100	BMT EL BUMMI 382
				Beasiswa Pendidikan	Rp34,092,500	BMT EL BUMMI 383
				Tali Asih Bapak Sukiyo	Rp1.800.000	BMT ASSALAM
				Tali Asih Sdr Eko	Rp1.800.000	BMT ASSALAM
				Pembagian Sembako	Rp19.427.700	BMT ASSALAM
				Donator TPA Assalam	Rp300,000	BMT ASSALAM
				Pembagian Beasiswa	Rp4.750.000	BMT ASSALAM
				Santunan berupa uang,bingkisan dan peralatan yang dibutuhkan untuk warga yang terkena covid.	Rp20,000,000	BMT MOJO BANGUN SENTOSA
				Menjadi donatur kegiatan sosial dalam bentuk uang dan barang yang di perlukan	Rp5,000,000	BMT MOJO BANGUN SENTOSA
				Pemberdayaan untuk masyarakat yang mempunyai usaha dan terdampak Pademi Covid 19	Rp30,000,000	BMT MOJO BANGUN SENTOSA
				Kegiatan Sosial PCNU Bantul	Rp4,362,015	KSPS An - Nahdiah
				Santunan kematian/ sakit bagi anggota koperasi	Rp3,215,000	BMT AD DA'WAH
				Bantuan untuk bencana semeru	Rp2,500,000	BMT AD DA'WAH
				Sumbangan tenda untuk masjid Ad Da'wah	Rp15,570,000	BMT AD DA'WAH
				Kontribusi untuk operasional masjid Ad Da'wah	Rp6,934,000	BMT AD DA'WAH
				Penyaluran zakat maal ke LazizMu Tirenggo	Rp2,800,000	BMT AD DA'WAH
				Aksi sosial santunan kepada dhuafa	Rp2,000,000	BMT AD DA'WAH
				Sumbangan untuk pembangunan balai warga	Rp1,000,000	BMT AD DA'WAH
				Sumbangan untuk anak yatim	Rp2,000,000	BMT AD DA'WAH
				Bantuan untuk warga isolasi Cpvid 19	Rp2,995,000	BMT AD DA'WAH
				Santunan Pendidikan untuk anak yatim piatu	Rp15,000,000	BMT AD DA'WAH
				Sumbangan untuk operasional TPA Ad Da'wah	Rp12,993,100	BMT AD DA'WAH
				Bantuan Pendidikan (Beasiswa) kepada 30 Siswa Kurang Mampu Tingkat SMA dan SMK	Rp45,000,000	PT. BANK BPD DIY CABANG BANTUL
				Bantuan Pendidikan (Beasiswa) Kepada 40 Orang Mahasiswa Berprestasi di Universitas di kabupaten Bantul	Rp100,000,000	PT. BANK BPD DIY CABANG BANTUL
				Bantuan Pengembangan Lahan Karakter Pengetahuan Keterampilan Hidup (KPK) SMP Negeri 2 Sedayu	Rp110,000,000	PT. BANK BPD DIY CABANG BANTUL
				Bantuan Pembangunan Asrama Putri Pondok Pesantren Al Mahalli Bantul	Rp150,000,000	PT. BANK BPD DIY CABANG BANTUL
				Bantuan Paket Sembako di 2 (dua) buah Par	30.000.000	BANK BRI KANCA BANTUL
				Bantuan 1 (satu) Unit Kendaraan Penunjang Usaha Gapoktan Desa Pongosari Srandakan Bantul	149,000,000	BANK BRI KANCA BANTUL

					Renovasi RTLH	Rp20,000,000	BANK MANDIRI TASPEN YOGYAKARTA
					Bantuan Sembako	Rp6,900,000	Kamar Dagang dan Industri Kab. Bantul
			Tujuan 2		Bahagia Bersama 1000 Yatim Dan Dhuafa (Paket Sembako Dan Tunai)	Rp8,472,000	KSPPS TAMZIS BINA UTAMA
					Pentasyarufan Langsung Perorangan Untuk Kaum Miskin Dhuafa (Sembako)	Rp5,400,000	KSPPS TAMZIS BINA UTAMA
					Pemberdayaan Kambing Kelompok Mandiri Bersama	Rp18,623,500	KSPPS TAMZIS BINA UTAMA
					Sembako Untuk Bakti Sosial	Rp10,037,600	Koperasi Kredit Adil Dlingo
					Pemberian Sodaqoh Takjil Ke Masjid	Rp4,500,000	Koperasi Kredit Adil Dlingo
					Konsumsi Untuk Pengerasan Jalan di Dusun Nogosari III Rt 14	Rp216,000	Koperasi Kredit Adil Dlingo
					Sembako utk Warga Jompo & Lansia	Rp4,500,000	KSPPS BMT RIZQI BAROKAH
					Paket Sembako untuk (Dhuafa, Anggota,Karyawan)	Rp10,750,000	BMT INSAN SADAR USAHA
					Sedekah Nasi Bungkus tiap Jumat di : Masjid, Panti Asuhan , Masyarakat (tukang becak, dhuafa, pemulung)	Rp57,600,000	BMT INSAN SADAR USAHA
					Pembagian paket sembako untuk Anggota dan masyarakat sekitar di bulan Ramadhan	Rp7,113,400	Koptan BMT Barokah
					Pentasyarufan paket sembako untuk anak yatim dan dhu'afa edisi lebaran	Rp13,361,900	KSPPS BMT Mitrama
					Pentasyarufan paket sembako untuk anak yatim dan dhu'afa edisi Milad ke-19	Rp9,042,200	KSPPS BMT Mitrama
					Sedekah Nasi Bungkus Jum'at berkah di Masjid Nyemengan	Rp700,000	KSPPS BMT NITI TENTREM NUGRAHA (NITEN)
					Ransum warga yang terdampak Covid 19	Rp49,558,900	BMT EL BUMMI 381
					Pemberdayaan untuk masyarakat yang mempunyai usaha dan terdampak Pandemi Covid 19	Rp30,000,000	BMT MOJO BANGUN SENTOSA
					Bantuan Paket Sembako di 2 (dua) buah Panti Wreda	30.000.000	BANK BRI KANCA BANTUL
					Bantuan 1 (satu) Unit Kendaraan Penunjang Usaha Gapoktan Desa Poncosari Srandakan Bantul	149.000.000	BANK BRI KANCA BANTUL
					2 unit Embung KT Lestari Mulyo (Pengembangan Klaster Bawang Merah)	Rp50.000.000	Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY
					Pembangunan Gudang Penyimpanan Benih Bawang Merah (Pengembangan Klaster Bawang Merah)	Rp200,000,000	Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY
					Penyempurnaan Gudang Penyimpanan Benih Bawang Merah (Pengembangan Klaster Bawang Merah)	Rp26,320,000	Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY
					Sumbangan Rice Milling Unit (Program HEBITREN DIY)	Rp507,000,000	Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY
					Mobil Box Operasional Distribusi (Program Halal Value Chain)	Rp244,500,000	Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY
					Green House Melon Etanon (Program Halal Value Chain)	Rp510,400,000	Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY
					Kolam Budidaya Ikan Lele (Program Kemandirian Ekonomi Pesantren)	Rp42,000,000	Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY
					Bantuan Penanaman Pohon Mangrove	Rp252,300,000	PT PLN (PERSERO) UP 3 YOGYAKARTA
					Desa Agribisnis berbasis Masyarakat Mandiri	Rp301,500,000	PT. Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Rewulu

				Budidaya Ayam Jowo Super	Rp255,000,000	PT. Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Rewulu
				Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan ternak dan pemasaran hasil produk susu kambing	Rp211,500,000	PT. Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Rewulu
				Bantuan Pembangunan Area Kuliner	Rp15,000,000	PT MADUBARU
				Program Tahunan Boga Sehat	Rp11,250,000	PT Ide Studio Indonesia (Karpenter)
				Bantuan untuk warga kurang mampu	Rp7,200,000	PAMELA SUPERMARKET
				Bantuan paket sembako	Rp7,500,000	PAMELA SUPERMARKET
				Bantuan Polybag dan media tanam	Rp750,000	PAMELA SUPERMARKET
				Bantuan Sembako	Rp143,074,200	RS PKU Muhammadiyah Bantul
				Sumbangan uang dan sembako disalurkan melalui LazisMu, Rumah Zakat, Yayasan Indonesia Cerdas dan Panti Asuhan	Rp26,731,900	PT. Busanaremajia Agracipta
				Sumbangan beras saat Hari Raya Idul Fitri disalurkan ke masjid-masjid di sekitar pabrik	Rp4,000,000	PT. Busanaremajia Agracipta
			Tujuan 3	Layanan Mobil Ambulan Gratis Masyarakat	Rp48,423,200	BMT Artha Amanah Sanden
				Pengadaan Pohon Perindang Diserahkan Ke Dlh Bantul Dan Pembelian Konsumsi Untuk Petugas Dlh	Rp735,000	KSPPS TAMZIS BINA UTAMA
				Santunan Sakit	Rp400,000	Kopwan BMT An-Nisa
				Paket Sembako untuk (Dhuafa, Anggota, Karyawan dan Masyarakat) terdampak bencana Covid-19	Rp10,221,850	KSPPS BMT NITI TENTREM NUGRAHA (NITEN)
				Armada Layanan Antar Obat (Kinanthi) dan Catering Gizi (Selasih) RSUD Panembahan Senopati sebanyak 5 Unit beserta kelengkapannya	Rp120,000,000	PT. BANK BPD DIY CABANG BANTUL
				Pengembangan Shelter Perawatan Pasien Covid-19 Kabupaten Bantul	Rp80,000,000	PT. BANK BPD DIY CABANG BANTUL
				Bantuan Sarana dan Prasarana Penunjang Kesehatan Covid 19 RSUD Panembahan Senopati	218.181.818	PT. BANK BPD DIY CABANG BANTUL
				Alat Kesehatan	Rp200,000,000	BANK MANDIRI KCP BANTUL
				Pengelolaan sampah mandiri berbasis masyarakat	Rp74,000,000	PT. Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Rewulu
				Pengembangan Industri Rumah Tangga Jamu Tradisional Berbasis Masyarakat	Rp56,000,000	PT. Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Rewulu
				Sumbangan HKS N Thn. 2021	Rp1,000,000	PT Bangunan Jaya Mandiri
				Sumbangan 2 water heater untuk Panti Asuhan Hanna	Rp1,200,000	PT Bangunan Jaya Mandiri
				Kegiatan Deteksi dini kelainan postur siswa SMP Negeri 2 Sanden, Kerjasama RS Santa Elisabeth, Puskesmas Sanden dan Ikatan Fisioterapi Indonesia	Rp935,000,000	RS Santa Elisabeth
			Tujuan 5	Bantuan Himpunan Wanita Disabilitas	Rp1.917.400	PT MADUBARU
				Iuran Posyandu anak Dusun Randubelang	Rp3.000.000	PT. Yogyakarta Tembakau Indonesia
				Iuran Pondok Lansia Dusun Randubelang	Rp3.000.000	PT. Yogyakarta Tembakau Indonesia
				Sumbangan untuk Taman Asuh Adikku	Rp41.170.500	PT. Yogyakarta Tembakau Indonesia
				Rumah Kebugaran Difabel	Rp75.000.000	PT. Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Rewulu

					Pengelolaan sampah mandiri berbasis masyarakat	Rp74.000.000	PT. Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Rewulu
					Pengembangan Industri Rumah Tangga Jamu Tradisional Berbasis Masyarakat	Rp56.000.000	PT. Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Rewulu
					Pelatihan Decoupage (Ketrampilan Menempel, Menghias, DII)	Rp2.000.000	DPC Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kab. Bantul
					Pelatihan pembuatan aksesoris	Rp1.500.000	DPC Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kab. Bantul
					Pelatihan Pembuatan Aneka Tas dan Dompot dari kain perca	Rp2.500.000	DPC Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kab. Bantul
					Pelatihan olahan lele krispi dan tiwul	Rp3.210.000	DPC Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kab. Bantul
					Pelatihan jahit tas dan dompet	Rp2.500.000	DPC Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kab. Bantul
					Pelatihan pembuatan aksesoris konektor jilbab via online	Rp1.500.000	DPC Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kab. Bantul
					Pelatihan pembuatan bunga kering, ecoprint dan pembuatan tas	Rp15.000.000	DPC Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kab. Bantul
					Pemberdayaan untuk masyarakat yang mempunyai usaha dan terdampak Pandemi Covid 19	Rp30.000.000	BMT MOJO BANGUN SENTOSA
			Tujuan 8		Green House Melon Etanon (Program Halal Value Chain)	Rp510.400.000	Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY
					Kolam Budidaya Ikan Lele (Program Kemandirian Ekonomi Pesantren)	Rp42.000.000	Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY
					Pengembangan Kawasan Wisata Puncak Sosok	Rp100.000.000	Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY
					Pengembangan Industri Rumah Tangga Jamu Tradisional Berbasis Masyarakat	Rp56.000.000	PT. Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Rewulu
					Desa Agribisnis berbasis Masyarakat Mandiri	Rp301.500.000	PT. Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Rewulu
					Budidaya Ayam Jowo Super	Rp255.000.000	PT. Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Rewulu
					Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan ternak dan pemasaran hasil produk susu kambing	Rp211.500.000	PT. Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Rewulu
					Bantuan Modal Kerja	Rp780.000.000	PT MADUBARU
					Bantuan Bibit Ikan Nila	Rp1.500.000	PT MADUBARU
					Bantuan Bazar Ramadhan Pasar Niten	Rp500.000	PT MADUBARU
					Bantuan ALSINTAN (Alat Mesin Pertanian)	Rp2.550.000	PT MADUBARU
					Bantuan Pembangunan Area Kuliner	Rp15.000.000	PT MADUBARU
					Pelatihan Industri untuk produksi mebel kombinasi resin	Rp35.000.000	CV. Jawa Classic Aesthetics Furniture & Craft
					Pelatihan produksi pembuatan kerajinan berbahan dasar akar jati	Rp20.000.000	CV. Jawa Classic Aesthetics Furniture & Craft
					Pelatihan produksi pembuatan dekorasi berbahan dasar ranting kayu jati	Rp35.000.000	CV. Jawa Classic Aesthetics Furniture & Craft
					Pelatihan produksi pembuatan dekorasi berbahan dasar kayu limbah laut	Rp20.000.000	CV. Jawa Classic Aesthetics Furniture & Craft
					Pelatihan Decoupage (Ketrampilan Menempel, Menghias, DII)	Rp2.000.000	DPC Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kab. Bantul
					Pelatihan pembuatan aksesoris	Rp1.500.000	DPC Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kab. Bantul
					Pelatihan Pembuatan Aneka Tas dan Dompot dari kain perca	Rp2.500.000	DPC Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kab. Bantul
					Pelatihan olahan lele krispi dan tiwul	Rp3.210.000	DPC Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kab. Bantul

					Pelatihan jahit tas dan dompet	Rp2.500.000	DPC Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kab. Bantul
					Pelatihan pembuatan aksesoris konektor jilbab via online	Rp1.500.000	DPC Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kab. Bantul
					Pelatihan pembuatan bunga kering, ecoprint dan pembuatan tas	Rp15.000.000	DPC Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kab. Bantul
					Pelatihan bimtek kearsipan	Rp300.000	BMT ASSALAM
			Tujuan 9		Bantuan Pembangunan Aplikasi Perdagangan Elektronik (E-Commerce) Berbasis Mobile Kerjasama dengan Dinas Kominfo Kabupaten Bantul	Rp380.000.000	PT. BANK BPD DIY CABANG BANTUL
			Tujuan 10		Renovasi Rumah Keluarga Pra Sejahtera	Rp4.946.500	BMT Artha Amanah Sanden
			Tujuan 14		Pengelolaan sampah mandiri berbasis masyarakat	Rp74.000.000	PT. Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Rewulu
			Tujuan 15		Bantuan Penanaman Pohon Mangrove	Rp252.300.000	PT PLN (PERSERO) UP 3 YOGYAKARTA
					Pengadaan Pohon Perindang Diserahkan Ke Dlh Bantul Dan Pembelian Konsumsi Untuk Petugas Dlh	Rp735.000	KSPPS TAMZIS BINA UTAMA
			Tujuan 16		Rumah Kebugaran Difabel	Rp75.000.000	PT. Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Rewulu

Matriks 4: Rencana Program/Kegiatan NonPemerintah (Pelaku Usaha) Kabupaten Kulon Progo

Program	Tema	Anggaran	Lokasi	Instansi Pelaksana
Program Non Pemerintah				
TPB 1	Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun			
	Bedah rumah tidak layak huni untuk 50 Kepala Keluarga	-	Kulon Progo	PT. Bank BPD DIY Cabang Wates
	Bedah rumah tidak layak huni untuk 10 Kepala Keluarga	-	Kulon Progo	PT. Bank BPD DIY Cabang Wates
	Rumah tidak layak huni 18 unit	-	Kulon Progo	PT. Bank BPD DIY Cabang Wates
TPB 3	Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia			
Kegiatan	Pencegahan penyebaran Covid 19 di Kabupaten Kulon Progo		Kulon Progo	PT. Bank BPD DIY Cabang Wates
TPB 7	Memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua			
	Program Pembangunan PLT Picohidro		Kulon Progo	PT PLN Pusharlis Bandung
TPB 8	Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua			
	Lingkungan dan Pembangunan Jalan Setapak di Bantaran Sungai		Kulon Progo	PT. PLN (Persero)
	Tenda untuk tempat parkir		Kulon Progo	PT. PLN (Persero)
	Bibit Anggrek, Pengadaan alat Safety dan Pembangunan Jembatan		Kulon Progo	PT. PLN (Persero)
	Program Branding Ekowisata Sungai Mudal dan PLN Peduli		Kulon Progo	PT. PLN (Persero)
	Program Pembangunan Musholla "Tombo Ati" dan Sarpras Bantuan		Kulon Progo	PT. PLN (Persero)
	Community Involvement Development PT. PLN (Persero) di Ekowisata		Kulon Progo	PT. PLN (Persero)
TPB 9	Membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi			
	Bedah rumah tidak layak huni untuk 50 Kepala Keluarga		Kulon Progo	PT. Bank BPD DIY Cabang Wates
	Bedah rumah tidak layak huni untuk 10 Kepala Keluarga		Kulon Progo	PT. Bank BPD DIY Cabang Wates
	Taman/ Tugu Selamat Datang Congot Temon		Kulon Progo	PT. Bank BPD DIY Cabang Wates
	Rumah tidak layak huni 18 unit		Kulon Progo	PT. Bank BPD DIY Cabang Wates
	Lingkungan dan Pembangunan Jalan Setapak di Bantaran Sungai		Kulon Progo	PT. PLN (Persero)
	Tenda untuk tempat parkir		Kulon Progo	PT. PLN (Persero)
	Bibit Anggrek, Pengadaan alat Safety dan Pembangunan Jembatan		Kulon Progo	PT. PLN (Persero)
	Program Pembangunan PLT Picohidro		Kulon Progo	PT PLN Pusharlis Bandung
	Program Branding Ekowisata Sungai Mudal dan PLN Peduli		Kulon Progo	PT. PLN (Persero)
	Program Pembangunan Musholla "Tombo Ati" dan Sarpras Bantuan		Kulon Progo	PT. PLN (Persero)
	Community Involvement Development PT. PLN (Persero) di Ekowisata		Kulon Progo	PT. PLN (Persero)
TPB 11	Membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan			
	Bedah rumah tidak layak huni untuk 50 Kepala Keluarga		Kulon Progo	PT. Bank BPD DIY Cabang Wates
	Bedah rumah tidak layak huni untuk 10 Kepala Keluarga		Kulon Progo	PT. Bank BPD DIY Cabang Wates
	Rumah tidak layak huni 18 unit		Kulon Progo	PT. Bank BPD DIY Cabang Wates
TPB 13	Mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya*			
	Penataan dan Pembangunan Taman Brosot	Rp197.224.000	Kulon Progo	PT. Bank BPD DIY Cabang Wates
	Pembangunan Taman, Jalan dan Trotoar Pasar Teteg Kulon MTL Tahap I	Rp398.764.000	Kulon Progo	PT. Bank BPD DIY Cabang Wates

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Pembangunan Taman, Jalan dan Trotoar Pasar Teteq Kulon MTL Tahap II	Rp209.887.900	Kulon Progo	PT. Bank BPD DIY Cabang Wates
--	---------------	-------------	-------------------------------

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGGU BUWONO X